https://jdih.pemalangkab.go.id

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama tahun anggaran 2024 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu penyampaian laporan keuangan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. laporan operasional;
   d. laporan perubahan ekuitas;
   e. neraca;
   f. laporan arus kas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp2.755.590.550.648,00
b.	belanja	Rp2.358.230.731.972,00
c.	transfer	Rp439.333.244.000,00
d.	defisit	Rp(41.973.425.324,00)
e.	pembiayaan	
	- penerimaan	Rp200.944.214.155,00
	- pengeluaran	Rp14.500.000.000,00
	- pembiayaan netto	Rp186.444.214.155,00
f.	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp144.470.788.831,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(51.776.703.352,00) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.807.367.254.000,00
2.	realisasi	Rp2.755.590.550.648,00
	selisih kurang	Rp(51.776.703.352,00)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(203.714.092.028,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja	
setelah perubahan	Rp2.561.944.824.000,00
2. realisasi	Rp2.358.230.731.972,00
selisih kurang	Rp(203.714.092.028,00)

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(128.400.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran transfer	
setelah perubahan	Rp439.333.244.000,00
2. realisasi	Rp439.461.644.000,00
selisih kurang	Rp(128.400.000,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp152.065.788.676,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran surplus/defisit	
setelah perubahan	Rp(194.039.214.000,00)
2. realisasi	Rp(41.973.425.324,00)
selisih lebih	Rp152.065.788.676,00

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(7.594.999.845,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp208.539.214.000,00
2. realisasi	Rp200.944.214.155,00
selisih kurang	Rp(7.594.999.845,00)

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp14.500.000.000,00
2. realisasi	Rp14.500.000.000,00
selisih	Rp0,00

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(7.594.999.845,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan	
netto setelah perubahan	Rp194.039.214.000,00
2. realisasi	Rp186.444.214.155,00
selisih kurang	Rp(7.594.999.845,00)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

h. selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah Rp144.470.788.831,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00
2.	realisasi	Rp144.470.788.831,00
	selisih lebih	Rp144.470.788.831,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp160.944.214.155,00
b.	penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp159.517.643.992,00
c.	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp144.470.788.831,00
d.	saldo anggaran lebih akhir	Rp144.470.788.831,00

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a.	pendapatan-laporan operasional	Rp2.550.758.125.442,59
b.	beban	Rp2.556.130.024.305,72
c.	kegiatan non operasional	Rp5.316.137.434,08
d.	pos luar biasa	Rp1.260.866.800,00
e.	defisit-laporan operasional	Rp(11.948.903.097,21)

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp3.846.862.214.714,55
b.	defisit-laporan operasional	Rp(11.948.903.097,21)
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp1.317.982.603,00
d.	ekuitas akhir	Rp3.836.231.294.220,34

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp3.888.702.058.486,30
b.	jumlah kewajiban	Rp52.470.764.265,96
c.	jumlah ekuitas	Rp3.836.231.294.220,34

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	jumlah kas awal per 1 Januari 2024	Rp159.537.743.992,00
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp137.796.916.292,00
c.	arus kas dari aktivitas investasi	Rp(152.843.771.453,00)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f.	saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp144.474.788.831,00

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

			Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional:
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Iktisar Laporan Keuangan Badan Usahan Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-110/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; (5) Neraca; (6) Laporan Arus Kas; (7) Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dilampiri Laporan Kinerja serta Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Laporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, dan digunakan terutama untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyajian informasi yang relevan akan membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Pemalang BERCAHAYA (Bersih, Cakap, Handal, Mulia) dan RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah (IDR)

URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2023
PENDAPATAN - LRA	**5.1.1**	**2.807.367.254.000,00**	**2.755.590.550.648,00**	**98,16**	**2.572.342.827.720,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	**5.1.1.1**	**417.213.761.000,00**	**402.958.330.520,00**	**96,58**	**363.617.077.022,00**
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	123.205.300.000,00	120.978.507.825,00	98,19	116.205.661.323,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	252.906.500.000,00	239.370.082.261,00	94,65	36.963.121.727,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	26.031.761.000,00	26.031.762.403,00	100,00	23.940.780.939,00
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	15.070.200.000,00	16.577.978.031,00	110,01	186.507.513.033,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	**5.1.1.2**	**2.390.153.493.000,00**	**2.352.632.220.128,00**	**98,43**	**2.208.725.750.698,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	1.881.195.824.000,00	1.869.980.690.410,00	99,40	1.746.347.989.883,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	30.859.145.000,00	31.100.745.000,00	100,78	30.912.318.834,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	2.286.964.000,00	2.324.683.000,00	101,65	3.488.565.979,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.3	1.265.304.393.000,00	1.265.304.393.000,00	100,00	1.178.380.360.243,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.1.4	582.745.322.000,00	571.250.869.410,00	98,03	533.566.744.827,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	271.871.079.000,00	271.871.079.000,00	100,00	267.910.752.760,00
Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.2.1	271.871.079.000,00	271.871.079.000,00	100,00	267.910.752.760,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	217.827.830.000,00	191.738.404.378,00	88,02	185.308.688.272,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	217.827.830.000,00	191.738.404.378,00	88,02	185.308.688.272,00
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.4	19.258.760.000,00	19.042.046.340,00	98,87	9.158.319.783,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	5.1.1.2.4.1	19.258.760.000,00	19.042.046.340,00	98,87	9.158.319.783,00
BELANJA	**5.1.2**	**2.561.944.824.000,00**	**2.358.230.731.972,00**	**92,05**	**2.108.583.684.072,00**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**2.367.480.276.291,00**	**2.175.975.811.564,00**	**91,91**	**1.890.948.953.345,00**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.452.801.288.790,00	1.302.143.148.625,00	89,63	1.113.196.374.159,00
Belanja Barang	5.1.2.1.2	751.061.378.291,00	714.049.430.646,00	95,07	667.795.423.023,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	153.666.629.210,00	150.235.584.293,00	97,77	101.019.252.163,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	9.950.980.000,00	9.547.648.000,00	95,95	8.937.904.000,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**192.492.047.709,00**	**180.988.417.949,00**	**94,02**	**217.207.125.026,00**
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	95,63	2.046.604.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	73.645.018.098,00	68.867.746.899,00	93,51	90.599.632.595,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	54.414.402.986,00	47.292.557.157,00	86,91	47.732.039.343,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	42.886.187.880,00	41.979.833.338,00	97,89	54.538.776.430,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	16.332.688.745,00	17.866.133.555,00	109,39	22.290.072.158,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.913.750.000,00	2.782.571.000,00	95,50	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**1.972.500.000,00**	**1.266.502.459,00**	**64,21**	**427.605.701,00**
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	64,21	427.605.701,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah (IDR)

URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2023
TRANSFER	**5.1.3**	**439.461.644.000,00**	**439.333.244.000,00**	**99,97**	**430.716.395.360,00**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**5.1.3.1**	**14.681.180.000,00**	**14.681.180.000,00**	**100,00**	**15.047.084.900,00**
Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	11.281.883.069,00	11.281.883.069,00	100,00	10.413.308.000,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	3.399.296.931,00	3.399.296.931,00	100,00	4.633.776.900,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**5.1.3.2**	**424.780.464.000,00**	**424.652.064.000,00**	**99,97**	**415.669.310.460,00**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.1	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	99,97	415.669.310.460,00
SURPLUS / (DEFISIT)		**(194.039.214.000,00)**	**(41.973.425.324,00)**	**21,63**	**33.042.748.288,00**
PEMBIAYAAN	**5.1.4**				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.1**	**208.539.214.000,00**	**200.944.214.155,00**	**96,36**	**155.751.465.867,00**
Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	160.944.214.000,00	159.517.643.992,00	99,11	155.751.465.867,00
Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.2	40.000.000.000,00	41.426.570.163,00	103,57	0,00
Penerimaan Kembali Piutang	5.1.4.1.3	7.595.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.2**	**14.500.000.000,00**	**14.500.000.000,00**	**100,00**	**27.850.000.000,00**
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	0,00	0,00		20.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00	7.850.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		**194.039.214.000,00**	**186.444.214.155,00**	**96,09**	**127.901.465.867,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**0,00**	**144.470.788.831,00**		**160.944.214.155,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah (IDR)

URAIAN	REF	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	**160.944.214.155,00**	**155.751.465.867,00**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		159.517.643.992,00	155.751.465.867,00
Sub Total		**1.426.570.163,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		144.470.788.831,00	160.944.214.155,00
Sub Total		**145.897.358.994,00**	**160.944.214.155,00**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		(1.426.570.163,00)	0,00
Sub Total		**(1.426.570.163,00)**	**0,00**
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**144.470.788.831,00**	**160.944.214.155,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah (IDR)

URAIAN	REF	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	5.3.1	**2.550.758.125.442,59**	**2.382.189.686.689,21**	**168.568.438.753,38**	**7,08**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.3.1.1	**424.396.986.531,73**	**375.181.695.379,65**	**49.215.291.152,08**	**13,12**
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.3.1.1.1	127.849.620.715,34	121.532.148.854,16	6.317.471.861,18	5,20
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.3.1.1.2	246.798.088.932,54	46.478.512.384,00	200.319.576.548,54	430,99
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.3.1.1.3	30.301.211.215,93	27.733.484.820,43	2.567.726.395,50	9,26
Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.3.1.1.4	19.448.065.667,92	179.437.549.321,06	(159.989.483.653,14)	(89,16)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.3.1.2	**2.089.139.947.294,00**	**1.951.502.217.892,00**	**137.637.729.402,00**	**7,05**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.3.1.2.1	1.866.365.810.410,00	1.745.799.264.070,00	120.566.546.340,00	6,91
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	5.3.1.2.2	5.719.565.000,00	6.635.557.000,00	(915.992.000,00)	(13,80)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.3.1.2.3	198.012.525.544,00	189.909.077.039,00	8.103.448.505,00	4,27
Bantuan Keuangan - LO	5.3.1.2.4	19.042.046.340,00	9.158.319.783,00	9.883.726.557,00	107,92
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.3.1.3	**37.221.191.616,86**	**55.505.773.417,56**	**(18.284.581.800,70)**	**(32,94)**
Pendapatan Hibah - LO	5.3.1.3.1	37.221.191.616,86	55.505.773.417,56	(18.284.581.800,70)	(32,94)
BEBAN	5.3.2	**2.556.130.024.305,72**	**2.306.164.982.502,98**	**249.965.041.802,74**	**10,84**
Beban Pegawai - LO	5.3.2.1	1.301.744.562.895,00	1.112.456.021.389,00	189.288.541.506,00	17,02
Beban Persediaan	5.3.2.2.1	129.095.193.483,57	154.965.310.853,23	(25.870.117.369,66)	(16,69)
Beban Jasa	5.3.2.2.2	478.871.320.897,72	470.976.185.817,62	7.895.135.080,10	1,68
Beban Pemeliharaan	5.3.2.2.3	81.939.257.537,00	63.135.887.771,00	18.803.369.766,00	29,78
Beban Perjalanan Dinas	5.3.2.2.4	51.594.058.552,00	47.701.138.686,00	3.892.919.866,00	8,16
Beban Hibah	5.3.2.3	147.854.388.693,00	101.070.972.163,00	46.783.416.530,00	46,29
Beban Bantuan Sosial	5.3.2.4	9.543.648.000,00	8.937.904.000,00	605.744.000,00	6,78
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.2.5	177.582.378.813,00	172.931.508.926,00	4.650.869.887,00	2,69
Beban Penyisihan Piutang	5.3.2.6	4.723.485.434,43	4.548.853.297,13	174.632.137,30	3,84
Beban Transfer	5.3.2.7	173.181.730.000,00	169.441.199.600,00	3.740.530.400,00	2,21
Beban Lain-lain	5.3.2.8	0,00	0,00	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		**(5.371.898.863,13)**	**76.024.704.186,23**	**(81.396.603.049,36)**	**(107,07)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.3.3				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.3.3.1	5.316.137.434,08	6.226.951.955,71	(910.814.521,63)	(14,63)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASI		**(5.316.137.434,08)**	**(6.226.951.955,71)**	**910.814.521,63**	**(14,63)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(10.688.036.297,21)**	**69.797.752.230,52**	**(80.485.788.527,73)**	**(115,31)**
POS LUAR BIASA	5.3.4				
Beban Luar Biasa	5.3.4.1	1.260.866.800,00	382.685.808,00	878.180.992,00	229,48
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		**(1.260.866.800,00)**	**(382.685.808,00)**	**(878.180.992,00)**	**229,48**
SURPLUS / DEFISIT - LO		**(11.948.903.097,21)**	**69.415.066.422,52**	**(81.363.969.519,73)**	**(117,21)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah (IDR)

URAIAN	REF	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.4.1	**3.846.862.214.714,55**	**3.789.884.540.124,53**
SURPLUS/DEFISIT - LO	5.4.2	**(11.948.903.097,21)**	**69.415.066.422,52**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.4.3	**1.317.982.603,00**	**(12.437.391.832,50)**
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		1.317.982.603,00	(12.437.391.832,50)
Koreksi Salah Pencatatan		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR		**3.836.231.294.220,34**	**3.846.862.214.714,55**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah (IDR)

URAIAN	REF	2024	2023
ASET	**5.5.1**		
ASET LANCAR	**5.5.1.1**		
Kas Di Kas Daerah	5.5.1.1.1	123.696.258.966,00	138.733.059.892,00
Kas Di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.2	0,00	9.698.500,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.3	0,00	4.011.000,00
Kas di BLUD	5.5.1.1.4	18.152.510.547,00	15.695.534.203,00
Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.5.1.1.5	0,00	3.085.216.504,00
Kas Dana BOS	5.5.1.1.6	35.771.608,00	52.637.684,00
Kas Lainnya	5.5.1.1.7	4.000.000,00	1.957.586.209,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.1.1.8	2.586.247.710,00	0,00
Piutang Pendapatan	5.5.1.1.9	119.399.893.476,10	102.364.177.096,60
Penyisihan Piutang	5.5.1.1.10	(50.925.763.558,90)	(49.175.174.698,47)
Beban Dibayar Dimuka	5.5.1.1.11	108.247.010,62	59.524.837,06
Persediaan	5.5.1.1.12	43.618.877.133,84	39.186.185.483,60
JUMLAH ASET LANCAR		**256.676.042.892,66**	**251.972.456.710,79**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.5.1.2**		
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.5.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.2.2.1	256.995.743.876,20	243.542.432.497,35
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		256.995.743.876,20	243.542.432.497,35
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**256.995.743.876,20**	**243.542.432.497,35**
ASET TETAP	**5.5.1.3**		
Tanah	5.5.1.3.1	1.062.837.140.300,00	1.056.322.037.800,00
Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2	893.532.685.419,70	834.387.411.113,00
Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3	1.695.019.049.552,00	1.646.798.445.866,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.3.4	1.314.651.315.232,00	1.260.572.489.829,00
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5	205.864.427.068,00	188.409.775.887,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.3.6	73.208.758.604,00	73.016.099.991,00
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.3.7	(2.007.515.676.920,70)	(1.838.590.454.527,00)
JUMLAH ASET TETAP		**3.237.597.699.255,00**	**3.220.915.805.959,00**
DANA CADANGAN	**5.5.1.4**		
Dana Cadangan	5.5.1.4.1	0,00	41.426.570.163,00
JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**41.426.570.163,00**
PROPERTI INVESTASI	**5.5.1.5**		
Properti Investasi	5.5.1.5.1	39.398.825.954,00	39.398.825.954,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.5.1.5.2	(3.210.670.661,00)	(2.918.329.688,00)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**36.188.155.293,00**	**36.480.496.266,00**
ASET LAINNYA	**5.5.1.6**		
Tagihan Jangka Panjang	5.5.1.6.1	456.006.128,00	546.830.500,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.5.1.6.2	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.6.3	3.127.897.475,00	633.260.925,00
Aset Lain-lain	5.5.1.6.4	89.106.312.566,44	88.721.135.189,67
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.5.1.6.5	24.701.000,00	2.710.515.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		**101.244.417.169,44**	**101.141.241.614,67**
JUMLAH ASET		**3.888.702.058.486,30**	**3.895.479.003.210,81**

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah (IDR)

URAIAN	REF	2024	2023
KEWAJIBAN	**5.5.2**		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.5.2.1**		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.2.1.2	3.255.876.651,96	5.850.892.435,26
Utang Belanja	5.5.2.1.3	49.214.887.614,00	42.740.160.402,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.4	0,00	25.735.659,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**52.470.764.265,96**	**48.616.788.496,26**
JUMLAH KEWAJIBAN		**52.470.764.265,96**	**48.616.788.496,26**
EKUITAS	**5.5.3**		
EKUITAS	**5.5.3.1**		
Ekuitas	5.5.3.1.1	3.836.231.294.220,34	3.846.862.214.714,55
JUMLAH EKUITAS		**3.836.231.294.220,34**	**3.846.862.214.714,55**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**3.888.702.058.486,30**	**3.895.479.003.210,81**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
1	**Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**	5.6.1		
2	***Arus Kas Masuk***	5.6.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		120.978.507.825,00	116.205.661.323,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		239.370.082.261,00	36.963.121.727,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -		26.031.762.403,00	23.940.780.939,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah - LRA		15.359.901.698,00	182.958.851.316,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak		31.100.745.000,00	30.912.318.834,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.324.683.000,00	3.488.565.979,00
9	Dana Alokasi Umum		1.265.304.393.000,00	1.178.380.360.243,00
10	Dana Alokasi Khusus		571.250.869.410,00	533.566.744.827,00
11	Dana Penyesuaian		271.871.079.000,00	267.910.752.760,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		191.738.404.378,00	185.308.688.272,00
13	Bantuan Keuangan		19.042.046.340,00	9.158.319.783,00
14	Pendapatan Hibah		0,00	0,00
15	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
16	**Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 15)**		**2.754.372.474.315,00**	**2.568.794.166.003,00**
17	***Arus Kas Keluar***	5.6.1.2		
18	Belanja Pegawai		1.302.143.148.625,00	1.113.196.374.159,00
19	Belanja Barang dan Jasa		714.049.430.646,00	667.795.423.023,00
20	Belanja Bunga		0,00	0,00
21	Belanja Hibah		150.235.584.293,00	101.019.252.163,00
22	Belanja Bantuan Sosial		9.547.648.000,00	8.937.904.000,00
23	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
24	Belanja Tak Terduga		1.266.502.459,00	427.605.701,00
25	Transfer-Bagi Hasil Pajak		11.281.883.069,00	10.413.308.000,00
26	Transfer-Bagi Hasil Retribusi		3.399.296.931,00	4.633.776.900,00
27	Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya		0,00	0,00
28	Transfer-Bantuan Keuangan ke Desa		424.652.064.000,00	415.669.310.460,00
29	Transfer-Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
30	**Jumlah Arus Kas Keluar (18 s.d. 29)**		**2.616.575.558.023,00**	**2.322.092.954.406,00**
31	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 30)**		**137.796.916.292,00**	**246.701.211.597,00**
32	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	5.6.2		
33	***Arus Kas Masuk***	5.6.2.1		
34	Pencairan Dana Cadangan		41.426.570.163,00	0,00
35	Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		1.218.076.333,00	2.179.625.800,00
36	Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
37	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
38	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
39	**Jumlah Arus Kas Masuk (34 s.d. 38)**		**42.644.646.496,00**	**2.179.625.800,00**
40	***Arus Kas Keluar***	5.6.2.2		
41	Pembentukan Dana Cadangan		-	20.000.000.000,00
42	Belanja Modal - Tanah		2.199.576.000,00	2.046.604.500,00
43	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		68.867.746.899,00	90.599.632.595,00
44	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		47.292.557.157,00	47.732.039.343,00
45	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan		41.979.833.338,00	54.538.776.430,00
46	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		17.866.133.555,00	22.290.072.158,00
47	Belanja Modal - Aset Lainnya		2.782.571.000,00	0,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		14.500.000.000,00	7.850.000.000,00
49	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
50	**Jumlah Arus Kas Keluar (41 s.d. 49)**		**195.488.417.949,00**	**245.057.125.026,00**
51	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 50)**		**(152.843.771.453,00)**	**(242.877.499.226,00)**

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	REF	2024	2023
52	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	5.6.3		
53	***Arus Kas Masuk***	5.6.3.1		
54	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
55	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
56	Penerimaan Utang Obligasi		0,00	0,00
57	Penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang		0,00	0,00
58	Peneriimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
59	Penerimaan Kasda dari Kas BLUD		7.848.753.164,00	17.000.000.000,00
60	**Jumlah Arus Kas Masuk (54 s.d. 59)**		**7.848.753.164,00**	**17.000.000.000,00**
61	***Arus Kas Keluar***	5.6.3.2		
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
64	Pembayaran Pokok Utang Obligasi		0,00	0,00
65	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
66	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
67	Penyetoran Kas BLUD ke Kasda		7.848.753.164,00	17.000.000.000,00
68	**Jumlah Arus Kas Keluar (62 s.d. 67)**		**7.848.753.164,00**	**17.000.000.000,00**
69	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (60 - 68)**		**0,00**	**0,00**
70	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	5.6.4		
71	***Arus Kas Masuk***	5.6.4.1		
72	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		164.731.781.755,21	152.018.807.689,00
73	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
74	Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
75	**Jumlah Arus Kas Masuk (70 s.d. 72)**		**164.731.781.755,21**	**152.018.807.689,00**
76	***Arus Kas Keluar***	5.6.4.2		
77	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		164.731.781.755,21	152.067.285.016,00
78	Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
79	Kiriman Uang Keluar		0,00	0,00
80	Setoran Kelebihan Salur Dana BOS		0,00	0,00
81	Koreksi Dana BOS		0,00	0,00
82	**Jumlah Arus Kas Keluar (75 s.d. 79)**		**164.731.781.755,21**	**152.067.285.016,00**
83	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (73 - 80)**		**-**	**(48.477.327,00)**
84	**Kenaikan / Penurunan Kas**		**(15.046.855.161,00)**	**3.775.235.044,00**
85	**Saldo Awal Kas**		**159.537.743.992,00**	**156.198.408.948,00**
86	**Koreksi SiLPA Tahun Lalu**		**0,00**	**0,00**
87	**Saldo Akhir Kas**		**144.490.888.831,00**	**159.973.643.992,00**
88	**Kas di BUD**		**123.696.258.966,00**	**138.733.059.892,00**
89	**Kas di Bendahara Pengeluaran**		**0,00**	**4.011.000,00**
90	**Kas di Bendahara Penerimaan**		**0,00**	**9.698.500,00**
91	**Kas BLUD**		**18.152.510.547,00**	**15.695.534.203,00**
92	**Kas JKN**		**0,00**	**3.085.216.504,00**
93	**Kas BOS**		**35.771.608,00**	**52.637.684,00**
94	**Kas BOK Puskesmas**		**2.586.247.710,00**	**1.937.486.209,00**
95	**Kas Lainnya**		**4.000.000,00**	**20.100.000,00**
96	**Saldo Akhir Kas**		**144.474.788.831,00**	**159.537.743.992,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan OPD selaku entitas akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai entitas pelaporan berkewajiban pula untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pemalang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam mengambil keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 Pasal 191 ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir. Selanjutnya Pasal 194 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Setiap entitas pelaporan termasuk Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan/diamanahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang TA 2024 sehingga akan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan sebagai pihak yang memberikan amanah maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan termasuk ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi *(Intergeneration Equity)*

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan dalam membiayai seluruh pengeluarannya. Dari sini dapat diketahui apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung pengeluaran tersebut (dengan melihat informasi yang berkenaan dengan kewajiban/hutang daerah).

Kemudian pada Paragraf 26 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
m. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
n. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
o. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
p. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Bab II Ekonomi Makro, Capaian Kinerja Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Capaian Kinerja Ekonomi Makro
  - 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  - 2.1.2 Angka Kemiskinan
  - 2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
  - 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi
  - 2.1.5 Laju Inflasi
  - 2.1.6 Gini Rasio
- 2.2 Kebijakan Keuangan
  - 2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
  - 2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah
  - 2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Bab III *Mandatory Spending*

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi
- 4.3 Kebijakan Akuntansi Akun
  - 4.3.1 Kas dan Setara Kas
  - 4.3.2 Investasi Jangka Pendek
  - 4.3.3 Piutang
  - 4.3.4 Beban Dibayar Dimuka
  - 4.3.5 Persediaan
  - 4.3.6 Aset untuk Dikonsolidasikan
  - 4.3.7 Investasi Jangka Panjang
  - 4.3.8 Aset Tetap
  - 4.3.9 Dana Cadangan
  - 4.3.10 Properti Investasi
  - 4.3.11 Aset Lainnya
  - 4.3.12 Kewajiban/Utang
  - 4.3.13 Ekuitas
  - 4.3.14 Pendapatan
  - 4.3.15 Beban, Belanja, dan Transfer Daerah
  - 4.3.16 Pembiayaan
  - 4.3.17 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)/Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 4.4 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
  - 4.4.1 Definisi
  - 4.4.2 Koreksi Kesalahan
  - 4.4.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi
  - 4.4.4 Perubahan Estimasi Akuntansi
  - 4.4.5 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
  - 4.4.6 Peristiwa Luar Biasa
  - 4.4.7 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1 Pendapatan LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Transfer
  - 5.1.4 Pembiayaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
5.2.5 Lain-Lain
5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.4.1 Pendapatan-LO
5.4.2 Beban
5.4.3 Kegiatan Non Operasional
5.4.4 Pos Luar Biasa
5.5 Penjelasan Pos-Pos Arus Kas
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Saldo Awal
5.6.2 Surplus / Defisit LO
5.6.3 Koreksi Kesalahan
Bab VI Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
6.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
6.1.1 Pendapatan
6.1.2 Belanja
6.1.3 Pembiayaan
6.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
6.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah
6.2.2 Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah
6.2.3 Permasalahan dan Solusi Pembiayaan Daerah
Bab VII Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
7.1 Umum
7.2 Kondisi Geografis
7.3 Gambaran Umum Demografis
7.4 Dokumen Perencanaan
Bab VIII Penutup

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dan juga merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Capaian indikator makro Kabupaten Pemalang sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Makro

No.	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Status	Keterangan	Persentase (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,10	68,65	Tercapai	IPM Kabupaten Pemalang peringkat 35 dari 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah	100,81%
2	Angka kemiskinan	%	15,00	14,92	Tercapai	Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil melandaikan jumlah penduduk miskin hingga 14,92% dengan beberapa kegiatan/strategi yang telah dilakukan pada Tahun 2024	100,54%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,33	6,55	Tercapai	Angka TPT Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Naik (menunjukkan trend positif)	103,47%
4	Pertumbuhan ekonomi	%	4,2	5,11	Tercapai	Angka Pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend positif	121,67%
5	Laju Inflasi	%	2,36	2,19	Tidak Tercapai	Sejak Tahun 2020, pengukuran laju inflasi Kabupaten Pemalang menginduk kepada Kota Tegal karena Bank Indonesia dan BPS hanya melakukan pengukuran Survey Biaya Hidup (SBH) pada 6 (enam) kota di Jawa Tengah. Penyebab utama inflasi adalah kenaikan harga beberapa bahan pokok.	61.02%
6	Gini Ratio	Indeks	-	0,319		Sejak tahun 2016 penghitungan indeks gini tidak lagi dilakukan di kabupaten /kota, penghitungan hanya sampai ditingkat provinsi.	

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

Pembangunan Manusia di Kabupaten Pemalang terus mengalami kemajuan, walaupun belum signifikan, terlebih jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang di tahun 2024 adalah 68,65, naik tipis sebesar 0,62% dibandingkan IPM tahun 2023 yaitu sebesar 68,03. Apabila disandingkan dengan target tahun 2024, capaian kinerjanya mencapai 100,81% dari target sebesar 68,10.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahun 2024 ini, Kabupaten Pemalang menduduki peringkat terendah di Jawa Tengah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah lintas sektoral, khususnya dalam upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan peningkatan tingkat pengeluaran per kapita.

Salah satu faktor pengungkit HLS adalah ketersediaan perguruan tinggi, yang pada akhirnya berpengaruh pada data jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan di atas Sekolah Menengah Umum (SMU). Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan IPM Kabupaten Pemalang.

Faktor lain yang berpengaruh adalah tingkat pengeluaran per kapita. Tingkat perekonomian yang relatif rendah, perilaku dan budaya konsumsi masyarakat Pemalang juga menjadi aspek yang turut menyumbang masih rendahnya IPM di Kabupaten Pemalang.

Permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya IPM di Kabupaten Pemalang di antaranya:

1. Belum sinkronnya antara perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan IPM. Hal ini dengan melihat program masing-masing Perangkat Daerah yang belum mampu bersinergi untuk melakukan kolaborasi dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Pemalang.
2. Belum optimalnya kerjasama peran *stakeholder* dalam melaksanakan program pembangunan, baik antar internal pemerintah daerah maupun kerjasama perangkat daerah dengan pihak non pemerintah seperti dengan pihak swasta, akademisi, organisasi masyarakat dan masyarakat.
3. Layanan pendidikan non formal (Program Belajar Kejar Paket A, Paket B dan Paket C) sebagai alternatif untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah belum dapat memberikan kontribusi secara optimal. Hal ini dikarenakan dari sisi sarana prasarana, pengelola, dan pembiayaan belum teranggarkan secara maksimal. Terutama di Kecamatan Pulosari, Watukumpul dan Warungpring sehingga akan mempengaruhi tingkat Harapan Lamanya Sekolah (HLS) pada kecamatan tersebut.
4. Belum meratanya akses pendidikan pada tingkat SMA/SMK yang tersedia.
5. Rasio jumlah puskesmas dengan penduduk yang belum ideal menjadikan jangkauan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terbatas.
6. Semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular (degeneratif). Hal ini mengakibatkan produktivitas masyarakat menurun dan berdampak pada meningkatnya beban ekonomi keluarga.
7. Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan belum merata sesuai dengan kebutuhan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit.
8. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB).
9. Masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima perlindungan sosial. Kemudian terdapat indikasi banyaknya masyarakat yang mampu justru mendapatkan perlindungan sosial yang sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Beberapa persoalan tambahan di lapangan antara lain dalam pengoperasian dan pendistribusian Kartu Indonesia

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sehat (KIS) dan BPJS, masih kurangnya tenaga bidan desa, sarana kesehatan, sanitasi lingkungan, dan koordinasi lintas sektoral terkait bidang kesehatan.

10. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sempitnya lapangan pekerjaan formal, belum berkembangnya sektor ekonomi mikro berbasis bahan unggulan lokal.
11. Belum adanya perguruan tinggi yang bisa menarik minat lulusan SMA/SMK Kabupaten Pemalang untuk melanjutkan pendidikannya di Kabupaten Pemalang.

Solusi yang dilakukan untuk meningkat IPM Kabupaten Pemalang di antaranya:

1. Program/kegiatan pembangunan yang harus direncanakan untuk meningkatkan IPM secara umum meliputi:
   a. Meningkatkan infrastruktur dalam bentuk sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan maupun ekonomi
      Hal ini setidaknya dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaannya perlu diperluas terutama fokus pada masyarakat miskin untuk bisa meningkatkan derajat kesehatannya, tingkat Pendidikan dan kemampuan ekonomi secara mandiri.
   b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
      Pengembangan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
   c. Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan investasi/penanaman modal
      Investasi atau penanaman modal secara signifikan dapat mendorong akselerasi pembangunan secara luas. Akselerasi pembangunan yang luas ini, dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, serta penyerapan tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Adanya investasi dan penanaman modal ini perlu didukung melalui kemudahan dalam pelayanan perijinan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Insentif biaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas tenaga kerja. Insentif biaya dapat dilakukan melalui investasi pemerintah dalam pendidikan dan ketrampilan khusus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan kerja melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
   d. Sosialisasi peningkatan perilaku konsumsi di wilayah Kabupaten Pemalang
      Konsumsi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang dapat meningkatkan pendapatan sektor-sektor produksi sehingga mendorong tumbuhnya investasi yang lebih besar bagi berkembangnya perekonomian daerah.
   e. Gerakan “Njuh Sekolah Maning” yaitu gerakan pengembalian Anak Tidak Sekolah untuk kembali bersekolah yang dilakukan beberapa tahap sebagaimana berikut:
      - Sosialisasi Aplikasi Njuh Sekolah Maning;
      - Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS);

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Menginput data ATS ke dalam aplikasi Njuh Sekolah Maning;
- Rekonfirmasi/pengembalian anak tidak sekolah, dengan gerakan satu guru satu ATS;
- Optimalisasi peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam menampung anak tidak sekolah yang mau bersekolah lagi;
- Monitoring ATS yang kembali bersekolah.

f. Terobosan program – program kesehatan di antaranya *Universal Health Couverage* (UHC), BLUD Puskesmas, Pembentukan Tim Kabupaten Sehat, Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Penduduk miskin yaitu penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran..

Angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebesar 14,92% dari target sebesar 15%. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 15,03% mengalami penurunan sebesar 0,11%. Kemiskinan tentunya tidak dapat terlepas dari indikator-indikator makro lainnya, karena mengatasi masalah kemiskinan membutuhkan pendekatan holistik. Kondisi ekonomi daerah seperti struktur perekonomian, tingkat pengangguran, infrastruktur, sampai ke kondisi sosial budaya seperti pendidikan, kesehatan, dan kondisi perumahan, saling terkait satu sama lain. Terkhusus pertanian, memiliki peran penting dalam perekonomian Pemalang karena menjadi lapangan usaha utama yang berkontribusi sebesar 25,93%. Beberapa tantangan di pertanian seperti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya dan keterbatasan akses infrastruktur, menyebabkan produktivitasnya yang belum maksimal. Hal ini menghambat potensi pendapatan di pertanian yang akhirnya berimbas pada pola pengeluarannya yang rendah. Pola pengeluaran yang rendah ini perlu menjadi perhatian karena sangat menentukan tingkat kemiskinan. Di mana, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 tercatat sebesar 493.593 rupiah perkapita perbulan.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Persentase TPT di Kabupaten Pemalang bergerak fluktuatif.

Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebanyak 0,08% dari tahun 2023. Adapun angka TPT Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 6,63% sedangkan TPT tahun 2023 sebesar 6,55%. Namun menunjukkan trend positif disebabkan oleh Jumlah Angkatan Kerja bertambah dan juga batas

https://jdih.pemalangkab.go.id

usia penghitungan Angkatan Kerja, selain itu juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Semakin bertambahnya investor yang masuk ke Kabupaten Pemalang,
2. Banyaknya perusahaan baru sehingga memperluas lapangan kerja.

Adapun langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menurunkan tingkat pengangguran antara lain:

1. Memperluas Kesempatan Kerja melalui pemberian Pelatihan Berbasis Kewirausahaan dan pelatihan berbasis kompetensi;
2. Memperluas pemerataan Kesempatan Kerja dengan mengoptimalkan Informasi Bursa Kerja;
3. Melaksanakan *Job Canvasing*;
4. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
5. Melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang untuk membuka lowongan kerja.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dipandang penting untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang akan tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Pemalang mengalami pertumbuhan, dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebesar 5,11% telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,2%.

2.1.5 Laju Inflasi

Salah satu indikator ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan harga barang dan jasa secara umum adalah tingkat inflasi. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus.

Sejak tahun 2020, pengukuran laju inflasi Kabupaten Pemalang menginduk kepada Kota Tegal karena Bank Indonesia dan BPS hanya melakukan pengukuran Survey Biaya Hidup (SBH) pada 6 kota di Jawa Tengah, yaitu Purwokerto, Kota Surakarta, Kota tegal, Cilacap, Kudus, Kota Semarang. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, namun Kota Tegal dijadikan sebagai acuan laju inflasi Kabupaten Pemalang karena

https://jdih.pemalangkab.go.id

faktor kedekatan wilayah. Adapun laju inflasi Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebesar 2,19% dimana laju ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 2,36%. Penyebab utama inflasi yaitu kenaikan harga beras, minyak goreng, kopi bubuk, biaya pendidikan tinggi (akademi/perguruan tinggi), sigaret mesin / rokok elektrik, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras dan kendaraan (mobil).

Beberapa langkah dan strategi telah dilakukan guna menekan laju inflasi yang terus meningkat, baik pada level kebijakan, level teknis, hingga langkah-langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, yang meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan operasi pasar khususnya pada tiga komoditas (beras, gula, dan minyak goreng) guna monitoring stabilitas harga bahan pokok;
2. Meluncurkan program penanganan dampak inflasi dengan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial (Perlinsos);
3. Melaksanakan kegiatan Pasar Murah secara rutin di titik daerah rawan kemiskinan;
4. Himbauan kepada masyarakat Pemalang untuk membatasi diri pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif. Sedangkan untuk ketergantungan terhadap kebutuhan pokok sebetulnya ada solusi alternatif adalah barang substitusi (barang penganti lain);
5. Himbauan untuk menanam sayur pada masing-masing rumah guna menjamin ketersediaan bahan pangan serta membangun ketahanan pangan rumah tangga. Harapannya, dengan pemenuhan bahan pangan sayur pada level rumah tangga, maka potensi inflasi yang disebabkan oleh kelangkaan bahan pokok dapat terminimalisir.

2.1.6 Gini Ratio

Gini ratio atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Gini ratio dinamakan demikian karena ditemukan oleh seorang ahli statistik Italia bernama Corrado Gini pada tahun 1912.

Gini ratio menghasilkan nilai antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan atau kekayaan sempurna (setiap individu memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama) sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi yang paling tidak merata (satu individu memiliki semua pendapatan atau kekayaan), atau dalam kata lain pendapatan itu hanya diterima oleh satu atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali.

Ukuran ketimpangan seperti Gini ratio penting dalam analisis ekonomi dan sosial karena dapat memberikan wawasan tentang tingkat ketidaksetaraan di dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi nilai Gini ratio, semakin besar ketidaksetaraan di dalam populasi tersebut.

Angka Gini ratio Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 0.319 dapat dibaca sebagai berikut: Nilai Gini ratio tersebut berada dalam rentang antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan tingkat kesetaraan sempurna (setiap individu memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama) dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimum (satu individu memiliki semua

https://jdih.pemalangkab.go.id

pendapatan atau kekayaan). Dengan demikian, nilai 0.319 menunjukkan tingkat ketidaksetaraan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2024.

Secara spesifik, semakin rendah nilai Gini ratio, semakin merata distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, sementara semakin tinggi nilai Gini ratio, semakin besar ketidaksetaraan. Dengan demikian, nilai 0.319 menunjukkan adanya tingkat ketidaksetaraan yang signifikan, meskipun tidak mencapai level yang sangat tinggi.

Perubahan dari angka Gini ratio Kabupaten Pemalang dari tahun 2023 sebesar 0.334 menjadi 0.319 di tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan pemerataan pengeluaran penduduk dalam tingkat ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan dalam populasi selama periode tersebut. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkat Ketidaksetaraan: Angka Gini ratio yang lebih rendah pada tahun 2024 (0.319) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan di Kabupaten Pemalang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (0.334).
2. Perubahan Distribusi: penurunan Gini ratio tersebut dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di Kabupaten Pemalang selama periode tersebut. Ini bisa berarti bahwa orang-orang dengan pendapatan atau kekayaan yang lebih tinggi mungkin mendapatkan peningkatan yang lebih besar dalam hal pendapatan atau kekayaan mereka, sementara orang-orang dengan pendapatan atau kekayaan yang lebih rendah mungkin mengalami peningkatan yang lebih kecil atau bahkan penurunan.
3. Pemantauan Kebijakan: Perubahan dalam Gini ratio seperti ini dapat menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi, sosial, atau pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Pemalang selama periode tersebut, serta untuk merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Dengan demikian, penurunan Gini ratio dari 0.334 pada tahun 2023 menjadi 0.319 pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di Kabupaten Pemalang selama periode tersebut, dan hal ini memerlukan perhatian dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan di masa mendatang untuk mencapai sasaran ketimpangan semakin menurun atau membaik di Kabupaten Pemalang.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan dan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

anggaran berkenaan. Dengan demikian pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh penerimaan daerah dalam APBD termasuk di dalamnya pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, atau jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan perubahannya, maka arah kebijakan dalam meningkatkan pendapatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran basis data, strategi ini dilaksanakan dengan kegiatan studi potensi maupun pemutakhiran basis data obyek maupun wajib pajak.
2. Penataan regulasi, strategi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi terutama pada tarif dan dasar pengenaan pajak dan retribusi, serta untuk menyusun payung hukum bagi ide-ide perbaikan dan inovasi tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola, strategi ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan peneriman PAD melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kemudahan pengelolaan PAD.
4. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi, startegi ini ditujukan untuk membangun ekosistem pengelolaan PAD yang terhubung dan saling mendukung dalam peningkatan PAD. Selain penerimaan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan hasil investasi pada BUMD perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Nomor 910/2321 dan Nomor 172.1/2445 tanggal 31 Juli 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu:
      - Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Nomor Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang.

- Penetapan target pajak daerah harus berdasarkan data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi informasi.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program JKN.
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan sebagaian untuk penyediaan penerangan jalan.
- Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi tahun 2024, tingkat inflasi tahun 2024, dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu dengan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan

https://jdih.pemalangkab.go.id

program strategis nasional dengan berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
   - Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
   - Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
   - Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
   - Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
   - Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah
   Penganggaran lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

   Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer
   Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
   Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
   a. Transfer Pemerintah Pusat
      Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:
      - Dana Perimbangan, yang terdiri atas rincian objek:
        a) Dana Transfer Umum, terdiri atas:
           - Dana Bagi Hasil (DBH)
             Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH yang bersumber dari pajak, meliputi: DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH- PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, serta DBH

https://jdih.pemalangkab.go.id

Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) meliputi: DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi.

- Dana Alokasi Umum (DAU)
  DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Transfer Khusus, terdiri atas:

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
  DAK Fisik merupakan dana transfer dari pusat yang sudah ditentukan penggunaannya, tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pemalang mendapat alokasi untuk: DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler - PAUD, DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler - SD, DAK Fisik – Bidang Pendidikan – Reguler - SMP, DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler - SKB, DAK Fisik – Bidang Kesehatan dan KB – Penugasan - Penurunan AKI dan AKB, DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB – Reguler - KB, DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman – Reguler - Penyediaan Rumah Swadaya, DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian, DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan, DAK Fisik - Bidang Jalan – Reguler - Jalan, DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler, DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler, DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan, DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
  DAK Non Fisik sama halnya dengan DAK Fisik, merupakan dana transfer dari pusat yang sudah ditentukan penggunaannya, tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pemalang mendapat DAK Non Fisik untuk: DAK Non Fisik-TPG PNSD, DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB, DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal, DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Insentif Fiskal
  Insentif fiskal adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan kinerja tertentu. Insentif fiskal merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2024 Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi Insentif Fiskal untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp5.719.565.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Dana Desa
  Terkait dengan Transfer Pemerintah Pusat, dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023, telah dianggarkan dengan menyesuaikan pagu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

b. Transfer Antar Daerah
   Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri atas:
   - Pendapatan Bagi Hasil
     Pendapatan bagi hasil bersumber dari bagi hasil pajak provinsi yang dianggarkan berdasarkan penetapan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
   - Pendapatan Bantuan Keuangan
     Pendapatan bantuan keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggarkan berdasarkan penetapan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 disampaikan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Penganggaran belanja pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan;
2. Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2024, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan;
3. Alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN tetap memenuhi ketentuan dalam butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
4. Penyediaan anggaran belanja lembur dianggarkan hanya untuk lembur tenaga Non ASN;
5. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dengan mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.m.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
6. Penyediaan anggaran yang menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Perubahan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultansi perencanaan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
7. Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5).e) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sudah memenuhi efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD dan tepat sasaran dan tepat jumlah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penganggaran program/ kegiatan/ sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (output) berupa fisik dan memenuhi kriteria pengadaan Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan;
9. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga dan tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat dengan menyediakan anggaran untuk Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;
10. penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan;
11. Mengalokasikan anggaran operasional kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam rangkaian kegiatan Pilkada Serentak tahun 2024;
12. dalam menjamin kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Kabupaten Pemalang telah mengacu pada butir E.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Dalam mewujudkan UHC di Desa dari sisi perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pemalang senantiasa mengawal kebijakan Pemerintah diantaranya menganggarkan untuk mendukung perlindungan jaminan kesehatan sosial bagi penduduk desa/kelurahan melalui pendaftaran

https://jdih.pemalangkab.go.id

kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa UHC dengan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa sebagaimana ditegaskan dalam butir E.3.a. dan E.3.d.2).b).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

14. Melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2024 mendasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.9/4/004337 tanggal 15 Agustus 2024.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Hasil dari penetapan besaran alokasi belanja daerah selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengadaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kebijakan alokasi belanja wajib, diarahkan upaya pada pemenuhan kebutuhan berikut ini:

1. Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan sebesar Rp1.220.035.337.213,00 atau 40,65% dari APBD.
2. Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan sebesar Rp543.414.816.913,00 atau 18,11% dari APBD.
3. Alokasi Anggaran belanja infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Rp130.931.821.000,00.
4. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp113.360.167.000,00 atau paling sedikit 10% dari DAU dan Dana Bagi Hasil Pajak/ bukan pajak.
5. Alokasi Anggaran Pengawasan sebesar Rp11.337.891.000,00 diluar belanja gaji dan tunjangan.
6. Alokasi Anggaran peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar Rp3.000.000.000,00.
7. Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp 14.513.750.000,00 atau paling sedikit 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah setelah dikurangi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
8. Alokasi Anggaran Belanja pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (belanja iuran dan bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas 3) sebesar Rp76.515.688.200,00 atau minimal sebesar 37,5% dari pendapatan bagi hasil pajak rokok yang diterima pemerintah daerah.
9. Alokasi Anggaran 11 Kelurahan, dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah masing-masing sebesar Rp350.000.000,00.

Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, meliputi:
    a. Belanja Pegawai
        i. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp1.452.801.288.790,00;
        ii. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian;
        iii. Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf ii) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja;

https://jdih.pemalangkab.go.id

iv. Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf ii) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai sebagaimana dimaksud huruf i) di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp1.169.093.710.482,00 dari total belanja APBD;
vi. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud huruf v) tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya;
vii. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022;
viii. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
ix. Kebijakan penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
x. Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
xi. Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya;
xii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
xiii. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.449.945.250,00 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
xiv. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK)

https://jdih.pemalangkab.go.id

dibebankan pada APBD sebesar Rp6.218.115.590,00 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

xv. Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, sebesar Rp138.057.693.000,00 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS; penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja; pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan TPP untuk TA 2024, yaitu sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya; alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya. Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani: menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS; pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP. Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2024 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2023;

xvi. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang bersumber dari APBN TA 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai

https://jdih.pemalangkab.go.id

berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan anggaran sebesar Rp287.583.278.611,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain. Belanja barang dan jasa dilaksanakan dalam rangka program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penganggaran belanja barang pakai habis sebesar Rp108.974.448.425,03 disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati Pemalang, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2023;
- Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam angka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
- Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp7.737.557.000,00 dan besarannya sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- Penganggaran jasa yang diberikan kepada pihak lain sebesar Rp31.848.059.740 atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
- Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.893.770.000;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan sebesar Rp76.515.688.200,00 sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu tahun anggaran dan berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerah dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerah dengan skema ganda;
- Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
  (1) Bupati/Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp332.273.415,00 digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp346.983.585,00 digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian

https://jdih.pemalangkab.go.id

bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Penganggaran sewa sebesar Rp4.132.508.952,00 terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan;
- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya sebesar Rp5.783.397.000,00 yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada perangkat daerah masing-masing. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Penggunaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Terkait kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dapat dilakukan di luar wilayah provinsi/kabupaten Pemalang;
- Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penganggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp57.284.984.770,00 dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif dan frekuentatif dengan jumlah hari dan orang dibatasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Lebih lanjut, perjalanan dinas ini memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum;
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain (sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang dijabarkan dalam RKPD), dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
  (1) hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp681.650.000,00;
  (2) penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp961.950.000,00;
  (3) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp266.151.514.000,00 yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga
Belanja bunga tidak dianggarkan karena tidak memiliki hutang.

d. Belanja Subsidi
Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Kabupaten Pemalang karena pada tahun 2024 tidak ada kebijakan pemberian subsidi.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- Belanja Hibah
  Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa sebesar Rp153.666.629.210,00 dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Selanjutnya, belanja hibah sebesar Rp153.666.629.210,00 termasuk juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pemalang. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id

APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Adapun anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1) Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar Rp579.355.000,00;
2) Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp386.551.000,00;
3) Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar Rp269.981.000,00;
4) Belanja Hibah kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp240.889.000,00;
5) Belanja Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar Rp236.995.000,00;
6) Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp172.097.000,00;
7) Belanja Hibah kepada Partai Nasional Demokrat sebesar Rp34.358.000,00;
8) Belanja Hibah kepada Partai Amanat Nasional sebesar Rp30.623.000,00.

- Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial sebesar Rp9.950.980.000,00 berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat secara selektif dan sifatnya tidak secara terus menerus. Belanja bantuan sosial ini bertujuan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

a. masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. penggunaan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut sebesar harga beli atau bangun dari aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Kabupaten Pemalang memprioritaskan alokasi belanja modal sebesar Rp192.492.047.709,00 pada Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
   a) Belanja Modal Tanah
      Belanja modal tanah sebesar Rp2.300.000.000,00 digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.
   b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
      Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp73.645.018.098,00 digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
   c) Belanja Modal Bangunan dan Gedung
      Belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp54.414.402.986,00 digunakan untuk menganggarkan seluruh bangunan dan gedung yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.
   d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
      Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp42.886.187.880,00 digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.

https://jdih.pemalangkab.go.id

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp16.332.688.745,00 digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah.

3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.972.500.000,00 merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan, antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan pengeluaran daerah lainnya. Pengeluaran-pengeluaran ini apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/atau masyarakat. Pengeluaran-pengeluaran ini juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Pengeluaran daerah lainnya digunakan untuk mendanai:
   a) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) keperluan mendesak; dan/atau
   c) pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
1) dana hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2) memanfaatkan kas yang tersedia.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil sebesar Rp14.681.180.000,00 digunakan untuk menganggarkan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar Rp11.281.883.069,00 dan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar Rp3.399.296.931,00 yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang kepada pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Pemalang pada akhir Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id

Anggaran 2023, kelebihan pelampauannya disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024. Belanja bagi hasil pajak daerah Kabupaten Pemalang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada OPD selaku SKPKD.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan sebesar Rp424.780.464.000,00 diberikan kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan kebijakan bantuan keuangan pada Pemerintah Desa berupa:

1) Bantuan Keuangan Dana Desa;
2) Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa;
3) Bantuan Keuangan Khusus Desa; dan
4) Bantuan Keuangan TMMD.

2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

   Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula pada APBD induk dianggarkan sebesar Rp66.532.560.000,00, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah Rp94.411.654.000,00 sehingga menjadi Rp160.944.214.000,00. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut di antaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pencermatan memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 7.595.000.000,00 merupakan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD dari penarikan penyertaan modal pada Bank Jateng dengan terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan sebagai dasar kebijakan divestasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pengeluaran Pembiayaan

   Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah semula dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp4.500.000.000,00 menjadi Rp14.500.000.000,00 atau meningkat sebesar 45,00%. Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan

https://jdih.pemalangkab.go.id

terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB III
PENGUNGKAPAN DATA KINERJA MANDATORY SPENDING

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Pada tahun 2024, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan belanja yang bersifat *mandatory* (*mandatory spending*) dengan komposisi sebagai berikut:

1) Alokasi anggaran untuk pendidikan

   Perhitungan *Mandatory spending* fungsi Pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2024

No	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a.	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.226.259.527.083	1.112.937.184.819
		1) Belanja Operasi	1.143.324.183.609	1.034.810.794.101
		2) Belanja Modal	82.935.343.474	78.126.390.718
	b.	Urusan Bidang Perpustakaan	8.502.657.000	7.900.666.007
		1) Belanja Operasi	5.335.499.000	4.879.282.135
		2) Belanja Modal	3.167.158.000	3.021.383.872
	c.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.097.183.550	21.538.640.984
		1) Belanja Operasi	22.576.440.870	21.018.786.940
		2) Belanja Modal	520.742.680	519.854.044
	d.	Anggaran di luar urusan Pendidikan yang menunjang Kebutuhan Masyarakat dibidang pendidikan	-	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d)		1.257.859.367.633	1.142.376.491.810
3.	Total Belanja Daerah		3.001.406.468.000	2.797.489.921.972
4.	Rasio anggaran Pendidikan (2/3 x 100%)		41,91%	40,84%

   Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar minimal 20% dari APBD. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan sebesar 41,91% dari APBD. Anggaran belanja Pendidikan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.257.859.367.633,00 dengan total belanja daerah TA 2024 sebesar Rp3.001.406.468.000,00

   Untuk realisasi belanja Pendidikan Kabupaten Pemalang TA 2024 sebesar Rp1.142.376.491.810,00 atau 90,82% dari anggaran Pendidikan sebesar Rp1.257.859.367.633,00 serta 40,84% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp.2.797.489.921.972,00.

2) Alokasi anggaran untuk Kesehatan

   Mandatory spending untuk anggaran Kesehatan, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalikasikan anggaran sebesar minimal 10% dari APBD diluar gaji. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan belanja Kesehatan sebesar Rp546.578.549.913,00 atau sebesar

https://jdih.pemalangkab.go.id

25,50**%** dari total anggaran belanja daerah di luar gaji sebesar Rp2.143.206.014.279,00.

Tabel 3.2
Perhitungan Alokasi Fungsi Kesehatan Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan		543.414.816.913	496.897.235.296
		1)	Belanja Operasi	489.954.172.690	448.521.353.694
		2)	Belanja Modal	53.460.644.223	48.375.881.602
	b.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang mennunjang kesehatan, antara lain :		3.163.733.000	3.163.632.000
		1)	Dinas Sosial, PP, KB, PP, dan PA	3.163.733.000	3.163.632.000
		a)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.100.000	3.005.000
		b)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	5.000.000	4.999.000
		c)	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.920.000	8.920.000
		d)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	6.385.000	6.385.000
		e)	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	3.935.000	3.935.000
		f)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.230.000	12.230.000
		g)	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	3.073.861.000	3.073.856.000
		h)	Peningkatan Kesertaan KB Pria	43.530.000	43.530.000
		i)	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5.000.000	5.000.000
		j)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.772.000	1.772.000
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)			546.578.549.913	500.060.867.296
3.	Total Belanja Daerah			3.001.406.468.000	2.797.489.921.972
4.	Gaji ASN			858.200.453.721	742.658.256.753
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)			2.143.206.014.279	2.054.831.665.219
6.	Rasio Anggaran Kesehatan (2/5 x 100%)			25,50%	24,34%

Realisasi anggaran belanja Kesehatan sebesar Rp500.060.867.296,00 atau 24,34% dari realisasi belanja daerah diluar gaji sebesar Rp2.054.831.665.219,00.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Mandatory spending untuk ADD adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan ADD sebesar Rp266.151.514.000,00 atau 15,06% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK Fisik dan Non Fisik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 3.3
Perhitungan Alokasi Fungsi Dana Desa Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Dana Desa	266.151.514.000	266.151.514.000
2.	Dana Perimbangan	1.881.195.824.000	1.869.980.690.410
3.	Dana Alokasi Khusus	110.173.816.000	102.178.208.438
4.	Dana Perimbangan - DAK (2-3)	1.771.022.008.000	1.767.802.481.972
5.	Rasio Anggaran Dana Desa (1/4 x 100%)	15,03%	15,06%

Realisasi anggaran Dana Desa sebesar Rp266.151.514.000,00 atau 100% dari total Anggaran Dana Desa sebesar Rp266.151.514.000,00 dan 15,06% dari realisasi total Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp1.767.802.481.972,00.

4) Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur

Alokasi anggaran belanja infrastruktur minimal 25% persen dari Total APBD. Total anggaran infrastruktur pada APBD TA-2024 adalah sebesar Rp870.104.749.652,00 atau 28,99 % dari total APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan realisasi belanja infrastruktur TA-2024 adalah sebesar Rp853.151.563.627,00 atau 30,50% dari total realisasi APBD TA 2024.

Tabel 3.4
Perhitungan Alokasi Fungsi Dana Desa Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Penerimaan	1.298.450.502.000	1.298.729.821.000
	Dana Trensfer Umum	1.298.450.502.000	1.298.729.821.000
	a DAU	1.265.304.393.000	1.265.304.393.000
	b DBH	33.146.109.000	33.425.428.000
	Jumlah Penerimaan	1.298.450.502.000	1.298.729.821.000
2	Pengurangan	278.887.162.000	279.166.481.000
	a DBH CHT	12.735.648.000	13.014.967.000
	b DBH DR	-	-
	c ADD	266.151.514.000	266.151.514.000
	Jumlah Pengurangan	278.887.162.000	279.166.481.000
3	Jumlah Dana Transer Umum yang Diperhitungkan	1.019.563.340.000	1.019.563.340.000
4	a Belanja Modal	192.492.047.709	180.988.417.949
	1) Tanah	2.300.000.000	2.199.576.000
	2) Peralatan dan Mesin	73.645.018.098	68.867.746.899
	3) Bangunan dan Gedung	54.414.402.986	47.292.557.157
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.886.187.880	41.979.833.338
	5) Aset Tetap Lainnya	16.332.688.745	17.866.133.555
	6) Aset Lainnya	2.913.750.000	2.782.571.000
	b Belanja Pemeliharaan	89.214.628.733	87.727.849.385
5	a Belanja Hibah	153.666.629.210	150.235.584.293
	Belanja Bantuan Sosial	9.950.980.000	9.547.648.000
	Belanja Bantuan Keuangan	424.780.464.000	424.652.064.000
6	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (4+5)	870.104.749.652	853.151.563.627
7	Total Belanja Daerah	3.001.406.468.000	2.797.489.921.972
8	Persentase	28,99%	30,50%

https://jdih.pemalangkab.go.id

5) Alokasi Anggaran Pengawasan

Alokasi Anggaran Pengawasan minimal 0,50 persen dari Total APBD, sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 pemerintah kabupaten didorong untuk mengalokasikan anggaran terkait dengan kegiatan pengawasan sebesar 0,50 persen dari total APBD Tahun 2024, Total anggaran pengawasan pada APBD TA 2024 adalah sebesar Rp15.167.463.000,00 atau 0,51% dari total APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.001.406.468.000,00 Sedangkan realisasi anggaran pengawasan TA 2024 adalah sebesar Rp14.041.665.870,00 atau 0,50 % dari realisasi Total APBD TA 2024 sebesar Rp2.797.489.921.971,83.

Kabupaten Pemalang mengalokasikan anggaran pengawasan 0,51%, angka tersebut sesuai dari anggaran pengawasan yang dimandatkan sebesar 0,50%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretariat Daerah beralamat di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang. Entitas pelaporan ini terdiri dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan 41 entitas akuntansi yaitu:

Tabel 4.1
Daftar SKPD di Kabupaten Pemalang

Kode SKPD	Nama SKPD (Entitas Akuntansi)
1.01.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.01.0000	Dinas Kesehatan
1.03.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.01.0000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07.01.0000	Dinas Tenaga Kerja
2.11.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.15.01.0000	Dinas Perhubungan
2.16.01.0000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2.17.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.18.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.23.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25.01.0000	Dinas Perikanan
3.26.01.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.27.01.0000	Dinas Pertanian
4.01.00.0000	Sekretariat Daerah
4.02.01.0000	Sekretariat DPRD
5.01.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.03.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah
6.01.01.0000	Inspektorat
7.01.01.0000	Kecamatan Moga
7.01.02.0000	Kecamatan Pulosari
7.01.03.0000	Kecamatan Belik
7.01.04.0000	Kecamatan Watukumpul
7.01.05.0000	Kecamatan Bodeh
7.01.06.0000	Kecamatan Bantarbolang
7.01.07.0000	Kecamatan Randudongkal
7.01.08.0000	Kecamatan Pemalang
7.01.09.0000	Kecamatan Taman
7.01.10.0000	Kecamatan Petarukan
7.01.11.0000	Kecamatan Ampelgading
7.01.12.0000	Kecamatan Comal
7.01.13.0000	Kecamatan Ulujami
7.01.14.0000	Kecamatan Warungpring
8.01.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.2 BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dae-rah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

4.3.1 KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI KAS DAN SETARA KAS

1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dengan masa jatuh temponya yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan.

B. JENIS-JENIS KAS DAN SETARA KAS

1. Kas Daerah
   Merupakan Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), adalah saldo rekening-rekening pada Bank yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
2. Kas di bendahara pengeluaran
   Merupakan kas yang dikelola bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TU) yang belum disetor ke kas daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo pada rekening Bendahara pengeluaran maupun saldo

https://jdih.pemalangkab.go.id

dalam bentuk tunai (uang kertas dan uang logam) pada Bendahara Pengeluaran.

3. Kas di Bendahara Penerimaan;
   Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
4. Kas BOS
   Merupakan kas yang dikelola bendahara BOS, mencakup seluruh saldo pada rekening bendahara BOS maupun saldo dalam bentuk tunai (uang kertas dan uang logam) pada bendahara BOS.
5. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
   Merupakan kas yang dikelola bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo pada rekening Bendahara pengeluaran BLUD dan Bendahara Penerimaan BLUD maupun saldo dalam bentuk tunai (uang kertas dan uang logam) pada Bendahara pengeluaran BLUD dan Bendahara Penerimaan BLUD.
6. Kas Lainnya
   Kas lainnya merupakan saldo kas selain sebagaimana disebutkan pada nomor 1 sampai dengan 5 di atas, yang bersumber dari APBN maupun APBD provinsi yang penerimaannya tidak melalui RKUD.
7. Setara kas terdiri dari:
   a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
   b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

C. PENGAKUAN KAS DAN SETARA KAS

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
   a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Atas dasar butir 1 angka b. tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

D. PENGUKURAN KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAS DAN SETARA KAS

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Informasi terkait dengan pembentukan dana cadangan atau kas yang dicadangkan atau dibatasi penggunaannya.

4.3.2 INVESTASI JANGKA PENDEK

A. DEFINISI INVESTASI JANGKA PENDEK

1. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

B. PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
3. Memiliki jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan kurang dari 12 (dua belas) bulan.
   a. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
   b. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional. Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.
   c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
   d. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja

https://jdih.pemalangkab.go.id

ataupun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

C. PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
      1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
      2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
   b. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PENDEK

1. Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca dalam kelompok Aset Lancar.
2. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Kebijakan Akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
   b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
   c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
   d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
   e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain- lain dan sebaliknya (jika ada).

4.3.3 PIUTANG

A. DEFINISI PIUTANG

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau Entitas lain.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

B. PENGAKUAN PIUTANG

1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada Entitas, yaitu pada saat:
   a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
   b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
   b. jumlah piutang dapat diukur.
3. Piutang BPJS/Jaminan Kesehatan Nasional diakui berdasarkan konfirmasi klaim pembayaran oleh BPJS Kesehatan dan telah disetujui kedua belah pihak paling sedikit satu kali pada akhir periode pelaporan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dibayarkan.
6. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.
7. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
   a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya dan mengakui sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
   b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi dan Pemerintah Pusat mengakui kekurangan transfer tersebut.
8. Piutang Bagi Hasil dari provinsi diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah provinsi atas bagi hasil dari provinsi yang belum dibayarkan.
9. Piutang transfer antar daerah diakui sebagai hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar berdasarkan dokumen sah kurang transfer yang diterbitkan pemerintah daerah lainnya.
10. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan

https://jdih.pemalangkab.go.id

maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

11. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

    SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

C. PENGUKURAN PIUTANG

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
    a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
    b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
    c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
    a. Pemberian pinjaman

        Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
    b. Penjualan

        Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
    c. Kemitraan

        Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
   a. Dana Bagi Hasil diukur pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.
   b. Dana Alokasi Umum (DAU) diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
   c. Dana Alokasi Khusus, diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dibayarkan.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan, disajikan sebagai aset lainnya sebesar nilai yang dilunasi berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
5. Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. Kualitas Piutang Lancar;
   b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
   c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
   d. Kualitas Piutang Macet.
9. Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah diklasifikasikan berdasarkan cara pemungutan:
   a. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
      1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
         a) Umur piutang kurang dari 2 (dua) tahun;
         b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
         c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
         d) Wajib pajak kooperatif;
         e) Wajib pajak likuid; dan/atau
         f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
   b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
   c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
   d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
   b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
   c) Wajib pajak tidak kooperatif;
   d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
   b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
   c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya /tidak diketemukan;
   d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b. Pajak yang ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur piutang kurang dari 2 (dua) tahun;
   b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
   c) Wajib pajak kooperatif;
   d) Wajib pajak likuid; dan/atau
   e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
   b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
   c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
   a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
   b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

10. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1(satu) tahun;
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1(satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.

11. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
a. 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

13. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

14. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

D. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
   a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
      1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
      2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
      3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
   b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
   c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.
9. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
10. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
    a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
    b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
    c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
    e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
    f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum *industry* (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
    g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

E. PENGUNGKAPAN PIUTANG

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

https://jdih.pemalangkab.go.id

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

   Contoh perhitungan nilai piutang dan penyisihan piutang yang tercantum pada neraca, sebagai berikut.

   Berdasarkan inventarisasi saldo piutang pajak restoran pada tanggal 31 Desember 2022 didapat data piutang sebagai berikut:

Tabel 4.2
Contoh Perhitungan Nilai dan Penyisihan Piutang

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
ANALISA UMUR PIUTANG PAJAK RESTORAN
PER 31 DESEMBER 2022

NAMA WP	JUMLAH	BELUM MENUNGGAK	MENUNGGAK		
		LANCAR < 2 TAHUN	KURANG LANCAR 2 - 3 TAHUN	DIRAGUKAN 3 - 5 TAHUN	MACET >5 TAHUN
RM Sedep Roso	270.000,00	250.000,00	20.000,00		
RM Pak Budi	500.000,00	500.000,00			
RM Ilham Berkah	320.000,00	250.000,00	30.000,00	40.000,00	
RM Cita Rasa	180.000,00				180.000,00
JUMLAH	1.270.000,00	1.000.000,00	50.000,00	40.000,00	180.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
PENYISIHAN PIUTANG	210.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	180.000,00

Saldo piutang pajak restoran sebesar Rp1.270.000,00 maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu menyusun saldo cadangan penyisihan piutang dengan perhitungan sebagai berikut:

Dari perhitungan di atas maka saldo piutang dan penyisihan piutang pajak restoran yang tercantum di Neraca Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Saldo Piutang sebesar Rp1.270.000,00 dan saldo penyisihan sebesar Rp210.000,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.3
Contoh Perhitungan Nilai dan Penyisihan Piutang di Neraca

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
ASET		
Aset Lancar		
Piutang Pendapatan	1.270.000,00	975.000,00
Penyisihan Piutang	(210.000,00)	(55.000,00)

4.3.4 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

A. DEFINISI BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

B. PENGAKUAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

C. PENGUKURAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

D. PENGUNGKAPAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.3.5 PERSEDIAAN

A. DEFINISI PERSEDIAAN

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
   a. Barang Pakai Habis;
   b. Barang Tak Pakai Habis;
   c. Barang Bekas Pakai;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan meliputi :
   a. Bahan;
   b. Suku Cadang;
   c. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;
   d. Obat-obatan;
   e. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan;
   f. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga;
   g. Natura dan Pakan;
   h. Persediaan Penelitian;
   i. Persediaan Dalam Proses;

https://jdih.pemalangkab.go.id

j. Komponen;
k. Pipa;
l. Komponen Bekas dan Pipa Bekas.

B. PENGAKUAN PERSEDIAAN

1. Persediaan diakui:
   a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
   b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

C. PENGUKURAN PERSEDIAAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar dengan metode pencatatan FIFO (*First In First Out*/masuk pertama keluar pertama).
2. Persediaan disajikan sebesar:
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
   b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
   c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

   Contoh penghitungan persediaan akhir pada 31 Desember 2022 sebagai berikut.

   Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang melakukan pembelian persediaan obat pada dua kali pembelian terakhir, sebelum 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Contoh Penghitungan Persediaan Akhir

Tanggal	Nama Obat	Jumlah (Biji)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
26-Des-2022	Konidin	110	1.000,00	110.000,00
	Paramex	200	1.200,00	240.000,00
	Vitamin	90	1.500,00	135.000,00
28-Des-2022	UltraFlu	110	1.100,00	121.000,00
	Paracetamol	200	950,00	190.000,00
	Vitamin	90	1.400,00	126.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pada tanggal 31 Desember 2022 masih terdapat persediaan obat sebagai berikut:

Nama Obat	Jumlah (biji)
Konidin	120
Paramex	70
Vitamin	40

Harga perolehan per unit obat yang digunakan dalam perhitungan persediaan yang tercantum di neraca TA. 2022 adalah harga peroleh pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu:

Nama Obat	Harga per Unit (Rp)
Konidin	1.000,00
Konidin	1.100,00
Paramex	950,00
Vitamin	1.400,00

Maka nilai persediaan obat yang tercantum di neraca tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp253.500,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nama Obat	Jumlah (Biji)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
Konidin	10	1.000,00	10.000,00
Konidin	110	1.100,00	121.000,00
Paramex	70	950,00	66.500,00
vitamin	40	1.400,00	56.000,00
		Nilai Persediaan →	**253.500,00**

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
   a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang;
   c. Untuk persediaan yang diserahkan kepada lembaga/instansi/pihak lain yang sulit memperoleh Berita Acara Serah Terima (BAST) dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Pimpinan OPD yang menyerahkan persediaan tersebut;
   d. Terhadap persediaan yang sudah digunakan namun terkendala administrasi berlaku prinsip *subtance over form* (substansi mengungguli bentuk formalitas).

4.3.6 ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

A. DEFINISI ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian

https://jdih.pemalangkab.go.id

yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

B. PENGAKUAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

C. PENGUKURAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

D. PENGUNGKAPAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

4.3.7 INVESTASI JANGKA PANJANG

A. DEFINISI INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
3. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
4. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
5. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

B. PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
   b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
   a. Deviden Tunai;
   b. Deviden Saham; dan
   c. Bagian Laba.
3. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya,

https://jdih.pemalangkab.go.id

dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah);

b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicacat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

4. Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
5. Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
   b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

C. PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
2. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
   a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
   b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
   c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
   d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
   e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

f. Investasi nonpermanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

3. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
4. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
5. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
   a. Metode Biaya;
   b. Metode Ekuitas;
   c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
6. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
7. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
8. Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
9. Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
10. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu

https://jdih.pemalangkab.go.id

diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penyisihan Investasi NonPermanen Dana Bergulir

2. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi nonpermanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
3. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi nonpermanen dana bergulir.
4. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi nonpermanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Persentase Penyisihan Investasi Nonpermanen Dana Bergulir
Yang Tidak Tertagih

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	2 s.d 3 Tahun	3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non-Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

5. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi nonpermanen dana bergulir yang bersangkutan.

4.3.8 ASET TETAP

A. DEFINISI ASET TETAP

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
4. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
5. Masa manfaat adalah:
   a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
6. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
8. Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
9. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
11. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
12. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
    a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
    b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
    c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
    d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
13. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
14. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
15. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

B. PENGAKUAN ASET TETAP

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. Berwujud;
    b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
    f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
6. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
2. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
4. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uraian Komponen Biaya Perolehan

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
1.	Tanah	1. Harga pembelian/Pembebasan Tanah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Aset Tetap		Belanja/Pengeluaran
			2. Biaya Pembebasan/Ganti Rugi; 3. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (Biaya pembuatan sertifikat, Pelepasan Hak, Permohonan Hak Pakai Tanah); 4. Biaya Pematangan, Pematokan, Pengukuran, dan Pengurukan/ Penimbunan; 5. Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2.	Peralatan dan Mesin		
	a	Pembelian Peralatan dan Mesin siap dipakai	1. Harga Pembelian Peralatan & Mesin(PPN & PPh); 2. Ongkos Angkut; 3. Biaya Asuransi Pengiriman; 4. Biaya Instalasi/Pemasangan; 5. Biaya Selama Masa Uji Coba.
	b	Pembuatan Peralatan dan Mesin	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan): a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; c. Biaya Perizinan; d. Jasa Konsultan. 2. Yang dilaksanakan secara swakelola: a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Jasa Konsultan; f. Biaya Perizinan.
3.	Gedung dan Bangunan		1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan) a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; c. Biaya Perizinan; d. Jasa Konsultan; e. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran bangunan lama. 2. Yang dilaksanakan secara swakelola a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Biaya Perizinan; f. Biaya Konsultan; g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama.
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan		1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan) a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; c. Biaya Perizinan; d. Jasa Konsultan; e. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. 2. Yang dilaksanakan secara swakelola a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Biaya Perizinan; f. Biaya Konsultan; g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama.

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
5.	Aset Tetap Lainnya	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan) a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya perencanaan dan pengawasan; dan c. Biaya perizinan. 2. Yang dilaksanakan secara swakelola a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Biaya Perizinan; f. Jasa Konsultan.
6.	Hibah dari pihak ketiga	Nilai wajar pada saat perolehan.

7. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.
8. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
9. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

10. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

11. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

12. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
13. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

14. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (*fasos fasum*), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
15. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka

https://jdih.pemalangkab.go.id

fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap *fasos fasum* diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

16. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
17. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
18. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

19. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
20. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
21. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
22. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

23. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditure*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

https://jdih.pemalangkab.go.id

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

24. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
    a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
        1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
        2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
        3) bertambah volume, dan/atau
        4) bertambah estetis/keindahan/kenyamanan, dan/atau
        5) bertambah kapasitas produksi.
    b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
25. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
26. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut :
    a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi.
    b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
    c. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*capitalization thresholds*) Perolehan Awal Aset Tetap:

Tabel 4.7
Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi Perolehan Awal Aset Tetap

NO	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 400.000,00
	untuk Rambu-rambu Lalu Lintas	Rp 5.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 5.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp 10.000.000,00
	- Irigasi	Rp 5.000.000,00
	- Jaringan	Rp 400.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

    d. Batas Minimum Belanja/Biaya Kapitalisasi (*capitalization thresholds*) dari Rehabilitasi/Renovasi/ Restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 4.8
Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi dari Rehabilitasi/Renovasi/ Restorasi

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi/Renovasi/ Pemeliharaan/Pengembangan/ Restorasi	Keterangan
Peralatan dan Mesin		
• Alat-alat Besar Darat	>= 50.000.000	Untuk yang sifatnya Pemeliharaan Berat dan Pemasangan Alat/ Sparepart baru
• Rambu-rambu	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
• Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	-sda-	
• Alat Olahraga Lainnya	-sda-	
Gedung dan Bangunan		
• Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 20.000.000	Untuk yang sifatnya Pemeliharaan Berat/ Menambah Umur Ekonomis
• Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 20.000.000	-sda-
• Bangunan Menara	>= 20.000.000	-sda-
Monumen		
• Bangunan Bersejarah	>= 20.000.000	Untuk yang sifatnya Pemeliharaan Berat/ Menambah Umur Ekonomis
• Tugu Peringatan	>= 20.000.000	-sda-
• Candi	>= 20.000.000	-sda-
• Taman (untuk umum)	>= 20.000.000	-sda-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
• Jalan	>= 100.000.000	Untuk yang sifatnya Pemeliharaan Berat/ Menambah Umur Ekonomis
• Jembatan	>= 100.000.000	-sda-
• Bangunan Air dan Irigasi	>= 100.000.000	-sda-
• Instalasi Air Minum	>= 50.000.000	-sda-
• Instalasi Air Kotor/ Limbah dan sejenisnya	>= 50.000.000	-sda-
• Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	>= 50.000.000	-sda-
• Instalasi Penangkal Petir	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
• Jaringan Air		

https://jdih.pemalangkab.go.id

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi/Renovasi/ Pemeliharaan/Pengembangan/ Restorasi	Keterangan
Minum dan sejenisnya		
• Jaringan Listrik dan sejenisnya		
• Jaringan Telepon dan sejenisnya		
Aset Tetap Lainnya		
• Buku	-sda-	
• Terbitan Berkala	-sda-	
• Barang Perpustakaan	-sda-	
• Barang Bercorak Kebudayaan	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
• Hewan (ternak dan peliharaan)	-sda-	
• Tanaman	-sda-	

Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk belanja modal atau belanja barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan kegiatan pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp20.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp100.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Tabel 4.9
Contoh Kriteria Pemeliharaan Rutin Berkala atau Belanja Modal yang Dapat Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.	Ya (karena pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00)
	Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis **Belanja Barang dan Jasa**.	

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya

https://jdih.pemalangkab.go.id

sebesar Rp4.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp200.000.000,00. Kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Tabel 4.10
Contoh Kriteria Pemeliharaan Rutin Berkala atau Belanja Modal yang Dapat Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Tidak (karena nilai pemeliharaan tidak melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00)
	Kesimpulan : Pemeliharaan gedung kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis **Belanja Barang dan Jasa**.	

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar Rp25.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp200.000.000,00. Kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Tabel 4.11
Contoh Kriteria Pemeliharaan Rutin Berkala atau Belanja Modal yang Dapat Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00)
	Kesimpulan : Pemeliharaan gedung kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud akan menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang bersifat menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis **Belanja Modal**.	

Penyusutan

27. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**				**ASET TETAP**	
1	**3**	**2**			**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (Badan Tenaga Atom Nasional/BATAN)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	09	05	Alat Keamanan dan Perlindungan	5

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	3
1	**3**	**3**			**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	2	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	2	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	**3**	**4**			**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

28. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan, dan Tanaman.
29. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset idle tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
30. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
    a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
    b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
31. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	6
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65%	5
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

https://jdih.pemalangkab.go.id

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
		>75%	6
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0

https://jdih.pemalangkab.go.id

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tangga		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4

https://jdih.pemalangkab.go.id

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Lingkungan		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7

https://jdih.pemalangkab.go.id

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

https://jdih.pemalangkab.go.id

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20%	15
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20%	15

https://jdih.pemalangkab.go.id

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
		>20%	6
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20%	4
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20%	4
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	7
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	7
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	6
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	1

https://jdih.pemalangkab.go.id

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Pengaman		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65%	4
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65%	4
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	13
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	13
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

32. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
33. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

34. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya

https://jdih.pemalangkab.go.id

35. dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP

1. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
   a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
   b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
      1) penambahan;
      2) pelepasan;
      3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
      4) mutasi aset tetap lainnya.
   c. Informasi penyusutan, meliputi:
      1) Nilai penyusutan;
      2) Metode penyusutan yang digunakan;
      3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
      4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
   a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
   b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
   c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
   d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

E. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
3. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
   Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
   a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
   b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
6. Pengukuran dan pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar biaya perolehan.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
   a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut.

https://jdih.pemalangkab.go.id

8. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
   Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
   b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
   c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
   d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
   e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
   f. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
      1) Asuransi
      2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
      3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
9. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan
   Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan dineraca dalam kelompok aset tetap.
2. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
   b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
   c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
   d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
   e. Retensi.

4.3.9 DANA CADANGAN

A. DEFINISI DANA CADANGAN

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id

peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

3. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

B. PENGAKUAN DANA CADANGAN

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

C. PENGUKURAN DANA CADANGAN

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
3. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA CADANGAN

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.10 PROPERTI INVESTASI

A. DEFINISI

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:
   a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
   b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
   c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
   d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
   2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

B. PROPERTI INVESTASI

1. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
   a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
   b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
2. Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
3. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
4. Berikut ini adalah contoh properti investasi:
   a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
   b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
   c. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
   a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
   b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
   c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
   d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
   e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
   f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
   g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
6. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
   a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
   b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
7. Pemerintah daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
8. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan

https://jdih.pemalangkab.go.id

ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.

9. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

C. PENGAKUAN

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
   a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
   b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan properti investasi, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

https://jdih.pemalangkab.go.id

D. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi nonpertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya- biaya di bawah ini:
   a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
   b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
   c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
7. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
8. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
9. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

10. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
    a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
    b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
11. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

E. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
    b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
    c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

F. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

1. Properti investasi disajikan sebagai aset nonlancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

G. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. metode penyusutan yang digunakan;
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
   a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
   b. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
   c. pelepasan;
   d. penyusutan;
   e. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
   f. perubahan lain.
6. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal- hal sebagai berikut:
   a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   c. tanggal efektif penilaian kembali;
   d. nilai tercatat sebelum revaluasi;
   e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
   f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
10. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

https://jdih.pemalangkab.go.id

11. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
    a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
    c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
    a. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
    b. informasi lain terkait dengan properti investasi.

H. ALIHGUNA

1. Alihguna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

2. Pemerintah daerah mengalih gunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
    a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
    b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
    c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. Alihguna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.

5. Alihguna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alihguna.

I. PELEPASAN

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
   a. pelepasan; atau
   b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
   c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non-Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

J. KETENTUAN TRANSISI

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3.11 ASET LAINNYA

A. DEFINISI ASET LAINNYA

1. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
   a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
   b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
   c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
   d. Aset Tidak Berwujud;
   e. Aset Lain-lain.

B. PENGAKUAN ASET LAINNYA

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

C. PENGUKURAN ASET LAINNYA

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET LAINNYA

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

E. RINCIAN ASET LAINNYA

1. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

a. Definisi Tagihan Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah tagihan atas penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
b. Pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan aset tetap terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan aset tetap.
c. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
d. Penyajian Tagihan Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran disajikan di Neraca pada kelompok aset lainnya dalam mata uang rupiah.
e. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran
   Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehubungan dengan tagihan penjualan angsuran antara lain:

https://jdih.pemalangkab.go.id

1) kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan tagihan penjualan angsuran;
2) rincian tagihan penjualan angsuran meliputi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir;
3) klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur; dan
4) informasi lain terkait tagihan penjualan angsuran.

2. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

a. Definisi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah hak/klaim pemerintah daerah sebagai hasil dari proses tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

b. Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
1) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

c. Pengukuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diukur sebesar nilai yang disepakati/ditetapkan sebagai kerugian daerah yang harus diganti oleh pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d. Penyajian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan di Neraca pada kelompok aset lainnya dalam mata uang rupiah.

e. Pengungkapan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehubungan dengan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah antara lain:
1) kebijakan akuntansi yang penting terkait tuntutan ganti kerugian daerah;
2) jumlah nilai dan rincian tuntutan ganti kerugian daerah kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah; dan
3) informasi lain terkait tuntutan ganti kerugian daerah.

3. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

a. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

b. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
1) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/ kemitraan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
3) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
5) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

c. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
1) Sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya (kemitraan dengan pihak ketiga sewa).
2) Aset Kerjasama/Kemitraan pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
3) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
4) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
5) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
6) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
7) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

8) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

d. Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
   1) Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam kemitraan pihak ketiga sewa harus dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
   2) Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga - kerja sama pemanfaatan harus dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji
   3) Bangun, guna, serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset bangun, guna serah (BGS) tersebut.
   4) Bangun, serah, guna, (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

e. Penyajian Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Kemitraan pihak ketiga disajikan dalam Neraca pada jenis aset lainnya dalam mata uang rupiah.

f. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
   1) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehubungan dengan aset kemitraan dengan pihak ketiga sewa adalah rincian jenis dan nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga - sewa serta informasi lain yang dianggap perlu.
   2) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan adalah rincian jenis dan nilai aset kemitraan dengan pihak ketigakerjasama pemanfaatan serta informasi lain yang terkait dengan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan.
   3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset kemitraan Bangun, Guna, Serah adalah rincian jenis dan nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga bangun, guna serah (BGS), kebijakan pelaksanaan bangun, guna serah (BGS) dengan pihak ketiga, serta informasi lain terkait aset kemitraan dengan pihak ketiga bangun, guna serah (BGS).
   4) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset kemitraan bangun, serah, guna adalah rincian jenis dan nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga bangun, serah, guna (BSG), kebijakan pelaksanaan bangun, serah, guna (BSG) dengan pihak ketiga, serta informasi lain terkait aset kemitraan dengan pihak ketiga bangun, serah, guna (BSG).

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. ASET TAK BERWUJUD

a. Definisi

Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

b. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

1) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu Entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai Entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
4) Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati

https://jdih.pemalangkab.go.id

tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

c. Pengakuan Aset Tidak Berwujud:
   1) pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh Entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh aset tak berwujud dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan aset tak berwujud. Manfaat sosial dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi; dan
   2) Pada saat aset tidak berwujud dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, maka aset tidak berwujud tersebut direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
   3) Jika dan hanya jika dapat diidentifikasi dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Pengukuran Aset Tidak Berwujud:
   1) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar Entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam Entitas tersebut.
   2) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
      a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
      b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
         (1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
         (2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
         (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
   a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
   b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh Entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
   c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
5) Pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi kedalam nilai Aset Tak Berwujud dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria:
   a) meningkatkan fungsi *software*;
   b) meningkatkan efisiensi *software*. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus di anggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.
6) ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:
   a) dijual;
   b) dipertukarkan;
   c) dihibahkan; atau
   d) dijadikan penyertaan modal daerah.
7) Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi

https://jdih.pemalangkab.go.id

masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah-tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

a) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
b) Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
c) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

e. Penyajian Aset Tidak Berwujud: Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan aset tak berwujud tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.
f. Pengungkapan Aset Tidak Berwujud: Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
   1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
   2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
   3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
   4) penghentian dan pelepasan aset tak berwujud;
   5) perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, dan;
   6) jika ada keberadaan aset tak berwujud yang dimiliki bersama.

5. ASET LAIN-LAIN

a. Definisi

   Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal.

b. Pengakuan Aset Lain-lain

   Aset lain-lain diakui pada saat terjadinya reklasifikasi suatu aset ke aset lain-lain berupa aset rusak berat/usang atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional /dari penggunaan aktif pemerintah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Pengukuran Aset Lain-lain
Aset lain-lain diukur sebesar nilai buku aset yang direklasifikasi ke aset lain-lain berupa aset rusak berat/usang atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.

d. Penyajian Aset Lain-lain
Aset lain-lain disajikan di Neraca pada jenis aset lainnya dalam mata uang rupiah.

e. Pengungkapan Aset Lain-lain
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset lain-lain adalah rincian jenis dan nominal aset lain-lain, faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya dan informasi relevan lain yang terkait aset lain-lain.

6. AMORTISASI ASET LAINNYA

a. Definisi
1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode Akuntansi.
2) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

b. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir periode akuntansi, saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

c. Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya
1) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
2) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
3) Apabila masa manfaat amortisasi tidak dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak maka Amortisasi aset tak berwujud ditetapkan 4 (empat) tahun.

d. Penyajian Amortisasi aset lainnya disajikan di Laporan Operasional pos beban penyusutan amortisasi dan neraca pos akumulasi amortisasi.

e. Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun Akumulasi Amortisasi yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai Beban Amortisasi.

4.3.12 KEWAJIBAN/UTANG

A. DEFINISI KEWAJIBAN

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Klasifikasi kewajiban
a. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.
c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
d. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari utang kepada pemerintah pusat, utang kepada lembaga keuangan bank (LKB), utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB), dan utang kepada masyarakat.

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Definisi
   Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
   Yang termasuk kewajiban jangka pendek, sebagai berikut:
   a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
   b. Utang Bunga;
   c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
   d. Pendapatan Diterima Dimuka;
   e. Utang Belanja;
   f. Utang Jangka Pendek Lainnya.
2. Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat:
   a. Timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran; atau
   b. penerimaan kas atas barang/jasa yang belum diserahkan; atau
   c. pengakuan belanja/beban pemerintah daerah yang belum dilakukan pembayaran; atau
   d. reklasifikasi atas bagian utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
3. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek
   a. Kewajiban Jangka Pendek diukur sebesar jumlah yang harus dibayarkan atau jumlah kas yang diterima atau jumlah belanja/beban yang diakui atau jumlah utang jangka panjang yang direklasifikasi menjadi utang jangka pendek.
   b. Kewajiban Jangka Pendek dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4. Penyajian Kewajiban Jangka Pendek
   Kewajiban Jangka Pendek disajikan di Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek dalam mata uang rupiah.
5. Pengungkapan Kewajiban Jangka Pendek
   Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Kewajiban Jangka Pendek antara lain rincian jenis kewajiban jangka pendek, jumlah nilai masing-masing jenis kewajiban jangka pendek, informasi jumlah kewajiban yang direklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs

https://jdih.pemalangkab.go.id

tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan informasi lain yang terkait kewajiban jangka pendek.

6. Rincian Kewajiban jangka Pendek
   a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
      1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
         a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS kesehatan, Taspen, dan Taperum.
         b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
      2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
         Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
      3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
         Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan
      4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
         a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
         b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
   b. Utang Bunga (*Accured Interest*)
      1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)
         Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
         Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id

beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)
   a) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.
   b) Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
   c) Utang Bunga dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca

4) Penyajian Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga disajikan pada neraca kelompok kewajiban jangka pendek.

5) Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   a) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
   b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode Akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek

5) Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang antara lain rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman, rincian utang jangka panjang, denda, dan kewajiban lainnya atas pelanggaran kontrak pinjaman jangka panjang sehingga menimbulkan *payable on demand*, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan informasi lain terkait Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dan Informasi lain terkait Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Utang Belanja

1) Definisi Utang Belanja

a) Utang Belanja adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena Entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

https://jdih.pemalangkab.go.id

b) Utang Belanja ini pada umumnya terjadi karena:
(1)Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
(2)Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada Entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
(3)Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, di mana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
(4)Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Belanja
Utang Beban diakui pada saat:
a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Belanja
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Belanja
Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya beserta informasi lain terkait utang beban diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas untuk pendapatan yang bukan menjadi hak

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemerintah daerah sampai dengan berakhirnya periode akuntansi.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya sebesar nilai kas yang tidak menjadi hak pemerintah daerah sampai dengan akhir periode Akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek lainnya disajikan dalam neraca pada kelompok kewajiban jangka pendek dan diungkapkan catatan atas laporan keuangan.

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

1. Definisi
   a. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
   b. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.
   c. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri.
2. Pengakuan kewajiban Jangka Panjang
   a. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan atas penerimaan kas atau barang/jasa pada saat ini atau pada waktu yang telah lalu.
   b. Atas bunga dari pokok kewajiban jangka panjang diakui sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
3. Pengukuran Pengakuan kewajiban Jangka Panjang
   a. Kewajiban Jangka Panjang diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah pada saat jatuh tempo.
   b. Kewajiban Jangka Panjang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca
4. Penyajian kewajiban Jangka Panjang
   a. Kewajiban Jangka Panjang disajikan di Neraca dalam mata uang rupiah.
   b. Apabila terdapat bunga atas kewajiban jangka panjang yang belum dibayarkan, maka disajikan di Neraca sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
5. Pengungkapan kewajiban Jangka Panjang
   Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Kewajiban Jangka Panjang antara lain jenis dan besaran nominal masing-masing kewajiban jangka panjang, rincian bagian kewajiban jangka panjang yang direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan informasi lain terkait Kewajiban Jangka Panjang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Rincian Kewajiban Jangka Panjang
   a. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
      1) Definisi Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
         Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua kewajiban pemerintah daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
      2) Pengakuan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
         a) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah kepada lembaga keuangan bank untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan atas penerimaan kas atau barang/jasa pada saat ini atau pada waktu yang telah lalu.
         b) Atas bunga dari pokok Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
      3) Pengukuran Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
         a) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank pada saat jatuh tempo.
         b) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
      4) Penyajian Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
         a) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank disajikan di Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Panjang dalam mata uang rupiah.
         b) Apabila terdapat bunga atas Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang belum dibayarkan, maka disajikan di Neraca sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
      5) Pengungkapan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
         Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank antara lain jenis dan besaran nominal masing-masing Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, rincian bagian lancar utang jangka panjang dari Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan informasi lain terkait Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Utang Kepada Masyarakat

1) Definisi Utang Kepada Masyarakat

Utang Kepada Masyarakat adalah semua kewajiban pemerintah daerah kepada Masyarakat yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Termasuk di dalam Utang Kepada Masyarakat adalah Utang Obligasi.

2) Pengakuan Utang Kepada Masyarakat

Utang Kepada Masyarakat diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau penjualan obligasi pemerintah daerah kepada masyarakat.

Atas bunga dari pokok Utang Kepada Masyarakat diakui sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.

3) Pengukuran Utang Kepada Masyarakat

Utang Kepada Masyarakat diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau nilai nominal obligasi atau jumlah utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada saat jatuh tempo.

4) Penyajian Utang Kepada Masyarakat

a) Utang Kepada Masyarakat disajikan di Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Panjang dalam mata uang rupiah.

b) Apabila terdapat bunga atas Utang Kepada Masyarakat yang belum dibayarkan, maka disajikan di Neraca sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.

5) Pengungkapan Utang Kepada Masyarakat

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Utang Kepada Masyarakat antara lain jenis dan besaran nominal masing-masing Utang Kepada Masyarakat, premi atau diskonto atas obligasi kepada masyarakat, rincian bagian lancar utang jangka panjang dari Utang Kepada Masyarakat yang direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek, dan informasi lain terkait Utang Kepada Masyarakat.

4.3.13 EKUITAS

A. DEFINISI EKUITAS

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

B. PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

C. PENGUKURAN EKUITAS

1. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
2. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
3. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

D. PENYAJIAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan laporan perubahan ekuitas.

E. PENGUNGKAPAN EKUITAS

Hal hal yang dapat dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dirinci sebagai berikut:

1. Informasi terkait dengan saldo awal, jumlah surplus/defisit LO;
2. Rincian atas koreksi ekuitas yang terjadi dari koreksi nilai persediaan;
3. Selisih revaluasi Aset Tetap, dan koreksi lainnya; dan
4. Informasi lain terkait dengan ekuitas.

4.3.14 PENDAPATAN

A. PENDAPATAN – LO

1. DEFINISI

a. Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non-Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
c. Pendapatan – LO terdiri dari:
   1) Pendapatan Asli Daerah – LO;
   2) Pendapatan Transfer – LO;
   3) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO;

https://jdih.pemalangkab.go.id

4) Pendapatan Non-Operasional – LO; dan
5) Pos Luar Biasa – LO.

2. PENGAKUAN

a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau;
   2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

b. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
   1) Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
   2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

d. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
   1) Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
   2) Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
   3) Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

e. Dapat diuraikan sebagai berikut :
   1) Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan–LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima
   2) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi TAK BERWUJUD penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima.
   3) Kebijakan Akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:
      a) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
         Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan Akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

b) Tidak ada dokumen penetapan
Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi Akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan Akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

c) Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

4) Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan– LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

3. PENGUKURAN PENDAPATAN – LO

a. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN – LO

Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) dengan rincian sebagai berikut :

a. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan

b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah – LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LO

1) Pendapatan Asli Daerah–LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah–LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
   a) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
   b) Pendapatan Asli Daerah–LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah–LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
   c) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode Akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, atau pun dokumen lainnya yang sah.
   d) Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan Akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode Akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang saji (*understated*) maupun lebih saji (*overstated*).
3) Pengakuan per jenis Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diuraikan sebagai berikut :
   a) Pendapatan Pajak Daerah- LO
      (1)Pendapatan Pajak Daerah yang jumlah pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan BPHTB, Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas. berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
      (2)Pendapatan Pajak Daerah yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pendapatan LO diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
   b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO
      Sesuai dengan karakteristik retribusi, secara umum pendapatan retribusi-LO diakui ketika pembayaran telah

https://jdih.pemalangkab.go.id

diterima Bendahara Penerimaan/Petugas Pemungut atau Kas Daerah kecuali untuk Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserah terimakannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD serta pengumuman pembagian laba tersebut telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan - LO
(1)Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
(2)Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi, Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan Lainnya.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

e) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

f) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO
Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

g) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LO
Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Dan diungkapkan beserta Informasi lain terkait yang dianggap perlu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

6. PENDAPATAN TRANSFER – LO

a. Definisi Pendapatan Transfer – LO
1) Pendapatan Transfer–LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2) Alokasi Pendapatan Transfer–LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian – LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer–LO
1) Pengakuan Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di SKPKD.

c. Pengukuran Pendapatan Transfer – LO
Pengukuran Pendapatan Transfer–LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

d. Penyajian Pendapatan Transfer – LO
Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

e. Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO
Rincian dari Pendapatan Transfer–LO dan informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam CaLK.

7. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO

a. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
Lain-lain Pendapatan yang Sah -LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah –LO dan Pendapatan Transfer – LO.

b. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO terdiri dari:
1) Pendapatan Hibah–LO;
2) Dana Darurat–LO;
3) Pendapatan Lainnya–LO.

c. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO
1) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD, kecuali untuk pendapatan-LO yang sumber dananya berasal non-APBD (misal dana BOS dari pusat yang melalui provinsi) pengakuan pendapatan pada saat pendapatan tersebut telah menjadi hak Pemerintah Daerah/sekolah berdasarkan dokumen yang sah.
2) Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat di terima di RKUD.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Dana Darurat–LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah.
4) Pendapatan Lainnya–LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.

d. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO
1) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
2) Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

e. Penyajian Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO.
Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

f. Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO
Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dan informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

8. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – LO

a. Definisi Pendapatan Non-Operasional – LO
1) Pendapatan Non-Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
2) Pendapatan Non-Operasional –LO terdiri dari:
a) Surplus Penjualan Aset NonLancar – LO.
b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
c) Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO.

b. Pengakuan Pendapatan Non-Operasional – LO
1) Pengakuan Pendapatan Non-Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
2) Pendapatan Non-Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset NonLancar) telah diterima.

c. Pengukuran Pendapatan Non-Operasional – LO
Pendapatan Non-Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non-Operasional – LO
Pendapatan Non-Operasional – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non-Operasional–LO dijelaskan dalam CaLK.

e. Pengungkapan Pendapatan Non-Operasional – LO
Rincian dari Pendapatan Non-Operasional – LO dan informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam CaLK.

https://jdih.pemalangkab.go.id

9. PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

a. Definisi Pendapatan Luar Biasa – LO
Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Entitas bersangkutan.

b. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa – LO
1) Pendapatan Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
2) Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh Entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode Akuntansi.

c. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa – LO
Pendapatan Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

d. Penyajian Pendapatan Luar Biasa – LO
Pendapatan Luar Biasa–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non-Operasional.

e. Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa – LO
Rincian dari Pendapatan Non-Operasional – LO dan informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam CaLK.

B. PENDAPATAN – LRA

1. DEFINISI PENDAPATAN – LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

c. Saldo Anggaran Lebih adalah jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

f. Pendapatan LRA terdiri dari:
1) Pendapatan Asli Daerah – LRA;
2) Pendapatan Transfer – LRA;
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. PENGAKUAN PENDAPATAN – LRA

a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
   1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
   2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
   3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat Entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Entitas telah diterima, dengan syarat Entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   5) Kas atas pendapatan yang diterima Entitas lain di luar Entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. PENGUKURAN PENDAPATAN – LRA

a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4. PENYAJIAN PENDAPATAN – LRA

Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. PENGUNGKAPAN PENDAPATAN – LRA

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. RINCIAN PENDAPATAN – LRA

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH–LRA

1) Definisi Pendapatan Asli Daerah–LRA

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

2) Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan RKUD.

Pendapatan JKN yang sumber dananya ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterbitkannya dokumen pengesahan pendapatan oleh BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran atau sebesar nilai penerimaan yang tercantum dalam dokumen permohonan pengesahan pendapatan yang dilaporkan SKPD penerima langsung dan telah disahkan oleh BUD.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

5) Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Rincian Pendapatan Asli Daerah–LRA dan Informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PENDAPATAN TRANSFER–LRA

1) Definisi Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan Transfer–LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2) Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA

a) Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer–LRA pada Rekening Kas

https://jdih.pemalangkab.go.id

Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

b) Pendapatan Transfer–LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

3) Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA
Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

4) Penyajian Pendapatan Transfer–LRA
Pendapatan Transfer–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

5) Pengungkapan Pendapatan Transfer–LRA
Rincian Pendapatan Transfer–LRA dan Informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH–LRA

1) Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah–LRA dan Pendapatan Transfer–LRA (dana perimbangan).

b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
(1)Pendapatan Hibah–LRA;
(2)Dana Darurat–LRA;
(3)Pendapatan Lainnya–LRA.

2) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) dan rekening bendahara Dana BOS.

b) Pendapatan BOS yang sumber dananya ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterimanya SPTMH oleh BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui oleh SKPKD.

3) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) atau sebesar nilai penerimaan yang tercantum dalam dokumen SPTMH yang dilaporkan SKPD penerima.

4) Penyajian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5) Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA dan informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.15 BEBAN, BELANJA, DAN TRANSFER DAERAH

A. BEBAN

1. DEFINISI

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
b. Beban terdiri dari :
   1) Beban Operasi;
   2) Beban Transfer;
   3) Beban Non-Operasional;
   4) Beban Luar Biasa.

2. PENGAKUAN

a. Beban dapat diakui pada saat:
   1) Timbulnya kewajiban;
   2) Terjadinya konsumsi aset; dan
   3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

   Dapat diuraikan sebagai berikut :
   1) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
   2) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
   3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

b. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

   Dapat diuraikan sebagai berikut :
   1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu. Kebijakan Akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya

https://jdih.pemalangkab.go.id

ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya.

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme SPP-GU. Perlakuan Akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan Akuntansi (accounting treatment) yang harus dilakukan.

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan Akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa belum dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pengelola Dana BOS Reguler, Dana Kapitasi JKN dan BLUD beban diakui pada saat penerbitan SP2B.

3. PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4. PENYAJIAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

5. PENGUNGKAPAN

Rincian dari Beban dan Informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. JENIS-JENIS BEBAN

a. Beban Operasi
   1) Definisi Beban Operasi
      a) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas dalam rangka kegiatan operasional Entitas agar Entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
      b) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dapat diuraikan sebagai berikut :

(1)Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.

(2)Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada nonpegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

(3)Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

(4)Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

(5)Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

(6)Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

(7)Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

(8)Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.

(9)Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

2) Pengakuan Beban Operasi

a) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

b) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.
c) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.
d) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
f) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
g) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode Akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
h) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode Akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
i) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode Akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
j) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode Akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
k) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Untuk Beban-LO yang sumber dananya berasal non-APBD (misal dana BOS dari pusat yang melalui provinsi) pengakuan beban pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga berdasarkan dokumen yang sah.

3) Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4) Penyajian Beban Operasi
Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
5) Pengungkapan Beban Operasi
Rincian dari Beban Operasi dan Informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Beban Transfer
1) Definisi Beban Transfer
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2) Pengakuan Beban Transfer
Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode Akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
3) Pengukuran Beban Transfer
Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.
4) Penyajian Beban Transfer
Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
5) Pengungkapan Beban Transfer
Rincian dari Beban Transfer dan Informasi lain terkait yang dianggap perludijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Beban Non-Operasional
1) Definisi Beban Non-Operasional
Beban Non-Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non-Operasional.
2) Pengakuan Beban Non-Operasional
a) Pengakuan Beban Non-Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
3) Pengukuran Beban Non-Operasional
Beban Non-Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban Non-Operasional diukur dengan mata uang rupiah.
4) Penyajian Beban Non-Operasional
Beban Non-Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

https://jdih.pemalangkab.go.id

5) Pengungkapan Beban Non-Operasional
Rincian dari Beban Non-Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Beban Luar Biasa

1) Definisi Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali Entitas pemerintah.

2) Pengakuan Beban Luar Biasa
Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

3) Pengukuran Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

4) Penyajian
Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional.

5) Pengungkapan Beban Luar Biasa
Rincian dari Beban Luar Biasa dan Informasi lain terkait yang dianggap perlu. dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6) Untuk beban-LO yang sumber dananya berasal Non-APBD (misal dana BOS dari pusat yang melalui provinsi) pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya sebagaimana pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan beban luar biasa-LO dan harus didukung dokumen sumber yang akurat.

B. BELANJA

1. DEFINISI

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

d. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

https://jdih.pemalangkab.go.id

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
g. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
h. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
i. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
j. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
k. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode Akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

   Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
l. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
m. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

n. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
   1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
   2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
   3) Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:	
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx
Belanja Bunga	xxx
Belanja Subsidi	xxx
Belanja Hibah	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx
Belanja Modal:	
Belanja Modal Tanah	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx
Belanja Tidak Terduga:	
Belanja Tidak Terduga	xxx
Belanja Transfer:	
Belanja Bagi Hasil	xxx
Belanja Bantuan Keuangan	xxx

2. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
d. Belanja BOS dan JKN yang sumber dananya ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterbitkannya dokumen pengesahan belanja oleh BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. PENGUKURAN

Pengukuran belanja berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan dari RKUD/Bendahara pengeluaran sesuai jumlah maksimal yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4. PENYAJIAN

a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   1) Belanja Operasi
   2) Belanja Modal
   3) Belanja Tak Terduga

   dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5. PENGUNGKAPAN

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

C. TRANSFER

1. DEFINISI

a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu Entitas Pelaporan dari/kepada Entitas Pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari Entitas Pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari Entitas Pelaporan ke Entitas Pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Entitas Pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan Entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan Entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

2. PENGAKUAN

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
   1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
   a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer
1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

3. PENGUKURAN

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer
1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4. PENYAJIAN

a. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.
Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

c. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

5. PENGUNGKAPAN

a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
   2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
   3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
   4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
   1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
   2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
   3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
   4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3.16 PEMBIAYAAN

A. DEFINISI

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan terdiri dari :
   a. Penerimaan Pembiayaan
      1) Definisi Penerimaan Pembiayaan
         a) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
         b) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai SKPKD.
      2) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
         Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
      3) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
         Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
      4) Penyajian Penerimaan Pembiayaan
         Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
      5) Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan
         a) Rincian Penerimaan Pembiayaan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
         b) Penerimaan pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
         c) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
         d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
   b. Pengeluaran Pembiayaan
      1) Definisi Pengeluaran Pembiayaan
         a) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

b) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai SKPKD.

2) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4) Penyajian Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5) Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
a) Rincian Pengeluaran Pembiayaan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
b) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
c) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh Entitas Akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan atau pengeluaran pembiayaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.3.17 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)/SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SIKPA)/SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

A. DEFINISI

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
2. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
3. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
4. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
   a. Surplus/Defisit – LRA
      Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
   b. Pembiayaan Netto
      Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
   c. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
      Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, sertapenerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
   d. Perubahan SAL
      Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
      Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

B. PENGAKUAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

1. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
2. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode Akuntansi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

4.4.1 DEFINISI

1. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan Akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan Entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.4.2 KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan Kebijakan Akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang;
   b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
   b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi

https://jdih.pemalangkab.go.id

tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
    Contoh koreksi kesalahan belanja :
    a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
    b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
    c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
11. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun

https://jdih.pemalangkab.go.id

mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

    Contoh koreksi kesalahan beban :

    a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

    a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
        1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
        2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
   1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
   2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

    a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

    Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

    a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

    Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

    a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
    Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
18. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
19. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu Entitas Pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, Kebijakan Akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran Akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis Akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan Kebijakan Akuntansi.
3. Suatu perubahan Kebijakan Akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu Kebijakan Akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Kebijakan Akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan Entitas.
4. Perubahan Kebijakan Akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
    a. adopsi suatu Kebijakan Akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
    b. adopsi suatu Kebijakan Akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan Kebijakan Akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar Akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan Kebijakan Akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Pengungkapan sebaiknya dirinci apa saja:
    a. Sifat perubahan kebijakan akuntansi;

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
c. Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
d. Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
e. Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

4.4.4 PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi Akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan Entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi Akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.4.5 OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tugas pokok dan fungsi suatu Entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya Entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
   a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh permintaan publik yang dilayani yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   b. Fungsi tersebut tetap ada.
   c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
   d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.4.6 PERISTIWA LUAR BIASA

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa Entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh Entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh Entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu Entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk Entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, Entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud

https://jdih.pemalangkab.go.id

menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban Entitas.

6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   a. Tidak merupakan kegiatan normal dari Entitas;
   b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   c. Berada di luar kendali atau pengaruh Entitas;
   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.7 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Definisi
   a. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
   b. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
      1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
      2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).
   c. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
2. Pengakuan dan Pengukuran Peristiwa setelah tanggal pelaporan
   a. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada :
      1) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
      2) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.
   b. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan, dengan contoh sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

1) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
2) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
3) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
4) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
5) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
6) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

c. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, dengan contoh sebagai berikut:
1) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
2) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.

3. Pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan
Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggungjawab mengotorisasi laporan keuangan.
4. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
5. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas

https://jdih.pemalangkab.go.id

mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

a. Sifat peristiwa; dan
b. Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

6. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
   a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
   b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
   c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
   d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
   e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontiniensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
   f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN–LRA

Pendapatan–LRA Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA, Pendapatan Transfer–LRA, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LRA, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2024 serta realisasi TA 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pendapatan Daerah LRA TA 2024 dan 2023

Pendapatan Daerah - LRA		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	417.213.761.000,00	402.958.330.520,00	96,58	363.617.077.022,00
2	Pendapatan Transfer - LRA	2.390.153.493.000,00	2.352.632.220.128,00	98,43	2.208.725.750.698,00
Jumlah		**2.807.367.254.000,00**	**2.755.590.550.648,00**	**98,16**	**2.572.342.827.720,00**

Realisasi Pendapatan Daerah–LRA TA 2024 sebesar Rp2.755.590.550.648,00 atau 98,16% dari anggarannya sebesar Rp2.807.367.254.000,00 dan 107,12% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp2.572.342.827.720,00.

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Daerah–LRA, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA TA 2024 dan 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah - LRA	123.205.300.000,00	120.978.507.825,00	98,19	116.205.661.323,00
2	Retribusi Daerah - LRA	252.906.500.000,00	239.370.082.261,00	94,65	36.963.121.727,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	26.031.761.000,00	26.031.762.403,00	100,00	23.940.780.939,00
4	Lain-lain PAD yang sah - LRA	15.070.200.000,00	16.577.978.031,00	110,01	186.507.513.033,00
Jumlah		**417.213.761.000,00**	**402.958.330.520,00**	**96,58**	**363.617.077.022,00**

Realisasi PAD - LRA TA 2024 sebesar Rp402.958.330.520,00 atau 96,58% dari anggarannya sebesar Rp417.213.761.000,00 dan 110,82% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp363.617.077.022,00.

Realisasi masing-masing jenis PAD–LRA TA 2024 dan 2023 tersaji sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.1.1.1 Pajak Daerah–LRA

Pajak Daerah berdasar Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah Kabupaten Pemalang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dengan realisasi selama TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pajak Daerah–LRA TA 2024 dan 2023

Pajak Daerah		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Hotel	600.000.000,00	600.008.196,00	100,00	630.807.498,00
2	Restoran	2.350.000.000,00	3.298.776.024,00	140,37	2.480.407.785,00
3	Hiburan	330.000.000,00	408.836.253,00	123,89	343.489.890,00
4	Reklame	1.800.000.000,00	1.838.821.283,00	102,16	1.845.830.522,00
5	Penerangan Jalan	57.000.000.000,00	58.573.203.303,00	102,76	48.884.821.760,00
6	Mineral Bukan Logam & Batuan (Pasir & Kerikil)	1.000.000.000,00	711.717.300,00	71,17	927.733.000,00
7	Parkir	160.300.000,00	86.896.040,00	54,21	144.717.921,00
8	Air Tanah	955.000.000,00	1.519.027.200,00	159,06	506.947.085,00
9	Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.700.000,00	107,00	10.000.000,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	33.000.000.000,00	27.624.741.965,00	83,71	34.370.164.539,00
11)	Bumi & Bangunan	26.000.000.000,00	26.305.780.261,00	101,18	26.060.741.323,00
Jumlah		**123.205.300.000,00**	**120.978.507.825,00**	**98,19**	**116.205.661.323,00**

Realisasi pendapatan pajak daerah-LRA TA 2024 sebesar Rp120.978.507.825,00 atau 98,19% dari anggarannya sebesar Rp123.205.300.000,00 dan 104,11% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp116.205.661.323,00.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah mengelola 11 jenis pajak daerah, dari jumlah tersebut 8 jenis pajak dapat memenuhi dan over target. Adapun realisasi pajak daerah yang pencapaiannya memenuhi over target yaitu:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Air Tanah;
7. Pajak Sarang Burung Walet; dan
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

https://jdih.pemalangkab.go.id

Sedangkan 3 jenis pajak tidak dapat memenuhi target realisasi yang pencapaiannya di bawah target yaitu:

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi capaiannya hanya mencapai 71,17% dari target. Hal ini disebabkan karena Banyak Usaha yang tidak produksi lagi;
2. Pajak Parkir realisasi capaiannya hanya mencapai 54,20% dari target. Hal ini disebabkan karena Perubahan Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah terbaru; dan
3. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasi capaiannya hanya mencapai 83,71% dari target. Hal ini disebabkan karena Perubahan Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah terbaru.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah–LRA

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi Daerah-LRA merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2024 sebesar Rp239.370.082.261,00 atau 94,65% dari anggarannya sebesar Rp252.906.500.000,00 dan 647,59% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp36.963.121.727,00.

Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang dikelola oleh 9 (sembilan) OPD yaitu:

Tabel 5.4
Daftar OPD Pengelola Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang

No	OPD	Jenis Retribusi Daerah
1	Dinkes	- Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	DPU TR	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
3	Disparpora	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	Diskoperindag	- Retribusi Pengujian Alat-alat - Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
5	Dishub	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6	Dinas Komunikas dan Informatika	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7	Dinas Pertanian	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Rumah Potong Hew an
8	Dinas Perikanan	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Hasil Tambak Dinas dan Hasil BBI) - Retribusi Tempat Pelelangan
9	Dinas Lingkungan Hidup	- Retribusi Pelayanan Persambahan/Kebersihan - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

Realisasi Retribusi Daerah selama TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

Pendapatan Retribusi Daerah		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan	229.500.000.000,00	218.384.657.616,00	95,16	16.201.303.131,00
2	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	476.500.000,00	529.063.000,00	111,03	418.654.000,00
3	Pemakaman & Pengabuan Mayat	-	-		7.100.000,00
4	Parkir Tepi Jalan Umum	650.000.000,00	626.755.000,00	96,42	552.888.000,00
5	Pelayanan Pasar (Los)	11.000.000.000,00	9.340.702.202,00	84,92	9.176.760.430,00
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-		515.505.000,00
7	Penyediaan/Penyedotan Kakus	-	-		7.800.000,00
8	JU Pemakaian Kekayaan Daerah	555.000.000,00	369.870.117,00	66,64	573.461.228,00
9	JU Tempat Pelelangan	4.000.000.000,00	2.726.817.826,00	68,17	3.530.445.778,00
10	JU Terminal	-	-		311.216.000,00
11	JU Rumah Potong Hew an	75.000.000,00	78.588.000,00	104,78	56.988.000,00
12	JU Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.050.000.000,00	1.385.171.000,00	45,42	1.089.135.550,00
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.600.000.000,00	5.928.457.500,00	164,68	4.409.127.110,00
14	Ijin Trayek	-	-		8.552.000,00
15	Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-		104.185.500,00
Jumlah		**252.906.500.000,00**	**239.370.082.261,00**	**94,65**	**36.963.121.727,00**

Tabel 5.6
Rincian Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

Pendapatan Retribusi Daerah		2024			2023	Kenaikan/Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Retribusi Jasa Umum :						
1	Pelayanan Kesehatan	229.500.000.000,00	218.384.657.616,00	95,16	16.201.303.131,00	202.183.354.485,00
2	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	476.500.000,00	529.063.000,00	111,03	418.654.000,00	110.409.000,00
3	Pemakaman & Pengabuan Mayat	-	-		7.100.000,00	(7.100.000,00)
4	Parkir Tepi Jalan Umum	650.000.000,00	626.755.000,00	96,42	552.888.000,00	73.867.000,00
5	Pelayanan Pasar (Los)	11.000.000.000,00	9.340.702.202,00	84,92	9.176.760.430,00	163.941.772,00
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-		515.505.000,00	(515.505.000,00)
7	Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	125,39	104.185.500,00	(104.185.500,00)
8	Penyediaan/Penyedotan Kakus	-	-		7.800.000,00	(7.800.000,00)
Retribusi Jasa Usaha :						
1	JU Pemakaian Kekayaan Daerah	555.000.000,00	369.870.117,00	66,64	573.461.228,00	(203.591.111,00)
2	JU Tempat Pelelangan	4.000.000.000,00	2.726.817.826,00	68,17	3.530.445.778,00	(803.627.952,00)
3	JU Terminal	-	-		311.216.000,00	(311.216.000,00)
4	JU Rumah Potong Hew an	75.000.000,00	78.588.000,00	104,78	56.988.000,00	21.600.000,00
5	JU Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.050.000.000,00	1.385.171.000,00	45,42	1.089.135.550,00	296.035.450,00
Retribusi Perizinan Tertentu:						
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.600.000.000,00	5.928.457.500,00	164,68	4.409.127.110,00	1.519.330.390,00
2	Ijin Trayek	-	-		8.552.000,00	(8.552.000,00)
Jumlah		**252.906.500.000,00**	**239.370.082.261,00**	**94,65**	**36.963.121.727,00**	**202.406.960.534,00**

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 mencapai 94,65% dari target. Realisasi tersebut naik 647,59% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pemalang mengelola 9 jenis retribusi. Dari jumlah tersebut, 4 jenis retribusi dapat terpenuhi dan *over target*, yaitu:

https://jdih.pemalangkab.go.id

1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan realisasi sebesar 113,03% dan mengalami kenaikan 30,13% dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.
2) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan dengan realisasi sebesar 113,36% dan mengalami kenaikan 15,86% dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.
3) Retribusi Rumah Potong Hewan dengan realisasi sebesar 104,76% dan mengalami kenaikan 37,87% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun sebelumnya.
4) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan realisasi sebesar 164,68% dan mengalami kenaikan sebesar 34,46% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target namun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya adalah:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan capaian realisasi sebesar 89,16% namun jika dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 1.262,97% hal ini karena adanya perubahan dari Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang semua merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah menjadi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2) Retribusi pelayanan pasar dengan realisasi sebesar 84,92% jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kanaikan sebesar 1,79%.
3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan capaian sebesar 45,42% namun jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 27,18%.

Jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya adalah :

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan capaian sebesar 66,64% dan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 35,5% hal ini dikarenakan adanya aset-aset daerah yang tidak lagi dapat dipungut retribusinya diantaranya Pemakaman dan sedot WC.
2) Retribusi Tempat Pelelangan dengan capaian sebesar 68,17% dan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 22,76%.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah. Laba yang dibagihasilkan merupakan perolehan laba tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp26.031.762.403,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp26.031.761.000,00 dan 108,73% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp23.940.946.000,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan ini bersumber dari bagi hasil atas penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Pemalang pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan ini mencapai 100% dari target dan meningkat 108,73% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023.

Adapun realisasinya pada TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagian Laba PD Air Minum (PDAM)	3.647.817.000,00	3.647.817.508,00	100,00	3.323.895.719,00
2	Bagian Laba pada Lembaga Keuangan	22.383.944.000,00	22.383.944.895,00	100,00	20.616.885.220,00
	a) Bagian Laba PD Bank Pemalang	-	-		*61.999.746,00*
	b) Bagian Laba BPD Jateng	*21.778.360.000,00*	*21.778.360.610,00*	100,00	*19.930.598.663,00*
	c) BPR-BKK Taman	*496.417.000,00*	*496.416.508,00*	100,00	*508.594.232,00*
	d) Perseroda LKM BKD	*109.167.000,00*	*109.167.777,00*	100,00	*115.692.579,00*
Jumlah		**26.031.761.000,00**	**26.031.762.403,00**	**100,00**	**23.940.780.939,00**

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah–LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah - LRA merupakan PAD yang bersumber dari selain pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan realisasi selama TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.8
Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

Lain-lain PAD Yang Sah		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	1.400.000.000,00	1.530.473.812,00	109,32	963.801.179,00
2	Penerimaan bunga deposito	5.000.000.000,00	6.305.624.046,00	126,11	7.199.857.759,00
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	50.410.000,00	90.824.372,00	180,17	68.544.121,00
4	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	-	-		146.747.389,00
5	Pendapatan dari pengembalian	2.898.980.000,00	2.552.936.792,00	88,06	2.602.869.804,00
6	Pendapatan Denda Reklame	-	3.638.212,00		16.405.046,00
7	Pendapatan Denda PBB	300.000.000,00	506.528.580,00	168,84	741.487.261,00
8	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	4.884.604,00		5.115.574,00
9	Pendapatan Denda Pajak Restoren	-	5.278.377,00		9.824.759,00
10	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	1.428.304,00		1.441.709,00
11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	569.194,00		2.248.206,00
12	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	10.210.847,00		11.954.900,00
13	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	-	883.144,00		1.332.032,00
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-		123.000.000,00
15	Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-		115.351.533.501,00
16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Pendapatan Sewa BMD)	4.670.200.000,00	4.346.621.414,00	93,07	-
17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-		50.817.300.028,00
18	Hasil Penjualan Tanah	-	-		1.325.314.300,00
19	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	635.670.000,00	317,84	789.296.500,00
20	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	550.610.000,00	582.406.333,00	105,77	55.716.000,00
21	Haail Penjualan Aset tetap lainnya	-	-		9.299.000,00
22	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dpisahkan	-	-		6.264.423.965,00
Jumlah		**15.070.200.000,00**	**16.577.978.031,00**	**110,01**	**186.507.513.033,00**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp16.577.978.031,00 atau 110,01% dari anggarannya sebesar Rp15.070.200.000,00 dan 9% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp186.507.513.033,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.1.2 Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp2.352.632.220.128,00 atau 98,43% dari anggarannya sebesar Rp2.390.153.493.000,00 dan 106,52% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp2.208.725.750.698,00.

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer-LRA TA 2024 dan 2023

Pendapatan Transfer - LRA		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.881.195.824.000,00	1.869.980.690.410,00	99,40	1.746.347.989.883,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	271.871.079.000,00	271.871.079.000,00	100,00	267.910.752.760,00
3	Transfer Pemerintahan Daerah Lainnya - LRA	217.827.830.000,00	191.738.404.378,00	88,02	185.308.688.272,00
4	Bantuan Keuangan - LRA	19.258.760.000,00	19.042.046.340,00	98,87	9.158.319.783,00
Jumlah		**2.390.153.493.000,00**	**2.352.632.220.128,00**	**98,43**	**2.208.725.750.698,00**

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat–LRA

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.10
Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2024 dan 2023

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LRA	30.859.145.000,00	31.100.745.000,00	100,78	30.912.318.834,00
2	Bagi Hasil SDA - LRA	2.286.964.000,00	2.324.683.000,00	101,65	3.488.565.979,00
3	Dana Alokasi Umum - LRA	1.265.304.393.000,00	1.265.304.393.000,00	100,00	1.178.380.360.243,00
4	Dana Alokasi Khusus - LRA	582.745.322.000,00	571.250.869.410,00	98,03	533.566.744.827,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		**1.881.195.824.000,00**	**1.869.980.690.410,00**	**99,40**	**1.746.347.989.883,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp1.869.980.690.410,00 atau 99,40% dari anggaran Rp1.881.195.824.000,00 dan 107,08% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.746.347.989.883,00. Adapun penjelasan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Bagi Hasil Pajak TA 2024 realisasi sebesar Rp31.100.745.000,00 atau 100,78% dari anggarannya sebesar Rp30.859.145.000,00 dan 100,61% dari realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2023 realisasi sebesar Rp30.912.318.834,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024 dan 2023

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari PBB	6.890.520.000,00	4.577.592.000,00	66,43	3.554.060.471,00
2	Bagi Hasil dari PPh Ps.25 dan Ps.29 WP orang pribadi dalam negeri	11.232.977.000,00	685.051.000,00	6,10	865.656.394,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	12.735.648.000,00	13.014.967.000,00	102,19	13.932.025.998,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan [PPh] Pasal 21	-	12.823.135.000,00		12.560.575.971,00
Jumlah		**30.859.145.000,00**	**31.100.745.000,00**	**100,78**	**30.912.318.834,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) TA 2024 realisasi sebesar Rp2.324.683.000,00 atau 101,65% dari anggarannya sebesar Rp2.286,964.000,00 sedangkan Bagi Hasil SDA TA 2023 realisasi sebesar Rp3.488.565.979,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024 dan 2023

Pendapatan Bagi Hasil SDA - LRA		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan	874.492.000,00	874.492.000,00	100,00	1.574.809.845,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.277.099.000,00	1.277.099.000,00	100,00	1.770.547.861,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	100.799.000,00	50.999.000,00	50,59	16.756.146,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	-	83.687.000,00		112.612.195,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	31.392.000,00	34.797.000,00	110,85	12.628.071,00
6	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara	3.182.000,00	3.609.000,00	113,42	1.211.861,00
Jumlah		**2.286.964.000,00**	**2.324.683.000,00**	**101,65**	**3.488.565.979,00**

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 realisasi Rp1.265.304.393.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.265.304.393.000,00 sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 realisasi Rp1.178.380.360.243,00.

Tabel 5.13
Pendapatan DAU-LRA TA 2024 dan 2023

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	DAU	1.046.268.439.000,00	1.046.268.439.000,00	100,00	1.120.907.802.243,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	100,00	2.200.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	36.658.872.000,00	36.658.872.000,00	100,00	55.272.558.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pend	139.846.075.000,00	139.846.075.000,00	100,00	-
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kese	26.634.226.000,00	26.634.226.000,00	100,00	-
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Peke	13.696.781.000,00	13.696.781.000,00	100,00	-
Jumlah		**1.265.304.393.000,00**	**1.265.304.393.000,00**	**100,00**	**1.178.380.360.243,00**

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 realisasi sebesar Rp571.250.869.410,00 atau 98,03% dari anggaran Rp582.745.322.000,00 sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023 realisasi sebesar Rp533.566.744.827,00 dengan rincian sebagai berikut:

- DAK Fisik realisasinya TA 2024 realisasinya sebesar Rp102.178.208.438,00 dari anggaran sebesar Rp110.173.816.000,00 sedangkan DAK Fisik realisasinya TA 2023 sebesar Rp91.392.948.645,00.
- DAK Non Fisik TA 2024 realisasinya sebesar Rp469.072.660.972,00 dari anggaran sebesar Rp472.571.506.000,00 sedangkan DAK Non Fisik TA 2023 realisasinya sebesar Rp442.173.796.182,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.14
Pendapatan DAK-LRA TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024(Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Dana Alokasi Khusus	**582.745.322.000,00**	**571.250.869.410,00**	**98,03**	**533.566.744.827,00**
A	**DAK Fisik**	**110.173.816.000,00**	**102.178.208.438,00**	**92,74**	**91.392.948.645,00**
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler PAUD	1.800.412.000,00	1.493.120.672,00	82,93	728.074.935,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SD	16.649.247.000,00	13.753.011.442,00	82,60	1.359.695.000,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SMP	4.415.288.000,00	3.717.940.800,00	84,21	4.793.249.955,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	261.855.000,00	255.157.317,00	97,44	-
5	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler Pengendalian Penyakit	-	-		2.103.000.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.345.717.000,00	6.978.064.359,00	95,00	-
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI-AKB	7.101.224.000,00	6.493.695.600,00	91,44	8.910.510.000,00
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Sistem Kesehatan	21.605.907.000,00	20.817.931.706,00	96,35	18.692.401.545,00
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler KB	415.460.000,00	404.032.460,00	97,25	1.455.800.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.045.623.000,00	6.016.510.754,00	99,52	9.699.783.985,00
11	DAK Fisik Penugasan Kelautan dan Perikanan	5.407.770.000,00	5.074.682.771,00	93,84	5.690.426.725,00
12	DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.416.168.000,00	7.394.374.400,00	99,71	24.217.911.000,00
14	DAK Fisik Penugasan Air Minum	12.918.734.000,00	11.665.367.150,00	90,30	7.145.450.500,00
15	DAK Fisik Penugasan Sanitasi	7.327.343.000,00	7.327.343.000,00	100,00	5.936.575.000,00
16	DAK Fisik Bidang Irigasi - Penugasan	11.463.068.000,00	10.786.976.007,00	94,10	660.070.000,00
B	**DAK Non Fisik**	**472.571.506.000,00**	**469.072.660.972,00**	**99,26**	**442.173.796.182,00**
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	215.210.980.000,00	215.210.980.000,00	100,00	206.545.952.982,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	6.350.706.000,00	6.350.706.000,00	100,00	3.962.241.500,00
3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	-	-		20.482.800.000,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	6.447.100.000,00	6.326.040.000,00	98,12	4.766.923.000,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - BOK	35.196.696.000,00	32.543.755.567,00	92,46	16.589.229.894,00
6	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	490.631.000,00	-	-	-
7	DAK Non Fisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal	580.092.000,00	580.092.000,00	100,00	330.305.000,00
8	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.041.150.000,00	1.041.099.800,00	100,00	435.799.485,00
9	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - Bantuan Operasional KB (BOKB)	13.219.951.000,00	13.103.310.564,00	99,12	13.883.970.700,00
10	DAK Non Fisik BOS Reguler	-	-		170.443.922.621,00
11	DAK Non Fisik PK2UM	-	-		445.151.000,00
12	DAK Non Fisik BOS Kinerja	-	-		4.287.500.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	170.276.700.000,00	170.208.929.041,00	99,96	-
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.837.500.000,00	3.837.500.000,00	100,00	-
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	19.920.000.000,00	19.870.248.000,00	99,75	-

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA berupa Dana Penyesuaian terdiri dari Dana Desa dan Dana Insentif Daerah, dengan realisasi dalam TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2024 dan 2023

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Desa	266.151.514.000,00	266.151.514.000,00	100,00	261.275.195.760,00
2	Insentif Fiskal	5.719.565.000,00	5.719.565.000,00	100,00	6.635.557.000,00
Jumlah		**271.871.079.000,00**	**271.871.079.000,00**	100,00	**267.910.752.760,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian TA 2024 sebesar Rp271.871.079.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp271.871.079.000,00 dan 101,48% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp267.910.752.760,00.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LRA berasal dari Pemerintah Provinsi berupa Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA 2024 sebesar Rp191.738.404.378,00 atau 88,02% dari anggaran sebesar Rp217.827.830.000,00 dan 103,47% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp185.308.688.272,00.

Tabel 5.16
Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2024 dan 2023

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	59.080.546.000,00	41.138.706.115,00	69,63	44.647.048.422,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	29.349.608.000,00	25.310.027.122,00	86,24	26.179.119.798,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	49.065.739.000,00	48.718.257.994,00	99,29	43.266.505.801,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP)	140.261.000,00	152.105.550,00	108,44	128.164.823,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	80.191.676.000,00	76.419.307.597,00	95,30	71.087.849.429,00
Jumlah		**217.827.830.000,00**	**191.738.404.378,00**	**88,02**	**185.308.688.273,00**

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan–LRA

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2024 sebesar Rp19.042.046.340,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp19.258.760.000,00 dan 207,92% dari Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp9.158.319.783,00.

Tabel 5.17
Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

Bantuan Keuangan		2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	TMMD	920.000.000,00	920.000.000,00	100,00	685.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Provinsi Bid Pendidikan	-	-		473.500.583,00
3	Bantuan Keuangan Provinsi Sapras	-	-		7.999.819.200,00
4	Penanggulangan Masalah Gizi (PMG)	8.248.989.000,00	8.248.989.000,00	100,00	-
5	Bantuan Sarpras Kesehatan	10.000.000.000,00	9.867.915.340,00	98,68	-
6	SPPD	89.771.000,00	5.142.000,00	5,73	-
Jumlah		**19.258.760.000,00**	**19.042.046.340,00**	**98,87**	**9.158.319.783,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.2 BELANJA

Belanja dan Transfer Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.797.563.975.972,00 dari anggaran sebesar Rp3.001.406.468.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18
Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Daerah	2.561.944.824.000,00	2.358.230.731.972,00	92,05	2.108.583.684.072,00
2	Transfer Daerah	439.461.644.000,00	439.333.244.000,00	99,97	430.716.395.360,00
Jumlah		3.001.406.468.000,00	2.797.563.975.972,00	93,21	2.539.300.079.432,00

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Pada TA 2024 dan 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang terdapat 41 OPD, dimana Kepala OPD berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.19
Belanja Daerah TA 2024 dan 2023

Belanja Daerah		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	2.367.480.276.291,00	2.175.975.811.564,00	91,91	1.890.948.953.345,00
2	Belanja Modal	192.492.047.709,00	180.988.417.949,00	94,02	217.207.125.026,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	64,21	427.605.701,00
Jumlah		2.561.944.824.000,00	2.358.230.731.972,00	92,05	2.108.583.684.072,00

Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp2.358.230.731.972,00 atau 92,05% dari anggaran sebesar Rp2.561.944.824.000,00 dan 111,84% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp2.108.583.684.072,00.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang bermanfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.20
Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

Belanja Operasi		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.452.801.288.790,00	1.302.143.148.625,00	89,63	1.113.196.374.159,00
2	Belanja Barang	751.061.378.291,00	714.049.430.646,00	95,07	667.795.423.023,00
3	Belanja Hibah	153.666.629.210,00	150.235.584.293,00	97,77	101.019.252.163,00
4	Belanja Bantuan Sosial	9.950.980.000,00	9.547.648.000,00	95,95	8.937.904.000,00
Jumlah		2.367.480.276.291,00	2.175.975.811.564,00	91,91	1.890.948.953.345,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp2.175.975.811.564,00 atau 91,91% dari anggaran Rp2.367.480.276.291,00 dan 115,07% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.890.948.953.345,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.302.143.148.625,00 atau 89,63% dari anggaran sebesar Rp1.452.801.288.790,00 dan 116,97% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.113.196.374.159,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.302.143.148.625,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja pegawai OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

Belanja Pegawai		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	858.200.453.721,00	742.658.256.753,00	86,54	673.918.703.800,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	138.057.693.000,00	124.668.447.396,00	90,30	132.199.270.278,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	287.583.278.611,00	283.338.798.656,00	98,52	210.084.545.339,00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.737.858.000,00	27.278.480.541,00	98,34	27.480.182.850,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	699.939.250,00	516.235.056,00	73,75	1.124.594.110,00
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	621.600.000,00	72,96	672.000.000,00
7	Pegawai BLUD	139.670.066.208,00	123.061.330.223,00	88,11	67.717.077.782,00
Jumlah		1.452.801.288.790,00	1.302.143.148.625,00	89,63	1.113.196.374.159,00

Rincian Belanja Pegawai dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Penggunaan Belanja Pegawai TA 2024

No	OPD	Realisasi Belanja Pegawai				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOS/BOK/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Dindikbud	813.408.687.110,00	2.021.443.923,00	-	-	815.430.131.033,00
2	Dinkes	110.720.618.501,00	295.009.831,00	111.577.847.177,00	11.483.483.046,00	234.076.958.555,00
3	DPU & PR	14.302.350.376,00	463.620.284,00	-	-	14.765.970.660,00
4	Disperkim	4.437.607.746,00	164.530.700,00	-	-	4.602.138.446,00
5	Satpol PP	7.292.656.405,00	265.268.612,00	-	-	7.557.925.017,00
6	BPBD	3.396.105.622,00	113.319.589,00	-	-	3.509.425.211,00
7	Dinsos-PPKBPPPA	4.443.046.084,00	159.639.742,00	-	-	4.602.685.826,00
8	Disnaker	3.492.727.590,00	158.829.486,00	-	-	3.651.557.076,00
9	DLH	13.423.062.739,00	327.355.153,00	-	-	13.750.417.892,00
10	Disdukcatpil	4.166.653.398,00	172.862.050,00	-	-	4.339.515.448,00
11	Dinpermasdes	3.780.656.422,00	155.140.744,00	-	-	3.935.797.166,00
12	Dishub	8.004.419.197,00	262.333.489,00	-	-	8.266.752.686,00
13	Diskominfo	5.029.020.655,00	182.797.868,00	-	-	5.211.818.523,00
14	Diskoperindag	17.587.369.375,00	474.187.430,00	-	-	18.061.556.805,00
15	DPMPTP	2.974.573.711,00	131.468.399,00	-	-	3.106.042.110,00
16	Dinpusarda	2.693.809.536,00	113.102.033,00	-	-	2.806.911.569,00
17	Disperik	4.650.266.877,00	168.845.401,00	-	-	4.819.112.278,00
18	Disparpora	5.907.304.135,00	222.357.849,00	-	-	6.129.661.984,00
19	Dispertan	12.875.018.100,00	428.285.778,00	-	-	13.303.303.878,00
20	Setda	18.742.260.027,00	794.525.209,00	-	-	19.536.785.236,00
21	Setwan	32.342.709.277,00	164.830.142,00	-	-	32.507.539.419,00
22	Bappeda	4.738.815.892,00	192.489.748,00	-	-	4.931.305.640,00
23	BPKAD	5.472.326.976,00	206.410.008,00	-	-	5.678.736.984,00
24	Bapenda	9.768.888.442,00	237.728.448,00	-	-	10.006.616.890,00
25	BKD	6.011.922.252,00	216.984.892,00	-	-	6.228.907.144,00
26	Inspektorat	6.989.861.898,00	315.527.482,00	-	-	7.305.389.380,00
27	Kec. Moga	1.604.755.723,00	60.869.372,00	-	-	1.665.625.095,00
28	Kec. Pulosari	1.870.150.243,00	67.349.818,00			1.937.500.061,00
29	Kec. Belik	1.805.673.006,00	69.782.492,00			1.875.455.498,00
30	Kec. Watukumpul	1.665.179.662,00	68.882.656,00			1.734.062.318,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	OPD	Realisasi Belanja Pegawai				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOS/BOK/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
31	Kec. Bodeh	2.186.349.589,00	81.725.310,00	-	-	2.268.074.899,00
32	Kec. Bantarbolang	1.972.769.463,00	63.613.729,00	-	-	2.036.383.192,00
33	Kec. Randudongkal	2.074.287.411,00	72.270.512,00	-	-	2.146.557.923,00
34	Kec. Pemalang	10.498.238.666,00	409.862.728,00	-	-	10.908.101.394,00
35	Kec. Taman	4.294.615.347,00	182.300.701,00	-	-	4.476.916.048,00
36	Kec. Petarukan	2.887.429.969,00	116.851.386,00	-	-	3.004.281.355,00
37	Kec. Ampelgading	1.939.094.929,00	74.118.218,00	-	-	2.013.213.147,00
38	Kec. Comal	3.124.360.306,00	115.867.216,00	-	-	3.240.227.522,00
39	Kec. Ulujami	1.856.897.994,00	75.095.277,00	-	-	1.931.993.271,00
40	Kec. Warungpring	2.081.022.130,00	56.923.527,00	-	-	2.137.945.657,00
41	Bakesbangpol	2.549.305.630,00	94.542.759,00	-	-	2.643.848.389,00
	Jumlah	1.169.062.868.411,00	10.018.949.991,00	111.577.847.177,00	11.483.483.046,00	1.302.143.148.625,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.302.143.148.625,00 terdiri dari:

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp1.179.081.818.402,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2024 sebesar Rp1.169.062.868.411,00;
  - Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya sebesar Rp10.018.949.991,00 berupa pembayaran atas TPP Bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada Januari 2024, terdiri dari:
    - ✓ Iuran Asuransi Kesehatan untuk TPP sebesar Rp371.307.240,00; dan
    - ✓ TPP sebesar Rp9.647.642.751,00.
- melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp123.061.330.223,00 yaitu Belanja Pegawai BLUD pada Dinkes berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2024 sebesar Rp111.577.847.177,00;
  - Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya sebesar Rp11.483.483.046,00 berupa pembayaran atas Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2023 yang dibayarkan pada Tahun 2024.

Kondisi kepegawaian dan anggota DPRD di Kabupaten Pemalang pada Desember 2024 terdiri dari 10.873 ASN terdiri dari: 7.724 PNS; 3.149 PPPK serta 50 Anggota DPRD.

5.1.2.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp714.049.430.646,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp751.061.378.291,00 dan 106,93% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp667.795.423.023,00. Realisasi Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp714.049.430.646,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja barang seluruh OPD, dengan rincian sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.23
Belanja Barang TA 2024 dan 2023

Belanja Barang		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	109.655.628.425,03	101.980.355.512,00	93,00	93.739.020.194,00
2	Belanja Jasa	247.041.592.635,00	237.343.159.071,00	96,07	260.724.369.060,00
3	Belanja Pemeliharaan	89.214.628.733,00	87.727.849.385,00	98,33	63.457.481.471,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	57.284.984.769,97	51.594.058.552,00	90,07	47.616.822.861,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa unuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	30.876.450.000,00	29.425.862.861,00	95,30	16.509.701.641,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	129.498.566.129,00	127.785.546.692,00	98,68	127.114.256.419,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.489.527.599,00	78.192.598.573,00	89,37	58.633.771.377,00
Jumlah		751.061.378.291,00	714.049.430.646,00	95,07	667.795.423.023,00

Rincian Belanja Barang dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rincian Penggunaan Belanja Barang TA 2024

No	OPD	Realisasi Belanja Barang				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOK/BOS/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Dindikbud	38.253.083.375,00	15.157.243,00	127.785.746.692,00	-	166.053.987.310,00
2	Dinkes	116.388.285.197,00	2.086.274.079,00	78.624.174.365,00	16.745.661.498,00	213.844.395.139,00
3	DPU & PR	92.586.720.613,00	31.648.114,00	-	-	92.618.368.727,00
4	Disperkim	31.990.496.783,00	1.499.585.745,00	-	-	33.490.082.528,00
5	Satpol PP	6.275.294.257,00	13.665.935,00	-	-	6.288.960.192,00
6	BPBD	4.051.279.753,00	10.890.782,00	-	-	4.062.170.535,00
7	Dinsos-PPKBPPPA	25.929.239.662,00	22.237.428,00	-	-	25.951.477.090,00
8	Disnaker	5.387.173.717,00	13.572.719,00	-	-	5.400.746.436,00
9	DLH	12.761.767.082,00	14.167.623,00	-	-	12.775.934.705,00
10	Disdukcatpil	3.359.396.828,00	32.824.991,00	-	-	3.392.221.819,00
11	Dinpermasdes	6.933.733.611,00	7.778.142,00	-	-	6.941.511.753,00
12	Dishub	4.842.171.401,00	28.440.207,00	-	-	4.870.611.608,00
13	Diskominfo	8.368.450.964,00	27.983.821,00	-	-	8.396.434.785,00
14	Diskoperindag	8.727.429.901,00	38.280.000,00	-	-	8.765.709.901,00
15	DPMPTP	2.542.001.715,00	11.956.358,00	-	-	2.553.958.073,00
16	Dinpusarda	2.064.671.363,00	7.699.203,00	-	-	2.072.370.566,00
17	Disperik	4.053.909.132,00	16.713.897,00	-	-	4.070.623.029,00
18	Disparpora	10.460.773.303,00	38.351.653,00	-	-	10.499.124.956,00
19	Dispertan	9.770.447.053,00	13.061.912,00	-	-	9.783.508.965,00
20	Setda	17.612.208.835,00	78.242.100,00	-	-	17.690.450.935,00
21	Setwan	24.688.414.294,00	57.752.610,00	-	-	24.746.166.904,00
22	Bappeda	5.586.254.064,00	16.276.943,00	-	-	5.602.531.007,00
23	BPKAD	5.560.905.616,00	10.440.383,00	-	-	5.571.345.999,00
24	Bapenda	3.498.211.244,00	12.026.150,00	-	-	3.510.237.394,00
25	BKD	6.952.904.513,00	21.824.501,00	-	-	6.974.729.014,00
26	Inspektorat	5.463.896.833,00	9.147.007,00	-	-	5.473.043.840,00
27	Kec. Moga	801.384.354,00	1.851.646,00	-	-	803.236.000,00
28	Kec. Pulosari	843.218.327,00	2.152.207,00	-	-	845.370.534,00
29	Kec. Belik	834.933.746,00	1.481.644,00	-	-	836.415.390,00
30	Kec. Watukumpul	845.379.743,00	1.789.873,00	-	-	847.169.616,00
31	Kec. Bodeh	815.411.266,00	5.208.734,00	-	-	820.620.000,00
32	Kec. Bantarbolang	824.984.750,00	2.571.000,00	-	-	827.555.750,00
33	Kec. Randudongkal	868.852.525,00	3.329.708,00	-	-	872.182.233,00
34	Kec. Pemalang	5.083.058.041,00	10.403.394,00			5.093.461.435,00
35	Kec. Taman	2.082.087.476,00	5.718.085,00			2.087.805.561,00
36	Kec. Petarukan	1.824.975.994,00	5.353.666,00			1.830.329.660,00
37	Kec. Ampelgading	829.585.484,00	1.754.516,00			831.340.000,00
38	Kec. Comal	1.438.904.805,00	2.982.245,00			1.441.887.050,00
39	Kec. Ulujami	861.920.794,00	4.109.055,00			866.029.849,00
40	Kec. Warungpring	691.758.754,00	1.432.946,00			693.191.700,00
41	Bakesbangpol	3.947.789.682,00	4.342.976,00			3.952.132.658,00
		486.703.366.850,00	**4.190.481.241,00**	**206.409.921.057,00**	**16.745.661.498,00**	**714.049.430.646,00**

Realisasi Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp714.049.430.646,00 terdiri dari:

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp490.893.848.091,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2024 sebesar Rp486.703.366.850,00;
  - Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Barang tahun sebelumnya sebesar Rp4.190.481.241,00 berupa pembayaran atas Jasa Kantor bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada Januari 2024, terdiri dari:
    - ✓ Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp29.377.418,00;
    - ✓ Belanja Tagihan Air sebesar Rp31.734.200,00;
    - ✓ Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp2.178.004.016,00;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- ✓ Belanja Internet sebesar Rp79.829.027,00;
- ✓ Belanja Surat Kabar sebesar Rp800,000,00; dan
- ✓ Belanja Tenaga Kesehatan sebesar Rp1.870.736.580,00.

- melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp223.155.582.555,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2024 sebesar Rp206.409.921.057,00 terdiri dari:
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dindikbud sebesar Rp127.340.956.692,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD pada Dindikbud sebesar Rp444.790.000,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinkes (RSUD) sebesar Rp39.067.632.639,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinkes (Puskesmas) sebesar Rp22.379.304.436,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BOK pada Dinkes (Puskesmas) sebesar Rp17.177.237.290,00.
  - Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Barang tahun sebelumnya sebesar Rp16.745.661.498,00 berupa pembayaran atas Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2023 yang dibayarkan pada Tahun 2024 terdiri dari:
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk utang obat-obatan sebesar Rp12.944.565.248,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk utang bahan kimia sebesar Rp3.274.357.600,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk utang telepon, air, listrik, dan internet sebesar Rp205.308.255,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk pemeliharaan sebesar Rp201.081.327,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk utang premi asuransi sebesar Rp120.349.068,00.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp150.235.584.293,00 atau 97,77% dari anggaran sebesar Rp153.666.629.210,00 dan 148,72% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp101.019.252.163,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

Belanja Hibah		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.432.500.000,00	2.381.195.600,00	97,89	2.868.409.750,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	109.883.372.526,00	109.146.127.085,00	99,33	44.332.832.998,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.058.500.000,00	1.942.764.869,00	94,38	8.454.426.347,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.420.970.000,00	15.961.758.848,00	86,65	27.340.262.560,00
6	Belanja Hibah kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	52.637.684,00	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Belanja Hibah		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.767.800.000,00	15.752.888.891,00	99,91	16.155.490.508,00
9	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.849.000,00	1.950.849.000,00	100,00	1.867.830.000,00
Jumlah Belanja Hibah		153.666.629.210,00	150.235.584.293,00	97,77	101.019.252.163,00

Besaran Hibah dari masing-masing OPD pemberi hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26
Daftar OPD Pemberi Hibah TA 2024 dan 2023

Belanja Hibah		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dindikbud	53.854.484.534,00	53.326.675.758,00	99,02	53.617.473.673,00
2	Dinkes	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	701.268.682,00
3	DPU	2.432.500.000,00	2.381.195.600,00	97,89	3.001.093.190,00
4	DLH	185.400.000,00	185.067.000,00	99,82	204.351.000,00
5	Diskominfo	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	270.000.000,00
6	Diskoperndag	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100.000.000,00
7	Disperik	4.660.284.861,00	4.465.468.086,00	95,82	5.598.984.026,00
8	Disparpora	4.440.000.000,00	4.390.000.000,00	98,87	7.255.000.000,00
9	Dispertan	7.571.110.815,00	7.464.828.849,00	98,60	10.511.251.592,00
10	Setda	11.477.000.000,00	9.176.500.000,00	79,96	15.561.000.000,00
11	Bakesbangpol	68.170.849.000,00	67.970.849.000,00	99,71	4.198.830.000,00
Jumlah		153.666.629.210,00	150.235.584.293,00	97,77	101.019.252.163,00

Rincian Belanja Hibah dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Penggunaan Belanja Hibah TA 2024 dari OPD

No	OPD	Realisasi Belanja Hibah				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOK/BOS/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Dindikbud	11.863.444.867,00	-	41.463.230.891,00	-	53.326.675.758,00
2	Dinkes	600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00
3	DPU & PR	2.381.195.600,00	-	-	-	2.381.195.600,00
4	DLH	185.067.000,00	-	-	-	185.067.000,00
5	Diskominfo	125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00
6	Diskoperindag	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
7	Disperik	4.465.468.086,00	-	-	-	4.465.468.086,00
8	Disparpora	4.390.000.000,00	-	-	-	4.390.000.000,00
9	Dispertan	7.464.828.849,00	-	-	-	7.464.828.849,00
10	Setda	9.176.500.000,00	-	-	-	9.176.500.000,00
11	Bakesbangpol	67.970.849.000,00	-	-	-	67.970.849.000,00
	Jumlah	108.772.353.402,00	-	41.463.230.891,00	-	150.235.584.293,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp150.235.584.293,00 terdiri dari:

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp108.772.353.402,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2024 sebesar Rp108.772.353.402,00;
- melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp41.463.230.891,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2024 sebesar Rp41.463.230.891,00 terdiri dari:
    - ✓ Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Satdikdas Swasta pada Dindikbud sebesar Rp15.752.888.891,00 yaitu untuk SD swasta sebesar Rp5.803.838.200,00 dan SMP swasta sebesar Rp9.949.050.691,00;
    - ✓ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berupa Belanja Hibah Uang

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dana BOP PAUD pada Dindikbud sebesar Rp19.384.302.000,00 untuk PAUD swasta;

- ✓ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berupa Belanja Hibah Uang Dana BOP Pendidikan Kesetaraan pada Dindikbud sebesar Rp6.326.040.000,00 yaitu untuk SPNF negeri sebesar Rp321.000.000,00 dan SPNF swasta sebesar Rp6.005.040.000,00.

Belanja Hibah sebesar Rp150.235.584.293,00 diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa terdapat pada beberapa OPD. Jenis Hibah yang diberikan serta OPD pemberi hibah terdiri dari:

Tabel 5.28
Daftar OPD Pemberi Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		**Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**5.432.500.000,00**	**5.381.195.600,00**	**2.868.409.750,00**
		Hibah Uang :	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
	Dindikbud	- Lembaga Pendidkan Islam (insentif pengajar)	-	3.000.000.000,00	-
		Hibah Barang :	2.432.500.000,00	2.381.195.600,00	2.868.409.750,00
	DPU	- Kodim 0711 Pemalang	-	1.117.973.350,00	1.849.941.200,00
		- Polres Pemalang	-	-	800.850.000,00
		- Kejari Pemalang	-	1.263.222.250,00	217.618.550,00
		Jumlah	5.432.500.000,00	5.381.195.600,00	2.868.409.750,00

Tabel 5.29
Daftar OPD Pemberi Hibah kepada Badan/Lembaga
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2		**Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-**	**109.883.372.526,00**	**109.146.127.085,00**	**44.332.832.998,00**
		Hibah Uang :	99.882.700.000,00	99.490.342.000,00	31.750.929.000,00
a	Dindikbud	- Pendamping BOS SD	-	-	305.000.000,00
		- Pendamping BOS SMP	-	-	1.720.000.000,00
		- BOP PAUD swasta	-	19.384.302.000,00	19.982.400.000,00
		- BOP Pendidikan Kesetaraan swasta	-	6.605.040.000,00	4.454.029.000,00
		- BOP Pendidikan Kesetaraan- SKB	-	321.000.000,00	45.000.000,00
		- Sarana Prasana Pendidikan	-	1.680.000.000,00	1.419.500.000,00
		- Sarana Prasana Kebudayaan	-	100.000.000,00	-
b	Dinkes	- PMI Pemalang	-	600.000.000,00	300.000.000,00
c	DLH	- Komunitas Peduli Sampah Simpur	-	-	25.000.000,00
		- BUMDES "Bangkit Tunggal Jaya"	-	100.000.000,00	-
d	Diskominfo	- PWI Pemalang (seminar)	-	25.000.000,00	-
e	Diskoperindag	- Dekopinda	-	50.000.000,00	100.000.000,00
f	Disperik	- Kelompok Tani Lele "Amanah"	-	25.000.000,00	-
g	Disparpora	- Pengelola Desa Wisata Bulakan	-	-	25.000.000,00
		- Pengelola Desa Wisata Surajaya	-	-	25.000.000,00
		- Pengelola Taman Rancah	-	-	25.000.000,00
		- Perkumpulan Mawar Arum Surajaya	-	-	30.000.000,00
		- Pengelola Desa Wisata Banyumudal	-	-	25.000.000,00
		- Pengelola Desa Wisata Wisnu	-	-	25.000.000,00
		- Komite Olahraga Nasilan Indonesia (KONI)	-	3.000.000.000,00	-
		- National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)	-	300.000.000,00	-
		- Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia	-	300.000.000,00	-
		- Gerakan Pramuka Kwarcab Pemalang	-	300.000.000,00	-
		- Komite Nasional Pemuda Indonesia	-	350.000.000,00	-
h	Dispertan	- Gudang Tembakau	-	-	100.000.000,00
		- Kelompok Tani	-	-	320.000.000,00
		- Komunitas Pecinta Tanaman Hias	-	-	25.000.000,00
		- Kelompok Tani Telang - Desa Sikasur	-	25.000.000,00	-
		- Kelompok Tani Sepaha	-	25.000.000,00	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
i	Setda	- BAZ Pemalang	-	500.000.000,00	700.000.000,00
		- MUI Pemalang	-	100.000.000,00	-
j	Bakesbangpol	- Baw aslu Pemalang	-	10.500.000.000,00	300.000.000,00
		- KPU Pemalang	-	48.700.000.000,00	1.800.000.000,00
		- Polres Pemalang	-	5.250.000.000,00	-
		- Korem 071 Wijaya Kusuma	-	1.250.000.000,00	-
		Hibah Barang :	10.000.672.526,00	9.655.785.085,00	12.581.903.998,00
a	Dindikbud	- Lembaga Pendidikan	-	-	-
		- sarana prasarana PAUD	-	4.853.444.867,00	4.518.257.331,00
		- sarana prasarana SMP	-	-	80.663.555,00
	Dinkes	- Lembaga Kesw adayaan Masyarakat	-	-	-
b	DLH	- sarana prasarana	-	85.067.000,00	179.351.000,00
c	Disperik	- Lembaga Kesw adayaan Masyarakat	-	-	-
		- sarpras KPD	-	99.765.366,00	224.326.774,00
		- kelompok tani ikan lele desa/kelurahan	-	-	119.777.936,00
		- alat budidaya ikan/kepiting	-	44.197.000,00	2.069.073.515,00
		- sarpras TPI	-	91.714.185,00	2.109.156.487,00
		- perahu/kapal/mesin	-	1.011.965.000,00	119.880.000,00
		- alat tangkap ikan	-	115.333.625,00	112.525.000,00
		- alat gilnet momoy	-	383.406.210,00	-
		- jalan produksi tambak desa (8 kelompok)	-	1.742.332.899,00	-
		- sarpras budidaya ikan (3 kelompok)	-	298.988.932,00	-
		- TPHT Limbangan	-	30.000.000,00	-
d	Dispertan	- Kelompok Tani	-	-	-
		- bibit tanaman	-	235.240.000,00	136.150.000,00
		- alat pertanian, pupuk, dan burung hantu + rumah	-	267.990.000,00	1.841.000.000,00
		- alat pertanian, motor, mesin	-	326.340.000,00	1.071.742.400,00
		- rehab talud tersier	-	70.000.001,00	-
		Jumlah	109.883.372.526,00	109.146.127.085,00	44.332.832.998,00

Tabel 5.30
Daftar OPD Pemberi Hibah kepada Badan/Lembaga
yang Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3		**Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**2.058.500.000,00**	**1.942.764.869,00**	**8.454.426.347,00**
		Hibah Uang :	1.435.000.000,00	1.320.000.000,00	7.205.000.000,00
a	Dindikbud	- Pemb. Gedung Sanggar Seni Sangga Budaya - Banyumudal	-	-	50.000.000,00
		- Sarana Sanggar Seni Sekar Purbaya - Surajaya	-	-	5.000.000,00
		- Pemb. Sanggar Tari Sekar Kinanthi - Muncang	-	-	20.000.000,00
		- Gamelan Paguyuban Kesenian Kuda Kepang Mekarsari - Nyalembeng	-	-	30.000.000,00
		- Dew an Pendidikan Kab. Pemalang	-	-	200.000.000,00
		- sarana prasarana Pendidikan	-	895.000.000,00	-
		- sarana prasarana Kebudayaan	-	205.000.000,00	-
		- sarana prasarana Keagamaan	-	80.000.000,00	-
		- Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (HIPPRADA)	-	40.000.000,00	-
		- Kelompok Pengrajin Olahan Singkong Desa Surajaya	-	100.000.000,00	-
b	Disparpora	- NPCI	-	-	1.000.000.000,00
		- KONI	-	-	5.000.000.000,00
		- KNPI	-	-	150.000.000,00
		- KORMI	-	-	150.000.000,00
		- Kw arcab Pramuka Pemalang	-	-	550.000.000,00
		- Mahardika FC	-	-	50.000.000,00
		Hibah Barang :	623.500.000,00	622.764.869,00	1.249.426.347,00
a	Dindikbud	- rehab bangunan bersejarah, cagar budaya	-	-	272.498.593,00
b	DPU	- pemeliharaan Masjid Agung	-	-	132.683.440,00
c	Disperik	- timbangan digital	-	-	5.500.000,00
		- kapal - Mina Mojo Mulyo	-	-	99.789.000,00
		- sarpras TPI	-	-	169.766.714,00
		- sarpras UPI	-	-	569.188.600,00
		- electric genset	-	12.000.000,00	-
		- coolbox dan lemari etalase	-	41.500.000,00	-
		- rehab UPI Poklahsar (3 kelompok)	-	569.264.869,00	-
		Jumlah	2.058.500.000,00	1.942.764.869,00	8.454.426.347,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.31
Daftar OPD Pemberi Hibah kepada Badan/Lembaga
Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
4		**Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifar Sosial Kemasyarakatan**	**18.420.970.000,00**	**15.961.758.848,00**	**27.340.262.560,00**
		Hibah Uang :	17.661.000.000,00	15.230.500.000,00	25.161.464.686,00
a	Dindikbud	- PGSI	-	-	4.124.634.686,00
		- pemb. Pagar keliling Makam Mbah Wonogati - Karangtengah, Ampelgading	-	-	20.000.000,00
		- pemb. Pagar keliling Makam Mbah Bayat - Purwosari, Comal	-	-	50.000.000,00
		- pemb. Gapura dan Pagar Keliling Makam Syekh Bogajati - Kebandaran, Bodeh	-	-	75.000.000,00
		- pemb. Pagar keliling Makam Candi Krapyak - Wonokromo Comal	-	-	50.000.000,00
		- Pengelola Makam Mbah Kyai Rawan	-	-	40.000.000,00
		- Rehab. Makam Mbah Maoneng Kel. Bojongbata	-	200.000.000,00	-
		- Pemb. Pagar Keliling Makam Mbah Buyut Eyang Agung Cinde Asih Desa Tambakrejo	-	200.000.000,00	-
		- Pemb. Pagar Keliling Makam Leluhur Mbah Pertinggi R. Yudho Husodo Prawiro Dirdjo Desa Bojongnangka	-	50.000.000,00	-
b	Diskominfo	- Komunitas Pemuda Sadar Digital	-	-	50.000.000,00
		- Komunitas Desain Grafis	-	-	25.000.000,00
		- Komunitas Start Up	-	-	40.000.000,00
		- LPPM ITB Adias Pemalang	-	-	35.000.000,00
		- Pelatihan Digital Marketing	-	-	100.000.000,00
		- Pelatihan Kursus Komputer	-	-	20.000.000,00
		- Komunitas Start Up Digital (pelatihan)	-	50.000.000,00	-
		- Pegiat Medsos Community (pelatihan)	-	50.000.000,00	-
c	Disparpra	- Panitia Pemb. GOR Sindo	-	-	200.000.000,00
d	Dispertan	- kelompok tani/peternak	-	273.000.000,00	1.108.000.000,00
		- rumah RMU	-	-	800.000.000,00
		- jalan usaha tani	-	2.691.000.000,00	3.075.130.000,00
		- irigasi usaha tani	-	2.300.000.000,00	76.000.000,00
		- jalan produksi	-	-	180.700.000,00
		- dam	-	240.000.000,00	-
		- talud jalan pertanian	-	280.000.000,00	-
e	Setda	- rumah ibadah	-	3.073.000.000,00	4.422.000.000,00
		- lembaga pendidikan : TPQ, madrasah dll	-	2.969.000.000,00	4.171.000.000,00
		- organisasi kemasyarakatan	-	2.203.000.000,00	6.268.000.000,00
		- bantuan hewan qurban	-	331.500.000,00	-
f	Bakesbangpol	- FKUB	-	-	50.000.000,00
		- DHC '45	-	-	45.000.000,00
		- PP TNI AL	-	-	16.000.000,00
		- Nusadaya Amanan Indonesia	-	-	20.000.000,00
		- Yayasan Dharma Suryani Center	-	-	25.000.000,00
		- GOW	-	-	30.000.000,00
		- MUI	-	-	45.000.000,00
		- Pemuda Panca Marga (PPM)	-	10.000.000,00	-
		- Persatuan Istri Purnawiran (Perip)	-	10.000.000,00	-
		- Persatuan Purnawiran dan Warakawudi TNI	-	10.000.000,00	-
		- Persatuan Wedatama Republik Indonesia (PWRI)	-	10.000.000,00	-
		- DPC Projo	-	10.000.000,00	-
		- Roemah Joeang Aman (RJA)	-	10.000.000,00	-
		- DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45	-	80.000.000,00	-
		- DPC Fans of Rhoma and Soneta (FORSA)	-	10.000.000,00	-
		- Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia	-	10.000.000,00	-
		- DPC Lindu Aji	-	15.000.000,00	-
		- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	-	15.000.000,00	-
		- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	-	20.000.000,00	-
		- Forum Kader Bela Negara (FKBN)	-	10.000.000,00	-
		- Senkom Mitra Polri	-	10.000.000,00	-
		- Dharma Wanita Persatuan (DWP)	-	50.000.000,00	-
		- Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari)	-	10.000.000,00	-
		- LPKPK	-	10.000.000,00	-
		- Gerakan Wanitas Sejahtera (GWS)	-	10.000.000,00	-
		- Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	-	10.000.000,00	-
		Hibah Barang :	759.970.000,00	731.258.848,00	2.178.797.874,00
a	Dinkes	- jamban keluarga	-	-	401.268.682,00
b	Dispertan	- Chooper	-	-	47.064.000,00
		- RMU	-	-	1.396.800.000,00
		- Jalan Pertanian Ds. Saradan	-	-	134.443.393,00
		- Jaringan Irigasi	-	-	199.221.799,00
		- alat/kendaraan	-	163.560.000,00	-
		- rumah silase	-	196.513.049,00	-
		- sumur	-	8.103.000,00	-
		- jalan usaha tani	-	363.082.799,00	-
		Jumlah	18.420.970.000,00	15.961.758.848,00	27.340.262.560,00

Tabel 5.32
Daftar OPD Pemberi Hibah kepada Koperasi TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5		**Hibah kepada Koperasi**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-**
		Hibah Uang :	100.000.000,00	100.000.000,00	-
a	Diskoperindag	- Koperasi Madyna PKK Mandiri	100.000.000,00	100.000.000,00	-
		Jumlah	100.000.000,00	100.000.000,00	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.33
Daftar OPD Pemberi Hibah Dana BOS untuk Satdikdas Negeri
TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
6		**Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri**	**52.637.684,00**	**-**	**-**
		Hibah Uang :	52.637.684,00	-	-
a	Dindikbud	- BOS SD negeri	52.637.684,00	-	-
		Jumlah	52.637.684,00	-	-

Tabel 5.34
Daftar OPD Pemberi Hibah Dana BOS untuk Satdikdas Swasta
TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
7		**Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta**	**15.767.800.000,00**	**15.752.888.891,00**	**16.155.490.508,00**
		Hibah Uang :	15.767.800.000,00	15.752.888.891,00	16.155.490.508,00
a	Dindikbud	- BOS SD swasta	5.798.264.608,00	5.803.838.200,00	5.920.940.619,00
		- BOS SMP swasta	9.969.535.392,00	9.949.050.691,00	10.234.549.889,00
		Jumlah	15.767.800.000,00	15.752.888.891,00	16.155.490.508,00

Tabel 5.35
Daftar OPD Pemberi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
8		**Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**1.950.849.000,00**	**1.950.849.000,00**	**1.867.830.000,00**
		Hibah Uang :	1.950.849.000,00	1.950.849.000,00	1.867.830.000,00
a	Bakesbangpol	- PDIP	579.355.000,00	579.355.000,00	640.605.000,00
		- PKB	386.551.000,00	386.551.000,00	352.683.000,00
		- Partai Golkar	269.981.000,00	269.981.000,00	238.071.000,00
		- PPP	240.889.000,00	240.889.000,00	237.279.000,00
		- Partai Gerindra	236.995.000,00	236.995.000,00	185.676.000,00
		- PKS	172.097.000,00	172.097.000,00	161.979.000,00
		- Partai Nasdem	34.358.000,00	34.358.000,00	51.537.000,00
		- PAN	30.623.000,00	30.623.000,00	-
		Jumlah	1.950.849.000,00	1.950.849.000,00	1.867.830.000,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp9.547.648.000,00 atau 95,95% dari anggaran sebesar Rp9.950.980.000,00 dan 106,82% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp8.937.904.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, badan/lembaga yaitu:

Tabel 5.36
Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

Belanja Bantuan Sosial		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Sosial Uang kepada Individu	5.762.720.000,00	5.399.920.000,00	93,70	8.249.300.000,00
2	Bantuan Sosial Barang kepada Individu	3.888.260.000,00	3.847.728.000,00	98,96	328.632.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
4	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	359.972.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		9.950.980.000,00	9.547.648.000,00	95,95	8.937.904.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Besaran Bantuan Sosial dari masing-masing OPD pemberi bantuan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37
Daftar OPD Pemberi Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

Belanja Bantuan Sosial		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Disperkim	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00	100,00	3.275.000.000,00
2	Dinsos KBPP	6.238.480.000,00	5.902.948.000,00	94,62	5.482.904.000,00
3	Disnaker	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
4	Dishub	180.000.000,00	166.200.000,00	92,33	180.000.000,00
5	Diskoperindag	1.147.500.000,00	1.093.500.000,00	95,29	-
Jumlah		9.950.980.000,00	9.547.648.000,00	95,95	8.937.904.000,00

Rincian Belanja Barang dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Penggunaan Belanja Bantuan Sosial TA 2024

No	OPD	Realisasi Belanja Bantuan Sosial				JUMLAH (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOK/BOS/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Disperkim	2.375.000.000,00	-	-	-	2.375.000.000,00
2	Dinsos KBPP	5.902.948.000,00	-	-	-	5.902.948.000,00
3	Disnaker	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
4	Dishub	166.200.000,00	-	-	-	166.200.000,00
5	Diskoperindag	1.093.500.000,00	-	-	-	1.093.500.000,00
	Jumlah	9.547.648.000,00	-	-	-	9.547.648.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp9.547.648.000,00 seluruhnya melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp9.547.648.000,00 murni belanja untuk TA 2023.

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp9.547.648.000,00 diberikan dalam bentuk uang dan barang terdapat pada beberapa OPD. Jenis Bantuan Sosial yang diberikan serta OPD pemberi bantuan sosial terdiri dari:

Tabel 5.39
Daftar OPD Pemberi Bantuan Sosial Uang kepada Individu TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Bansos	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		**Bantuan Sosial Uang kepada Individu**	**5.762.720.000,00**	**5.399.920.000,00**	**8.249.300.000,00**
		Bansos Uang :	5.762.720.000,00	5.399.920.000,00	8.249.300.000,00
a	Disperkim	- RTLH	-	900.000.000,00	3.200.000.000,00
		- Korban Bencana	-	75.000.000,00	75.000.000,00
		- Pengentasan Pemukiman Kumuh	-	120.000.000,00	-
		- Stimulan Rumah Swadaya	-	1.280.000.000,00	-
b	Dinsos KBPP	- Bantuan Pengobatan	-	-	50.000.000,00
		- BLT	-	-	4.594.800.000,00
		- Orang Terlantar	-	-	100.000.000,00
		- Penyandang Disabilitas	-	148.500.000,00	49.500.000,00
		- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	1.101.720.000,00	-
		- Pelatihan	-	505.000.000,00	-
c	Disnaker	- Transmigran asal Kab. Pemalang	10.000.000,00	10.000.000,00	-
d	Dishub	- Pengemudi Angkutan Umum & Ojek	180.000.000,00	166.200.000,00	180.000.000,00
e	Diskoperindag	- Pedagang Pasar Belik	1.147.500.000,00	1.093.500.000,00	-
		Jumlah	5.762.720.000,00	5.399.920.000,00	8.249.300.000,00

Tabel 5.40
Daftar OPD Pemberi Bantuan Sosial Barang kepada Individu TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Bansos	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2		**Bantuan Sosial Barang kepada Individu**	**3.888.260.000,00**	**3.847.728.000,00**	**328.632.000,00**
		Bansos Barang :	3.888.260.000,00	3.847.728.000,00	328.632.000,00
a	Dinsos KBPP	- Alat Bantu Kesehatan	-	179.500.000,00	100.500.000,00
		- Anak Stunting	-	1.983.600.000,00	228.132.000,00
		- Permakanan	-	1.684.628.000,00	-
		Jumlah	3.888.260.000,00	3.847.728.000,00	328.632.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.41
Daftar OPD Pemberi Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat
TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Bansos	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3		**Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**-**
		Bansos Uang :	300.000.000,00	300.000.000,00	-
a	Dinsos KBPP	- KUBE		300.000.000,00	
		Jumlah	300.000.000,00	300.000.000,00	-

Tabel 5.42
Daftar OPD Pemberi Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat
TA 2024 dan 2023

No.	OPD Pemberi Bansos	Uraian	2024		2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
4		**Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat**	**-**	**-**	**359.972.000,00**
		Bansos Barang :	-	-	359.972.000,00
a	Dinsos KBPP	- BKB Kit Stunting	-	-	359.972.000,00
		Jumlah	-	-	359.972.000,00

Dari realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Individu sebesar Rp1.755.220.000,00 pada Dinsos KBPP terdapat penyaluran bantuan sosial yang belum diterima sebesar Rp4.000.000,00 yaitu berupa Bantuan Sosial untuk Pelatihan kepada Anak Tidak Sekolah karena yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan tersebut.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi TA 2024 dan TA 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.43
Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Belanja Modal		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	95,63	2.046.604.500,00
2	Peralatan dan Mesin	73.645.018.098,00	68.867.746.899,00	93,51	90.599.632.595,00
3	Gedung dan Bangunan	54.414.402.986,00	47.292.557.157,00	86,91	47.732.039.343,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.886.187.880,00	41.979.833.338,00	97,89	54.538.776.430,00
5	Aset Tetap Lainnya	16.332.688.745,00	17.866.133.555,00	109,39	22.290.072.158,00
6	Aset Lainnya	2.913.750.000,00	2.782.571.000,00	95,50	-
Jumlah Belanja Modal		192.492.047.709,00	180.988.417.949,00	94,02	217.207.125.026,00

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp180.988.417.949,00 atau 94,02% dari anggaran sebesar Rp192.492.047.709,00 dan 83,33% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp217.207.125.026,00.

Kemudian penjelasan lebih lanjut untuk setiap jenis belanja modal pada TA 2024 adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi BM–Tanah TA 2024 sebesar Rp2.199.576.000,00 atau 95,63% dari anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00 dan 107,47% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp2.204.454.900,00. Realisasi BM–Tanah tersebut terdiri dari:

Tabel 5.44
Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

Belanja Modal Tanah		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	95,63	2.046.604.500,00
Jumlah Belanja Modal Tanah		2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	95,63	2.046.604.500,00

Rincian BM-Tanah dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45
Rincian Penggunaan Belanja Modal Tanah TA 2024

No	OPD	Realisasi Belanja Modal Tanah				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOK/BOS/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Diskperkim	2.199.576.000,00	-	-	-	2.199.576.000,00
	Jumlah	2.199.576.000,00	-	-	-	2.199.576.000,00

Realisasi BM-Tanah sebesar Rp2.199.576.000,00 digunakan untuk pengadaan tanah sebagai tempat bangunan sekolah di desa Cikadu Kecamatan Watukumpul.

Dari realisasi BM-Tanah sebesar Rp2.199.576.000,00 yang menjadi Aset Tetap Tanah adalah sebesar Rp2.199.576.000,00 atau 100,00%, sehingga seluruh Belanja Modal Tanah menjadi Aset Tetap Tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi BM–Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp68.867.746.899,00 atau 93,51% dari anggaran sebesar Rp73.645.018.098,00 dan 76,01% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp90.599.632.595,00. Realisasi BM–Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari:

Tabel 5.46
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2024

Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Alat Besar	579.802.500,00	536.559.950,00	92,54	1.928.997.200,00
2	BM Alat Angkutan	16.156.686.000,00	15.992.422.400,00	98,98	4.546.873.947,00
3	BM Alat Bengkel dan Alat Ukur	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	105.215.400,00
4	BM Alat Pertanian	291.100.000,00	290.225.000,00	99,70	44.800.000,00
5	BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.330.758.540,00	9.010.548.471,00	87,22	5.956.544.138,00
6	BM Alat Studio, Komunikasi dan Peman	337.966.006,00	320.375.314,00	94,80	2.289.334.620,00
7	BM Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.383.547.424,00	19.846.214.588,00	88,66	35.232.967.961,00
8	BM Alat Laboratorium	1.853.412.530,00	1.681.971.390,00	90,75	2.776.158.590,00
9	BM Komputer	8.105.151.972,00	7.528.652.310,00	92,89	37.412.921.239,00
10	BM Alat Eksplorasi	69.985.000,00	47.150.000,00	67,37	70.907.000,00
11	BM Alat Produksi Pengolahan, dan Pem	-	-	-	2.000.000,00
12	BM Alat Keselamatan Kerja	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	-
13	BM Rambu-rambu	150.000.000,00	149.286.337,00	99,52	232.912.500,00
14	BM Peralatan Olahraga	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	-
15	BM Peralatan dan Mesin BOS	13.261.560.126,00	13.398.761.139,00	101,03	-
16	BM Peralatan dan Mesin BLUD	69.148.000,00	9.980.000,00	14,43	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		73.645.018.098,00	68.867.746.899,00	93,51	90.599.632.595,00

Rincian BM-Peralatan dan Mesin dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.47
Rincian Penggunaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024

No	OPD	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin				JUMLAH (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOK/BOS/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Dindikbud	8.073.931.300,00	-	13.418.071.139,00	-	21.492.002.439,00
2	Dinkes	31.455.444.080,00	-	6.804.842.853,00	-	38.260.286.933,00
3	DPU & PR	355.212.000,00	-	-	-	355.212.000,00
4	Disperkim	13.320.000,00	-	-	-	13.320.000,00
5	Satpol PP	36.254.950,00	-	-	-	36.254.950,00
6	BPBD	106.649.400,00	-	-	-	106.649.400,00
7	Dinsos-PPKBPPPA	193.258.460,00	-	-	-	193.258.460,00
8	Disnaker	1.554.261.220,00	-	-	-	1.554.261.220,00
9	DLH	436.420.736,00	-	-	-	436.420.736,00
10	Disdukcatpil	9.960.000,00	-	-	-	9.960.000,00
11	Dinpermasdes	28.800.000,00	-	-	-	28.800.000,00
12	Dishub	277.338.337,00	-	-	-	277.338.337,00
13	Diskominfo	275.670.039,00	-	-	-	275.670.039,00
14	Diskoperindag	172.341.400,00	-	-	-	172.341.400,00
15	DPMPTP	1.900.000,00	-	-	-	1.900.000,00
16	Dinpusarda	10.931.892,00	-	-	-	10.931.892,00
17	Disperik	390.278.875,00	-	-	-	390.278.875,00
18	Disparpora	124.429.950,00	-	-	-	124.429.950,00
19	Dispertan	483.161.000,00	-	-	-	483.161.000,00
20	Setda	869.550.740,00	-	-	-	869.550.740,00
21	Setwan	217.778.000,00	-	-	-	217.778.000,00
22	Bappeda	350.238.793,00	-	-	-	350.238.793,00
23	BPKAD	914.510.250,00	-	-	-	914.510.250,00
24	Bapenda	269.479.000,00	-	-	-	269.479.000,00
25	BKD	134.529.960,00	-	-	-	134.529.960,00
26	Inspektorat	1.233.142.650,00	-	-	-	1.233.142.650,00
27	Kec. Moga	45.386.000,00	-	-	-	45.386.000,00
28	Kec. Belik	11.475.000,00	-	-	-	11.475.000,00
29	Kec. Bodeh	80.880.000,00	-	-	-	80.880.000,00
30	Kec. Bantarbolang	70.573.800,00	-	-	-	70.573.800,00
31	Kec. Randudongkal	32.323.000,00	-	-	-	32.323.000,00
32	Kec. Pemalang	125.858.875,00	-	-	-	125.858.875,00
33	Kec. Taman	44.320.000,00	-	-	-	44.320.000,00
34	Kec. Ampelgading	19.500.000,00	-	-	-	19.500.000,00
35	Kec. Comal	97.147.000,00	-	-	-	97.147.000,00
36	Kec. Ulujami	32.254.600,00	-	-	-	32.254.600,00
37	Kec. Warungpring	55.821.600,00	-	-	-	55.821.600,00
38	Bakesbangpol	40.500.000,00	-	-	-	40.500.000,00
	Jumlah	48.644.832.907,00	-	20.222.913.992,00	-	68.867.746.899,00

Realisasi BM-Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp68.867.746.899,00 terdiri dari:

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp48.644.832.907,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2024;
- melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp20.222.913.992,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2024 yaitu pada:
  - Dindikbud sebesar Rp13.418.071.139,00 terdiri dari:
    - ✓ Belanja Modal dari Dana BOS sebesar Rp13.398.761.139,00 berupa BM-Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp13.398.761.139,00;
    - ✓ Belanja Modal dari Dana BOP PAUD sebesar Rp19.310.000,00 berupa:
      - ❖ BM-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp3.000.000,00;
      - ❖ BM-Alat Laboratorium sebesar Rp7.210.000,00; dan
      - ❖ BM-Komputer sebesar Rp9.100.000,00;
  - Dinkes sebesar Rp6.804.842.853,00 terdiri dari:
    - ✓ Belanja Modal dari BLUD pada RSUD sebesar Rp4.136.801,203,00 berupa :
      - ❖ BM-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.009.355.080,00;
      - ❖ BM-Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp2.557.886.123,00;
      - ❖ BM-Komputer sebesar Rp540.560.000,00; dan
      - ❖ BM-Alat Eksplorasi sebesar Rp29.000.000,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- ✓ Belanja Modal dari BLUD pada Puskesmas sebesar Rp2.668.041.650,00 berupa:
  - ❖ BM-Alat Besar sebesar Rp11.150.000,00;
  - ❖ BM-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp596.574.900,00;
  - ❖ BM-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp42.064.375,00;
  - ❖ BM-Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp441.517.525,00;
  - ❖ BM-Alat Laboratorium sebesar Rp930.000,00;
  - ❖ BM-Komputer sebesar Rp1.563.774.850,00;
  - ❖ BM-Alat Eksplorasi sebesar Rp5.050.000,00; dan
  - ❖ BM-Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp9.980.000,00.

Realisasi BM-Peralatan dan Mesin adalah 93,51% namun demikian masih ada realisasi BM-Peralatan dan Mesin di bawah 80% yaitu BM-Alat Eksplorasi sebesar 67,37% dan BM-Peralatan dan Mesin BLUD sebesar 14,43% yang terdapat pada:

Tabel 5.48
Daftar OPD dengan Realisasi BM-Peralatan dan Mesin TA 2024 dibawah 80%

OPD		2024		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
A	**BM-Alat Eksplorasi**	**69.985.000,00**	**47.150.000,00**	**67,37**
1	Dinkes	52.266.250,00	34.050.000,00	65,15
3	DLH	11.812.500,00	11.200.000,00	94,81
4	BPKAD	5.906.250,00	1.900.000,00	32,17
B	**BM-Peralatan dan Mesin BLUD**	**69.148.000,00**	**9.980.000,00**	**14,43**
1	Dinkes	69.148.000,00	9.980.000,00	14,43
Jumlah		139.133.000,00	57.130.000,00	41,06

BM-Alat Eksplorasi :
- pada Dinkes capaian realisasi 65,15% dikarenakan efisiensi dalam pengadaan barang (harga pada *e-catalog* lebih rendah dari DPA);
- pada BPKAD capaian realisasi 32,17% dikarenakan efisiensi dalam pengadaan barang (dengan harga tersebut pengadaan barang sudah terpenuhi);

BM-Peralatan dan Mesin BLUD :
- pada Dinkes capaian realisasi 14,43% dikarenakan efisiensi dalam pengadaan barang (barang *existing* masih mencukupi/baik);

Selain itu, terdapat realisasi yang melebihi pagu anggaran yaitu BM-Peralatan dan Mesin BOS sebesar 101,03% pada Dindikbud, hal itu dikarenakan:
- Pengelola Dana Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mengakomodir permintaan Satuan Pendidikan untuk mengubah anggaran dari Belanja Barang dan Jasa BOS menjadi Belanja Modal (BM-Peralatan dan Mesin BOS) pada sistem ARKAS, dengan pertimbangan :
  - diangkatnya Tenaga Honorer pada Dindikbud menjadi PPPK, sehingga anggaran yang direncanakan untuk tenaga honorer dialihkan untuk Belanja Modal;
  - untuk memperkuat dan mempercepat jaringan internet di sekolah-sekolah (menambah *bandwidth*);
  - untuk kelengkapan multimedia untuk pembelajaran berbasis digital;
- atas perubahan anggaran tersebut, Dindikbud belum melakukan perubahan anggaran pada DPA sub kegiatan tersebut yaitu Pengelolaan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Dana BOS SD dan Pengelolaan Dana BOS SMP pada SIPD saat Perubahan APBD TA 2024;
- realisasi belanja modal yang dibuat mendasari pagu pada ARKAS bukan SIPD, sehingga mengakibatkan realisasi belanja melebihi pagu anggaran (tidak sesuai DPA).

Dari realisasi BM-Peralatan dan Mesin sebesar Rp68.867.746.899,00 yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp65.735.564.194,00 atau 95,45%. Terdapat selisih sebesar Rp3.132.182.705,00 atau 4,55% yang tidak menjadi aset.
Pengurangan sebesar Rp3.132.182.705,00 terdiri dari:
- realisasi melalui SP2D sebesar Rp1.766.065.541,00;
  Tidak menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan:
  - menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp1.766.065.541,00 pada 12 OPD;
- realisasi melalui SP2B sebesar Rp1.366.117.164,00; terdiri dari:
  - menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp1.280.622.164,00 melalui:
    - ✓ SPB BOS sebesar Rp1.233.227.815,00;
    - ✓ SP2B BLUD-RSUD sebesar Rp4.314.900,00;
    - ✓ SP2B BLUD-Puskesmas sebesar Rp43.079.449,00;
  - menjadi barang Aset Tidak Berwujud (*software*) yaitu:
    - ✓ SP2B BLUD-Puskesmas sebesar Rp85.495.000,00 berupa SIMPUS pada Puskesmas Warungpring.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi BM–Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp47.292.557.157,00 atau 86,91% dari anggaran sebesar Rp54.414.402.986,00 dan 99,08% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp47.732.039.343,00. Realisasi BM-Gedung dan Bangunan pada TA 2024 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Bangunan Gedung	54.284.349.211,00	47.186.265.807,00	86,92	47.532.580.343,00
3	BM Tugu Titik Kontrol/Pasti	30.000.000,00	29.990.000,00	99,97	199.459.000,00
4	BM Gedung dan Bangunan BLUD	100.053.775,00	76.301.350,00	76,26	-
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		54.414.402.986,00	47.292.557.157,00	86,91	47.732.039.343,00

Rincian BM-Gedung dan Bangunan dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.50
Rincian Penggunaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024

No	OPD	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOK/BOS/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Dindikbud	38.971.699.884,00	-	-	-	38.971.699.884,00
2	Dinkes	1.470.131.706,00	-	149.891.963,00	-	1.620.023.669,00
3	DPU & PR	687.068.000,00	-	-	-	687.068.000,00
9	Dinsos KBPP	1.322.604.000,00	-	-	-	1.322.604.000,00
4	DLH	13.780.000,00	-	-	-	13.780.000,00
5	Dishub	96.402.996,00	-	-	-	96.402.996,00
6	DPMPTSP	384.473.564,00	-	-	-	384.473.564,00
7	Dinpusarda	2.866.034.320,00	-	-	-	2.866.034.320,00
8	Disperik	904.956.630,00	-	-	-	904.956.630,00
9	Disparpora	395.424.094,00	-	-	-	395.424.094,00
10	Inspektorat	30.090.000,00	-	-	-	30.090.000,00
	Jumlah	**47.142.665.194,00**	**-**	**149.891.963,00**	**-**	**47.292.557.157,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Realisasi BM-Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp47.292.557.157,00 terdiri dari:
- realisasi melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp47.142.665.194,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2024;
- realisasi melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp149.891.963,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2024 yaitu pada:
  - Dinkes sebesar Rp149.891.963,00 terdiri dari:
    - ✓ Belanja Modal dari BLUD pada RSUD sebesar Rp73.590,613,00 berupa :
      - ❖ BM-Bangunan Kesehatan sebesar Rp73.590.613,00;
    - ✓ Belanja Modal dari BLUD pada Puskesmas sebesar Rp76.301.350,00 berupa:
      - ❖ BM-Gedung dan Bangunan sebesar Rp76.301.350,00.

Realisasi BM-Gedung dan Bangunan adalah 86,91% karena masih ada realisasi BM-Gedung dan Bangunan di bawah 80% yaitu :
- BM-Bangunan Kesehatan sebesar 76,05%;
- BM-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar 78,96%; dan
- BM-Gedung dan Bangunan BLUD sebesar 76,26%

yang terdapat pada:

Tabel 5.51
Daftar OPD dengan Realisasi BM-Gedung dan Bangunan TA 2024 dibawah 80%

	OPD	2024		%	2023		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
	Bangunan Kesehatan	**96.768.730,00**	**73.590.613,00**	**76,05**	**11.992.673.440,00**	**605.000.035,00**	**5,04**
1	Dinkes	96.768.730,00	73.590.613,00	76,05	11.992.673.440,00	605.000.035,00	5,04

	OPD	2024		%	2023		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	**1.675.000.000,00**	**1.322.604.000,00**	**78,96**	-	-	-
1	Dinsos KBPP	1.675.000.000,00	1.322.604.000,00	78,96	-	-	-
	Gedung dan Bangunan BLUD	**100.053.775,00**	**76.301.350,00**	**76,26**	-	-	-
1	Dinkes	100.053.775,00	76.301.350,00	76,26	-	-	-

Bangunan Kesehatan
- pada Dinkes capaian realisasi 76,05% dikarenakan efisiensi dalam pembangunan gedung;

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
- pada Dinsos KBPP capaian realisasi 78,96% dikarenakan efisiensi dalam pembangunan UPTD dan Rumah Singgah (terdapat sisa tender)

Gedung dan Bangunan BLUD
- pada Dinkes capaian realisasi 76,26% dikarenakan efisiensi dalam pemeliharaan bangunan gedung puskesmas.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.292.557.157,00 di antaranya digunakan untuk pembangunan :
- Bangunan Gedung sebesar Rp47.186.265.807,00 terdapat pada:
  - Dindikbud sebesar Rp38.941.709.884,00 terdiri dari pembangunan/ rehabilitasi sekolah sebesar Rp35.567.292.739,00 dan pembangunan gedung kantor sebesar Rp3.374.417.145,00;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Dinspusarda sebesar Rp2.866.034.320,00 terdiri dari pembangunan gedung Perpustakaan sebesar Rp2.666.666.665,00 dan pembangunan tempat pendidikan sebesar Rp199.367.655,00;
- Dinkes sebesar Rp1.543.722.319,00 terdiri dari pembangunan Laboratorium sebesar Rp1.470.131.706,00 dan pembangunan pagar sebesar Rp73.590.613,00;
- Dinsos KBPP sebesar Rp1.322.604.000,00 berupa pembangunan kantor UPTD dan Rumah Singgah;
- Disperik sebesar Rp904.956.630,00 berupa pembangunan bangunan perikanan;
- DPU sebesar Rp687.068.000,00 terdiri dari pembangunan gedung kantor sebesar Rp369.039.000,00 dan pembangunan gedung olahraga sebesar Rp318.029.000,00;
- Disparpora sebesar Rp395.424.094,00 berupa pembangunan gedung tempat olahraga;
- DPMPTSP sebesar Rp384.473.564,00 berupa pembangunan gedung kantor;
- Dishub sebesar Rp96.402.996,00 berupa pembangunan Pos Jaga Perlintasan KA;
- Inspektorat sebesar Rp30.090.000,00 berupa pembangunan gedung kantor;
- DLH sebesar Rp13.780.000,00 berupa pembangunan tempat pendidikan;

- Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp29.990.000,00 terdapat pada:
  - Dindikbud sebesar Rp29.990.000,00 berupa pembangunan pagar;
- Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp76.301.350,00 terdapat pada:
  - Dinkes sebesar Rp76.301.350,00 berupa pemeliharaan bangunan kesehatan pada Puskesmas Klareyan.

Dari realisasi BM-Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.292.557.157,00 yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp47.004.428.144,00 atau 99,39%. Terdapat selisih sebesar Rp288.129.013,00 atau 0,61% yang tidak menjadi aset.
Pengurangan sebesar Rp288.129.013,00 terdiri dari:

- realisasi melalui SP2D sebesar Rp138.237.050,00;
  Tidak menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan:
  - Reklas ke sesama Aset Tetap, terdiri dari :
    - ✓ Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.191.250,00 berupa peralatan pada Pos Jaga Perlintasan KA pada Dishub; dan
    - ✓ Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp119.068.000,00 berupa pembangunan pagar pada DPU;
  - menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp15.977.800,00 pada DLH dan Dishub;
- realisasi melalui SP2B sebesar Rp149.891.963,00, terdiri dari:
  - SP2B BLUD-RSUD sebesar Rp73.590.613,00 reklas menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - SP2B BLUD-Puskesmas sebesar Rp76.301.350,00 berupa pemeliharaan bangunan kesehatan.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp41.979.833.338,00 atau 97,89% dari anggaran sebesar

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rp42.886.187.880,00 dan 76,97% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp54.538.776.430,00. Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2024 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.52
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dan 2023

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Jalan dan Jembatan	35.796.219.080,00	35.304.221.338,00	98,63	52.382.454.200,00
2	BM Bangunan Air	802.000.000,00	765.612.000,00	95,46	18.495.000,00
3	BM Instalasi	6.287.968.800,00	5.910.000.000,00	93,99	1.973.000.000,00
4	BM Jaringan	-	-	-	164.827.230,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		42.886.187.880,00	41.979.833.338,00	97,89	54.538.776.430,00

Rincian BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.53
Rincian Penggunaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024

No	OPD	Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				JUMLAH (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOK/BOS/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Dinkes	5.910.000.000,00	-	-	-	5.910.000.000,00
2	DPU	32.068.865.036,00	-	-	-	32.068.865.036,00
3	Disperkim	3.404.257.832,00	-	-	-	3.404.257.832,00
4	DLH	199.778.000,00	-	-	-	199.778.000,00
5	Dishub	187.624.645,00	-	-	-	187.624.645,00
6	Kec. Pemalang	209.307.825,00	-	-	-	209.307.825,00
	Jumlah	41.979.833.338,00	-	-	-	41.979.833.338,00

Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp41.979.833.338,00 seluruhnya direalisasikan melalui RKUD dengan penerbitan SP2D dan murni untuk belanja TA 2024.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp41.979.833.338,00 digunakan untuk :
- Jalan dan Jembatan sebesar Rp35.304.221.338,00 terdapat pada:
  - DPU sebesar Rp32.068.865.036,00 berupa pekerjaan rekonstruksi jalan sebesar Rp31.869.482.390,00 dan rehab jembatan sebesar Rp199.382.646,00;
  - Disperkim sebesar Rp2.638.645.832,00 berupa pembangunan jalan lingkungan;
  - DLH sebesar Rp199.778.000,00 berupa pengurugan;
  - Dishub sebesar Rp187.624.645,00 berupa pengaspalan terminal;
  - Kec. Pemalang sebesar Rp209.307.825,00 berupa pembangunan jalan lingkungan di Kel. Mulyoharjo dan Kel. Bojongbata;
- Bangunan Air sebesar Rp765.612.000,00 terdapat pada:
  - Disperkim sebesar Rp765.612.000,00 berupa bangunan pengendali banjir di Kel. Pelutan (Kec. Pemalang);
- Instalasi sebesar Rp5.910.000.000,00 terdapat pada:
  - Dinkes sebesar Rp5.910.000.000,00 berupa pembangunan saluran air kotor;

Dari realisasi BM-Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp41.979.833.338,00 yang menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebesar Rp41.584.826.526,00 atau 99,06%. Terdapat selisih sebesar Rp395.006.812,00 atau 0,94%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pengurangan sebesar Rp395.006.812,00 yaitu:
- realisasi melalui SP2D sebesar Rp395.006.812,00;
  Tidak menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dikarenakan:
  - menjadi Beban Pemeliharaan sebesar Rp187.624.645,00 pada Dishub;
  - menjadi Barang *Extracomptable* sebesar Rp207.382.167,00 pada Disperkim sebesar Rp7.604.167,00 dan DLH sebesar Rp199.778.000,00.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM–Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp17.866.133.555,00 atau 109,39% dari anggaran sebesar Rp16.332.688.745,00 dan 80,15% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp22.290.072.158,00. Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya TA 2024 terdiri dari:

Tabel 5.54
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Bahan Perpustakaan	246.180.000,00	239.800.160,00	97,41	21.719.526.158,00
2	BM Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	372.300.000,00
3	BM Barang Koleksi Non Budaya	35.645.000,00	35.645.000,00	100,00	-
4	BM Aset Tidak Berwujud	-	-	-	198.246.000,00
5	BM Aset Tetap Lainnya BOS	16.030.863.745,00	17.570.688.395,00	109,61	-
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		16.332.688.745,00	17.866.133.555,00	109,39	22.290.072.158,00

Rincian BM-Aset Tetap Lainnya dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.55
Rincian Penggunaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024

No	OPD	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOS/BOP PAUD)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Dindikbud	91.700.000,00	-	17.570.988.395,00	-	17.662.688.395,00
5	Dinpusarda	144.417.660,00	-	-	-	144.417.660,00
6	Setda	52.894.000,00	-	-	-	52.894.000,00
7	Setwan	6.133.500,00	-	-	-	6.133.500,00
	Jumlah	295.145.160,00	-	17.570.988.395,00	-	17.866.133.555,00

Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp17.866.133.555,00 terdiri dari:
- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp295.445.160,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2024;
- melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp17.570.988.395,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2024 yaitu pada:
  - Dindikbud sebesar Rp17.570.988.395,00 yaitu:
    - ✓ Belanja Modal dari Dana BOS sebesar Rp17.570.688.395,00 berupa BM-Bahan Perpustakaan untuk SD dan SMP;
    - ✓ Belanja Modal dari Dana BOP PAUD sebesar Rp300.000,00 berupa BM-Bahan Perpustakaan untuk PAUD.

Capaian realisasi BM–Aset Tetap Lainnya TA 2024 109,39%, hal ini dikarenakan terdapat realisasi belanja yang melebihi pagu anggaran, yaitu

https://jdih.pemalangkab.go.id

pada Belanja Aset Tetap Lainnya BOS pada Dindikbud sebesar 109,61% hal ini dikarenakan:

- Pengelola Dana Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mengakomodir permintaan Satuan Pendidikan untuk mengubah anggaran dari Belanja Barang dan Jasa BOS menjadi Belanja Modal (BM-Aset Tetap Lainnya BOS) pada sistem ARKAS dengan pertimbangan :
  - diangkatnya Tenaga Honorer pada Dindikbud menjadi PPPK, sehingga anggaran yang direncanakan untuk tenaga honorer dialihkan untuk Belanja Modal;
  - adanya kebijakan karena adanya perubahan mulai berlakunya kurikulum baru untuk kelas rendah, sehingga perlu buku ajar sesuai kurikulum baru;
- atas perubahan anggaran tersebut, Dindikbud belum melakukan perubahan anggaran pada DPA sub kegiatan tersebut yaitu Pengelolaan Dana BOS SD dan Pengelolaan Dana BOS SMP pada SIPD saat Perubahan APBD TA 2024;
- realisasi belanja modal yang dibuat mendasari pagu pada ARKAS bukan SIPD, sehingga mengakibatkan realisasi belanja melebihi pagu anggaran (tidak sesuai DPA).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.866.133.555,00 di antaranya digunakan untuk pengadaan :

- Bahan Perpustakaan sebesar Rp239.800.160,00 terdapat pada:
  - Dindikbud sebesar Rp72.000.000,00 berupa Buku Umum;
  - Dinpusarda sebesar Rp144.417.660,00 berupa: Buku Umum;
  - Setda sebesar Rp17.249.000,00 terdiri dari: Rp5.249.000,00 berupa Buku Umum dan Rp12.000.000,00 berupa Lukisan dan Ukiran;
  - Setwan sebesar Rp6.133.500,00 berupa Buku Umum;
- Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp20.000.000,00 terdapat pada:
  - Dindikbud sebesar Rp20.000.000,00 berupa Barang Kerajinan;
- Barang Koleksi Non Budaya sebesar Rp35.645.000,00 terdapat pada:
  - Setda sebesar Rp35.645.000,00 berupa Tanaman Koleksi berserta kelengkapannya.
- Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp17.570.688.395,00 terdapat pada:
  - Dindikbud sebesar Rp17.570.688.395,00 terdiri dari:
    - ✓ BOS SD sebesar Rp11.775.276.525,00 berupa Buku Umum;
    - ✓ BOS SMP sebesar Rp5.795.411.870,00 berupa Buku Umum.

Dari realisasi BM-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.866.133.555,00 yang menjadi Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp17.409.400.859,00 atau 97,44%. Terdapat selisih sebesar Rp456.732.696,00 atau 2,56%.
Pengurangan sebesar Rp456.732.696,00 terdiri dari:

- realisasi melalui SP2D sebesar Rp47.645.000,00.
  Tidak menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar dikarenakan:
  - menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp47.645.000,00 pada Setda;
- realisasi melalui SP2B sebesar Rp409.087.696,00 berasal dari SP2B BOS :
  Tidak menjadi Aset Tetap Lainnya dikarenakan:
  - menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp409.087.696,00 pada Dindikbud.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi BM–Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp2.782.571.000,00 atau 95,50% dari anggaran sebesar Rp2.913.750.000,00 dan 100,00% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi BM-Aset Lainnya TA 2024 terdiri dari:

Tabel 5.56
Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dan 2023

Belanja Modal Aset Lainnya		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Aset Tidak Berwujud-Software	2.913.750.000,00	2.782.571.000,00	95,50	-
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya		2.913.750.000,00	2.782.571.000,00	95,50	-

Rincian BM-Aset Tetap Lainnya dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.57
Rincian Penggunaan Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024

No	OPD	Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahaan SP2B (BLUD/BOS/BOK/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Dinkes	-	-	2.585.571.000,00	-	2.585.571.000,00
2	Bapenda	197.000.000,00	-	-	-	197.000.000,00
		197.000.000,00	-	2.585.571.000,00	-	2.782.571.000,00

Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp2.782.571.000,00 terdiri dari:
- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp197.000.000,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2024;
- melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp2.585.571.000,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2024 yaitu pada:
  - Dinkes sebesar Rp2.585.571.000,00.

Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp2.782.571.000,00 di antaranya digunakan untuk pengadaan :
- Aset Tidak Berwujud (*Software*) sebesar Rp2.782.571.000,00 terdapat pada:
  - Dinkes sebesar Rp2.585.571.000,00;
  - Bapenda sebesar Rp197.000.000,00;

Dari realisasi BM-Aset Lainnya sebesar Rp2.782.571.000,00 yang menjadi Aset Tidak Berwujud adalah sebesar Rp2.782.571.000,00 atau 100,00%.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam maupun bencana sosial dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp1.266.502.459,00 atau 64,21% dari anggaran sebesar Rp1.972.500.000,00 dan 296,18% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp427.605.701,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 terdiri dari:

Tabel 5.58
Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	64,21	427.605.701,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	64,21	427.605.701,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga naik sebesar Rp838.896.758,00 atau 196,18% dibanding tahun 2023 dikarenakan pada tahun terdapat pengembalian pendapatan yang cukup signifikan sebesar 46,05% dari realisasi Belanja Tidak Terduga.

Rincian Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga TA 2024

No	OPD	Realisasi Belanja Tidak Terduga				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOK/BOS/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2024 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	BPKAD	1.260.866.800,00	5.635.659,00	-	-	1.266.502.459,00
	Jumlah	1.260.866.800,00	5.635.659,00	-	-	1.266.502.459,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp1.266.502.459,00 terdiri dari:

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp1.266.502.459,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2024 sebesar Rp1.260.866.800,00;
  - Belanja untuk pembayaran atas Utang Jangka Pendek Lainnya tahun sebelumnya sebesar Rp5.635.659,00 berupa pengembalian kepada KUD Mina Misoyo Sari yaitu pendapatan yang salah catat pada tahun 2023, yang seharusnya menjadi pendapatan KUD Mina Misoyo Sari tetapi tercatat di RKUD sebagai Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan pada Disperik.

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.266.502.459,00 digunakan untuk :

- penanganan bencana sebesar Rp435.722.600,00 terdiri dari:
  - penanganan bencana alam di Kec. Watukumpul sebesar Rp349.282.500,00;
  - penanganan bencana kebakaran di Pasar Belik sebesar Rp86.440.100,00;
- pemberian bantuan sosial sebesar Rp247.550.000,00 terdiri dari:
  - pemberian bantuan sosial sebesar Rp73.250.000,00;
  - pemberian bantuan sosial sebesar Rp50.750.000,00;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- pemberian bantuan sosial sebesar Rp56.250.000,00;
- pemberian bantuan sosial sebesar Rp67.300.000,00;

- pengembalian pendapatan sebesar Rp583.229.859,00 terdiri dari:
  - pengembalian Utang Jangka Pendek Lainnya kepada KUD Mina Misoyo Sari sebesar Rp5.635.659,00 karena pendapatan yang seharusnya hak KUD tetapi masuk ke RKUD sebagai Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan pada Disperik;
  - pengembalian Dana BOP PAUD TA 2023 ke RKUN sebesar Rp23.100.000,00;
  - pengembalian Dana Non Kapitasi TA 2023 sebesar Rp551.494.200,00;
  - pengembalian BPHTB sebesar Rp2.500.000,00;
  - pengembalian BPHTB sebesar Rp500.000,00;

5.1.3 TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Realisasi Transfer TA 2024 sebesar Rp439.333.244.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp439.461.644.000,00 dan 102,00% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp430.716.395.360,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60
Transfer TA 2024 dan 2023

Transfer		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	14.681.180.000,00	14.681.180.000,00	100,00	15.047.084.900,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	99,97	415.669.310.460,00
Jumlah Transfer		439.461.644.000,00	439.333.244.000,00	99,97	430.716.395.360,00

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2024 sebesar Rp14.681.180.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp14.681.180.900,00 dan 97,57% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp15.047.084.900,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:

Tabel 5.61
Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2024 dan 2023

Transfer Bagi Hasil Pendapatan		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.281.883.069,00	11.281.883.069,00	100,00	10.413.308.000,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.399.296.931,00	3.399.296.931,00	100,00	4.633.776.900,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		14.681.180.000,00	14.681.180.000,00	100,00	15.047.084.900,00

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp11.281.833.069,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp11.281.833.069,00 dan 108,34% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp10.413.308.000,00. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan bagi hasil pajak daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2024 sebesar Rp3.399.296.931,00atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.399.296.931,00 dan 73,36% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp4.633.776.900,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan bagi hasil retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp424.652.064.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp424.780.464.700,00 dan 102,16% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp415.669.310.460,00. Transfer Bantuan Keuangan ini terdiri dari:

Tabel 5.62
Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

Transfer Bantuan Keuangan		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	99,97	415.669.310.460,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	99,97	415.669.310.460,00

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 sebesar Rp424.652.064.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp424.780.464.700,00 dan 102,16% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp415.669.310.460,00. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp424.652.064.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.63
Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa :**	**-**	**-**		**113.229.692.000,00**
	- Bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD	-	-		*113.229.692.000,00*
2	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa :**	**-**	**-**		**8.845.000.000,00**
	- Bantuan Keuangan kepada desa (Khusus)	-	-		*8.160.000.000,00*
	- Bantuan keuangan untuk TMMD (Bantuan Provinsi)	-	-		*685.000.000,00*
3	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa :**	**424.780.464.000,00**	**424.652.064.000,00**	**99,97**	**293.594.618.460,00**
	- Bantuan Alokasi Dana Desa	*113.360.167.000,00*	*113.360.167.000,00*	*100,00*	-
	- Bantuan keuangan untuk TMMD (Bantuan Provinsi)	*690.000.000,00*	*690.000.000,00*	*100,00*	-
	- Bantuan Keuangan kepada desa (Khusus)	*14.955.000.000,00*	*14.855.000.000,00*	*99,33*	*9.415.000.000,00*
	- Bantuan Keuangan kepada desa (Khusus-Hasil Musrenbang)	*16.661.783.000,00*	*16.661.783.000,00*	*100,00*	*14.167.422.700,00*
	- Bantuan Keuangan kepada desa (BKKD-Pokkir)	*5.775.000.000,00*	*5.775.000.000,00*	*100,00*	*2.400.000.000,00*
	- Bantuan Keuangan kepada desa (BKKD-Non Pokkir)	*6.350.000.000,00*	*6.321.600.000,00*	*99,55*	*5.500.000.000,00*
	- Bantuan keuangan untuk TMMD (APBD Pemalang)	*837.000.000,00*	*837.000.000,00*	*100,00*	*837.000.000,00*
	- Dana Desa (APBN)	*266.151.514.000,00*	*266.151.514.000,00*	*100,00*	*261.275.195.760,00*
Jumlah		**424.780.464.000,00**	**424.652.064.000,00**	**99,97**	**415.669.310.460,00**

Bantuan Keuangan Dana Desa dari APBN (DD APBN) sebesar Rp266.151.514.000,00 direalisasikan melalui Pengesahan SP2B.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 dan 2023, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.64
Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

PEMBIAYAAN		2024		2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	208.539.214.000,00	200.944.214.155,00	155.751.465.867,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	27.850.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO			**186.444.214.155,00**	**127.901.465.867,00**
SILPA			**144.470.788.831,00**	**197.195.413.907,00**

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 sebesar Rp200.944.214.155,00 atau 96,36% dari anggarannya sebesar Rp208.539.214,00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2024 sebesar Rp14.500.000.000,00 dari anggarannya sebesar Rp14.500.000.000,00 atau 100%.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.65
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Penerimaan Pembiayaan		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	160.944.214.000,00	159.517.643.992,00	99,11	155.751.465.000,00
2	Dana Cadangan	40.000.000.000,00	41.426.570.163,00	103,57	-
3	Peneriman kembali investasi non permanen kepada BUMD	7.595.000.000,00	-	-	-
Jumlah		**208.539.214.000,00**	**200.944.214.155,00**		**155.751.465.000,00**

5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2024 sebesar Rp159.517.643.992,00. Realisasi ini termasuk didalamnya droping/transfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi yang diterima/masuk rekening kas umum daerah pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya.

5.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan sebesar Rp1.426.570.163,00 adalah Bunga Dana Cadangan tahun 2022 dan 2023 yang dicairkan pada tahun 2024 bersamaan Pokok Dana Cadangan Rp40.000.000.000,00 jadi pencairan dana cadangan tahun 2024 sebesar Rp.41.426.570.163,00.

5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Kepada BUMD

Saldo Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Kepada BUMD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp7.595.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Pengeluaran Pembiayaan		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	20.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pemda	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00	7.850.000.000,00
Jumlah		**14.500.000.000,00**	**14.500.000.000,00**	**100,00**	**27.850.000.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Saldo Pembentukan Dana Cadangan pada penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00

5.1.4.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah TA 2024 sebesar Rp14.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024

No	Penyertaan Modal/Investasi pemerintah	2024			Anggaran 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023	767.000.000,00	767.000.000,00	100,00	500.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng Tahun Anggaran 2023	3.733.000.000,00	3.733.000.000,00	100,00	4.050.000.000,00
4	Penyertaan Modal PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	-
5	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	-
	JUMLAH	**14.500.000.000,00**	**14.500.000.000,00**		**7.850.000.000,00**

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

5.1.4.2.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2024 dan 2023 terdapat SILPA yang alokasi pada tahun anggaran berikutnya sudah terikat/ditentukan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

Tabel 5.68
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
	SiLPA 2024 (A*udited*)	**144.470.788.831,00**	**160.944.214.155,00**
	A SiLPA Terikat (*harus dianggarkan kembali*)	**21.510.404.220,00**	**22.593.631.071,00**
	1) SiLPA JKN di Puskesmas	*2.586.247.710,00*	3.085.216.504,00
	2) SiLPA BLUD RSUD	18.152.510.547,00	15.695.534.203,00
	3) SiLPA DAK non Fisik	771.645.963,00	2.386.310.201,00
	a) SiLPABOS SDN dan SMP N	35.771.608,00	*425.723.993,00*
	b) SiLPA BBOP PAUD	-	*23.100.000,00*
	c) SiLPA BOK	735.874.355,00	*1.937.486.208,00*
	4) Dana Cadangan	-	1.426.570.163,00
	5) Insentif Fiskal	70.240.667,00	-
	6) SiLPA DAK Fisik	156.533.961,00	-
	7) SiLPA Tidak terikat	122.960.384.611,00	138.350.583.084,00
	SiLPA 2024 (Audited)	**144.470.788.831,00**	**160.944.214.155,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Ringkasan LPSAL Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.69
Ringkasan LPSAL 2024 dan 2023

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebil Awal	160.944.214.155,00	155.751.465.867,00	5.192.748.288,00
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	159.517.643.992,00	155.751.465.867,00	3.766.178.125,00
3	Sub Total (1-2)	1.426.570.163,00	-	1.426.570.163,00
4	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	144.470.788.831,00	160.944.214.155,00	(16.473.425.324,00)
5	Sub Total (3+4)	145.897.358.994,00	160.944.214.155,00	(15.046.855.161,00)
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-	-
7	Lain - Lain	(1.426.570.163,00)	-	(1.426.570.163,00)
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	144.470.788.831,00	160.944.214.155,00	(16.473.425.324,00)

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp160.944.214.155,00 naik sebesar Rp5.192.748.288,00 atau 3,33 % dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp155.751.465.867,00.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2024 penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp159.517.643.992,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.2.3. Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2024 sebesar Rp144.470.788.831,00 atau turun sebesar Rp16.473.425.324,00 atau 11,40 % dari SILPA Tahun 2023 sebesar Rp160.944.214.155,00.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5. Lain – Lain

Lain -lain sebesar Rp1.426.570.163,00 adalah Bunga Dana Cadangan TA 2022 dan TA 2023 yang dicairkan bersamaan dengan Pokok Dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00 pada bulan Februari 2024 dengan rincian bunga deposito dana Cadangan TA 2022 sebesar Rp57.534.246,00 dan bunga deposito dana cadangan TA 2023 sebesar Rp1.369.035.917,00**.**

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2024 sebesar Rp144.470.788.831,00 atau turun sebesar Rp16.473.425.324,00 atau 11,4 % dari Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp160.944.214.155,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional terdiri dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Kegiatan Operasional di Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan dan Beban – LO. Adapun Pendapatan–LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LO, Pendapatan Transfer–LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO. Kegiatan Non Operasional meliputi Surplus Penjualan Aset Non Lancar–LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO. Adapun Pendapatan–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 PENDAPATAN–LO

Pendapatan–LO dalam Laporan Operasional di Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO, Pendapatan Transfer–LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO, Surplus Non Operasional–LO dan Pendapatan Luar Biasa–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 5.70
Pendapatan-LO TA 2024 dan 2023

Pendapatan - LO		SALDO (Rp)		Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		2024	2023		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	424.396.986.531,73	375.181.695.379,65	49.215.291.152,08	13,12
2	Pendapatan Transfer - LO	2.089.139.947.294,00	1.951.502.217.892,00	137.637.729.402,00	7,05
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	37.221.191.616,86	55.505.773.417,56	(18.284.581.800,70)	(32,94)
Jumlah		**2.550.758.125.442,59**	**2.382.189.686.689,21**	**168.568.438.753,38**	**7,08**

Realisasi Pendapatan–LO TA 2024 sebesar Rp2.550.758.125.442,59 naik sebesar Rp168.568.438.753,38 atau 7,08% dari Realisasi Pendapatan–LO TA 2023 sebesar Rp2.382.189.686.689,21. Realisasi masing-masing akun Pendapatan–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp424.396.986.531,73 naik sebesar Rp49.215.291.152,08 atau 13,12% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO TA 2023 Rp375.181.695.379,65. Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.71
Pendapatan Asli Daerah–LO TA 2024 dan 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Saldo (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
		2024	2023		
1	Pajak Daerah - LO	127.849.620.715,34	121.532.148.854,16	6.317.471.861,18	5,20
2	Retribusi Daerah - LO	246.798.088.932,54	46.478.512.384,00	200.319.576.548,54	430,99
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	30.301.211.215,93	27.733.484.820,43	2.567.726.395,50	9,26
4	Lain-lain PAD yang sah - LO	19.448.065.667,92	179.437.549.321,06	(159.989.483.653,14)	(89,16)
Jumlah		**424.396.986.531,73**	**375.181.695.379,65**	**49.215.291.152,08**	**13,12**

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah– LO TA 2024 tersaji sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Pajak Daerah–LO

Realisasi Pajak Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp127.849.620.715,34 naik sebesar Rp6.317.471.861,18 atau 5,20% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp121.532.148.854,16. Realisasi masing-masing akun Pajak Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.72
Pajak Daerah-LO TA 2024 dan 2023

Pajak Daerah - LO		SALDO (Rp)		Kenaikan/	%
		2024	2023	Penurunan (Rp)	
1	Hotel - LO	600.008.196,00	630.807.498,00	(30.799.302,00)	105,13
2	Restoran - LO	3.298.776.024,00	2.480.407.785,00	818.368.239,00	75,19
3	Pajak Hiburan - LO	408.836.253,00	343.489.890,00	65.346.363,00	84,02
4	Pajak Reklame Papan/Billboard - LO	1.970.160.286,34	1.847.672.510,16	122.487.776,18	93,78
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri -	58.573.203.303,00	48.884.821.760,00	9.688.381.543,00	83,46
6	Pajak Parkir - LO	86.896.040,00	144.717.921,00	(57.821.881,00)	166,54
7	Pajak Air Tanah - LO	1.512.127.950,00	523.181.640,00	988.946.310,00	34,60
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	10.700.000,00	10.000.000,00	700.000,00	93,46
9	Pasir dan kerikil - LO	-	927.733.000,00	(927.733.000,00)	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan - LO	33.052.453.398,00	31.369.152.311,00	1.683.301.087,00	94,91
11	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	27.624.741.965,00	34.370.164.539,00	(6.745.422.574,00)	124,42
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	711.717.300,00	-	711.717.300,00	-
	Jumlah	**127.849.620.715,34**	**121.532.148.854,16**	**6.317.471.861,18**	**5,20**

Tabel 5.73
Perbandingan Pajak LO dan LRA

Jenis Pajak	2024		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pajak Reklame	1.970.160.286,34	1.838.821.283,00	131.339.003,34
Pajak Air Tanah	1.512.127.950,00	1.519.027.200,00	(6.899.250,00)
Pajak Bumi dan Bangunan	33.052.453.398,00	26.305.780.261,00	6.746.673.137,00
	36.534.741.634,34	***29.663.628.744,00***	***6.871.112.890,34***

Terdapat selisih Realisasi Pajak–LO dengan Pajak–LRA TA 2024 sebesar Rp6.871.112.890,34. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Pajak Reklame terdapat selisih sebesar Rp131.339.003,34. Hal ini dikarenakan:
   - Bertambah sebesar Rp497.609.938,33 merupakan Pendapatan diterima dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame TA 2024.
   - Bertambah Piutang Pajak Reklame tahun 2024 sebesar 98.706.494,00.
   - Berkurang pendapatan diterima dimuka Pajak reklame TA 2023 Rp422.666.355,99.
   - Berkurang Piutang Pajak Reklame karena ada pembayaran atas Piutang Pajak Reklame tahun 2023 sebesar Rp42.311.073,00.
2. Pajak Air Tanah terdapat selisih sebesar Rp6.899.250,00. Hal ini dikarenakan:
   - Penambahan Piutang Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp22.494.570,00.
   - Pengurangan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp29.393.820,00 karena adanya pembayaran atas Piutang Pajak Air Tanah 2023.
3. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat selisih sebesar Rp6.746.673.137,00. Hal ini dikarenakan :
   - Penambahan Piutang PBB TA 2024 sebesar Rp9.707.010.165,00
   - Pengurangan Piutang PBB sebesar Rp2.960.337.028,00 karena adanya pembayaran atas Piutang PBB tahun 2012 – 2023.

5.3.1.1.2 Retribusi Daerah–LO

Realisasi Retribusi Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp246.798.088.932,54 naik sebesar Rp200.319.576.548,54 atau 430,99% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp46.478.512.384,00. Realisasi masing-masing akun Retribusi Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.74
Retribusi Daerah–LO TA 2024 dan 2023

Retribusi Daerah-LO		Saldo (Rp)		Kenaikan/	%
		2024	2023	Penurunan (Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	218.594.500.495,54	16.201.303.131,00	202.393.197.364,54	1.249,24
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	529.063.000,00	418.654.000,00	110.409.000,00	26,37
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	-	7.100.000,00	(7.100.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	626.755.000,00	552.888.000,00	73.867.000,00	13,36
5	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor - LO	-	515.505.000,00	(515.505.000,00)	(100,00)
6	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	-	7.800.000,00	(7.800.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	-	104.185.500,00	(104.185.500,00)	(100,00)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	369.870.117,00	573.461.228,00	(203.591.111,00)	(35,50)
9	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	16.569.500.994,00	18.751.339.746,00	(2.181.838.752,00)	(11,64)
10	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	2.726.817.826,00	3.524.810.119,00	(797.992.293,00)	(22,64)
11	Retribusi Jasa Usaha Terminal - LO	-	311.216.000,00	(311.216.000,00)	(100,00)
12	Retribusi Rumah Potong Hew an - LO	78.588.000,00	56.988.000,00	21.600.000,00	37,90
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	1.385.171.000,00	1.089.135.550,00	296.035.450,00	27,18
14	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	5.917.822.500,00	4.355.574.110,00	1.562.248.390,00	35,87
15	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	-	8.552.000,00	(8.552.000,00)	(100,00)
				-	
Jumlah		***246.798.088.932,54***	***46.478.512.384,00***	**200.319.576.548,54**	**430,99**

Tabel 5.75
Perbandingan Retribusi LO dan LRA

Retribusi Daerah-LO		Saldo		Selisih (Rp)
		LO (Rp)	LRA (Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	218.594.500.495,54	218.384.657.616,00	209.842.879,54
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	5.917.822.500,00	5.928.457.500,00	(10.635.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	16.569.500.994,00	9.340.702.202,00	7.228.798.792,00
Jumlah		***241.081.823.989,54***	***233.653.817.318,00***	**7.428.006.671,54**

Terdapat selisih Realisasi Retribusi - LO dengan Retribusi - LRA TA 2024 sebesar Rp7.428.006.671,54. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan kesehatan - LO terdapat selisih Rp209.842.879,54. Hal ini dikarenakan:
   - Bertambah karena adanya Pengakuan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka (PDD) sebesar Rp17.372.531,51 atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
   - Bertambah karena adanya Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2024 sebesar Rp659.682.900,00.
   - Berkurang karena adanya Pengakuan Pendapatan-LO atas PDD tahun sebelumnya sebesar Rp21.575.452,05, dan
   - Berkurang karena adanya pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit tahun sebelumnya sebesar Rp454.042.941,00.
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO terdapat selisih Rp10.635.000,00. Hal ini dikarenakan adanya pelunasan piutang sebesar Rp10.635.000,00.
3. Retribusi Pelayanan Pasar terdapat selisih sebesar Rp7.228.798.792,00. Hal ini dikarenakan:
   - Bertambah sebesar Rp8.641.236.777,50 karena ada Piutang Retribusi Pasar TA 2024
   - Berkurang sebesar Rp1.331.165.257,00 karena ada pembayaran atas Piutang Retribusi Pasar TA 2023 dan TA 2022.
   - Bertambah karena Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Retribusi Pasar TA 2024 pada Diskoperindag 82.997.361,50.
   - Reklas pencatatan Pendapatan-LO Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.724.633,00 menjadi Pendapatan-LO Retribusi pada Diskoperindag berupa pengakuan Pendapatan-LO atas Pendapatan Diterima Dimuka TA 2023.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp30.301.211.215,93 naik sebesar Rp2.567,726.395,50 atau 9,26% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp27.733.484.820,43.
Realisasi masing-masing akun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.76
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO
TA 2024 dan 2023

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		Realisasi (Rp)		Kenaikan/
		2024	2023	Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO	7.044.441.442,00	6.632.395.470,00	412.045.972,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO	23.256.769.773,93	21.101.089.350,43	2.155.680.423,50
	Jumlah	**30.301.211.215,93**	**27.733.484.820,43**	**2.567.726.395,50**

Tabel 5.77
Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO dan LRA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah		Saldo		Selisih (Rp)
		LO (Rp)	LRA (Rp)	
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	23.256.769.773,93	26.031.762.403,00	(2.774.992.629,07)
Jumlah		***23.256.769.773,93***	***26.031.762.403,00***	**(2.774.992.629,07)**

Terdapat selisih Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2024 sebesar Rp2.774.992.629,07. Hal ini dikarenakan selisih sebesar Rp2.774.992.629,07 adalah selisih antara Penyertaan Modal sebesar Rp14.500.000.000,00 dengan Penambahan Nilai Investasi pada BUMD sebesar Rp13.459.885.159,49, dimana terjadi penambahan nilai investasi sebesar Rp4.276.022.593,57 yaitu pada : PDAM, PTAU, LKM BKD, BKK Taman dan pengurangan nilai investasi sebesar Rp5.316.147.434,08 yaitu pada Bank Pemalang.

5.3.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah–LO

Saldo Lain-lain PAD yang Sah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp19.448.065.667,92 turun sebesar Rp159.989.483.653,14 atau 89,16% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp179.437.549.321,06. Realisasi masing-masing akun Lain-lain PAD yang Sah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.78
Lain-lain PAD yang Sah–LO TA 2024 dan 2023

Lain-lain PAD Yang Sah - LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.218.076.333,00	2.179.625.800,00	(961.549.467,00)	(44,12)
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.530.473.812,00	962.785.387,00	567.688.425,00	58,96
3	Pendapatan Bunga - LO	6.305.624.046,00	7.199.857.759,00	(894.233.713,00)	(12,42)
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	-	33.684.121,00	(33.684.121,00)	(100,00)
5	Pendapatan Denda Pajak- LO	533.421.262,00	789.809.487,00	(256.388.225,00)	(32,46)
6	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO	-	-	-	-
7	Pendapatan dari Pengembalian - LO	2.552.936.792,00	2.602.869.804,00	(49.933.012,00)	(1,92)
8	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	7.307.533.422,92	4.771.379.522,17	2.536.153.900,75	53,15
9	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	-	109.933.490.023,89	(109.933.490.023,89)	(100,00)

https://jdih.pemalangkab.go.id

Lain-lain PAD Yang Sah - LO		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
10	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	-	-	-	-
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	-	50.817.300.028,00	(50.817.300.028,00)	(100,00)
12	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	-	146.747.389,00	(146.747.389,00)	(100,00)
		19.448.065.667,92	**179.437.549.321,06**	(159.989.483.653,14)	(89,16)

Tabel 5.79
Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah–LO dan LRA

Lain-lain PAD Yang Sah - LO		2024		Selisih (Rp)
		LO (Rp)	LRA (Rp)	
1	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	-	90.824.372,00	(90.824.372,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	7.307.533.422,92	4.346.621.414,00	2.960.912.008,92
	Jumlah	**7.307.533.422,92**	**7.307.533.422,92**	**2.870.087.636,92**

Terdapat selisih Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan Lain-lain PAD yang Sah - LRA sebesar Rp2.869.112.269,92. Hal ini dikarenakan :

1. Terdapat selisih penerimaan atas TGR - LO sebesar Rp90.824.372,00 dikarenakan pada tahun 2024 ada realisasi penerimaan atas TGR sebesar Rp90.824.372,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.80
Rincian Selisih Penerimaan atas TGR - LO

No	Jenis Kerugian	Mutasi kurang (Rp)
1	Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	32.362.400,00
2	TGR dari Pembayaran Premi Asuransi CAR Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	31.186.400,00
3	TGR dari Pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 2004 s.d. 2009 yang berasal dari pos Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan	14.063.572,00
4	TGR atas hilangnya kendaraan bermotor roda empat Nopol G 8 D	500.000,00
6	TGR hilangnya 12 CPU pada Kepala SMPN 4 Banbarbolang a.n. Nasari, S.Pd.	12.712.000,00
Jumlah		**90.824.372,00**

2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan – LO selisih sebesar Rp2.960.912.008,92.

Tabel 5.81
Rincian Selisih Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		2024		Selisih (Rp)
		LRA (Rp)	LO (Rp)	
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	156.660.000,00	265.730.000,00	(109.070.000,00)
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	157.110.000,00	290.421.157,86	(133.311.157,86)
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	160.500.000,00	439.544.334,98	(279.044.334,98)
4	Dinas Pertanian	202.546.500,00	202.546.500,00	-
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	659.605.914,00	1.139.834.125,08	(480.228.211,08)
6	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.010.199.000,00	4.968.481.938,00	(1.958.282.938,00)
	Jumlah	**4.346.621.414,00**	**7.306.558.055,92**	**(2.959.936.641,92)**

Hal ini dikarenakan:

a. Pendapatan-LO atas Sewa Tanah di BPKAD sebesar Rp480.228.211,08 rinciannya adalah sebagai berikut:

- Bertambah sebesar Rp351.478.497,72. Hal ini karena adanya penambahan Pendapatan Diterima Dimuka TA 2024.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Berkurang sebesar Rp562.332.112,14. Hal ini karena adanya pelunasan atas Pendapatan Diterima Dimuka TA 2023.
- Berkurang sebesar Rp137.538.311,65. Hal ini karena adanya pelunasan atas Pendapatan Diterima Dimuka TA 2022.
- Berkurang sebesar Rp80.419.618,00. Hal ini karena adanya pelunasan atas Pendapatan Diterima Dimuka TA 2021.
- Berkurang sebesar Rp50.500.000,00. Hal ini karena adanya pelunasan atas Pendapatan Diterima Dimuka TA 2020.
- Berkurang sebesar Rp916.667,00. Hal ini karena adanya pelunasan atas Pendapatan Diterima Dimuka TA 2019.

b. Pendapatan-LO atas Sewa Gedung dan Bangunan di Disperkim selisihnya sebesar Rp109.070.000,00. Hal ini disebabkan karena:
   - Bertambah karena adanya piutang pendapatan sewa rusunawa TA 2024 sebesar Rp135.475.000,00.
   - Berkurang karena adanya pelunasan piutang pendapatan sewa rusunawa tahun sebelumnya sebesar Rp26.405.000,00.

c. Pendapatan-LO atas Sewa Gedung dan Bangunan di Disparpora selisihnya sebesar Rp279.044.334,98. Hal ini karena :
   - Bertambah karena adanya penambahan piutang sebesar Rp288.000.000,00.
   - Bertambah pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp147.900.000,00.
   - Berkurang pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp27.044.334,98.
   - Berkurang karena adanya pembayaran atas piutang sebesar Rp36.000.000,00.

d. Pendapatan-LO atas Sewa Gedung dan Bangunan di Diskoperindag selisihnya sebesar Rp133.311.157,86.
   - Bertambah pendapatan diterima dimuka Sewa Kios *Gandulan Culinary Center* (GCC) tahun 2024 sebesar Rp49.315,07.
   - Bertambah pendapatan diterima dimuka Sewa Kios GCC tahun 2024 sebesar Rp49.315,07.
   - Bertambah pendapatan diterima dimuka Sewa Kios GCC tahun 2024 sebesar Rp3.057.534,25
   - Bertambah pendapatan diterima dimuka Sewa Kios GCC tahun 2024 sebesar Rp1.528.767,12.
   - Bertambah pendapatan diterima dimuka Sewa Kios GCC tahun 2024 Rp11.359.835,62.
   - Bertambah pendapatan diterima dimuka Sewa Bank Pemalang tahun 2024 sebesar Rp87.019.397,26.
   - Berkurang sebesar Rp60.109.489,05 karena adanya pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Tahun sebelumnya.
   - Berkurang sebesar Rp8.488.554,22 atas pendapatan diterima dimuka sewa Pasar Beras Tahun 2021.
   - Berkurang sebesar Rp16.029.197,08 atas pendapatan diterima dimuka Sewa Kios GCC tahun 2023.
   - Berkurang sebesar Rp1.724.633,00 atas pendapatan diterima dimuka Sewa Pasar tahun 2023.
   - Berkurang sebesar Rp53.948.266,42 atas pendapatan diterima dimuka sewa Kios GCC Tahun 2022.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Berkurang sebesar Rp42.175.182,48 atas pendapatan diterima dimuka sewa Pasar Randudongkal Tahun 2021.
- Berkurang sebesar Rp53.900.000 atas pelunasan pendapatan diterima dimuka sewa Pasar Beras tahun 2020.

e. Pendapatan-LO atas Sewa Tanah Eks Bondo Desa di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.958.282.938,00 adalah sebagai berikut:
- Bertambah atas pendapatan diterima dimuka dari pendapatan diterima dimuka atas pendapatan sewa tanah eks bondo desa tahun 2024 sebesar Rp0,00.
- Berkurang atas pendapatan diterima dimuka dari pendapatan diterima dimuka atas pendapatan sewa tanah eks bondo desa tahun 2023 sebesar Rp1.958.282.938,00.

5.3.1.2 Pendapatan Transfer–LO

Pendapatan Transfer–LO berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat–LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LO dan Bantuan Keuangan–LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82
Pendapatan Transfer-LO TA 2024 dan 2023

Pendapatan Transfer - LO		SALDO		Kenaikan	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Penurunan (Rp)	
1	Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.866.365.810.410,00	1.745.799.264.070,00	120.566.546.340,00	6,91
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	5.719.565.000,00	6.635.557.000,00	(915.992.000,00)	(13,80)
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	198.012.525.544,00	199.067.396.822,00	(1.054.871.278,00)	(0,53)
4	Bantuan Keuangan - LO	19.042.046.340,00	-	19.042.046.340,00	-
Jumlah		**2.089.139.947.294,00**	**1.951.502.217.892,00**	**137.637.729.402,00**	**7,05**

5.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat–LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam DAU, DAK dengan realisasi TA 2024 Rp1.866.365.810.410,00 naik sebesar Rp120.566.546.340,00 atau 6,91% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 Rp1.745.799.264.070,00.

Tabel 5.83
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO TA 2024 dan 2023

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		SALDO (Rp)		Kenaikan/	%
		2024	2023	Penurunan (Rp)	
1	Bagi Hasil Pajak - LO	29.810.548.000,00	30.720.289.000,00	(909.741.000,00)	(2,96)
2	Bagi hasil SDA - LO	-	3.131.870.000,00	(3.131.870.000,00)	(100,00)
3	Dana Alokasi Umum - LO	1.265.304.393.000,00	1.178.380.360.243,00	86.924.032.757,00	7,38
4	Dana Alokasi Khusus - LO	571.250.869.410,00	533.566.744.827,00	37.684.124.583,00	7,06
Jumlah		**1.866.365.810.410,00**	**1.745.799.264.070,00**	**120.566.546.340,00**	**6,91**

Tabel 5.84
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO dan LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		SALDO (Rp)		SELISIH (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil Pajak - LO	29.810.548.000,00	33.425.428.000,00	(3.614.880.000,00)
Jumlah		**29.810.548.000,00**	**33.425.428.000,00**	**(3.614.880.000,00)**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Terdapat selisih Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–LO yaitu pada Bagi Hasil Pajak - LO dengan Bagi Hasil Pajak - LRA terdapat selisih sebesar Rp3.614.880.000,00. Hal ini dikarenakan:

- Selisih lebih karena Saldo Dana *Transfer Treasury Deposito Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.701.000,00 berdasar Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.
- Selisih kurang karena adanya penyaluran Saldo Dana *Transfer Treasury Deposito Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.710.515.000,00 dan Piutang Transfer Pemerintah Pusat karena ada penerimaan DBH CHT sebesar Rp929.066.000,00.
- Adapun Rincian Dana *Transfer Treasury Deposito Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Tabel 5.85
Rincian TDF TA 2024 dan 2023

Uraian		Jumlah	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)		
1	DBH PBB-LO	-	397.587.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	-	2.179.956.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	-	95.253.000,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	1.588.000,00	427.000,00
5	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	9.505.000,00	3.405.000,00
6	DBH SDA Minyak Bumi-LO	10.529.000,00	33.887.000,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	2.000,00	-
8	DBH SDA Gas Bumi-LO	3.076.000,00	-
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	1.000,00	-
Jumlah		**24.701.000,00**	**2.710.515.000,00**

5.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO TA 2024 meliputi Dana Insentif Daerah dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.719.565.000,00 turun sebesar Rp915.992.000,00 atau 13,80% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.635.557.000,00. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa) LRA dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa) – LO selisih kurang sebesar Rp266.151.514.000,00. Hal ini karena transfer bantuan keuangan ke desa berupa Dana Desa yang berasal dari APBN bukan merupakan kinerja operasional bagi Pemerintah Daerah.

5.3.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp198.012.525.544,00 turun sebesar Rp8.103.448.505,00 atau 4,27% dengan realisasi 2023 sebesar Rp189.909.077.039,00. Adapun rincian realisasinya sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.86
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO TA 2024 dan 2023

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO		SALDO (Rp)		Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		2024	2023		
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	44.475.172.677,00	44.628.658.256,00	(153.485.579,00)	(0,34)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-	27.666.706.496,00	25.973.581.272,00	1.693.125.224,00	6,52
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) - LO	49.286.420.503,00	48.090.052.058,00	1.196.368.445,00	2,49
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP) - LO	164.918.271,00	128.936.024,00	35.982.247,00	27,91
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	76.419.307.597,00	71.087.849.429,00	5.331.458.168,00	7,50
Jumlah		**198.012.525.544,00**	**189.909.077.039,00**	**8.103.448.505,00**	**4,27**

Tabel 5.87
Perbandingan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO dan LRA

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO		2024 (Rp)		SELISIH (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	44.475.172.677,00	41.138.706.115,00	3.336.466.562,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) - LO	27.666.706.496,00	25.310.027.122,00	2.356.679.374,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) - LO	49.286.420.503,00	48.718.257.994,00	568.162.509,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP) - LO	164.918.271,00	152.105.550,00	12.812.721,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	76.419.307.597,00	76.419.307.597,00	-
Jumlah		**198.012.525.544,00**	**191.738.404.378,00**	**6.274.121.166,00**

Terdapat selisih Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–LO yaitu pada Bagi Hasil Pajak Provinsi - LO dengan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA terdapat selisih sebesar Rp6.274.121.166,00.

5.3.1.2.4 Bantuan Keuangan–LO

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi–LO TA 2024 sebesar Rp19.042.046.340,00 naik sebesar Rp9.883.726.557,00 atau 107,92% dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp9.158.319.783,00.

5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO terdiri dari Pendapatan Hibah–LO, Pendapatan Dana Darurat–LO dan Pendapatan Lainnya–LO. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.88
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO TA 2024 dan 2023

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		SALDO	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	37.221.191.616,86	55.505.773.417,56
	Jumlah	**37.221.191.616,86**	**55.505.773.417,56**

5.3.1.3.1 Pendapatan Hibah–LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri–LO TA 2024 dengan realisasi sebesar Rp37.221.191.616,86 turun sebesar Rp18.284.581.800,70 atau 32,94% dibandingkan realisasi TA 2023 dengan realisasi sebesar Rp55.505.773.417,56 .

Tabel 5.89
Pendapatan Hibah-LO TA 2024 dan 2023

Pendapatan Hibah-LO		SALDO		Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	2.322.403.050,00	-	(2.322.403.050,00)	-
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	25.012.422.281,86	54.371.761.137,56	29.359.338.855,70	54,00
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	9.886.366.285,00	1.126.519.780,00	(8.759.846.505,00)	(777,60)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	-	7.492.500,00	7.492.500,00	100,00
	Jumlah	**37.221.191.616,86**	**55.505.773.417,56**	**18.284.581.800,70**	**32,94**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Adapun Penjelasan Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri–LO TA 2024 dengan realisasi sebesar Rp37.221.191.616,86 adalah sebagai berikut:

1. Hibah dari Pemerintah Pusat – LO terdapat pada Dinas Koperasi UMKM mendapat hibah dari Kementerian Perdagangan berupa bangunan pasar Belik sebesar Rp2.322.403.050,00.
2. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp25.012.422.281,86 terdapat pada:
   1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebesar Rp1.791.258.250 adalah Penerimaan Hibah Barang Persediaan dari Pemprov Jateng berupa Alat Kontrasepsi.
   2) Dinas Kesehatan sebesar Rp20.515.861.436,98 berupa Penerimaan Hibah Obat-obatan dari Pemprov Jateng.
   3) Hibah Obat-obatan Lainnya sebesar Rp2.705.302.594,88 dari Pemprov Jateng ke Dinas Kesehatan.
3. Hibah dari Kelompok Masyarakat sebesar Rp9.886.366.285,00 rinciannya sebagai berikut:
   1) Dinas Koperasi UMKM sebesar Rp1.185.150.000,00 berupa uang untuk pedagang.
   2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.701.216.285,00 berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.3.2 BEBAN

Realisasi Beban TA 2024 sebesar Rp2.556.130.024.305,72 bertambah sebesar Rp249.965.041.802,74 atau 10,84% dibandingkan dengan realisasi Beban TA 2023 sebesar Rp2.306.164.982.502,98. Beban TA 2024 terdiri dari:

Tabel 5.90
Beban TA 2024 dan 2023

Beban		Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1.	Beban Pegawai	1.301.744.562.895,00	1.112.456.021.389,00	189.288.541.506,00	17,02
2.	Beban Persediaan	129.095.193.483,57	154.965.310.853,23	(25.870.117.369,66)	(16,69)
3.	Beban Jasa	478.871.320.897,72	470.976.185.817,62	7.895.135.080,10	1,68
4.	Beban Pemeliharaan	81.939.257.537,00	63.135.887.771,00	18.803.369.766,00	29,78
5.	Beban Perjalanan Dinas	51.594.058.552,00	47.701.138.686,00	3.892.919.866,00	8,16
6.	Beban Hibah	147.854.388.693,00	101.070.972.163,00	46.783.416.530,00	46,29
7.	Beban Bantuan Sosial	9.543.648.000,00	8.937.904.000,00	605.744.000,00	6,78
8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	177.582.378.813,00	172.931.508.926,00	4.650.869.887,00	2,69
6.	Beban Penyisihan Piutang	4.723.485.434,43	4.548.853.297,13	174.632.137,30	3,84
7.	Beban Transfer	173.181.730.000,00	169.441.199.600,00	3.740.530.400,00	2,21
8.	Beban Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah		2.556.130.024.305,72	2.306.164.982.502,98	249.965.041.802,74	10,84

Saldo Beban sebesar Rp2.556.130.024.305,72 merupakan gabungan saldo beban-beban sebagai berikut:

5.3.2.1 Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.301.744.562.895,00 bertambah sebesar Rp189.288.541.506,00 atau 17,02% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.112.456.021.389,00. Beban Pegawai ini merupakan gabungan beban pegawai di 41 OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91
Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

No.	Uraian Belanja	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Gaji dan Tunjangan ASN	742.628.195.333,00	673.878.053.688,00	68.750.141.645,00	10,20
2	Tambahan Penghasilan ASN	124.406.141.385,00	130.981.261.804,00	(6.575.120.419,00)	(5,02)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	283.338.798.656,00	210.084.545.339,00	73.254.253.317,00	34,87
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.278.480.541,00	27.480.182.850,00	(201.702.309,00)	(0,73)
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	516.235.056,00	1.124.594.110,00	(608.359.054,00)	(54,10)
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	621.600.000,00	672.000.000,00	(50.400.000,00)	(7,50)
7	Pegawai BLUD	122.955.111.924,00	68.235.383.598,00	54.719.728.326,00	80,19
	Jumlah	1.301.744.562.895,00	1.112.456.021.389,00	189.288.541.506,00	17,02

Tabel 5.92
Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai TA 2024

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Gaji dan Tunjangan ASN	742.658.256.753,00	341.245.820,00	371.307.240,00	742.628.195.333,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	124.668.447.396,00	9.385.336.740,00	9.647.642.751,00	124.406.141.385,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	283.338.798.656,00	-	-	283.338.798.656,00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.278.480.541,00	-	-	27.278.480.541,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	516.235.056,00	-	-	516.235.056,00
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	621.600.000,00	-	-	621.600.000,00
7	Pegawai BOS	-	-	-	-
8	Pegawai BLUD	123.061.330.223,00	11.377.264.747,00	11.483.483.046,00	122.955.111.924,00
Jumlah		1.302.143.148.625,00	21.103.847.307,00	21.502.433.037,00	1.301.744.562.895,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Terdapat selisih kurang beban pegawai sebesar Rp398.585.730,00 dibandingkan dengan belanja pegawai pada LRA sebesar Rp1.302.143.148.625,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penyesuaian tambah sebesar Rp21.103.847.307,00 terdiri dari:
  - Rp341.245.820,00 merupakan pengakuan beban iuran jaminan kesehatan PNS bulan Desember 2024 yang baru diterima oleh PNS pada bulan Januari 2025;
  - Rp9.385.336.740,00 merupakan pengakuan beban tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2024 yang baru diterima oleh PNS pada bulan Januari 2025;
  - Rp11.377.264.747,00 merupakan pengakuan beban pegawai BLUD tahun 2024 yang sampai 31 Desember 2024 belum diterima pegawai;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp21.582.652.948,00 terdiri dari:
  - Rp371.307.240,00 merupakan pembayaran utang belanja iuran jaminan kesehatan PNS bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024;
  - Rp9.647.642.751,00 merupakan pembayaran utang belanja tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024;
  - Rp11.483.483.046,00 merupakan pembayaran utang pegawai BLUD tahun 2023.

5.3.2.2.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2024 sebesar Rp129.095.193.483,57 berkurang sebesar Rp25.870.117.369,66 atau 16,69% dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan TA 2023 sebesar Rp154.965.310.853,23. Beban Persediaan TA 2024 dari seluruh OPD terdiri dari:

Tabel 5.93
Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian Belanja	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Beban Bahan	16.487.834.474,00	17.072.386.485,00	(584.552.011,00)	(3,42)
2	Beban Suku Cadang	268.457.300,00	1.122.704.262,00	(854.246.962,00)	(76,09)
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	19.803.355.764,00	24.390.700.005,00	(4.587.344.241,00)	(18,81)
4	Beban Obat-obatan	38.709.478.204,57	66.492.995.484,23	(27.783.517.279,66)	(41,78)
5	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan	6.361.133.386,00	10.625.083.631,00	(4.263.950.245,00)	(40,13)
6	Beban Barang untuk Tujuan Strategis	45.600.000,00	-	45.600.000,00	-
7	Beban Natura dan Pakan	1.171.326.155,00	2.487.200.923,00	(1.315.874.768,00)	(52,91)
8	Beban Makanan dan Minuman	39.142.419.237,00	31.049.083.288,00	8.093.335.949,00	26,07
9	Beban Pakaian	2.706.338.887,00	1.641.739.535,00	1.064.599.352,00	64,85
10	Beban Komponen dan Pipa	-	83.417.240,00	(83.417.240,00)	(100,00)
11	Beban Peralatan dan Mesin TMS Kapitalisasi	3.120.865.580,00	-	3.120.865.580,00	-
12	Beban Gedung dan Bangunan TMS Kapitalisasi	621.873.800,00	-	621.873.800,00	-
13	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi TMS Kapitalisasi	199.778.000,00	-	199.778.000,00	-
14	Beban Aset Tetap Lainnya TMS Kapitalisasi	456.732.696,00	-	456.732.696,00	-
	Jumlah	129.095.193.483,57	154.965.310.853,23	(25.870.117.369,66)	(16,69)

Tabel 5.94
Perbandingan Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan TA 2024

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Bahan	16.456.813.206,00	331.938.732,00	300.917.464,00	16.487.834.474,00
2	Suku Cadang	269.651.300,00	861.000,00	2.055.000,00	268.457.300,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	19.335.700.770,00	1.486.024.430,00	1.018.369.436,00	19.803.355.764,00
4	Obat-obatan	16.142.393.492,00	39.613.953.305,69	17.046.868.593,12	38.709.478.204,57
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	6.028.813.090,00	3.645.935.964,00	3.313.615.668,00	6.361.133.386,00
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis	45.600.000,00	-	-	45.600.000,00
7	Natura dan Pakan	1.172.551.655,00	2.295.000,00	3.520.500,00	1.171.326.155,00
8	Makanan dan Minuman	39.142.419.237,00	-	-	39.142.419.237,00
9	Pakaian	2.706.338.887,00	-	-	2.706.338.887,00
10	Peralatan dan Mesin TMS Kapitalisasi	74.177.875,00	3.046.687.705,00	-	3.120.865.580,00
11	Gedung dan Bangunan TMS Kapitalisasi	605.896.000,00	15.977.800,00	-	621.873.800,00
12	Jalan, Jaringan, dan Irigasi TMS Kapitalisasi	-	199.778.000,00	-	199.778.000,00
13	Aset Tetap Lainnya TMS Kapitalisasi	-	456.732.696,00	-	456.732.696,00
Jumlah		101.980.355.512,00	48.800.184.632,69	21.685.346.661,12	129.095.193.483,57

https://jdih.pemalangkab.go.id

Terdapat selisih lebih sebesar Rp27.114.837.971,57 antara Beban Persediaan dengan saldo realisasi Belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp101.980.355.512,00 berupa penyesuaian tambah sebesar Rp48.800.335.632,69 dan penyesuaian kurang sebesar Rp21.685.497.661,12.

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban persediaan pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Beban Bahan selisih kurang sebesar Rp99.364.732,00 karena:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp331.958.732,00 berupa:
     - pengakuan beban bahan : bahan bangunan konstruksi, bahan kimia; isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas; dan bahan lainnya tahun 2023 sebesar Rp331.958.732,00 sebagai beban persediaan karena akan digunakan;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp431.323.464,00 berupa:
     - pengakuan sebagai persediaan : bahan kimia; bahan bakar dan pelumas, bahan baku, isi tabung pemadam kebakaran; dan bahan lainnya tahun 2024 sebesar Rp202.820.742,00 yang mengurangi beban persediaan;
     - kapitalisasi dari bahan bangunan konstruksi yang menambah nilai aset tetap sebesar Rp183.252.400,00 pada Disparpora;
     - kapitalisasi dari bahan bibit ikan/ternak menjadi Aset Tetap Lainnya berupa Ikan Budidaya sebesar Rp45.250.322,00 pada Disperik (UBIAT).
2) Beban Suku Cadang selisih kurang sebesar Rp1.194.000,00 karena:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp861.000,00 berupa:
     - pengakuan beban suku cadang alat laboratorium tahun 2023 sebesar Rp861.000,00 sebagai beban persediaan karena akan digunakan;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp2.055.000,00 berupa:
     - pengakuan sebagai persediaan suku cadang alat laboratorium tahun 2024 sebesar Rp2.055.000,00 yang mengurangi beban persediaan.
3) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor selisih lebih sebesar Rp422.701.894,00 karena:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp1.486.155.430,00 berupa:
     - pengakuan beban alat/bahan : alat tulis kantor; kertas dan cover, bahan cetak; benda pos; bahan komputer, perabot kantor; alat listrik, dan alat untuk kegiatan kantor lainnya tahun 2023 sebesar Rp1.486.155.430,00 sebagai beban persediaan karena akan digunakan;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp1.063.453.536,00 berupa:
     - pengakuan sebagai persediaan : alat tulis kantor; kertas dan cover; bahan cetak; benda pos; bahan komputer, perabot kantor; alat listrik; dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya tahun 2024 sebesar Rp1.063.453.536,00 yang mengurangi beban persediaan.
4) Beban Obat-obatan selisih lebih Rp22.742.473.812,57 karena :
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp39.613.953.305,69 terdiri dari::
     - pengakuan beban obat-obatan sebesar Rp14.601.506.774,00 sebagai beban persediaan karena akan digunakan;
     - pengakuan beban obat-obatan tahun 2024 yang merupakan hibah dari Pemprov Jateng sebesar Rp1.791.258.250,00 berupa Alat

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi yang diterima oleh Dinsos KBPP;
- pengakuan beban obat-obatan tahun 2024 yang merupakan hibah dari Pemprov Jateng sebesar Rp20.515.861.436,98 berupa Obat-obatan yang diterima oleh Dinkes;
- pengakuan beban obat-obatan lainnya tahun 2024 yang merupakan hibah dari Pemprov Jateng sebesar Rp2.705.302.594,88 berupa BMHP yang diterima oleh Dinkes;
- penghapusan persediaan obat-obatan kadaluwarsa sebesar Rp24.249,23 pada Dinkes;

- Penyesuaian kurang sebesar Rp16.871.479.493,12 berupa:
  - pengakuan sebagai persediaan : obat-obatan dan obat-obatan lainnya tahun 2024 sebesar Rp16.834.256.437,12 yang mengurangi beban persediaan;
  - persediaan yang sudah kadaluwarsa sebesar Rp37.223.056,00 pada Dinkes (RSUD dr. M. Ashari) yang dicatat sebagai Aset Lain-lain (mengurangi beban persediaan).

5) Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan selisih lebih sebesar Rp332.320.296,00 karena:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp3.645.935.964,00 berupa:
     - pengakuan beban barang akan diserahkan sebesar Rp3.645.935.964,00 sebagai beban persediaan karena akan digunakan;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp3.313.615.668,00 berupa:
     - pengakuan sebagai persediaan barang akan dijual/diserahkan tahun 2024 sebesar Rp3.313.615.668,00 pada DPU, Diskoperindag, dan Dispertan yang mengurangi beban persediaan.
6) Beban Natura dan Pakan selisih kurang Rp1.225.500,00 karena :
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp2.295.000,00 berupa:
     - pengakuan beban pakan sebesar Rp2.295.000,00 pada Disperik sebagai beban persediaan karena akan digunakan;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp3.520.500,00 terdiri dari:
     - pengakuan sebagai persediaan natura tahun 2024 sebesar Rp100.000,00 pada Disnaker yang mengurangi beban persediaan;
     - pengakuan sebagai persediaan pakan tahun 2024 sebesar Rp3.420.500,00 pada Disperik yang mengurangi beban persediaan.
7) Beban Makanan dan Minuman selisih kurang Rp50.000,00 karena :
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp50.000,00 berupa:
     - pengakuan sebagai persediaan penambah daya tahan tubuh tahun 2024 sebesar Rp50.000,00 pada Kec. Pemalang yang mengurangi beban persediaan.

Beban persediaan sebesar Rp129.095.193.483,57 dibandingkan dengan belanja barang persediaan pada LRA sebesar Rp101.980.355.512,00 dan perubahan saldo persediaan sebesar Rp4.432.691.650,24 maka terdapat selisih sebesar Rp31.547.529.621,81.

Hal ini dikarenakan terdapat beban yang berasal dari bukan belanja persediaan antara lain:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.95
Selisih Beban Persediaan LO dan LRA

Penambahan	**47.169.785.271,28**
Belanja Barang BLUD	16.056.991.188,42
Belanja Barang BOS	-
Belanja Modal (TMS kapitalisasi aset tetap - menjadi extracomptable)	3.719.176.201,00
Kapitalisasi dari belanja Persediaan	-
Hibah Barang	27.393.617.881,86
terima hibah barang persediaan dari Pemprov Jateng	*25.012.422.281,86*
persediaan barang akan diserahkan yang berasal dari Belanja Hibah	*2.381.195.600,00*
Penghapusan persediaan kadaluwarsa	
Pengurangan	**15.622.255.649,47**
Belanja Barang BLUD	15.313.130.312,47
Belanja Barang BOS	43.399.559,00
Belanja Modal	-
Kapitalisasi dari belanja Persediaan	228.502.722,00
Persediaan kadaluwarsa	37.223.056,00
Jumlah Akhir	**31.547.529.621,81**

5.3.2.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa TA 2024 sebesar Rp478.871.320.897,72 bertambah sebesar Rp7.895.135.080,10 atau 1,68% dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa TA 2023 sebesar Rp470.976.185.817,62. Beban Jasa TA 2024 dari seluruh OPD terdiri dari:

Tabel 5.96
Beban Jasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Beban Jasa kantor	136.884.713.204,00	192.368.336.282,00	(55.483.623.078,00)	(28,84)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	78.363.602.520,79	48.342.299.875,22	30.021.302.645,57	62,10
3	Beban Sewa Tanah	95.250.000,00	69.749.999,00	25.500.001,00	36,56
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.040.615.642,00	2.723.384.084,00	317.231.558,00	11,65
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	820.311.000,00	889.795.000,00	(69.484.000,00)	(7,81)
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.827.375.244,00	6.814.849.678,00	1.012.525.566,00	14,86
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.508.149.446,00	3.890.711.698,00	(2.382.562.252,00)	(61,24)
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	4.600.000,00	50.000,00	4.550.000,00	9.100,00
9	Beasiswa Pendidikan PNS	200.000.000,00	-	200.000.000,00	100,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan	5.349.571.000,00	6.122.888.250,00	(773.317.250,00)	(12,63)
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	27.360.000,00	27.735.000,00	(375.000,00)	(1,35)
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masya	27.652.360.000,00	14.054.282.100,00	13.598.077.900,00	96,75
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masya	1.773.502.861,00	2.455.419.541,00	(681.916.680,00)	(27,77)
14	Beban Barang dan Jasa BOS	127.828.946.251,00	126.976.834.880,00	852.111.371,00	0,67
15	Beban Barang dan Jasa BLUD	87.494.963.728,93	63.916.105.242,40	23.578.858.486,53	36,89
16	Beban Ekstracomptable	-	2.323.744.188,00	(2.323.744.188,00)	100,00
JUMLAH		478.871.320.897,72	470.976.185.817,62	7.895.135.080,10	1,68

Tabel 5.97
Perbandingan Beban Jasa dengan Belanja Jasa TA 2024

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Jasa Kantor	138.420.767.038,00	783.690.827,00	2.319.744.661,00	136.884.713.204,00
2	Iuran Jaminan/Asuransi	80.049.159.701,00	207.689.878,16	1.893.247.058,37	78.363.602.520,79
3	Sewa Tanah	95.250.000,00	-	-	95.250.000,00
4	Sewa Peralatan dan Mesin	3.040.615.642,00	-	-	3.040.615.642,00
5	Sewa Gedung dan Bangunan	820.311.000,00	-	-	820.311.000,00
6	Jasa Konsultansi Konstruksi	7.827.375.244,00	-	-	7.827.375.244,00
7	Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.508.149.446,00	-	-	1.508.149.446,00
8	Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
9	Beasiswa Pendidikan PNS	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
10	Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.349.571.000,00	-	-	5.349.571.000,00
11	Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	27.360.000,00	-	-	27.360.000,00
12	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	27.652.360.000,00	-	-	27.652.360.000,00
13	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	1.773.502.861,00	-	-	1.773.502.861,00
14	Barang dan Jasa BOS	127.785.546.692,00	171.714.669,00	128.315.110,00	127.828.946.251,00
15	Barang dan Jasa BLUD	78.192.598.573,00	45.824.572.226,90	36.522.207.070,97	87.494.963.728,93
Jumlah		472.747.167.197,00	46.987.667.601,06	40.863.513.900,34	478.871.320.897,72

https://jdih.pemalangkab.go.id

Terdapat selisih lebih sebesar Rp6.124.153.700,72 antara Beban Jasa dengan saldo realisasi Belanja Jasa pada LRA sebesar Rp472.747.167.197,00 berupa penyesuaian tambah sebesar Rp46.987.667.601,06 dan penyesuaian kurang sebesar Rp40.863.513.900,34.

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo Beban Jasa pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Beban Jasa Kantor selisih kurang sebesar Rp1.536.053.834,00 karena:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp783.690.827,00 berupa:
     - pengakuan beban jasa telepon, air, listrik, internet, dan surat kabar bulan Desember 2024 sebesar Rp783.690.827,00 yang belum dibayarkan;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp2.319.744.661,00 terdiri dari:
     - pembayaran atas utang belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp2.319.744.661,00 yang mengurangi beban jasa telepon, air, listrik, internet, dan surat kabar;
2) Beban Iuran/Jaminan Asuransi selisih kurang sebesar Rp1.685.557.180,21 karena:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp207.689.878,16 terdiri dari:
     - pengakuan beban premi berupa asuransi kendaraan atas premi asuransi dibayar dimuka tahun 2023 sebesar Rp17.653.878,16;
     - pengakuan beban iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU tahun 2024 sebesar Rp190.036.000,00;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp1.893.247.058,37 terdiri dari:
     - pengurangan beban premi asuransi tahun 2024 sebesar Rp22.510.478,37 karena masih merupakan beban dibayar dimuka;
     - pembayaran atas utang iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU tahun 2023 sebesar Rp1.870.736.580,00;
3) Beban Barang dan Jasa BOS selisih lebih sebesar Rp43.399.559,00;
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp171.714.669,00 berupa:
     - pengakuan beban Barang dan Jasa BOS tahun 2023 sebesar Rp171.714.669,00 sebagai persediaan ATK yang akan digunakan;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp128.315.110,00 berupa:
     - pengakuan sebagai persediaan ATK tahun 2024 sebesar Rp128.315.110,00 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BOS;
4) Beban Barang dan Jasa BLUD selisih lebih sebesar Rp9.302.365.155,93 karena:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp45.823.508.726,90 terdiri dari:
     - pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp902.784.296,00 sebagai persediaan Bahan Kimia yang akan digunakan;
     - pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp259.736.350,00 sebagai persediaan ATK yang akan digunakan;
     - pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp145.627.750,00 sebagai persediaan Bahan Cetak yang akan digunakan;
     - pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp179.465.700,00 sebagai persediaan Perabot Kantor yang akan digunakan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp6.009.176.514,00 sebagai persediaan Obat yang akan digunakan;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp100.215.308,00 sebagai persediaan Natura yang akan digunakan;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD atas Beban Dibayar Dimuka asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter tahun 2023 sebesar Rp41.870.958,90;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD untuk jasa kantor (telepon, air, listrik, dan internet) tahun 2024 yang belum dibayarkan sebesar Rp205.842.482,00;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD untuk penggunaan Obat tahun 2024 sebesar Rp19.348.909.720,00 yang belum dibayarkan;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD untuk penggunaan Bahan Kimia tahun 2024 sebesar Rp6.389.193.211,00 yang belum dibayarkan;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD untuk jasa pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp212.315.409,00 yang belum dibayarkan;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD untuk penggunaan Natura tahun 2024 sebesar Rp223.450.261,00 yang belum dibayarkan;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD untuk penggunaan Material Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp179.305.000,00 yang belum dibayarkan;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD untuk jasa Pemeriksaan Sampel tahun 2024 sebesar Rp20.155.000,00 yang belum dibayarkan;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD untuk premi asuransi tahun 2024 sebesar Rp86.962.700,00;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp11.348.902.996,00 sebagai persediaan yang akan digunakan pada 25 Puskesmas;
- pengakuan beban Barang dan Jasa BLUD untuk utang jasa kantor pada 23 puskesmas tahun 2024 sebesar Rp169.595.071,00 yang belum dibayarkan.

- Penyesuaian kurang sebesar Rp36.521.143.570,97 terdiri dari:
  - pengakuan persediaan Bahan Kimia tahun 2024 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp885.534.283,00;
  - pengakuan persediaan ATK tahun 2024 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp270.831.386,00;
  - pengakuan persediaan Kertas dan Cover tahun 2024 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp4.995.000,00;
  - pengakuan persediaan Bahan Cetak tahun 2024 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp286.044.974,00;
  - pengakuan persediaan Perabot Kantor tahun 2023 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp148.802.250,00;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- pengakuan persediaan Obat tahun 2024 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp6.665.796.430,00;
- pengakuan persediaan Natura tahun 2024 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp112.069.497,00;
- pengakuan Beban Dibayar Dimuka atas Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter tahun 2024 sebesar Rp85.736.532,25;
- pembayaran utang belanja jasa kantor (telepon, air, listrik, dan internet) bulan Desember 2023 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp205.308.255,00;
- pembayaran utang belanja Obat tahun 2023 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp12.944.565.248,00;
- pembayaran utang belanja Bahan Kimia tahun 2023 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp3.274.357.600,00;
- pembayaran utang belanja Pemeliharaan tahun 2023 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp201.081.327,00;
- pembayaran utang Premi Asuransi tahun 2023 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp120.349.068,00;
- pengakuan persediaan pada 25 puskesmas tahun 2024 yang mengurangi beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp11.315.671.720,72.

5.3.2.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp81.939.257.537,00 bertambah sebesar Rp18.803.369.766,00 atau 29,78% dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 sebesar Rp63.135.887.771,00. Beban Pemeliharaan TA 2024 dari seluruh OPD terdiri dari:

Tabel 5.98
Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	262.506.280,00	(262.506.280,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.284.466.608,00	9.250.028.127,00	34.438.481,00	0,37
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.704.190.209,00	18.514.436.171,00	(7.810.245.962,00)	(42,18)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.949.852.040,00	35.106.667.193,00	26.843.184.847,00	76,46
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	748.680,00	2.250.000,00	(1.501.320,00)	(66,73)
JUMLAH		81.939.257.537,00	63.135.887.771,00	18.803.369.766,00	29,78

Tabel 5.99
Perbandingan Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan TA 2024

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.284.466.608,00	-	-	9.284.466.608,00
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.026.391.859,00	76.301.350,00	398.503.000,00	10.704.190.209,00
4	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.416.242.238,00	195.228.812,00	5.661.619.010,00	61.949.852.040,00
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	748.680,00	-	-	748.680,00
Jumlah		87.727.849.385,00	271.530.162,00	6.060.122.010,00	81.939.257.537,00

Terdapat selisih kurang sebesar Rp5.788.591.848,00 antara Beban Pemeliharaan dengan saldo realisasi Belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp87.727.849.385,00 berupa penyesuaian tambah sebesar Rp271.530.162,00 dan penyesuaian kurang sebesar Rp6.060.122.010,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban pemeliharaan pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan selisih kurang sebesar Rp322.201.650,00 karena :
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp76.301.350,00 berupa:
     - pemeliharaan bangunan kesehatan sebesar Rp76.301.350,00 pada Puskesmas Klareyan;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp398.503.000,00 terdiri dari:
     - reklasifikasi dari beban pemeliharaan gedung menjadi Aset Tetap Gedung Kantor sebesar Rp198.945.000,00 pada Inspektorat;
     - reklasifikasi dari beban pemeliharaan gedung menjadi Aset Tetap Gudang Alkon sebesar Rp199.558.000,00 pada Dinsos KBPP.
2) Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi selisih kurang sebesar Rp5.466.390.198,00 karena:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp195.228.812,00 terdiri dari:
     - beban pemeliharaan berupa pengaspalan terminal sebesar Rp187.624.645,00 yang berasal dari Belanja Modal Jalan Kabupaten pada Dishub;
     - beban pemeliharaan jala lingkungan sebesar Rp7.604.167,00 yang berasal dari Belanja Modal Jalan Kota pada Disperkim;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp5.661.619.010,00 berupa:
     - kapitalisasi menambah nilai aset Jalan Kabupaten sebesar Rp5.661.619.010,00 berupa rekonstruksi jalan pada DPU yang berasal dari belanja pemeliharaan jalan.

5.3.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp51.594.058.552,00 bertambah sebesar Rp3.892.919.866,00 atau 8,16% dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2023 sebesar Rp47.701.138.686,00. Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dari seluruh OPD terdiri dari:

Tabel 5.100
Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Negeri	51.544.058.552,00	47.636.138.686,00	3.907.919.866,00	8,20
2	Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	50.000.000,00	65.000.000,00	(15.000.000,00)	100,00
JUMLAH		51.594.058.552,00	47.701.138.686,00	3.892.919.866,00	8,16

Tabel 5.101
Perbandingan Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan TA 2024

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Negeri	51.544.058.552,00	-	-	51.544.058.552,00
2	Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
Jumlah		51.594.058.552,00	-	-	51.594.058.552,00

Beban Perjalanan Dinas sama dengan saldo realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada LRA sebesar Rp51.594.058.352,00.

5.3.2.1 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp147.854.388.693,00 bertambah sebesar Rp46.783.416.530,00 atau 46,29% dibandingkan dengan realisasi beban hibah tahun 2023 sebesar Rp101.070.972.163,00. Beban Hibah tahun 2024 terdiri dari:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.102
Beban Hibah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	2.868.409.750,00	131.590.250,00	4,59
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	127.150.650.802,00	80.179.241.905,00	46.971.408.897,00	58,58
3	Hibah Dana BOS	15.752.888.891,00	16.155.490.508,00	(402.601.617,00)	100,00
4	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.849.000,00	1.867.830.000,00	83.019.000,00	4,44
	Jumlah	147.854.388.693,00	101.070.972.163,00	46.783.416.530,00	46,29

Tabel 5.103
Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah TA 2024

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.381.195.600,00	-	2.381.195.600,00	3.000.000.000,00
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	127.150.650.802,00	-	-	127.150.650.802,00
3	Hibah Dana BOS	15.752.888.891,00	-	-	15.752.888.891,00
4	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai	1.950.849.000,00			1.950.849.000,00
	Jumlah	150.235.584.293,00	-	2.381.195.600,00	147.854.388.693,00

Terdapat selisih kurang sebesar Rp2.381.195.600,00 antara Beban Hibah dengan saldo realisasi Belanja Hibah pada LRA sebesar Rp150.235.584.293,00 berupa penyesuaian tambah sebesar Rp0,00 dan penyesuaian kurang sebesar Rp2.381.195.600,00.

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban hibah pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hibah kepada Pemerintah Pusat selisih kurang sebesar Rp2.381.195.600,00 karena:
   - penyesuaian kurang sebesar Rp2.381.195.600,00 terdiri dari:
     - hibah kepada Kodim 0711 Pemalang sebesar Rp1.117.973.350,00;
     - hibah kepada Kejari Pemalang sebesar Rp1.263.222.250,00.

5.3.2.1 Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp9.543.648.000,00 bertambah sebesar Rp605.744.000,00 atau 6,78% dibandingkan dengan beban TA 2023 sebesar Rp8.937.904.000,00. Beban tersebut merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yaitu:

Tabel 5.104
Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Bantuan Sosial kepada Individu	9.243.648.000,00	8.577.932.000,00	665.716.000,00	7,76
2	Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	-
3	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	359.972.000,00	(59.972.000,00)	100,00
	Jumlah	9.543.648.000,00	8.937.904.000,00	605.744.000,00	6,78

Tabel 5.105
Perbandingan Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial TA 2024

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Bantuan Sosial kepada Individu	9.247.648.000,00	-	4.000.000,00	9.243.648.000,00
2	Bantuan Sosial kepada Kelompok	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
	Jumlah	9.547.648.000,00	-	4.000.000,00	9.543.648.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Terdapat selisih kurang sebesar Rp4.000.000,00 antara Beban Bantuan Sosial dengan saldo realisasi Belanja Bantuan Sosial pada LRA sebesar Rp9.547.648.000,00 berupa penyesuaian tambah sebesar Rp0,00 dan penyesuaian kurang sebesar Rp4.000.000,00.

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban bantuan sosial pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bantuan Sosial kepada Individu selisih kurang sebesar Rp4.000.000,00 karena:
   - penyesuaian kurang sebesar Rp4.000.000,00 berupa:
     - tidak tersalurkannya bantuan sosial kepada 4 orang peserta pelatihan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) sebesar Rp4.000.000,00 karena tidak mengikuti kegiatan.

5.3.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Beban penyusutan dan amortisasi ini terjadi sejak bulan pertama perolehan dan pengakuan beban secara bulanan mengikuti sistem pencatatan barang milik daerah.

Saldo beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 sebesar Rp177.582.378.813,00 bertambah sebesar Rp4.650.869.887,00 atau 2,69% dari beban tahun 2023 sebesar Rp172.931.508.926,00. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.106
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74.951.718.171,00	71.631.478.381,00	3.320.239.790,00	4,64
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.207.952.041,00	30.445.064.453,00	762.887.588,00	2,51
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	71.053.409.276,00	70.218.047.779,00	835.361.497,00	1,19
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	369.299.325,00	636.918.313,00	(267.618.988,00)	(42,02)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		177.582.378.813,00	172.931.508.926,00	4.650.869.887,00	2,69

Adapun rincian beban penyusutan per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.107
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024

No	OPD	Beban Penyusutan dan Amortisasi (Rp)			
		Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Amortisasi Aset Tak Berwujud
1	Dindikbud	25.564.320.227,00	15.249.796.903,00	106.305.630,00	-
2	Dinkes	30.900.490.355,00	3.340.281.314,00	508.565.471,00	110.606.960,00
3	DPU & PR	983.988.752,00	409.682.183,00	63.035.278.159,00	3.437.500,00
4	Disperkim	351.998.519,00	870.090.363,00	4.090.142.151,00	-
5	Satpol PP	527.635.798,00	14.634.984,00	-	-
6	BPBD	735.879.429,00	26.529.480,00	-	-
7	Dinsos-PPKBPPPA	1.034.139.538,00	73.226.849,00	1.861.816,00	-
8	Disnaker	477.600.715,00	152.395.202,00	4.940.707,00	-
9	DLH	2.253.849.120,00	101.566.438,00	422.654.394,00	-
10	Disdukcatpil	600.255.701,00	36.605.378,00	10.789.240,00	15.319.094,00
11	Dinpermasdes	217.694.053,00	32.078.133,00	1.283.475,00	-
12	Dishub	884.106.698,00	261.300.469,00	31.769.283,00	38.438.000,00
13	Diskominfo	732.332.286,00	94.336.284,00	10.093.630,00	17.136.396,00
14	Diskoperindag	754.315.593,00	4.471.536.220,00	210.616.191,00	13.032.708,00
15	DPMPTP	274.985.032,00	41.649.540,00	3.646.522,00	-
16	Dinpusarda	402.649.561,00	51.176.690,00	959.577,00	-
17	Disperik	199.413.155,00	265.710.769,00	137.934.151,00	-
18	Disparpora	591.379.501,00	1.580.626.246,00	740.182.223,00	15.583.333,00
19	Dispertan	779.009.295,00	481.048.592,00	49.112.004,00	-
20	Setda	2.348.794.630,00	440.916.880,00	27.136.762,00	-
21	Setwan	801.730.550,00	2.321.234.604,00	6.144.445,00	-
22	Bappeda	190.280.436,00	38.635.555,00	2.547.601,00	-
23	BPKAD	972.329.588,00	143.577.681,00	7.722.625,00	-
24	Bapenda	385.394.445,00	22.423.002,00	1.854.202,00	107.141.709,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	OPD	Beban Penyusutan dan Amortisasi (Rp)			
		Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Amortisasi Aset Tak Berwujud
25	BKD	361.053.316,00	19.503.597,00	4.557.519,00	36.303.625,00
26	Inspektorat	389.696.974,00	19.194.551,00	-	-
27	Kec. Moga	77.984.979,00	18.885.768,00	37.500,00	-
28	Kec. Pulosari	32.441.108,00	34.350.092,00	187.501,00	-
29	Kec. Belik	65.589.462,00	26.616.146,00	37.500,00	-
30	Kec. Watukumpul	69.212.067,00	35.771.750,00	75.000,00	-
31	Kec. Bodeh	82.849.533,00	14.183.856,00	-	-
32	Kec. Bantarbolang	59.200.755,00	20.379.171,00	25.000,00	-
33	Kec. Randudongkal	54.127.996,00	28.687.268,00	10.073.800,00	-
34	Kec. Pemalang	189.189.871,00	170.176.528,00	1.065.430.002,00	12.300.000,00
35	Kec. Taman	116.553.133,00	48.416.578,00	302.593.945,00	-
36	Kec. Petarukan	71.348.322,00	50.935.184,00	175.975.134,00	-
37	Kec. Ampelgading	50.548.666,00	13.794.720,00	62.500,00	-
38	Kec. Comal	45.490.832,00	125.910.359,00	82.670.561,00	-
39	Kec. Ulujami	63.178.985,00	33.705.275,00	-	-
40	Kec. Warungpring	72.377.668,00	26.381.439,00	75.000,00	-
41	Bakesbangpol	186.301.527,00	-	68.055,00	-
Jumlah		74.951.718.171,00	31.207.952.041,00	71.053.409.276,00	369.299.325,00

5.3.2.1 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.723.485.434,43 bertambah sebesar Rp174.632.137,30 atau 3,84% dari beban TA 2023 sebesar Rp4.548.853.297,13. Beban penyisihan piutang TA 2024 terdiri dari:

Tabel 5.108
Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

No	Beban Penyisihan Piutang	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	3.945.303.875,47	4.143.764.093,01	(198.460.217,54)	(4,79)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	604.780.708,96	62.800.619,75	541.980.089,21	863,02
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain	173.400.850,00	342.288.584,37	(168.887.734,37)	(49,34)
Jumlah		4.723.485.434,43	4.548.853.297,13	174.632.137,30	3,84

5.3.2.1 Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer TA 2024 sebesar Rp173.181.730.000,00 bertambah sebesar Rp3.740.530.400,00 atau 2,21% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp169.441.199.600,00. Beban Transfer terdiri dari:

Tabel 5.109
Beban Transfer TA 2024 dan 2023

No.	Beban Transfer	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.281.883.069,00	10.413.308.000,00	868.575.069,00	8,34
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.399.296.931,00	4.633.776.900,00	(1.234.479.969,00)	(26,64)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	158.500.550.000,00	154.394.114.700,00	4.106.435.300,00	2,66
Jumlah Beban Transfer		173.181.730.000,00	169.441.199.600,00	3.740.530.400,00	2,21

Tabel 5.110
Perbandingan Beban Transfer dan Belanja Transfer TA 2024

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	11.281.883.069,00	-	-	11.281.883.069,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota	3.399.296.931,00	-	-	3.399.296.931,00
3	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau	424.652.064.000,00	-	266.151.514.000,00	158.500.550.000,00
Jumlah		**439.333.244.000,00**	**-**	**266.151.514.000,00**	**173.181.730.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Terdapat selisih kurang sebesar Rp266.151.514.000,00 antara Beban Transfer pada LO dengan saldo realisasi Transfer pada LRA sebesar Rp439.333.244.000,00 berupa penyesuaian tambah sebesar Rp0,00 dan penyesuaian kurang sebesar Rp266.151.514.000,00.

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa selisih kurang sebesar Rp266.151.514.000,00 karena transfer bantuan keuangan ke desa berupa Dana Desa yang berasal dari APBN bukan merupakan kinerja operasional bagi pemerintah daerah.

5.3.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.111
Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

No.	Kegiatan Non Operasional	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2024	2023		
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-Lo	-	-	-	-
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya_LO	-	-	-	-
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.316.137.434,08	6.226.951.955,71	(910.814.521,63)	(14,63)
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(5.316.137.434,08)	(6.226.951.955,71)	910.814.521,63	(14,63)

5.3.3.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 sebesar Rp5.316.137.434,08 yang terjadi pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 berkurang sebesar Rp910.814.521,63 atau 14,63% dari TA 2023 sebesar Rp6.226.951.955,71.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 sebesar Rp5.316.137.434,08 merupakan pengakuan rugi dari BUMD yang mengurangi nilai investasi Pemda pada BUMD yaitu pada PT. BPR Bank Pemalang sebesar Rp5.316.137.434,08.

5.3.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari Beban Luar Biasa–LO. Saldo Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa adalah defisit Rp1.260.866.800,00.

5.3.4.1 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi sebesar Rp1.260.866.800,00 bertambah sebesar Rp878.180.992,00 atau 299,48% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp382.685.808,00.

Tabel 5.112
Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

No.	Pos Luar Biasa	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2023	2022		
1	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
2	Beban Luar Biasa	1.260.866.800,00	382.685.808,00	878.180.992,00	229,48
	Pos Luar Bissa	(1.260.866.800,00)	(382.685.808,00)	(878.180.992,00)	229,48

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pada tahun 2024, di LRA terdapat Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.266.502.459,00, dengan demikian terdapat selisih antara LRA dengan LO sebesar Rp5.635.659,00, selisih tersebut berupa BTT yang digunakan untuk pengembalian Kasda kepada KUD Mina Misoyo Sari sebesar Rp5.635.659,00 karena pada TA 2023 terjadi salah catat, yang seharusnya menjadi pendapatan KUD Mina Misoyo Sari tetapi masuk pada pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan pada Disperik.

Tabel 5.113
Perbandingan Beban Luar Biasa dengan Belanja Tidak Terduga TA 2024

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Luar Biasa	1.266.502.459,00	-	5.635.659,00	1.260.866.800,00
Jumlah		**1.266.502.459,00**	**-**	**5.635.659,00**	**1.260.866.800,00**

Pada tahun 2024, Beban Luar Biasa sebesar 1.266.502.459,00 digunakan untuk :

- penanganan bencana sebesar Rp435.722.600,00 terdiri dari:
  - penanganan bencana alam di Kec. Watukumpul sebesar Rp349.282.500,00;
  - penanganan bencana kebakaran di Pasar Belik sebesar Rp86.440.100,00;
- pemberian bantuan sosial sebesar Rp247.550.000,00 terdiri dari:
  - pemberian bantuan sosial sebesar Rp73.250.000,00;
  - pemberian bantuan sosial sebesar Rp50.750.000,00;
  - pemberian bantuan sosial sebesar Rp56.250.000,00;
  - pemberian bantuan sosial sebesar Rp67.300.000,00;
- pengembalian pendapatan sebesar Rp577.594.200,00 terdiri dari:
  - pengembalian Dana BOP PAUD TA 2023 ke RKUN sebesar Rp23.100.000,00;
  - pengembalian Dana Non Kapitasi TA 2023 sebesar Rp551.494.200,00;
  - pengembalian BPHTB sebesar Rp2.500.000,00;
  - pengembalian BPHTB sebesar Rp500.000,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pemalang pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pemalang. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.836.231.294.220,34 berkurang sebesar Rp10.630.920.494,21 atau 0,28% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.846.862.214.714,55.
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi penambahan atau pengurangan ekuitas pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Saldo Awal

Saldo Awal Ekuitas tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.846.862.214.714,55 dan Rp3.789.884.540.124,53 bertambah sebesar Rp56.977.674.590,02 atau 1,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Saldo awal ekuitas diperoleh dari saldo akhir ekuitas laporan keuangan tahun sebelumnya.

5.4.2 Surplus/Defisit–LO

Surplus/Defisit–LO tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp11.948.903.097,21) dan Rp69.415.066.422,52 berkurang sebesar Rp81.363.969.519,73 atau 117,21% dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan defisit atas operasional entitas yang mengurangi nilai ekuitas.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.317.982.603,00 dan (Rp12.437.391.832,50) bertambah sebesar Rp13.755.374.435,50 atau 110,60% dibanding tahun sebelumnya.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari:
- Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp1.317.982.603,00.

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2024 terdiri dari:
- Koreksi Ekuitas–Piutang sebesar (Rp2.934.754.574,00);
- Koreksi Ekuitas–Penyisihan Piutang sebesar Rp2.972.896.574,00;
- Koreksi Ekuitas–Aset Tetap sebesar Rp1.322.777.251,00;
- Koreksi Ekuitas–Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp793.477,00;
- Koreksi Ekuitas–Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp4.130.125,00).

Penjelasan dari masing-masing Koreksi Ekuitas adalah sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas–Piutang:
- Berkurangnya Ekuitas sebesar Rp2.934.754.574,00 merupakan koreksi nilai Piutang yang terdiri dari:
  - Berkurangnya Ekuitas sebesar Rp2.971.438.574,00 berupa koreksi nilai piutang karena adanya Penghapusan atas Piutang PBB tahun 2012 yang merupakan pelimpahan dari KPP Pratama;
  - Berkurangnya Ekuitas sebesar Rp2.916.000,00 berupa koreksi nilai piutang karena adanya pembayaran/pelunasan atas Piutang Pajak

https://jdih.pemalangkab.go.id

Reklame tahun 2020 yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak pada tahun 2022.

Koreksi Ekuitas–Penyisihan Piutang:

- Bertambahnya Ekuitas sebesar Rp2.934.754.574,00 merupakan koreksi nilai Penyisihan Piutang yang terdiri dari:
  - Bertambahnya Ekuitas sebesar Rp2.971.438.574,00 berupa koreksi nilai penyisihan piutang karena adanya Penghapusan atas Piutang PBB tahun 2012 yang merupakan pelimpahan dari KPP Pratama;
  - Bertambahnya Ekuitas sebesar Rp1.458.000,00 berupa koreksi nilai piutang karena adanya pembayaran/pelunasan atas Piutang Pajak Reklame tahun 2020 yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak pada tahun 2022.

Koreksi Ekuitas-Aset Tetap:

- Berkurangnya Ekuitas sebesar Rp1.322.777.251,00 merupakan koreksi pencatatan atas nilai Aset Tetap TA. 2024 yang terdiri dari:
  - Bertambahnya Ekuitas sebesar Rp4.324.690.000,00 berupa koreksi pencatatan aset karena nilai aset belum dicatat, yaitu pada:
    - Disperkim sebesar Rp39.690.000,00 berupa aset tanah kosong di perumahan Griya Sidomukti;
    - Dishub sebesar Rp4.285.000.000,00 berupa aset tanah di kawasan pelabuhan.
  - Berkurangnya Ekuitas sebesar Rp3.001.912.749,00 karena penghapusan aset yang masih memiliki nilai buku, yaitu pada:
    - Diskoperindag sebesar Rp2.992.749.249,00 adalah penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa pasar Belik yang terbakar dengan nilai perolehan sebesar Rp4.741.969.326,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.749.220.077,00;
    - Kec. Pemalang sebesar Rp9.163.500,00 adalah penghapusan atas Tanah berupa tanah pertanian karena terkena proyek jalan tol.

Koreksi Ekuitas–Akumulasi Penyusutan Aset Tetap:

- Bertambahnya Ekuitas sebesar Rp793.477,00 merupakan koreksi pencatatan atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2024 karena perbedaan saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dindikbud.

Koreksi Ekuitas–Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya:

- Berkurangnya Ekuitas sebesar Rp4.130.125,00 merupakan koreksi pencatatan atas nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Bapenda, karena pada tahun 2023 beban penyusutan belum sebesar Rp4.1.30.125,00 atas 1 *software* belum dicatat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.114
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2024

No	SKPD	Koreksi Ekuitas Lainnya TA. 2024									Jumlah
		Koreksi Lainnya	Koreki Piutang	Koreksi Penyisihan Piutang	Koreksi Aset Tetap	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Koreksi Investasi	Koreksi Aset Lainnya	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Mutasi Aset antar SKPD	
1	Dindikbud	-	-	-	-	793.477,00	-	-	-	-	793.477,00
2	Dinkes	-	-	-	-	-	-	-	-	- 7.848.753.164,00	- 7.848.753.164,00
3	DPU TR	-	-	-	-	-	-	-	-	- 568.000.000,00	- 568.000.000,00
4	Disperkim	-	-	-	39.690.000,00	-	-	-	-	- 23.862.834,00	15.827.166,00
5	Dishub	-	-	-	4.285.000.000,00	-	-	-	-	-	4.285.000.000,00
6	Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	- 86.971.556,00	- 86.971.556,00
7	Diskoperindag	-	-	-	- 2.992.749.249,00	-	-	-	-	-	- 2.992.749.249,00
8	Setda	-	-	-	-	-	-	-	-	142.002.833,00	142.002.833,00
10	BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	7.730.613.165,00	7.730.613.165,00
11	Bapenda	-	- 2.974.354.574,00	2.972.896.574,00	-	-	-	-	- 4.130.125,00	899.510,00	- 4.688.615,00
12	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	- 899.510,00	- 899.510,00
13	Kec. Pemalang	-	-	-	- 9.163.500,00	-	-	-	-	568.000.000,00	558.836.500,00
14	Kec. Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	86.971.556,00	86.971.556,00
	Jumlah Total	-	- 2.974.354.574,00	2.972.896.574,00	1.322.777.251,00	793.477,00	-	-	- 4.130.125,00	-	1.317.982.603,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.5.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adapun Aset terdiri dari:

1) **Aset lancar** adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
2) **Aset non lancar** adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5.5.1.1 Aset Lancar

Kas merupakan pos neraca yang paling likuid. Pos ini menunjukkan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD dr. M. Ashari dan Kapitasi JKN (FKTP) pada Dinas Kesehatan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta bendahara pada OPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Kas dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

Kas dan Setara Kas		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Prosentase %
1	Kas di Kas Daerah	123.696.258.966,00	138.733.059.892,00	89,16
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	9.698.500,00	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	4.011.000,00	-
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	18.152.510.547,00	15.695.534.203,00	115,65
5	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	3.085.216.504,00	-
6	Kas Dana Bantuan Operasioanal Sek	35.771.608,00	52.637.684,00	67,96
7	Kas Lainnya	4.000.000,00	1.957.586.209,00	0,20
8	Kas Dana BOK Puskesmas	2.586.247.710,00	-	-
Jumlah		**144.474.788.831,00**	**159.537.743.992,00**	90,56

5.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah (BUD/PPKD), baik berupa uang tunai maupun dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito, dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.116
Kas di Kas Daerah TA 2024 dan 2023

Kas di Kas Daerah		2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Rekening Giro	123.696.258.966,00	138.733.059.892,00
Jumlah		**123.696.258.966,00**	**138.733.059.892,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian saldo per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.117
Rekening Giro TA 2024 dan 2023

Rekening Giro		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bank Jateng A/C No. 1.025.00793.2	123.696.258.966,00	138.733.059.892,00
Jumlah		**123.696.258.966,00**	**138.733.059.892,00**

Terdapat selisih Rp2.000.000,00 pada rekening giro tercatat Rp123.694.258.966,00 seharusnya Rp123.696.258.966,00. Hal ini dikarenakan pada tanggal 17 Mei 2024 terjadi kesalahan *input* SP2D No. 3327/040/000038/LS/103000000010 dari Rekening 1-025-00793-2 (RKUD Kabupaten Pemalang) ke Rekening 1-025-013444-4 (CV Jagad Raya) sebesar Rp178.472.648,00 dimana nominal yang sebenarnya sebesar Rp176.472.648,00. Adapun koreksi mutasi telah diproses Bank Jateng pada tanggal 7 Maret 2025.

5.5.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 tidak ada sedangkan Saldo kas di bendahara penerimaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga TA 2023 Rp9.698.500,00 yang disetorkan pada tanggal 2 Januari 2024.

5.5.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 tidak ada sedangkan Saldo kas di bendahara pengeluaran TA 2023 sebesar Rp4.011.000,00.

5.5.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah saldo kas yang berada di OPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
OPD yang menerapkan PPK-BLUD memiliki fleksibilitas untuk dapat langsung menggunakan pendapatan yang diterimanya tanpa terlebih dulu menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah.
Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.152.510.547,00 dan 2023 sebesar Rp15.695.534.203,00.

Tabel 5.118
Kas di BLUD TA 2024 dan 2023

Kas di Badan Layanan Umum Daerah		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Prosentase %
1	RSUD dr. M. Ashari	3.705.492.079,00	15.695.534.203,00	23,61
2	Puskesmas	14.447.018.468,00	-	
Jumlah		**18.152.510.547,00**	**15.695.534.203,00**	**115,65**

Adapun Rincian Kas di BLUD pada 25 Puskesmas dapat dijelaskan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.119
Rincian Kas BLUD Puskesmas TA 2024 dan 2023

Kas di BLUD		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Puskesmas Banyumudal	842.487.912,00	-
2	Puskesmas Warungpring	289.719.642,00	-
3	Puskesmas Pulosari	897.045.216,00	-
4	Puskesmas Belik	1.726.218.821,00	-
5	Puskesmas Watukumpul	874.368.410,00	-
6	Puskesmas Kebandaran	511.011.467,00	-
7	Puskesmas Bantarbolang	824.149.788,00	-
8	Puskesmas Randudongkal	843.392.635,00	-
9	Puskesmas Kalimas	201.273.651,00	-
10	Puskesmas Paduraksa	491.364.557,00	-
11	Puskesmas Mulyoharjo	544.734.972,00	-
12	Puskesmas Kebondalem	601.355.935,00	-
13	Puskesmas Banjardaw a	603.843.584,00	-
14	Puskesmas Kabunan	389.325.742,00	-
15	Puskesmas Jebed	592.935.217,00	-
16	Puskesmas Petarukan	429.368.003,00	-
17	Puskesmas Klareyan	553.940.863,00	-
18	Puskesmas Losari	355.678.670,00	-
19	Puskesmas Purw oharjo	944.536.111,00	-
20	Puskesmas Sarw odadi	315.050.246,00	-
21	Puskesmas Row osari	125.668.175,00	-
22	Puskesmas Mojo	595.814.535,00	-
23	Puskesmas Cikadu	358.031.137,00	-
24	Puskesmas Jatiroyom	326.688.503,00	-
25	Puskesmas Karangasem	209.014.676,00	-
Jumlah		**14.447.018.468,00**	**-**

Adapun Kas di BLUD pada RSUD merupakan saldo kas dan setara kas pada pemegang kas per 31 Desember 2024 dan 2023. Kas dan setara kas RSUD pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.120
Rincian Kas BLUD RSUD TA 2024 dan 2023

Rincian Kas dan Setara Kas	2024 Rp	2023 Rp
Kas (Uang Tunai) terdiri dari:		
Kas Di Bendahara Penerimaan	29.459.833,00	45.232.143,00
Jumlah kas (Uang Tunai)	**29.459.833,00**	**45.232.143,00**
Bank terdiri dari:		
BNI No. Rek. 522726959	1.474.718.417,00	7.484.157.328,00
Bank Jateng No. Rek. 1025003515	590.490.432,00	3.698.082.314,00
Bank Jateng No. Rek. 1025003523	115.748.813,00	44.839.282,00
BRI No. Rek. 6901000685305	633.310.858,00	1.101.838.118,00
BNI No. Rek. 361759160	861.763.726,00	3.321.385.018,00
Jumlah Kas di Bank	**3.676.032.246,00**	**15.650.302.060,00**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**3.705.492.079,00**	**15.695.534.203,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.1.5 Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Saldo kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah saldo kas yang berada di 25 Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.085.216.504,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024 dan 2023

Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Prosentase %
1	Puskesmas Banyumudal	-	16.511.218,00	-
2	Puskesmas Warungpring	-	228.416.250,00	-
3	Puskesmas Pulosari	-	89.349.252,00	-
4	Puskesmas Belik	-	431.380.901,00	-
5	Puskesmas Watukumpul	-	27.590.730,00	-
6	Puskesmas Kebandaran	-	8.329,00	-
7	Puskesmas Bantarbolang	-	452.372.972,00	-
8	Puskesmas Randudongkal	-	75.385.296,00	-
9	Puskesmas Kalimas	-	169.451.435,00	-
10	Puskesmas Paduraksa	-	38.823.968,00	-
11	Puskesmas Mulyoharjo	-	158.270.179,00	-
12	Puskesmas Kebondalem	-	3.598.611,00	-
13	Puskesmas Banjardaw a	-	173.456.409,00	-
14	Puskesmas Kabunan	-	101.336.721,00	-
15	Puskesmas Jebed	-	230.501.847,00	-
16	Puskesmas Petarukan	-	26.242.240,00	-
17	Puskesmas Klareyan	-	54.536.033,00	-
18	Puskesmas Losari	-	2.383.692,00	-
19	Puskesmas Purw oharjo	-	140.658.508,00	-
20	Puskesmas Sarw odadi	-	142.276.081,00	-
21	Puskesmas Row osari	-	94.950.013,00	-
22	Puskesmas Mojo	-	218.461.277,00	-
23	Puskesmas Cikadu	-	49.663.534,00	-
24	Puskesmas Jatiroyom	-	159.408.965,00	-
25	Puskesmas Karangasem	-	182.043,00	-
Jumlah		**-**	**3.085.216.504,00**	**-**

5.5.1.1.6 Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah saldo kas yang berada di bendahara pengelola Dana BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saldo kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp35.771.608,00 dan Rp52.637.684,00.

Adapun rincian saldo per Sekolah terdapat dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Tabel 5.122
Kas Dana BOS TA 2024 dan 2023

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Prosentase %
1	SD NEGERI (BOS)	30.449.024,00	41.402.292,00	73,54
2	SMP NEGERI (BOS)	5.322.584,00	11.235.392,00	47,37
Jumlah		**35.771.608,00**	**52.637.684,00**	**67,96**

5.5.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya adalah Kas yang penggunaannya sudah ditentukan sebesar Rp4.000.000,00. Bantuan Sosial Uang melalui *Virtual Account* yang direncanakan kepada Individual akan tetapi sampai akhir tahun ada 4 (empat) anak tidak mengikuti pelatihan Anak Tidak Sekolah (ATS) sehingga tidak

https://jdih.pemalangkab.go.id

dicairkan. Adapun Saldo Kas Lainnya sebesar Rp4.000.000,00 bukan sebagai SiLPA Tahun 2024. Atas Saldo Kas Lainnya tersebut sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 13 Januari 2025.

5.5.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.586.247.710,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.123
Kas Dana BOK Puskesmas TA 2024

Kas Dana BOK Puskesmas		2024 (Rp)
1	Puskesmas Banyumudal	265.630.275,00
2	Puskesmas Warungpring	66.542.225,00
3	Puskesmas Pulosari	59.249.461,00
4	Puskesmas Belik	120.639.000,00
5	Puskesmas Watukumpul	71.975.194,00
6	Puskesmas Kebandaran	113.882.387,00
7	Puskesmas Bantarbolang	18.529.500,00
8	Puskesmas Randudongkal	64.180.227,00
9	Puskesmas Kalimas	81.627.567,00
10	Puskesmas Paduraksa	31.369.584,00
11	Puskesmas Mulyoharjo	91.470.323,00
12	Puskesmas Kebondalem	93.853.612,00
13	Puskesmas Banjardawa	130.724.107,00
14	Puskesmas Kabunan	156.863.362,00
15	Puskesmas Jebed	132.765.081,00
16	Puskesmas Petarukan	99.645.584,00
17	Puskesmas Klareyan	240.052.352,00
18	Puskesmas Losari	143.442.043,00
19	Puskesmas Purwoharjo	81.259.569,00
20	Puskesmas Sarwodadi	44.468.926,00
21	Puskesmas Rowosari	81.823.662,00
22	Puskesmas Mojo	231.743.027,00
23	Puskesmas Cikadu	75.774.300,00
24	Puskesmas Jatiroyom	63.112.000,00
25	Puskesmas Karangasem	25.624.342,00
Jumlah		**2.586.247.710,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang belum diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124
Piutang dan Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

Piutang		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Piutang Pendapatan	119.399.893.476,10	102.364.177.096,60	16,64
2	Piutang Lainnya	-	-	-
3	Penyisihan Piutang	(50.925.763.558,90)	(49.175.174.698,47)	3,56
Jumlah Piutang yang dapat direalisasikan		68.474.129.917,20	53.189.002.398,13	28,74

Dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penyisihan piutang dalam laporan keuangan ini sejak tahun 2015. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, semua piutang yang ada masuk dalam kategori Piutang Pendapatan.

5.5.1.1.9 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, dan Piutang Transfer Antar Daerah. Saldo Piutang Pendapatan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.125
Piutang Pendapatan TA 2024 dan 2023

Piutang Pendapatan		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Piutang Pajak	73.596.628.607,00	69.774.813.873,00	5,48
2	Piutang Retribusi	30.687.765.863,10	10.281.468.489,00	198,48
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.529.126.832,00	15.066.577.726,60	(83,21)
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	778.435.933,00	1.707.501.933,00	(54,41)
5	Piutang Transfer Antar Daerah	11.807.936.241,00	5.533.815.075,00	113,38
Jumlah		119.399.893.476,10	102.364.177.096,60	16,64

1. Piutang Pajak

   Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.126
Piutang Pajak TA 2024 dan 2023

Piutang Pajak		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	PBB	73.117.870.033,00	69.342.635.470,00	5,44
2	Reklame	448.092.750,00	394.613.329,00	13,55
3	Air Bawah Tanah	30.665.824,00	37.565.074,00	(18,37)
Jumlah		73.596.628.607,00	69.774.813.873,00	5,48

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2024 sebesar Rp73.117.870.033,00 adalah piutang atas pengelolaan PBB yang sekarang dilimpahkan pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sejak tahun 2013. Saldo Piutang PBB bertambah sebesar Rp3.775.234.563,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp5.931.775.602,00 dan penambahan piutang baru sebesar Rp9.707.010.165,00. Rincian Piutang PBB sebagai berikut:

Tabel 5.127
Rincian Piutang PBB TA 2024

Tahun	Saldo Awal Piutang	Ketetapan	Pendapatan 2024	Mutasi		Penghapusan 2024	Saldo Akhir Piutang
				Penambahan	Pengurangan		
2012	13.882.587.305,00	-	39.342.733,00	-	39.342.733,00	2.971.438.574,00	10.871.805.998,00
2013	4.024.789.905,00	-	118.513.344,00	-	118.513.344,00	-	3.906.276.561,00
2014	3.586.814.511,00	-	118.556.570,00	-	118.556.570,00	-	3.468.257.941,00
2015	4.482.456.750,00	-	141.617.182,00	-	141.617.182,00	-	4.340.839.568,00
2016	4.010.099.354,00	-	123.159.004,00	-	123.159.004,00	-	3.886.940.350,00
2017	3.491.696.111,00	-	127.875.444,00	-	127.875.444,00	-	3.363.820.667,00
2018	4.583.302.828,00	-	148.518.178,00	-	148.518.178,00	-	4.434.784.650,00
2019	4.451.398.489,00	-	173.947.619,00	-	173.947.619,00	-	4.277.450.870,00
2020	5.646.968.971,00	-	215.318.772,00	-	215.318.772,00	-	5.431.650.199,00
2021	5.632.280.041,00	-	249.464.838,00	-	249.464.838,00	-	5.382.815.203,00
2022	6.927.845.885,00	-	359.412.101,00	-	359.412.101,00	-	6.568.433.784,00
2023	8.622.395.320,00	-	1.144.518.642,00	-	1.144.518.642,00	-	7.477.876.678,00
2024	-	33.052.453.398,00	23.345.443.233,00	9.707.010.165,00	-	-	9.707.010.165,00
	-	-	92.601,00	-	92.601,00	-	(92.601,00)
Jumlah	69.342.635.470,00	33.052.453.398,00	26.305.780.261,00	9.707.010.165,00	2.960.337.028,00	2.971.438.574,00	73.117.870.033,00

- Pelimpahan PBB sebelum tahun 2013 sebesar Rp10.871.805.998,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp13.882.587.305,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp39.342.733,00
  dikurangi : penghapusan piutang sebesar Rp2.971.438.574,00
- Piutang tahun 2013 sebesar Rp3.906.276.561,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.024.789.905,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp118.513.344,00
- Piutang tahun 2014 sebesar Rp3.468.257.941,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp3.586.814.511,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp118.556.570,00
- Piutang tahun 2015 sebesar Rp4.340.839.568,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.482.456.750,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp141.617.182,00
- Piutang tahun 2016 sebesar Rp3.886.940.350,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.010.099.354,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp123.159.004,00
- Piutang tahun 2017 sebesar Rp3.363.820.667,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp3.491.696.111,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp127.875.444,00
- Piutang tahun 2018 sebesar Rp4.434.784.650,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.583.302.828,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp148.518.178,00
- Piutang tahun 2019 sebesar Rp4.277.450.870,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.451.398.489,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp173.947.619,00
- Piutang tahun 2020 sebesar Rp5.431.650.199,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp5.646.968.971,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp215.318.772,00
- Piutang tahun 2021 sebesar Rp5.382.815.203,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp5.632.280.041,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp249.464.838,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Piutang tahun 2022 sebesar Rp6.568.433.784,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp6.927.845.885,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp359.412.101,00
- Piutang tahun 2023 sebesar Rp7.477.876.678,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp8.622.395.320,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp1.144.518.642,00
- Penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp9.707.010.165,00 adalah ketetapan PBB tahun 2024 sebesar Rp33.052.453.398,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp23.345.443.233,00
- Terdapat pendapatan PBB tahun 2024 sebesar Rp92.601,00 yang mengurangi saldo Piutang PBB namun belum diketahui NOP dan tahun piutang, sehingga belum dapat dimasukkan ke dalam tahun piutang.

- Saldo Piutang Pajak Reklame tahun 2024 sebesar Rp448.092.750,00 adalah piutang dari Pendapatan Pajak Reklame yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum terealisasi atas Penetapan besaran pajak yang harus dibayarkan. Saldo Piutang Pajak Reklame bertambah sebesar Rp53.479.421,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp45.227.073,00 dan penambahan piutang baru sebesar Rp98.706.494,00. Rincian Piutang Pajak Reklame sebagai berikut:

Tabel 5.128
Rincian Piutang Pajak Reklame TA 2024

Tahun	Saldo Awal Piutang	Ketetapan	Pendapatan 2024	Mutasi		Koreksi	Saldo Akhir Piutang
				Penambahan	Pengurangan		
2017	101.937.530,00	-	-	-	-	-	101.937.530,00
2018	111.098.387,00	-	-	-	-	(1.238.400,00)	109.859.987,00
2019	28.303.677,00	-	-	-	-	1.238.400,00	29.542.077,00
2020	40.968.630,00	-	-	-	-	(2.916.000,00)	38.052.630,00
2021	25.583.534,00	-	-	-	-	-	25.583.534,00
2022	10.159.516,00	-	-	-	-	-	10.159.516,00
2023	76.562.055,00	-	42.311.073,00	-	42.311.073,00	-	34.250.982,00
2024	-	1.895.216.704,00	1.796.510.210,00	98.706.494,00	-	-	98.706.494,00
Jumlah	394.613.329,00	1.895.216.704,00	1.838.821.283,00	98.706.494,00	42.311.073,00	(2.916.000,00)	448.092.750,00

- Piutang tahun 2017 sebesar Rp101.937.530,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp101.937.530,00
- Piutang tahun 2018 sebesar Rp109.859.987,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp111.098.387,00
  dikurangi : koreksi pencatatan piutang sebesar Rp1.238.400,00
- Piutang tahun 2019 sebesar Rp29.542.077,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp28.303.677,00
  ditambah : koreksi pencatatan piutang sebesar Rp1.238.400,00
- Piutang tahun 2020 sebesar Rp38.052.630,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp40.968.630,00
  dikurangi : koreksi pencatatan piutang sebesar Rp2.916.000,00
- Piutang tahun 2021 sebesar Rp25.583.534,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp25.583.534,00
- Piutang tahun 2022 sebesar Rp10.159.516,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp10.159.516,00
- Piutang tahun 2023 sebesar Rp34.250.982,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp76.562.055,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp42.311.073,00
- Penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp98.706.494,00 adalah ketetapan Pajak Reklame tahun 2024 sebesar

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rp1.895.216.704,00
dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp1.796.510.210,00

- Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah tahun 2024 sebesar Rp36.665.824,00 adalah piutang dari Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum terealisasi atas penetapan besaran pajak tahun 2022 yang harus dibayarkan.

  Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah berkurang sebesar Rp6.899.250,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp29.393.820,00 berupa pelunasan piutang tahun lalu dan penambahan piutang baru sebesar Rp22.494.570,00. Rincian Piutang Air Bawah Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.129
Rincian Piutang Pajak Air Tanah TA 2024

Tahun	Saldo Awal Piutang	Ketetapan	Pendapatan 2024	Mutasi		Saldo Akhir Piutang
				Penambahan	Pengurangan	
2017	631.832,00			-	-	631.832,00
2018	7.253.672,00			-	-	7.253.672,00
2019	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	29.679.570,00	-	29.393.820,00	-	29.393.820,00	285.750,00
2024	-	1.512.127.950,00	1.489.633.380,00	22.494.570,00	-	22.494.570,00
Jumlah	37.565.074,00	1.512.127.950,00	1.519.027.200,00	22.494.570,00	29.393.820,00	30.665.824,00

- Piutang tahun 2017 sebesar Rp631.832,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp631.832,00
- Piutang tahun 2018 sebesar Rp7.253.672,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp7.253.672
- Piutang tahun 2023 sebesar Rp285.750,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp29.679.570,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp29.393.820,00;
- Penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp22.494.570,00 adalah ketetapan Pajak Air Bawah Tanah tahun 2024 sebesar Rp1.512.127.950,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp1.489.633.380,00

2. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, adapun piutang retribusi yang dimaksud adalah hak pendapatan atas pelayanan yang telah diberikan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dibayar oleh penerima pelayanan atau Wajib Retribusi bersangkutan. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp30.687.765.863,10 dan Rp10.281.468.489,00 dengan rincian:

Tabel 5.130
Piutang Retribusi TA 2024

Piutang Retribusi		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Izin Gangguan (DPMPTSP)	364.479.175,00	364.479.175,00	-
2	IMB (DPMPTSP)	123.498.000,00	134.133.000,00	(7,93)
3	Izin Perikanan (DPMPTSP)	520.000,00	520.000,00	-
4	Izin Usaha Pariwisata (DPMPTSP)	375.000,00	375.000,00	-
5	Izin Usaha Industri (DPMPTSP)	50.000,00	50.000,00	-
6	Pasar (Diskoperindag)	17.091.982.834,50	9.781.911.314,00	74,73
7	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Dinkes)	12.447.177.953,60	-	-
8	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Dinkes)	659.682.900,00	-	-
Jumlah		30.687.765.863,10	10.281.468.489,00	198,48

https://jdih.pemalangkab.go.id

Piutang Retribusi sebesar Rp30.687.765.863,10 bertambah sebesar Rp20.406.297.374,10 dibanding tahun lalu karena adanya penambahan piutang sebesar Rp21.748.097.631,10 terdiri dari :

- pencatatan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada Dinkes (RSUD dr. M. Ashari) yang sebelumnya dicatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang BLUD) sebesar Rp12.447.177.953,60
- Piutang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp659.682.900,00;
- Penambahan Piutang Retribusi Pasar sebesar Rp8.641.236.777,50

dan pengurangan sebesar Rp1.341.800.257,00 terdiri dari :

- pelunasan piutang tahun sebelumnya (Piutang IMB) pada DPMPTSP sebesar Rp10.635.000,00;
- pelunasan piutang tahun sebelumnya (Piutang Retribusi Pasar) pada Diskoperindag sebesar Rp1.331.165.257,00.

Saldo Piutang Retribusi terdiri dari:

- Saldo Piutang Retribusi Izin Gangguan TA 2024 sebesar Rp364.479.175,00 sama dengan saldo tahun lalu;
- Saldo Piutang Retribusi IMB tahun 2024 sebesar Rp123.498.000,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp134.133.000,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp10.635.000,00;
- Saldo Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan TA 2024 sebesar Rp520.000,00 sama dengan saldo tahun lalu;
- Saldo Piutang Retribusi Izin Usaha Pariwisata TA 2024 sebesar Rp375.000,00 sama dengan saldo tahun lalu;
- Saldo Piutang Retribusi Izin Usaha Industri TA 2024 sebesar Rp50.000,00 sama dengan saldo tahun lalu; dan
- Saldo Piutang Retribusi Pasar TA 2024 sebesar Rp17.091.982.834,50 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp9.781.911.314,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp1.331.165.257,00;
  ditambah : piutang baru tahun 2024 sebesar Rp8.641.236.777,50 adalah ketetapan Retribusi Pasar tahun 2024 sebesar Rp15.020.337.522,50 dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp6.379.100.745,00
- Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit TA 2024 sebesar Rp12.447.177.953,60 adalah saldo tahun lalu saat dicatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp12.901.220.894,60
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp454.042.941,00;
  merupakan piutang yang terdiri dari :
  - jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp12.439.287.953,60, terdiri dari:
    - ✓ pasien Umum sebesar Rp2.502.842.951,60;
    - ✓ pasien BPJS sebesar Rp9.371.434.244,00;
    - ✓ RS Comal Baru sebesar Rp65.876.869,00;
    - ✓ RS Harapan Sehat sebesar Rp12.865.562,00;
    - ✓ RSI Mardotillah sebesar Rp23.894.390,00;
    - ✓ RSUD Surodadi sebesar Rp57.894.585,00;
    - ✓ RS Santa Maria sebesar Rp48.879.260,00;
    - ✓ RSI Al-Ikhlas sebesar Rp223.344.567,00;
    - ✓ PT. *Inhealth* sebesar Rp11.651.970,00;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- ✓ PT. KAI sebesar Rp290.333,00;
- ✓ PT. Jasa Raharja sebesar Rp75.624.065,00;
- ✓ BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42.850.370,00;
- ✓ BRI *Life* sebesar Rp1.838.787,00.

- jasa sewa tempat/kios PKL di lokasi RSUD sebesar Rp7.890.000,00.

Pengurangan dan penambahan Piutang BLUD selama TA 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.131
Rincian Piutang BLUD TA 2024

Kelompok Debitur		Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Pasien Umum	2.453.897.471,60	72.013.420,00	23.067.940,00	2.502.842.951,60
2	BPJS	10.232.769.503,00	9.371.434.244,00	10.232.769.503,00	9.371.434.244,00
3	RS Comal Baru	-	65.876.869,00	-	65.876.869,00
4	RS Harapan Sehat	-	12.865.562,00	-	12.865.562,00
5	RSI Mardotillah	11.372.928,00	23.894.390,00	11.372.928,00	23.894.390,00
6	RSUD Surodadi	26.025.345,00	57.894.585,00	26.025.345,00	57.894.585,00
7	RS Santa Maria	32.494.133,00	48.879.260,00	32.494.133,00	48.879.260,00
8	RSI Al-Ikhlas	118.838.176,00	223.344.567,00	118.838.176,00	223.344.567,00
9	PT. Inhealth	1.562.388,00	11.651.970,00	1.562.388,00	11.651.970,00
10	PT. KAI	757.144,00	290.333,00	757.144,00	290.333,00
11	PT. Jasa Raharja	-	75.624.065,00	-	75.624.065,00
12	BPJS Ketenagkerjaan	-	42.850.370,00	-	42.850.370,00
13	PT. Kalimantan Prima P	13.518.931,00	-	13.518.931,00	-
14	MOW	2.094.875,00	-	2.094.875,00	-
15	BRI *Life*	-	1.838.787,00	-	1.838.787,00
16	Kios PKL	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00
Jumlah		12.901.220.894,60	10.016.348.422,00	10.470.391.363,00	12.447.177.953,60

- Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2024 sebesar Rp659.682.900,00 adalah piutang atas jasa pelayanan kesehatan berupa klaim kepada BPJS sebesar Rp659.682.900,00 yang ada pada 17 puskesmas.
  Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas baru pertama dicatat pada TA 2024 ini.

3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.529.126.832,00 dan Rp15.066.577.726,60 dengan rincian:

Tabel 5.132
Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

Piutang Lain-lain PAD yang Sah		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Piutang BLUD	-	12.901.220.894,60	(100,00)
2	Piutang Pendapatan Sewa	1.053.735.000,00	689.965.000,00	52,72
4	Piutang Denda	471.569.042,00	471.569.042,00	-
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.122.790,00	1.122.790,00	-
6	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.002.700.000,00	1.002.700.000,00	-
Jumlah		2.529.126.832,00	15.066.577.726,60	(83,21)

- Saldo Piutang BLUD pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.901.220.894,60 berkurang sebesar Rp12.901.220.894,60 karena pada tahun 2024 dicatat sebagai Piutang Retribusi sesuai dengan Pendapatannya, yaitu Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Piutang Pendapatan Sewa

Saldo Piutang Pendapatan Sewa pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.053.735.000,00 dan Rp689.965.000,00, terdiri dari:

Tabel 5.133
Piutang Pendapatan Sewa TA 2024 dan 2023

Piutang Pendapatan Sewa		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios	491.520.000,00	239.520.000,00	105,21
2	Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa	559.515.000,00	450.445.000,00	24,21
3	Piutang Pendapatan Wisma Pemalang di Yogyakarta	2.700.000,00	-	-
Jumlah		1.053.735.000,00	689.965.000,00	52,72

Piutang Pendapatan Sewa adalah hak tagih Pemerintah Kabupaten Pemalang atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh pihak ketiga yang sampai tanggal 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya, terdiri dari:

- Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios pada Disparpora sebesar Rp491.520.000,00 adalah hak tagih pemerintah daerah kepada para penyewa tanah dan bangunan kios di lokasi Kawasan Stadion Sirandu.
  Saldo Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios sebesar Rp491.520.000,00 bertambah sebesar Rp252.000.000,00 dibanding saldo tahun lalu Rp239.520.000,00 karena adanya penambahan piutang sebesar Rp288.000.000,00 dan pembayaran atas piutang sebesar Rp36.000.000,00;
- Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa pada Disperkim sebesar Rp559.515.000,00 adalah hak tagih pemerintah daerah kepada para penyewa rusunawa. Saldo Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa sebesar Rp559.515.000,00 bertambah sebesar Rp109.070.000,00 dibanding saldo tahun lalu Rp450.445.000,00 karena adanya penambahan piutang sebesar Rp135.475.000,00 dan pembayaran atas piutang sebesar Rp26.405.000,00 pada Disperkim.
- Piutang Pendapatan Wisma Pemalang di Yogyakarta pada Disparpora sebesar Rp2.700.000,00 adalah sejumlah pendapatan dari Wisma Pemalang di Yogyakarta yang belum terima oleh Bendahara Penerimaan, sehingga menimbulkan piutang. Atas piutang tersebut, Bendahara Penerimaan telah menerima dan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp2.700.000,00.

- Piutang Denda

Saldo Piutang Denda pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp471.569.042,00 dan Rp471.569.042,00, terdiri dari:

Tabel 5.134
Piutang Denda TA 2024 dan 2023

Piutang Denda		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Piutang Denda Pajak PBB-P2	455.729.042,00	455.729.042,00	-
2	Piutang Denda Pendapatan Sewa	15.840.000,00	15.840.000,00	-
Jumlah		471.569.042,00	471.569.042,00	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Piutang Denda adalah hak tagih Pemerintah Kabupaten Pemalang atas denda pendapatan yang sampai tanggal 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya, terdiri dari:

- Piutang Denda Pajak merupakan piutang denda atas pembayaran PBB-P2 tahun 2013 dan 2014 yang diperhitungkan per 31 Desember 2014, dan tidak termasuk atas tambahan piutang denda atas PBB tahun 2024.
  Saldo Piutang Denda Pajak tahun 2024 sebesar Rp455.729.042,00 sama dengan saldo tahun lalu karena tidak ada pembayaran Denda PBB;
- Piutang Denda atas Pendapatan Sewa sebesar Rp15.840.000,00 dikenakan kepada para penyewa tanah dan bangunan kios di lokasi Kawasan Stadion Sirandu yang sampai batas waktu ditentukan belum membayar sewa dikenakan denda 2%/bulan. Piutang Denda atas Pendapatan Sewa masih sama dibanding tahun lalu.

- Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.122.790,00 dan Rp1.122.790,00, terdiri dari:

Tabel 5.135
Piutang Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 dan 2023

Piutang Pendapatan dari Pengembalian		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Kelebihan Gaji Pegaw ai	1.122.790,00	1.122.790,00	-
Jumlah		1.122.790,00	1.122.790,00	-

Piutang atas Kelebihan Gaji Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.122.790,00 merupakan piutang yang terjadi karena adanya kelebihan pemberian Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai, adalah sama dengan saldo piutang tahun lalu.

- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.002.700.000,00 dan Rp1.002.700.000,00, terdiri dari:

Tabel 5.136
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024 dan 2023

Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Bantuan Modal Kerja Koperasi "Puskopyah"	25.000.000,00	25.000.000,00	-
2	Bantuan Modal Kerja Pengembangan STA Gombong	26.500.000,00	26.500.000,00	-
3	Bantuan Modal Kerja Koperasi	506.000.000,00	506.000.000,00	-
4	Pembangunan Petak Toko	15.200.000,00	15.200.000,00	-
5	Bantuan Modal Kerja LUEP	430.000.000,00	430.000.000,00	-
Jumlah		1.002.700.000,00	1.002.700.000,00	-

- Saldo Piutang Koperasi BMT TA 2024 sebesar Rp25.000.000,00 merupakan sejenis pinjaman bantuan modal yang direalisasikan pada TA 2004 dalam pengelolaan Bappeda dan disalurkan kepada Puskopyah Kabupaten Pemalang;
- Saldo Piutang Pengembangan Agribisnis TA 2024 sebesar Rp26.500.000,00 merupakan pinjaman untuk pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) Gombong kepada petani dan pedagang yang berusaha di bidang holtikultura yang diterimakan kepada Asosiasi Petani dan Pedagang Holtikultura (APPH)

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kawasan Agropolitan "Waliksarimadu" pada Tahun 2009. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pengembangan Sub Terminal Agribisnis Gombong. Berdasarkan ketentuan maka APPH menyetor pengembalian dana satu tahun berikutnya sebesar pokok pinjaman ditambah jasa 6% (4% disetor ke Rekening Kas Umum Daerah + 2% biaya operasional APPH dan Tim Teknis).

- Saldo Piutang Bantuan Modal Koperasi TA 2024 sebesar Rp506.000.000,00 sama dengan saldo tahun lalu. Pemberian Bantuan Modal Koperasi ini dalam pengelolaan Diskoperindag dalam usaha menciptakan wirausahawan-wirausahawan di Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2006. Koperasi penerima pinjaman yang terpilih berdasarkan seleksi oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir, membuat surat pernyataan pengakuan hutang dan berkewajiban membayar angsuran pokok selama lima kali pembayaran dalam jangka waktu tiga tahun dengan angsuran jasa sebesar 6% setahun dibayarkan per bulan.
- Piutang Pembangunan Petak Toko TA 2024 sebesar Rp15.200.000,00 merupakan hasil dari pengelolaan petak toko/ruko di tiap-tiap pasar yang dikelola Diskoperindag adalah saldo piutang tahun lalu.
- Piutang Layanan Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) TA 2024 sebesar Rp430.000.000,00 adalah sama dengan saldo piutang tahun lalu karena pada tahun 2022 tidak ada penerimaan kembali atas pemberian Pinjaman Modal LUEP kepada kelompok petani.

4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat berupa Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil. Saldo Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.137
Piutang Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

Piutang Transfer Pemerintah Pusat		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2021	386.844.752,00	386.844.752,00	-
2	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2022	391.591.181,00	391.591.181,00	-
3	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2023 (DBHCHT)	-	929.066.000,00	100,00
Jumlah		778.435.933,00	1.707.501.933,00	(54,41)

Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil adalah sejumlah uang yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri dari:

Tabel 5.138
Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	DBH PPh Ps. 21	386.844.752,00	386.844.752,00	-
2	DBH PPh Ps. 25/29	391.591.181,00	391.591.181,00	-
3	DBH Cukai Hasil Tembakau	-	929.066.000,00	(100,00)
Jumlah		778.435.933,00	1.707.501.933,00	(54,41)

https://jdih.pemalangkab.go.id

Berdasarkan PMK Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 jumlah Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak untuk Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp929.066.000,00.

Tabel 5.139
Piutang DBH CHT TA 2024

NO	Rekening Piutang Kurang Bayar	Piutang Kurang Bayar TA 2023 berdasarkan PMK Nomor 159 Tahun 2023 (Rp)	Penerimaan Pendapatan atas Kurang Bayar TA 2023 di tahun 2024 (Rp)	Saldo Piutang Kurang Bayar TA 2024 (Rp)
1	Piutang DBH CHT	929.066.000,00	929.066.000,00	-
	Jumlah	929.066.000,00	929.066.000,00	-

Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp929.066.000,00 sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tanggal 2 Januari 2024.

5. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah berupa Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Saldo Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.140
Piutang Transfer Antar Daerah TA 2024 dan 2023

Piutang Transfer Antar Daerah		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi	11.807.936.241,00	5.533.815.075,00	113,38
Jumlah		11.807.936.241,00	5.533.815.075,00	113,38

Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi adalah sejumlah uang yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Dana Bagi Hasil Pajak.

Saldo Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2024 sebesar Rp11.807.936.241,00 bertambah sebesar Rp6.274.121.166,00 dikarenakan adanya pengurangan sebesar Rp5.533.815.075,00 yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tanggal 13 Desember 2024 dan penambahan sebesar Rp11.807.936.241,00 berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah nomor B/900.1.14.3/11/2025 tanggal 14 Mei 2025.

Tabel 5.141
Rincian Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2024 dan 2023

Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.512.001.611,00	1.175.535.049,00	283,83
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.856.672.666,00	499.993.292,00	471,34
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.416.226.197,00	3.848.063.688,00	14,76
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	23.035.767,00	10.223.046,00	125,33
Jumlah		11.807.936.241,00	5.533.815.075,00	113,38

Atas Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi tersebut, pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sudah diterima Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tanggal 16 Mei 2025 sebesar Rp11.807.936.241,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Dengan adanya Penyisihan Piutang Tak Tertagih maka dapat diketahui besarnya Nilai Piutang yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*). Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan menyiapkan perhitungan umur piutang (*aging schedule*) atas saldo piutang yang ada pada 31 Desember sesuai jenis piutang menjadi beberapa kategori kualitas piutang. Besarnya prosentase penyisihan piutang untuk masing-masing kualitas piutang adalah : Lancar (0,5%); Kurang Lancar (10%); Diragukan (50%); dan Macet (100%).
Sedangkan penetapan umur piutang berbeda untuk masing-masing jenis piutang, yaitu Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya.

Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.142
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2024 dan 2023

Penyisihan Piutang Tak Tertagih		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Pajak	44.983.014.939,20	44.010.607.637,73	2,21
2	Penyisihan Piutang Retribusi	3.837.665.912,70	552.619.931,25	594,45
3	Penyisihan Piutang Lain-lain	2.105.082.707,00	4.611.947.129,49	- 54,36
Jumlah		50.925.763.558,90	49.175.174.698,47	3,56

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp50.925.763.558,90 dan Rp49.175.174.698,47. Penyisihan Piutang Tak Tertagih bertambah sebesar Rp1.750.588.860,43 dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Penyisihan Piutang selama TA 2024 adalah sebesar Rp4.723.485.434,43 terdapat selisih sebesar Rp2.972.896.574,00 antara Beban Penyisihan Piutang dengan penambahan saldo Penyisihan Piutang.
Selisih sebesar Rp2.972.896.574,00 dikarenakan adanya koreksi atas saldo Penyisihan Piutang berupa :

- pengurangan karena Penghapusan Piutang PBB tahun 2012 yang mengakibatkan koreksi atas saldo Penyisihan Piutang PBB sebesar Rp2.971.438.574,00; dan
- pengurangan karena koreksi atas Piutang Pajak Reklame tahun 2020 yang mengakibatkan koreksi atas saldo Penyisihan Piutang Pajak Reklame tahun 2020 sebesar Rp1.458.000,00.

1. Penyisihan Piutang Pajak

   Saldo Penyisihan Piutang Pajak pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp44.983.014.939,20 dan Rp44.010.607.637,73 terdiri dari:

Tabel 5.143
Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Piutang PBB	44.700.177.118,62	43.751.909.704,13	2,17
2	Piutang Pajak Reklame	274.838.414,98	250.664.031,75	9,64
3	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	7.999.405,60	8.033.901,85	(0,43)
Jumlah		44.983.014.939,20	44.010.607.637,73	2,21

https://jdih.pemalangkab.go.id

Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.144
Rincian Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak	Saldo Piutang 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar < 2 th	Kurang Lancar 2 - 3 th	Diragukan 3 - 5 th	Macet > 5 th
PBB	73.117.870.033,00	17.184.886.843,00	6.568.433.784,00	10.814.465.402,00	38.550.176.605,00
Reklame	448.092.750,00	132.957.476,00	10.159.516,00	63.636.164,00	241.339.594,00
Air Tanah	30.665.824,00	22.780.320,00	-	-	7.885.504,00
Jumlah	73.596.628.607,00	17.340.624.639,00	6.578.593.300,00	10.878.101.566,00	38.799.401.703,00
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	44.983.014.939,20	86.703.123,20	657.859.330,00	5.439.050.783,00	38.799.401.703,00

Penjelasan:
- Piutang Pajak PBB adalah piutang tahun 1993–2024, sehingga terbagi dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
- Piutang Pajak Reklame adalah piutang tahun 2017–2024, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet;
- Piutang Pajak Air Bawah Tanah adalah piutang tahun 2017-2024, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar dan Macet.

Penyisihan piutang pajak bertambah sebesar Rp972.407.301,47 dibanding saldo tahun lalu dikarenakan bertambahnya penyisihan piutang sebesar Rp4.877.865.234,14 karena bertambahnya piutang dan menurunnya kualitas piutang serta berkurangnya penyisihan piutang sebesar Rp3.905.457.932,67 karena adanya pembayaran atas piutang sebesar Rp932.561.358,67 dan koreksi penyisihan piutang sebesar Rp2.972.896.574,00.

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.837.665.912,70 dan Rp552.619.931,25 terdiri dari:

Tabel 5.145
Penyisihan Piutang Retribusi TA 2024 dan 2023

Penyisihan Piutang Retribusi		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Retribusi Gangguan (HO)	364.479.175,00	364.479.175,00	-
2	Retribusi IMB	123.498.000,00	118.753.500,00	4,00
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	520.000,00	520.000,00	-
4	Retribusi Izin Usaha Pariw isata	375.000,00	375.000,00	-
5	Retribusi Izin Usaha Industri	50.000,00	50.000,00	-
6	Retribusi Pasar	953.962.586,79	68.442.256,25	1.293,82
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	2.391.482.736,41	-	-
8	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.298.414,50	-	-
Jumlah		3.837.665.912,70	552.619.931,25	594,45

Penyisihan Piutang Retribusi bertambah sebesar Rp3.285.045.981,45 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu karena penambahan sebesar Rp3.285.045.981,45 berupa :
- mutasi pencatatan penyisihan piutang dari Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah menjadi Penyisihan Piutang Retribusi pada RSUD dr. M. Ashari sebesar Rp2.391.482.736.41;
- menurunnya kualitas piutang sebesar Rp847.058.646,65;
- bertambahnya penyisihan piutang baru sebesar Rp43.206.183,89.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.146
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi TA 2024

Piutang Retribusi	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar < 1 th	Kurang Lancar 1 - 2 th	Diragukan 2 - 3 th	Macet > 3 th
HO	364.479.175,00	-	-	-	364.479.175,00
IMB	123.498.000,00	-	-	-	123.498.000,00
Perikanan	520.000,00	-	-	-	520.000,00
Pariwisata	375.000,00	-	-	-	375.000,00
Industri	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Pasar (e-ret)	164.204.493,00	-	-	164.204.493,00	-
Pasar (e-ret)	1.595.785.289,00	-	1.595.785.289,00	-	-
Pasar (manual)	6.690.756.275,00	-	6.690.756.275,00	-	-
Pasar (e-ret)	3.794.353.973,00	3.794.353.973,00	-	-	-
Pasar (manual)	4.846.882.804,50	4.846.882.804,50	-	-	-
Yan Kes (RSUD)	12.447.177.953,60	10.016.348.422,00	78.895.742,00	36.844.739,00	2.315.089.050,60
Yan Kes (Puskesmas)	659.682.900,00	659.682.900,00	-	-	-
Jumlah	30.687.765.863,10	19.317.268.099,50	8.365.437.306,00	201.049.232,00	2.804.011.225,60
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	3.837.665.912,70	96.586.340,50	836.543.730,60	100.524.616,00	2.804.011.225,60

Penjelasan :

1) Piutang Retribusi pada DPMPTSP
   - Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO) adalah piutang tahun 2009 – 2017, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
   - Piutang Retribusi IMB adalah piutang tahun 2016 – 2021, sehingga terbagi dalam kategori kualitas Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
   - Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah piutang tahun 2013 – 2016, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
   - Piutang Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah piutang tahun 2009 – 2010, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
   - Piutang Retribusi Izin Usaha Industri adalah piutang tahun 2009, sehingga masuk dalam kualitas Macet;

2) Piutang Retribusi pada Diskoperindag
   - Piutang Retribusi Pasar adalah piutang tahun 2022 – 2024, sehingga masuk dalam kualitas Lancar, Kurang Lancar dan Diragukan;

3) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinkes (RSUD dr. M. Ashari)
   - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah piutang 2007 – 2024 masuk dalam kategori Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Tabel 5.147
Rincian Piutang BLUD TA 2014

Tahun	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar (< 1 tahun)	Kurang Lancar (1 - 2 tahun)	Diragukan (2 - 3 tahun)	Macet (> 3 tahun)
2007	74.355.678,77	-	-	-	74.355.678,77
2008	172.189.951,00	-	-	-	172.189.951,00
2009	364.920.066,00	-	-	-	364.920.066,00
2010	286.076.463,07	-	-	-	286.076.463,07
2011	241.411.164,80	-	-	-	241.411.164,80
2012	186.911.367,35	-	-	-	186.911.367,35
2013	164.971.736,61	-	-	-	164.971.736,61
2014	135.788.870,00	-	-	-	135.788.870,00
2015	193.460.862,00	-	-	-	193.460.862,00
2016	170.582.784,00	-	-	-	170.582.784,00
2017	91.992.609,00	-	-	-	91.992.609,00
2018	79.111.534,00	-	-	-	79.111.534,00
2019	47.159.080,00	-	-	-	47.159.080,00
2020	28.159.514,00	-	-	-	28.159.514,00
2021	77.997.370,00	-	-	-	77.997.370,00
2022	36.844.739,00	-	-	36.844.739,00	-
2023	78.895.742,00	-	78.895.742,00	-	-
2024	10.016.348.422,00	10.016.348.422,00	-	-	-
Jumlah	12.447.177.953,60	10.016.348.422,00	78.895.742,00	36.844.739,00	2.315.089.050,60
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	2.391.482.736,41	50.081.742,11	7.889.574,20	18.422.369,50	2.315.089.050,60

https://jdih.pemalangkab.go.id

Saldo Penyisihan Piutang BLUD TA 2024 sebesar Rp2.391.482.736,41 berkurang sebesar Rp288.782.536,08 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp2.680.265.272,49 dikarenakan adanya penambahan sebesar Rp50.081.742,11 karena bertambahnya piutang serta pengurangan sebesar Rp338.864.278,19 karena adanya pembayaran atas piutang tahun sebelumnya.

4) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinkes (Puskesmas)
   - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah piutang baru tahun 2024 sehingga masuk dalam kategori Lancar.

3. Penyisihan Piutang Lain-lain

Penyisihan piutang lain-lain dikenakan pada selain piutang pajak maupun piutang retribusi. Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.105.082.707,00 dan Rp4.611.947.129,49 terdiri dari:

Tabel 5.148
Penyisihan Piutang Lain-lain TA 2024 dan 2023

Penyisihan Piutang Lain-lain		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Piutang BLUD	-	2.680.265.272,49	(100,00)
2	Piutang Pendapatan Sew a	629.690.875,00	456.290.025,00	38,00
3	Piutang Denda PBB	455.729.042,00	455.729.042,00	-
4	Piutang Denda atas Pendapatan Sew a	15.840.000,00	15.840.000,00	-
5	Piutang atas Kelebihan Gaji Pegaw ai	1.122.790,00	1.122.790,00	-
6	Piutang Bantuan Modal Koperasi BMT Puskopyah	25.000.000,00	25.000.000,00	-
7	Piutang Bantuan Modal Agribisnis STA Gombong	26.500.000,00	26.500.000,00	-
8	Piutang Bantuan Modal Koperasi	506.000.000,00	506.000.000,00	-
9	Piutang Pembangunan Petak Toko	15.200.000,00	15.200.000,00	-
10	Piutang Bantuan Modal LUEP	430.000.000,00	430.000.000,00	-
Jumlah		2.105.082.707,00	4.611.947.129,49	(54,36)

Penjelasan untuk masing-masing obyek Penyisihan Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang BLUD

Penyisihan Piutang BLUD sebesar Rp0,00 berkurang sebesar Rp2.680.265.272,49 karena adanya mutasi pencatatan piutang dan penyisihan piutang dari Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi.

2) Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa

Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain, sehingga perhitungan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.149
Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa TA 2024

Tahun	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2018	35.520.000,00	-	-	-	35.520.000,00
2018	19.250.000,00	-	-	-	19.250.000,00
2019	80.180.000,00	-	-	-	80.180.000,00
2020	25.660.000,00	-	-	-	25.660.000,00
2021	102.585.000,00	-	-	-	102.585.000,00
2022	24.000.000,00	-	-	-	24.000.000,00
2022	113.660.000,00	-	-	-	113.660.000,00
2023	144.000.000,00	-	-	-	144.000.000,00
2023	82.705.000,00	-	-	-	82.705.000,00
2024	288.000.000,00	288.000.000,00	-	-	-
2024	135.475.000,00	135.475.000,00	-	-	-
2024	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-
Jumlah	1.053.735.000,00	426.175.000,00	-	-	627.560.000,00
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	629.690.875,00	2.130.875,00	-	-	627.560.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa TA 2024 sebesar Rp629.690.875,00 bertambah sebesar Rp173.400.850,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp456.290.025,00 dikarenakan adanya penambahan sebesar Rp176.100.850,00 berupa menurunnya kualitas Piutang sebesar Rp173.969.975,00 dan bertambahnya piutang baru sebesar Rp2.130.875,00, serta pengurangan sebesar Rp2.700.000,00 karena adanya pelunasan piutang.

3) Penyisihan Piutang Denda Pajak

Tabel 5.150
Penyisihan Piutang Denda Pajak TA 2024

Nama	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Denda PBB P2	455.729.042,00	-	-	-	455.729.042,00
Jumlah	455.729.042,00	-	-	-	455.729.042,00
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	455.729.042,00	-	-	-	455.729.042,00

Saldo Piutang Denda Pajak merupakan saldo tahun 2013 dan 2014, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.
Saldo Penyisihan Piutang Denda Pajak tahun 2024 sebesar Rp455.729.042,00 sama dibanding tahun lalu karena tidak ada penerimaan pendapatan Denda PBB-P2 atas piutang tersebut.

4) Penyisihan Piutang Denda atas Pendapatan Sewa

Tabel 5.151
Penyisihan Piutang Denda atas Pendapatan Sewa TA 2024

Nama	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Denda Sew a	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00
Jumlah	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00

Saldo Penyisihan Piutang Denda atas Pendapatan Sewa tahun 2024 sebesar Rp15.840.000,00 sama dengan saldo penyisihan piutang tahun lalu.

5) Penyisihan Piutang Kelebihan Gaji

Tabel 5.152
Penyisihan Piutang Kelebihan Gaji TA 2024

Nama	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
PNS	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00
Jumlah	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00

Penyisihan Piutang Kelebihan Gaji TA 2024 sebesar Rp1.122.790,00 merupakan saldo penyisihan piutang tahun lalu, timbul karena piutang kelebihan pemberian Tunjangan Gaji tahun 2007 – 2013 sehingga masuk dalam kategori Macet.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6) Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi BMT Puskopyah

Tabel 5.153
Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi BMT Puskopyah TA 2024

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
BMT Puskopyah	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
Jumlah	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00

Piutang kepada BMT Puskopyah adalah piutang sejak tahun 2004 yang sampai sekarang belum ada usaha pengembalian piutang, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

7) Penyisihan Piutang Bantuan Modal Agribisnis – STA Gombong

Tabel 5.154
Penyisihan Piutang Bantuan Modal Agribisnis TA 2024

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
APPH	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00
Jumlah	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00

Piutang kepada APPH pada STA Gombong adalah piutang sejak tahun 2009, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

8) Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi

Tabel 5.155
Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi TA 2024

Jatuh Tempo	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2011	102.000.000,00	-	-	-	102.000.000,00
2012	108.000.000,00	-	-	-	108.000.000,00
2013	126.000.000,00	-	-	-	126.000.000,00
2014	170.000.000,00	-	-	-	170.000.000,00
Jumlah	506.000.000,00	-	-	-	506.000.000,00
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	506.000.000,00	-	-	-	506.000.000,00

Piutang Bantuan Modal Koperasi diberikan dengan masa pengembalian dalam tiga tahun. Dari saldo piutang tersebut di atas, maka keseluruhan dari piutang masuk dalam kategori kualitas Macet.
Saldo Piutang Bantuan Modal Koperasi tahun 2024 sebesar Rp506.000.000,00 sama dibanding saldo penyisihan piutang tahun lalu.

9) Penyisihan Piutang Pembangunan Petak Toko

Tabel 5.156
Penyisihan Piutang Pembangunan Petak Toko TA 2024

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
-	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00
Jumlah	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Penyisihan Piutang Petak Toko tahun 2024 sebesar Rp15.200.000,00 adalah piutang atas pembangunan Petak Toko yang timbul sejak tahun 2013, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

10) Penyisihan Piutang LUEP

Tabel 5.157
Penyisihan Piutang LUEP TA 2024

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2024	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
PB Sari Bumi	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00
PB. Margo Mulyo	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
PB. Mekar Jaya	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
Jumlah	430.000.000,00	-	-	-	430.000.000,00
		0,50%	**10%**	**50%**	**100%**
Penyisihan Piutang	430.000.000,00	-	-	-	430.000.000,00

Saldo Penyisihan Piutang LUEP TA 2024 sebesar Rp430.000.000,00, tidak ada perubahan karena tidak ada pembayaran atas piutang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum dikonsumsi sehingga menyisakan hak tagih bagi pemerintah daerah. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.158
Beban Dibayar Dimuka TA 2024 dan 2023

Beban Dibayar Dimuka		2024 (Rp)	2023 (Rp)	%
1	Asuransi Kendaraan (BPKAD)	22.510.478,37	17.653.878,16	27,51
2	Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter	85.736.532,25	41.870.958,90	104,76
Jumlah		108.247.010,62	59.524.837,06	81,85

Rincian Beban Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 5.159
Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2024

NO.	Jenis Beban Dibayar Dimuka	Saldo Per 31-Des-2023	Penyesuaian		Saldo Per 31-Des-2024	Pokok	Jangka Waktu	Beban-LO 2024	Beban Dibayar Dimuka
			Debet	Kredit					
	Saldo 31 Des 2023	59.524.837,06	-	-	59.524.837,06				-
1	Asuransi Kendaraan - 2023	17.653.878,16	-	17.653.878,16	41.870.958,90	88.283.425,00	3 MAR '23 - 13 MAR 2	17.653.878,16	-
2	Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter	41.870.958,90	-	41.870.958,90	-	169.810.000,00	1 APR '23 - 31 MAR 24	41.870.958,90	-
3	*Asuransi Kendaraan 2024 - Bumida*	-	4.205.479,45	-	4.205.479,45	10.000.000,00	03 JUN '24 - 03 JUN 25	5.794.520,55	4.205.479,45
4	*Asuransi Kendaraan 2024 - Bumida*	-	5.464.985,22	-	9.670.464,67	12.994.916,00	03 JUN '24 - 03 JUN 25	7.529.930,78	5.464.985,22
5	*Asuransi Alat Berat 2024 - Bumida*	-	12.840.013,70	-	22.510.478,37	28.490.000,00	14 JUN '24 - 14 JUN 25	15.649.986,30	12.840.013,70
6	*Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter*	-	85.736.532,25	-	108.247.010,62	172.894.112,00	1 JUL '24 - 30 JUN 25	87.157.579,75	85.736.532,25
	Jumlah	59.524.837,06	108.247.010,62	59.524.837,06	108.247.010,62	482.472.453,00		175.656.854,44	108.247.010,62

1. Asuransi Kendaraan

   Pembayaran premi Asuransi Kendaraan tahun 2024 terdiri dari:
   - PT. Bumi Putra Muda senilai Rp10.000.000,00 untuk 1 kendaraan dinas dengan masa pertanggungan 3 Juni 2024 sampai dengan 3 Juni 2025. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2024 adalah 153,5 hari sebesar Rp4.205.479,45;
   - PT. Bumi Putra Muda senilai Rp12.994.916,00 untuk 2 kendaraan dinas dengan masa pertanggungan 3 Juni 2024 sampai dengan 3 Juni 2025. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2024 adalah 153,5 hari sebesar Rp5.464.985,22;
   - PT. Bumi Putra Muda senilai Rp28.490.000,00 untuk 4 unit Alat Berat (*Heavy Equipment*) dengan masa pertanggungan 14 Juni 2024 sampai dengan 14 Juni 2025. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2024 adalah 164,5 hari sebesar Rp12.840.013,70.

   Total Beban Dibayar Dimuka dari ketiga pembayaran tersebut adalah sebesar Rp22.510.478,37.

2. Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter

   Pembayaran premi Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter *Extra Cover* untuk 495 tenaga medis tahun 2024 kepada PT. Bumi Putra Muda senilai Rp172.894.112,00 dengan masa pertanggungan 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2024 adalah 181 hari sebesar Rp85.736.532,25.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.1.12 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.160
Persediaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	PERSEDIAAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	BAHAN KONSTRUKSI	-	22.721.700,00
2	BAHAN KIMIA	1.264.485.269,00	2.741.095.814,00
3	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	80.000,00	-
4	BAHAN BAKU	66.346.000,00	792.000,00
5	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	792.000,00	-
6	ISI TABUNG GAS	-	20.000,00
7	BAHAN LAINNYA	239.225.993,33	381.060,00
8	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	2.055.000,00	861.000,00
9	ALAT TULIS KANTOR	1.176.490.444,00	1.552.509.147,00
10	KERTAS DAN COVER	156.674.828,25	11.740.100,00
11	BAHAN CETAK	1.425.391.427,00	1.556.907.498,00
12	BENDA POS	3.599.000,00	340.000,00
13	BAHAN KOMPUTER	36.542.350,00	13.660.000,00
14	PERABOT KANTOR	155.747.925,00	202.159.070,00
15	ALAT LISTRIK	33.780.789,00	16.258.000,00
16	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	43.082.255,00	61.000,00
17	OBAT	24.900.224.908,37	27.724.247.472,60
18	OBAT-OBATAN LAINNYA	8.302.832.512,89	1.593.985.350,00
19	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	5.694.811.268,00	3.645.935.964,00
20	NATURA	113.244.664,00	100.215.308,00
21	PAKAN	3.420.500,00	2.295.000,00
22	DAYA TAHAN TUBUH	50.000,00	-
Jumlah		**43.618.877.133,84**	**39.186.185.483,60**

1. Saldo Persediaan Bahan Konstruksi adalah pengadaan TA 2024 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp22.721.700,00 terdapat pada DPU TR berupa asbuton pada tahun 2023 dan tahun 2024 sudah tidak ada persediaan bahan konstruksi.

2. Saldo Persediaan Bahan Kimia adalah pengadaan TA 2024 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp1.264.485.269,00 dan Rp2.741.095.814,00. Pengadaan Bahan Kimia tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.161
Persediaan Bahan Kimia TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	BAHAN KIMIA	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINAS LINGKUKANGAN HIDUP	61.269.180,00	117.809.472,00
2	DINAS KESEHATAN	1.195.116.089,00	2.593.936.342,00
3	DISPARPORA	-	29.350.000,00
4	DINAS PERTANIAN	8.100.000,00	-
Jumlah		**1.264.485.269,00**	**2.741.095.814,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Saldo Persediaan Bahan bakar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp80.000,00 dan Rp0,00 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun 2024.
4. Saldo Persediaan Bahan Baku per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp66.346.000,00 dan Rp0,00 pada Dinas Kesehatan pada tahun 2024.
5. Saldo Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp792.000,00 dan Rp792.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024.
6. Saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp20.000,00.
7. Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp239.225.993,33 dan Rp381.060,00;

Tabel 5.162
Persediaan Bahan lainnya TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	BAHAN LAINNYA	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINAS LINGKUKANGAN HIDUP	206.560,00	237.060,00
2	KECAMATAN PEMALANG	30.000,00	144.000,00
3	DINAS KESEHATAN	236.971.431,33	-
4	DINAS TENAGA KERJA	268.500,00	-
5	DINSPERMASDES	14.000,00	-
6	DINPERPUS	1.472.002,00	-
7	KECAMATAN PULOSARI	263.500,00	-
Jumlah		**239.225.993,33**	**381.060,00**

8. Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.055.000,00 dan Rp861.000,00;
9. Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) adalah pengadaan TA 2024 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp1.176.490.444,00 dan Rp1.552.509.147,00. Pengadaan ATK tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.163
Persediaan Alat Tulis Kantor TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	ALAT TULIS KANTOR	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINDIKBUD	128.707.110,00	175.013.469,00
2	DINKES	933.138.428,00	994.410.508,00
3	DPU TR	5.866.000,00	22.245.320,00
4	DISPERKIM	540.000,00	494.000,00
5	SATPOL PP	-	717.800,00
6	BPBD	2.958.196,00	7.688.000,00
7	DINSOSKBPP	-	-
8	DISNAKER	290.000,00	649.500,00
9	DLH	7.471.500,00	2.044.200,00
10	DISDUKCATPIL	25.460.910,00	189.080.595,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA OPD	ALAT TULIS KANTOR	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
11	DINPERMASDES	382.500,00	50.000,00
12	DISHUB	153.000,00	288.500,00
13	DISKOMINFO	3.927.000,00	
14	DISKOPERINDAG	1.000.500,00	1.140.000,00
15	DPMPTSP	71.400,00	246.300,00
16	DINPUSARDA	1.899.850,00	764.800,00
17	DISPERIK	1.283.500,00	4.034.390,00
18	DISPARPORA	560.450,00	2.008.025,00
19	DIPERTAN	549.400,00	1.905.800,00
20	BAPPEDA	1.024.500,00	409.500,00
21	BAPENDA	-	80.430.600,00
22	BPKAD	10.613.100,00	10.782.500,00
23	BKD	4.539.500,00	1.380.000,00
24	INSPEKTORAT	23.592.300,00	8.016.740,00
25	SETWAN	11.836.750,00	26.583.800,00
26	SETDA	4.355.950,00	9.577.000,00
27	KESBANGPOLINMAS	2.123.500,00	3.365.500,00
28	KEC. MOGA	532.900,00	564.900,00
29	KEC. PULOSARI	131.000,00	660.000,00
30	KEC. BELIK	324.000,00	75.000,00
31	KEC. WATUKUMPUL	297.500,00	1.500.000,00
32	KEC. BODEH	180.400,00	332.400,00
33	KEC. BANTARBOLANG	50.000,00	50.000,00
34	KEC. RANDUDONGKAL	139.000,00	162.000,00
35	KEC. PEMALANG	1.235.000,00	1.720.000,00
36	KEC. TAMAN	281.500,00	300.000,00
37	KEC. PETARUKAN	238.000,00	294.000,00
38	KEC. AMPELGADING	425.000,00	337.000,00
39	KEC. COMAL	304.000,00	1.273.000,00
40	KEC. ULUJAMI	-	1.644.000,00
41	KEC. WARUNGPRING	6.800,00	270.000,00
	JUMLAH	**1.176.490.444,00**	**1.552.509.147,00**

10. Saldo Persediaan Kertas dan Cover adalah pengadaan TA 2024 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp156.674.828,25 dan Rp11.740.100,00. Pengadaan Kertas dan Cover tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.164
Persediaan Kertas dan Cover TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	KERTAS DAN COVER	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINDIKBUD	1.385.500,00	-
2	DINAS KESEHATAN	96.890.931,25	-
3	DPU TR	8.193.750,00	4.015.000,00
4	DISPERKIM	200.000,00	555.000,00
5	SATPOL PP	179.000,00	215.000,00
6	BPBD	2.083.410,00	1.594.000,00
7	DINSOSKBPP	23.400,00	-
9	DISNAKER	451.500,00	-
10	DLH	11.052.137,00	667.600,00
11	DINPERMASDES	-	702.500,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	340.000,00	66.000,00
13	DISKOMINFO	300.000,00	-
14	DISKOPERINDAG	560.000,00	-
15	DMPTSP	381.000,00	227.000,00
16	DINPERPUSARDA	1.242.500,00	-
17	DISPERIK	608.000,00	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	NAMA OPD	KERTAS DAN COVER	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
18	BAPPEDA	391.000,00	600.000,00
19	BAPENDA	1.400.000,00	-
20	BPKAD	5.575.600,00	-
21	BKD	2.425.000,00	-
22	INSPEKTORAT	9.820.000,00	-
23	SEKRETARIAT DPRD	2.235.000,00	-
24	SEKRETARIAT DAERAH	1.987.250,00	-
25	KESBANGPOLINMAS	418.250,00	-
26	KECAMATAN PULOSARI	1.064.000,00	1.310.000,00
27	KECAMATAN BELIK	640.000,00	329.000,00
28	KECAMATAN WATUKUMPUL	666.600,00	-
29	KECAMATAN BODEH	171.000,00	158.000,00
30	KECAMATAN BANTARBOLANG	2.399.000,00	100.000,00
31	KECAMATAN RANDUDONGKAL	168.500,00	-
32	KECAMATAN PEMALANG	1.288.000,00	961.000,00
33	KECAMATAN TAMAN	319.000,00	-
34	KECAMATAN AMPELGADING	280.000,00	-
35	KECAMATAN PETARUKAN	719.500,00	-
36	KECAMATAN COMAL	425.000,00	-
37	KECAMATAN ULUJAMI	142.000,00	-
38	KECAMATAN WARUNGPRING	249.000,00	240.000,00
Jumlah		**156.674.828,25**	**11.740.100,00**

11. Saldo Persediaan Bahan Cetak yang belum terpakai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.425.391.427,00 dan Rp1.556.907.498,00 sebagai berikut :

Tabel 5.165
Persediaan Bahan Cetak TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	BAHAN CETAK	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINDIKBUD	150.000,00	-
2	DINAS KESEHATAN	617.145.069,00	678.643.708,00
3	DPU TR	1.550.000,00	4.563.000,00
4	DISPERKIM	400.000,00	-
5	SATPOL PP	1.045.000,00	-
6	DLH	2.550.000,00	520.000,00
7	DISDUKCATPIL	611.190.440,00	611.190.440,00
8	DISPERMASDES	460.000,00	-
9	DINAS PERHUBUNGAN	74.152.407,00	117.754.000,00
10	DISKOPERINDAG	2.335.000,00	-
11	DPMPTSP	170.000,00	-
12	DINPERPUSARDA	595.000,00	480.500,00
13	DISPERIK	95.303.561,00	56.640.000,00
14	DISPARPORA	4.500.000,00	4.840.000,00
15	BAPEDA	1.392.200,00	-
16	BAPPENDA	-	46.925.250,00
17	INSPEKTORAT	1.000.000,00	15.180.000,00
18	SEKRETARIAT DAERAH	8.785.000,00	10.165.600,00
19	KESBANGPOL	180.000,00	-
20	BPKAD	-	9.925.000,00
21	KECAMATAN TAMAN	150.000,00	-
22	KECAMATAN PETARUKAN	984.000,00	-
23	KECAMATAN PULOSARI	-	80.000,00
24	KECAMATAN ULUJAMI	603.750,00	-
25	KECAMATAN AMPELGADING	750.000,00	-
Jumlah		**1.425.391.427,00**	**1.556.907.498,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

12. Saldo Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.599.000,00 dan 2023 sebesar Rp340.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.166
Persediaan Benda Pos TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	BENDA POS	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN	110.000,00	20.000,00
2	DLH	200.000,00	90.000,00
3	SEKRETARIAT DAERAH	140.000,00	230.000,00
4	DINAS KESEHATAN	1.900.000,00	-
5	DISKOMINFO	150.000,00	-
6	DINPERPUSARDA	300.000,00	-
7	DISPARPORA	99.000,00	-
8	BKD	150.000,00	-
9	SEKRETARIAT DPRD	250.000,00	-
10	KECAMATAN COMAL	300.000,00	-
Jumlah		**3.599.000,00**	**340.000,00**

13. Saldo Persediaan Bahan Komputer per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp36.542.350,00 dan Rp13.660.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.167
Persediaan Bahan Komputer TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	BAHAN KOMPUTER	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINDIKBUD	100.000,00	-
2	DINAS KESEHATAN	21.217.350,00	-
3	DPU TR	9.370.000,00	12.945.000,00
4	DINPERMASDES	-	115.000,00
5	DPMPTSP	170.000,00	165.000,00
6	KECAMATAN PULOSARI	650.000,00	205.000,00
7	KECAMATAN BODEH	230.000,00	230.000,00
8	DISPARPORA	525.000,00	-
9	BAPENDA	1.000.000,00	-
10	INSPEKTORAT	1.375.000,00	-
11	SEKRETARIAT DAERAH	1.070.000,00	-
12	KECAMATAN PEMALANG	255.000,00	-
13	KECAMATAN TAMAN	230.000,00	-
14	KECAMATAN COMAL	100.000,00	-
15	KECAMATAN WARUNGPRING	250.000,00	-
Jumlah		**36.542.350,00**	**13.660.000,00**

14. Saldo Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp155.747.925,00 dan Rp202.159.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.168
Persediaan Perabot Kantor TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	PERABOT KANTOR	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	149.968.250,00	179.465.700,00
2	DLH	56.625,00	-
3	DINPUSARDA	-	213.000,00
4	DISPARPORA	351.450,00	688.920,00
5	BAPPEDA	213.500,00	406.850,00
6	SEKRATRAIAT DPRD	5.158.100,00	21.384.600,00
Jumlah		**155.747.925,00**	**202.159.070,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

15. Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp33.780.789,00 dan Rp16.258.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.169
Persediaan Alat Listrik TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	ALAT LISTRIK	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINDIKBUD	60.000,00	-
2	DINKES	24.319.289,00	-
3	DINPERPUSARDA	990.000,00	-
4	DISNAKER	60.000,00	-
5	SEKRETARIAT DPRD	6.057.000,00	15.216.000,00
6	BAPPEDA	300.000,00	90.000,00
8	DLH	-	150.000,00
9	DISPARPORA	1.767.000,00	752.000,00
10	DPU TR	-	50.000,00
11	BKD	5.000,00	-
12	INSPEKTORAT	222.500,00	-
Jumlah		**33.780.789,00**	**16.258.000,00**

16. Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp43.082.255,00 dan Rp61.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.170
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINKES	40.176.155,00	-
2	DINPERMASDES	-	61.000,00
3	DISPARPORA	1.141.220,00	-
4	BKD	277.380,00	-
5	INSPEKTORAT	225.000,00	-
6	DISKOMINFO	75.000,00	-
7	SEKRETARIAT DAERAH	960.000,00	-
8	DINAPERPUSARDA	227.500,00	-
Jumlah		**43.082.255,00**	**61.000,00**

17. Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp24.900.224.908,37 dan Rp27.724.247.472,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.171
Persediaan Obat TA 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	OBAT	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	24.178.103.813,37	26.848.137.642,60
2	DINAS PERTANIAN	122.082.955,00	177.481.505,00
3	BKD	-	102.855,00
4	DINSOSKBPP	600.038.140,00	698.525.470,00
Jumlah		**24.900.224.908,37**	**27.724.247.472,60**

- Saldo Persediaan Obat di Dinas Kesehatan sebesar Rp24.178.103.813,37 berupa obat yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp7.809.302.829,23, obat pada RSUD DR. M. Ashari sebesar Rp6.665.796.430,00 dan Puskesmas se-Kabupaten Pemalang sebesar Rp9.703.004.554,14 ini merupakan obat yang

https://jdih.pemalangkab.go.id

masih ada untuk pasien pada Puskesmas se-Kabupaten Pemalang. Pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas masih terdapat obat kedaluwarsa yang dihapus pada tahun 2025 dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 442/019/DINKES/2025 tanggal 13 Februari 2025 senilai Rp634.945.716,15;

- Saldo Persediaan Obat di Dinsos KBPP sebesar Rp600.038.140,00 berupa obat kontrasepsi dan alat kontrasepsi;
- Saldo Persediaan Obat di Dinas Pertanian sebesar Rp122.082.955,00 berupa obat untuk Pertanian.

18. Saldo Persediaan Obat-obatan Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.302.832.519,89 dan saldo tahun 2023 sebesar Rp1.593.985.350,00. Saldo pada Dinas kesehatan sebesar Rp8.301.590.812,89; dan pada BKD saldo obat-obatan lainnya sebesar Rp1.241.700,00 untuk ASN di Lingkungan Kabupaten.
19. Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.694.811.268,00 dan Rp3.645.935.964,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.172
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	NAMA OPD	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	
		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	DPU PR	5.613.610.408,00	3.232.414.808,00
4	DISKOPERINDAG	34.105.000,00	34.105.000,00
5	DISPERTAN	47.095.860,00	379.416.156,00
Jumlah		**5.694.811.268,00**	**3.645.935.964,00**

- Saldo persediaan yang belum diserahkan ke pihak lain di DPU dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Saldo tahun 2024 sebesar Rp5.613.610.408,00 dan saldo tahun 2023 sebesar Rp3.232.414.808,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.173
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada DPU TR
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	PERSEDIAAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	**Islamic Center (2015-2018)**	**2.867.359.543,00**	**2.867.359.543,00**
	Islamic Center(2015)	1.724.053.000,00	1.724.053.000,00
	Islamic Center (Belanja Hibah 2016)	969.519.543,00	969.519.543,00
	Perencanaan finising Islamic Center (Belanja Hibah 2017)	39.897.000,00	39.897.000,00
	Pembangunan Pagar Islamic Center (Belanja Hibah 2018)	119.890.000,00	119.890.000,00
	Perencanaan Pembangunan Pagar Islamic Center (Belanja Hibah 2018)	8.000.000,00	8.000.000,00
	Pengaw asan Pembangunan Pagar Islamic Center (Belanja Hibah 2018)	6.000.000,00	6.000.000,00
2	**MCK WISMA PEMALANG (2018)**	**175.672.265,00**	**175.672.265,00**
	Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja Hibah 2018)	20.000.000,00	20.000.000,00
	Perencanaan Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja hibah 2018)	3.000.000,00	3.000.000,00
	Pengaw asan Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja Hibah 2018)	2.000.000,00	2.000.000,00
	Belanja Penunjang - Bantuan Renovasi MCK Umum di Lingkungan Wisma Pemalang di Yogyakarta (Belanja Hibah 2018)	150.672.265,00	150.672.265,00
3	Pekerjaan Pembangunan Gedung RW 6m x 10m Dukuh. Serdadi RW 09 RT 01 Dusun Purw oharjo Comal (DAU=Rp.189.383.000,-) Pekerjaan Pembangunan Gedung RW 6m x 10m Dukuh. Serdadi RW 09 RT 01 Dusun Purw oharjo Comal (DAU=Rp.189.383.000,-) dari belanja modal gedung bangunan TA 2023	189.383.000,00	189.383.000,00
4	**Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat**	**2.381.195.600,00**	**-**
	Rehabilitasi Gedung Makodim 0711 pemalang tahap 3 (2024)	904.637.750,00	-
	Rehabilitasi gedung kantor barang bukti rampasan dan tilang kejaksaan negeri pemalang (2024)	1.064.830.450,00	-
	pemeliharaan kantor kejaksaan (2024)	198.391.800,00	-
	pemeliharaan kantor TNI w ilayah kerja pemalang (2024)	213.335.600,00	-
	JUMLAH	**5.613.610.408,00**	**3.232.414.808,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum diserahkan ke pihak lain tahun 2024 di Diskoperindag Rp34.105.000,00 perolehan TA 2015 berupa barang pameran milik Diskoperindag.
- Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum diserahkan ke pihak lain tahun 2024 di Dispertan Rp47.095.860,00 berupa obat hibah dari Provinsi Jawa Tengah yang masih ada sisanya akan diserahkan kepada kelompok peternak.

20. Saldo Persediaan Natura per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp113.244.664,00 dan Rp100.215.308,00 ada pada RSUD dr. M. Ashari.
21. Saldo Persediaan Pakan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.420.500,00 dan Rp2.295.000,00 pada Dinas Perikanan.
22. Saldo Persediaan Daya Tahan Tubuh per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp50.000,00 dan Rp0,00 pada Kecamatan Pemalang di Kelurahan Widuri.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.174
Investasi Jangka Panjang TA 2024 dan 2023

Investasi Jangka Panjang		2024 (Rp).	2023 (Rp).
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	256.995.743.876,20	243.542.432.497,35
JUMLAH		256.995.743.876,20	243.542.432.497,35

5.5.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.5.1.2.1.1 Investasi Non Permanen Lainnya

Saldo investasi non permanen Kabupaten Pemalang Tahun 2024 masih sama dengan saldo tahun 2023 yaitu sebesar Rp0,00.

5.5.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.5.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp256.995.743.876,20 dan Rp243.542.432.497,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.175
Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pemalang
TA 2024 dan 2023

Investasi Jangka Panjang Permanen		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	PT. Bank Jateng	95.067.000.000,00	91.334.000.000,00
2	Perusahaan Daerah	161.422.743.876,20	151.702.432.497,35
3	PT. PRPP Jawa Tengah	506.000.000,00	506.000.000,00
Jumlah		**256.995.743.876,20**	**243.542.432.497,35**

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penyertaan modal kepada beberapa Perusahaan Daerah sebesar Rp14.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.176
Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2024

No	Perusahaan Daerah	Tambahan penyertaan Modal (Rp)
1	Bank Jateng	3.733.000.000,00
2	PDAM Tirta Mulia	4.000.000.000,00
3	PT LKM BKD	767.000.000,00
4	PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)	1.500.000.000,00
5	PT Aneka Usaha	4.500.000.000,00
	Jumlah	14.500.000.000,00

Penjelasan investasi permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1) PT Bank Jateng
Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan modal disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pada Bank Jateng sebesar Rp3.733.000.000,00 sehingga total investasi permanen dengan metode *cost* di PT Bank Jateng tahun 2024 sebesar Rp95.067.000.000,00 Saldo investasi tersebut tidak sama dengan yang tertera dalam Laporan Keuangan Bank Jateng TA 2024, karena yang tertera di Kaporan Keuangan Bank Jateng TA 2024 sebesar Rp.87.284.000.000,00 merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jateng TA 2022, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2023 sebesar Rp.4.050.000.000,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2024 sebesar Rp.3.733.000.000,00 belum terakomodir.

2) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah
Investasi Permanen pada perusahaan daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan berdasarkan metode *equity* dan metode *cost* masing-masing sebesar Rp161.422.743.876,20 dan Rp151.702.432.497,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.177
Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Perusahaan Daerah		Metode Perhitungan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	PDAM Tirta Mulia	Equity	125.303.614.250,00	117.906.990.316,00
2	PT. BPR BKK Jateng	Cost	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00
3	PT. BPR BKK Taman	Equity	5.319.214.134,88	4.984.669.995,37
4	PT BPR Bank Pemalang	Equity	1.430.432.566,02	5.246.570.000,10
5	PD Aneka Usaha	Equity	14.604.130.559,00	9.695.808.924,00
6	PT LKM BKD	Equity	4.965.352.366,30	4.068.393.261,88
Jumlah			**161.422.743.876,20**	**151.702.432.497,35**

Perusahaan-perusahaan Daerah yang komposisi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pemalang di atas 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan pengelolaannya metode penilaian investasi permanen menggunakan metode *equity*. Perusahaaan-perusahaan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Investasi Permanen pada PDAM Tirta Mulia
Perhitungan Investasi pada PDAM Tirta Mulia didasarkan pada Laporan Keuangan PDAM Tirta Mulia TA 2024 (audited)
Dalam laporan keuangan PDAM disajikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp14.732.252.954,00. Angka sebesar Rp14.732.252.954.00 tersebut

https://jdih.pemalangkab.go.id

merupakan bantuan dari pemerintah pusat (APBN) sehingga tidak diakui sebagai penambah ekuitas Pemkab Pemalang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.178
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Penyertaan 2004 dari Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Jawa Tengah	2.137.482.517,00
Penyertaan 2005 dari Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Jawa Tengah	433.796.000,00
Permukiman Jawa Tengah Penyertaan 2006 dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah Jawa Tengah	24.864.677.00
Penyertaan 2008 dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Air Minum Rp1.513.332.760,00 dan Air Limbah Jawa Tengah	1.513.332.760,00
Penyerahan Operasional dari Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah Ditjen Cipta Karya Departemen PU Tahun 2010	10.622.777.000,00
Total	14.732.252.954,00

Kepala Divisi Accounting PDAM Tirta Mulia menjelaskan terkait dana sebesar Rp14.732.252.954,00 tersebut dicatat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya.

Prosentase kepemilikan Pemerintah kabupaten Pemalang terhadap PDAM Tirta mulia sebesar 100 % sehingga Perhitungan investasi pada PDAM Tirta Mulia menggunakan metode *equity*.

Perhitungan Investasi pada PDAM Tirta Mulia didasarkan pada Laporan Keuangan Audited PDAM Tirta Mulia TA 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00028/2.0282/AU.2/04/0183-2/1/II/2025. Berdasarkan laporan KAP tersebut Perhitungan jumlah ekuitas PDAM Tirta Mulia sebagai berikut:

Tabel 5.179
Perhitungan Jumlah Ekuitas PDAM Tirta Mulia
Tahun Anggaran 2024

Saldo per 31 Desember 2023	117.906.990.316,00
Dikurangi :	
Penerimaan deviden tahun 2024	3.647.817.508,00
Koreksi kesalahan tahun 2023	
Ditambah :	
Bagian laba tahun 2024 (Audited) :	7.044.441.442,00
100% x Rp7.044.441.442,00	
Tambahan Penyertaan modal 2024	4.000.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	125.303.614.250,00

Dalam Laporan Keuangan, Neraca per 31 Desember 2024, penyertaan modal Pemkab Pemalang pada PDAM Tirta Mulia disajikan sebesar Rp125.303.614.250,00.

b) Investasi Permanen pada PT BKK Jateng

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank

https://jdih.pemalangkab.go.id

Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017, dan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Ning Sarwiyati, S.H., notaris di Semarang nomor 25 tanggal 24 Juni 2019, PD BKK Pemalang pada tahun 2019 merger dengan PD BKK di wilayah Jawa Tengah (total sebanyak 29 PD BKK) menjadi PT BKK Jateng.
Dengan berubahnya PD BKK Pemalang menjadi PT BKK Jateng mengakibatkan berubahnya penilaian investasi permanen yang disesuaikan dengan kepemilikan dari metode *equity* menjadi metode *cost.* Hal ini karena nilai investasi Pemerintah Kabupaten Pemalang pada PT BKK Jateng kurang dari 20%.
Perhitungan Investasi pada PT BKK Jateng didasarkan pada Laporan Keuangan PT BKK Jateng TA 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00016/2.0282/AU.2/07/0182-2/1/I/2025. Berdasarkan laporan KAP tersebut komposisi saham Pemerintah Kabupaten Pemalang pada PT BKK Jateng per 31 Desember 2024 masih sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp9.800.000.000,00 akan tetapi persentase penyertaan modal mengalami penurunan sebesar 0,01% dari 2,66% menjadi 2,65%.

c) Investasi Permanen pada PT. BPR BKK Taman
PT BPR BKK Taman (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 1995 yang telah dirubah terakhir dengan Perda Nomor 20 Tahun 2002. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Kredit Kecamatan (BKK) PD BPR BKK Taman.
Perhitungan Investasi pada PT BPR BKK Taman didasarkan pada Laporan Keuangan PT BPR BKK Taman TA 2024 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik (KAP) Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan auditor Independen nomor : 00014/2.0282/AU.2/07/0182-1/1/I/2025. Perhitungan jumlah ekuitas PT BPR BKK Taman sebagai berikut:

Tabel 5.180
Perhitungan jumlah Ekuitas PT BPR BKK Taman
Tahun Anggaran 2024

Saldo per 31 Desember 2023	4.984.669.995,37
Dikurangi :	
Penerimaan deviden tahun 2024	496.416.508,00
Koreksi kesalahan tahun 2023	
Ditambah :	
Bagian laba tahun 2024 (Audited) :	830.960.647,51
48,6% x Rp1.709.795.571,00	
Tambahan Penyertaan modal 2024	
Saldo per 31 Desember 2024	**5.319.214.134,88**

Prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap PT BPR BKK Taman per 31 Desember 2024 adalah 48,6 %

https://jdih.pemalangkab.go.id

sedangkan sisanya sebesar 51,4% dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Perhitungan investasi permanen pada PT BPR BKK Taman menggunakan metode *equity*, sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar Rp5.319.214.134,88.

d) Investasi Permanen pada PT. BPR Bank Pemalang

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : S-1846/MD/1985 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP 259/ KM /1996. Pada tahun 2019, PD BPR Bank Pemalang berubah bentuk badan usaha menjadi PT. BPR Bank Pemalang (perseroda) sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 22 Januari 2019 Tentang Perusahaan Perseroda Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.

Perhitungan Investasi pada PD BPR Bank Pemalang didasarkan pada Laporan Keuangan PT BPR Bank Pemalang TA2024 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan auditor Independen dengan nomor: 00047/2.1353/AU.2/07/1484-1/I/II/2025 Perhitungan jumlah ekuitas PT BPR Bank Pemalang sebagai berikut:

Tabel 181
Perhitungan Jumlah Ekuitas PT BPR Bank Pemalang
Tahun Anggaran 2024

Saldo per 31 Desember 2023	5.246.570.000,10
Dikurangi :	
Penerimaan deviden tahun 2024	0,00
Koreksi ekuitas Tahun sebelumnya	
Ditambah :	
Bagian rugi tahun 2024 (Audited) :	- 5.316.137.434,08
99% x Rp5.369.835.792,00	
Tambahan Penyertaan modal 2024	1.500.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	**1.430.432.566,02**

Sesuai dengan laporan tersebut prosentase Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 adalah 99 %, Perhitungan Investasi Permanen pada PT. BPR Bank Pemalang menggunakan metode *equity,* sehingga investasi permanen pada PT BPR Bank Pemalang Tahun Anggaran 2024 adalah Rp1.430.432.566,02.

Pada Tahun Anggaran 2024 PT BPR Bank Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp5.369.835.792,00 yang disebabkan karena banyaknya kredit macet sehingga investasi permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu Rp5.246.570.000,10 pada TA 2023 turun menjadi Rp1.430.432.566,02 pada TA 2024.

e) Investasi Permanen pada PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang

PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda), dibentuk untuk memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Tahun 2021 berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha. Perubahan Badan hukum ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.

Perhitungan Investasi pada PT Aneka Usaha didasarkan pada Laporan Keuangan PT Aneka Usaha TA 2024 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan. dengan opini Wajar dengan Pengecualian. Adapun hal yang menjadi pengecualian dalam Laporan Keuangan PT Aneka Usaha TA 2024 adalah sebagai berikut:

- ✓ Perusahaan belum menyajikan perhitungan kewajiban Imbalan Kerja yang mencakup pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, pesangon pemutusan kontrak, dan imbalan berbasis ekuitas sesuai SAK-ETAP Bab 23 dan Bab 24 tentang pajak penghasilan.
- ✓ PT ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG (PERSERODA) mengalami Saldo Laba Negatif, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 terakumulasi sebesar minus Rp16.088.418.569,-, kondisi tersebut mengindikasi keraguan atas kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*).

Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan auditor Independen dengan nomor:00049/2.1137/AU.2/05/1326-2/1/III/2025 Perhitungan jumlah ekuitas PT Aneka Usaha sebagai berikut:

Tabel 5.182
Perhitungan Jumlah Ekuitas PT Aneka Usaha
Tahun Anggaran 2024

Saldo per 31 Desember 2023	9.695.808.924,00
Dikurangi :	
Penerimaan deviden tahun 2024	
Koreksi Rugi Tahun Lalu	
Koreksi Rugi	
Rugi Tahun berjalan	
Ditambah :	
Bagian laba tahun 2024 (Audited) :	408.321.635,00
100% x Rp.408.321.635,00	
Tambahan Penyertaan modal 2024	4.500.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	**14.604.130.559,00**

Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 adalah 100%, Perhitungan Investasi Permanen pada PT. Aneka Usaha menggunakan metode *equity,* sehingga investasi permanen pada PT Aneka Usaha adalah sebesar Rp14.604.130.559,00.

f) Investasi Permanen pada PT LKM BKD

PT LKM BKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang perusahaan perseroaan daerah lembaga keuangan mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang. PT LKM BKD dibentuk pada tanggal 2 Juni 2020 pembentukan BUMD baru tersebut berasal dari penggabungan 9 BKD di Kabupaten Pemalang yaitu:

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. BKD Kelurahan Mulyoharjo;
2. BKD Kelurahan Pelutan;
3. BKD Kelurahan Kebondalem;
4. BKD Kelurahan Sugihwaras;
5. BKD Kelurahan Bojongbata;
6. BKD Kelurahan Wanarejan;
7. BKD Kelurahan Beji;
8. BKD Kelurahan Petarukan; dan
9. BKD Kelurahan Purwoharjo.

Perhitungan Investasi pada PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perserorda) didasarkan pada Laporan Keuangan PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perserorda) TA 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sarastanto & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen dengan nomor: 00002/2.1137/AU.3/09/1326-1//1/I/2025 Perhitungan jumlah ekuitas PT LKM BKD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.183
Perhitungan Jumlah Ekuitas PT LKM BKD
Tahun Anggaran 2024

Saldo per 31 Desember 2023	4.068.393.261,88
Dikurangi :	
Penerimaan deviden tahun 2024	109.167.777,00
Koreksi saldo tahun 2023	
Ditambah :	
Bagian laba tahun 2024 (Audited) :	239.126.881,42
99,11% x Rp241.274.222,00	
Tambahan Penyertaan modal 2024	767.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	**4.965.352.366,30**

Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 adalah 99,11% Perhitungan Investasi Permanen pada PT. LKM BKD menggunakan metode *equity,* sehingga investasi permanen pada PT LKM BKD adalah sebesar Rp4.965.352.366,30.

3) Investasi Permanen pada PT PRPP Jawa Tengah

Dasar hukum penyertaan modal ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 09 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP). Penghitungan nilai investasi pada PT PRPP menggunakan metode *cost* karena modal yang disetor nilainya dibawah 20% dari modal keseluruhan. Total investasi pada PT PRPP tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp506.000.000,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023, tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.184
Jenis Aset Tetap TA 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
1	Tanah	1.062.837.140.300,00	1.056.322.037.800,00	6.515.102.500,00	0,62
2	Peralatan Mesin	893.532.685.419,70	834.387.411.113,00	59.145.274.306,70	7,09
3	Gedung Bangunan	1.695.019.049.552,00	1.646.798.445.866,00	48.220.603.686,00	2,93
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.314.651.315.232,00	1.260.572.489.829,00	54.078.825.403,00	4,29
5	Aset Tetap Lainnya	205.864.427.068,00	188.409.775.887,00	17.454.651.181,00	9,26
6	Konstruksi Dlm Pengerjaan	73.208.758.604,00	73.016.099.991,00	192.658.613,00	0,26
7	Akumulasi Penyusutan	(2.007.515.676.920,70)	(1.838.590.454.527,00)	(168.925.222.393,70)	9,19

Nilai bersih aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.237.597.699.255,00 terdiri dari Nilai Perolehan Aset sebesar Rp5.245.113.376.175,70 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp2.007.515.676.920,70. Terjadi penambahan nilai bersih Aset Tetap pada tahun 2024 sebesar Rp16.681.893.296,00 atau 0,52% dibandingkan tahun 2023 adalah berupa penambahan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap masing-masing sebesar Rp185.607.115.689,70 dan Rp168.925.222.393,70. Penambahan nilai bersih Aset Tetap dikarenakan bertambahnya nilai Aset Tetap lebih besar dibandingkan bertambahnya nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Penambahan Aset Tetap diperoleh dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap TA 2024 sebesar Rp178.205.846.949,00 dan penambahan sebesar Rp25.948.515.339,00 berupa kapitalisasi non belanja modal/reklas sesama Aset Tetap, mutasi masuk antar OPD, koreksi pencatatan aset dan hibah, serta pengurangan sebesar Rp18.547.246.598,30 berupa reklas sesama Aset Tetap, hibah, tidak memenuhi kapitalisasi, mutasi keluar antar OPD, koreksi pencatatan aset, penghapusan, dan reklas menjadi Aset Lainnya. Dari Belanja Modal Aset Tetap TA 2024 sebesar Rp178.205.846.949,00 yang menjadi Aset Tetap adalah sebesar Rp174.129.645.586,00 atau 97.71%.

Tabel 5.185
Rincian Jenis Aset Tetap TA 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tanah	1.056.322.037.800,00	6.524.266.000,00	9.163.500,00	1.062.837.140.300,00
2	Peralatan dan Mesin	834.387.411.113,00	71.137.946.423,00	11.992.672.116,30	893.532.685.419,70
3	Gedung dan Bangunan	1.646.798.445.866,00	53.914.275.160,00	5.693.671.474,00	1.695.019.049.552,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.260.572.489.829,00	54.473.832.215,00	395.006.812,00	1.314.651.315.232,00
5	Aset Tetap Lainnya	188.409.775.887,00	17.911.383.877,00	456.732.696,00	205.864.427.068,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.016.099.991,00	192.658.613,00	-	73.208.758.604,00
7	Akumulasi Penyusutan	- 1.838.590.454.527,00	- 179.269.496.750,00	- 10.344.274.356,30	- 2.007.515.676.920,70
Jumlah		**3.220.915.805.959,00**	**24.884.865.538,00**	**8.202.972.242,00**	**3.237.597.699.255,00**

Mutasi Penambahan sebesar Rp25.948.515.339,00 yang berasal dari selain belanja modal terdiri dari:

- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp6.484.474.595,00 terdiri dari:
  - Kapitalisasi dari Belanja Non Modal sebesar Rp6.288.624.732,00 berupa kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Tak Terduga;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp195.849.863,00;

- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp2.890.581.409,00; dan
- Koreksi Pencatatan/Penilaian Aset/Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp16.573.459.335,00 terdiri dari:
  - koreksi pencatatan aset yang belum tercatat sebesar Rp4.3.64.690.000,00; dan
  - penerimaan Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp12.208.769.335,00.

Mutasi Pengurangan sebesar Rp18.547.246.598,30 terdiri dari:
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp195.849.863,00;
- Tidak memenuhi kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp3.990.706.363,00;
- Mutasi Keluar antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp2.890.581.409,00;
- Penghapusan aset sebesar Rp9.268.898.325,00; dan
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp2.201.210.638,00.
  Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi terdiri dari:
  - Reklas ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp85.495.000,00;
  - Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp2.115.715.638,00;

Ringkasan penambahan Aset Tetap tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2024	2.890.581.409,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2024	2.890.581.409,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset Tetap/Aset Lainnya	6.484.474.595,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	16.573.459.335,00	
		23.057.933.930,00
Kurang :		
- Reklas sesama Aset Tetap	195.849.863,00	
- Diserahkan ke pihak lain/hibah	0,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	3.990.706.363,00	
- Koreksi Pencatatan Aset	0,00	
- Penghapusan	9.268.898.325,30	
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi	2.201.210.638,00	
		15.656.665.189,30
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		7.401.268.740,70
Belanja Modal Aset Tetap		178.205.846.949,00
Penambahan Aset Tetap TA. 2024		185.607.115.689,70

Saldo konsolidasi dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.186
Konsolidasi Aset Tetap TA 2024

No	OPD	Aset Tetap						
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
1	Dindikbud	104.082.091.079,00	234.504.252.311,00	857.574.354.816,00	5.568.257.487,00	201.923.983.647,00	2.362.017.589,00	1.406.014.956.929,00
2	Dinkes	68.212.799.000,00	362.480.403.800,00	183.900.602.113,00	20.481.496.330,00	192.260.980,00	1.046.886.749,00	636.314.448.972,00
3	DPU TP	422.825.478.308,00	21.375.628.621,00	21.282.732.562,00	1.141.959.421.462,00	199.944.760,00	61.674.700.523,00	1.669.317.906.236,00
4	Disperkim	20.125.589.800,00	5.261.327.445,00	43.402.002.124,00	97.089.389.776,00	21.619.500,00	359.547.793,00	166.259.476.438,00
5	Satpol PP	892.500.000,00	7.105.799.975,00	756.590.000,00	-	232.000.000,00	-	8.986.889.975,00
6	BPBD	5.002.510.000,00	6.888.959.648,00	1.564.867.000,00	-	9.969.300,00	-	13.466.305.948,00
7	Dinsos KBPP	1.340.620.050,00	11.964.637.448,00	4.584.818.000,00	72.806.000,00	7.715.000,00	101.042.000,00	18.071.638.498,00
8	Disnaker	3.570.800.000,00	7.557.089.415,00	8.862.437.232,00	197.657.800,00	8.647.500,00	42.548.000,00	20.239.179.947,00
9	DLH	9.291.789.500,00	25.487.811.239,00	5.078.321.896,00	6.601.048.425,00	11.416.000,00	-	46.470.387.060,00
10	Disdukcatpil	1.963.000.000,00	11.384.882.299,00	2.050.879.586,00	319.977.750,00	37.765.915,00	-	15.756.505.550,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	OPD	Aset Tetap						
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
11	Dinpermasdes	806.400.000,00	4.398.455.480,00	1.734.444.646,00	52.189.000,00	-	-	6.991.489.126,00
12	Dishub	12.287.372.288,00	17.798.920.924,00	13.130.122.810,00	3.314.659.000,00	2.271.900,00	100.765.000,00	46.634.111.922,00
13	Diskominfo	-	15.468.614.944,00	4.570.615.434,00	284.286.230,00	9.536.000,00	-	20.333.052.608,00
14	Diskoperindag	65.099.950.200,00	9.286.642.779,00	235.982.560.411,00	2.104.507.329,00	17.952.200,00	1.383.825.800,00	313.875.438.719,00
15	DPMPTSP	1.143.000.000,00	4.103.542.712,00	2.582.948.897,00	122.907.650,00	37.565.000,00	-	7.989.964.259,00
16	Dinpusarda	1.810.500.000,00	4.926.279.735,00	4.284.356.320,00	33.896.290,00	1.631.602.200,00	95.865.000,00	12.782.499.545,00
17	Disperik	4.018.481.000,00	6.065.358.968,00	12.037.698.646,00	3.184.803.045,00	62.603.322,00	-	25.368.944.981,00
18	Disparpora	37.099.763.179,00	8.721.635.365,00	82.450.462.136,00	12.140.813.093,00	43.208.500,00	6.041.560.150,00	146.497.442.423,00
19	Dispertan	26.388.813.000,00	11.331.365.131,00	24.790.319.234,00	1.506.876.500,00	47.027.480,00	-	64.064.401.345,00
20	Setda	3.980.326.000,00	34.533.108.248,70	22.726.983.000,00	831.895.500,00	574.400.394,00	-	62.646.713.142,70
21	Setwan	10.075.008.032,00	14.716.088.864,00	116.214.408.423,00	294.856.125,00	417.273.170,00	-	141.717.634.614,00
22	Bappeda	3.606.389.499,00	5.806.776.285,00	2.039.784.000,00	101.320.700,00	94.630.900,00	-	11.648.901.384,00
23	BPKAD	66.136.103.700,00	20.164.356.756,00	4.435.475.560,00	240.405.000,00	73.182.900,00	-	91.049.523.916,00
24	Bapenda	1.575.000.000,00	7.219.738.927,00	1.214.103.500,00	74.168.100,00	1.734.500,00	-	10.084.745.027,00
25	BKD	-	6.004.988.792,00	988.798.431,00	208.412.000,00	40.330.000,00	-	7.242.529.223,00
26	Inspektorat	3.809.000.000,00	5.008.077.591,00	1.233.839.562,00	-	9.451.000,00	-	10.060.368.153,00
27	Kec. Moga	2.712.750.000,00	1.294.575.901,00	959.050.900,00	2.000.000,00	107.500,00	-	4.968.484.301,00
28	Kec. Pulosari	113.100.000,00	1.056.037.851,00	1.862.715.000,00	7.000.000,00	-	-	3.038.852.851,00
29	Kec. Belik	673.750.000,00	1.349.579.580,00	1.537.790.476,00	2.000.000,00	10.000,00	-	3.563.130.056,00
30	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	1.158.213.751,00	1.878.626.300,00	3.000.000,00	30.000,00	-	3.123.470.051,00
31	Kec. Bodeh	292.400.000,00	1.291.772.776,00	736.095.249,00	-	6.030.000,00	-	2.326.298.025,00
32	Kec. Bantarbolang	-	1.199.989.160,00	1.178.458.000,00	500.000,00	-	-	2.378.947.160,00
33	Kec. Randudongkal	700.000.000,00	1.060.090.001,00	1.576.455.400,00	102.988.000,00	65.000,00	-	3.439.598.401,00
34	Kec, Pemalang	144.793.386.650,00	3.928.755.314,00	9.437.995.774,00	12.014.455.576,00	68.854.250,00	-	170.243.447.564,00
35	Kec Taman	17.111.703.000,00	2.287.751.925,00	3.037.763.900,00	3.082.958.123,00	20.557.500,00	-	25.540.734.448,00
36	Kec, Petarukan	8.586.656.621,00	1.509.308.403,00	2.591.406.079,00	1.792.832.341,00	38.455.250,00	-	14.518.658.694,00
37	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	1.223.545.651,00	884.838.500,00	3.000.000,00	650.000,00	-	2.334.534.151,00
38	Kec. Comal	11.466.205.872,00	1.566.163.903,00	6.638.256.500,00	845.580.600,00	17.442.500,00	-	20.533.649.375,00
39	Kec. Ulujami	715.303.522,00	1.324.569.967,00	1.805.699.135,00	2.000.000,00	3.535.000,00	-	3.851.107.624,00
40	Kec. Warungpring	222.500.000,00	1.148.283.711,00	1.419.372.000,00	3.450.000,00	98.000,00	-	2.793.703.711,00
41	Bakesbangpol	-	2.569.303.823,00	-	3.500.000,00	500.000,00	-	2.573.303.823,00
	Jumlah	*1.062.837.140.300,00*	*893.532.685.419,70*	*1.695.019.049.552,00*	*1.314.651.315.232,00*	*205.864.427.068,00*	*73.208.758.604,00*	*5.245.113.376.175,70*

Seluruh saldo Aset Tetap masing-masing OPD per 31 Desember 2024 tersebut telah sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2024.
Adapun saldo masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.3.1 Tanah

Saldo Tanah pada TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.062.837.140.300,00 Rp1.056.322.037.800,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.187
Saldo Aset Tetap Tanah TA 2024 dan 2023

No	OPD	Aset Tetap Tanah		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Dindikbud	104.082.091.079,00	104.082.091.079,00	-	-
2	Dinkes	68.212.799.000,00	68.212.799.000,00	-	-
3	DPUTR	422.825.478.308,00	422.825.478.308,00	-	-
4	Disperkim	20.125.589.800,00	17.886.323.800,00	2.239.266.000,00	12,52
5	Satpol PP	892.500.000,00	892.500.000,00	-	-
6	BPBD	5.002.510.000,00	5.002.510.000,00	-	-
7	Dinsos KBPP	1.340.620.050,00	1.340.620.050,00	-	-
8	Disnaker	3.570.800.000,00	3.570.800.000,00	-	-
9	DLH	9.291.789.500,00	9.291.789.500,00	-	-
10	Disdukcatpil	1.963.000.000,00	1.963.000.000,00	-	-
11	Dinpermasdes	806.400.000,00	806.400.000,00	-	-
12	Dishub	12.287.372.288,00	8.002.372.288,00	4.285.000.000,00	53,55
13	Diskominfo	-	-	-	-
14	Diskoperindag	65.099.950.200,00	65.099.950.200,00	-	-
15	DPMPTSP	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	-	-
16	Dinpusarda	1.810.500.000,00	1.810.500.000,00	-	-
17	Disperik	4.018.481.000,00	4.018.481.000,00	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	OPD	Aset Tetap Tanah		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
18	Disparpora	37.099.763.179,00	37.099.763.179,00	-	-
19	Dispertan	26.388.813.000,00	26.388.813.000,00	-	-
20	Setda	3.980.326.000,00	3.980.326.000,00	-	-
21	Setwan	10.075.008.032,00	10.075.008.032,00	-	-
22	Bappeda	3.606.389.499,00	3.606.389.499,00	-	-
23	BPKAD	66.136.103.700,00	66.136.103.700,00	-	-
24	Bapenda	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	-	-
25	BKD	-	-	-	-
26	Inspektorat	3.809.000.000,00	3.809.000.000,00	-	-
27	Kec. Moga	2.712.750.000,00	2.712.750.000,00	-	-
28	Kec. Pulosari	113.100.000,00	113.100.000,00	-	-
29	Kec. Belik	673.750.000,00	673.750.000,00	-	-
30	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	83.600.000,00	-	-
31	Kec. Bodeh	292.400.000,00	292.400.000,00	-	-
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-
34	Kec. Pemalang	144.793.386.650,00	144.802.550.150,00	(9.163.500,00)	(0,01)
35	Kec. Taman	17.111.703.000,00	17.111.703.000,00	-	-
36	Kec. Petarukan	8.586.656.621,00	8.586.656.621,00	-	-
37	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	222.500.000,00	-	-
38	Kec. Comal	11.466.205.872,00	11.466.205.872,00	-	-
39	Kec. Ulujami	715.303.522,00	715.303.522,00	-	-
40	Kec. Warungpring	222.500.000,00	222.500.000,00	-	-
41	Bakesbangpol	-	-	-	-
Jumlah		**1.062.837.140.300,00**	**1.056.322.037.800,00**	**6.515.102.500,00**	**0,62**

Pada Tahun 2024 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp6.515.102.500,00 atau 0,62%. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp2.199.576.000,00, terdapat perbedaan sebesar Rp4.315.526.500,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp4.324.690.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp9.163.500,00.

Mutasi penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2024 sebesar Rp4.324.690.000,00 antara lain terdiri dari:

- Koreksi Pencatatan dan/atau Hibah sebesar Rp4.324.690.000,00 adalah koreksi atas tanah yang belum dicatat, yaitu pada:
  - Disperkim sebesar Rp39.690.000,00 berupa tanah kosong di Perumahan Griya Sidomukti di Kec. Taman;
  - Dishub sebesar Rp4.285.000.000,00 berupa 2 bidang tanah untuk kawasan pelabuhan di Kec. Pemalang.

Mutasi pengurangan Aset Tetap Tanah tahun 2024 sebesar Rp9.163.500,00 terdiri dari:

- Penghapusan Aset sebesar Rp9.163.500,00 yaitu pada Kec. Pemalang (Kel. Paduraksa) karena terkena proyek jalan tol:

Ringkasan penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2024	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2024	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	0,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	4.324.690.000,00	
		4.324.690.000,00
Kurang :		
- Penghapusan Aset	9.163.500,00	
- Reklas ke Properti Investasi	0,00	
		9.163.500,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		4.315.526.500,00
Belanja Modal Tanah		2.199.576.000,00
Penambahan Aset Tetap TA. 2024		6.515.102.500,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah TA 2024 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.188
Akumulasi Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2024

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2023	MUTASI ASET TETAP - TANAH 2024													Saldo Per 31-Des-2024
				MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
			BM 2024	Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	=9+10+11+12+13+14+	17=3+8-16
1	Dindikbud	104.082.091.079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.082.091.079,00
2	Dinkes	68.212.799.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.212.799.000,00
3	DPUTR	422.825.478.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.825.478.308,00
4	Disperkim	17.886.323.800,00	2.199.576.000,00	-	-	39.690.000,00	39.690.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.125.589.800,00
5	Satpol PP	892.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892.500.000,00
6	BPBD	5.002.510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.002.510.000,00
7	Dinsos KBPP	1.340.620.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.340.620.050,00
8	Disnaker	3.570.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.570.800.000,00
9	DLH	9.291.789.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.291.789.500,00
10	Disdukcatpil	1.963.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963.000.000,00
11	Dinpermasdes	806.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806.400.000,00
12	Dishub	8.002.372.288,00	-	-	-	4.285.000.000,00	4.285.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.287.372.288,00
13	Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Diskoperindag	65.099.950.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.099.950.200,00
15	DPMPTSP	1.143.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143.000.000,00
16	Dinpusarda	1.810.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.810.500.000,00
17	Disperik	4.018.481.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.018.481.000,00
18	Disparpora	37.099.763.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.099.763.179,00
19	Dispertan	26.388.813.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.388.813.000,00
20	Setda	3.980.326.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.980.326.000,00
21	Setw an	10.075.008.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.075.008.032,00
22	Bappeda	3.606.389.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.606.389.499,00
23	BPKAD	66.136.103.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.136.103.700,00
24	Bapenda	1.575.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000.000,00
25	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektora	3.809.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.809.000.000,00
27	Kec. Moga	2.712.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.712.750.000,00
28	Kec. Pulosari	113.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.100.000,00
29	Kec. Belik	673.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673.750.000,00
30	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.600.000,00
31	Kec. Bodeh	292.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.400.000,00
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	700.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00
34	Kec. Pemalang	144.802.550.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.163.500,00	-	9.163.500,00	144.793.386.650,00
35	Kec. Taman	17.111.703.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.111.703.000,00
36	Kec. Petarukan	8.586.656.621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.586.656.621,00
37	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.500.000,00
38	Kec. Comal	11.466.205.872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.466.205.872,00
39	Kec. Ulujami	715.303.522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.303.522,00
40	Kec. Warungpring	222.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.500.000,00
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.056.322.037.800,00	2.199.576.000,00	-	-	4.324.690.000,00	4.324.690.000,00	-		-	-	-	9.163.500,00	-	9.163.500,00	1.062.837.140.300,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp893.532.685.419,70 dan Rp834.387.411.113,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.189
Saldo Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

No	OPD	Aset Tetap Peralatan dan Mesin		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Dindikbud	234.504.252.311,00	215.799.503.193,00	18.704.749.118,00	8,67
2	Dinkes	362.480.403.800,00	324.389.715.188,00	38.090.688.612,00	11,74
3	DPUTR	21.375.628.621,00	23.238.786.621,00	(1.863.158.000,00)	(8,02)
4	Disperkim	5.261.327.445,00	5.569.361.445,00	(308.034.000,00)	(5,53)
5	Satpol PP	7.105.799.975,00	7.186.045.025,00	(80.245.050,00)	(1,12)
6	BPBD	6.888.959.648,00	6.782.310.248,00	106.649.400,00	1,57
7	Dinsos KBPP	11.964.637.448,00	12.567.070.988,00	(602.433.540,00)	(4,79)
8	Disnaker	7.557.089.415,00	6.099.120.915,00	1.457.968.500,00	23,90
9	DLH	25.487.811.239,00	25.058.118.053,00	429.693.186,00	1,71
10	Disdukcatpil	11.384.882.299,00	11.501.837.299,00	(116.955.000,00)	(1,02)
11	Dinpermasdes	4.398.455.480,00	4.369.655.480,00	28.800.000,00	0,66
12	Dishub	17.798.920.924,00	17.471.511.337,00	327.409.587,00	1,87
13	Diskominfo	15.468.614.944,00	15.172.735.380,00	295.879.564,00	1,95
14	Diskoperindag	9.286.642.779,00	9.114.301.379,00	172.341.400,00	1,89
15	DPMPTSP	4.103.542.712,00	4.101.642.712,00	1.900.000,00	0,05
16	Dinpusarda	4.926.279.735,00	4.915.347.843,00	10.931.892,00	0,22
17	Disperik	6.065.358.968,00	5.694.356.593,00	371.002.375,00	6,52
18	Disparpora	8.721.635.365,00	8.597.205.415,00	124.429.950,00	1,45
19	Dispertan	11.331.365.131,00	10.939.161.131,00	392.204.000,00	3,59
20	Setda	34.533.108.248,70	33.850.073.214,00	683.035.034,70	2,02
21	Setwan	14.716.088.864,00	16.178.240.864,00	(1.462.152.000,00)	(9,04)
22	Bappeda	5.806.776.285,00	5.442.427.967,00	364.348.318,00	6,69
23	BPKAD	20.164.356.756,00	20.724.825.581,00	(560.468.825,00)	(2,70)
24	Bapenda	7.219.738.927,00	6.670.045.787,00	549.693.140,00	8,24
25	BKD	6.004.988.792,00	5.692.008.832,00	312.979.960,00	5,50
26	Inspektorat	5.008.077.591,00	3.933.613.556,00	1.074.464.035,00	27,31
27	Kec. Moga	1.294.575.901,00	1.249.189.901,00	45.386.000,00	3,63
28	Kec. Pulosari	1.056.037.851,00	1.056.037.851,00	-	-
29	Kec. Belik	1.349.579.580,00	1.338.104.580,00	11.475.000,00	0,86
30	Kec. Watukumpul	1.158.213.751,00	1.187.083.751,00	(28.870.000,00)	(2,43)
31	Kec. Bodeh	1.291.772.776,00	1.210.892.776,00	80.880.000,00	6,68
32	Kec. Bantarbolang	1.199.989.160,00	1.134.183.585,00	65.805.575,00	5,80
33	Kec. Randudongkal	1.060.090.001,00	1.027.767.001,00	32.323.000,00	3,14
34	Kec. Pemalang	3.928.755.314,00	3.799.996.439,00	128.758.875,00	3,39
35	Kec. Taman	2.287.751.925,00	2.243.431.925,00	44.320.000,00	1,98
36	Kec. Petarukan	1.509.308.403,00	1.509.308.403,00	-	-
37	Kec. Ampelgading	1.223.545.651,00	1.204.045.651,00	19.500.000,00	1,62
38	Kec. Comal	1.566.163.903,00	1.469.016.903,00	97.147.000,00	6,61
39	Kec. Ulujami	1.324.569.967,00	1.292.315.367,00	32.254.600,00	2,50
40	Kec. Warungpring	1.148.283.711,00	1.078.211.111,00	70.072.600,00	6,50
41	Bakesbangpol	2.569.303.823,00	2.528.803.823,00	40.500.000,00	1,60
Jumlah		**893.532.685.419,70**	**834.387.411.113,00**	**59.145.274.306,70**	**7,09**

Pada tahun 2024 terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp59.145.274.306,70 atau 7,09%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp68.867.746.899,00, terdapat perbedaan sebesar Rp9.722.472.592,30, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp2.270.199.524,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp11.992.672.116,30.

Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp2.270.199.524,00 antara lain terdiri dari:

- Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp3.191.250,00 pada Dishub berupa reklas di Gedung dan Bangunan (Pos Jaga Perlintasan KA) berupa mebel pada Pos Jaga tersebut;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp2.227.008.274,00;
- Koreksi Pencatatan dan/atau Hibah sebesar Rp40.000,00 adalah koreksi atas aset berupa kendaraan dinas pada Dishub yang belum tercatat.

Mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp11.992.672.116,30 terdiri dari:

- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp3.046.687.705,00 berupa peralatan kantor, mebel, dan alat kesehatan yang nilai satuannya di bawah batas kapitalisasi. Dari aset yang tidak memenuhi kapitalisasi berasal dari:
  - Dana BOS sebesar Rp1.233.227.815,00;
  - Dana BLUD sebesar Rp47.394.349,00; dan
  - SP2D sebesar Rp1.766.065.541,00.
- Mutasi keluar antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp2.227.008.274,00 berupa kendaraan dinas dan peralatan kerja;
- Penghapusan sebesar Rp4.517.765.499,30 yaitu pada:
  - Dindikbud sebesar Rp16.500.000,00 berupa 4 sepeda motor;
  - DPU sebesar Rp2.233.990.000,00 berupa 1 sepeda motor dan 4 alat berat;
  - Disperkim sebesar Rp35.000.000,00 berupa 1 mobil pick up;
  - Satpol PP sebesar Rp115.500.000,00 berupa 1 mobil;
  - Dinsos KBPP sebesar Rp732.615.000,00 berupa 3 mobil dan 2 sepeda motor;
  - Disnaker sebesar Rp70.000.000,00 berupa 6 sepeda motor;
  - Disdukcatpil sebesar Rp126.915.000,00 berupa 1 mobil dan 2 sepeda motor;
  - Dishub sebesar Rp170.000.000,00 berupa 3 mobil;
  - Dispertan sebesar Rp77.330.000,00 berupa 1 mobil dan 12 sepeda motor;
  - Setda sebesar Rp432.453.499,30 berupa 2 mobil dan 1 sepeda motor;
  - BPKAD sebesar Rp443.918.000,00 berupa 1 bus, 1 mobil, dan 1 sepeda motor;
  - Bapenda sebesar Rp14.500.000,00 berupa 2 sepeda motor;
  - BKD sebesar Rp19.000.000,00 berupa 3 sepeda motor;
  - Kec. Watukumpul sebesar Rp3.300.000,00 berupa 1 sepeda motor;
  - Kec. Bantarbolang sebesar Rp14.044.000,00 berupa 1 sepeda motor;
  - Kec. Pemalang sebesar Rp13.000.000,00 berupa 1 sepeda motor.
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp2.201.210.638,00, terdiri dari:

  Reklas ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp85.495.000,00, yaitu pada:
  - Dinkes sebesar Rp85.495.000,00 berupa *software* SIMPUS di Puskesmas Warungpring;

  Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp2.115.715.638,00, yaitu pada:
  - Dinkes sebesar Rp22.718.972,00 berupa peralatan kantor, mebel, dan alat kedokteran dengan kondisi rusak berat, terdiri dari:
    - RSUD dr. M. Ashari sebesar Rp15.967.870,00 berupa alat kantor dan mebel;
    - Puskesmas Cikadu sebesar Rp6.751.102,00 berupa 4 buah alat kedokteran;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Setda sebesar Rp413.066.666,00 berupa 1 mobil yang akan dihapuskan; dan
- Setwan sebesar Rp1.679.930.000,00 berupa 3 mobil yang akan dihapuskan.

Ringkasan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2024	2.227.008.274,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2024	2.227.008.274,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	3.191.250,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	40.000.000,00	
		43.191.250,00
Kurang :		
- Reklas sesama Aset	0,00	
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	0,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	3.046.687.705,00	
- Koreksi pencatatan Aset	0,00	
- Penghapusan	4.517.765.499,30	
- Reklas ke Aset Lain-lain	2.201.210.638,00	
		9.765.663.842,30
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		(9.722.472.592,30)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		68.867.746.899,00
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2024		59.145.274.306,70

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.190

Akumulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2023	MUTASI ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN 2024													Saldo Per 31-Des-2024
			BM 2024	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	215.799.503.193,00	21.492.002.439,00	-	-	-	-	-	-	2.770.753.321,00	-	-	16.500.000,00	-	2.787.253.321,00	234.504.252.311,00
2	Dinkes	324.389.715.188,00	38.260.286.933,00	-	-	-	-	-	-	61.384.349,00	-	-	-	108.213.972,00	169.598.321,00	362.480.403.800,00
3	DPUTR	23.238.786.621,00	355.212.000,00	-	15.620.000,00	-	15.620.000,00	-	-	-	-	-	2.233.990.000,00	-	2.233.990.000,00	21.375.628.621,00
4	Disperkim	5.569.361.445,00	13.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	286.354.000,00	-	35.000.000,00	-	321.354.000,00	5.261.327.445,00
5	Satpol PP	7.186.045.025,00	36.254.950,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	115.500.000,00	-	116.500.000,00	7.105.799.975,00
6	BPBD	6.782.310.248,00	106.649.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.888.959.648,00
7	Dinsos KBPP	12.567.070.988,00	193.258.460,00	-	-	-	-	-	-	-	63.077.000,00	-	732.615.000,00	-	795.692.000,00	11.964.637.448,00
8	Disnaker	6.099.120.915,00	1.554.261.220,00	-	-	-	-	-	-	26.292.720,00	-	-	70.000.000,00	-	96.292.720,00	7.557.089.415,00
9	DLH	25.058.118.053,00	436.420.736,00	-	-	-	-	-	-	6.727.550,00	-	-	-	-	6.727.550,00	25.487.811.239,00
10	Disdukcatpil	11.501.837.299,00	9.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.915.000,00	-	126.915.000,00	11.384.882.299,00
11	Dinpermasdes	4.369.655.480,00	28.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.398.455.480,00
12	Dishub	17.471.511.337,00	277.338.337,00	3.191.250,00	180.000.000,00	40.000.000,00	223.191.250,00	-	-	3.120.000,00	-	-	170.000.000,00	-	173.120.000,00	17.798.920.924,00
13	Diskominfo	15.172.735.380,00	275.670.039,00	-	20.209.525,00	-	20.209.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.468.614.944,00
14	Diskoperindag	9.114.301.379,00	172.341.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.286.642.779,00
15	DPMPTSP	4.101.642.712,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.103.542.712,00
16	Dinpusarda	4.915.347.843,00	10.931.892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.926.279.735,00
17	Disperik	5.694.356.593,00	390.278.875,00	-	31.304.000,00	-	31.304.000,00	-	-	50.580.500,00	-	-	-	-	50.580.500,00	6.065.358.968,00
18	Disparpora	8.597.205.415,00	124.429.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.721.635.365,00
19	Dispertan	10.939.161.131,00	483.161.000,00	-	15.873.000,00	-	15.873.000,00	-	-	29.500.000,00	-	-	77.330.000,00	-	106.830.000,00	11.331.365.131,00
20	Setda	33.850.073.214,00	869.550.740,00	-	758.914.000,00	-	758.914.000,00	-	-	85.796.540,00	14.113.000,00	-	432.453.499,30	413.066.666,00	945.429.705,30	34.533.108.248,70
21	Setwan	16.178.240.864,00	217.778.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.679.930.000,00	1.679.930.000,00	14.716.088.864,00
22	Bappeda	5.442.427.967,00	350.238.793,00	-	20.209.525,00	-	20.209.525,00	-	-	6.100.000,00	-	-	-	-	6.100.000,00	5.806.776.285,00
23	BPKAD	20.724.825.581,00	914.510.250,00	-	65.870.000,00	-	65.870.000,00	-	-	595.500,00	1.096.335.575,00	-	443.918.000,00	-	1.540.849.075,00	20.164.356.756,00
24	Bapenda	6.670.045.787,00	269.479.000,00	-	586.004.182,00	-	586.004.182,00	-	-	-	291.290.042,00	-	14.500.000,00	-	305.790.042,00	7.219.738.927,00
25	BKD	5.692.008.832,00	134.529.960,00	-	197.450.000,00	-	197.450.000,00	-	-	-	-	-	19.000.000,00	-	19.000.000,00	6.004.988.792,00
26	Inspektora	3.933.613.556,00	1.233.142.650,00	-	291.290.042,00	-	291.290.042,00	-	-	-	449.968.657,00	-	-	-	449.968.657,00	5.008.077.591,00
27	Kec. Moga	1.249.189.901,00	45.386.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294.575.901,00
28	Kec. Pulosari	1.056.037.851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056.037.851,00
29	Kec. Belik	1.338.104.580,00	11.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.349.579.580,00
30	Kec. Watukumpul	1.187.083.751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.870.000,00	-	3.000.000,00	-	28.870.000,00	1.158.213.751,00
31	Kec. Bodeh	1.210.892.776,00	80.880.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.291.772.776,00
32	Kec. Bantarbolang	1.134.183.585,00	70.573.800,00	-	14.113.000,00	-	14.113.000,00	-	-	4.837.225,00	-	-	14.044.000,00	-	18.881.225,00	1.199.989.160,00
33	Kec. Randudongkal	1.027.767.001,00	32.323.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060.090.001,00
34	Kec. Pemalang	3.799.996.439,00	125.858.875,00	-	15.900.000,00	-	15.900.000,00	-	-	-	-	-	13.000.000,00	-	13.000.000,00	3.928.755.314,00
35	Kec. Taman	2.243.431.925,00	44.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287.751.925,00
36	Kec. Petarukan	1.509.308.403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.509.308.403,00
37	Kec. Ampelgading	1.204.045.651,00	19.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.223.545.651,00
38	Kec. Comal	1.469.016.903,00	97.147.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.566.163.903,00
39	Kec. Ulujami	1.292.315.367,00	32.254.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.324.569.967,00
40	Kec. Warungpring	1.078.211.111,00	55.821.600,00	-	14.251.000,00	-	14.251.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.148.283.711,00
41	Bakesbangpol	2.528.803.823,00	40.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.569.303.823,00
	JUMLAH	834.387.411.113,00	68.867.746.899,00	3.191.250,00	2.227.008.274,00	40.000.000,00	2.270.199.524,00	-	-	3.046.687.705,00	2.227.008.274,00	-	4.517.765.499,30	2.201.210.638,00	11.992.672.116,30	893.532.685.419,70

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.695.019.049.552,00 dan Rp1.646.798.445.866,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.191
Saldo Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

No	OPD	Aset Tetap Gedung dan Bangunan		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Dindikbud	857.574.354.816,00	818.602.654.932,00	38.971.699.884,00	4,76
2	Dinkes	183.900.602.113,00	182.430.470.407,00	1.470.131.706,00	0,81
3	DPUTR	21.282.732.562,00	21.282.732.562,00	-	-
4	Disperkim	43.402.002.124,00	41.533.165.706,00	1.868.836.418,00	4,50
5	Satpol PP	756.590.000,00	756.590.000,00	-	-
6	BPBD	1.564.867.000,00	1.564.867.000,00	-	-
7	Dinsos KBPP	4.584.818.000,00	3.062.656.000,00	1.522.162.000,00	49,70
8	Disnaker	8.862.437.232,00	8.862.437.232,00	-	-
9	DLH	5.078.321.896,00	5.078.321.896,00	-	-
10	Disdukcatpil	2.050.879.586,00	2.050.879.586,00	-	-
11	Dinpermasdes	1.734.444.646,00	1.734.444.646,00	-	-
12	Dishub	13.130.122.810,00	13.039.108.864,00	91.013.946,00	0,70
13	Diskominfo	4.570.615.434,00	4.666.188.569,00	(95.573.135,00)	(2,05)
14	Diskoperindag	235.982.560.411,00	237.216.976.687,00	(1.234.416.276,00)	(0,52)
15	DPMPTSP	2.582.948.897,00	2.198.475.333,00	384.473.564,00	17,49
16	Dinpusarda	4.284.356.320,00	1.418.322.000,00	2.866.034.320,00	202,07
17	Disperik	12.037.698.646,00	11.132.742.016,00	904.956.630,00	8,13
18	Disparpora	82.450.462.136,00	81.871.785.642,00	578.676.494,00	0,71
19	Dispertan	24.790.319.234,00	24.790.319.234,00	-	-
20	Setda	22.726.983.000,00	22.726.983.000,00	-	-
21	Setwan	116.214.408.423,00	116.214.408.423,00	-	-
22	Bappeda	2.039.784.000,00	2.039.784.000,00	-	-
23	BPKAD	4.435.475.560,00	4.435.475.560,00	-	-
24	Bapenda	1.214.103.500,00	1.214.103.500,00	-	-
25	BKD	988.798.431,00	988.798.431,00	-	-
26	Inspektorat	1.233.839.562,00	1.004.804.562,00	229.035.000,00	22,79
27	Kec. Moga	959.050.900,00	959.050.900,00	-	-
28	Kec. Pulosari	1.862.715.000,00	1.862.715.000,00	-	-
29	Kec. Belik	1.537.790.476,00	1.537.790.476,00	-	-
30	Kec. Watukumpul	1.878.626.300,00	1.878.626.300,00	-	-
31	Kec. Bodeh	736.095.249,00	736.095.249,00	-	-
32	Kec. Bantarbolang	1.178.458.000,00	1.178.458.000,00	-	-
33	Kec. Randudongkal	1.576.455.400,00	1.576.455.400,00	-	-
34	Kec. Pemalang	9.437.995.774,00	8.869.995.774,00	568.000.000,00	6,40
35	Kec. Taman	3.037.763.900,00	3.037.763.900,00	-	-
36	Kec. Petarukan	2.591.406.079,00	2.591.406.079,00	-	-
37	Kec. Ampelgading	884.838.500,00	884.838.500,00	-	-
38	Kec. Comal	6.638.256.500,00	6.638.256.500,00	-	-
39	Kec. Ulujami	1.805.699.135,00	1.710.126.000,00	95.573.135,00	5,59
40	Kec. Warungpring	1.419.372.000,00	1.419.372.000,00	-	-
41	Bakesbangpol	-	-	-	-
Jumlah		**1.695.019.049.552,00**	**1.646.798.445.866,00**	**48.220.603.686,00**	**2,93**

Pada tahun 2024 terdapat penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp48.220.603.686,00 atau 2,93%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp47.292.557.157,00, terdapat perbedaan sebesar Rp928.046.529,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp6.621.718.003,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp5.693.671.474,00.

Mutasi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp6.621.718.003,00 antara lain terdiri dari:

- Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp581.755.400,00 berupa kapitalisasi dari belanja barang, terdiri dari:

https://jdih.pemalangkab.go.id

  - Dinsos KBPP sebesar Rp199.558.000,00 berupa rehab gudang Alkon;
  - Disparpora sebesar Rp183.252.400,00 berupa rehab lapangan tenis;
  - Inspektorat sebesar Rp198.945.000,00 berupa rehab gedung kantor;
- Mutasi Masuk Antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp663.573.135,00;
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah sebesar Rp5.376.389.468,00 terdiri dari:
  - Disperkim sebesar Rp1.868.836.418,00 hibah PSU dari pengembang perumahan berupa tempat ibadah, pos jaga, dan taman;
  - Diskoperindag sebesar Rp3.507.553.050,00 hibah bangunan di pasar dari Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Pemalang sebesar Rp1.185.150.000,00 dan Pemerintah Pusat sebesar Rp2.322.403.050,00 untuk Pasar Belik.

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp5.693.671.474,00 antara lain terdiri dari:
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp195.849.863,00 berupa:
  Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.191.250,00 yaitu pada:
  - Dishub sebesar Rp3.191.250,00 berupa mebel (meja dan kursi) pada Pos Jaga Perlintasan KA (JPL 146 – Desa Cibiyuk);

  Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp192.658.612,00 yaitu pada:
  - Dinkes sebesar Rp73.590.613,00 berupa DED Ruangan *Cathlab* di RSUD;
  - DPU sebesar Rp119.068.000,00 berupa pagar kantor;
- Tidak memenuhi kapitalisasi/masuk ke *extracomptable* atau berupa pemeliharaan sebesar Rp92.279.150,00 yaitu pada:
  - Dinkes sebesar Rp76.301.350,00 berupa pemeliharaan gedung puskemas Klareyan;
  - DLH sebesar Rp13.780.000,00 berupa jasa konsultan;
  - Dishub sebesar Rp2.197.800,00 berupa peralatan rumah tangga Pos Jaga Perlintasan KA dengan nilai bawah kapitalisasi;
- Mutasi keluar antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp663.573.135,00;
- Penghapusan Aset sebesar Rp4.741.969.326,00 pada Diskoperindag berupa penghapusan aset pasar Belik karena musibah kebakaran;

Ringkasan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2024	663.573.135,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2024	663.573.135,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	581.755.400,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	5.376.389.468,00	
		5.958.144.868,00
Kurang :		
- Reklas ke sesama Aset	195.849.863,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	92.279.150,00	
- Penghapusan Aset	4.741.969.326,00	
		5.030.098.339,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		928.046.529,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		47.292.557.157,00
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2024		48.220.603.686,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.192

Akumulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2023	MUTASI ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN 2024													Saldo Per 31-Des-2024
			BM 2024	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	818.602.654.932,00	38.971.699.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.574.354.816,00
2	Dinkes	182.430.470.407,00	1.620.023.669,00	-	-	-	-	73.590.613,00	-	76.301.350,00	-	-	-	-	149.891.963,00	183.900.602.113,00
3	DPUTR	21.282.732.562,00	687.068.000,00	-	-	-	-	119.068.000,00	-	-	568.000.000,00	-	-	-	687.068.000,00	21.282.732.562,00
4	Disperkim	41.533.165.706,00	-	-	-	1.868.836.418,00	1.868.836.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	43.402.002.124,00
5	Satpol PP	756.590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.590.000,00
6	BPBD	1.564.867.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.564.867.000,00
7	Dinsos KBPP	3.062.656.000,00	1.322.604.000,00	199.558.000,00	-	-	199.558.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.584.818.000,00
8	Disnaker	8.862.437.232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.862.437.232,00
9	DLH	5.078.321.896,00	13.780.000,00	-	-	-	-	-	-	13.780.000,00	-	-	-	-	13.780.000,00	5.078.321.896,00
10	Disdukcatpil	2.050.879.586,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.050.879.586,00
11	Dinpermasdes	1.734.444.646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.734.444.646,00
12	Dishub	13.039.108.864,00	96.402.996,00	-	-	-	-	3.191.250,00	-	2.197.800,00	-	-	-	-	5.389.050,00	13.130.122.810,00
13	Diskominfo	4.666.188.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95.573.135,00	-	-	-	95.573.135,00	4.570.615.434,00
14	Diskoperindag	237.216.976.687,00	-	-	-	3.507.553.050,00	3.507.553.050,00	-	-	-	-	-	4.741.969.326,00	-	4.741.969.326,00	235.982.560.411,00
15	DPMPTSP	2.198.475.333,00	384.473.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.582.948.897,00
16	Dinpusarda	1.418.322.000,00	2.866.034.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.284.356.320,00
17	Disperik	11.132.742.016,00	904.956.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.037.698.646,00
18	Disparpora	81.871.785.642,00	395.424.094,00	183.252.400,00	-	-	183.252.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	82.450.462.136,00
19	Dispertan	24.790.319.234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.790.319.234,00
20	Setda	22.726.983.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.726.983.000,00
21	Setw an	116.214.408.423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.214.408.423,00
22	Bappeda	2.039.784.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.039.784.000,00
23	BPKAD	4.435.475.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.435.475.560,00
24	Bapenda	1.214.103.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214.103.500,00
25	BKD	988.798.431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988.798.431,00
26	Inspektora	1.004.804.562,00	30.090.000,00	198.945.000,00	-	-	198.945.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.233.839.562,00
27	Kec. Moga	959.050.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959.050.900,00
28	Kec. Pulosari	1.862.715.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.862.715.000,00
29	Kec. Belik	1.537.790.476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.537.790.476,00
30	Kec. Watukumpul	1.878.626.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.878.626.300,00
31	Kec. Bodeh	736.095.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736.095.249,00
32	Kec. Bantarbolang	1.178.458.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.178.458.000,00
33	Kec. Randudongkal	1.576.455.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.576.455.400,00
34	Kec. Pemalang	8.869.995.774,00	-	-	568.000.000,00	-	568.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.437.995.774,00
35	Kec. Taman	3.037.763.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.037.763.900,00
36	Kec. Petarukan	2.591.406.079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.591.406.079,00
37	Kec. Ampelgading	884.838.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884.838.500,00
38	Kec. Comal	6.638.256.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.638.256.500,00
39	Kec. Ulujami	1.710.126.000,00	-	-	95.573.135,00	-	95.573.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.805.699.135,00
40	Kec. Warungpring	1.419.372.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.419.372.000,00
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1.646.798.445.866,00	47.292.557.157,00	581.755.400,00	663.573.135,00	5.376.389.468,00	6.621.718.003,00	195.849.863,00	-	92.279.150,00	663.573.135,00	-	4.741.969.326,00	-	5.693.671.474,00	1.695.019.049.552,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.314.651.315.232,00 dan Rp1.260.572.489.829,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.193
Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dan 2023

No	OPD	Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Dindikbud	5.568.257.487,00	5.568.257.487,00	-	-
2	Dinkes	20.481.496.330,00	14.571.496.330,00	5.910.000.000,00	40,56
3	DPUTR	1.141.959.421.462,00	1.104.228.937.416,00	37.730.484.046,00	3,42
4	Disperkim	97.089.389.776,00	86.860.356.244,00	10.229.033.532,00	11,78
5	Satpol PP	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	72.806.000,00	72.806.000,00	-	-
8	Disnaker	197.657.800,00	197.657.800,00	-	-
9	DLH	6.601.048.425,00	6.601.048.425,00	-	-
10	Disdukcatpil	319.977.750,00	319.977.750,00	-	-
11	Dinpermasdes	52.189.000,00	52.189.000,00	-	-
12	Dishub	3.314.659.000,00	3.314.659.000,00	-	-
13	Diskominfo	284.286.230,00	284.286.230,00	-	-
14	Diskoperindag	2.104.507.329,00	2.104.507.329,00	-	-
15	DPMPTSP	122.907.650,00	122.907.650,00	-	-
16	Dinpusarda	33.896.290,00	33.896.290,00	-	-
17	Disperik	3.184.803.045,00	3.184.803.045,00	-	-
18	Disparpora	12.140.813.093,00	12.140.813.093,00	-	-
19	Dispertan	1.506.876.500,00	1.506.876.500,00	-	-
20	Setda	831.895.500,00	831.895.500,00	-	-
21	Setwan	294.856.125,00	294.856.125,00	-	-
22	Bappeda	101.320.700,00	101.320.700,00	-	-
23	BPKAD	240.405.000,00	240.405.000,00	-	-
24	Bapenda	74.168.100,00	74.168.100,00	-	-
25	BKD	208.412.000,00	208.412.000,00	-	-
26	Inspektorat	-	-	-	-
27	Kec. Moga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
28	Kec. Pulosari	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
29	Kec. Belik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
30	Kec. Watukumpul	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	500.000,00	500.000,00	-	-
33	Kec. Randudongkal	102.988.000,00	102.988.000,00	-	-
34	Kec. Pemalang	12.014.455.576,00	11.805.147.751,00	209.307.825,00	1,77
35	Kec. Taman	3.082.958.123,00	3.082.958.123,00	-	-
36	Kec. Petarukan	1.792.832.341,00	1.792.832.341,00	-	-
37	Kec. Ampelgading	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
38	Kec. Comal	845.580.600,00	845.580.600,00	-	-
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
40	Kec. Warungpring	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-
41	Bakesbangpol	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
Jumlah		**1.314.651.315.232,00**	**1.260.572.489.829,00**	**54.078.825.403,00**	**4,29**

Pada tahun 2024 terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp54.078.825.403,00 atau 4,29%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp41.979.833.338,00, terdapat perbedaan sebesar Rp12.098.992.065,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp12.493.998.877,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp395.006.812,00.

Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp12.493.998.877,00 antara lain terdiri dari:

- Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp5.661.619.010,00 berupa kapitalisasi dari belanja pemeliharaan, yaitu pada:
  - DPU sebesar Rp5.661.619.010,00 berupa rekonstruksi jalan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah sebesar Rp6.832.379.867,00 yaitu pada:
  - Disperkim sebesar Rp6.832.379.867,00 hibah PSU dari pengembang perumahan berupa jalan lingkungan sebesar Rp6.109.754.742,00 dan saluran drainase sebesar Rp722.625.125,00;

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp395.006.812,00 antara lain terdiri dari:

- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke *Extracomptable* dan menjadi pemeliharaan sebesar Rp395.006.812,00 yaitu pada:
  - Disperkim sebesar Rp7.604.167,00 berupa pemeliharaan jalan lingkungan;
  - DLH sebesar Rp199.778.000,00 berupa pengurugan;
  - Dishub sebesar Rp187.624.645,00 berupa pengaspalan terminal;

Ringkasan penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2024	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2024	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	5.661.619.010,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	6.832.379.867,00	
		12.493.998.877,00
Kurang :		
- Reklas Aset	0,00	
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	0,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	395.006.812,00	
- Koreksi Pencatatan Aset	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lainya/Persediaan/Properti Investasi	0,00	
		395.006.812,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		12.098.992.065,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		41.979.833.338,00
Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA. 2024		54.078.825.403,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.194

Akumulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2023	MUTASI ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 2024													Saldo Per 31-Des-2024
				MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
			BM 2024	Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	5.568.257.487,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.568.257.487,00
2	Dinkes	14.571.496.330,00	5.910.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.481.496.330,00
3	DPUTR	1.104.228.937.416,00	32.068.865.036,00	5.661.619.010,00	-	-	5.661.619.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.141.959.421.462,00
4	Disperkim	86.860.356.244,00	3.404.257.832,00	-	-	6.832.379.867,00	6.832.379.867,00	-	-	7.604.167,00	-	-	-	-	7.604.167,00	97.089.389.776,00
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	72.806.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.806.000,00
8	Disnaker	197.657.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.657.800,00
9	DLH	6.601.048.425,00	199.778.000,00	-	-	-	-	-	-	199.778.000,00	-	-	-	-	199.778.000,00	6.601.048.425,00
10	Disdukcatpil	319.977.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.977.750,00
11	Dinpermasdes	52.189.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.189.000,00
12	Dishub	3.314.659.000,00	187.624.645,00	-	-	-	-	-	-	187.624.645,00	-	-	-	-	187.624.645,00	3.314.659.000,00
13	Diskominfo	284.286.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.286.230,00
14	Diskoperindag	2.104.507.329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.104.507.329,00
15	DPMPTSP	122.907.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.907.650,00
16	Dinpusarda	33.896.290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.896.290,00
17	Disperik	3.184.803.045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.184.803.045,00
18	Disparpora	12.140.813.093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.140.813.093,00
19	Dispertan	1.506.876.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.506.876.500,00
20	Setda	831.895.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831.895.500,00
21	Setwan	294.856.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.856.125,00
22	Bappeda	101.320.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.320.700,00
23	BPKAD	240.405.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.405.000,00
24	Bapenda	74.168.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.168.100,00
25	BKD	208.412.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.412.000,00
26	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kec. Moga	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
28	Kec. Pulosari	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00
29	Kec. Belik	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
30	Kec. Watukumpul	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
33	Kec. Randudongkal	102.988.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.988.000,00
34	Kec. Pemalang	11.805.147.751,00	209.307.825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.014.455.576,00
35	Kec. Taman	3.082.958.123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.082.958.123,00
36	Kec. Petarukan	1.792.832.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.792.832.341,00
37	Kec. Ampelgading	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
38	Kec. Comal	845.580.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845.580.600,00
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
40	Kec. Warungpring	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450.000,00
41	Bakesbangpol	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00
	JUMLAH	1.260.572.489.829,00	41.979.833.338,00	5.661.619.010,00	-	6.832.379.867,00	12.493.998.877,00	-	-	395.006.812,00	-	-	-	-	395.006.812,00	1.314.651.315.232,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp205.864.427.068,00 dan Rp188.409.775.887,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.195
Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

No	OPD	Aset Tetap Lainnya		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Dindikbud	201.923.983.647,00	184.670.382.948,00	17.253.600.699,00	9,34
2	Dinkes	192.260.980,00	192.260.980,00	-	-
3	DPUTR	199.944.760,00	199.944.760,00	-	-
4	Disperkim	21.619.500,00	21.619.500,00	-	-
5	Satpol PP	232.000.000,00	232.000.000,00	-	-
6	BPBD	9.969.300,00	9.969.300,00	-	-
7	Dinsos KBPP	7.715.000,00	7.715.000,00	-	-
8	Disnaker	8.647.500,00	8.647.500,00	-	-
9	DLH	11.416.000,00	11.416.000,00	-	-
10	Disdukcatpil	37.765.915,00	37.765.915,00	-	-
11	Dinpermasdes	-	-	-	-
12	Dishub	2.271.900,00	2.271.900,00	-	-
13	Diskominfo	9.536.000,00	9.536.000,00	-	-
14	Diskoperindag	17.952.200,00	17.952.200,00	-	-
15	DPMPTSP	37.565.000,00	37.565.000,00	-	-
16	Dinpusarda	1.631.602.200,00	1.487.184.540,00	144.417.660,00	9,71
17	Disperik	62.603.322,00	17.353.000,00	45.250.322,00	260,76
18	Disparpora	43.208.500,00	43.208.500,00	-	-
19	Dispertan	47.027.480,00	47.027.480,00	-	-
20	Setda	574.400.394,00	569.151.394,00	5.249.000,00	0,92
21	Setwan	417.273.170,00	411.139.670,00	6.133.500,00	1,49
22	Bappeda	94.630.900,00	94.630.900,00	-	-
23	BPKAD	73.182.900,00	73.182.900,00	-	-
24	Bapenda	1.734.500,00	1.734.500,00	-	-
25	BKD	40.330.000,00	40.330.000,00	-	-
26	Inspektorat	9.451.000,00	9.451.000,00	-	-
27	Kec. Moga	107.500,00	107.500,00	-	-
28	Kec. Pulosari	-	-	-	-
29	Kec. Belik	10.000,00	10.000,00	-	-
30	Kec. Watukumpul	30.000,00	30.000,00	-	-
31	Kec. Bodeh	6.030.000,00	6.030.000,00	-	-
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	65.000,00	65.000,00	-	-
34	Kec. Pemalang	68.854.250,00	68.854.250,00	-	-
35	Kec. Taman	20.557.500,00	20.557.500,00	-	-
36	Kec. Petarukan	38.455.250,00	38.455.250,00	-	-
37	Kec. Ampelgading	650.000,00	650.000,00	-	-
38	Kec. Comal	17.442.500,00	17.442.500,00	-	-
39	Kec. Ulujami	3.535.000,00	3.535.000,00	-	-
40	Kec. Warungpring	98.000,00	98.000,00	-	-
41	Bakesbangpol	500.000,00	500.000,00	-	-
Jumlah		**205.864.427.068,00**	**188.409.775.887,00**	**17.454.651.181,00**	**9,26**

Pada tahun 2024 terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.454.651.181,00 atau 9,26%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp17.866.133.555,00, terdapat perbedaan sebesar Rp411.482.374,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp45.250.322,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp456.732.696,00.

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp45.250.322,00 yaitu:

- Kapitalisasi Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp45.250.322,00 berupa kapitalisasi dari belanja persediaan, yaitu pada:
  - Disperik sebesar Rp45.250.322,00 berupa indukan ikan pada Unit Budidaya Ikan Air Tawar (UBIAT);

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp456.732.696,00 yaitu:

- Tidak memenuhi Kapitalisasi/ke *Extracomptable* sebesar Rp456.732.696,00 yaitu pada:
  - Dindikbud sebesar Rp409.087.696,00 berasal dari Dana BOS berupa buku elektronik, peralatan olahraga, bendera pataka, dll;
  - Setda sebesar Rp47.645.000,00 berupa lukisan dan bunga.

Ringkasan penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2024	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2024	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	45.250.322,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	0,00	
		45.250.322,00
Kurang :		
- Reklas Aset	0,00	
- Diserahkan ke pihak lain/hibah	0,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	456.732.696,00	
- Reklas ke Aset Lainya/~~Persediaan/Properti Investasi~~	0,00	
		456.732.696,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		(411.482.374,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		17.866.133.555,00
Penambahan Aset Tetap Lainnya TA. 2024		17.454.651.181,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya TA 2024 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.196

Akumulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2024

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2023	MUTASI ASET TETAP - LAINNYA 2024													Saldo Per 31-Des-2024
			BM 2024	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	184.670.382.948,00	17.662.688.395,00	-	-	-	-	-	-	409.087.696,00	-	-	-	-	409.087.696,00	201.923.983.647,00
2	Dinkes	192.260.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.260.980,00
3	DPUTR	199.944.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.944.760,00
4	Disperkim	21.619.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.619.500,00
5	Satpol PP	232.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.000.000,00
6	BPBD	9.969.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.969.300,00
7	Dinsos KBPP	7.715.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.715.000,00
8	Disnaker	8.647.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.647.500,00
9	DLH	11.416.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.416.000,00
10	Disdukcatpil	37.765.915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.765.915,00
11	Dinpermasdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dishub	2.271.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.271.900,00
13	Diskominfo	9.536.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.536.000,00
14	Diskoperindag	17.952.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.952.200,00
15	DPMPTSP	37.565.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.565.000,00
16	Dinpusarda	1.487.184.540,00	144.417.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.631.602.200,00
17	Disperik	17.353.000,00	-	45.250.322,00	-	-	45.250.322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	62.603.322,00
18	Disparpora	43.208.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.208.500,00
19	Dispertan	47.027.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.027.480,00
20	Setda	569.151.394,00	52.894.000,00	-	-	-	-	-	-	47.645.000,00	-	-	-	-	47.645.000,00	574.400.394,00
21	Setwan	411.139.670,00	6.133.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.273.170,00
22	Bappeda	94.630.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.630.900,00
23	BPKAD	73.182.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.182.900,00
24	Bapenda	1.734.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.734.500,00
25	BKD	40.330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.330.000,00
26	Inspektora	9.451.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.451.000,00
27	Kec. Moga	107.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.500,00
28	Kec. Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kec. Belik	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
30	Kec. Watukumpul	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
31	Kec. Bodeh	6.030.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.030.000,00
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000,00
34	Kec. Pemalang	68.854.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.854.250,00
35	Kec. Taman	20.557.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.557.500,00
36	Kec. Petarukan	38.455.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.455.250,00
37	Kec. Ampelgading	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,00
38	Kec. Comal	17.442.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.442.500,00
39	Kec. Ulujami	3.535.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.535.000,00
40	Kec. Warungpring	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.000,00
41	Bakesbangpol	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
	JUMLAH	188.409.775.887,00	17.866.133.555,00	45.250.322,00	-	-	45.250.322,00	-	-	456.732.696,00	-	-	-	-	456.732.696,00	205.864.427.068,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp73.208.758.604,00 dan Rp73.016.099.991,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.197
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024 dan 2023

No	OPD	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Dindikbud	2.362.017.589,00	2.362.017.589,00	-	-
2	Dinkes	1.046.886.749,00	973.296.136,00	73.590.613,00	7,56
3	DPU TR	61.674.700.523,00	61.555.632.523,00	119.068.000,00	0,19
4	Disperkim	359.547.793,00	359.547.793,00	-	-
5	Dinsos KBPP	101.042.000,00	101.042.000,00	-	-
6	Disnaker	42.548.000,00	42.548.000,00	-	-
7	Dishub	100.765.000,00	100.765.000,00	-	-
8	Diskoperindag	1.383.825.800,00	1.383.825.800,00	-	-
9	Dinpusarda	95.865.000,00	95.865.000,00	-	-
10	Disparpora	6.041.560.150,00	6.041.560.150,00	-	-
Jumlah		**73.208.758.604,00**	**73.016.099.991,00**	**192.658.613,00**	**0,26**

Pada tahun 2024 terdapat penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp192.658.613,00 atau 0,26% hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp192.658.613,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp0,00.

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 sebesar Rp192.658.613,00 yaitu:

- Reklas dari sesama Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp192.658.613,00 yaitu:
  Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp192.658.613,00 yaitu pada:
  - Dinkes sebesar Rp73.590.613,00 berupa DED Ruangan *Cathlab* pada RSUD;
  - DPU sebesar Rp119.068.000,00 berupa pagar kantor.

Ringkasan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2024	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2024	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	192.658.613,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	0,00	
		192.658.613,00
Kurang :		
- Reklas ke sesama Aset Tetap	0,00	
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan	0,00	
		0,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		192.658.613,00
Belanja Modal KDP		0,00
Penambahan KDP TA. 2024		192.658.613,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024 dari seluruh OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.198
Akumulasi Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2023	MUTASI ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 2024													Saldo Per 31-Des-2024
			BM 2024	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	=9+10+11+12+13+14+	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	2.362.017.589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.362.017.589,00
2	Dinkes	973.296.136,00	-	73.590.613,00	-	-	73.590.613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.046.886.749,00
3	DPUTR	61.555.632.523,00	-	119.068.000,00	-	-	119.068.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61.674.700.523,00
4	Disperkim	359.547.793,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.547.793,00
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	101.042.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.042.000,00
8	Disnaker	42.548.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.548.000,00
9	DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Disdukcatpil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinpermasdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dishub	100.765.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.765.000,00
13	Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Diskoperindag	1.383.825.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383.825.800,00
15	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinpusarda	95.865.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.865.000,00
17	Disperik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Disparpora	6.041.560.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.041.560.150,00
19	Dispertan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Setda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Setda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bapenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kec. Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kec. Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kec. Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kec. Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kec. Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kec. Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kec. Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kec. Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kec. Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kec. Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kec. Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		73.016.099.991,00	-	192.658.613,00	-	-	192.658.613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	73.208.758.604,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Daftar Pekerjaan yang masih berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.199
Daftar Pekerjaan yang masih KDP TA 2024

NO	OPD	PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	% KEUANGAN	% FISIK
1	DINDIKBUD			**2.362.017.589,00**		
		Bangunan SMPN 4 Randudongkal	2012	75.191.876,00	100,00%	100,00%
		Bangunan SDN 3 Gunungjaya	2012	30.829.000,00	100,00%	100,00%
		Bangunan SDN 2 Bodas	2012	40.256.000,00	100,00%	100,00%
		Bangunan SMPN Satu Atap Tlagasana	2012	63.814.000,00	100,00%	100,00%
		Perencanaan APBD II PAUD Desa Tumbal	2013	9.000.000,00	100,00%	100,00%
		Perencanaan APBD II PAUD	2013	9.000.000,00	100,00%	100,00%
		Rehabilitasi DAK 2013 dan APBD II SMPN 4 Ampelgading	2013	54.000.000,00	100,00%	100,00%
		Rehabilitasi DAK 2013 dan APBD II SMPN 2 Warungpring	2013	54.000.000,00	100,00%	100,00%
		Rehabilitasi ruang kelas DAK 2013 dan APBD II SDN 1 Surajaya	2013	81.672.400,00	100,00%	100,00%
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	14.997.400,00	100,00%	100,00%
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	9.999.000,00	100,00%	100,00%
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	9.999.000,00	100,00%	100,00%
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	4.999.500,00	100,00%	100,00%
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	4.999.500,00	100,00%	100,00%
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	6.500.000,00	100,00%	100,00%
		Dindik 2017 (urugan) Rencana dibangun Gedung Kesenian Taman	2017	1.112.243.000,00	100,00%	100,00%
		Rehabilitasi Gedung SMPN 2 Ulujami	2021	506.366.350,00	100,00%	100,00%
		Bangunan Taman Bacaan Masyarakat di SKB Comal	2021	274.150.563,00	100,00%	100,00%
2	DINKES			**1.046.886.749,00**		
		KDP pengurugan tanah untuk rumah sakit comal DED + Progres penyelesaian fisik 8,437 % dari nilai kontrak	2017	435.967.626,00	100,00%	8,47%
		Perencanaan pembangunan gedung logistik dan alkes	2019	53.760.000,00	100,00%	0,00%
		Bangunan Rumah Sakit (rumah genset)	2020	11.940.000,00	100,00%	0,00%
		Bangunan Rumah Sakit (jasa konsultan - RS Randudongkal)	2023	471.628.510,00	100,00%	0,00%
		DED Ruangan Cathlab RSUD	2024	73.590.613,00	100,00%	0,00%
3	DPU TR			**61.674.700.523,00**		
		DED Bangunan Gedung BKD Kabupaten Pemalang	2016	49.560.000,00	100,00%	100,00%
		DED Kantor Kelurahan Widuri	2016	52.598.000,00	100,00%	0,00%
		DED kantor kelurahan kebondalem	2016	49.929.000,00	100,00%	0,00%
		Perkerasan jalan ruko Stadion Mochtar	2016	217.968.000,00	100,00%	100,00%
		Lanjutan Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2016	976.091.000,00	100,00%	100,00%
		Pembangunan gedung BKD Kabupaten Pemalang	2017	1.649.918.912,00	100,00%	100,00%
		Pembuatan masterplan lingkungan Kantor Bupati Pemalang	2017	50.735.117,00	100,00%	0,00%
		Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2017	587.816.855,00	100,00%	100,00%
		Pembangunan Gedung BKD	2018	5.389.518.457,00	10,00%	100,00%
		Manajemen konstruksi/pengaw asan penataan kaw asan stadion	2018	172.236.914,00	100,00%	100,00%
		Perencanaan Pemb. Gedung BKL Comal Disnakertrans	2019	74.745.000,00	100,00%	0,00%
		Belanja penunjang Pemb. Gedung BKL Comal Disnakertrans	2019	169.289.000,00	100,00%	0,00%
		Perencanaan Pemb. Kantor Kelurahan Widuri	2019	83.131.000,00	100,00%	0,00%
		Perencanaan Pemb. Gedung Kantor Dinsos KBPP	2019	76.816.000,00	100,00%	0,00%
		Perencanaan Pemb. Kantor Kecamatan Ampelgading	2019	81.805.000,00	100,00%	0,00%
		Pemb. Gedung BKD	2019	3.961.119.800,00	100,00%	100,00%
		Perencanaan Pemb. Gedung Arsip Dinspusarda	2019	82.350.000,00	100,00%	0,00%
		Pemb. Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2019	14.549.878.608,00	100,00%	100,00%
		MK Pemb. Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2019	447.477.250,00	100,00%	100,00%
		Belanja penunjang Pemb. Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2019	180.371.347,00	100,00%	100,00%
		Perencanaan Pemb. Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Pemalar	2019	81.085.000,00	100,00%	0,00%
		Perencanaan Gedung Setda Kabupaten Pemalang	2020	96.096.000,00	100,00%	0,00%
		Review perencanaan Pembangunan Gedung BKD Pemalang	2020	29.900.000,00	100,00%	100,00%
		Pemb. Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2020	32.050.001.741,00	100,00%	100,00%
		Pembangunan Gedung Arsip Disdukcapil	2020	395.194.522,00	100,00%	100,00%
		Pembangunan Pagar Kantor	2024	119.068.000,00	100,00%	100,00%
4	DISPERKIM			**359.547.793,00**		
		DED RTH Pemb. trotoar dan boullevard Perintis Kemerdekaan	2019	111.201.000,00	100,00%	0,00%
		DED RTH Kecamatan Moga	2019	63.072.000,00	100,00%	0,00%
		DED RTH Terminal Pemalang	2019	63.052.000,00	100,00%	0,00%
		DED RTH Kec. Taman	2019	59.069.000,00	100,00%	0,00%
		DED RTH Kec. Bantarbolang	2019	63.153.793,00	100,00%	0,00%
5	DINSOS KBPP			**101.042.000,00**		
		Design Enginering Detail	2016	49.752.000,00	100,00%	0,00%
		Detail Enginering Design (DED)	2017	51.290.000,00	100,00%	0,00%
6	DISNAKER			42.548.000,00		
		Perencanaan Pemb. Asrama BLK	2020	42.548.000,00	100,00%	0,00%
7	DISHUB			100.765.000,00		
		DED di Sub Termina Angkutan	2016	49.980.000,00	99,96%	100,00%
		Perencanaan Rehabilitasi Sub Terminal Grosir Comal	2017	50.785.000,00	99,77%	100,00%

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPD	PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI (Rp)	% KEUANGAN	% FISIK
8	DISKOPERINDAG			1.383.825.800,00		
		DED Pasar Pemalang	2017	299.117.400,00	100,00%	
		Pembuatan DED Pasar Pagi Pemalang	2018	50.455.000,00	100,00%	
		Sertifikasi Tanah Ps. Bung Karno	2020	30.000.000,00	100,00%	
		Amdal Ps. Bung Karno	2020	319.642.850,00	100,00%	
		Andalalin Ps. Bung Karno	2020	230.757.350,00	100,00%	
		DED Ps. Bung karno	2020	133.715.350,00	100,00%	
		Amdal Ps. Moga	2020	320.137.850,00	100,00%	
9	DINPUSARDA			95.865.000,00		
		DED Gedung Perpustakaan	2019	95.865.000,00	100,00%	
10	DISPARPORA			**6.041.560.150,00**		
		DED Gardu Pandang Gg Slamet Pulosari	2016	49.940.000,00	100,00%	
		DED Rumah Budaya	2016	83.400.000,00	100,00%	
		DED Susur kali comal	2016	78.444.000,00	100,00%	
		Pos Jaga Gunung Slamet	2017	61.731.500,00		
		Peningkatan Jalan Road Race	2017	67.601.000,00		
		Pos Jaga Gunung Slamet	2018	354.750.000,00		
		Pos Jaga Gunung Slamet	2019	34.590.000,00		
		Sport Center	2019	49.885.000,00		
		Tempat Parkir Swimmingpool	2020	31.973.771,00		
		Gardu Pandang Gn. Slamet	2020	5.229.244.879,00		
		JUMLAH		**73.208.758.604,00**		

Atas kondisi KDP tersebut akan dikoreksi di tahun 2025 dengan rincian:
- Akan dikapitalisasi ke aset induknya sebesar Rp549.278.047,00;
- Ke Aset Lain-Lain sebesar Rp3.319.286.723,00 dan akan dihapuskan.

5.5.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.007.515.676.920,70 dan Rp1.838.590.454.527,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.200
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024 dan 2023

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
1	Peralatan dan Mesin	683.784.380.655,70	615.078.958.529,00	68.705.422.126,70	11,17
2	Gedung dan Bangunan	517.160.138.718,00	487.993.747.727,00	29.166.390.991,00	5,98
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	806.571.157.547,00	735.517.748.271,00	71.053.409.276,00	9,66
Jumlah		**2.007.515.676.920,70**	**1.838.590.454.527,00**	**168.925.222.393,70**	**9,19**

Pada tahun 2024 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp168.925.222.393,70 atau 9,19% dibanding tahun lalu. Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp177.213.079.488,00. Terdapat perbedaan antara Beban Penyusutan Aset Tetap dengan Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp8.287.857.094,30 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp2.056.417.262,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp10.344.274.356,30.

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.056.417.262,00, antara lain terdiri dari:
- Mutasi masuk Aset antar OPD sebesar Rp2.016.417.262,00;
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp40.000.000,00 yaitu pada Dishub berupa akumulasi penyusutan atas kendaraan dinas yang belum dicatat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp10.344.274.356,30 antara lain terdiri dari:
- Mutasi Aset antar OPD sebesar Rp2.016.417.262,00;
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp793.477,00 pada Dindikbud karena perbedaan saldo awal;
- Penghapusan sebesar Rp6.266.985.576,30; dan
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp2.060.078.041,00, yaitu:
  Reklas ke Aset Lain-lain karena aset rusak berat sebesar Rp1.767.737.068,00;
  Reklas ke Properti Investasi sebesar Rp292.340.973,00 berupa akumulasi penyusutan atas beban penyusutan gedung dan bangunan TA 2024 yang menjadi Properti Investasi.

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA 2024	2.016.417.262,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA 2024	2.016.417.262,00	
		0,00
Tambah :		
- Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	40.000.000,00	
		40.000.000,00
Kurang :		
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	793.477,00	
- Penghapusan	6.266.985.576,30	
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi	2.060.078.041,00	
		8.327.857.094,30
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		(8.287.857.094,30)
Beban Penyusutan Aset Tetap		177.213.079.488,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2024		168.925.222.393,70

Jika dibandingkan antara perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp168.925.222.393,70 dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional sebesar Rp177.213.079.488,00 maka terdapat selisih sebesar Rp8.287.857.094,30. Selisih tersebut terjadi karena penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp2.056.417.262,00 terdiri dari: mutasi aset antar OPD sebesar Rp2.016.417.262,00 dan koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya sebesar Rp40.000.000,00; dan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp10.344.274.356,30 terdiri dari: mutasi keluar antar OPD sebesar Rp2.016.417.262,00, koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya sebesar Rp793.477,00; penghapusan aset sebesar Rp6.266.985.576,30, dan reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp2.060.078.041,00 sedangkan sebesar Rp369.299.325,00 merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
Adapun saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 dan 2023 yang merupakan saldo konsolidasi dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.201
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024 dan 2023

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Dindikbud	506.165.408.841,00	465.262.279.558,00	40.903.129.283,00	8,79
2	Dinkes	312.918.124.126,00	278.191.505.958,00	34.726.618.168,00	12,48
3	DPUTR	775.911.809.075,00	713.701.229.981,00	62.210.579.094,00	8,72
4	Disperkim	32.419.643.435,00	27.404.903.568,00	5.014.739.867,00	18,30
5	Satpol PP	6.452.123.824,00	6.025.353.042,00	426.770.782,00	7,08
6	BPBD	6.160.410.794,00	5.398.001.885,00	762.408.909,00	14,12
7	Dinsos KBPP	10.094.290.343,00	9.780.754.140,00	313.536.203,00	3,21
8	Disnaker	7.698.456.965,00	7.133.520.341,00	564.936.624,00	7,92
9	DLH	23.540.429.974,00	20.762.360.022,00	2.778.069.952,00	13,38
10	Disdukcatpil	11.376.911.653,00	10.856.176.334,00	520.735.319,00	4,80
11	Dinpermasdes	4.754.595.203,00	4.503.539.542,00	251.055.661,00	5,57
12	Dishub	23.901.527.425,00	22.674.350.975,00	1.227.176.450,00	5,41
13	Diskominfo	14.762.776.898,00	13.914.406.752,00	848.370.146,00	6,10
14	Diskoperindag	55.949.813.633,00	52.262.565.706,00	3.687.247.927,00	7,06
15	DPMPTSP	4.149.621.616,00	3.829.340.522,00	320.281.094,00	8,36
16	Dinpusarda	5.189.772.336,00	4.734.986.508,00	454.785.828,00	9,60
17	Disperik	9.548.507.277,00	8.914.145.202,00	634.362.075,00	7,12
18	Disparpora	33.838.203.142,00	31.137.341.586,00	2.700.861.556,00	8,67
19	Dispertan	15.264.718.808,00	14.017.005.917,00	1.247.712.891,00	8,90
20	Setda	39.616.771.832,70	34.413.155.889,00	5.203.615.943,70	15,12
21	Setwan	23.340.633.534,00	18.052.045.902,00	5.288.587.632,00	29,30
22	Bappeda	5.891.586.206,00	5.414.400.086,00	477.186.120,00	8,81
23	BPKAD	21.258.259.580,00	5.663.150.719,00	15.595.108.861,00	275,38
24	Bapenda	6.755.990.769,00	22.537.959.860,00	(15.781.969.091,00)	(70,02)
25	BKD	6.042.788.166,00	5.017.883.675,00	1.024.904.491,00	20,43
26	Inspektorat	3.505.932.145,00	2.877.625.576,00	628.306.569,00	21,83
27	Kec. Moga	1.456.163.451,00	1.219.124.505,00	237.038.946,00	19,44
28	Kec. Pulosari	1.596.713.811,00	1.422.926.313,00	173.787.498,00	12,21
29	Kec. Belik	1.756.586.780,00	1.513.146.028,00	243.440.752,00	16,09
30	Kec. Watukumpul	1.820.586.031,00	1.590.780.573,00	229.805.458,00	14,45
31	Kec. Bodeh	1.598.692.244,00	1.366.708.600,00	231.983.644,00	16,97
32	Kec. Bantarbolang	1.485.021.874,00	1.309.058.736,00	175.963.138,00	13,44
33	Kec. Randudongkal	1.443.503.421,00	1.232.087.367,00	211.416.054,00	17,16
34	Kec. Pemalang	11.450.613.098,00	8.457.901.514,00	2.992.711.584,00	35,38
35	Kec. Taman	4.188.350.353,00	3.191.624.103,00	996.726.250,00	31,23
36	Kec. Petarukan	2.921.325.399,00	2.293.149.175,00	628.176.224,00	27,39
37	Kec. Ampelgading	1.489.510.875,00	1.313.462.732,00	176.048.143,00	13,40
38	Kec. Comal	4.209.882.922,00	3.648.250.975,00	561.631.947,00	15,39
39	Kec. Ulujami	1.832.805.590,00	1.580.968.224,00	251.837.366,00	15,93
40	Kec. Warungpring	1.496.091.769,00	1.249.816.773,00	246.274.996,00	19,70
41	Bakesbangpol	2.260.721.702,00	1.886.193.129,00	374.528.573,00	19,86
Jumlah		**2.007.515.676.920,70**	**1.827.755.187.993,00**	**179.760.488.927,70**	**9,84**

Jenis Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk masing-masing OPD dapat dirinci sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

   Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp683.784.380.655,70 dan Rp615.078.958.529,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.202
Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Dindikbud	167.043.068.742,00	141.496.041.992,00	25.547.026.750,00	18,05
2	Dinkes	261.711.241.559,00	230.833.470.176,00	30.877.771.383,00	13,38
3	DPUTR	18.830.189.036,00	20.064.570.284,00	(1.234.381.248,00)	(6,15)
4	Disperkim	4.273.221.186,00	4.218.713.833,00	54.507.353,00	1,29
5	Satpol PP	6.165.401.203,00	5.753.265.405,00	412.135.798,00	7,16
6	BPBD	5.275.011.564,00	4.539.132.135,00	735.879.429,00	16,21
7	Dinsos KBPP	9.362.203.498,00	9.123.755.960,00	238.447.538,00	2,61
8	Disnaker	5.733.388.890,00	5.325.788.175,00	407.600.715,00	7,65
9	DLH	17.101.103.375,00	14.847.254.255,00	2.253.849.120,00	15,18
10	Disdukcatpil	10.636.513.434,00	10.163.172.733,00	473.340.701,00	4,66
11	Dinpermasdes	4.178.078.513,00	3.960.384.460,00	217.694.053,00	5,50
12	Dishub	16.186.698.696,00	15.252.591.998,00	934.106.698,00	6,12
13	Diskominfo	14.075.147.149,00	13.322.605.338,00	752.541.811,00	5,65
14	Diskoperindag	7.946.783.661,00	7.192.468.068,00	754.315.593,00	10,49
15	DPMPTSP	3.806.639.042,00	3.531.654.010,00	274.985.032,00	7,79
16	Dinpusarda	4.558.878.442,00	4.156.228.881,00	402.649.561,00	9,69
17	Disperik	5.549.044.364,00	5.318.327.209,00	230.717.155,00	4,34
18	Disparpora	8.039.110.681,00	7.447.731.180,00	591.379.501,00	7,94
19	Dispertan	9.163.273.011,00	8.445.720.716,00	717.552.295,00	8,50
20	Setda	29.790.689.605,70	27.684.616.974,00	2.106.072.631,70	7,61
21	Setwan	13.786.802.074,00	14.317.022.954,00	(530.220.880,00)	(3,70)
22	Bappeda	5.249.245.949,00	5.038.755.988,00	210.489.961,00	4,18
23	BPKAD	18.433.672.201,00	18.817.586.189,00	(383.913.988,00)	(2,04)
24	Bapenda	6.300.294.737,00	5.635.585.662,00	664.709.075,00	11,79
25	BKD	5.586.108.962,00	5.046.605.646,00	539.503.316,00	10,69
26	Inspektorat	3.124.143.014,00	2.892.225.145,00	231.917.869,00	8,02
27	Kec. Moga	1.173.593.419,00	1.095.608.440,00	77.984.979,00	7,12
28	Kec. Pulosari	1.029.532.085,00	997.090.977,00	32.441.108,00	3,25
29	Kec. Belik	1.233.905.161,00	1.168.315.699,00	65.589.462,00	5,61
30	Kec. Watukumpul	1.087.474.433,00	1.047.132.366,00	40.342.067,00	3,85
31	Kec. Bodeh	1.154.288.596,00	1.071.439.063,00	82.849.533,00	7,73
32	Kec. Bantarbolang	1.017.715.235,00	958.445.480,00	59.269.755,00	6,18
33	Kec. Randudongkal	967.570.757,00	913.442.761,00	54.127.996,00	5,93
34	Kec. Pemalang	3.625.372.301,00	3.433.282.430,00	192.089.871,00	5,59
35	Kec. Taman	2.097.198.456,00	1.980.645.323,00	116.553.133,00	5,88
36	Kec. Petarukan	1.398.623.908,00	1.327.275.586,00	71.348.322,00	5,38
37	Kec. Ampelgading	1.149.176.512,00	1.098.627.846,00	50.548.666,00	4,60
38	Kec. Comal	1.439.695.348,00	1.394.204.516,00	45.490.832,00	3,26
39	Kec. Ulujami	1.211.613.134,00	1.148.434.149,00	63.178.985,00	5,50
40	Kec. Warungpring	1.035.150.145,00	948.521.477,00	86.628.668,00	9,13
41	Bakesbangpol	2.257.518.577,00	2.071.217.050,00	186.301.527,00	8,99
Jumlah		**683.784.380.655,70**	**615.078.958.529,00**	**68.705.422.126,70**	**11,17**

Pada tahun 2024 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp68.705.422.126,70 atau 11,17%. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2024 adalah sebesar Rp74.951.718.171,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp6.246.296.044,30 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp2.047.815.683,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp8.294.111.727,30.

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.047.815.683,00, antara lain terdiri dari:

- Mutasi masuk Aset antar OPD sebesar Rp2.007.815.683,00;
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp40.000.000,00 yaitu pada Dishub berupa akumulasi penyusutan atas kendaraan dinas yang belum dicatat.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.294.111.727,30 antara lain terdiri dari:

- Mutasi Aset antar OPD sebesar Rp2.007.815.683,00;
- Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan sebesar Rp793.477,00, yaitu pada Dindikbud berupa koreksi saldo awal;
- Penghapusan sebesar Rp4.517.765.499,30; dan
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp1.767.737.068,00, yaitu reklas ke Aset Lain-lain karena aset rusak berat berupa mobil dan peralatan kantor, dan alat kesehatan, yaitu pada:
  - Dinkes sebesar Rp22.718.972,00;
  - Setda sebesar Rp413.066.666,00; dan
  - Setwan sebesar Rp1.331.951.430,00.

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2024	2.007.815.683,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2024	2.007.815.683,00	
		0,00
Tambah :		
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	40.000.000,00	
		40.000.000,00
Kurang :		
- Diserahkan ke pihak lain/hibah	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	793.477,00	
- Penghapusan	4.517.765.499,30	
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi	1.767.737.068,00	
		6.286.296.044,30
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		(6.246.296.044,30)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		74.951.718.171,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2024		68.705.422.126,70

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2024 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.203
Akumulasi Mutasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2024

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2023	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN 2024												Saldo Per 31-Des-2024
			Beban Penyusutan 2024	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=3+4+8-15
1	Dindikbud	141.496.041.992,00	25.564.320.227,00	-	-	-	-	-	-	-	793.477,00	16.500.000,00	-	17.293.477,00	167.043.068.742,00
2	Dinkes	230.833.470.176,00	30.900.490.355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.718.972,00	22.718.972,00	261.711.241.559,00
3	DPUTR	20.064.570.284,00	983.988.752,00	-	15.620.000,00	-	15.620.000,00	-	-	-	-	2.233.990.000,00	-	2.233.990.000,00	18.830.189.036,00
4	Disperkim	4.218.713.833,00	351.998.519,00	-	-	-	-	-	-	262.491.166,00	-	35.000.000,00	-	297.491.166,00	4.273.221.186,00
5	Satpol PP	5.753.265.405,00	527.635.798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	115.500.000,00	-	115.500.000,00	6.165.401.203,00
6	BPBD	4.539.132.135,00	735.879.429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.275.011.564,00
7	Dinsos KBPP	9.123.755.960,00	1.034.139.538,00	-	-	-	-	-	-	63.077.000,00	-	732.615.000,00	-	795.692.000,00	9.362.203.498,00
8	Disnaker	5.325.788.175,00	477.600.715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00	5.733.388.890,00
9	DLH	14.847.254.255,00	2.253.849.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.101.103.375,00
10	Disdukcatpil	10.163.172.733,00	600.255.701,00	-	-	-	-	-	-	-	-	126.915.000,00	-	126.915.000,00	10.636.513.434,00
11	Dinpermasdes	3.960.384.460,00	217.694.053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.178.078.513,00
12	Dishub	15.252.591.998,00	884.106.698,00	-	180.000.000,00	40.000.000,00	220.000.000,00	-	-	-	-	170.000.000,00	-	170.000.000,00	16.186.698.696,00
13	Diskominfo	13.322.605.338,00	732.332.286,00	-	20.209.525,00	-	20.209.525,00	-	-	-	-	-	-	-	14.075.147.149,00
14	Diskoperindag	7.192.468.068,00	754.315.593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.946.783.661,00
15	DPMPTSP	3.531.654.010,00	274.985.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.806.639.042,00
16	Dinpusarda	4.156.228.881,00	402.649.561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.558.878.442,00
17	Disperik	5.318.327.209,00	199.413.155,00	-	31.304.000,00	-	31.304.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.549.044.364,00
18	Disparpora	7.447.731.180,00	591.379.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.039.110.681,00
19	Dispertan	8.445.720.716,00	779.009.295,00	-	15.873.000,00	-	15.873.000,00	-	-	-	-	77.330.000,00	-	77.330.000,00	9.163.273.011,00
20	Setda	27.684.616.974,00	2.348.794.630,00	-	616.911.167,00	-	616.911.167,00	-	-	14.113.000,00	-	432.453.499,30	413.066.666,00	859.633.165,30	29.790.689.605,70
21	Setwan	14.317.022.954,00	801.730.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331.951.430,00	1.331.951.430,00	13.786.802.074,00
22	Bappeda	5.038.755.988,00	190.280.436,00	-	20.209.525,00	-	20.209.525,00	-	-	-	-	-	-	-	5.249.245.949,00
23	BPKAD	18.817.586.189,00	972.329.588,00	-	65.870.000,00	-	65.870.000,00	-	-	978.195.576,00	-	443.918.000,00	-	1.422.113.576,00	18.433.672.201,00
24	Bapenda	5.635.585.662,00	385.394.445,00	-	546.959.548,00	-	546.959.548,00	-	-	253.144.918,00	-	14.500.000,00	-	267.644.918,00	6.300.294.737,00
25	BKD	5.046.605.646,00	361.053.316,00	-	197.450.000,00	-	197.450.000,00	-	-	-	-	19.000.000,00	-	19.000.000,00	5.586.108.962,00
26	Inspektora	2.892.225.145,00	389.696.974,00	-	253.144.918,00	-	253.144.918,00	-	-	410.924.023,00	-	-	-	410.924.023,00	3.124.143.014,00
27	Kec. Moga	1.095.608.440,00	77.984.979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.173.593.419,00
28	Kec. Pulosari	997.090.977,00	32.441.108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.029.532.085,00
29	Kec. Belik	1.168.315.699,00	65.589.462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.233.905.161,00
30	Kec. Watukumpul	1.047.132.366,00	69.212.067,00	-	-	-	-	-	-	25.870.000,00	-	3.000.000,00	-	28.870.000,00	1.087.474.433,00
31	Kec. Bodeh	1.071.439.063,00	82.849.533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.154.288.596,00
32	Kec. Bantarbolang	958.445.480,00	59.200.755,00	-	14.113.000,00	-	14.113.000,00	-	-	-	-	14.044.000,00	-	14.044.000,00	1.017.715.235,00
33	Kec. Randudongkal	913.442.761,00	54.127.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967.570.757,00
34	Kec. Pemalang	3.433.282.430,00	189.189.871,00	-	15.900.000,00	-	15.900.000,00	-	-	-	-	13.000.000,00	-	13.000.000,00	3.625.372.301,00
35	Kec. Taman	1.980.645.323,00	116.553.133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.097.198.456,00
36	Kec. Petarukan	1.327.275.586,00	71.348.322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398.623.908,00
37	Kec. Ampelgading	1.098.627.846,00	50.548.666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.149.176.512,00
38	Kec. Comal	1.394.204.516,00	45.490.832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439.695.348,00
39	Kec. Ulujami	1.148.434.149,00	63.178.985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.211.613.134,00
40	Kec. Warungpring	948.521.477,00	72.377.668,00	-	14.251.000,00	-	14.251.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.035.150.145,00
41	Bakesbangpol	2.071.217.050,00	186.301.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.257.518.577,00
	JUMLAH	615.078.958.529,00	74.951.718.171,00	-	2.007.815.683,00	40.000.000,00	2.047.815.683,00	-	-	2.007.815.683,00	793.477,00	4.517.765.499,30	1.767.737.068,00	8.294.111.727,30	683.784.380.655,70

https://jdih.pemalangkab.go.id

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp517.160.138.718,00 dan Rp487.993.747.727,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.204
Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Dindikbud	335.921.095.336,00	320.671.298.433,00	15.249.796.903,00	4,76
2	Dinkes	47.934.501.324,00	44.594.220.010,00	3.340.281.314,00	7,49
3	DPUTR	5.544.691.920,00	5.135.009.737,00	409.682.183,00	7,98
4	Disperkim	6.846.615.389,00	5.976.525.026,00	870.090.363,00	14,56
5	Satpol PP	286.722.621,00	272.087.637,00	14.634.984,00	5,38
6	BPBD	885.399.230,00	858.869.750,00	26.529.480,00	3,09
7	Dinsos KBPP	707.074.660,00	633.847.811,00	73.226.849,00	11,55
8	Disnaker	1.905.680.627,00	1.753.285.425,00	152.395.202,00	8,69
9	DLH	1.372.906.954,00	1.271.340.516,00	101.566.438,00	7,99
10	Disdukcatpil	580.927.437,00	544.322.059,00	36.605.378,00	6,72
11	Dinpermasdes	566.789.321,00	534.711.188,00	32.078.133,00	6,00
12	Dishub	4.736.725.587,00	4.475.425.118,00	261.300.469,00	5,84
13	Diskominfo	657.234.538,00	571.499.833,00	85.734.705,00	15,00
14	Diskoperindag	46.693.703.464,00	43.971.387.321,00	2.722.316.143,00	6,19
15	DPMPTSP	329.166.724,00	287.517.184,00	41.649.540,00	14,49
16	Dinpusarda	618.970.593,00	567.793.903,00	51.176.690,00	9,01
17	Disperik	2.695.178.986,00	2.429.468.217,00	265.710.769,00	10,94
18	Disparpora	18.298.771.640,00	16.929.471.808,00	1.369.299.832,00	8,09
19	Dispertan	5.657.759.400,00	5.176.710.808,00	481.048.592,00	9,29
20	Setda	9.650.010.253,00	9.209.093.373,00	440.916.880,00	4,79
21	Setwan	9.439.106.265,00	7.117.871.661,00	2.321.234.604,00	32,61
22	Bappeda	607.342.507,00	568.706.952,00	38.635.555,00	6,79
23	BPKAD	2.725.332.493,00	2.662.769.371,00	62.563.122,00	2,35
24	Bapenda	434.166.089,00	411.743.087,00	22.423.002,00	5,45
25	BKD	396.635.321,00	377.131.724,00	19.503.597,00	5,17
26	Inspektorat	381.789.131,00	362.594.580,00	19.194.551,00	5,29
27	Kec. Moga	281.279.407,00	262.393.639,00	18.885.768,00	7,20
28	Kec. Pulosari	563.228.610,00	528.878.518,00	34.350.092,00	6,49
29	Kec. Belik	521.390.994,00	494.774.848,00	26.616.146,00	5,38
30	Kec. Watukumpul	731.530.348,00	695.758.598,00	35.771.750,00	5,14
31	Kec. Bodeh	444.403.648,00	430.219.792,00	14.183.856,00	3,30
32	Kec. Bantarbolang	466.904.556,00	446.525.385,00	20.379.171,00	4,56
33	Kec. Randudongkal	421.857.714,00	393.170.446,00	28.687.268,00	7,30
34	Kec. Pemalang	2.719.047.820,00	2.548.871.292,00	170.176.528,00	6,68
35	Kec. Taman	636.586.626,00	588.170.048,00	48.416.578,00	8,23
36	Kec. Petarukan	700.337.037,00	649.401.853,00	50.935.184,00	7,84
37	Kec. Ampelgading	338.266.655,00	324.471.935,00	13.794.720,00	4,25
38	Kec. Comal	2.383.054.663,00	2.257.144.304,00	125.910.359,00	5,58
39	Kec. Ulujami	619.192.456,00	576.885.602,00	42.306.854,00	7,33
40	Kec. Warungpring	458.760.374,00	432.378.935,00	26.381.439,00	6,10
41	Bakesbangpol	-	-	-	-
Jumlah		**517.160.138.718,00**	**487.993.747.727,00**	**29.166.390.991,00**	**5,98**

Pada tahun 2024 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.166.390.991,00 atau 5,98%. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2024 adalah sebesar Rp31.207.952.041,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp2.041.561.050,00 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp8.601.579,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.050.162.629,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.601.579,00 terdiri dari:
- Mutasi Masuk Aset antar OPD sebesar Rp8.601.579,00;

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.050.162.629,00 terdiri dari:
- Mutasi Keluar Aset antar OPD sebesar Rp8.601.579,00;
- Penghapusan akumulasi penyusutan karena penghapusan aset tetap sebesar Rp1.749.220.077,00 pada Diskoperindag;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp292.340.973,00 yaitu:
  Reklas ke Properti Investasi sebesar Rp292.340.973,00 yaitu pada:
  - Disparpora sebesar Rp211.326.414,00; dan
  - BPKAD sebesar Rp81.014.559,00.

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2024	8.601.579,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2024	8.601.579,00	
		0,00
Tambah :		
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
		0,00
Kurang :		
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
- Penghapusan	1.749.220.077,00	
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi	292.340.973,00	
		2.041.561.050,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		(2.041.561.050,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		31.207.952.041,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2024		29.166.390.991,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2024 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.205
Akumulasi Mutasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2024

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2023	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN 2024												Saldo Per 31-Des-2024
			Beban Penyusutan 2024	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=3+4+8-15
1	Dindikbud	320.671.298.433,00	15.249.796.903,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.921.095.336,00
2	Dinkes	44.594.220.010,00	3.340.281.314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.934.501.324,00
3	DPUTR	5.135.009.737,00	409.682.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.544.691.920,00
4	Disperkim	5.976.525.026,00	870.090.363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.846.615.389,00
5	Satpol PP	272.087.637,00	14.634.984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.722.621,00
6	BPBD	858.869.750,00	26.529.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885.399.230,00
7	Dinsos KBPP	633.847.811,00	73.226.849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.074.660,00
8	Disnaker	1.753.285.425,00	152.395.202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.905.680.627,00
9	DLH	1.271.340.516,00	101.566.438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.372.906.954,00
10	Disdukcatpil	544.322.059,00	36.605.378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.927.437,00
11	Dinpermasdes	534.711.188,00	32.078.133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566.789.321,00
12	Dishub	4.475.425.118,00	261.300.469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.736.725.587,00
13	Diskominfo	571.499.833,00	94.336.284,00	-	-	-	-	-	-	8.601.579,00	-	-	-	8.601.579,00	657.234.538,00
14	Diskoperindag	43.971.387.321,00	4.471.536.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.749.220.077,00	-	1.749.220.077,00	46.693.703.464,00
15	DPMPTSP	287.517.184,00	41.649.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329.166.724,00
16	Dinpusarda	567.793.903,00	51.176.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618.970.593,00
17	Disperik	2.429.468.217,00	265.710.769,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.695.178.986,00
18	Disparpora	16.929.471.808,00	1.580.626.246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.326.414,00	211.326.414,00	18.298.771.640,00
19	Dispertan	5.176.710.808,00	481.048.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.657.759.400,00
20	Setda	9.209.093.373,00	440.916.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.650.010.253,00
21	Setwan	7.117.871.661,00	2.321.234.604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.439.106.265,00
22	Bappeda	568.706.952,00	38.635.555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607.342.507,00
23	BPKAD	2.662.769.371,00	143.577.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.014.559,00	81.014.559,00	2.725.332.493,00
24	Bapenda	411.743.087,00	22.423.002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.166.089,00
25	BKD	377.131.724,00	19.503.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.635.321,00
26	Inspektora	362.594.580,00	19.194.551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.789.131,00
27	Kec. Moga	262.393.639,00	18.885.768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.279.407,00
28	Kec. Pulosari	528.878.518,00	34.350.092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563.228.610,00
29	Kec. Belik	494.774.848,00	26.616.146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521.390.994,00
30	Kec. Watukumpul	695.758.598,00	35.771.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731.530.348,00
31	Kec. Bodeh	430.219.792,00	14.183.856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.403.648,00
32	Kec. Bantarbolang	446.525.385,00	20.379.171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466.904.556,00
33	Kec. Randudongkal	393.170.446,00	28.687.268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421.857.714,00
34	Kec. Pemalang	2.548.871.292,00	170.176.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.719.047.820,00
35	Kec. Taman	588.170.048,00	48.416.578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636.586.626,00
36	Kec. Petarukan	649.401.853,00	50.935.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.337.037,00
37	Kec. Ampelgading	324.471.935,00	13.794.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.266.655,00
38	Kec. Comal	2.257.144.304,00	125.910.359,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.383.054.663,00
39	Kec. Ulujami	576.885.602,00	33.705.275,00	-	8.601.579,00	-	8.601.579,00	-	-	-	-	-	-	-	619.192.456,00
40	Kec. Warungpring	432.378.935,00	26.381.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.760.374,00
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		487.993.747.727,00	31.207.952.041,00	-	8.601.579,00	-	8.601.579,00	-	-	8.601.579,00	-	1.749.220.077,00	292.340.973,00	2.050.162.629,00	517.160.138.718,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp806.571.157.547,00 dan Rp735.517.748.271,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.206
Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dan 2023

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	Dindikbud	3.201.244.763,00	3.094.939.133,00	106.305.630,00	3,43
2	Dinkes	3.272.381.243,00	2.763.815.772,00	508.565.471,00	18,40
3	DPUTR	751.536.928.119,00	688.501.649.960,00	63.035.278.159,00	9,16
4	Disperkim	21.299.806.860,00	17.209.664.709,00	4.090.142.151,00	23,77
5	Satpol PP	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	25.012.185,00	23.150.369,00	1.861.816,00	8,04
8	Disnaker	59.387.448,00	54.446.741,00	4.940.707,00	9,07
9	DLH	5.066.419.645,00	4.643.765.251,00	422.654.394,00	9,10
10	Disdukcatpil	159.470.782,00	148.681.542,00	10.789.240,00	7,26
11	Dinpermasdes	9.727.369,00	8.443.894,00	1.283.475,00	15,20
12	Dishub	2.978.103.142,00	2.946.333.859,00	31.769.283,00	1,08
13	Diskominfo	30.395.211,00	20.301.581,00	10.093.630,00	49,72
14	Diskoperindag	1.309.326.508,00	1.098.710.317,00	210.616.191,00	19,17
15	DPMPTSP	13.815.850,00	10.169.328,00	3.646.522,00	35,86
16	Dinpusarda	11.923.301,00	10.963.724,00	959.577,00	8,75
17	Disperik	1.304.283.927,00	1.166.349.776,00	137.934.151,00	11,83
18	Disparpora	7.500.320.821,00	6.760.138.598,00	740.182.223,00	10,95
19	Dispertan	443.686.397,00	394.574.393,00	49.112.004,00	12,45
20	Setda	176.071.974,00	148.935.212,00	27.136.762,00	18,22
21	Setwan	114.725.195,00	108.580.750,00	6.144.445,00	5,66
22	Bappeda	34.997.750,00	32.450.149,00	2.547.601,00	7,85
23	BPKAD	99.254.886,00	91.532.261,00	7.722.625,00	8,44
24	Bapenda	21.529.943,00	19.675.741,00	1.854.202,00	9,42
25	BKD	60.043.883,00	55.486.364,00	4.557.519,00	8,21
26	Inspektorat	-	-	-	-
27	Kec. Moga	1.290.625,00	1.253.125,00	37.500,00	2,99
28	Kec. Pulosari	3.953.116,00	3.765.615,00	187.501,00	4,98
29	Kec. Belik	1.290.625,00	1.253.125,00	37.500,00	2,99
30	Kec. Watukumpul	1.581.250,00	1.506.250,00	75.000,00	4,98
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	402.083,00	377.083,00	25.000,00	6,63
33	Kec. Randudongkal	54.074.950,00	44.001.150,00	10.073.800,00	22,89
34	Kec. Pemalang	5.106.192.977,00	4.040.762.975,00	1.065.430.002,00	26,37
35	Kec. Taman	1.454.565.271,00	1.151.971.326,00	302.593.945,00	26,27
36	Kec. Petarukan	822.364.454,00	646.389.320,00	175.975.134,00	27,22
37	Kec. Ampelgading	2.067.708,00	2.005.208,00	62.500,00	3,12
38	Kec. Comal	387.132.911,00	304.462.350,00	82.670.561,00	27,15
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
40	Kec. Warungpring	2.181.250,00	2.106.250,00	75.000,00	3,56
41	Bakesbangpol	3.203.125,00	3.135.070,00	68.055,00	2,17
Jumlah		**806.571.157.547,00**	**735.517.748.271,00**	**71.053.409.276,00**	**9,66**

Pada tahun 2024 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp71.053.409.276,00 atau 9,66%. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi tahun 2024 adalah sebesar Rp71.053.409.276,00 tidak terdapat perbedaan antara penambahan akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Penambahan akumulasi penyusutan seluruhnya dipengaruhi dari beban penyusutan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024:

Uraian		Perubahan Nilai
Mutasi Masuk antar OPD TA. 2024	0,00	
Mutasi Keluar antar OPD TA. 2024	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
		0,00
Kurang :		
- Diserahkan ke Pihak Lain/Hibah	0,00	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lain-lain	0,00	
		0,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan		0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		71.053.409.276,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2024		71.053.409.276,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.207
Akumulasi Mutasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2023	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 2024											Saldo Per 31-Des-2024
			Beban Penyusutan 2024	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN						
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	5=9+10+11+12+13+1	16=3+4+8-15
1	Dindikbud	3.094.939.133,00	106.305.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.201.244.763,00
2	Dinkes	2.763.815.772,00	508.565.471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.272.381.243,00
3	DPUTR	688.501.649.960,00	63.035.278.159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.536.928.119,00
4	Disperkim	17.209.664.709,00	4.090.142.151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.299.806.860,00
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	23.150.369,00	1.861.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.012.185,00
8	Disnaker	54.446.741,00	4.940.707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.387.448,00
9	DLH	4.643.765.251,00	422.654.394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.066.419.645,00
10	Disdukcatpil	148.681.542,00	10.789.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.470.782,00
11	Dinpermasdes	8.443.894,00	1.283.475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.727.369,00
12	Dishub	2.946.333.859,00	31.769.283,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.978.103.142,00
13	Diskominfo	20.301.581,00	10.093.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.395.211,00
14	Diskoperindag	1.098.710.317,00	210.616.191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.309.326.508,00
15	DPMPTSP	10.169.328,00	3.646.522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.815.850,00
16	Dinpusarda	10.963.724,00	959.577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.923.301,00
17	Disperik	1.166.349.776,00	137.934.151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.304.283.927,00
18	Disparpora	6.760.138.598,00	740.182.223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.320.821,00
19	Dispertan	394.574.393,00	49.112.004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443.686.397,00
20	Setda	148.935.212,00	27.136.762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.071.974,00
21	Setwan	108.580.750,00	6.144.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.725.195,00
22	Bappeda	32.450.149,00	2.547.601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.997.750,00
23	BPKAD	91.532.261,00	7.722.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.254.886,00
24	Bapenda	19.675.741,00	1.854.202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.529.943,00
25	BKD	55.486.364,00	4.557.519,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.043.883,00
26	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kec. Moga	1.253.125,00	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.290.625,00
28	Kec. Pulosari	3.765.615,00	187.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.953.116,00
29	Kec. Belik	1.253.125,00	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.290.625,00
30	Kec. Watukumpul	1.506.250,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.581.250,00
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	377.083,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.083,00
33	Kec. Randudongkal	44.001.150,00	10.073.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.074.950,00
34	Kec. Pemalang	4.040.762.975,00	1.065.430.002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.106.192.977,00
35	Kec. Taman	1.151.971.326,00	302.593.945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.454.565.271,00
36	Kec. Petarukan	646.389.320,00	175.975.134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822.364.454,00
37	Kec. Ampelgading	2.005.208,00	62.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.067.708,00
38	Kec. Comal	304.462.350,00	82.670.561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.132.911,00
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
40	Kec. Warungpring	2.106.250,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.181.250,00
41	Bakesbangpol	3.135.070,00	68.055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.203.125,00
	JUMLAH	735.517.748.271,00	71.053.409.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806.571.157.547,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.4 Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung pada Tahun 2024. Dana Cadangan di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) mengamanatkan besarnya Dana Cadangan dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran. Saldo dana Cadangan Tahun 2024 sebesar 0,00 dan saldo dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp41.426.570.163,00. Dana cadangan dicairkan pada bulan Februari tahun 2024.

Tabel 5.208
Dana Cadangan TA 2024 dan 2023

NO	KETERANGAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	DANA CADANGAN	-	41.426.570.163,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.5 PROPERTI INVESTASI

5.5.1.5.1 PROPERTI INVESTASI

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai menyajikan Aset Properti Investasi pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp36.480.496.266,00 angka ini berasal dari Properti Investasi Tanah dan Properti Investasi Gedung dan Bangunan. Nilai Perolehan Properti Investasi per 31 Desember 2024 masih sama dengan Nilai Perolehan Properti Investasi Per 31 Desember Tahun 2023 Karena Pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada penambahan maupun mutasi Properti Investasi. Saldo Properti Investasi Tahun 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.209
Properti Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Properti Investasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Tanah	9.956.175.000,00	9.956.175.000,00
Gedung	29.442.650.954,00	29.442.650.954,00
Total Nilai Perolehan	39.398.825.954,00	39.398.825.954,00
Penyusutan	3.210.670.661,00	2.918.329.688,00
Nilai Buku	36.188.155.293,00	36.480.496.266,00

A. PROPERTI INVESTASI TANAH

Saldo Properti Investasi tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.956.175.000,00 berasal dari reklasifikasi Aset tetap tanah yang tercatat pada KIB A Dinas Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Perikanan
  1. Tambak Dinas Limbangan 1 terletak di desa Limbangan kecamatan Ulujami;
  2. Tambak Dinas Limbangan 2 terletak di desa Limbangan Kecamatan Ulujami;
  3. Tambak Dinas Asemdoyong terleak diesa Asemdoyong Kecamatan Taman.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  1. Tanah bangunan gudang terletak di Desa Tahunan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta yang sekarang dimanfaatkan sebagai Wisma Jogja;
  2. Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Timur sekarang dimanfaatkan sebagai Gedung Serba Guna;
  3. Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup yang terletak di Jalan Alun-alun Pemalang dan sekarang dimanfaatkan sebagai GOR Kridanggo.

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
  Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel sebanyak dua bidang yang terletak di Jalan Raya Randudongkal-Moga dan sekarang dimanfaatkan sebagai Hotel Moga.

Harga perolehan dan nilai buku Properti Investasi Tanah yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.210
Properti Investasi Tanah Tahun Anggaran 2024

NO	Properti Investasi	Perolehan (Rp)	Penyusutan	Nilai Buku (Rp)
1	Tambak Dinas Limbangan 1	165.000.000,00	-	165.000.000,00
2	Tambak Dinas Limbangan 2	227.925.000,00	-	227.925.000,00
3	Tambak Dinas	157.500.000,00	-	157.500.000,00
4	Tanah Bangunan Gudang	418.500.000,00	-	418.500.000,00
5	Tanah Bangunan Balai sidang/Pertemuan	2.931.250.000,00	-	2.931.250.000,00
6	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	5.647.500.000,00	-	5.647.500.000,00
7	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	24.300.000,00	-	24.300.000,00
8	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	384.200.000,00	-	384.200.000,00
	Total	**9.956.175.000,00**	**-**	**9.956.175.000,00**

Penjelasan tentang gambaran properti investasi tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.211
Properti Investasi Tanah Tahun Anggaran 2024

Pl- Tanah	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Alamat	Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)
Tambak Dinas Limbangan 1	22.000	1995	Desa Limbangan	Tambak Ikan	Pembelian	165.000.000,00
Tambak Dinas Limbangan 2	30.390	1998	Desa Limbangan	Tambak Ikan	Pembelian	227.925.000,00
Tambak Dinas Asemdoyong	22.500	1997	Desa Asemdoyong	Tambak Ikan	Pembelian	157.500.000,00
Tanah Bangunan Gudang	558	2003	Tahunan, Umbulharjo,	Hotel/Wisma yogya	Pembelian	418.500.000,00
Tanah Bangunan Balai	7.750	2003	Jl. Jend. Sudirman Timur	Gedung Serba Guna	Pembelian	2.931.250.000,00
Tanah Untuk Bangunan Sarana	3.765	2003	Jl. Alun-alun	GOR Kridanggo	Pembelian	5.647.500.000,00
Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/M	486	1988	Jalan Raya RDD - Moga, Kec	Hotel Moga	Pembelian	24.300.000,00
Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/M	3.842	1988	Jalan Raya RDD - Moga, Kec	Hotel Moga	Pembelian	384.200.000,00
Jumlah Properti Investasi Tanah						**9.956.175.000,00**

B. PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.442.650.954,00 berasal dari reklasifikasi Aset tetap gedung dan bangunan yang tercatat pada KIB C Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga dengan rincian sebagai berikut:

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. Bangunan gedung pertemuan Permanen yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Timur dan sekarang dimanfaatkan sebagai Gedung Serba Guna;
2. Gedung Olah Raga Tertutup Permanen yang terletak di Jalan Alun-alun Pemalang dan sekarang dimanfaatkan sebagai GOR Kridanggo.

- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
  1. Bangunan Gedung Hotel Permanen yang terletak di Jalan Raya Randudongkal-Moga dan sekarang dimanfaatkan sebagai Hotel Moga;
  2. Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen terletak di Desa Tahunan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta yang sekarang dimanfaatkan sebagai Wisma Jogja.

Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 berasal dari reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.212
Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024

PI- Gedung dan Bangunan	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Alamat	Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)
GOR Kridanggo	1.782	1991	Jl. Alun-alun	Gedung Olah Raga (GOR Kridanggo)	Pembelian	1.911.675.950,00
Wisma Yogya	730	2016	Tahunan Jogjakarta	Wisma/ hotel	Pembelian	3.583.115.504,00
Hotel Moga	4.500	2019	Jalan Raya Moga	hotel	Pembelian	21.808.807.500,00
Gedung Serba Guna	2.494	2003	Jl. Jend. Sudirman Timur	Gedung Serba Guna	Pembelian	2.139.052.000,00
Jumlah Properti Investasi Gedung dan Bangunan						**29.442.650.954,00**

5.5.1.5.2 AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

Pada Tahun Anggaran 2024 angka penyusutan properti investasi berasal dari reklasifikasi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.213
Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024

NO	Properti Investasi	Perolehan (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	GOR Kridanggo	1.911.675.950,00	1.296.753.519,00	614.922.431,00
2	Wisma Yogya	3.583.115.504,00	418.266.011,00	3.164.849.493,00
3	Hotel Moga	21.808.807.500,00	593.684.204,00	21.215.123.296,00
4	Gedung Serba Guna	2.139.052.000,00	901.966.927,00	1.237.085.073,00
	Total	**29.442.650.954,00**	**3.210.670.661,00**	**26.231.980.293,00**

Nilai Buku Properti Investasi gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.231.980.293,00 angka ini berasal dari harga perolehan sebesar Rp29.442.650.954,00 dikurangi akumulasi penyusutan properti investasi gedung dan bangunan sebesar Rp3.210.670.661,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.1.6 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pemalang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp101.244.417.169,44 dan Rp101.141.241.614,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.214
Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Aset Lainnya		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	456.006.128,00	546.830.500,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	3.127.897.475,00	633.260.925,00
4	Aset lain-lain	89.106.312.566,44	88.721.135.189,67
5	*Dana Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)	24.701.000,00	2.710.515.000,00
Jumlah		**101.244.417.169,44**	**101.141.241.614,67**

5.5.1.6.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp456.006.128,00 dan Rp546.830.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.215
Tagihan Jangka Panjang Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Jenis Kerugian	Saldo 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	225.800.000,00	-	32.362.400,00	193.437.600,00
2	TGR dari Pembayaran Premi Asuransi CAR Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	137.560.000,00	-	31.186.400,00	106.373.600,00
3	TGR dari Pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 2004 s.d. 2009 yang berasal dari pos Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan	127.740.000,00	-	14.063.572,00	113.676.428,00
4	TGR atas hilangnya kendaraan bermotor roda empat Nopol G 8 D	500.000,00	-	500.000,00	-
5	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9973 AD pada Kepala Desa Gintung Kec. Comal a.n. Rijono	315.000,00	-	-	315.000,00
6	TGR hilangnya 12 CPU pada Kepala SMPN 4 Banbarbolang a.n. Nasari, S.Pd.	45.400.000,00	-	12.712.000,00	32.688.000,00
7	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak An. Tarjuki kadus I desa Simpur Kecamatan Belik sebesar Rp.6.500.000,00 disebabkan karena hilangnya sepeda motor supra X Nopol G 9996 AD sebesar Rp.6.500.000 paling lambat setor 14 Maret 2020	5.958.000,00	-	-	5.958.000,00
8	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak An. Joko Sutopo sebesar Rp.7.500.000,00 disebabkan karena hilangnya berupa kendaraan roda dua dinas Nopol G 9612 BD sebesar Rp.7.500.000,00 paling lambat setor november 2021	3.557.500,00	-	-	3.557.500,00
Jumlah		**546.830.500,00**	**-**	**90.824.372,00**	**456.006.128,00**

- Pengurangan sebesar Rp9.110.372,00 berasal dari TGR atas Pos Setda An. Kumpul Sutrisno berkurang sebesar Rp987.599,00 berasal dari setoran tanggal 3 Januari 2024 dan tanggal 29 Juli 2024 sebesar Rp8.122.773,00;
- Pengurangan sebesar Rp11.420.000,00 berasal dari TGR An. Sulistiarso dari Purna Bhakti sebesar Rp10.420.000,00 dan CAR sebesar Rp.1.000.000,00 berasal dari setoran tanggal 3 Januari 2024;
- Pengurangan sebesar Rp500.000,00 TGR hilangnya kendaraan bermotor roda empat Nopol G 8 D an. Noor Rosyadi berasal dari setoran tanggal 5 Januari 2024;
- Pengurangan sebesar Rp8.920.000,00 TGR An. Muchlis Yasin dari Pos Setda sebesar Rp987.599,00 berasal dari setoran tanggal 27 Maret 2024; sebesar Rp7.927.401 setoran tanggal 27 Mei 2024 dan setoran tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp5.000,00;
- Pengurangan sebesar Rp2.860.800,00 TGR An. Hartono dari Purna Bhakti berkurang sebesar Rp2.858.300,00 berasal dari setoran tanggal

https://jdih.pemalangkab.go.id

1 Juli 2024 dan setoran tanggal 23 September 2024 sebesar Rp2.500,00;

- Pengurangan sebesar Rp3.253.600,00 TGR An. Imam Siregar setoran tanggal 18 Juli 2024 sebesar Rp3.251.100,00 dan tanggal 23 September 2024 sebesar Rp2.500,00 yang masuk pada Purna Bhakti sebesar Rp753.600,00 dan asuransi CAR sebesar Rp2.500.000,00;
- Pengurangan sebesar Rp3.477.600,00 TGR An. H. Usman Sidiq dari Purna Bhakti berasal dari setoran tanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp.3.475.100,00 dan tanggal 23 September 2024 sebesar Rp.2.500,00
- Pengurangan sebesar Rp4.342.800,00 TGR An. Heri Santoso berasal dari setoran tanggal 19 Agustus 2024 sebesar Rp4.340.300,00 dan tanggal 23 September 2024 sebesar Rp2.500,00 yang masuk ke Pos Setda sebesar Rp2.590.000,00 dan Purna Bhakti sebesar Rp1.752.800,00;
- Berkurangnya sebesar Rp4.177.600,00 TGR An. Dumeri berasal dari setoran tanggal 19 Agustus 2024 sebesar Rp4.175.100,00 dan tanggal 23 September 2024 Rp2.500,00 untuk Purna Bhakti;
- Berkurangnya sebesar Rp2.363.200,00 TGR An. H. Turah Raharjo berasal dari setoran tanggal 19 Agustus 2024 sebesar Rp2.360.700,00 dan setor tanggal 23 September 2024 Rp2.500,00 untuk Pos Setda;
- Berkurangnya sebesar Rp7.369.600,00 TGR An. Tjarub Aryanto berasal dari setoran tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp7.367.100,00 dan tanggal 23 September 2024 sebesar Rp2.500,00 masuk ke asuransi CAR;
- Berkurangnya sebesar Rp6.148.800,00 TGR An. Suprayitno berasal dari setoran tanggal 11 September 2024 sebesar Rp6.146.300,00 dan tanggal 23 September 2024 sebesar Rp2.500,00 masuk ke asuransi CAR;
- Berkurangnya sebesar Rp4.457.600,00 TGR An. Kusworo berasal dari setoran tanggal 13 September 2024 sebesar Rp4.455.100,00 dan tanggal 23 September 2024 sebesar Rp2.500,00 masuk ke asuransi CAR;
- Berkurangnya sebesar Rp4.692.800,00 TGR An. Abdul Muhaimin berasal dari setoran tanggal 26 September 2024 sebesar Rp4.690.300,00 dan tanggal 23 September 2024 sebesar Rp2.500,00 masuk ke asuransi CAR;
- Berkurangnya sebesar Rp12.712.000,00 TGR An. Nasori SPD berasal dari setoran tanggal 26 September 2024 sebesar Rp12.709.500,00 dan tanggal 4 Desember 2024 sebesar Rp2.500,00 TGR hilangnya Komputer;
- Berkurangnya sebesar Rp5.017.600,00 TGR An. M. Zaenudin berasal dari setoran tanggal 26 September 2024 sebesar Rp5.015.100,00 dan tanggal 23 September 2024 sebesar Rp2.500,00 masuk ke asuransi CAR;

5.5.1.6.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Pemalang menggunakan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS). Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah dengan rincian sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.216
Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2024 dan 2023

Nama Barang	No Sertifikat & Tanggal	Luas (m^2)	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Tanah Sirandu Mall	Hak Pengelolaan No. 2 Tgl 10 Maret 2003	12.185	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
Jumlah	-	-	**8.529.500.000,00**	**8.529.500.000,00**

- Tanah Sirandu Mall dengan saldo tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp8.529.500.000,00 dan Rp8.529.500.000,00. Saldo tanah Sirandu Mall dengan luas 12.185 M^2 dengan No sertifikat hak pengelolaan No. 2 tanggal 10 maret 2003 harga perolehan diperoleh dari Tim *Apraisal Institute for Public Service Development Studies Ipseds* pada tahun 2008 sebesar Rp8.529.500.000,00.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola Kemitraan dengan Pihak Ketiga antara pihak Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan pihak PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Jakarta untuk kerjasama bagi tempat usaha dalam pembangunan pusat perdagangan, grosir dan rekreasi di kawasan bekas Terminal Sirandu. Kemitraan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17/KBBP/III/2002 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pusat Perdagangan, Grosir dan Rekreasi Pemalang yang ditanda tangani hari Kamis tanggal 14 Maret 2002 oleh Bupati Pemalang Bapak H.M. Machroes, SH dengan Direktur Utama PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Jakarta, Bapak T. Susilo Handoko. Masa berlaku Surat perjanjian kerjasama adalah 30 tahun atau dari tahun 2002 s/d 2032. PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa menyertakan modalnya berupa modal kerja untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana senilai Rp14.524.250.500,00 berupa:
  1. Rumah dan toko (ruko) 2 (dua) lantai;
  2. Toko 1 (satu) lantai;
  3. *Department store*/Swalayan/Pusat Grosir 2 (dua) lantai;
  4. Selasar Ruko;
  5. Selasar Toko;
  6. Selasar *Department store* /Swalayan/Pusat Grosir;
  7. Pagar keliling ± 64,5 M^2;
  8. Lapangan parkir dan jalan ± 5.153,56 M^2;
  9. Pos jaga ± 4 M^2;
  10. Selasar jaga ± 8 M^2;
  11. MCK/kamar mandi ± 18 M^2;
  12. Lampu taman HPL 125 watt 8 unit;
  13. Lampu taman HPL 250 watt 25 unit;
  14. Mushola ± 30 M^2;
  15. Tempat wudhu ± 12 M^2;
  16. Taman lingkungan 1 LS;
  17. Trotoar ± 147,5 M^2;
  18. *Kansteen trotoar* ± 238,5 M^2;
  19. Rambu lalu lintas 18 unit;
  20. Instalasi listrik jalan dan taman 1 LS;
  21. Saluran induk tutup plat beton 1.036 M;
  22. Saluran anak (MD-40) tutup gril besi ± 708,70 M;
  23. Saluran drainase lapangan ± 58 M;
  24. Pengadaan air bersih 1 LS;

https://jdih.pemalangkab.go.id

25. Papan nama dan gapura 1 LS;
26. Selasar MCK dan musholla seluas ± 20 M^2;
27. Titik kran hydrant 4 unit (tanpa instalasi) ;
28. Gerobak dan tong sampah 1 LS.

5.5.1.6.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 dengan nilai buku sebesar Rp3.127.897.475,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp633.260.925,00. Saldo per 31 Desember 2024 berasal dari Harga perolehan sebesar Rp12.799.800.168,00 dan Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar (Rp9.671.902.693,00).

Aset Tak Berwujud tahun 2024 berupa Penambahan Aset Tak Berwujud TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.217

Aset Tidak Berwujud TA 2024 dan 2023

No	Aset Tak Berwujud	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo 31 Des 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1. SOFTWARE					
1	DIKBUD	2.403.853.980,00	-	-	2.403.853.980,00
2	DINAS KESEHATAN	1.272.590.888,00	2.671.066.000,00	-	3.943.656.888,00
3	DINSOSKB PP	51.165.000,00	-	-	51.165.000,00
4	DINAS TENAGA KERJA	170.887.000,00	-	-	170.887.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34.925.000,00	-	-	34.925.000,00
6	DISDUKCATPIL	370.096.500,00	-	-	370.096.500,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	150.783.000,00	-	-	150.783.000,00
8	DISKOMINFO	2.040.951.500,00	-	-	2.040.951.500,00
9	DPMPTSP	267.857.000,00	-	-	267.857.000,00
10	DINSPEPUSARSIP	283.366.000,00	-	-	283.366.000,00
11	DINAS PERTANIAN	96.050.300,00	-	-	96.050.300,00
12	BAPPEDA	4.235.000,00	-	-	4.235.000,00
13	BAPPENDA	891.788.000,00	197.000.000,00	-	1.088.788.000,00
14	BPKAD	113.489.000,00	-	-	113.489.000,00
15	BKD	376.149.000,00	-	-	376.149.000,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	390.676.500,00	-	-	390.676.500,00
17	KECAMATAN PEMALANG	54.943.000,00	-	-	54.943.000,00
18	DISKOPERINDAG	189.065.500,00	-	-	189.065.500,00
19	DPU	437.525.000,00	-	-	437.525.000,00
20	DINPERMASDES	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
21	DISPARPORA	97.700.000,00	-	-	97.700.000,00
Jumlah Software (1)		**9.728.097.168,00**	**2.868.066.000,00**	**-**	**12.596.163.168,00**
2. KAJIAN					
1	DPU	49.885.000,00	-	-	49.885.000,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	153.752.000,00	-		153.752.000,00
Jumlah Kajian (2)		**203.637.000,00**	**-**	**-**	**203.637.000,00**
Jumlah Total (1 + 2)		**9.931.734.168,00**	**2.868.066.000,00**	**-**	**12.799.800.168,00**

- Aset Tidak Berwujud di Dinas Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp2.671.066.000,00 berasal dari penambahan berupa pengadaan *software*/aplikasi dari RSUD. Dr. M Ashari sebesar Rp2.490.000.000,00 berupa *Software* aplikasi Simas Ashari dan aplikasi SIA BLUD sebesar Rp95.571.000,00 belanja modal *software* Belanja modal aset tidak berwujud dan *Software* aplikasi pada Puskesmas Warungpring sebesar Rp85.495.000,00 dari belanja peralatan mesin di reklas ke belanja modal *software* ;
- Aset Tidak Berwujud di Bappenda tahun 2024 sebesar Rp197.000.000,00 berupa *Software* Aplikasi S*oftware Smartmap Web* berasal dari belanja modal *software*- Belanja modal aset tidak berwujud.

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2023 adalah (Rp9.298.473.243,00) dan amortisasi per 31 Desember 2024 adalah (Rp9.671.902.693,00 dengan rincian sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.218
Amortisasi Aset Tak Berwujud TA 2024 dan 2023

No	Amortisasi Aset Tak Berwujud	Saldo Amortisasi 31 Des 2023 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2024		Saldo Amortisasi 31 Des 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1. SOFTWARE					
1	DIKBUD	(2.403.853.980,00)	-	-	(2.403.853.980,00)
2	DINAS KESEHATAN	(1.148.948.431,00)	(110.606.960,00)	-	(1.259.555.391,00)
3	DINSOSKB PP	(51.165.000,00)	-	-	(51.165.000,00)
4	DINAS TENAGA KERJA	(170.887.000,00)	-	-	(170.887.000,00)
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(34.925.000,00)	-	-	(34.925.000,00)
6	DISDUKCATPIL	(342.810.219,00)	(15.319.094,00)	-	(358.129.313,00)
7	DINAS PERHUBUNGAN	(150.783.000,00)	-	-	(150.783.000,00)
8	DISKOMINFO	(2.023.815.104,00)	(17.136.396,00)	-	(2.040.951.500,00)
9	DPMPTSP	(267.857.000,00)	-	-	(267.857.000,00)
10	DINSPEPUSARSIP	(283.366.000,00)	-	-	(283.366.000,00)
11	DINAS PERTANIAN	(96.050.300,00)	-	-	(96.050.300,00)
12	BAPPEDA	(4.235.000,00)	-	-	(4.235.000,00)
13	BAPPENDA	(640.065.958,00)	(111.271.834,00)	-	(751.337.792,00)
14	BPKAD	(113.489.000,00)	-	-	(113.489.000,00)
15	BKD	(291.976.625,00)	(36.303.625,00)	-	(328.280.250,00)
16	SEKRETARIAT DAERAH	(390.676.500,00)	-	-	(390.676.500,00)
17	KECAMATAN PEMALANG	(31.368.000,00)	(12.300.000,00)	-	(43.668.000,00)
18	DISKOPERINDAG	(176.032.792,00)	(13.032.708,00)	-	(189.065.500,00)
19	DPU	(434.087.500,00)	(3.437.500,00)	-	(437.525.000,00)
20	DINPERMASDES	(30.000.000,00)	-	-	(30.000.000,00)
21	DISPARPORA	(82.116.667,00)	(15.583.333,00)	-	(97.700.000,00)
Jumlah Software (1)		**(9.168.509.076,00)**	-	-	**(9.503.500.526,00)**
2. KAJIAN		-		-	
1	DPU	(49.885.000,00)	-	-	(49.885.000,00)
2	DINAS PERHUBUNGAN	(80.079.167,00)	(38.438.000,00)	-	(118.517.167,00)
Jumlah Kajian (2)		**(129.964.167,00)**	**(38.438.000,00)**	-	**(168.402.167,00)**
Jumlah Total (1 + 2)		**(9.298.473.243,00)**	**(38.438.000,00)**	-	**(9.671.902.693,00)**

5.5.1.6.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 dengan nilai buku sebesar Rp89.106.312.566,44 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 berasal dari Harga perolehan sebesar Rp110.772.164.660,44 dan Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar (Rp21.668.852.094,00) dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lain-lain tahun 2024 berupa Penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.219
Aset lain-lain Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	OPD	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo 31 Des 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	DINDIKBUD	465.457.564,00	-	-	465.457.564,00
2	DINKES	735.747.872,23	59.942.028,00	24.249,23	795.665.651,00
3	DPU TR	99.888.935.059,00	-	690.800.000,00	99.198.135.059,00
4	DISPERKIM	1.875.396.000,00	-	-	1.875.396.000,00
5	SATPOL PP	531.417,00	-	-	531.417,00
6	DINSOS KBPP	15.447.000,00	-	-	15.447.000,00
7	DISNAKER	319.125.000,00	-	-	319.125.000,00
8	DLH	958.846.610,44	-	-	958.846.610,44
9	DISDUKCATPIL	154.673.000,00	-	-	154.673.000,00
10	DINPERMASDES	45.716.000,00	-	7.000.000,00	38.716.000,00
11	DISHUB	198.160.625,00	-	6.500.000,00	191.660.625,00
12	DISKOMINFO	208.453.000,00	-	-	208.453.000,00
13	DISKOPERINDAG	62.100.000,00	-	28.000.000,00	34.100.000,00
14	DPMPTSP	19.795.500,00	-	-	19.795.500,00
15	DINPUSARDA	419.613.500,00	-	-	419.613.500,00
16	DISPERIK	20.266.500,00	-	-	20.266.500,00
17	DISPARPORA	1.523.840.870,00	-	-	1.523.840.870,00
18	DIPERTAN	64.330.000,00	-	-	64.330.000,00
19	BAPPEDA	16.100.000,00	-	-	16.100.000,00
20	BAPENDA	11.874.500,00	-	-	11.874.500,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	OPD	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo 31 Des 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
21	BPKAD	256.642.744,00	-	-	256.642.744,00
22	BKD	692.704.000,00	-	-	692.704.000,00
23	INSPEKTORAT	-	-	-	-
24	SETWAN	588.379.420,00	1.679.930.000,00	-	2.268.309.420,00
25	SETDA	322.927.495,00	413.066.666,00	3.000.000,00	732.994.161,00
26	BPBD	-	-	-	-
27	KESBANGPOLINMAS	17.922.500,00	-	-	17.922.500,00
28	KEC. MOGA	8.244.800,00	-	-	8.244.800,00
29	KEC. PULOSARI	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
30	KEC. BELIK	39.327.662,00	-	-	39.327.662,00
31	KEC. WATUKUMPUL	3.035.000,00	-	-	3.035.000,00
32	KEC. BODEH	87.357.500,00	-	-	87.357.500,00
33	KEC. BANTARBOLANG	9.400.000,00	-	-	9.400.000,00
34	KEC. RANDUDONGKAL	72.432.500,00	-	-	72.432.500,00
35	KEC. PEMALANG	41.875.000,00	-	-	41.875.000,00
36	KEC. TAMAN	57.206.577,00	-	-	57.206.577,00
37	KEC. PETARUKAN	40.150.000,00	-	-	40.150.000,00
38	KEC. AMPELGADING	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
39	KEC. COMAL	28.465.000,00	-	-	28.465.000,00
40	KEC. ULUJAMI	71.320.000,00	-	-	71.320.000,00
41	KEC. WARUNGPRING	750.000,00	-	-	750.000,00
Jumlah		**112.065.065.215,67**	**2.152.938.694,00**	**735.324.249,23**	**110.772.164.660,44**

- Penambahan Aset Lainnya-Aset lain-lain pada Dinas Kesehatan sebesar Rp59.942.028,00 terdapat pada Puskesmas Cikadu sebesar Rp6.751.102,00 berupa Tensimeter 4 buah yang sudah rusak dan obat *expired* pada RSUD dr. M. Ashari sebesar Rp37.223.056,00 dan aset rusak sebesar Rp15.967.870,00;

Tabel 5.220
Penambahan Aset lain-lain pada RSUD. DR.M.Ashari TA 2024

NO	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (Rp)
1	Alat Kantor Lainnya	2016	1.672.874,00
2	Alat Kantor Lainnya	2018	10.450.000,00
3	Kursi Putar	2014	644.996,00
4	Meja Tamu Biasa	2007	3.200.000,00
	JUMLAH		**15.967.870,00**

- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp24.249,23 berasal dari penghapusan Aset Lain-lain berupa penghapusan obat pada RSUD dr. M. Ashari sebesar Rp24.249,23 Berita Acara penghapusan tanggal 15 Januari 2025 ;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di DPU TR tahun 2024 sebesar sebesar Rp690.800.000,00 yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 100.3.3.2/698/2024;

Tabel 5.221
Pengurangan Aset lain-lain pada DPU TR TA 2024

NO	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (Rp)
1	Macadan Roller/Three Wheel Roler	1997	100.000.000,00
2	loader lainnya (dst)	2001	590.800.000,00
	JUMLAH		**690.800.000,00**

- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinpermasdes tahun 2024 sebesar Rp7.000.000,00 berupa Sepeda Motor Jupiter tahun 2004 nopol G 9956 D harga Rp7.000.000,00 yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 100.3.3.2/698/2024;

https://jdih.pemalangkab.go.id

- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dishub tahun 2024 sebesar Rp6.500.000,00 berupa Sepeda motor Astrea tahun 2001 Nopol G-9643-W sebesar Rp6.500.000,00 yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 100.3.3.2/698/2024;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Diskoperindag tahun 2024 sebesar Rp28.000.000,00 yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 100.3.3.2/698/2024;

Tabel 5.222
Pengurangan Aset lain-lain pada Diskoperindag TA 2024

NO	NAMA ASET	MEREK	TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NOPOL	HARGA (Rp)
1	Sepeda Motor	Honda	MCB (Win)	2002	G 9725 AD	4.000.000,00
2	Sepeda Motor	Honda	MCB (Win)	2003	G 9738 AD	4.000.000,00
3	Sepeda Motor	Yamaha	Jupiter / SLM	2004	G 9957 D	7.500.000,00
4	Sepeda Motor	Honda	NF 125 SD	2006	G 9947 M	12.500.000,00
	JUMLAH					28.000.000,00

- Penambahan Aset Lainnya-Aset lain-lain pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.679.930.000,00 berupa:

Tabel 5.223
Pengurangan Aset lain-lain pada Sekretariat DPRD TA 2024

NO	NAMA	TYPE	TAHUN	NPOLO	HARGA (Rp)
1	Sedan	CAMRY 2.5V AT ASV50R JETGKD	2016	G 3 D	597.330.000,00
2	Sport Utility Vehicle (SUV)	FORTUNER 2,4 VRZ A/T 4x2 DIESEL TRD VIN 2020	2020	G 12 D	541.300.000,00
3	Sport Utility Vehicle (SUV)	FORTUNER 2,4 VRZ A/T 4x2 DIESEL TRD VIN 2020	2020	G 8 D	541.300.000,00
	JUMLAH				**1.679.930.000,00**

- Penambahan Aset Lainnya-Aset lain-lain pada Sekretariat Daerah sebesar Rp413.066.666,00 berupa aset rusak peralatan mesin Station Wagon type CR-V RMI 2WD 2.0 AT CKD tahun perolehan 2016 Nopol G 1007 XD sebesar Rp413.066.666,00.
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.000.000,00 berupa aset rusak yang dihapus pada tahun 2023.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2023 adalah (Rp20.633.415.026,00). Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah (Rp21.665.852.094,00). Akumulasi berkurang karena adanya penghapusan pada Aset Lain-lain dan penambahan karena adanya penghentian masa manfaat pada Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.224
Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain TA 2024 dan 2023

No	OPD	SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)	MUTASI 2024		SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
1	DINDIKBUD	(123.465.164,00)	-	-	(123.465.164,00)
2	DINKES	(617.029.309,00)	(22.718.972,00)	-	(639.748.281,00)
3	DPU TR	(15.468.143.508,00)	-	(690.800.000,00)	(14.777.343.508,00)
4	DISPERKIM	(29.400.000,00)	-	-	(29.400.000,00)
5	SATPOL PP	(97.427,00)	-	-	(97.427,00)
6	DINSOS KBPP	(15.447.000,00)	-	-	(15.447.000,00)
7	DISNAKER	(310.875.000,00)	-	-	(310.875.000,00)
8	DLH	(618.324.388,00)	-	-	(618.324.388,00)
9	DISDUKCATPIL	(104.796.000,00)	-	-	(104.796.000,00)
10	DINPERMASDES	(45.361.400,00)	-	(7.000.000,00)	(38.361.400,00)
11	DISHUB	(196.320.325,00)	-	(6.500.000,00)	(189.820.325,00)
12	DISKOMINFO	(208.453.000,00)	-	-	(208.453.000,00)
13	DISKOPERINDAG	(57.950.000,00)	-	(28.000.000,00)	(29.950.000,00)
14	DPMPTSP	(19.795.500,00)	-	-	(19.795.500,00)
15	DINPUSARDA	(353.418.500,00)	-	-	(353.418.500,00)
16	DISPERIK	(20.266.500,00)	-	-	(20.266.500,00)
17	DISPARPORA	(525.340.600,00)	-	-	(525.340.600,00)
18	DIPERTAN	(64.330.000,00)	-	-	(64.330.000,00)

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	OPD	SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)	MUTASI 2024		SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
19	BAPPEDA	(16.100.000,00)	-	-	(16.100.000,00)
20	BAPENDA	(11.874.500,00)	-	-	(11.874.500,00)
21	BPKAD	(184.350.000,00)	-	-	(184.350.000,00)
22	BKD	(282.871.000,00)	-	-	(282.871.000,00)
23	INSPEKTORAT	-	-	-	-
24	SETWAN	(578.566.911,00)	(1.331.951.430,00)	-	(1.910.518.341,00)
25	SETDA	(309.824.952,00)	(413.066.666,00)	(3.000.000,00)	(719.891.618,00)
26	BPBD	-	-	-	-
27	KESBANGPOLINMAS	(17.922.500,00)	-	-	(17.922.500,00)
28	KEC. MOGA	(6.904.340,00)	-	-	(6.904.340,00)
29	KEC. PULOSARI	(7.000.000,00)	-	-	(7.000.000,00)
30	KEC. BELIK	(37.807.078,00)	-	-	(37.807.078,00)
31	KEC. WATUKUMPUL	(2.900.000,00)	-	-	(2.900.000,00)
32	KEC. BODEH	(86.810.626,00)	-	-	(86.810.626,00)
33	KEC. BANTARBOLANG	(9.400.000,00)	-	-	(9.400.000,00)
34	KEC. RANDUDONGKAL	(70.429.337,00)	-	-	(70.429.337,00)
35	KEC. PEMALANG	(38.475.000,00)	-	-	(38.475.000,00)
36	KEC. TAMAN	(55.767.827,00)	-	-	(55.767.827,00)
37	KEC. PETARUKAN	(36.498.334,00)	-	-	(36.498.334,00)
38	KEC. AMPELGADING	(5.000.000,00)	-	-	(5.000.000,00)
39	KEC. COMAL	(26.065.000,00)	-	-	(26.065.000,00)
40	KEC. ULUJAMI	(69.284.000,00)	-	-	(69.284.000,00)
41	KEC. WARUNGPRING	(750.000,00)	-	-	(750.000,00)
		(20.633.415.026,00)	**(1.767.737.068,00)**	**(735.300.000,00)**	**(21.665.852.094,00)**

5.5.1.6.5 Dana *Transfer Treasury Deposito Facility* (TDF)

Saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain di BPKAD tahun 2024 sebesar Rp24.701.000,00 merupakan Saldo Dana *Transfer Treasury Deposito Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.701.000,00 berdasar Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023. Saldo Dana *Transfer Treasury Deposito Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.701.000,00.

Tabel 5.225
Dana *Transfer Treasury Deposito Facility* (TDF)
Tahun Anggaran 2024

NO	TANGGAL	URAIAN	KOTOR (Rp)	POTONGAN (Rp)	BERSIH (Rp)
1	31/12/2024	611111 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	248.650.000,00	248.650.000,00	-
2	31/12/2024	611112 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	25.300.000,00	25.300.000,00	-
3	31/12/2024	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	580.109.000,00	580.109.000,00	-
4	31/12/2024	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	5.297.000,00	5.297.000,00	-
5	31/12/2024	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	1.622.000,00	1.622.000,00	-
6	31/12/2024	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Migas Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	7.136.000,00	7.136.000,00	-
7	31/12/2024	611212 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	18.716.000,00	18.716.000,00	-
8	31/12/2024	612111 Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	35.756.000,00	25.227.000,00	10.529.000,00
9	31/12/2024	612211 Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	3.076.000,00	-	3.076.000,00
10	31/12/2024	612311 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	1.588.000,00	-	1.588.000,00
11	31/12/2024	612312 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	2.000,00	-	2.000,00
12	31/12/2024	612411 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	124.000,00	-	124.000,00
13	31/12/2024	612412 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	9.381.000,00	-	9.381.000,00
14	31/12/2024	612512 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	1.000,00	-	1.000,00
	JUMLAH		**936.758.000,00**	**912.057.000,00**	**24.701.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.5.2 KEWAJIBAN

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.226
Kewajiban Jangka Pendek TA 2024 dan 2023

Kewajiban Jangka Pendek		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang PFK	-	-
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
3	Pendapatan Diterima Dimuka	3.255.876.651,96	5.850.892.435,26
4	Utang Belanja	49.214.887.614,00	42.740.160.402,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	25.735.659,00
6	Utang Pengadaan Aset Tetap	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**52.470.764.265,96**	**48.616.788.496,26**

Saldo-saldo akun Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 tidak ada dan 2023 juga tidak ada.

5.5.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024 sebesar Rp3.255.876.651,96 mengalami penurunan sebesar Rp2.595.015.783,30 atau 55,65% dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 sebesar Rp5.850.892.435,26. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024 sebesar Rp3.172.879.290,46, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.227
Pendapatan Diterima Dimuka TA 2024 dan 2023

	OPD	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinkes (RSUD Ashari)	104.109.619,04	25.315.178,08	78.794.440,96
2	Diskoperindag	297.451.779,28	430.762.937,15	(133.311.157,87)
3	BPKAD	2.263.823.541,91	2.744.051.752,98	(480.228.211,07)
4	Bapenda	497.609.938,33	2.530.836.458,67	(2.033.226.520,34)
5	Disparpora	92.881.773,40	119.926.108,38	(27.044.334,98)
	Jumlah	**3.255.876.651,96**	**5.850.892.435,26**	(2.595.015.783,30)

5.5.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan beban-beban yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2024. Utang belanja ini meliputi Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa serta Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.214.887.614,00 naik sebesar Rp6.474.727.212,00 atau 115,15% dibandingkan dengan saldo Utang Beban tahun 2023 sebesar Rp42.740.160.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 5.228
Utang Belanja TA 2024 dan 2023

Utang Belanja	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Utang Belanja Pegawai	21.103.847.307,00	21.265.969.697,00	(162.122.390,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa	27.809.455.681,00	21.172.606.079,00	6.636.849.602,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	301.584.626,00	301.584.626,00	-
Jumlah	**49.214.887.614,00**	**42.740.160.402,00**	**6.474.727.212,00**

1) Utang Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp21.103.847.307,00 turun sebesar Rp162.122.390,00 dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp21.265.969.697,00.
Adapun rincian Utang Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar 21.184.067.218,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.229
Rincian Utang Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

No	OPD	Utang Beban Pegawai 2024 (Rp)	Utang Beban Pegawai 2023 (Rp)
1	Dindikbud	1.793.824.099,00	2.021.443.923,00
2	Dinkes	362.476.155,00	11.542.029.537,00
3	DPU TR	470.589.823,00	463.620.284,00
4	Disperkim	126.298.800,00	164.530.700,00
5	Satpol PP	263.424.450,00	265.268.612,00
6	Dinsos KBPP	185.336.938,00	159.639.742,00
7	Disnaker	139.741.709,00	158.829.486,00
8	DLH	339.165.017,00	327.355.153,00
9	Disdukcatpil	155.657.006,00	172.862.050,00
10	Dinpermasdes	142.373.794,00	155.140.744,00
11	Dishub	280.381.771,00	262.333.489,00
12	Diskominfo	190.223.135,00	182.797.868,00
13	Diskoperindag	488.121.124,00	474.187.430,00
14	DPMPTSP	122.513.547,00	131.468.399,00
15	Dinpusarda	121.411.117,00	113.102.033,00
16	Disperik	185.068.329,00	168.845.401,00
17	Disparpora	220.685.190,00	222.357.849,00
18	Dispertan	412.074.990,00	428.285.778,00
19	Bappeda	181.533.668,00	192.489.748,00
20	Bapenda	237.067.905,00	237.728.448,00
21	BPKAD	210.406.776,00	206.410.008,00
22	BKD	236.516.570,00	216.984.892,00
23	Inspektorat	298.872.493,00	315.527.482,00
24	Sekretariat DPRD	169.770.341,00	164.830.142,00
25	Sekretariat Daerah	710.699.354,00	794.525.209,00
26	BPBD	136.860.430,00	113.319.589,00
27	Badan Kesbangpol	103.066.996,00	94.542.759,00
28	Kec. Moga	66.113.776,00	60.869.372,00
29	Kec. Pulosari	65.845.687,00	67.349.818,00
30	Kec. Belik	67.788.542,00	69.782.492,00
31	Kec. Watukumpul	52.259.328,00	68.882.656,00
32	Kec. Bodeh	83.856.082,00	81.725.310,00
33	Kec. Bantarbolang	74.154.194,00	63.613.729,00
34	Kec. Randudongkal	69.818.335,00	72.270.512,00
35	Kec. Pemalang	378.898.985,00	409.862.728,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	OPD	Utang Beban Pegawai 2024 (Rp)	Utang Beban Pegawai 2023 (Rp)
36	Kec. Taman	135.392.260,00	182.300.701,00
37	Kec. Petarukan	114.469.078,00	116.851.386,00
38	Kec. Ampelgading	70.563.403,00	74.118.218,00
39	Kec. Comal	108.877.310,00	115.867.216,00
40	Kec. Ulujami	69.507.247,00	75.095.277,00
41	Kec. Warungpring	84.876.806,00	56.923.527,00
42	RSUD dr M.Ashari (BLUD)	5.512.730.310,00	-
43	Puskesmas (BLUD)	5.864.534.437,00	-
Jumlah		**21.103.847.307,00**	**21.265.969.697,00**

2) Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan utang belanja telepon, air, listrik, internet, bahan obat-obatan, bahan kimia, perawatan kesehatan, dan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 yang belum dibayarkan. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp27.809.455.681,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.230
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

No	OPD	Utang Belanja Barang dan Jasa 2024 (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa 2023 (Rp)
1	Dindikbud	13.653.334,00	15.157.243,00
2	Dinkes	405.573.499,00	2.322.737.419,00
3	DPU TR	13.879.576,00	31.648.114,00
4	Disperkim	10.432.564,00	1.499.585.745,00
5	Satpol PP	12.827.571,00	13.665.935,00
6	Dinsos KBPP	28.725.456,00	22.237.428,00
7	Disnaker	12.903.148,00	13.572.719,00
8	DLH	12.165.005,00	14.167.623,00
9	Disdukcatpil	17.032.707,00	32.824.991,00
10	Dinpermasdes	8.984.833,00	7.778.142,00
11	Dishub	18.731.852,00	28.440.207,00
12	Diskominfo	25.374.256,00	27.983.821,00
13	Diskoperindag	32.777.900,00	38.280.000,00
14	DPMPTSP	9.850.010,00	11.956.358,00
15	Dinpusarda	9.427.181,00	7.699.203,00
16	Disperik	9.666.025,00	16.713.897,00
17	Disparpora	42.137.688,00	38.351.653,00
18	Dispertan	14.521.819,00	13.061.912,00
19	Bappeda	19.007.078,00	16.276.943,00
20	Bapenda	23.187.182,00	12.026.150,00
21	BPKAD	8.649.307,00	10.440.383,00
22	BKD	18.573.739,00	21.824.501,00
23	Inspektorat	12.138.186,00	9.147.007,00
24	Sekretariat DPRD (SETWAN)	52.708.278,00	57.752.610,00
25	Sekretariat Daerah	74.457.991,00	78.242.100,00
26	BPBD	7.995.516,00	10.890.782,00
27	Badan Kesbangpol	5.344.982,00	4.342.976,00
28	Kec. Moga	1.593.489,00	1.851.646,00
29	Kec. Pulosari	1.770.337,00	2.152.207,00
30	Kec. Belik	948.706,00	1.481.644,00
31	Kec. Watukumpul	1.565.225,00	1.789.873,00
32	Kec. Bodeh	5.393.639,00	5.208.734,00
33	Kec. Bantarbolang	2.986.400,00	2.571.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	OPD	Utang Belanja Barang dan Jasa 2024 (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa 2023 (Rp)
34	Kec. Randudongkal	3.343.350,00	3.329.708,00
35	Kec. Pemalang	9.231.791,00	10.403.394,00
36	Kec. Taman	6.502.386,00	5.718.085,00
37	Kec. Petarukan	5.326.330,00	5.353.666,00
38	Kec. Ampelgading	1.724.888,00	1.754.516,00
39	Kec. Comal	4.660.742,00	2.982.245,00
40	Kec. Ulujami	4.922.607,00	4.109.055,00
41	Kec. Warungpring	3.030.254,00	1.432.946,00
42	RSUD (BLUD)	26.666.133.783,00	16.745.661.498,00
43	Puskesmas (BLUD)	169.595.071,00	-
Jumlah		**27.809.455.681,00**	**21.172.606.079,00**

3) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp301.584.626,00 dan Rp301.584.626,00. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp Rp301.584.626,00 merupakan utang kepada pihak ketiga pada Dinas kesehatan karena adanya kelebihan volume pekerjaan yang belum dibayarkan.

5.5.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2024 sebesar Rp0,00 dan 2023 sebesar Rp25.735.659,00.

5.5.3 EKUITAS

5.5.3.1 Ekuitas

5.5.3.1.1 Ekuitas

Akun ini menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu jumlah aset dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki per tanggal neraca.
Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.231
Ekuitas TA 2024 dan 2023

Ekuitas	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Ekuitas	3.836.231.294.220,34	3.846.862.214.714,55

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.836.231.294.220,34 terdiri dari:
- Ekuitas Awal sebesar Rp3.846.862.214.714,55;
- Surplus Defisit LO sebesar (Rp11.948.903.097,21);
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp1.317.982.603,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.6 PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2024 dan 2023 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.232
Laporan Arus Kas
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	137.796.916.292,00	246.701.211.597,00
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(152.843.771.453,00)	(242.877.499.226,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	48.477.327,00
5	Kenaikan / Penurunan Kas	(15.046.855.161,00)	3.775.235.044,00
6	Saldo Awal Kas	159.537.743.992,00	156.198.408.948,00
7	Saldo Akhir Kas di BUD	123.696.258.966,00	138.733.059.892,00
8	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	4.011.000,00
9	Kas di Bendahara Penerimaan	-	9.698.500,00
10	Kas BLUD	18.152.510.547,00	15.695.534.203,00
11	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	3.085.216.504,00
12	Kas BOS	35.771.608,00	52.637.684,00
13	Kas lainnya	4.000.000,00	1.957.586.209,00
14	Kas Dana BOK Puskesmas	2.586.247.710,00	-
15	Saldo Akhir Kas	144.474.788.831,00	159.537.743.992,00

5.6.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp137.796.916.292,00 merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar yang terdiri dari :

Tabel 5.233
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi
Tahun 2024 dan 2023

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	**Arus Kas Masuk**		
2	Penerimaan Pajak Daerah	120.978.507.825,00	116.205.661.323,00
3	Penerimaan Retribusi Daerah	239.370.082.261,00	36.963.121.727,00
4	Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	26.031.762.403,00	23.940.780.939,00
5	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	15.359.901.698,00	182.958.851.316,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	31.100.745.000,00	30.912.318.834,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.324.683.000,00	3.488.565.979,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.265.304.393.000,00	1.178.380.360.243,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	571.250.869.410,00	533.566.744.827,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	271.871.079.000,00	261.275.195.760,00
11	Penerimaan Bagi Hasil	191.738.404.378,00	194.467.008.055,00
12	Penerimaan Insentif Fiskal	19.042.046.340,00	6.635.557.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Hibah	-	-
14	Penerimaan Lainnya	-	-
15	**Jumlah Arus Kas Masuk (1 s/d 14)**	**2.754.372.474.315,00**	**2.568.794.166.003,00**
16	***Arus Kas Keluar***		
17	Pembayaran Pegawai	1.302.143.148.625,00	1.113.196.374.159,00
18	Pembayaran Barang	714.049.430.646,00	667.795.423.023,00
19	Pembayaran Bunga	-	-
20	Pembayaran Hibah	150.235.584.293,00	101.019.252.163,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	9.547.648.000,00	8.937.904.000,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
23	Pembayaran Tak Terduga	1.266.502.459,00	427.605.701,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	11.281.883.069,00	10.413.308.000,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	3.399.296.931,00	4.633.776.900,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan	424.652.064.000,00	415.669.310.460,00
27	**Jumlah Arus Kas Keluar (16 s/d 26)**	**2.616.575.558.023,00**	**2.322.092.954.406,00**
28	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 27)**	**137.796.916.292,00**	**246.701.211.597,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp137.796.916.292,00 sudah termasuk perhitungan arus kas pendapatan selain transaksi yang melalui RKUD seperti pengelolaan BLUD pada RSUD dr. M. Ashari, Dana Kapitasi JKN pada puskesmas, Dana BOS untuk SD dan SMP.

Penyajian tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 03 Laporan Arus Kas par 8, yang menyatakan bahwa definisi arus kas adalah arus masuk kas dan arus kas keluar dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah sedangkan aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

5.6.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang.
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi defisit sebesar -Rp152.843.771.453,00 sudah termasuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp14.500.000.000,00

Adapun Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar sebagai berikut :

Tabel 5.234
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
1	***Arus Kas Masuk***		
2	Pencairan Dana Cadangan	41.426.570.163,00	-
3	Penjualan atas aset daerah yang tidak dipisahkan	1.218.076.333,00	2.179.625.800,00
4	penjualan atas aset lainnya	-	-
5	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
6	penerimaan penjualan investasi non permanen	-	-
7	**Jumlah Arus Kas Masuk (2 s/d 6)**	**42.644.646.496,00**	**2.179.625.800,00**
8	***Arus Kas Keluar***		
9	Pembentukan Dana Cadangan	-	20.000.000.000,00
10	Belanja Modal Tanah	2.199.576.000,00	2.046.604.500,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.867.746.899,00	90.599.632.595,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.292.557.157,00	47.732.039.343,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.979.833.338,00	54.538.776.430,00
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.866.133.555,00	22.290.072.158,00
15	Belanja Modal Aset Lainnya	2.782.571.000,00	-
16	Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah - Investasi Permanen	14.500.000.000,00	7.850.000.000,00
17	**Jumlah Arus Kas Keluar (9 s/d 16)**	**195.488.417.949,00**	**245.057.125.026,00**
18	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	**(152.843.771.453,00)**	**(242.877.499.226,00)**

Sedangkan Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp195.488.417.949,00 merupakan pembelian aset tetap dan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi permanen kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.235
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	
2	Belanja Modal Tanah	2.199.576.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.867.746.899,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.292.557.157,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.979.833.338,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.866.133.555,00
7	Belanja Modal Aset Lainnya	2.782.571.000,00
8	Penyertaan modal pemerintah daerah	14.500.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	195.488.417.949,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

5.6.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yang berasal dari penyetoran SiLPA BLUD tahun 2023 ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp7.848.753.164,00.
Peristiwa Penyetoran kas tersebut merupakan transaksi perpindahan kas dari BLUD ke RKUD Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, dicatat sebagai arus keluar kas pada Laporan Arus Kas BLUD dan sebagai arus masuk kas pada Laporan Arus Kas BUD sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 mencerminkan tidak adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar atas Aktivitas Pendanaan.

Tabel 5.236
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
1	Arus Kas Masuk		
2	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/ Masyarakat	-	-
3	Penerimaan Kasda dari Kas BLUD	7.848.753.164,00	17.000.000.000,00
4	Jumlah Arus Kas Masuk	7.848.753.164,00	17.000.000.000,00
5	Arus Kas Keluar		
6	Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	-	-
7	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Lainnya/Masyarakat	-	-
	Penyetoran Kas BLUD ke Kasda	7.848.753.164,00	17.000.000.000,00
8	Jumlah Arus Kas Keluar (5 s/d 7)	7.848.753.164,00	17.000.000.000,00
9	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (4 - 8)	-	-

5.6.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Aktivitas Transitoris diantaranya adalah pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga yang berada di BUD maupun Bendahara SKPD, yaitu terdiri dari: IWP, PPh Ps 21, 22, 23, dan PPN dalam tahun 2023. Jumlah Arus Masuk Dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp164.731.781.755,21 sedangkan jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris Rp164.731.781.755,21 arus kas bersih aktivitas transitoris sebesar Rp0,00.

Tabel 5.237
Arus Kas Aktivitas Transitoris
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
1	*Arus Kas Masuk*		
2	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	164.731.781.755,21	152.018.807.689,00
3	Penerimaan Setoran Saldo Tahun lalu dari Bendahara Penerimaan	-	-
4	Saldo Awal Kas BLUD dan JKN	-	-
5	Saldo Awal Kas BOS	-	-
6	Penerimaan Kelebihan Salur Dana BOS	-	-
7	Jumlah Arus Kas Masuk	164.731.781.755,21	152.018.807.689,00
8	*Arus Kas Keluar*		
9	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	164.731.781.755,21	152.067.285.016,00
10	Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
11	Setoran Kelebihan Salur Dana BOS	-	-
12	Koreksi Dana BOS	-	-
13	Jumlah Arus Kas Keluar (8 s/d 12)	164.731.781.755,21	152.067.285.016,00
14	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (7 - 13)	-	(48.477.327,00)

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB VI
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

6.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, terdapat rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah: **"*Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni.*"** Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan visi Kabupaten Pemalang tersebut, adalah sebagai berikut:

1. **Adil**; merupakan keadaan/ kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia, sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup. Politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. **Makmur;** merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya;
3. **Agamis;** merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.
4. **Ngangeni;** merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang aman, tenteram dan damai. Didukung modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung, sehingga siapapun merasa betah saat berada di Pemalang dan kangen ingin ke Pemalang saat berada di luar wilayah Pemalang.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Untuk mencapai visi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun Keempat dari implementasi RPJMD 2021-2026. Secara umum pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan	2.807.367.254.000,00	2.755.590.550.648,00	98,16%
Belanja	3.001.406.468.000,00	2.797.563.975.972,00	93,21%
Surplus/(Defisit)	(194.039.214.000,00)	(41.973.425.324,00)	21,63%
Penerimaan Pembiayaan	208.539.214.000,00	200.944.214.155,00	96,36%
Pengeluaran Pembiayaan	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00%
Pembiayaan Netto	194.039.214.000,00	186.444.214.155,00	96,09%
SILPA	-	144.470.788.831,00	

6.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 6.2
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	TARGET 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	KETERANGAN (%)
1	2	3	4	5
Pendapatan Daerah	**2.572.342.827.720,00**	**2.807.367.254.000,00**	**2.755.590.550.648,00**	**98,16**
Pendapatan Asli Daerah	**363.617.077.022,00**	**417.213.761.000,00**	**402.958.330.520,00**	**96,58**
Pendapatan Transfer	**2.208.725.750.698,00**	**2.390.153.493.000,00**	**2.352.632.220.128,00**	**98,43**

Sumber: BPKAD Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pemalang periode TA 2024

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.755.590.550.648,00 atau 98,16% dari target sebesar Rp2.807.367.254.000,00 dan naik 7,12 % jika dibandingkan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.572.342.827.720,00. Angka realisasi pendapatan tersebut menunjukan bahwa secara umum target kinerja pendapatan belum tercapai. Adapun kinerja untuk setiap jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

6.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar 96,58% dari target dan naik 10,82% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023. Realisasi masing-masing komponen PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2024

URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	TARGET 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Asli Daerah	**363.617.077.022,00**	**417.213.761.000,00**	**402.958.330.520,00**
Pajak Daerah	116.205.661.323,00	123.205.300.000,00	120.978.507.825,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	TARGET 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
1	2	3	4
Retribusi Daerah	36.963.121.727,00	252.906.500.000,00	239.370.082.261,00
Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.940.780.939,00	26.031.761.000,00	26.031.762.403,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	186.507.513.033,00	15.070.200.000,00	16.577.978.031,00

Pada APBD Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang semua merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah menjadi Pendapatan Retribusi Daerah yaitu pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

a. Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, beberapa perubahan dari tahun-tahun sebelumnya terkait Pajak Daerah diantaranya adalah:

1) Pengelompokan 5 (lima) jenis pajak dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terdiri dari; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Parkir menjadi:
   a. Jasa Perhotelan
   b. Jasa Makanan dan Minuman
   c. Jasa Hiburan dan kesenian
   d. Tenaga listrik
   e. Jasa Parkir
2) Perubahan Tarif dan Perhitungan Pajak terhutang untuk beberapa jenis pajak diantaranya :
   a. Tarif 10% untuk PBJT (jasa perhotelan, makanan dan munuman, hiburan, tenaga listrik dan Jasa Parkir) kecuali untuk Jasa Hiburan dan Kesenian tertentu sebesar 50%
   b. Tarif 15 % untuk Pajak Mineral Bukan logam dan batuan
   c. Penerapan tarif untuk PBB sebesar 0,08% bagi lahan produksi pangan dan ternak dengan NJOP kurang dari Rp. 1.000.0000.000,00 dan tarif 0,18% untuk bagi lahan produksi pangan dan ternak dengan NJOP lebih dari Rp. 1.000.0000.000,00
   d. Untuk BPHTB besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Realisasi masing-masing komponen Pajak Daerah dapat dijelaskan pada Tabel 6.4 sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

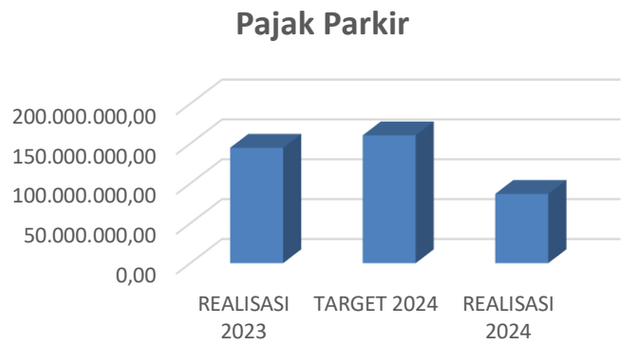
Tabel 6.4
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024

JENIS PAJAK	REALISASI 2023 (RP)	TARGET 2024 (RP)	REALISASI 2024 (RP)	KETERANGAN
1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu				
a) Jasa Perhotelan	630.807.498,00	600.000.000,00	600.008.196,00	(100% dari target) (95,12% dari realisasi 2023)
b) Makanan dan Minuman	2.480.407.785,00	2.350.000.000,00	3.298.776.024,00	(140 % dari target) (133 % dari realisasi 2023)
c) Pajak Hiburan dan Kesenian	343.489.890,00	330.000.000,00	408.836.253,00	(124% dari target) (119% dari realisasi 2023)
d) Tenaga Listrik	48.884.821.760,00	57.000.000.000,00	58.573.203.303,00	(103% dari target) (119,02% dari realisasi 2023)
e) Parkir	144.717.921,00	160.300.000,00	86.896.040,00	(54% dari target) (60,65% dari realisasi 2023)
2. Pajak Reklame	1.845.830.522,00	1.800.000.000,00	1.838.821.283,00	(102% dari target) (100% dari realisasi 2023)
3. Pajak Air Tanah	506.947.085,00	955.000.000,00	1.519.027.200,00	(159% dari target) (300% dari realisasi 2023)
4. Pajak SarangBurung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	10.700.000,00	107% dari target 107% dari realisasi 2023
5. Pajak Mineral Bukan logam dan batuan	927.733.000,00	1.000.000.000,00	711.717.300,00	71% dari target 76,72% dari realisasi 2023
6. Pajak PBB P2	26.061.573.658,00	26.000.000.000,00	26.305.780.261,00	101% dari target 100,94% dari realisasi 2023
7. Pajak BPHTB	34.370.164.539,00	33.000.000.000,00	27.624.741.965,00	84% dari target 80,38% dari realisasi 2023
Total	116.206.493.658,00	123.205.300.000,00	120.978.507.825,00	

Sumber: BAPENDA Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2024

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024 Rp.120.978.507.825,00 atau 98,19% dari target Rp.123.205.300.000,00 Realisasi tersebut meningkat 4,11% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp116.206.493.658,00. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah dari jenis pajak yang dikelola terdapat 8 (delapan) jenis pajak yang dapat mencapai target dan 3 (tiga) jenis pajak tidak tercapai target pendapatan pada tahun 2024, Beberapa jenis pajak yang tidak tercapai targetnya diantaranya:

1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Parkir yang hanya tercapai 54% dari target yang direncanakan, tidak tercapainya target karena adanya penurunan dasar pengenaan pajak terhutang pada jasa parkir karena pemberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dari 30% menjadi 10% sehingga berdampak pada turunnya realisasi pada tahun 2024, capaian target tersebut sebagaimana dalam Gambar 6.1 di bawah ini:



Gambar 6.1 Pajak Parkir

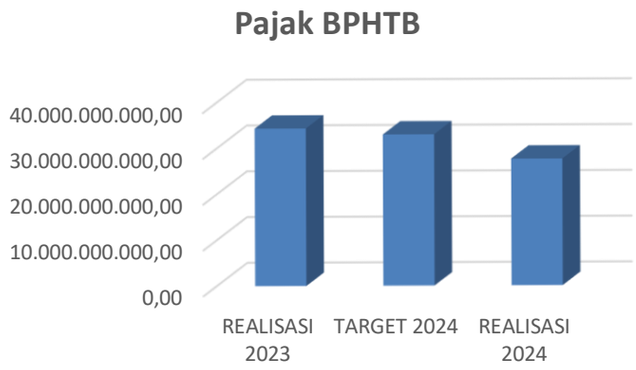
https://jdih.pemalangkab.go.id

2) Pajak Mineral Bukan logam dan batuan dengan capaian target sebesar 71%, tidak tercapainya target yang telah ditetapkan karena menurunnya kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pemalang, capaian target tersebut sebagaimana dalam Gambar 6.2 di bawah ini:



Gambar 6.2 Pajak Mineral Bukan Logam

3) Pajak BPHTB dengan capaian target sebesar 83,71%, tidak tercapainya target karena adanya perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Pajak (NOPOTKP) yang semua sebesar Rp. 60.000.000,00 menjadi Rp. 80.000.000,00 dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga nilai transaksi kurang dari Rp. 80.000.000,00 tidak dikenakan BPHTB, capaian target tersebut sebagaimana dalam Gambar 6.3 di bawah ini:

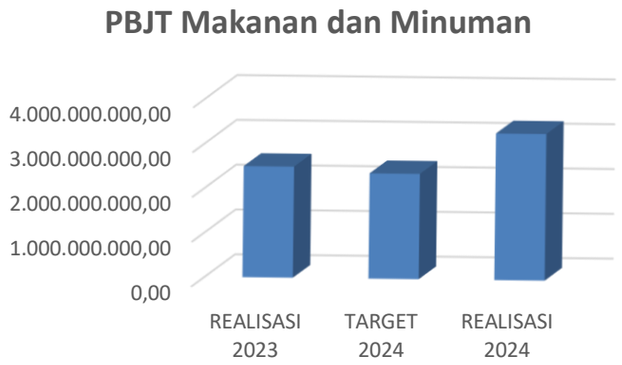


Gambar 6.3 Pajak BPHTB

Selain 3 (tiga) Jenis pajak tersebut di atas dapat mencapai target yang ditetapkan, bahkan terdapat 3 (tiga) jenis pajak yang pencapaiannya melebihi 100% dari yang ditargetkan yaitu:

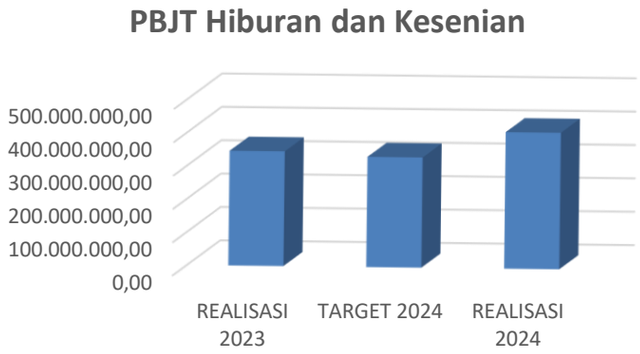
1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman dengan capaian target sebesar 140% dan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 32,99% kenaikan yang signifikan ini salah satunya karena adanya ekstensifikasi potensi pajak melalui kegiatan pendataan dan pendaftaran objek baru, capaian target tersebut sebagaimana dalam Gambar 6.4 di bawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id



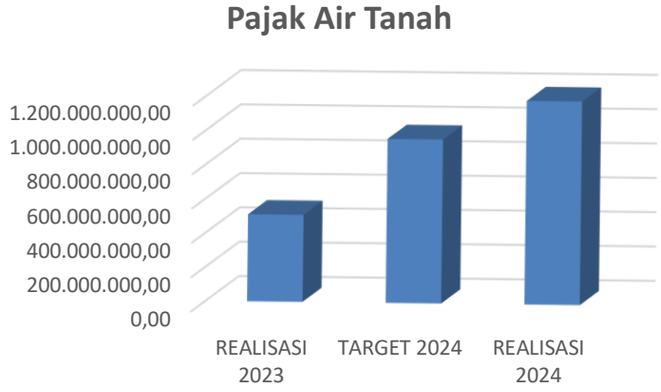
Gambar 6.4 PBJT Makanan dan Minuman

2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Hiburan dan Kesenian dengan capaian target sebesar 124% dan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 19,02% kenaikan yang terjadi salah satunya karena adanya ekstensifikasi potensi pajak melalui kegiatan pendataan dan pendaftaran objek baru, capaian target tersebut sebagaimana dalam Gambar 6.5 di bawah ini:



Gambar 6.5 PBJT Hiburan dan Kesenian

3) Pajak Air Tanah dengan capaian target sebesar 159% dan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 200% kenaikan yang signifikan ini karena adanya perubahan tarif yang dikenakan yaitu dari 5% menjadi 15% dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, capaian target tersebut sebagaimana dalam Gambar 6.6 di bawah ini:

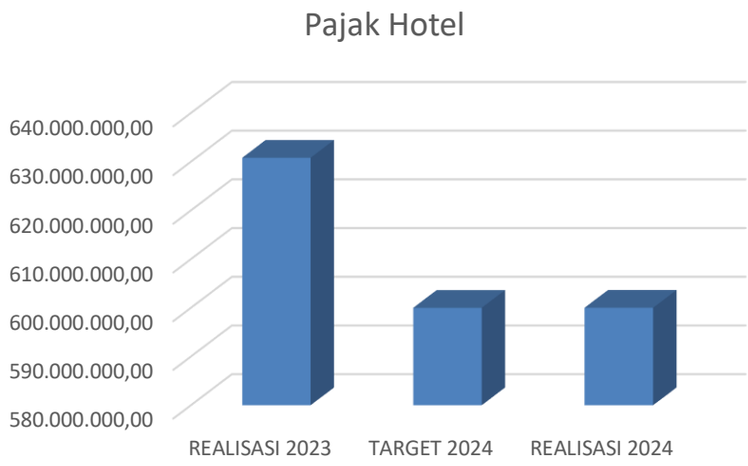


Gambar 6.6 Pajak Air Tanah

https://jdih.pemalangkab.go.id

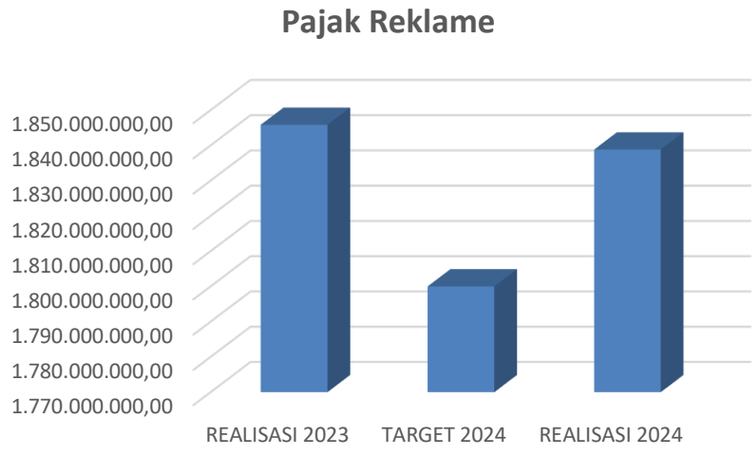
Sedangkan untuk Jenis pajak lainnya dapat mencapai target, dengan tingkat realisasi sebagai berikut:

1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Perhotelan dengan capaian target sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,88%, dengan capaian target tersebut sebagaimana dalam Gambar 6.7 di bawah ini:



Gambar 6.7 Pajak Hotel

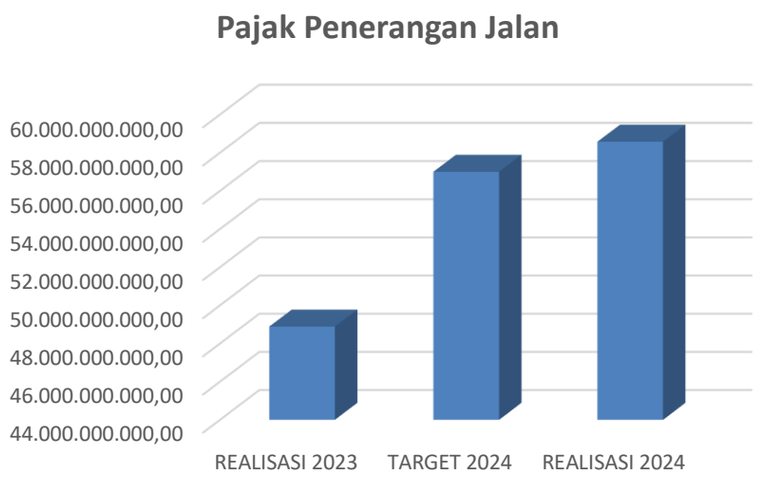
2) Pajak Reklame dengan capaian target sebesar 102% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan 0,38% dengan capaian target tersebut sebagaimana dalam Gambar 6.8 di bawah ini:



Gambar 6.8 Pajak Reklame

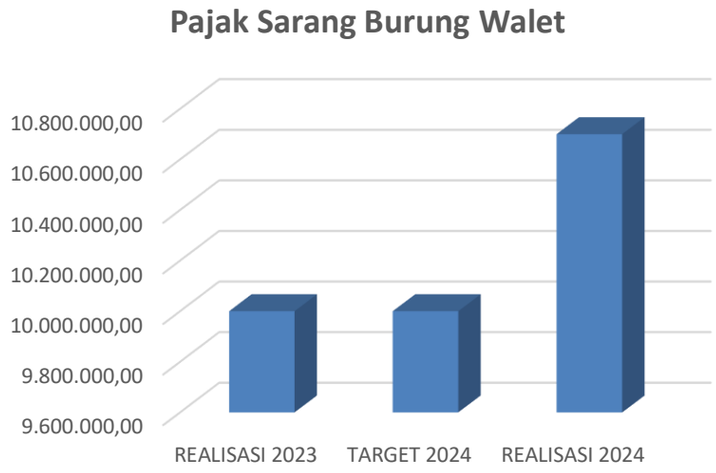
3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik dengan capaian target sebesar 103% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 20 %, kenaikan tersebut karena adanya kenaikan tarif dari 9% menjadi 10%, capaian target untuk pajak barang tertentu tenaga listrik sebagaimana dalam Gambar 6.9 di bawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id



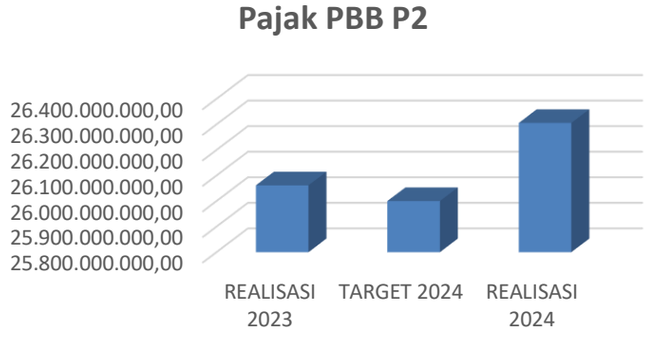
Gambar 6.9 Pajak Penerangan Jalan

4) Pajak Sarang Burung Walet dengan capaian target sebesar 107% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 7% dengan capaian target tersebut sebagaimana dalam Gambar 6.10 di bawah ini:



Gambar 6.10 Pajak Sarang Burung Walet

5) Pajak PBB-P2 dengan capaian target sebesar 101% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,94% dengan capaian target tersebut sebagaimana dalam Gambar 6.11 di bawah ini:



Gambar 6.11 Pajak PBB P2

https://jdih.pemalangkab.go.id

Meskipun target Pajak PBB-P2 tahun 2024 dapat tercapai namun jika dibandingkan dengan jumlah ketetapan pajak daerah yang ditetapkan realisasi untuk pajak PBB-P2 masih kurang dari 80%, hal ini salah satunya diakibatkan kualitas data PBB-P2 yang belum baik, karena sejak mendapatkan limpahan data dari Pemerintahan Pusat pada tahun 2012, pemutahiran data PBB-P2 hanya dilakukan sebatas untuk objek-objek baru. Data tingkat realisasi PBB-P2 terhadap Baku Ketetapan Pajak dari tahun 2012 – 2024 disajikan secara lengkap pada Tabel 6.5 sebagai berikut:

Tabel 6.5
Realisasi PBB-P2 dibandingkan dengan Baku Ketetapan Pajak PBB-P2
Tahun 2012-2024

	Baku Ketetapan		Realisasi		
Tahun Pajak	SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	%
2012	646.971	19.233.548.803	5.259	751.210.825	3,91
2013	647.525	16.991.517.003	508.996	13.063.080.095	76,88
2014	651.995	17.075.584.294	524.677	13.397.866.622	78,46
2015	644.232	17.757.788.230	497.663	13.429.321.405	75,62
2016	666.679	18.066.931.576	531.580	14.189.321.876	78,54
2017	672.277	18.004.687.499	548.523	14.412.396.411	80,05
2018	671.519	21.503.004.911	542.439	17.079.270.847	79,43
2019	688.786	25.751.048.704	568.486	21.487.220.616	83,44
2020	705.098	25.815.509.982	536.558	20.404.211.881	79,04
2021	713.116	25.866.576.761	561.526	20.522.108.859	79,34
2022	722.791	29.623.333.565	574.429	23.158.172.665	78,18
2023	730.471	31.369.152.311	563.266	23.928.412.092	76,28
2024	738.392	33.052.453.398	515.629	23.693.103.348	71,68

Berdasarkan data diatas dapat diketahui masih tingginya potensi Piutang dari Pajak PBB-P2 tiap tahunnya atau rata-rata piutang pajak PBB-P2 adalah 28% dari Baku Ketetapan yang ditetapkan.

b. Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, beberapa perubahan dari tahun-tahun sebelumnya terkait Retribusi Daerah diantaranya adalah:

1) Pengelompokan Retribusi Daerah menjadi :
   a. Retribusi Jasa Umum
      - pelayanan kesehatan;
      - pelayanan kebersihan;
      - pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
      - pelayanan pasar.
   b. Retribusi Jasa Usaha
      - penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
      - penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
      - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
      - penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
      - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
      - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

- pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- Retribusi.

2) Penghapusan beberapa objek retribusi daerah diantaranya:
a. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
c. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
d. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
e. Retribusi Terminal;
f. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Lain-lain.

Realisasi untuk pendapatan dari retribusi Daerah secara rinci ditampilkan pada Tabel 6.6 sebagai berikut:

Tabel 6.6
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Retribusi	Realisasi 2023 (Rp)	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Umum				
	a. pelayanan kesehatan	16.201.303.131,00	229.500.000.000,00	239.370.082.261,00	(104,30% dari target), *
	b. pelayanan kebersihan	406.555.000,00	418.654.000,00	476.500.000,00	(111,02% dari target) dan (126,36% dari Realisasi Tahun 2023)
	c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	540.965.000,00	552.888.000,00	650.000.000,00	(96,42% dari target) dan (113,36% dari Realisasi Tahun 2023)
	d. Pelayanan Pasar	9.176.760.430,00	11.000.000.000,00	9.340.702.202,00	(84,91% dari target) dan (101,79% dari Realisasi Tahun 2023)
2	Retribusi Jasa Usaha				
	a. Retribusi Pemakaian aset daerah / Pemakaian Kekayaan Daerah	573.461.228,00	555.000.000,00	369.870.117,00	(66,64% dari target) dan (64,50% dari Realisasi Tahun 2023)
	b. Retribusi Tempat Pelelangan	3.530.445.778,00	4.000.000.000,00	2.726.817.826,00	(68,17% dari target) dan (77,24% dari Realisasi Tahun 2023)
	c. Retribusi Rumah Potong Hewan	56.988.000,00	75.000.000,00	78.588.000,00	(104,78% dari target) dan (137,90% dari Realisasi Tahun 2023)
	d. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	1.089.135.550,00	3.050.000.000,00	1.385.171.000,00	(45,42% dari target) dan (127,18% dari Realisasi Tahun 2023)
3	Retribusi Perizinan Tertentu				
	a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.409.127.110,00	3.600.000.000,00	5.928.457.500,00	(164,68% dari target) dan (134,46% dari Realisasi Tahun 2023)
	Total Retribusi Daerah	36.963.121.727,00	252.906.500.000,00	239.370.082.261,00	(94,65% dari target), *

**tidak dapat dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 karena perbedaan struktur pendapatan dengan Tahun 2023*
Sumber: BAPENDA Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 mencapai 94,65% dari target. Pada APBD Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang semua merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah menjadi Pendapatan Retribusi Daerah yaitu pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga jika dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun sebelumnya realisasi pendapatan dari retribusi daerah sebesar 609,28% dari Realisasi Tahun sebelumnya. Jenis retribusi daerah yang dapat mencapai target diantaranya adalah:

1) Retribusi pelayanan Persampahan / kebersihan dengan realisasi sebesar 111,02% dan mengalami kenaikan 26,36% dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.
2) Retribusi Rumah Potong Hewan dengan realisasi sebesar 104,78% dan mengalami kenaikan 37,90% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun sebelumnya
3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan realisasi sebesar 164% dan mengalami kenaikan sebesar 34,46% dibandingkan tahun sebelumnya

Jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target namun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya adalah:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan capaian realisasi sebesar 104,30% namun jika dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 1.477,47% hal ini karena adanya perubahan dari Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang semua merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah menjadi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan capaian sebesar 96,42% dan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 13,36%
3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan capaian sebesar 45,42% namun jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 27,18%

Jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya adalah :

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan capaian sebesar 66,64% dan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 35,5% hal ini dikarenakan adanya aset-aset daerah yang tidak lagi dapat dipungut retribusinya diantaranya Pemakaman dan sedot WC.
2) Retribusi Pasar dengan capaian sebesar 84,91% dan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 1,79% kenaikan ini salah satunya terjadi karena adanya perubahan tarif mendasari peraturan yang ada.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3) Retribusi Tempat Pelelangan dengan capaian sebesar 68,17% dan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 22,76%.

Berdasarkan data realisasi pendapatan Retribusi Daerah dapat diketahui bahwa dari 9 (sembilan) jenis Retribusi Daerah hanya 3 (tiga) retribusi Daerah yang dapat mencapai target yang ditetapkan, beberapa hal yang mempengaruhi capaian realisasi Pendapatan dari Retribusi Daerah diantaranya adalah :

1) Tingkat layanan pengelola Retribusi, tingkat layanan ini sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Retribusi Daerah diantaranya untuk Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha yang merupakan layanan langsung kepada masyarakat, beberapa retribusi daerah tersebut diantaranya adalah; retribusi layanan kesehatan, Retribusi pelayanan Persampahan / kebersihan, Retribusi Pasar, Retribusi parkir tepi jalan dan beberapa Retribusi yang berorientasi pada layanan kepada masyarakat.
2) Dukungan dan Ketersediaan sarana prasarana dalam penyelenggaraan layanan publik penghasil Retribusi Daerah, beberapa jenis retribusi daerah layanan yang diberikan perlu dukungan sarana prasarana yang memadai, khususnya Retribusi Pemakaian aset daerah / Pemakaian Kekayaan Daerah.

Berdasarkan faktor tersebut ketidak tercapaian target Pendapatan Retribusi Daerah adalah karena tidak optimalnya pelayanan yang diberikan karena adanya keterbatasan rendahnya terhadap peningkatan sarana dan prasarana objek retribusi daerah, diantaraya minimnya jumlah alat berat yang dapat dioperasikan karena kondisi alat berat dalam kondisi rusak berat yang tidak segera diperbaiki, kerusakan pada wahana objek wisata widuri, kondisi lingkungan pasar yang kurang nyaman dan beberapa permasalahan lain yang berdampak pada tidak optimalnya layanan yang diberikan pada masyarakat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini bersumber dari bagi hasil atas penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Pemalang pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan ini mencapai 100,00% dari target dan meningkat 8,73% jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 mencapai 110,00% dari target.

6.1.2 Belanja

Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.358.234.874.920,00 atau 92,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.561.944.824.000,00. Tabel 6.7 menjelaskan rincian realisasi belanja Kabupaten Pemalang Tahun anggaran 2024.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 6.7
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja
Kabupaten PemalangTahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	REALISASI 2023 (Rp)	ANGGARAN 2024(Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	**2.539.300.079.432,00**	**3,001,406,468,000.00**	**2,797,563.975.972,00**	**93,21**
I	**Belanja Operasi**	**1.890.948.953.345,00**	**2.367.480.276.291,00**	**2.175.975.811.564,00**	**91,91**
1	Belanja Pegawai	1.113.196.374.159,00	1.452.801.288.790,00	1.302.143.148.625,00	89,63
2	Belanja Barang dan Jasa	667.795.423.023,00	751.061.378.291,00	714.049.430.646,00	95,07
3	Belanja Hibah	101.019.252.163,00	153.666.629.210,00	150.235.584.293,00	97,77
4	Belanja Bantuan Sosial	8.937.904.000,00	9.950.980.000,00	9.547.648.000,00	95,95
II	**Belanja Modal**	**217.207.125.026,00**	**192.492.047.709,00**	**180.988.417.949,00**	**94,02**
1	Belanja ModalTanah	2.046.604.500,00	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	95,63
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.599.632.595,00	73.645.018.098,00	68.867.746.899,00	93,51
3	Belanja ModalGedung dan Bangunan	47.732.039.343,00	54.414.402.986,00	47.292.557.157,00	86,91
4	Belanja Modal Jalan,Jaringan,danIrigasi	54.538.776.430,00	42.886.187.880,00	41.979.833.338,00	97,89
5	Belanja Modal AsetTetap Lainnya	22.290.072.158,00	16.332.688.745,00	17.866.133.555,00	109,39
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	2.913.750.000,00	2.782.571.000,00	
III	**Belanja TidakTerduga**	**427.605.701,00**	**1.972.500.000,00**	**1.266.502.459,00**	**64,21**
1	Belanja TidakTerduga	427.605.701,00	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	64,21
IV	**Belanja Transfer**	**430.716.395.360,00**	**439.461.644.000,00**	**439.333.244.000,00**	**99,97**
1	Belanja Bagi Hasil	15.047.084.900,00	14.681.180.000,00	14.681.180.000,00	100,00
2	Belanja BantuanKeuangan	415.669.310.460,00	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	99,97

Sumber: BPKAD Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2024 (sebelum diaudit BPK RI)

Realisasi belanja tersebut diatas digunakan untuk membiayai 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 8 (delapan) urusan pemerintahan fungsi penunjang

6.1.3 Pembiayaan Daerah

6.1.3.1 Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan dapat dilihat pada Tabel 6.8 berikut:

Tabel 6.8
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN %
I	**PENERIMAAN**	**208.539.214.000,00**	**200.944.214.155,00**	**96,36**
1	SiLPA	160.944.214.000,00	159.517.643.992,00	99,11
2	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	41.426.570.163,00	103,573
3	Penerimaan Kembali Piutang	7.595.000.000,00	0,00	0,00
II	**PENGELUARAN**	**14.500.000.000,00**	**14.500.000.000,00**	**100,00**
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Daerah	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**194.039.214.000,00**	**186.444.214.155,00**	**96,09**
III	**SiLPA TahunBerkenaan**	**0,00**	**144.470.788.831,00**	

Sumber: BPKAD Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pemalang periode Tahun Anggaran 2024 (sebelum diaudit BPK RI)

Realisasi pembiayaan yang terdiri dari penerimaan daerah dengan realisasi sebesar Rp200.944.214.155,00 tercapai 96,36% dan pengeluaran pembiayaan dengan realisasi sebesar Rp14.500.000.000,00 tercapai 100,00%, sehingga pembiayaan netonya sebesar Rp186,444,214,155,00. Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun berkenaan sebesar Rp144.470.788.831,00.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

6.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah

1. Permasalahan

   Secara umum kondisi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan 4,16% jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022. Meskipun demikian adanya Jenis Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat mencapai target hal ini karena masih terdapat beberapa permasalahan pada pengelolaan pendapatan Pajak dan Retribusi daerah, diantaranya:

   a. Pengembangan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang masih memerlukan optimalisasi guna implementasi di lapangan baik pada aspek regulasi maupun aspek SDM;
   b. Regulasi pajak dan retribusi harus selalu *update d*isesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi maupun nilai ekonomi terkini;
   c. Pendataan potensi pajak dan retribusi daerah yang belum optimal;
   d. Belum seluruh retribusi daerah dikelola secara elektronik dalam pemungutannya.

2. Solusi

   Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Pemalang masih menetapkan kebijakan relaksasi pajak, yaitu berupa pemberian keringanan/pengurangan pajak dan pembebasan denda PBB-P2. Hal ini merupakan strategi untuk menarik wajib pajak melunasi kewajiban pajak yang belum dibayarkan pada masa sebelumnya. Kemudian untuk memecahkan permasalahan yang secara lebih spesifik diidentifikasikan dan dilaksanakan upaya, antara lain:

   a. Mengembangkan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah guna mendukung pencapaian target;
   b. Menetapkan regulasi sebagai dasar pengelolaan/penghitungan pajak dan retribusi senantiasa di-*update* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi maupun nilai ekonomi terkini. Pada Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
   c. Melaksanakan kegiatan pendataan obyek pajak dan retribusi secara intensif dalam upaya optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi;
   d. Secara bertahap program retribusi elektronik daerah telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan elektronifikasi untuk proses pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (tambahan), Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Terminal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6.2.2 Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

1. Permasalahan

   Permasalahan utama belanja daerah pada tahun anggaran 2023 yaitu:

   a. Besarnya anggaran dana transfer dari pusat berupa DAU tidak di ikuti dengan besarnya pengeluaran dalam bentuk belanja modal, karena DAU lebih didominasi oleh belanja pegawai yang berarti bahwa pada umumnya pemerintah daerah masih berkonsentrasi kepada masalah administrasi, sehingga belum efektif dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini salah satunya tercermin dalam realisasi DAU yang sebagian besar digunakan untuk belanja birokrasi;

   b. Kendala yang umumnya dihadapi daerah dalam pelaksanaan belanja daerah tidak tepat waktu antara lain terjadinya gagal lelang, sehingga pemerintah daerah harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian *output*;

   c. Permasalahan/penyebab kinerja realisasi belanja yang tidak optimal disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya blokir anggaran khususnya *automatic adjustment* yang mengakibatkan kegiatan belum dapat dilaksanakan. Kedua, pedoman umum/petunjuk teknis dan SK Pengelola Keuangan belum terbit. ketiga, belum sepenuhnya diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi dieksekusi di awal tahun, terutama kegiatan yang terkait dengan operasional perkantoran seperti perjalanan dinas, honorarium, serta pengadaan yang bersifat langsung. Keempat, adanya kecenderungan *wait and see* dalam melakukan kegiatan dan pembayaran untuk mengantisipasi perubahan kebijakan;

   d. Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Solusi

   a. Pemerintah melakukan reformasi kebijakan terkait pemberian DAU, dari yang semula hanya bersifat *block grant* menjadi bersifat kombinasi antara *block grant* dan *specific grant.* Pemberian DAU yang bersifat kombinasi ini tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU HKPD yang mengatur bahwa “Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya”;

https://jdih.pemalangkab.go.id

b. Pelaksanaan lelang dini sesuai *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Mendagri, Kepala LKPP, Kepala BPKP No. 027/6692/SJ, 2 Tahun 2021 dan MoU-8/K/D3/2021 tentang Pengadaan Dini atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah daerah dapat mempercepat lelang atau pelaksanaan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa sudah bisa dimulai pada bulan Juli/Agustus tahun sebelumnya, saat KUA-PPAS sudah ada/ sebelum Perda tentang APBD. Hal ini sesuai amanah Pasal 50 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Hal ini terkait dengan serapan anggaran yang menjadi masalah setiap tahun. bahkan pemenangnya bisa ditetapkan tahun sebelumnya. Hanya kontraknya dilakukan awal tahun berjalan. sehingga begitu awal tahun kegiatan bisa langsung dilaksanakan. Ketika terjadi gagal lelang, putus kontrak, penundaan bayar, maupun kurang bayar, maka diberikan kesempatan 50 hari kalender sampai dengan pekerjaan selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sehingga ketika terjadi gagal lelang, masih ada waktu untuk proses lelang ulang dan cukup waktu dalam pelaksanaan pekerjaan;

c. Strategi optimalisasi kinerja realisasi belanja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, mengidentifikasi dan melakukan percepatan kegiatan yang dapat segera dilakukan serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran;

d. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pada APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 dengan total sebesar Rp40.000.000.000,00 dari Pengeluaran Pembiayaan Dana Cadangan yang akan direalisasikan sebagai Belanja Hibah Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten melalui alokasi penganggaran SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik pada APBD Tahun Anggaran 2024 dalam 1 (satu) tahap pencairan pada bulan Februari tahun 2024. Namun dengan kapasitas keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Pemalang hanya dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.100.000.000,00 dalam Belanja Hibah Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6.2.3 Permasalahan dan Solusi Pembiayaan Daerah

1. Permasalahan

   Permasalahan utama pembiayaan, yaitu sulit melakukan proyeksi terhadap anggaran sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berdasarkan kapasitas riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan karena:

   a. Harus melakukan penghitungan perkiraan pelampauan atau tidak terpenuhinya target penerimaan pendapatan, baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah,
   b. Harus melakukan perkiraan tentang besaran sisa belanja sebagai akibat penghematan/efisiensi belanja atau akibat- akibat lainnya.

2. Solusi

   Setelah SiLPA tahun 2022 diketahui yang didasarkan pada LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022, maka diperlukan pencermatan terhadap:

   a. SiLPA yang bersifat mengikat/terarah dan harus dianggarkan kembali sesuai peruntukkan semula; dan
   b. SiLPA yang diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berjalan, khususnya terhadap SiLPA yang bersumber dana dari dana transfer dari Pusat dan Provinsi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB VII
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.1. UMUM

a. Dasar Hukum dan Tempat Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Pemalang berdomisili di Jalan Surohadikusumo No.1 Pemalang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 dijelaskan bahwa Pemalang ditetapkan sebagai salah satu daerah kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah.

b. Pejabat Eksekutif

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2024 merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 yang diangkat untuk masa jabatan 2021-2024 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3-4029 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Pemalang dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Pemalang Provinsi Jawa Tengah, Mansur Hidayat, ST secara resmi dan definitif ditetapkan sebagai Bupati Pemalang untuk sisa masa jabatan 2021-2024 terhitung sejak tanggal pelantikan, menggantikan Mukti Agung Wibowo, ST, M,Si yang diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3580 Tahun 2023 tanggal 23 Agustus 2023. Memperhatikan bahwa sisa masa jabatan yang tidak lama lagi, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak melakukan pengangkatan Wakil Kepala Daerah untuk sisa periode masa jabatan 2021-2024.

c. Pejabat Legislatif

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2024 merupakan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang Periode 2024-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang
Periode 2024 - 2029

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Drs. Martono, MA	Ketua DPRD	2024-2029
2	Slamet Ramuji	Wakil Ketua DPRD	2019-2024
3	HM. Wardoyo, SE	Wakil Ketua DPRD	2019-2024
4	Aris Ismail, A.Md	Wakil Ketua DPRD	2019-2024

7.1.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, terdapat rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah: ***"Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni."*** Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan visi Kabupaten Pemalang tersebut, mengandung penjelasan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id

1. **Adil**; merupakan keadaan/ kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia, sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup. Politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. **Makmur;** merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.
3. **Agamis;** merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.
4. **Ngangeni;** merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang aman, tenteram dan damai. Didukung modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung, sehingga siapapun merasa betah saat berada di Pemalang dan kangen ingin ke Pemalang saat berada di luar wilayah Pemalang.

7.1.2. Misi

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Untuk mencapai visi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Untuk mengimplementasikan visi dan misinya, Pemerintah Kabupaten Pemalang menentukan langkah-langkah kebijakan pembangunan daerah yang bersifat lebih operasional dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, Tabel 7.2 menjelaskan rumusan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 7.2
Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Program
Misi 1: Mewujudkan rasa aman, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat		
Meningkatkan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari: a. ancaman politik; b. ancaman bencana; dan c. ancaman ketertiban dan ketentraman perlindungan masyarakat.	• Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	• Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	• Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asisten
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		Program Perizinan Penggunaan Arsip
	• Meningkatnya Birokrasi Kapabel	Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	• Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Misi 3: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong		
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	• Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	• Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	• Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Program Perlindungan Khusus Anak
Meningkatkan nilai-nilai budaya, toleransi, dan karakter bangsa	• Meningkatnya pelestarian budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
	• Meningkatnya budaya literasi di masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	• Meningkatnya solidaritas keagamaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial	• Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Misi 4 : Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan		
Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	• Meningkatnya kemandirian desa	Program penataan desa
		Program peningkatan kerjasama desa
		Program administrasi pemerintahan desa
		Program pemberdayaaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
	• Terwujudnya pengembangan Kota	Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Didukung: Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Misi 5 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal		
Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dalam upaya kemandirian ekonomi daerah	• Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tujuan	Sasaran	Program
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	• Meningkatnya realisasi penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Progam Pelayanan Penanaman Modal
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Misi 6 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan		
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	• Meningkatnya cakupan universal akses	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	• Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayaran
	• Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	• Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Program Penatagunaan Tanah
	• Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan

https://jdih.pemalangkab.go.id

7.1.3. Program Unggulan

Program unggulan Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 merupakan program yang dirancang oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam lima tahun masa jabatan. Program ini bukan termasuk dalam program nasional, tetapi merupakan implementasi dari misi. Program unggulan ditetapkan dalam 4 (empat) program yaitu DEWI (Desa Wisata), DEDI (Desa Digital), DESI (Desa Sinergi) dan KOIN (Kota Industri). Program unggulan ini diharapkan dapat menjadi upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

1. Pengembangan Desa Wisata (DEWI), merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

   Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata dengan:

   a. Menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola desa wisata sebanyak 217 peserta, yang dilaksanakan di:
      1) Desa Wisata Simpur yang diikuti oleh 35 orang pemandu ekowisata desa wisata;
      2) Desa Wisata Sikasur yang diikuti 36 orang pemandu ekowisata desa wisata;
      3) Desa Penggarit yang diikuti oleh 46 orang pemandu ekowisata desa wisata;
      4) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang yang diikuti oleh 36 orang pengelola desa wisata;
      5) Desa Wisata Nyalembeng Bukit Tangkeban yang diikuti oleh 64 pelaku usaha pariwisata *homestay*.
   b. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) paket wisata untuk desa wisata dan daya tarik wisata sebanyak 50 peserta.
   c. Menyelenggarakan pembinaan dan rapat koordinasi (rakor) pariwisata sebanyak 36 desa wisata.
   d. Menyelenggarakan forum komunikasi desa wisata tingkat Provinsi Jawa Tengah di Desa Sikasur sebanyak 170 peserta dari kota/kabupaten se jawa tengah.
   e. Menyelenggarakan forum komunikasi desa wisata tingkat Kabupaten Pemalang.

   Selain itu, di Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pemalang juga berpartisipasi dalam kegiatan wisata dan menyelenggarakan beberapa kegiatan yaitu:

   a. Mengikuti jambore Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kudus yang di wakili oleh Desa Wisata Sikasur.
   b. Mengikuti gelar desa wisata di Kabupaten Purworejo di wakili oleh Desa Wisata Penggarit.

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. Berpartisipasi dalam pameran pada Festival Gunung Slamet di Desa Wisata Serang Kabupaten Purbalingga.
d. Menyelenggarakan Festival Wong Gunung di desa wisata kawasan Kecamatan Pulosari.
e. Melakukan pengambilan video / foto dalam rangka promosi pariwisata di desa wisata dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah bersama Panji Sang Petualang.

Melalui Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pemalang mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk pengembangan desa wisata yang disalurkan kepada Desa Wisata Penggarit dan Desa Wisata Majalangu.

2. Pengembangan Desa Digital (DEDI), merupakan program pengembangan melalui Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (SIDEKEM) yang terintegrasi melalui penyajian data potensi desa dan pemanfaatannya sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan, pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan melalui teknologi digital dan internet yang didukung penguatan keamanan sistem informasi. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan beberapa kegiatan yaitu:
   a. Pembinaan teknis bagi admin desa guna meningkatkan kualitas perencanaan Desa dan Kabupaten dengan penyediaan data desa yang terdigitalisasi dan mutakhir yang meliputi:
      1) Monitoring penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara digital dengan menyediakan fitur menu kelembagaan di Sistem Informasi Desa dan Kawasan Kabupaten Pemalang "(Sidekem)", Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Lembaga Ekonomi Desa (LED).
      2) Informasi dan dokumentasi, yang meliputi surat menyurat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan infografis APBDesa.
      3) Kesehatan, berupa ketersediaan data dan optimalisasi data kesehatan berbasis posyandu (*standart antropometri* anak dan Kartu Menuju Sehat), ketersediaan data baik pada Posyandu Remaja maupun Posyandu Lansia.
   b. Fasilitasi Pemberdayaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa melalui *platform* media informasi desa (*Website* Desa dan Sosial Media Desa) sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi untuk percepatan informasi kepada masyarakat desa secara cepat dengan menyediakan:
      1) *Registran domain* 120 *desa.id* dari 212 desa.
      2) 55 akun *twitter* desa dari 212 desa.
      3) 36 akun *facebook* dan 19 *fanpage.*
      4) 76 akun *instagram* desa dari 212 DesaPengembangan.

   Data informasi desa diatas dapat dilihat pada buku III (lampiran LKPJ Bupati Pemalang ATA 2024) dengan tautan https://s.id/Buku_III_Lampiran_LKPJATA2024.

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Pengembangan Desa Sinergi (DESI), merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten, khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.
   Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pemalang telah membentuk Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang, dimana BKAD ini memfasilitasi Kerja Sama di Bidang:
   a. Bidang Pemerintahan Desa;
   b. Bidang Pembangunan Desa;
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

   Selain itu, dalam Program Desa Sinergi telah melakukan monitoring di beberapa Wilayah Kawasan seperti:
   1). Kawasan Melati dan Bandeng di Kecamatan Ulujami;
   2). Kawasan Agrobisnis Kopi di Kecamatan Pulosari;
   3). Kawasan Nanas di Kecamatan Belik; dan
   4). Kawasan Gedange di Kecamatan Bodeh.
4. Pengembangan Kota Industri (KOIN), merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.
   Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan pelatihan diversifikasi produk industri hasil tembakau (pelatihan *blending* dan *grading* bagi pelaku usaha industri hasil tembakau dengan peserta sejumlah 38 orang dan pelatihan melinting rokok bagi tenaga kerja industri hasil tembakau di Kabupaten Pemalang dengan peserta sejumlah 25 orang dari PR Rokok Solehudin Desa Gombong Kecamatan Belik), Pemerintah Kabupaten Pemalang juga melakukan fasilitasi merek sebanyak 50 Industri Kecil Menengah (IKM), fasilitasi merek juga diberikan dari dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 IKM, dan fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk IKM garam konsumsi beriodium dari Kementerian Perindustrian sebanyak 1 ikm di Desa Gombong Kecamatan Belik. Selain kegiatan – kegiatan diatas, juga dilakukan Bimbingan Teknis Pelaporan SIINas dengan peserta 20 IKM dan Sosialisasi serta Fasilitasi Sertifikasi TKDN dengan peserta 25 IKM. Selain itu melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan kegiatan terkait pelaksanaan Program Unggulan Kota Industri, antara lain:
   a. Menyusun buku kajian peluang investasi di Kabupaten Pemalang dengan mengangkat tema Pembangunan Industri Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Solar, penyusunan kajian ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen proposal proyek investasi Pembangunan Industri Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Solar sebagai

https://jdih.pemalangkab.go.id

persyaratan dalam mengikuti *Investment Challenge* (IC) yang diselenggarakan oleh KERIS JATENG serta sebagai bahan informasi kepada pasar (investor) tentang peluang investasi Pembangunan Industri Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Solar.

b. Pemberian insentif penanaman modal sesuai dengan Perda Kabupaten Pemalang No 9 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Namun pada tahun 2024 belum melaksanakan Pemberian Fasilitas / Insentif Penanaman Modal kepada perusahaan manapun. Pemberian insentif hanya sebatas pendampingan dan kemudahan persyaratan investasi.
c. Mengikuti kegiatan pameran investasi yang diselenggarakan di Jogja City Mall dengan tema pameran "*Indonesia Tourism And Trade Invesment Expo 2024*" pada bulan April 2024 dan yang diselenggarakan di Solo Square Mall Surakarta pada Oktober 2024. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenalkan investasi unggulan yang ada di Kabupaten Pemalang dan untuk menampilkan produk-produk unggulan, olahan makanan hasil UMKM.
d. Melaksanakan kegiatan *Matchmaking* / temu usaha besar dan kecil yang diselenggarakan di Rest Area Rosalia Indah Ruas Tol Pemalang – Batang KM 219 B.
e. Menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital di sektor perijinan kesehatan, hal ini bertujuan agar proses perijinan semakin mudah dan cepat. Kemudian melaksanakan kegiatan Sijempol (Sistem Jemput perijinan Online) dengan mambuka stand perijinan di kecamatan - kecamatan seperti Kecamatan Randudongkal, Ulujami, Belik, Warungpring, Pulosari dan Comal.

Adapun perbandingan capaian program unggulan DEWI (Desa Wisata), DEDI (Desa Digital), DESI (Desa Sinergi) dan KOIN (Kota Industri) dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 7.3
Perbandingan Capaian Program Unggulan Tahun 2023 dengan 2024

No	Program Unggulan	Capaian 2023	Capaian 2024
1.	DEWI (Desa Wisata)	Melakukan Pembinaan BUMDesa Unit Usaha Pariwisata	Menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola Desa Wisata sebanyak 186 peserta dari 36 Desa wisata, yang terdiri dari: • Pelatihan pemandu ekowisata Desa Wisata di Desa Wisata Simpur sebanyak 36 orang; • Pelatihan pemandu ekowisata Desa Wisata di Desa Penggarit sebanyak 46 Orang; • Pelatihan tata kelola manajemen bagi Pengelola Desa Wisata sebanyak 40 Orang; • Pelatihan *homestay* bagi pelaku usaha pariwisata *homestay* di Desa Wisata Nyalembeng Bukit Tangkeban sebanyak 64 Peserta
		Pendampingan Pelayanan Perizinan berusaha pada sektor pariwisata	Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) paket wisata untuk Desa Wisata dan daya tarik wisata sebanyak 50 peserta
		Melakukan penetapan dan evaluasi Desa Wisata sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 556/116/Tahun 2023	Menyelenggarakan Pembinaan dan rakor Pariwisata sebanyak 36 desa Wisata

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Unggulan	Capaian 2023	Capaian 2024
		Menginisiasi Pembuatan Peraturan Daerah Pemberdayaan Desa Wisata dan Pendampingan Desa Wisata	Menyelenggarakan forum komunikasi Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Desa Sikasur sebanyak 170 Peserta dari Kota/Kab se Jawa Tengah
		Menyelenggarakan Pelatihan Olahan Makanan untuk para pelaku ekonomi kreatif lokal	Menyelenggarakan forum komunikasi Desa Wisata tingkat Kabupaten Pemalang
		Membuat *Detail Engineering Design* (DED) untuk daya tarik wisata di Desa Watukumpul	Mengikuti Jambore Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kudus yang di wakili oleh desa Wisata Sikasur
		Memberikan Hibah Sarana dan Prasarana Sekretariat Pengelola Desa Wisata di Desa Banyumudal, Mendelem, Bulakan dan Wlsnu	Mengikuti gelar Desa Wisata di Kabupaten Purworejo di wakili oleh Desa Wisata Penggarit
			Berpartisipasi dalam Pameran pada Festival Gunung Slamet di Desa Wisata Serang Kabupaten Purbalingga
			Menyelenggarakan Festival Wong Gunung di Desa Wisata Kawasan Kecamatan Pulosari
			Melakukan pengambilan video / foto dalam rangka promosi pariwisata di Desa Wisata dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah bersama Panji Sang Petualang
2.	DEDI (Desa Digital)	Pembinaan Teknis bagi admin desa guna meningkatkan kualitas perencanaan Desa dan Kabupaten dengan penyediaan data desa yang terdigitalisasi dan mutakhir meliputi: • Monitoring penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara digital dengan menyediakan fitur menu kelembagaan di SIDEKEM, Pemdes, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM), • Informasi dan dokumentasi, yang meliputi surat menyurat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan infografis APBDesa, • Kesehatan, berupa ketersediaan data dan optimalisasi data kesehatan berbasis posyandu (standart antropometri anak dan Kartu Menuju Sehat), ketersediaan data baik pada Posyandu Remaja maupun Posyandu Lansia	Pembinaan Teknis bagi admin desa guna meningkatkan kualitas perencanaan Desa dan Kabupaten dengan penyediaan data desa yang terdigitalisasi dan mutakhir meliputi: • Monitoring penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara digital dengan menyediakan fitur menu kelembagaan di SIDEKEM, Pemdes, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM), • Informasi dan dokumentasi, yang meliputi surat menyurat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan infografis APBDesa, • Kesehatan, berupa ketersediaan data dan optimalisasi data kesehatan berbasis posyandu (standart antropometri anak dan Kartu Menuju Sehat), ketersediaan data baik pada Posyandu Remaja maupun Posyandu Lansia
		Fasilitasi Pemberdayaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa melalui platform media informasi desa (Website Desa dan Sosial Media Desa) sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi untuk percepatan informasi kepada masyarakat desa secara cepat dengan menyediakan: • Registran domain 123 desa.id dari 212 desa, • 202 akun twitter desa dari 212 desa • 55 akun facebook dan 19 fanpage • 26 Chanel Official Youtube desa	Fasilitasi Pemberdayaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa melalui platform media informasi desa (Website Desa dan Sosial Media Desa) sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi untuk percepatan informasi kepada masyarakat desa secara cepat dengan menyediakan: • Registran domain 123 desa.id dari 212 desa, • 202 akun twitter desa dari 212 desa • 55 akun facebook dan 19 fanpage • 63 akun *instagram* desa dari 212 Desa • 26 Chanel Official Youtube desa
		Memasang infrastruktur telekomunikasi pada titik blankspot (Desa Wisata) sebanyak 8 (delapan) titik	
		Memasang akses internet gratis di 12 titik Kantor Kepala Desa	

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Program Unggulan	Capaian 2023	Capaian 2024
3.	DESI (Desa Sinergi)	Kegiatan Monev bersama Perangkat Daerah terkait perkembangan Kawasan Perdesaan (Kecamatan Belik, Pulosari, Bodeh, dan Ulujami)	membentuk Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang, dimana BKAD ini memfasilitasi Kerja Sama di Bidang: • Bidang Pemerintahan Desa • Bidang Pembangunan Desa • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa • Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Fasilitasi dan pendampingan terhadap pembentukan kawasan perdesaan Wilayah Kecamatan Pemalang, Petarukan dan Kecamatan yang lainnya	Monitoring terhadap beberapa Wilayah Kawasan seperti: • Kawasan Melati dan Bandeng di Kecamatan Ulujami • Kawasan Agrobisnis Kopi di Kecamatan Pulosari • Kawasan Nanas di Kecamatan Belik, dan • Kawasan Gedange di Kecamatan Bodeh
4.	KOIN (Kota Industri)	Melaksanakan Pemutakiran data dan informasi terkait profil potensi, peluang, dan daya dukung investasi melalui penyusunan buku kajian peluang investasi di kabupaten pemalang dengan mengangkat tema industri pengalengan nanas	Melaksanakan pelatihan diversifikasi produk industri hasil tembakau (pelatihan *blanding* dan *grading* bagi pelaku usaha industri hasil tembakau dengan peserta sejumlah 38 orang
		Melaksanakan kegiatan lain yaitu temu bisnis/*matchmaking*	Pelatihan melinting rokok bagi tenaga kerja industri hasil tembakau di Kabupaten Pemalang dengan peserta sejumlah 25 orang
		Memberikan fasilitasi sertifikasi merek untuk 20 Industri Kecil Menengah (IKM)	Fasilitasi merek sebanyak 50 Industri Kecil Menengah (IKM) fasilitasi merek juga diberikan dari dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 IKM, dan fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk IKM garam konsumsi beriodium dari Kementerian Perindustrian sebanyak 1 IKM
		Melaksanakan kegiatan pemanfaatan teknologi industri (digitalisasi industri) untuk sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi industri kecil dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi sertifikasi TKDN	Melakukan Bimbingan Teknis Pelaporan SIINas dengan peserta 20 IKM
		Melakukan verifikasi teknis dan lapangan industri pada 60 perusahaan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Sosialisasi serta Fasilitasi Sertifikasi TKDN dengan peserta 25 IKM
			Menyusun buku kajian peluang investasi di kabupaten pemalang dengan mengangkat tema Pembangunan Industri Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Solar
			Pemberian insentif pendampingan dan kemudahan persyaratan investasi
			Mengikuti kegiatan pameran investasi yang diselenggarakan di Jogja City Mall dengan tema pameran "*Indonesia Tourism And Trade Invesment Expo 2024*" pada bulan April 2024 dan yang diselenggarakan di Solo Square Mall Surakarta pada Oktober 2024
			Melaksanakan kegiatan *Matchmaking* / temu usaha besar dan kecil yang diselenggarakan di Rest Area Rosalia Indah Ruas Tol Pemalang – Batang KM 219 B
			Menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital di sektor perijinan kesehatan
			Melaksanakan kegiatan Sijempol (Sistem Jemput perijinan Online) dengan mambuka stand perijinan di kecamatan - kecamatan seperti Kecamatan Randudongkal, Ulujami, Belik, Warungpring, Pulosari dan Comal

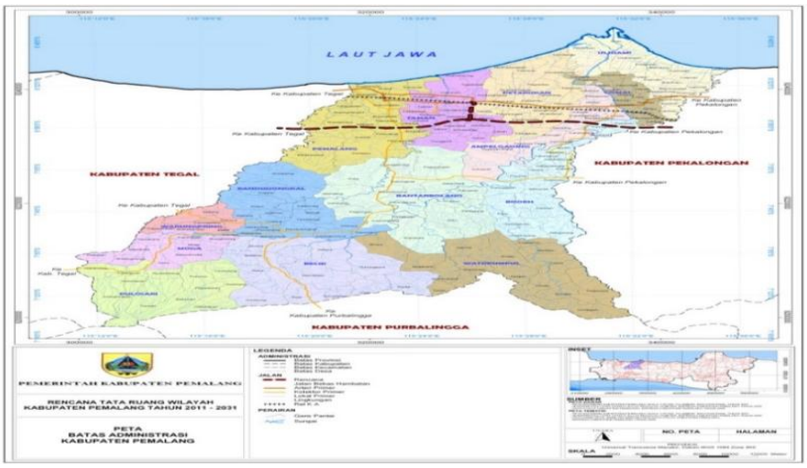
https://jdih.pemalangkab.go.id

7.2. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur transportasi pantai utara (pantura) Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 6^0 52' 30" dan 7^0 20" 11" lintang selatan (LS) dan antara 109^0 17" 30" - 109^0 40" 30" bujur timur (BT). Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.

Gambar 7.1
Peta Administrasi Kabupaten Pemalang



Sumber : RTRW Kabupaten Pemalang 2018-2038

Kabupaten Pemalang berdasarkan wilayah administratif terdiri dari 14 kecamatan dan 11 kelurahan, serta 212 desa. Sedangkan jumlah dusun/lingkungan yang ada di seluruh desa dan kelurahan adalah 841 yang terdiri dari 6.470 RT dan 1.307 RW.

Wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan topografi berada pada dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Dataran pantai adalah daerah dengan ketinggian 1-5 meter di atas permukaan laut. Dataran ini terdapat di beberapa bagian utara Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dataran rendah adalah daerah dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut dimana daerah ini juga terletak di kawasan utara. Daerah dataran tinggi adalah daerah dengan ketinggian 16-212 meter di atas permukaan laut yang terletak di bagian tengah dan selatan Kabupaten Pemalang. Sedangkan daerah pegunungan adalah daerah dengan ketinggian 213-925 meter di atas permukaan laut yang umumnya terletak di bagian selatan Kabupaten Pemalang.

Dari aspek geologis, jenis tanah di wilayah Kabupaten Pemalang terdiri dari tanah *alluvial, regosol* dan *latosol*. Tanah *alluvial* umumnya terletak di dataran

https://jdih.pemalangkab.go.id

rendah, sedangkan *regosol* adalah batu-batuan pasir dan intermedier yang terdapat di daerah perbukitan sampai pegunungan. Jenis yang terakhir adalah tanah *latasol* yang terdiri dari batu bekuan pasir dan banyak terdapat di daerah bukit sampai pegunungan. Pemanfaatan tanah di Kabupaten Pemalang sebagian besar untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

7.3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Kabupaten Pemalang yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Pemalang selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber utama data kependudukan dan proyeksi yang digunakan adalah berdasarkan sensus penduduk oleh Badan pusat Statistik (BPS) yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, mulai Tahun 1961 sampai dengan 2020.

Berdasarkan data penduduk BPS Kabupaten Pemalang, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 1.541.685 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebesar 780.921 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebesar 760.764 jiwa. Secara berurutan, Tabel 1.3 menjelaskan jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Pemalang per Kecamatan Tahun 2024.

Tabel 7.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Per Kecamatan Tahun 2024

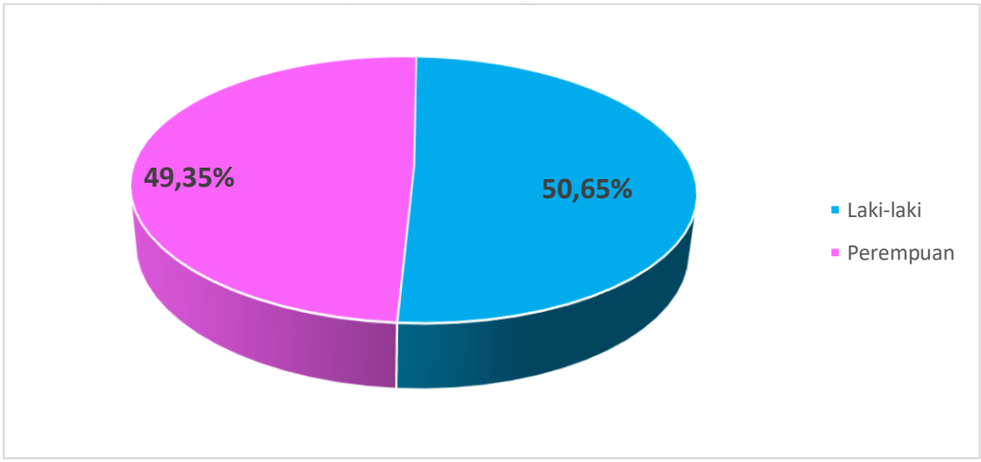
No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Kecamatan Ampelgading	38.920	39.072	77.992
2	Kecamatan Bantarbolang	46.023	44.501	90.704
3	Kecamatan Belik	63.210	60.751	123.961
4	Kecamatan Bodeh	32.917	32.233	65.150
5	Kecamatan Comal	48.559	48.023	96.582
6	Kecamatan Moga	38.719	37.553	76.272
7	Kecamatan Pemalang	106.208	103.871	210.079
8	Kecamatan Petarukan	90.074	88.053	178.127
9	Kecamatan Pulosari	32.373	31.711	64.084
10	Kecamatan Randudongkal	58.491	57.367	115.858
11	Kecamatan Taman	100.200	97.670	197.870
12	Kecamatan Ulujami	60.317	58.773	119.090
13	Kecamatan Watukumpul	41.351	38.858	80.209
14	Kecamatan Warungpring	23.379	22.328	45.707
	Jumlah	**780.921**	**760.764**	**1.541.685**

Sumber: BPS Kab. Pemalang Tahun 2024

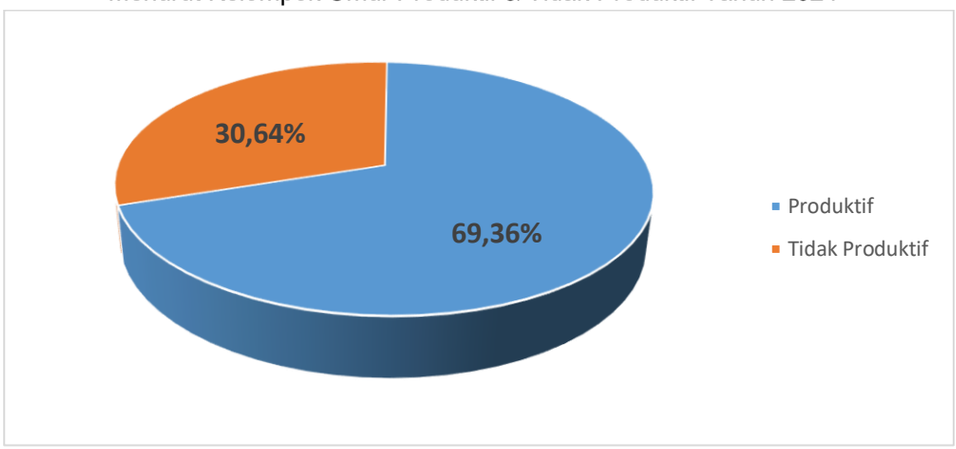
Berdasarkan Tabel 7.4 diatas, komposisi penduduk Kabupaten Pemalang menurut jenis kelamin hampir berimbang. Secara ringkas, proporsi atau persentase penduduk perempuan dan laki-laki masing-masing adalah 49,35% dan 50,65% sebagaimana disajikan pada Gambar 7.2.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 7.1
Komposisi Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024



Gambar 7.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Pemalang
Menurut Kelompok Umur Produktif & Tidak Produktif Tahun 2024



Data persentase pada Gambar 7.3 mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Pemalang mempunyai penduduk dengan usia produktif (15-60 tahun) yang cukup tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa jumlah angkatan kerja untuk Kabupaten Pemalang juga cukup besar.

Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Pemalang yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Pemalang selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber utama data kependudukan dan proyeksi yang digunakan adalah berdasarkan sensus penduduk oleh Badan pusat Statistik (BPS) yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, mulai tahun 1961 sampai dengan 2020.

Berdasarkan data proyeksi penduduk BPS Kabupaten Pemalang, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 1.541.685 jiwa. Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang (berdasarkan kecamatan) dari Tahun 2023 sampai Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 7.5.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Tabel 7.5
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan (Laki-laki dan Perempuan) dari 2023 ke 2024

Kecamatan	Dalam persentase (%)
	2023-2024
Moga	1,18
Warungpring	1,09
Pulosari	0,94
Belik	1,16
Watukumpul	1,41
Bodeh	1,22
Bantarbolang	1,61
Randudongkal	1,19
Pemalang	1,14
Taman	1,37
Petarukan	1,30
Ampelgading	1,10
Comal	0,55
Ulujami	1,12
Rata-rata	1,17

Sumber: BPS Kab. Pemalang Tahun 2024

Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pemalang dari tahun 2023 ke tahun 2024 melampaui dari angka rata-rata proyeksi 1,17%. Berdasarkan Data jumlah penduduk Kabupaten Pemalang Per Kecamatan dan Perbandingan Tahun 2023 ke Tahun 2024, memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pemalang mencapai 0,59%.

Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebanyak 10.873 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 7.724 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 3.149 orang.

a. Jumlah PNS

Jumlah PNS di Kabupaten Pemalang sebanyak 7.724 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.451 orang sedangkan perempuan sebanyak 4.273 orang. Tabel 7.6 adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 4 kategori yaitu jenis kelamin, golongan, pendidikan, dan usia.

Tabel 7.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kategori Tahun 2024

Kategori	Kelompok	Jumlah 2023 (Orang)	Jumlah 2024 (Orang)
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	3.760	3.451
	PEREMPUAN	4.501	4.273
Jumlah		**8.261**	**7.724**
GOLONGAN	Ia	0	0
	Ib	0	0
	Ic	2	2
	Id	104	63

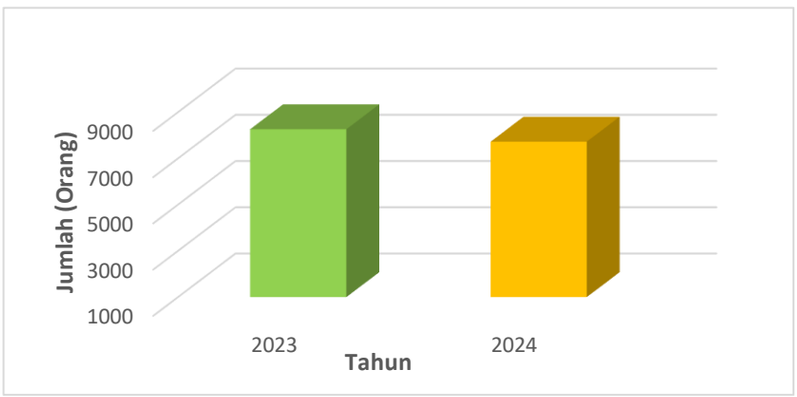
https://jdih.pemalangkab.go.id

Kategori	Kelompok	Jumlah 2023 (Orang)	Jumlah 2024 (Orang)
	IIa	136	151
	IIb	216	148
	IIc	373	353
	IId	464	411
	IIIa	1.106	916
	IIIb	1.624	1461
	IIIc	1.189	1007
	IIId	1.380	1778
	IVa	1.294	421
	IVb	321	835
	IVc	44	176
	IVd	3	2
Jumlah		**8.261**	**7.724**
PENDIDIKAN	SD/sederajat	165	93
	SMP/sederajat	298	229
	SMA/sederajat	1.199	1.009
	D1	12	9
	D2	103	29
	D3	617	584
	D4	89	97
	S1	5.198	5.111
	S2	577	559
	S3	3	4
Jumlah		**8.261**	**7.724**
USIA	< = 25 th	49	14
	26-29 th	239	108
	30-34 th	401	348
	35-39 th	984	587
	40-44 th	1.408	1.193
	45-49 th	1.429	1.449
	> = 50 th	4.350	4.025
Jumlah		**8.261**	**7.724**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang Tahun 2024

Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sejumlah 537 orang, dapat dilihat pada Gambar 7.3 dibawah.

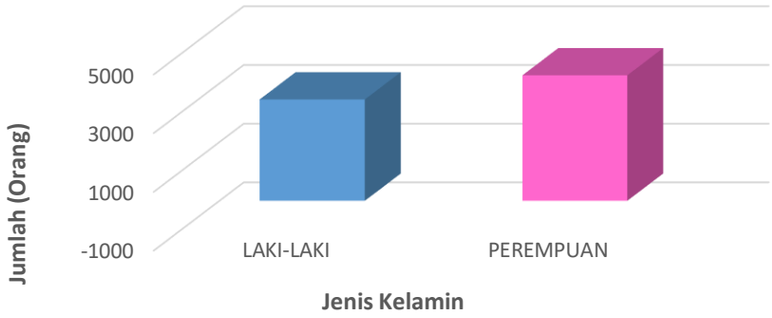
Gambar 7.3
Perbandingan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan Tahun 2024



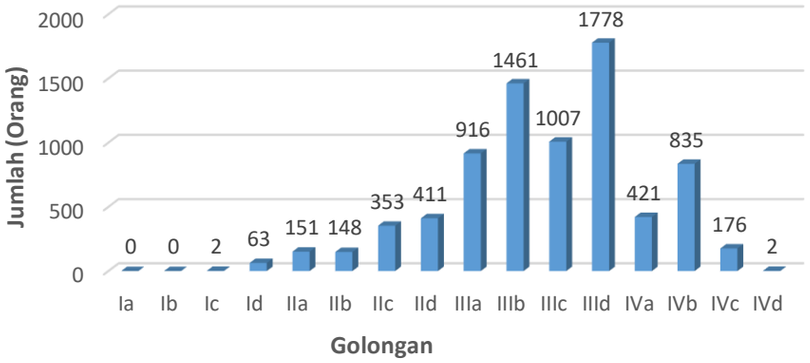
https://jdih.pemalangkab.go.id

Hal ini disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas pada Tahun 2024 dan pengadaan Pegawai yang dilaksanakan pada Tahun 2024 masih dalam proses persiapan pemberkasan menjadi Calon Pegaewai Negeri sipil (CPNS). Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang juga dapat dilihat dalam persentase seperti ditunjukan grafik pada
Gambar **7.4** hingga Gambar 7.7.

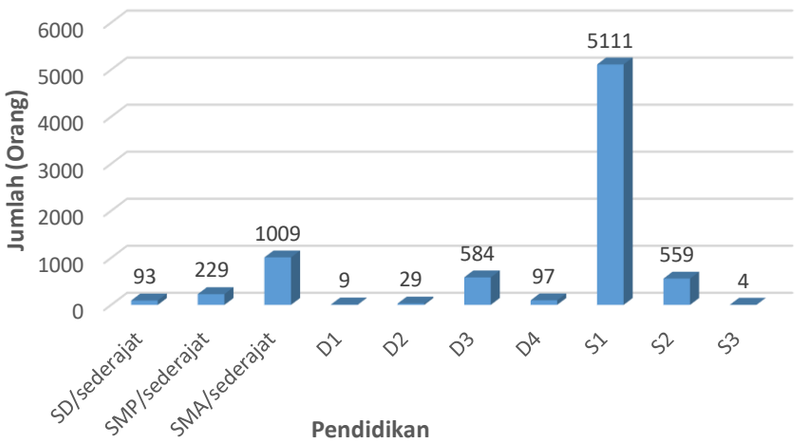
Gambar 7.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Gambar 7.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan Tahun 2024

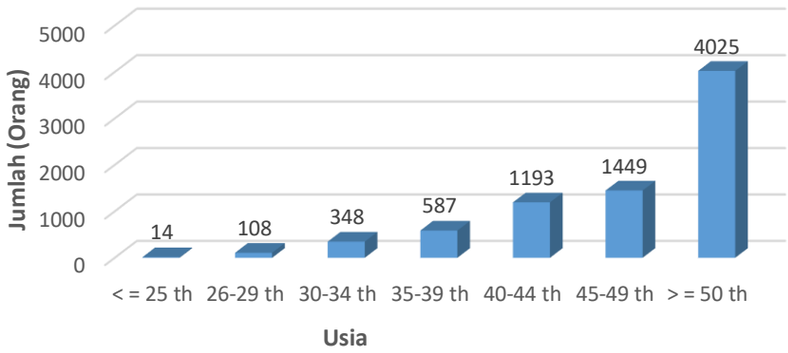


Gambar 7.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 7.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Usia
Tahun 2024



Terdapat empat deskripsi komposisi PNS di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yaitu jenis kelamin, golongan, pendidikan dan usia. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 4.273 pegawai dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 3.451 pegawai. Golongan pegawai negeri sipil di Kabupaten Pemalang paling banyak adalah golongan III/D yaitu 1.778 pegawai, dan paling sedikit golongan I/C dan IV/D yang masing – masing berjumlah 2 pegawai, sedangkan golongan I/A dan I/B yaitu 0 pegawai. Berdasarkan kategori pendidikan, pegawai negeri sipil di Kabupaten Pemalang didominasi oleh lulusan S1 dengan jumlah 5.111 pegawai, dan yang paling sedikit merupakan lulusan S3 yaitu 4 pegawai. Terakhir, pegawai negeri sipil di Kabupaten Pemalang berdasarkan usia, paling banyak berusia lebih dari atau sama dengan 50 Tahun yaitu 4.025 pegawai, dan yang paling sedikit yaitu 14 pegawai berusia kurang dari atau sama dengan 25 Tahun.

b. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Tabel 7.7 adalah jumlah PPPK berdasarkan 4 kategori yaitu jenis kelamin, golongan, pendidikan, dan usia. Jumlah PPPK di Kabupaten Pemalang sebanyak 3.149 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 952 orang sedangkan perempuan sebanyak 2.197 orang.

Tabel 7.7
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Kategori Tahun 2024

Kategori	Kelompok	Jumlah 2023 (Orang)	Jumlah 2024 (Orang)
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	699	952
	PEREMPUAN	1.353	2197
Jumlah		**2.052**	**3.149**
GOLONGAN	IIa	22	20
	IIb	1	1
	IIc	199	246
	IId	0	0
	IIIa	1.828	2.875
	IIIb	1	7
Jumlah		**2.052**	**3.149**

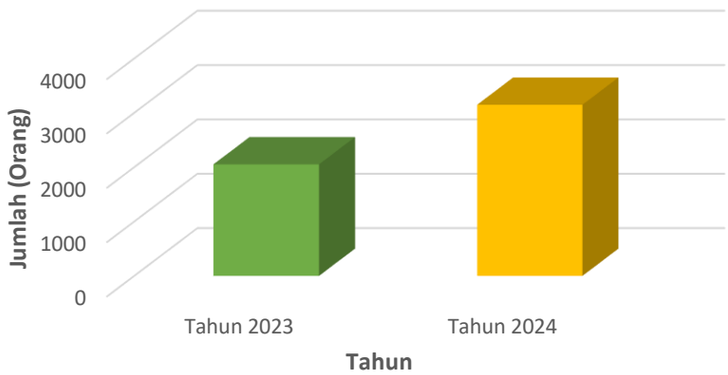
https://jdih.pemalangkab.go.id

Kategori	Kelompok	Jumlah 2023 (Orang)	Jumlah 2024 (Orang)
PENDIDIKAN	SD/sederajat	0	0
	SMP/sederajat	0	0
	SMA/sederajat	22	20
	D1	0	0
	D2	1	1
	D3	199	245
	D4	1	0
	S1	1.828	2.883
	S2	1	0
	S3	0	0
Jumlah		**2.052**	**3.149**
USIA	< = 25 th	6	0
	26-29 th	121	70
	30-34 th	380	564
	35-39 th	763	812
	40-44 th	560	1.128
	45-49 th	220	412
	> = 50 th	0	163
Jumlah		**2.052**	**3.149**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang Tahun 2024

Kondisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sejumlah 1.097 orang dibandingkan Tahun 2023, dapat dilihat pada Gambar 7.8 dibawah ini.

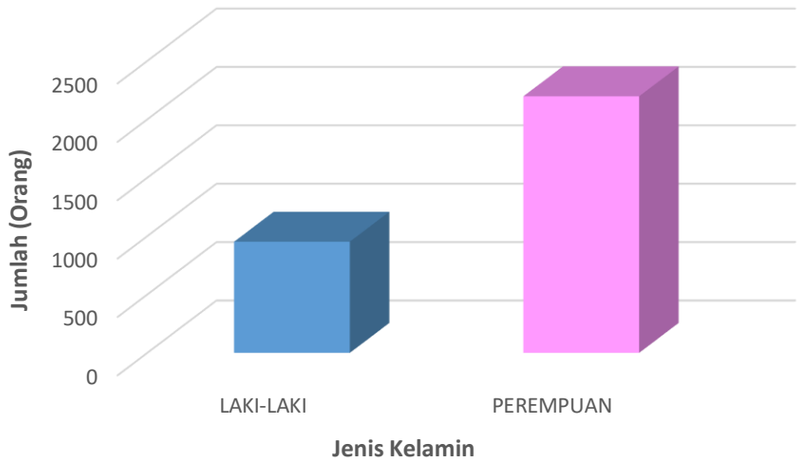
Gambar 7.8
Perbandingan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan Tahun 2024



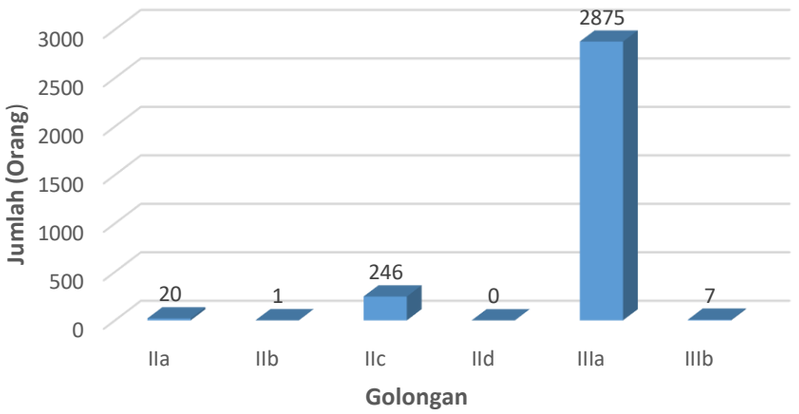
Hal ini disebabkan oleh adanya pengadaan PPPK di Kabupaten Pemalang. Data dan deskripsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dapat dilihat juga pada Gambar 7.9 hingga Gambar 7.12.

https://jdih.pemalangkab.go.id

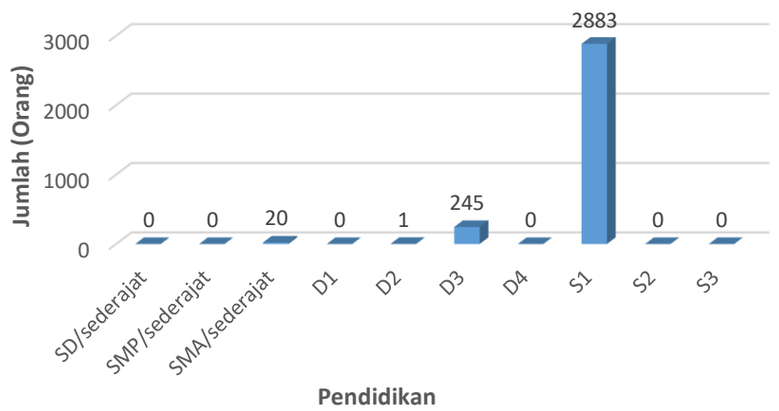
Gambar 7.9
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Gambar 7.10
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan Tahun 2024

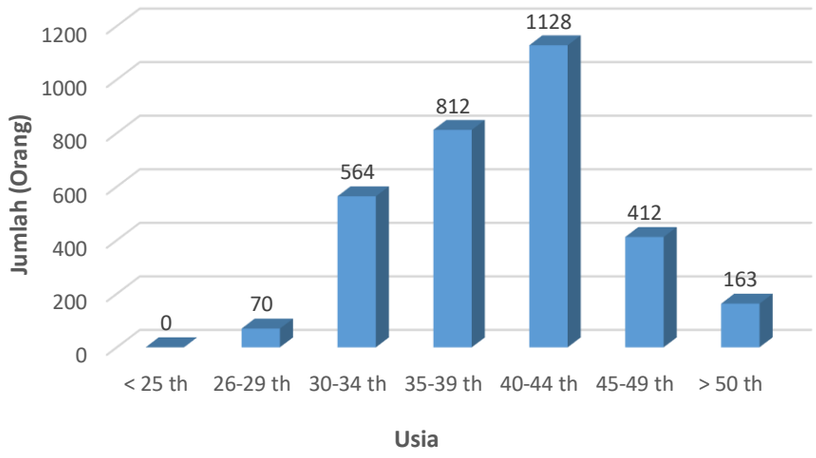


Gambar 7.11
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



https://jdih.pemalangkab.go.id

Gambar 7.12
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Usia Tahun 2024



Deskripsi komposisi PPPK terkait dengan jenis kelamin, golongan, pendidikan, dan usia dapat dirinci berdasarkan Tabel 7.7 dan Gambar 7.10-7.13. Pada kategori jenis kelamin, jumlah PPPK berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 adalah 2.197 pegawai (69,77%) lebih banyak dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki, yaitu 952 pegawai (30,23%). Kategori kedua adalah golongan pegawai. Berdasarkan golongan PPPK di Kabupaten Pemalang paling banyak adalah golongan III/a yaitu 2.875 pegawai, dan paling sedikit golongan II/b yaitu 1 pegawai. Selanjutnya pada kategori pendidikan, Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Pemalang didominasi oleh lulusan S1 dengan jumlah 2.883 pegawai, dan lulusan D2 dengan jumlah 1 pegawai merupakan tingkat pendidikan terendah pada PPPK Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Usia PPPK di Kabupaten Pemalang paling banyak berusia 40-44 Tahun yaitu 1.128 pegawai, dan yang paling sedikit berusia 26-29 Tahun yaitu 70 pegawai.

7.4. DOKUMEN PERENCANAAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang secara integral selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu

https://jdih.pemalangkab.go.id

tahun. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang sebagai acuan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB VIII
PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 akan dijadikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD.

Beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi bagi penyelesaian penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 ini dan mohon maaf atas kekurangan yang masih ada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah kita membangun dan melayani masyarakat Kabupaten Pemalang yang kita cintai.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN 1
SALDO KAS DANA BOS SD NEGERI
TAHUN 2024

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
1	SDN 01 BANGLARANGAN	-
2	SDN 01 CIBIYUK	-
3	SDN 01 JATIREJO	-
4	SDN 01 KARANGTALOK	-
5	SDN 01 KARANGTENGAH	-
6	SDN 01 KEBAGUSAN	-
7	SDN 01 KEMUNING	-
8	SDN 01 LOSARI	-
9	SDN 01 SIDOKARE	-
10	SDN 01 TEGALSARI	-
11	SDN 01 UJUNGGEDE	-
12	SDN 01 WONOGIRI	334,00
13	SDN 02 AMPELGADING	-
14	SDN 02 BANGLARANGAN	-
15	SDN 02 BLIMBING	-
16	SDN 02 CIBIYUK	-
17	SDN 02 JATIREJO	-
18	SDN 02 KARANGTALOK	-
19	SDN 02 KARANGTENGAH	-
20	SDN 02 KEBAGUSAN	-
21	SDN 02 LOSARI	-
22	SDN 02 SIDOKARE	-
23	SDN 02 SOKAWATI	-
24	SDN 02 TEGALSARI	633,00
25	SDN 02 UJUNGGEEDE	-
26	SDN 02 WONOGIRI	65,00
27	SDN 03 AMPELGADING	-
28	SDN 03 JATIREJO	-
29	SDN 03 KARANGTALOK	-
30	SDN 03 KEBAGUSAN	-
31	SDN 03 LOSARI	-
32	SDN 03 SIDOKARE	70,00
33	SDN 03 TEGALSARI	-
34	SDN 03 UJUNGGEDE	-
35	SDN 03 WONOGIRI	-
36	SDN 04 TEGALSARI	-
37	SDN 04 UJUNGGEDE	-
38	SDN 05 TEGALSARI	-
39	SDN 06 TEGALSARI	-
40	SDN 07 TEGALSARI	-
41	SDN 01 BANJARSARI	-
42	SDN 01 BANTARBOLANG	-
43	SDN 01 GLANDANG	-
44	SDN 01 KARANGANYAR	-
45	SDN 01 KEBON GEDE	-
46	SDN 01 KUTA BANTARBOLANG	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
47	SDN 01 PEDAGUNG	-
48	SDN 01 PEGIRINGAN	-
49	SDN 01 PEGUYANGAN	-
50	SDN 01 SUMURKIDANG	-
51	SDN 01 SURU	-
52	SDN 01 WANARATA	-
53	SDN 02 BANJARSARI	-
54	SDN 02 BANTARBOLANG	276.587,00
55	SDN 02 GLANDANG	-
56	SDN 02 KARANGANYAR	-
57	SDN 02 KEBON GEDE	61.200,00
58	SDN 02 KUTA BANTARBOLANG	-
59	SDN 02 PEDAGUNG	-
60	SDN 02 PEGIRINGAN	546,00
61	SDN 02 PEGUYANGAN	-
62	SDN 02 SUMURKIDANG	-
63	SDN 02 SURU	-
64	SDN 02 WANARATA	-
65	SDN 03 BANTARBOLANG	-
66	SDN 03 KARANGANYAR	-
67	SDN 03 PEDAGUNG	-
68	SDN 03 PEGIRINGAN	-
69	SDN 03 SURU	-
70	SDN 04 BANTARBOLANG	-

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
71	SDN 04 KUTA BANTARBOLANG	664,00
72	SDN 04 PEDAGUNG	-
73	SDN 04 PEGIRINGAN	1.450.000,00
74	SDN 04 WANARATA	60,00
75	SDN 05 BANTARBOLANG	-
76	SDN 05 PEDAGUNG	-
77	SDN 05 PEGIRINGAN	-
78	SDN 05 WANARATA	200.000,00
79	SDN 06 BANTARBOLANG	10.088,00
80	SDN 07 BANTARBOLANG	92,00
81	SDN 08 BANTARBOLANG	-
82	SDN LENGGERONG	-
83	SDN PABUARAN	66.222,00
84	SDN PURANA	240,00
85	SDN SAMBENG	-
86	SDN SARWODADI	-
87	SDN 01 BADAK	-
88	SDN 01 BELIK	-
89	SDN 01 BELUK	-
90	SDN 01 BULAKAN	200.850,00
91	SDN 01 GOMBONG	-
92	SDN 01 GUNUNGJAYA	-
93	SDN 01 GUNUNGTIGA	-
94	SDN 01 KUTA	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
95	SDN 01 MENDELEM	16.500,00
96	SDN 01 SIKASUR	177.280,00
97	SDN 01 SIMPUR	-
98	SDN 02 BADAK	-
99	SDN 02 BELIK	750,00
100	SDN 02 BELUK	150.000,00
101	SDN 02 GOMBONG	-
102	SDN 02 GUNUNGJAYA	-
103	SDN 02 GUNUNGTIGA	-
104	SDN 02 KUTA	462,00
105	SDN 02 MENDELEM	-
106	SDN 02 SIKASUR	120,00
107	SDN 02 SIMPUR	-
108	SDN 03 BADAK	29.560,00
109	SDN 03 BELIK	-
110	SDN 03 BELUK	113.010,00
111	SDN 03 BULAKAN	-
112	SDN 03 GOMBONG	-
113	SDN 03 GUNUNGJAYA	-
114	SDN 03 KUTA	-
115	SDN 03 MENDELEM	-
116	SDN 03 SIKASUR	-
117	SDN 03 SIMPUR	-
118	SDN 04 BADAK	-
119	SDN 04 BELIK	-
120	SDN 04 BELUK	-
121	SDN 04 BULAKAN	-
122	SDN 04 GOMBONG	-
123	SDN 04 GUNUNGJAYA	-
124	SDN 04 KUTA	-
125	SDN 04 MENDELEM	-
126	SDN 04 SIKASUR	-
127	SDN 04 SIMPUR	-
128	SDN 05 BELIK	-
129	SDN 05 GOMBONG	-
130	SDN 05 GUNUNGJAYA	-
131	SDN 05 KUTA	-
132	SDN 05 MENDELEM	-
133	SDN 05 SIKASUR	379.950,00
134	SDN 06 GOMBONG	86.000,00
135	SDN 06 MENDELEM	-
136	SDN 06 SIKASUR	-
137	SDN 07 MENDELEM	-
138	SDN KALISALEH	-
139	SDN 01 BODEH	390,00
140	SDN 01 CANGAK	-
141	SDN 01 JATINGARANG	100.776,00
142	SDN 01 JATIROYOM	406,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
143	SDN 01 KARANGBRAI	-
144	SDN 01 KELANGDEPOK	21.946,00
145	SDN 01 KESESIREJO	-
146	SDN 01 MUNCANG	40.421,00
147	SDN 01 PASIR	-
148	SDN 01 PAYUNG	-
149	SDN 01 PENDOWO	29.888,00
150	SDN 02 CANGAK	-
151	SDN 02 JATINGARANG	-
152	SDN 02 JATIROYOM	-
153	SDN 02 KARANGBRAI	-
154	SDN 02 KESESIREJO	-
155	SDN 02 LONGKEYANG	-
156	SDN 02 MUNCANG	38.014,00
157	SDN 02 PASIR	59.245,00
158	SDN 02 PAYUNG	-
159	SDN 03 JATINGARANG	-
160	SDN 03 KARANGBRAI	30.333,00
161	SDN 03 KELANGDEPOK	(500,00)
162	SDN 03 KESESIREJO	54,00
163	SDN 03 LONGKEYANG	-
164	SDN 03 MUNCANG	62.593,00
165	SDN 03 PENDOWO	10.043,00
166	SDN 04 JATINGARANG	-
167	SDN 04 KARANGBRAI	65.570,00
168	SDN BABAKAN	37.625,00
169	SDN GUNUNGBATU	-
170	SDN JRAGANAN	-
171	SDN KEBANDARAN	34.219,00
172	SDN KEBANDUNGAN	31,00
173	SDN KWASEN	10.301,00
174	SDN PARUNGGALIH	-
175	SDN 01 GANDU	-
176	SDN 01 GEDEG	-
177	SDN 01 GINTUNG	-
178	SDN 01 KANDANG	-
179	SDN 01 KEBOJONGAN	-
180	SDN 01 KLEGEN	-
181	SDN 01 PECANGAKAN	-
182	SDN 01 PURWOHARJO	-
183	SDN 01 PURWOSARI	-
184	SDN 01 SARWODADI	-
185	SDN 01 SIDOREJO	-
186	SDN 01 SIKAYU	-
187	SDN 01 TUMBAL	-
188	SDN 01 WONOKROMO	-
189	SDN 02 GANDU	48.949,00
190	SDN 02 GEDEG	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
191	SDN 02 KANDANG	-
192	SDN 02 KEBOJONGAN	-
193	SDN 02 KLEGEN	-
194	SDN 02 PECANGAKAN	-
195	SDN 02 PURWOHARJO	-
196	SDN 02 PURWOSARI	-
197	SDN 02 SARWODADI	-
198	SDN 02 SIDOREJO	-
199	SDN 02 SIKAYU	200.000,00
200	SDN 02 SUSUKAN	-
201	SDN 02 TUMBAL	-
202	SDN 02 WONOKROMO	-
203	SDN 03 KEBOJONGAN	-
204	SDN 03 PECANGAKAN	75.601,00
205	SDN 03 PURWOHARJO	-
206	SDN 03 PURWOSARI	-
207	SDN 03 SARWODADI	-
208	SDN 03 SIDOREJO	-
209	SDN 03 SUSUKAN	-
210	SDN 04 PURWOSARI	-
211	SDN 04 SUSUKAN	-
212	SDN 04 WONOKROMO	-
213	SDN 05 PURWOHARJO	-
214	SDN 05 SARWODADI	-

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
215	SDN 06 PURWOHARJO	-
216	SDN 07 PURWOHARJO	-
217	SDN 08 PURWOHARJO	85.724,00
218	SDN 09 PURWOHARJO	-
219	SDN AMBOKULON	-
220	SDN LOWA	-
221	SDN 01 BANYUMUDAL	-
222	SDN 01 GENDOWANG	-
223	SDN 01 MANDIRAJA	-
224	SDN 01 MOGA	-
225	SDN 01 PLAKARAN	-
226	SDN 01 SIMA	-
227	SDN 01 WALANGSANGA	-
228	SDN 01 WANGKELANG	-
229	SDN 02 BANYUMUDAL	-
230	SDN 02 GENDOWANG	-
231	SDN 02 MANDIRAJA	-
232	SDN 02 MOGA	-
233	SDN 02 PLAKARAN	-
234	SDN 02 SIMA	-
235	SDN 02 WALANGSANGA	-
236	SDN 02 WANGKELANG	-
237	SDN 03 BANYUMUDAL	410.000,00
238	SDN 03 GENDOWANG	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
239	SDN 03 MANDIRAJA	-
240	SDN 03 PLAKARAN	-
241	SDN 03 SIMA	-
242	SDN 03 WALANGSANGA	-
243	SDN 04 BANYUMUDAL	214.150,00
244	SDN 04 GENDOWANG	-
245	SDN 04 MANDIRAJA	-
246	SDN 04 WALANGSANGA	-
247	SDN 05 BANYUMUDAL	-
248	SDN 05 MOGA	-
249	SDN 05 SIMA	-
250	SDN 06 SIMA	-
251	SDN 07 BANYUMUDAL	-
252	SDN 07 SIMA	-
253	SDN 08 BANYUMUDAL	93.900,00
254	SDN KEBANGGAN	1.700,00
255	SDN PEPEDAN	-
256	SDN 01 BANJARMULYA	75.000,00
257	SDN 01 BOJONGBATA	87.799,00
258	SDN 01 BOJONGNANGKA	566.340,00
259	SDN 01 DANASARI	490.505,00
260	SDN 01 KEBONDALEM	328.385,00
261	SDN 01 KRAMAT	76,00
262	SDN 01 LAWANGREJO	560.000,00

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
263	SDN 01 MENGORI	80.822,00
264	SDN 01 MULYOHARJO	542.750,00
265	SDN 01 PADURAKSA	3.089,00
266	SDN 01 PEGONGSORAN	67.937,00
267	SDN 01 PELUTAN	9.042,00
268	SDN 01 SARADAN	159.000,00
269	SDN 01 SEWAKA	12.000,00
270	SDN 01 SUMBERHARJO	177.630,00
271	SDN 01 SUNGAPAN	263.688,00
272	SDN 01 SURAJAYA	72.000,00
273	SDN 01 TAMBAKREJO	209.000,00
274	SDN 01 TANJUNGSARI	1.630.075,00
275	SDN 01 WANAMULYA	396.000,00
276	SDN 01 WIDURI	-
277	SDN 02 BANJARMULYA	4.515,00
278	SDN 02 BOJONGBATA	893.000,00
279	SDN 02 BOJONGNANGKA	441.000,00
280	SDN 02 DANASARI	190.500,00
281	SDN 02 KEBONDALEM	917.279,00
282	SDN 02 KRAMAT	2.940,00
283	SDN 02 LAWANGREJO	-
284	SDN 02 MENGORI	63,00
285	SDN 02 MULYOHARJO	35.000,00
286	SDN 02 PADURAKSA	20.590,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
287	SDN 02 PEGONGSORAN	212.930,00
288	SDN 02 PELUTAN	4.000,00
289	SDN 02 SARADAN	90.140,00
290	SDN 02 SEWAKA	130.538,00
291	SDN 02 SUMBERHARJO	1.815,00
292	SDN 02 SURAJAYA	35.000,00
293	SDN 02 TAMBAKREJO	129.195,00
294	SDN 02 TANJUNGSARI	721.009,00
295	SDN 02 WANAMULYA	39.811,00
296	SDN 02 WIDURI	100.000,00
297	SDN 03 BANJARMULYA	1.299.450,00
298	SDN 03 BOJONGBATA	9.000,00
299	SDN 03 BOJONGNANGKA	492.254,00
300	SDN 03 DANASARI	779.574,00
301	SDN 03 KEBONDALEM	9.741,00
302	SDN 03 MENGORI	63,00
303	SDN 03 MULYOHARJO	322.840,00
304	SDN 03 PADURAKSA	206,00
305	SDN 03 PEGONGSORAN	-
306	SDN 03 SARADAN	552.823,00
307	SDN 03 SEWAKA	24.472,00
308	SDN 03 SUNGAPAN	9.000,00
309	SDN 03 SURAJAYA	527.500,00
310	SDN 03 TANJUNGSARI	951.000,00
311	SDN 03 WANAMULYA	78.000,00
312	SDN 03 WIDURI	175,00
313	SDN 04 BOJONGBATA	212.100,00
314	SDN 04 BOJONGNANGKA	290.082,00
315	SDN 04 KEBONDALEM	1.631.091,00
316	SDN 04 MULYOHARJO	167.880,00
317	SDN 04 PADURAKSA	2.310,00
318	SDN 04 PELUTAN	-
319	SDN 04 SEWAKA	8.968,00
320	SDN 04 SURAJAYA	1.105.000,00
321	SDN 04 TAMBAKREJO	412,00
322	SDN 04 TANJUNGSARI	41.442,00
323	SDN 05 BOJONGBATA	108.503,00
324	SDN 05 BOJONGNANGKA	-
325	SDN 05 KEBONDALEM	-
326	SDN 05 PELUTAN	27.000,00
327	SDN 06 BOJONGNANGKA	26.000,00
328	SDN 06 KEBONDALEM	792.000,00
329	SDN 06 MULYOHARJO	7.024,00
330	SDN 06 PELUTAN	-
331	SDN 07 KEBONDALEM	74.000,00
332	SDN 07 MULYOHARJO	58.091,00
333	SDN 08 MULYOHARJO	1.080.000,00
334	SDN 08 PELUTAN	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
335	SDN 09 MULYOHARJO	-
336	SDN 10 KEBONDALEM	62.000,00
337	SDN 11 KEBONDALEM	16.000,00
338	SDN 11 MULYOHARJO	441.100,00
339	SDN 11 PELUTAN	93.330,00
340	SDN 12 MULYOHARJO	353.000,00
341	SDN 12 PELUTAN	216.800,00
342	SDN 13 KEBONDALEM	21.000,00
343	SDN 13 MULYOHARJO	4.000,00
344	SDN 14 MULYOHARJO	-
345	SDN 14 PELUTAN	70.200,00
346	SDN 15 MULYOHARJO	653,00
347	SDN 16 MULYOHARJO	124.124,00
348	SDN 01 ISER	-
349	SDN 01 KALIRANDU	-
350	SDN 01 KENDALDOYONG	-
351	SDN 01 KENDALSARI	-
352	SDN 01 KLAREYAN	-
353	SDN 01 LONING	-
354	SDN 01 PANJUNAN	-
355	SDN 01 PEGUNDAN	-
356	SDN 01 PESUCEN	-
357	SDN 01 PETANJUNGAN	-
358	SDN 01 SERANG	-
359	SDN 01 SIRANGKANG	-
360	SDN 01 TEGALMLATI	-
361	SDN 01 TEMUIRENG	-
362	SDN 01 WIDODAREN	-
363	SDN 02 BULU	-
364	SDN 02 ISER	-
365	SDN 02 KALIRANDU	-
366	SDN 02 KARANGASEM	-
367	SDN 02 KENDALDOYONG	-
368	SDN 02 KENDALSARI	-
369	SDN 02 LONING	-
370	SDN 02 PANJUNAN	-
371	SDN 02 PEGUNDAN	-
372	SDN 02 PESUCEN	-
373	SDN 02 PETARUKAN	-
374	SDN 02 SERANG	-
375	SDN 02 SIRANGKANG	-
376	SDN 02 TEGALMLATI	-
377	SDN 02 TEMUIRENG	-
378	SDN 02 WIDODAREN	-
379	SDN 03 BULU	-
380	SDN 03 KALIRANDU	-
381	SDN 03 KARANGASEM	-
382	SDN 03 KENDALDOYONG	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
383	SDN 03 KENDALSARI	-
384	SDN 03 KLAREYAN	-
385	SDN 03 PEGUNDAN	-
386	SDN 03 PESUCEN	-
387	SDN 03 PETANJUNGAN	-
388	SDN 03 PETARUKAN	-
389	SDN 03 SERANG	-
390	SDN 03 TEGALMLATI	-
391	SDN 03 WIDODAREN	-
392	SDN 04 BULU	-
393	SDN 04 KALIRANDU	-
394	SDN 04 KENDALDOYONG	-
395	SDN 04 KENDALSARI	-
396	SDN 04 KLAREYAN	-
397	SDN 04 LONING	-
398	SDN 04 PEGUNDAN	-
399	SDN 04 PESUCEN	-
400	SDN 04 PETANJUNGAN	-
401	SDN 04 PETARUKAN	-
402	SDN 04 SERANG	-
403	SDN 04 TEGALMLATI	-
404	SDN 04 TEMUIRENG	-
405	SDN 05 KENDALDOYONG	-
406	SDN 05 KENDALSARI	-
407	SDN 05 KLAREYAN	-
408	SDN 05 LONING	-
409	SDN 05 PEGUNDAN	-
410	SDN 05 PETARUKAN	-
411	SDN 05 WIDODAREN	-
412	SDN 06 KENDALDOYONG	-
413	SDN 06 KENDALSARI	-
414	SDN 06 LONING	-
415	SDN 06 PETARUKAN	-
416	SDN 07 KENDALDOYONG	-
417	SDN 07 KLAREYAN	-
418	SDN 08 LONING	-
419	SDN 09 KENDALDOYONG	-
420	SDN 09 PETARUKAN	-
421	SDN 10 PETARUKAN	-
422	SDN 01 BATURSARI	-
423	SDN 01 CIKENDUNG	-
424	SDN 01 CLEKATAKAN	-
425	SDN 01 GAMBUHAN	-
426	SDN 01 GUNUNGSARI	-
427	SDN 01 KARANGSARI	-
428	SDN 01 NYALEMBENG	-
429	SDN 01 PAGENTERAN	-
430	SDN 01 PENAKIR	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
431	SDN 01 PULOSARI	-
432	SDN 01 SIREMENG	-
433	SDN 02 BATURSARI	-
434	SDN 02 CIKENDUNG	-
435	SDN 02 CLEKATAKAN	-
436	SDN 02 GAMBUHAN	-
437	SDN 02 GUNUNGSARI	-
438	SDN 02 KARANGSARI	-
439	SDN 02 NYALEMBENG	-
440	SDN 02 PENAKIR	-
441	SDN 02 PULOSARI	-
442	SDN 03 BATURSARI	-
443	SDN 03 CIKENDUNG	-
444	SDN 03 CLEKATAKAN	-
445	SDN 03 GAMBUHAN	-
446	SDN 03 GUNUNGSARI	-
447	SDN 03 KARANGSARI	-
448	SDN 03 PENAKIR	-
449	SDN 03 PULOSARI	-
450	SDN 03 SIREMENG	-
451	SDN 04 CIKENDUNG	-
452	SDN 04 GAMBUHAN	-
453	SDN 04 SIREMENG	-
454	SDN JURANGMANGU	-

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
455	SDN 01 BANJARANYAR	-
456	SDN 01 GEMBYANG	-
457	SDN 01 KALIMAS	-
458	SDN 01 KALITORONG	-
459	SDN 01 KARANGMONCOL	-
460	SDN 01 KEJENE	-
461	SDN 01 KREYO	-
462	SDN 01 LODAYA	-
463	SDN 01 MANGLI	-
464	SDN 01 MEJAGONG	-
465	SDN 01 PENUSUPAN	-
466	SDN 01 RANDUDONGKAL	-
467	SDN 01 REMBUL	-
468	SDN 01 SEMAYA	-
469	SDN 01 TANAHBAYA	-
470	SDN 01 SEMINGKIR	-
471	SDN 02 BANJARANYAR	-
472	SDN 02 GEMBYANG	-
473	SDN 02 KALIMAS	-
474	SDN 02 KALITORONG	-
475	SDN 02 KARANGMONCOL	-
476	SDN 02 KEJENE	-
477	SDN 02 KREYO	-
478	SDN 02 LODAYA	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
479	SDN 02 MANGLI	-
480	SDN 02 PENUSUPAN	-
481	SDN 02 RANDUDONGKAL	-
482	SDN 02 REMBUL	-
483	SDN 02 SEMAYA	50.000,00
484	SDN 02 SEMINGKIR	-
485	SDN 02 TANAHBAYA	-
486	SDN 03 KALITORONG	-
487	SDN 03 KEJENE	-
488	SDN 03 KREYO	-
489	SDN 03 RANDUDONGKAL	-
490	SDN 03 SEMINGKIR	-
491	SDN 03 TANAHBAYA	-
492	SDN 04 KARANGMONCOL	-
493	SDN 04 KEJENE	-
494	SDN 04 KREYO	-
495	SDN 04 RANDUDONGKAL	2.182.703,00
496	SDN 04 SEMINGKIR	-
497	SDN 05 KARANGMONCOL	-
498	SDN 05 KEJENE	-
499	SDN 05 RANDUDONGKAL	-
500	SDN 05 SEMINGKIR	-
501	SDN 06 RANDUDONGKAL	-
502	SDN 07 RANDUDONGKAL	-

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
503	SDN 08 RANDUDONGKAL	-
504	SDN 09 RANDUDONGKAL	-
505	SDN 10 RANDUDONGKAL	-
506	SDN GONGSENG	-
507	SDN KECEPIT	-
508	SDN 01 ASEMDOYONG	-
509	SDN 01 BANJARAN	-
510	SDN 01 BANJARDAWA	-
511	SDN 01 BEJI	-
512	SDN 01 CIBELOK	-
513	SDN 01 GONDANG	-
514	SDN 01 JEBED	-
515	SDN 01 JRAKAH	-
516	SDN 01 KABUNAN	-
517	SDN 01 KALIGELANG	-
518	SDN 01 KEDUNGBANJAR	-
519	SDN 01 KEJAMBON	-
520	SDN 01 PEDURUNGAN	-
521	SDN 01 PENER	-
522	SDN 01 PENGGARIT	-
523	SDN 01 SITEMU	-
524	SDN 01 SOKAWANGI	-
525	SDN 01 TAMAN	-
526	SDN 01 WANAREJAN	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
527	SDN 02 ASEMDOYONG	-
528	SDN 02 BANJARAN	-
529	SDN 02 BANJARDAWA	-
530	SDN 02 BEJI	-
531	SDN 02 GONDANG	-
532	SDN 02 JEBED	-
533	SDN 02 JRAKAH	-
534	SDN 02 KABUNAN	-
535	SDN 02 KALIGELANG	-
536	SDN 02 KEDUNGBANJAR	-
537	SDN 02 KEJAMBON	-
538	SDN 02 PEDURUNGAN	-
539	SDN 02 PENER	-
540	SDN 02 PENGGARIT	-
541	SDN 02 SITEMU	-
542	SDN 02 SOKAWANGI	-
543	SDN 02 TAMAN	-
544	SDN 02 WANAREJAN	-
545	SDN 03 ASEMDOYONG	66.600,00
546	SDN 03 BANJARAN	10.000,00
547	SDN 03 BEJI	-
548	SDN 03 CIBELOK	-
549	SDN 03 JEBED	-
550	SDN 03 JRAKAH	-

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
551	SDN 03 KABUNAN	-
552	SDN 03 KALIGELANG	-
553	SDN 03 KEDUNGBANJAR	-
554	SDN 03 PEDURUNGAN	-
555	SDN 03 PENER	-
556	SDN 03 PENGGARIT	-
557	SDN 03 SOKAWANGI	-
558	SDN 03 TAMAN	-
559	SDN 03 WANAREJAN	-
560	SDN 04 ASEMDOYONG	-
561	SDN 04 BANJARAN	-
562	SDN 04 BEJI	-
563	SDN 04 CIBELOK	-
564	SDN 04 JEBED	-
565	SDN 04 JRAKAH	-
566	SDN 04 KABUNAN	-
567	SDN 04 KALIGELANG	-
568	SDN 04 PEDURUNGAN	-
569	SDN 04 SOKAWANGI	-
570	SDN 04 TAMAN	100.000,00
571	SDN 05 ASEMDOYONG	-
572	SDN 05 BEJI	-
573	SDN 05 CIBELOK	-
574	SDN 05 JEBED	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
575	SDN 05 KABUNAN	-
576	SDN 05 PEDURUNGAN	-
577	SDN 05 TAMAN	-
578	SDN 05 WANAREJAN	-
579	SDN 06 BEJI	-
580	SDN 07 JEBED	-
581	SDN 07 KABUNAN	-
582	SDN 07 WANAREJAN	-
583	SDN 08 WANAREJAN	-
584	SDN 09 KABUNAN	15.000,00
585	SDN 09 WANAREJAN	150.000,00
586	SDN 10 WANAREJAN	-
587	SDN 01 AMBOWETAN	-
588	SDN 01 BLENDUNG	-
589	SDN 01 BOTEKAN	-
590	SDN 01 KALIPRAU	-
591	SDN 01 KERTOSARI	-
592	SDN 01 KETAPANG	-
593	SDN 01 LIMBANGAN	34.466,00
594	SDN 01 MOJO	-
595	SDN 01 PADEK	-
596	SDN 01 PAGERGUNUNG	-
597	SDN 01 PAMUTIH	-
598	SDN 01 PESANTREN	-
599	SDN 01 ROWOSARI	1.411,00
600	SDN 01 SAMONG	-
601	SDN 01 SUKOREJO	-
602	SDN 01 TASIKREJO	-
603	SDN 01 WIYOROWETAN	-
604	SDN 02 AMBOWETAN	-
605	SDN 02 BLENDUNG	-
606	SDN 02 BOTEKAN	27,00
607	SDN 02 BUMIREJO	-
608	SDN 02 KALIPRAU	-
609	SDN 02 KERTOSARI	-
610	SDN 02 KETAPANG	40.211,00
611	SDN 02 LIMBANGAN	-
612	SDN 02 MOJO	-
613	SDN 02 PADEK	-
614	SDN 02 PAGERGUNUNG	100.000,00
615	SDN 02 PAMUTIH	-
616	SDN 02 PESANTREN	-
617	SDN 02 ROWOSARI	-
618	SDN 02 SAMONG	-
619	SDN 02 SUKOREJO	10.089,00
620	SDN 02 TASIKREJO	-
621	SDN 02 WIYOROWETAN	-
622	SDN 03 BLENDUNG	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
623	SDN 03 KALIPRAU	-
624	SDN 03 KETAPANG	-
625	SDN 03 LIMBANGAN	-
626	SDN 03 MOJO	-
627	SDN 03 PAGERGUNUNG	-
628	SDN 03 PAMUTIH	40.898,00
629	SDN 03 PESANTREN	-
630	SDN 03 ROWOSARI	-
631	SDN 03 SAMONG	-
632	SDN 03 SUKOREJO	-
633	SDN 03 TASIKREJO	-
634	SDN 04 MOJO	-
635	SDN 04 PESANTREN	-
636	SDN 04 ROWOSARI	-
637	SDN 04 SUKOREJO	-
638	SDN 05 PAGERGUNUNG	-
639	SDN 05 PESANTREN	-
640	SDN 01 CIBUYUR	263.500,00
641	SDN 01 MERENG	12.917,00
642	SDN 01 PAKEMBARAN	16.375,00
643	SDN 01 WARUNGPRING	71.239,00
644	SDN 02 CIBUYUR	2.046,00
645	SDN 02 MERENG	98.065,00
646	SDN 02 PAKEMBARAN	51.614,00
647	SDN 02 WARUNGPRING	11.220,00
648	SDN 03 CIBUYUR	-
649	SDN 03 MERENG	-
650	SDN 03 WARUNGPRING	711,00
651	SDN 04 CIBUYUR	-
652	SDN 04 MERENG	4.594,00
653	SDN 04 WARUNGPRING	-
654	SDN 05 CIBUYUR	124.095,00
655	SDN 05 MERENG	61,00
656	SDN 05 WARUNGPRING	12.824,00
657	SDN 06 WARUNGPRING	943,00
658	SDN 07 WARUNGPRING	901,00
659	SDN 08 WARUNGPRING	-
660	SDN DATAR	60,00
661	SDN KARANGDAWA	155.130,00
662	SDN 01 BODAS	-
663	SDN 01 BONGAS	-
664	SDN 01 CAWET	25,00
665	SDN 01 CIKADU	-
666	SDN 01 GAPURA	-
667	SDN 01 JOJOGAN	-
668	SDN 01 MAJAKERTA	-
669	SDN 01 MAJALANGU	-
670	SDN 01 MEDAYU	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
671	SDN 01 PAGELARAN	70.000,00
672	SDN 01 TAMBI	25.000,00
673	SDN 01 TLAGASANA	500,00
674	SDN 01 TUNDAGAN	168,00
675	SDN 01 WATUKUMPUL	-
676	SDN 01 WISNU	-
677	SDN 02 BODAS	-
678	SDN 02 BONGAS	-
679	SDN 02 CAWET	10.154,00
680	SDN 02 GAPURA	-
681	SDN 02 MAJAKERTA	-
682	SDN 02 MAJALANGU	-
683	SDN 02 MEDAYU	-
684	SDN 02 PAGELARAN	-
685	SDN 02 TAMBI	-
686	SDN 02 TLAGASANA	-
687	SDN 02 TUNDAGAN	10.000,00
688	SDN 02 WISNU	-
689	SDN 03 BODAS	-
690	SDN 03 BONGAS	-
691	SDN 03 CIKADU	-
692	SDN 03 JOJOGAN	792,00
693	SDN 03 MAJAKERTA	-
694	SDN 03 MAJALANGU	-
695	SDN 03 TLAGASANA	667,00
696	SDN 03 TUNDAGAN	396,00
697	SDN 03 WATUKUMPUL	-
698	SDN 04 BONGAS	289,00
699	SDN 04 CIKADU	-
700	SDN 04 JOJOGAN	-
701	SDN 04 MAJAKERTA	-
702	SDN 04 MAJALANGU	-
703	SDN 04 TLAGASANA	20.000,00
704	SDN 04 TUNDAGAN	-
705	SDN 04 WATUKUMPUL	-
706	SDN 05 CIKADU	-
707	SDN 05 MAJAKERTA	-
708	SDN 05 TLAGASANA	-
Total Kas Dana BOS SD		**30.449.024,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN 2
SALDO KAS DANA BOS SMP NEGERI
TAHUN 2024

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
1	SMP NEGERI 3 BODEH	-
2	SMP NEGERI 2 COMAL	-
3	SMP NEGERI 1 PULOSARI	-
4	SMP NEGERI 4 BELIK	-
5	SMP NEGERI 3 BELIK	-
6	SMP NEGERI 2 BANTARBOLANG	-
7	SMP NEGERI 3 PULOSARI	-
8	SMP NEGERI 1 ULUJAMI	63,00
9	SMP NEGERI 8 PEMALANG	-
10	SMP NEGERI 3 COMAL	-
11	SMP NEGERI 2 WATUKUMPUL	-
12	SMP SATAP GUNUNGJAYA	-
13	SMP NEGERI 4 BANTARBOLANG	33.121,00
14	SMP NEGERI 3 MOGA	-
15	SMP NEGERI 4 COMAL	-
16	SMP NEGERI 1 PETARUKAN	-
17	SMP NEGERI 1 MOGA	123.384,00
18	SMP NEGERI 2 PULOSARI	10.058,00
19	SMP NEGERI 5 TAMAN	-
20	SMP NEGERI 4 BODEH	59.034,00
21	SMP NEGERI 6 TAMAN	-
22	SMP NEGERI 2 PEMALANG	-
23	SMP N 1 TLAGASANA SATU ATAP	828.475,00
24	SMP NEGERI 1 TAMAN	-
25	SMP NEGERI 2 BODEH	681.465,00
26	SMP NEGERI 4 ULUJAMI	19,00
27	SMP NEGERI 2 MOGA	-
28	SMP NEGERI 4 TAMAN	270.000,00
29	SMP NEGERI 3 PEMALANG	-
30	SMP NEGERI 2 ULUJAMI	7.757,00
31	SMP NEGERI 4 PEMALANG	25.568,00
32	SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL	-
33	SMP NEGERI 4 AMPELGADING	-
34	SMP NEGERI PABUARAN SATU ATAP	-
35	SMP NEGERI 1 RANDUDONGKAL	127.500,00
36	SMP NEGERI 1 BODEH	-
37	SMP NEGERI 4 PETARUKAN	-
38	SMP NEGERI 2 TAMAN	1.222,00
39	SMP NEGERI 3 WATUKUMPUL	-
40	SMP NEGERI 2 AMPELGADING	59.000,00
41	SMP NEGERI 2 RANDUDONGKAL	-
42	SMP NEGERI 1 AMPELGADING	10.000,00
43	SMP NEGERI 2 BELIK	10.000,00
44	SMP NEGERI 3 TAMAN	-
45	SMP NEGERI 1 WATUKUMPUL	10.000,00
46	SMP NEGERI 2 PETARUKAN	74.392,00
47	SMP NEGERI 1 PEMALANG	38.894,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	Nama Sekolah	SALDO AKHIR
48	SMP NEGERI 5 PETARUKAN	2.511.159,00
49	SMP SATAP PARUNGGALIH	-
50	SMP NEGERI 5 PEMALANG	-
51	SMP NEGERI 3 BANTARBOLANG	-
52	SMP NEGERI 3 RANDUDONGKAL	-
53	SMP NEGERI 3 AMPELGADING	102.000,00
54	SMP NEGERI 2 WARUNGPRING	-
55	SMP NEGERI 5 COMAL	-
56	SMP NEGERI 1 COMAL	-
57	SMP NEGERI 1 BANTARBOLANG	67.500,00
58	SMP NEGERI 7 PEMALANG	-
59	SMP NEGERI 6 PETARUKAN	-
60	SMP NEGERI 5 RANDUDONGKAL	-
61	SMP NEGERI 3 PETARUKAN	-
62	SMP NEGERI GONGSENG SATU ATAP	-
63	SMP NEGERI 3 ULUJAMI	49.473,00
64	SMP NEGERI 1 BELIK	-
65	SMP NEGERI 6 PEMALANG	222.500,00
66	SMP NEGERI 5 ULUJAMI	-
Total Kas Dana BOS SMP		**5.322.584,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1		**Piutang Pajak Daerah**	**69.774.813.873,00**	**9.828.211.229,00**	**6.006.396.495,00**	**73.596.628.607,00**
	Bapenda	a. Pajak Bumi dan Bangunan	69.342.635.470,00	9.707.010.165,00	5.931.775.602,00	73.117.870.033,00
	Bapenda	b. Pajak Reklame	394.613.329,00	98.706.494,00	45.227.073,00	448.092.750,00
	Bapenda	c. Pajak Air Tanah	37.565.074,00	22.494.570,00	29.393.820,00	30.665.824,00
2		**Piutang Retribusi Daerah**	**10.281.468.489,00**	**21.748.097.631,10**	**1.341.800.257,00**	**30.687.765.863,10**
	Dpmptsp	a. Retribusi Izin Usaha Industri (IUI)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Dpmptsp	b. Retribusi Izin Gangguan	364.479.175,00	0,00	0,00	364.479.175,00
	Dpmptsp	c. Retribusi Izin Usaha Pariwisata	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	Dpmptsp	d. Retribusi Izin Usaha Perikanan	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	Dpmptsp	e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	134.133.000,00	0,00	10.635.000,00	123.498.000,00
	DISKOPERINDAG	f. Retribusi Pasar	9.781.911.314,00	8.641.236.777,50	1.331.165.257,00	17.091.982.834,50
	Dinkes	g. Pelayanan kesehatan di rumah sakit	0,00	12.447.177.953,60	0,00	12.447.177.953,60
	Dinkes	h. Pelayanan kesehatan di Puskesmas	0,00	659.682.900,00	0,00	659.682.900,00
3		**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**15.066.577.726,60**	**426.175.000,00**	**12.963.625.894,60**	**2.529.126.832,00**
	Dinas Kesehatan	a. Pendapatan BLUD	12.901.220.894,60		12.901.220.894,60	-
		b. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Pendapatan Sewa)	689.965.000,00	426.175.000,00	62.405.000,00	1.053.735.000,00
	Disparpora	- Sewa Tanah dan Bangunan Kios	*239.520.000,00*	288.000.000,00	36.000.000,00	491.520.000,00
	Disperkim	- Sewa Rusunawa	*450.445.000,00*	135.475.000,00	26.405.000,00	559.515.000,00
		- Sewa wisma pemalang di Yogyakarta		*2.700.000,00*		2.700.000,00
	Bpkad	c. Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00			-
		d. Piutang Pendapatan Denda	471.569.042,00			471.569.042,00
	Bapenda	- Denda PBB	*455.729.042,00*			455.729.042,00
	Diskoperindag	- Denda atas Pendapatan Sewa	*15.840.000,00*			15.840.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
	Bpkad	e. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan	1.122.790,00			1.122.790,00
		f. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.002.700.000,00			1.002.700.000,00
		- Piutang Bantuan Modal Koperasi BMT Puskopyah	*25.000.000,00*			25.000.000,00
		- Piutang Bantuan Modal Agribisnis STA Gombong	*26.500.000,00*			26.500.000,00
		- Piutang Bantuan Modal Koperasi	*506.000.000,00*			506.000.000,00
		- Piutang Pembangunan Petak Toko	*15.200.000,00*			15.200.000,00
		- Piutang Bantuan Modal LUEP	*430.000.000,00*			430.000.000,00
	Bpkad	g. Piutang Remunerasi dari TDF	0,00			-
4		**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**1.707.501.933,00**	**35.423.808.723,00**	**18.459.577.225,00**	**778.435.933,00**
	Bpkad	a. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	1.707.501.933,00	-	929.066.000,00	778.435.933,00
		- Piutang dana transfer Umum -DBH PPh Pasa 21	*386.844.752,00*			*386.844.752,00*
		- Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	*391.591.181,00*			*391.591.181,00*
		- Piutang Dana Transfer Umum- DBH CHT	*929.066.000,00*		929.066.000,00	-
		Piutang Transfer Antar Daerah	**5.533.815.075,00**	**11.807.936.241,00**	**5.533.815.075,00**	**11.807.936.241,00**
		a. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	5.533.815.075,00	11.807.936.241,00	5.533.815.075,00	11.807.936.241,00
		- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	*1.175.535.049,00*	4.512.001.611,00	*1.175.535.049,00*	*4.512.001.611,00*
		- Piutang bagi Hasil Bea Balik nama Kendaraan Bermotor	*499.993.292,00*	2.856.672.666,00	*499.993.292,00*	*2.856.672.666,00*
		- Piutang Bagi Hasil Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor	*3.848.063.688,00*	4.416.226.197,00	*3.848.063.688,00*	*4.416.226.197,00*
		- Piutang bagi Hasil pajak Air Permukaan	*10.223.046,00*	23.035.767,00	*10.223.046,00*	*23.035.767,00*
		JUMLAH PIUTANG	**102.364.177.096,60**	**79.234.228.824,10**	**44.305.214.946,60**	**119.399.893.476,10**

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	**Piutang Pajak Daerah**	**73.596.628.607,00**	**(44.983.014.939,20)**	**28.613.613.667,80**
	a. Pajak Bumi dan Bangunan	73.117.870.033,00	(44.700.177.118,62)	28.417.692.914,38
	b. Pajak Reklame	448.092.750,00	(274.838.414,98)	173.254.335,02
	c. Pajak Air Tanah	30.665.824,00	(7.999.405,60)	22.666.418,40
2	**Piutang Retribusi Daerah**	**30.687.765.863,10**	**(3.837.665.912,70)**	**26.850.099.950,40**
	a. Retribusi Izin Usaha Industri (IUI)	50.000,00	(50.000,00)	-
	b. Retribusi Izin Gangguan	364.479.175,00	(364.479.175,00)	-
	c. Retribusi Izin Usaha Pariwisata	375.000,00	(375.000,00)	-
	d. Retribusi Izin Usaha Perikanan	520.000,00	(520.000,00)	-
	e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	123.498.000,00	(123.498.000,00)	-
	f. Retribusi Pasar	17.091.982.834,50	(953.962.586,79)	16.138.020.247,71
	g. Pelayanan kesehatan di rumah sakit	12.447.177.953,60	(2.391.482.736,41)	10.055.695.217,19
	h. Pelayanan kesehatan di Puskesmas	659.682.900,00	(3.298.414,50)	656.384.485,50
3	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**2.529.126.832,00**	**(2.105.082.707,00)**	**424.044.125,00**
	a. Pendapatan BLUD	-	-	-
	b. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Pendapatan Sewa)	1.053.735.000,00	(629.690.875,00)	424.044.125,00
	- Sewa Tanah dan Bangunan Kios	491.520.000,00	(204.960.000,00)	286.560.000,00
	- Sewa Rusunawa	559.515.000,00	(424.717.375,00)	134.797.625,00
	- Sewa wisma pemalang di Yogyakarta	2.700.000,00	(13.500,00)	2.686.500,00
	c. Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	-		-
	d. Piutang Pendapatan Denda	471.569.042,00	(471.569.042,00)	-
	- Denda PBB	455.729.042,00	(455.729.042,00)	-
	- Denda atas Pendapatan Sewa	15.840.000,00	(15.840.000,00)	-
	e. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.122.790,00	(1.122.790,00)	-
	f. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.002.700.000,00	(1.002.700.000,00)	-
	- Piutang Bantuan Modal Koperasi BMT Puskopyah	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-
	- Piutang Bantuan Modal Agribisnis STA Gombong	26.500.000,00	(26.500.000,00)	-
	- Piutang Bantuan Modal Koperasi	506.000.000,00	(506.000.000,00)	-
	- Piutang Pembangunan Petak Toko	15.200.000,00	(15.200.000,00)	-
	- Piutang Bantuan Modal LUEP	430.000.000,00	(430.000.000,00)	-
	g. Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00		-
	h. Piutang Remunerasi dari TDF	-		-
4	**Piutang Transfer Transfer Pusat**	**778.435.933,00**	**-**	**778.435.933,00**
	a. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	778.435.933,00	-	778.435.933,00
	- Piutang dana transfer Umum -DBH PPh Pasa 21	386.844.752,00	0,00	386.844.752,00
	29/WPOPDN	391.591.181,00		391.591.181,00
	- Piutang Dana Transfer Umum- DBH CHT	-		-
	Piutang Transfer Antar Daerah	**11.807.936.241,00**	**-**	**23.615.872.482,00**
	b. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	11.807.936.241,00	-	11.807.936.241,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.512.001.611,00		4.512.001.611,00
	- Piutang bagi Hasil Bea Balik nama Kendaraan Bermotor	2.856.672.666,00		2.856.672.666,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor	4.416.226.197,00		4.416.226.197,00
	- Piutang bagi Hasil pajak Air Permukaan	23.035.767,00		23.035.767,00
	Jumlah Piutang Pendapatan	**119.399.893.476,10**	**(50.925.763.558,90)**	**80.282.066.158,20**

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5

N I H I L

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang Disertakan s.d. Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang Telah Disertakan s.d. Akhir Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang Disertakan s.d Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2024	PT. Bank Jateng (Perseroda)	Perda Kab. Pemalang No. 10 Tahun 2021	Saham	5.000.000.000.000,00	91.334.000.000,00	3.733.000.000,00	95.067.000.000,00	4.904.933.000.000,00	19.041.222.876,00	0,00	95.067.000.000,00
2	2024	PDAM Tirta Mulia (Perseroda)	Perda Kab. Pemalang No. 10 Tahun 2021	Saham	200.000.000.000,00	106.247.698.604,00	4.000.000.000,00	110.247.698.604,00	89.752.301.396,00	2.820.088.578,00	0,00	110.247.698.604,00
3	2024	PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)	Perda Kab. Pemalang No. 10 Tahun 2021	Saham TA 2024	11.000.000.000,00	10.890.000.000,00	1.500.000.000,00	12.390.000.000,00	(1.390.000.000,00)	329.228.616,00	0,00	12.390.000.000,00
4	2024	PT. BPR BKK Taman (Perseroda)	Perda Kab. Pemalang No. 10 Tahun 2021	Saham	60.000.000.000,00	7.650.000.000,00		7.650.000.000,00	52.350.000.000,00	716.699.296,00	0,00	7.650.000.000,00
5	2024	PT. BKK Jateng (Perseroda)	Perda Kab. Pemalang No. 10 Tahun 2021	Saham	924.840.000.000,00	9.800.000.000,00	0,00	9.800.000.000,00	915.040.000.000,00	0,00	0,00	9.800.000.000,00
6	2024	PD. Aneka Usaha (Perseroda)	Perda Kab. Pemalang No. 10 Tahun 2021	Saham	75.000.000.000,00	26.192.549.128,00	4.500.000.000,00	30.692.549.128,00	44.307.450.872,00	0,00	0,00	30.692.549.128,00
7	2024	PT. LKM BKD (Perseroda)	Perda Kab. Pemalang No. 10 Tahun 2021	Saham	5.000.000.000,00	3.699.309.578,00	767.000.000,00	4.466.309.578,00	533.690.422,00	100.412.312,00	0,00	4.466.309.578,00
JUMLAH					**6.275.840.000.000,00**	**255.813.557.310,00**	**14.500.000.000,00**	**270.313.557.310,00**	**6.005.526.442.690,00**	**23.007.651.678,00**	**0,00**	**270.313.557.310,00**

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

-

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dindikbud	1.331.084.907.228,00	78.126.390.718,00	3.196.341.017,00	1.406.014.956.929,00
2	Dinkes	590.770.038.041	45.863.901.215,00	319.490.284,00	636.314.448.972,00
3	DPU TR	1.633.331.512.190	38.907.452.046,00	2.921.058.000,00	1.669.317.906.236,00
4	Disperkim	152.230.374.488	14.358.060.117,00	328.958.167,00	166.259.476.438,00
5	Satpol PP	9.067.135.025	36.254.950,00	116.500.000,00	8.986.889.975,00
6	BPBD	13.359.656.548	106.649.400,00	-	13.466.305.948,00
7	Dinsos KBPP	17.151.910.038	1.715.420.460,00	795.692.000,00	18.071.638.498,00
8	Disnaker	18.781.211.447	1.554.261.220,00	96.292.720,00	20.239.179.947,00
9	DLH	46.040.693.874	649.978.736,00	220.285.550,00	46.470.387.060,00
10	Disdukcatpil	15.873.460.550	9.960.000,00	126.915.000,00	15.756.505.550,00
11	Dinpermasdes	6.962.689.126	28.800.000,00	-	6.991.489.126,00
12	Dishub	41.930.688.389	5.069.557.228,00	366.133.695,00	46.634.111.922,00
13	Diskominfo	20.132.746.179	295.879.564,00	95.573.135,00	20.333.052.608,00
14	Diskoperindag	314.937.513.595	3.679.894.450,00	4.741.969.326,00	313.875.438.719,00
15	DPMPTSP	7.603.590.695	386.373.564,00	-	7.989.964.259,00
16	Dinpusarda	9.761.115.673	3.021.383.872,00	-	12.782.499.545,00
17	Disperik	24.047.735.654	1.371.789.827,00	50.580.500,00	25.368.944.981,00
18	Disparpora	145.794.335.979	703.106.444,00	-	146.497.442.423,00
19	Dispertan	63.672.197.345	499.034.000,00	106.830.000,00	64.064.401.345,00
20	Setda	61.958.429.108	1.681.358.740,00	993.074.705,30	62.646.713.142,70

https://jdih.pemalangkab.go.id

No	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
21	Setwan	143.173.653.114	223.911.500,00	1.679.930.000,00	141.717.634.614,00
22	Bappeda	11.284.553.066	370.448.318,00	6.100.000,00	11.648.901.384,00
23	BPKAD	91.609.992.741	980.380.250,00	1.540.849.075,00	91.049.523.916,00
24	Bapenda	9.535.051.887	855.483.182,00	305.790.042,00	10.084.745.027,00
25	BKD	6.929.549.263	331.979.960,00	19.000.000,00	7.242.529.223,00
26	Inspektorat	8.756.869.118	1.753.467.692,00	449.968.657,00	10.060.368.153,00
27	Kec. Moga	4.923.098.301	45.386.000,00	-	4.968.484.301,00
28	Kec. Pulosari	3.038.852.851	-	-	3.038.852.851,00
29	Kec. Belik	3.551.655.056	11.475.000,00	-	3.563.130.056,00
30	Kec. Watukumpul	3.152.340.051	-	28.870.000,00	3.123.470.051,00
31	Kec. Bodeh	2.245.418.025	80.880.000,00	-	2.326.298.025,00
32	Kec. Bantarbolang	2.313.141.585	84.686.800,00	18.881.225,00	2.378.947.160,00
33	Kec. Randudongkal	3.407.275.401	32.323.000,00	-	3.439.598.401,00
34	Kec, Pemalang	169.346.544.364	919.066.700,00	22.163.500,00	170.243.447.564,00
35	Kec Taman	25.496.414.448	44.320.000,00	-	25.540.734.448,00
36	Kec, Petarukan	14.518.658.694	-	-	14.518.658.694,00
37	Kec. Ampelgading	2.315.034.151	19.500.000,00	-	2.334.534.151,00
38	Kec. Comal	20.436.502.375	97.147.000,00	-	20.533.649.375,00
39	Kec. Ulujami	3.723.279.889	127.827.735,00	-	3.851.107.624,00
40	Kec. Warungpring	2.723.631.111	70.072.600,00	-	2.793.703.711,00
41	Bakesbangpol	2.532.803.823	40.500.000,00	-	2.573.303.823,00
TOTAL		**5.059.506.260.486,00**	**204.154.362.288,00**	**18.547.246.598,30**	**5.245.113.376.175,70**

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Per Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	1.056.322.037.800,00	6.524.266.000,00	9.163.500,00	1.062.837.140.300,00
2	Peralatan dan Mesin	834.387.411.113,00	71.137.946.423,00	11.992.672.116,30	893.532.685.419,70
3	Gedung dan Bangunan	1.646.798.445.866,00	53.914.275.160,00	5.693.671.474,00	1.695.019.049.552,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.260.572.489.829,00	54.473.832.215,00	395.006.812,00	1.314.651.315.232,00
5	Aset Tetap Lainnya	188.409.775.887,00	17.911.383.877,00	456.732.696,00	205.864.427.068,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.016.099.991,00	192.658.613,00	0,00	73.208.758.604,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.838.590.454.527,00)	(179.269.496.750,00)	(10.344.274.356,30)	(2.007.515.676.920,70)
TOTAL		**3.220.915.805.959,00**	**24.884.865.538,00**	**8.202.972.242,00**	**3.237.597.699.255,00**

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL (31-DES-2023)	MUTASI										REKLASIFIKASI / PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR (31-DES-2024)
			BERTAMBAH					BERKURANG						
			PERALATAN DAN MESIN	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	BANGUNAN GEDUNG	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	PERALATAN DAN MESIN	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	BANGUNAN GEDUNG	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.362.017.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.362.017.589,00
2	Dinas Kesehatan	973.296.136	-	-	73.590.613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.046.886.749,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.555.632.523	-	-	119.068.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61.674.700.523,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	359.547.793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.547.793,00
5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	101.042.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.042.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	42.548.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.548.000,00
7	Dinas Perhubungan	100.765.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.765.000,00
8	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	1.383.825.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383.825.800,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	95.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.865.000,00
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6.041.560.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.041.560.150,00
JUMLAH		**73.016.099.991**	**-**	**-**	**192.658.613,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.208.758.604,00**

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	2	3	4	5
1	Tagihan Jangka Panjang	546.830.500,00	-	90.824.372,00	456.006.128,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.529.500.000,00	-	-	8.529.500.000,00
3	Aset Tak Berwujud	9.931.734.168,00	2.868.066.000,00	-	12.799.800.168,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(9.298.473.243,00)	(373.429.450,00)	-	(9.671.902.693,00)
5	Aset Lain-lain	109.354.550.215,67	2.152.938.694,00	735.324.249,23	110.772.164.660,44
6	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(20.633.415.026,00)	(1.767.737.068,00)	(735.300.000,00)	(21.665.852.094,00)
7	TDF	2.710.515.000,00	24.701.000,00	2.710.515.000,00	24.701.000,00
JUMLAH		**101.141.241.614,67**	**2.904.539.176,00**	**2.801.363.621,23**	**101.244.417.169,44**

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH PER 31 DESEMBER 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang PFK	-	-	-	-
2	Utang Bunga	-	-	-	-
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka	5.850.892.435,26	1.052.522.491,00	3.647.538.274,30	3.255.876.651,96
5	Utang Belanja	42.740.160.402,00	49.462.566.551,00	42.987.839.339,00	49.214.887.614,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	25.735.659,00		25.735.659,00	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**48.616.788.496,26**	**50.515.089.042,00**	**46.661.113.272,30**	**52.470.764.265,96**

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XX.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2024	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 =5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17x18
1	**Bidang Perbankan**			**2.717.041.698.039,00**	**73.001.911.116,00**	**23.621.019.094,00**	**2.813.664.627.249,00**	**2.321.744.835.713,00**	**0,00**	**2.321.744.835.713,00**	**395.810.000.000,00**	**1.580.000.000,00**	**397.390.000.000,00**	**66.784.944.983,00**	**27.744.846.554,00**	**491.919.791.537,00**		
	1 PT. BPR Bank Pemalang (*Audited*)			71.160.661.638,00	1.336.119.773,00	346.511.625,00	72.843.293.036,00	68.897.858.995,00	0,00	68.897.858.995,00	10.920.000.000,00	1.580.000.000,00	12.500.000.000,00	2.692.960.662,00	-11.247.526.621,00	3.945.434.041,00	99,73	99,73
	2 PT. BPR BKK Taman (*Audited*)			224.075.615.120,00	3.362.087.179,00	2.957.076.933,00	230.394.778.232,00	205.365.194.357,00	0,00	205.365.194.357,00	15.740.000.000,00	0,00	15.740.000.000,00	7.579.788.304,00	1.709.795.571,00	25.029.583.875,00	48,6	48,6
	3 PT. BPR BKK Jateng (*Audited*)			2.421.805.421.281,00	68.303.704.164,00	20.317.430.536,00	2.510.426.555.981,00	2.047.481.782.361,00	0,00	2.047.481.782.361,00	369.150.000.000,00	0,00	369.150.000.000,00	56.512.196.017,00	37.282.577.604,00	462.944.773.621,00	2,66	2,66
2	**Bidang Lainnya**			**59.314.014.693,00**	**143.068.952.954,00**	**10.807.083.394,00**	**213.190.051.042,00**	**33.679.095.200,00**	**16.520.914.789,00**	**50.200.009.989,00**	**145.446.247.732,00**	**309.578,00**	**49.931.111.660,00**	**11.305.849.694,00**	**-8.494.618.905,00**	**162.990.041.053,00**		
	1 PDAM Tirta Mulia (*Audited*)			38.319.484.969,00	135.951.069.763,00	0,00	174.270.554.732,00	14.496.056.531,00	16.520.914.789,00	31.016.971.320,00	110.247.698.604,00	0,00	14.732.252.954,00	10.921.106.412,00	7.352.525.442,00	143.253.583.412,00	100	100,00
	2 PT. Aneka Usaha (*Audited*)			11.047.199.964,00	6.209.921.553,00	10.755.147.016,00	28.012.268.534,00	13.408.137.975,00	0,00	13.408.137.975,00	30.692.549.128,00	0,00	30.692.549.128,00	0,00	-16.088.418.569,00	14.604.130.559,00	100	100,00
	3 PT. LKM BKD (*Audited*)			9.947.329.760,00	907.961.638,00	51.936.378,00	10.907.227.776,00	5.774.900.694,00	0,00	5.774.900.694,00	4.506.000.000,00	309.578,00	4.506.309.578,00	384.743.282,00	241.274.222,00	5.132.327.082,00	99,11	99,11
	Total Seluruh Bidang industri			**2.776.355.712.732,00**	**216.070.864.070,00**	**34.428.102.488,00**	**3.026.854.678.291,00**	**2.355.423.930.913,00**	**16.520.914.789,00**	**2.371.944.845.702,00**	**541.256.247.732,00**	**1.580.309.578,00**	**447.321.111.660,00**	**78.090.794.677,00**	**19.250.227.649,00**	**654.909.832.590,00**		

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PEMALANG

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2024	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Bidang Perbankan**			**273.548.165.988,00**	**225.460.532.688,00**	**48.087.633.300,00**	**1.972.631.889,00**	**4.231.259.532,00**	**45.829.005.657,00**
	1 PT. BPR Bank Pemalang (*Audited*)			5.450.278.013,00	10.791.803.560,00	(5.341.525.547,00)	58.934.755,00	87.245.000,00	(5.369.835.792,00)
	2 PT. BPR BKK Taman (*Audited*)			19.738.749.344,00	16.425.619.041,00	3.313.130.303,00	1.090.000,00	1.079.734.918,00	2.234.485.385,00
	3 PT. BPR BKK Jateng (*Audited*)			248.359.138.631,00	198.243.110.087,00	50.116.028.544,00	1.912.607.134,00	3.064.279.614,00	48.964.356.064,00
2	**Bidang Lainnya**			**71.734.541.793,00**	**62.042.046.944,00**	**9.692.494.848,00**	**3.979.118.320,00**	**2.981.278.499,00**	**10.690.334.669,00**
	1 PDAM Tirta Mulia (*Audited*)			66.122.804.400,00	56.702.196.640,00	9.420.607.760,00	3.555.181.745,00	2.967.454.383,00	10.008.335.122,00
	2 PT. Aneka Usaha (*Audited*)			2.791.268.271,00	2.793.059.094,00	(1.790.824,00)	423.936.575,00	13.824.116,00	408.321.635,00
	3 PT. LKM BKD (*Audited*)			2.820.469.122,00	2.546.791.210,00	273.677.912,00	-	-	273.677.912,00
	Total Seluruh Bidang			**345.282.707.781,00**	**287.502.579.632,00**	**57.780.128.148,00**	**5.951.750.209,00**	**7.212.538.031,00**	**56.519.340.326,00**

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	2.807.367.254.000,00	2.755.590.550.648,00	(51.776.703.352,00)	98,16
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	233.640.000.000,00	224.566.728.709,00	(9.073.271.291,00)	96,12
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	229.500.000.000,00	218.384.657.616,00	(11.115.342.384,00)	95,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	229.500.000.000,00	369.910.000,00	(229.130.090.000,00)	0,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	229.500.000.000,00	369.910.000,00	(229.130.090.000,00)	0,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	229.500.000.000,00	369.910.000,00	(229.130.090.000,00)	0,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	229.500.000.000,00	369.910.000,00	(229.130.090.000,00)	0,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		RSUD Dr. M. Ashari	-	129.385.294.035,00	129.385.294.035,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	-	21.707.114.921,00	21.707.114.921,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	-	107.678.179.114,00	107.678.179.114,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	107.678.179.114,00	107.678.179.114,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	21.707.114.921,00	21.707.114.921,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	-	107.678.179.114,00	107.678.179.114,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	-	21.707.114.921,00	21.707.114.921,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Banyumudal	-	4.195.842.035,00	4.195.842.035,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.195.842.035,00	4.195.842.035,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.195.842.035,00	4.195.842.035,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.195.842.035,00	4.195.842.035,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Warungpring	-	2.143.495.935,00	2.143.495.935,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.143.495.935,00	2.143.495.935,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.143.495.935,00	2.143.495.935,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.143.495.935,00	2.143.495.935,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Pulosari	-	4.249.726.254,00	4.249.726.254,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.249.726.254,00	4.249.726.254,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.249.726.254,00	4.249.726.254,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.249.726.254,00	4.249.726.254,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Belik	-	6.966.149.043,00	6.966.149.043,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	-	6.966.149.043,00	6.966.149.043,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.966.149.043,00	6.966.149.043,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	-	6.966.149.043,00	6.966.149.043,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Watukumpul	-	3.255.496.668,00	3.255.496.668,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.255.496.668,00	3.255.496.668,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.255.496.668,00	3.255.496.668,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.255.496.668,00	3.255.496.668,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Kebandaran	-	3.252.029.456,00	3.252.029.456,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.252.029.456,00	3.252.029.456,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.252.029.456,00	3.252.029.456,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.252.029.456,00	3.252.029.456,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Bantarbolang	-	5.343.881.758,00	5.343.881.758,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	-	5.343.881.758,00	5.343.881.758,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5.343.881.758,00	5.343.881.758,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.02	Retribusi Daerah	-	5.343.881.758,00	5.343.881.758,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Randudongkal	-	3.837.708.486,00	3.837.708.486,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.837.708.486,00	3.837.708.486,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.837.708.486,00	3.837.708.486,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.837.708.486,00	3.837.708.486,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Kalimas	-	2.278.800.964,00	2.278.800.964,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.278.800.964,00	2.278.800.964,00	0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.278.800.964,00	2.278.800.964,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.278.800.964,00	2.278.800.964,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Paduraksa	-	3.348.445.322,00	3.348.445.322,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.348.445.322,00	3.348.445.322,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.348.445.322,00	3.348.445.322,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.348.445.322,00	3.348.445.322,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Mulyoharjo	-	3.573.818.324,00	3.573.818.324,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.573.818.324,00	3.573.818.324,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.573.818.324,00	3.573.818.324,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.573.818.324,00	3.573.818.324,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Kebondalem	-	3.615.691.631,00	3.615.691.631,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.615.691.631,00	3.615.691.631,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.615.691.631,00	3.615.691.631,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.615.691.631,00	3.615.691.631,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Banjardawa	-	3.458.796.259,00	3.458.796.259,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.458.796.259,00	3.458.796.259,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.458.796.259,00	3.458.796.259,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.458.796.259,00	3.458.796.259,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Kabunan	-	2.845.612.787,00	2.845.612.787,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.845.612.787,00	2.845.612.787,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.845.612.787,00	2.845.612.787,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.845.612.787,00	2.845.612.787,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Puskesmas Jebed	-	3.284.695.314,00	3.284.695.314,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.284.695.314,00	3.284.695.314,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.284.695.314,00	3.284.695.314,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.284.695.314,00	3.284.695.314,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas Petarukan	-	4.313.867.106,00	4.313.867.106,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.313.867.106,00	4.313.867.106,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.313.867.106,00	4.313.867.106,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.313.867.106,00	4.313.867.106,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Klareyan	-	4.049.434.020,00	4.049.434.020,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.049.434.020,00	4.049.434.020,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.049.434.020,00	4.049.434.020,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.049.434.020,00	4.049.434.020,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		Puskesmas Losari	-	4.744.189.443,00	4.744.189.443,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.744.189.443,00	4.744.189.443,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.744.189.443,00	4.744.189.443,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.744.189.443,00	4.744.189.443,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		Puskesmas Purwoharjo	-	4.892.394.546,00	4.892.394.546,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.892.394.546,00	4.892.394.546,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.892.394.546,00	4.892.394.546,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.892.394.546,00	4.892.394.546,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022		Puskesmas Sarwodadi	-	2.330.491.899,00	2.330.491.899,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.330.491.899,00	2.330.491.899,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.330.491.899,00	2.330.491.899,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.330.491.899,00	2.330.491.899,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023		Puskesmas Rowosari	-	2.205.050.137,00	2.205.050.137,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.205.050.137,00	2.205.050.137,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.205.050.137,00	2.205.050.137,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.205.050.137,00	2.205.050.137,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024		Puskesmas Mojo	-	3.474.583.317,00	3.474.583.317,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.474.583.317,00	3.474.583.317,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.474.583.317,00	3.474.583.317,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.474.583.317,00	3.474.583.317,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025		Puskesmas Cikadu	-	2.333.800.321,00	2.333.800.321,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.333.800.321,00	2.333.800.321,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.333.800.321,00	2.333.800.321,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.333.800.321,00	2.333.800.321,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026		Puskesmas Jatiroyom	-	2.241.462.880,00	2.241.462.880,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.241.462.880,00	2.241.462.880,00	0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.241.462.880,00	2.241.462.880,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.241.462.880,00	2.241.462.880,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027		Puskesmas Karangasem	-	2.393.989.676,00	2.393.989.676,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.393.989.676,00	2.393.989.676,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.393.989.676,00	2.393.989.676,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.393.989.676,00	2.393.989.676,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.880.000.000,00	6.025.411.093,00	2.145.411.093,00	155,29
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.880.000.000,00	6.025.411.093,00	2.145.411.093,00	155,29
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.880.000.000,00	6.025.411.093,00	2.145.411.093,00	155,29
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.880.000.000,00	6.025.411.093,00	2.145.411.093,00	155,29
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.880.000.000,00	6.025.411.093,00	2.145.411.093,00	155,29
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15.986.500.000,00	12.712.372.226,00	(3.274.127.774,00)	79,52
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	375.000.000,00	379.604.500,00	4.604.500,00	101,23
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	375.000.000,00	379.604.500,00	4.604.500,00	101,23
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	379.604.500,00	4.604.500,00	101,23
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	379.604.500,00	4.604.500,00	101,23
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	175.000.000,00	177.058.000,00	2.058.000,00	101,18
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.000.000,00	202.546.500,00	2.546.500,00	101,27
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.060.000.000,00	9.497.812.202,00	(1.562.187.798,00)	85,88
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	11.060.000.000,00	9.497.812.202,00	(1.562.187.798,00)	85,88
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	11.060.000.000,00	9.497.812.202,00	(1.562.187.798,00)	85,88
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.060.000.000,00	9.497.812.202,00	(1.562.187.798,00)	85,88
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	11.000.000.000,00	9.340.702.202,00	(1.659.297.798,00)	84,92
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.000.000,00	157.110.000,00	97.110.000,00	261,85
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.300.000.000,00	1.545.671.000,00	(1.754.329.000,00)	46,84
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	3.300.000.000,00	1.545.671.000,00	(1.754.329.000,00)	46,84
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.300.000.000,00	1.545.671.000,00	(1.754.329.000,00)	46,84
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.300.000.000,00	1.545.671.000,00	(1.754.329.000,00)	46,84
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.050.000.000,00	1.385.171.000,00	(1.664.829.000,00)	45,42
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	250.000.000,00	160.500.000,00	(89.500.000,00)	64,20
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	425.000.000,00	473.475.000,00	48.475.000,00	111,41
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	425.000.000,00	473.475.000,00	48.475.000,00	111,41
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	425.000.000,00	473.475.000,00	48.475.000,00	111,41
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	425.000.000,00	473.475.000,00	48.475.000,00	111,41
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	425.000.000,00	473.475.000,00	48.475.000,00	111,41
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	726.500.000,00	712.563.000,00	(13.937.000,00)	98,08
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	726.500.000,00	712.563.000,00	(13.937.000,00)	98,08
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	726.500.000,00	712.563.000,00	(13.937.000,00)	98,08
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	726.500.000,00	712.563.000,00	(13.937.000,00)	98,08
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	726.500.000,00	712.563.000,00	(13.937.000,00)	98,08
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,25
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,25
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,25
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,25
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,25
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.050.000.000,00	2.767.797.826,00	(1.282.202.174,00)	68,34
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.050.000.000,00	2.767.797.826,00	(1.282.202.174,00)	68,34
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	4.050.000.000,00	2.767.797.826,00	(1.282.202.174,00)	68,34
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	4.050.000.000,00	2.767.797.826,00	(1.282.202.174,00)	68,34
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.050.000.000,00	2.767.797.826,00	(1.282.202.174,00)	68,34
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	4.050.000.000,00	2.767.797.826,00	(1.282.202.174,00)	68,34
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.553.690.754.000,00	2.515.543.651.887,00	(38.147.102.113,00)	98,51
5.02			KEUANGAN	2.553.690.754.000,00	2.515.543.651.887,00	(38.147.102.113,00)	98,51
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.426.635.254.000,00	2.391.021.523.800,00	(35.613.730.200,00)	98,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.426.635.254.000,00	2.076.405.736.072,00	(350.229.517.928,00)	85,57

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	-	314.615.787.728,00	314.615.787.728,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	(1.426.570.163,00)	(1.426.570.163,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.481.761.000,00	39.815.873.835,00	3.334.112.835,00	109,14
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.031.761.000,00	26.031.762.403,00	1.403,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	(1.426.570.163,00)	(1.426.570.163,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.450.000.000,00	13.784.111.432,00	3.334.111.432,00	131,91
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	-	316.042.357.891,00	316.042.357.891,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.390.153.493.000,00	2.036.589.862.237,00	(353.563.630.763,00)	85,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.153.066.903.000,00	1.825.809.411.519,00	(327.257.491.481,00)	84,80
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	316.042.357.891,00	316.042.357.891,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	237.086.590.000,00	210.780.450.718,00	(26.306.139.282,00)	88,90
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	127.055.500.000,00	124.522.128.087,00	(2.533.371.913,00)	98,01
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	127.055.500.000,00	124.522.128.087,00	(2.533.371.913,00)	98,01
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	127.055.500.000,00	124.522.128.087,00	(2.533.371.913,00)	98,01
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.01	Pajak Daerah	123.205.300.000,00	120.978.507.825,00	(2.226.792.175,00)	98,19
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.850.200.000,00	3.543.620.262,00	(306.579.738,00)	92,04
		5	Belanja	3.001.406.468.000,00	2.797.563.975.971,83	(203.842.492.028,17)	93,21
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.003.339.175.008,00	1.833.559.809.779,00	(169.779.365.229,00)	91,53
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.220.035.337.213,00	1.107.124.854.791,00	(112.910.482.422,00)	90,75
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.220.035.337.213,00	1.107.124.854.791,00	(112.910.482.422,00)	90,75
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.220.035.337.213,00	1.107.124.854.791,00	(112.910.482.422,00)	90,75
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.140.121.753.739,00	1.031.932.642.272,00	(108.189.111.467,00)	90,51
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	917.817.790.029,00	815.430.131.033,00	(102.387.658.996,00)	88,84
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.409.479.176,00	164.010.835.481,00	(5.398.643.695,00)	96,81
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	52.894.484.534,00	52.491.675.758,00	(402.808.776,00)	99,24
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	79.913.583.474,00	75.192.212.519,00	(4.721.370.955,00)	94,09
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.747.549.248,00	21.492.002.439,00	(255.546.809,00)	98,82
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.057.390.481,00	36.057.521.685,00	(5.999.868.796,00)	85,73
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.108.643.745,00	17.642.688.395,00	1.534.044.650,00	109,52
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	543.414.816.913,00	496.897.235.296,00	(46.517.581.617,00)	91,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	260.705.043.393,00	247.148.552.573,00	(13.556.490.820,00)	94,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	260.705.043.393,00	247.148.552.573,00	(13.556.490.820,00)	94,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	237.413.484.183,00	224.684.587.727,00	(12.728.896.456,00)	94,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	118.785.585.000,00	111.015.628.332,00	(7.769.956.668,00)	93,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.027.899.183,00	113.068.959.395,00	(4.958.939.788,00)	95,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.291.559.210,00	22.463.964.846,00	(827.594.364,00)	96,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.185.652.210,00	15.083.833.140,00	(101.819.070,00)	99,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.818.407.000,00	1.470.131.706,00	(348.275.294,00)	80,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.287.500.000,00	5.910.000.000,00	(377.500.000,00)	94,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		RSUD Dr. M. Ashari	177.796.757.929,00	157.736.869.517,00	(20.059.888.412,00)	88,72
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	177.796.757.929,00	157.736.869.517,00	(20.059.888.412,00)	88,72
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	151.508.849.265,00	134.579.295.761,00	(16.929.553.504,00)	88,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	87.000.000.000,00	73.766.079.206,00	(13.233.920.794,00)	84,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.508.849.265,00	60.813.216.555,00	(3.695.632.710,00)	94,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	26.287.908.664,00	23.157.573.756,00	(3.130.334.908,00)	88,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.491.308.664,00	20.498.412.143,00	(2.992.896.521,00)	87,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.600.000,00	73.590.613,00	(23.009.387,00)	76,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.700.000.000,00	2.585.571.000,00	(114.429.000,00)	95,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Banyumudal	4.890.089.000,00	4.074.542.848,00	(815.546.152,00)	83,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	4.890.089.000,00	4.074.542.848,00	(815.546.152,00)	83,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.686.935.350,00	3.944.593.348,00	(742.342.002,00)	84,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	2.424.400.000,00	2.313.656.071,00	(110.743.929,00)	95,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.262.535.350,00	1.630.937.277,00	(631.598.073,00)	72,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	203.153.650,00	129.949.500,00	(73.204.150,00)	63,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.153.650,00	129.949.500,00	(73.204.150,00)	63,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Warungpring	2.941.986.360,00	2.557.220.428,00	(384.765.932,00)	86,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	2.941.986.360,00	2.557.220.428,00	(384.765.932,00)	86,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.810.891.760,00	2.453.596.053,00	(357.295.707,00)	87,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	1.415.694.360,00	1.208.791.167,00	(206.903.193,00)	85,39

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.395.197.400,00	1.244.804.886,00	(150.392.514,00)	89,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	131.094.600,00	103.624.375,00	(27.470.225,00)	79,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.094.600,00	103.624.375,00	(27.470.225,00)	79,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Pulosari	4.569.654.860,00	4.025.953.937,00	(543.700.923,00)	88,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	4.569.654.860,00	4.025.953.937,00	(543.700.923,00)	88,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.405.748.024,00	3.885.470.929,00	(520.277.095,00)	88,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	2.435.455.350,00	2.162.091.145,00	(273.364.205,00)	88,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.970.292.674,00	1.723.379.784,00	(246.912.890,00)	87,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	163.906.836,00	140.483.008,00	(23.423.828,00)	85,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.906.836,00	140.483.008,00	(23.423.828,00)	85,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Belik	7.244.025.000,00	5.720.316.222,00	(1.523.708.778,00)	78,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	7.244.025.000,00	5.720.316.222,00	(1.523.708.778,00)	78,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.890.888.575,00	5.498.246.222,00	(1.392.642.353,00)	79,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	4.170.800.000,00	3.869.323.761,00	(301.476.239,00)	92,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.720.088.575,00	1.628.922.461,00	(1.091.166.114,00)	59,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	353.136.425,00	222.070.000,00	(131.066.425,00)	62,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.136.425,00	222.070.000,00	(131.066.425,00)	62,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Watukumpul	3.416.101.000,00	3.032.254.064,00	(383.846.936,00)	88,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	3.416.101.000,00	3.032.254.064,00	(383.846.936,00)	88,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.316.228.250,00	2.937.994.064,00	(378.234.186,00)	88,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	1.711.800.000,00	1.494.147.863,00	(217.652.137,00)	87,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.604.428.250,00	1.443.846.201,00	(160.582.049,00)	89,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	99.872.750,00	94.260.000,00	(5.612.750,00)	94,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.872.750,00	94.260.000,00	(5.612.750,00)	94,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Kebandaran	3.719.004.000,00	3.461.394.602,00	(257.609.398,00)	93,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	3.719.004.000,00	3.461.394.602,00	(257.609.398,00)	93,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.680.861.460,00	3.461.394.602,00	(219.466.858,00)	94,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000.000,00	1.768.557.267,00	(31.442.733,00)	98,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.880.861.460,00	1.692.837.335,00	(188.024.125,00)	90,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	38.142.540,00	-	(38.142.540,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.142.540,00	-	(38.142.540,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Bantarbolang	5.835.690.525,00	5.431.392.995,00	(404.297.530,00)	93,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	5.835.690.525,00	5.431.392.995,00	(404.297.530,00)	93,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.510.750.518,00	5.163.556.595,00	(347.193.923,00)	93,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	3.133.407.525,00	2.917.288.829,00	(216.118.696,00)	93,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.377.342.993,00	2.246.267.766,00	(131.075.227,00)	94,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	324.940.007,00	267.836.400,00	(57.103.607,00)	82,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	324.940.007,00	267.836.400,00	(57.103.607,00)	82,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Randudongkal	3.928.392.809,00	3.700.528.433,00	(227.864.376,00)	94,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	3.928.392.809,00	3.700.528.433,00	(227.864.376,00)	94,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.810.076.780,00	3.588.786.433,00	(221.290.347,00)	94,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	2.001.626.809,00	1.900.262.443,00	(101.364.366,00)	94,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.808.449.971,00	1.688.523.990,00	(119.925.981,00)	93,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	118.316.029,00	111.742.000,00	(6.574.029,00)	94,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.316.029,00	111.742.000,00	(6.574.029,00)	94,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Kalimas	3.044.713.441,00	2.697.969.187,00	(346.744.254,00)	88,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	3.044.713.441,00	2.697.969.187,00	(346.744.254,00)	88,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.001.618.281,00	2.659.649.027,00	(341.969.254,00)	88,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	1.529.610.441,00	1.304.015.242,00	(225.595.199,00)	85,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.007.840,00	1.355.633.785,00	(116.374.055,00)	92,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	43.095.160,00	38.320.160,00	(4.775.000,00)	88,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.095.160,00	38.320.160,00	(4.775.000,00)	88,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Paduraksa	4.074.053.000,00	3.619.764.181,00	(454.288.819,00)	88,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	4.074.053.000,00	3.619.764.181,00	(454.288.819,00)	88,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	3.911.919.345,00	3.491.138.681,00	(420.780.664,00)	89,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	1.972.000.000,00	1.916.358.848,00	(55.641.152,00)	97,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.939.919.345,00	1.574.779.833,00	(365.139.512,00)	81,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	162.133.655,00	128.625.500,00	(33.508.155,00)	79,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.133.655,00	128.625.500,00	(33.508.155,00)	79,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Mulyoharjo	4.268.035.000,00	3.745.634.029,00	(522.400.971,00)	87,76

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	4.268.035.000,00	3.745.634.029,00	(522.400.971,00)	87,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	4.212.910.032,00	3.718.084.029,00	(494.826.003,00)	88,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	2.177.000.000,00	2.081.945.595,00	(95.054.405,00)	95,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.035.910.032,00	1.636.138.434,00	(399.771.598,00)	80,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	55.124.968,00	27.550.000,00	(27.574.968,00)	49,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.124.968,00	27.550.000,00	(27.574.968,00)	49,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Kebondalem	4.325.894.000,00	3.613.813.084,00	(712.080.916,00)	83,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	4.325.894.000,00	3.613.813.084,00	(712.080.916,00)	83,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	4.121.698.814,00	3.462.843.084,00	(658.855.730,00)	84,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	2.229.500.000,00	2.076.147.409,00	(153.352.591,00)	93,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.892.198.814,00	1.386.695.675,00	(505.503.139,00)	73,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	204.195.186,00	150.970.000,00	(53.225.186,00)	73,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.195.186,00	150.970.000,00	(53.225.186,00)	73,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Banjardawa	3.799.794.950,00	3.432.149.518,00	(367.645.432,00)	90,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	3.799.794.950,00	3.432.149.518,00	(367.645.432,00)	90,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	3.691.759.828,00	3.353.577.556,00	(338.182.272,00)	90,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	1.870.193.950,00	1.866.937.286,00	(3.256.664,00)	99,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.821.565.878,00	1.486.640.270,00	(334.925.608,00)	81,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	108.035.122,00	78.571.962,00	(29.463.160,00)	72,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.035.122,00	78.571.962,00	(29.463.160,00)	72,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Kabunan	3.373.001.000,00	2.844.624.683,00	(528.376.317,00)	84,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5	BELANJA DAERAH	3.373.001.000,00	2.844.624.683,00	(528.376.317,00)	84,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.251.797.278,00	2.761.829.683,00	(489.967.595,00)	84,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1.01	Belanja Pegawai	1.672.500.000,00	1.626.529.806,00	(45.970.194,00)	97,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.297.278,00	1.135.299.877,00	(443.997.401,00)	71,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	121.203.722,00	82.795.000,00	(38.408.722,00)	68,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.203.722,00	82.795.000,00	(38.408.722,00)	68,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Puskesmas Jebed	4.194.283.500,00	3.554.866.016,00	(639.417.484,00)	84,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5	BELANJA DAERAH	4.194.283.500,00	3.554.866.016,00	(639.417.484,00)	84,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	4.006.250.660,00	3.388.256.016,00	(617.994.644,00)	84,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.01	Belanja Pegawai	2.140.000.000,00	1.774.104.628,00	(365.895.372,00)	82,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.866.250.660,00	1.614.151.388,00	(252.099.272,00)	86,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	188.032.840,00	166.610.000,00	(21.422.840,00)	88,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.032.840,00	166.610.000,00	(21.422.840,00)	88,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas Petarukan	5.042.280.240,00	4.581.133.759,00	(461.146.481,00)	90,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5	BELANJA DAERAH	5.042.280.240,00	4.581.133.759,00	(461.146.481,00)	90,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	4.975.182.240,00	4.575.403.759,00	(399.778.481,00)	91,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1.01	Belanja Pegawai	2.676.842.240,00	2.484.051.967,00	(192.790.273,00)	92,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.298.340.000,00	2.091.351.792,00	(206.988.208,00)	90,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	67.098.000,00	5.730.000,00	(61.368.000,00)	8,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.348.000,00	5.730.000,00	(57.618.000,00)	9,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Klareyan	5.004.626.000,00	3.822.146.805,00	(1.182.479.195,00)	76,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5	BELANJA DAERAH	5.004.626.000,00	3.822.146.805,00	(1.182.479.195,00)	76,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	4.705.968.400,00	3.681.527.239,00	(1.024.441.161,00)	78,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.01	Belanja Pegawai	2.735.577.600,00	2.441.224.831,00	(294.352.769,00)	89,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.970.390.800,00	1.240.302.408,00	(730.088.392,00)	62,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	298.657.600,00	140.619.566,00	(158.038.034,00)	47,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.603.825,00	64.318.216,00	(134.285.609,00)	32,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.053.775,00	76.301.350,00	(23.752.425,00)	76,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		Puskesmas Losari	6.058.475.000,00	5.362.543.730,00	(695.931.270,00)	88,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5	BELANJA DAERAH	6.058.475.000,00	5.362.543.730,00	(695.931.270,00)	88,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	5.808.884.002,00	5.299.088.730,00	(509.795.272,00)	91,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1.01	Belanja Pegawai	2.685.120.000,00	2.669.706.451,00	(15.413.549,00)	99,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.123.764.002,00	2.629.382.279,00	(494.381.723,00)	84,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	249.590.998,00	63.455.000,00	(186.135.998,00)	25,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.590.998,00	63.455.000,00	(186.135.998,00)	25,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		Puskesmas Purwoharjo	5.498.804.000,00	4.813.402.866,00	(685.401.134,00)	87,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5	BELANJA DAERAH	5.498.804.000,00	4.813.402.866,00	(685.401.134,00)	87,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	5.244.421.600,00	4.594.832.526,00	(649.589.074,00)	87,61

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	2.626.000.000,00	2.594.391.274,00	(31.608.726,00)	98,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.618.421.600,00	2.000.441.252,00	(617.980.348,00)	76,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	254.382.400,00	218.570.340,00	(35.812.060,00)	85,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.382.400,00	218.570.340,00	(33.812.060,00)	86,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022		Puskesmas Sarwodadi	2.833.009.000,00	2.692.173.727,00	(140.835.273,00)	95,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5	BELANJA DAERAH	2.833.009.000,00	2.692.173.727,00	(140.835.273,00)	95,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	2.684.332.618,00	2.562.256.727,00	(122.075.891,00)	95,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1.01	Belanja Pegawai	1.486.000.000,00	1.424.739.896,00	(61.260.104,00)	95,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.332.618,00	1.137.516.831,00	(60.815.787,00)	94,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	148.676.382,00	129.917.000,00	(18.759.382,00)	87,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.676.382,00	129.917.000,00	(18.759.382,00)	87,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023		Puskesmas Rowosari	2.855.940.000,00	2.566.498.300,00	(289.441.700,00)	89,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5	BELANJA DAERAH	2.855.940.000,00	2.566.498.300,00	(289.441.700,00)	89,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	2.816.590.800,00	2.547.713.450,00	(268.877.350,00)	90,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1.01	Belanja Pegawai	1.453.557.650,00	1.360.228.044,00	(93.329.606,00)	93,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.363.033.150,00	1.187.485.406,00	(175.547.744,00)	87,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	39.349.200,00	18.784.850,00	(20.564.350,00)	47,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.349.200,00	18.784.850,00	(20.564.350,00)	47,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024		Puskesmas Mojo	4.286.058.551,00	3.934.753.755,00	(351.304.796,00)	91,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5	BELANJA DAERAH	4.286.058.551,00	3.934.753.755,00	(351.304.796,00)	91,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	4.169.128.529,00	3.822.719.915,00	(346.408.614,00)	91,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000.000,00	2.016.960.745,00	(3.039.255,00)	99,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.149.128.529,00	1.805.759.170,00	(343.369.359,00)	84,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.2	BELANJA MODAL	116.930.022,00	112.033.840,00	(4.896.182,00)	95,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.930.022,00	112.033.840,00	(4.896.182,00)	95,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025		Puskesmas Cikadu	3.032.465.000,00	2.639.459.884,00	(393.005.116,00)	87,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5	BELANJA DAERAH	3.032.465.000,00	2.639.459.884,00	(393.005.116,00)	87,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	2.866.835.825,00	2.511.676.884,00	(355.158.941,00)	87,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.1.01	Belanja Pegawai	1.426.872.000,00	1.342.311.163,00	(84.560.837,00)	94,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.439.963.825,00	1.169.365.721,00	(270.598.104,00)	81,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.2	BELANJA MODAL	165.629.175,00	127.783.000,00	(37.846.175,00)	77,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.629.175,00	127.783.000,00	(37.846.175,00)	77,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026		Puskesmas Jatiroyom	2.795.079.655,00	2.575.742.032,00	(219.337.623,00)	92,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5	BELANJA DAERAH	2.795.079.655,00	2.575.742.032,00	(219.337.623,00)	92,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	2.657.217.283,00	2.452.819.532,00	(204.397.751,00)	92,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.1.01	Belanja Pegawai	1.445.108.283,00	1.317.998.388,00	(127.109.895,00)	91,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.212.109.000,00	1.134.821.144,00	(77.287.856,00)	93,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	137.862.372,00	122.922.500,00	(14.939.872,00)	89,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.862.372,00	122.922.500,00	(14.939.872,00)	89,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027		Puskesmas Karangasem	3.391.506.000,00	3.095.856.658,00	(295.649.342,00)	91,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5	BELANJA DAERAH	3.391.506.000,00	3.095.856.658,00	(295.649.342,00)	91,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	3.312.889.290,00	3.034.737.659,00	(278.151.631,00)	91,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.1.01	Belanja Pegawai	1.431.000.000,00	1.363.480.898,00	(67.519.102,00)	95,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.881.889.290,00	1.671.256.761,00	(210.632.529,00)	88,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.2	BELANJA MODAL	78.616.710,00	61.118.999,00	(17.497.711,00)	77,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.447.980,00	61.118.999,00	(17.328.981,00)	77,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.730,00	-	(168.730,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028		Laboratorium Kesehatan Daerah	490.053.700,00	415.677.463,00	(74.376.237,00)	84,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5	BELANJA DAERAH	490.053.700,00	415.677.463,00	(74.376.237,00)	84,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	480.053.700,00	405.677.463,00	(74.376.237,00)	84,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.053.700,00	405.677.463,00	(74.376.237,00)	84,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	149.124.092.264,00	142.876.680.023,00	(6.247.412.241,00)	95,81
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	149.124.092.264,00	142.876.680.023,00	(6.247.412.241,00)	95,81
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	149.124.092.264,00	142.876.680.023,00	(6.247.412.241,00)	95,81
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	115.946.901.158,00	109.765.534.987,00	(6.181.366.171,00)	94,67
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	16.509.259.000,00	14.765.970.660,00	(1.743.288.340,00)	89,44
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.005.142.158,00	92.618.368.727,00	(4.386.773.431,00)	95,48

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.432.500.000,00	2.381.195.600,00	(51.304.400,00)	97,89
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	33.177.191.106,00	33.111.145.036,00	(66.046.070,00)	99,80
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	393.953.206,00	355.212.000,00	(38.741.206,00)	90,17
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	690.000.000,00	687.068.000,00	(2.932.000,00)	99,58
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.093.237.900,00	32.068.865.036,00	(24.372.864,00)	99,92
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	45.276.303.000,00	43.654.393.286,00	(1.621.909.714,00)	96,42
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	45.276.303.000,00	43.654.393.286,00	(1.621.909.714,00)	96,42
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	45.276.303.000,00	43.654.393.286,00	(1.621.909.714,00)	96,42
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	41.457.063.000,00	40.236.815.454,00	(1.220.247.546,00)	97,06
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.681.786.000,00	4.602.138.446,00	(1.079.647.554,00)	81,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.400.277.000,00	33.259.677.008,00	(140.599.992,00)	99,58
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00	-	100,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.819.240.000,00	3.417.577.832,00	(401.662.168,00)	89,48
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.320.000,00	13.320.000,00	-	100,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.805.920.000,00	3.404.257.832,00	(401.662.168,00)	89,45
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.940.073.000,00	21.561.385.305,00	(1.378.687.695,00)	93,99
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	14.522.544.400,00	13.883.140.159,00	(639.404.241,00)	95,60
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.522.544.400,00	13.883.140.159,00	(639.404.241,00)	95,60
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.486.289.450,00	13.846.885.209,00	(639.404.241,00)	95,59
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.089.745.000,00	7.557.925.017,00	(531.819.983,00)	93,43
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.396.544.450,00	6.288.960.192,00	(107.584.258,00)	98,32
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	36.254.950,00	36.254.950,00	-	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.254.950,00	36.254.950,00	-	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.417.528.600,00	7.678.245.146,00	(739.283.454,00)	91,22
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	8.417.528.600,00	7.678.245.146,00	(739.283.454,00)	91,22
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.310.493.100,00	7.571.595.746,00	(738.897.354,00)	91,11
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.184.001.000,00	3.509.425.211,00	(674.575.789,00)	83,88
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.126.492.100,00	4.062.170.535,00	(64.321.565,00)	98,44
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	107.035.500,00	106.649.400,00	(386.100,00)	99,64
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.035.500,00	106.649.400,00	(386.100,00)	99,64
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	22.548.552.618,00	21.445.261.078,00	(1.103.291.540,00)	95,11
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.548.552.618,00	21.445.261.078,00	(1.103.291.540,00)	95,11
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	22.548.552.618,00	21.445.261.078,00	(1.103.291.540,00)	95,11
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.867.227.618,00	20.116.332.078,00	(750.895.540,00)	96,40
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.872.786.000,00	4.602.685.826,00	(270.100.174,00)	94,46
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.755.961.618,00	9.610.698.252,00	(145.263.366,00)	98,51
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.238.480.000,00	5.902.948.000,00	(335.532.000,00)	94,62
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.681.325.000,00	1.328.929.000,00	(352.396.000,00)	79,04
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.325.000,00	6.325.000,00	-	100,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.675.000.000,00	1.322.604.000,00	(352.396.000,00)	78,96
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	166.504.072.538,00	157.445.819.071,00	(9.058.253.467,00)	94,56
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11.308.474.350,00	10.492.630.011,00	(815.844.339,00)	92,79
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Tenaga Kerja	11.308.474.350,00	10.492.630.011,00	(815.844.339,00)	92,79
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.308.474.350,00	10.492.630.011,00	(815.844.339,00)	92,79
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.706.829.230,00	8.938.368.791,00	(768.460.439,00)	92,08
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.333.039.000,00	3.651.557.076,00	(681.481.924,00)	84,27
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.373.790.230,00	5.286.811.715,00	(86.978.515,00)	98,38
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.601.645.120,00	1.554.261.220,00	(47.383.900,00)	97,04
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.601.645.120,00	1.554.261.220,00	(47.383.900,00)	97,04
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.335.500.000,00	2.156.264.058,00	(179.235.942,00)	92,33
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.335.500.000,00	2.156.264.058,00	(179.235.942,00)	92,33
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.335.500.000,00	2.156.264.058,00	(179.235.942,00)	92,33
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.335.500.000,00	2.156.264.058,00	(179.235.942,00)	92,33
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.335.500.000,00	2.156.264.058,00	(179.235.942,00)	92,33
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	567.000.000,00	559.093.200,00	(7.906.800,00)	98,61
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	567.000.000,00	559.093.200,00	(7.906.800,00)	98,61
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	567.000.000,00	559.093.200,00	(7.906.800,00)	98,61
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	567.000.000,00	559.093.200,00	(7.906.800,00)	98,61
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.000.000,00	559.093.200,00	(7.906.800,00)	98,61
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.560.000.000,00	2.429.981.520,00	(130.018.480,00)	94,92

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.560.000.000,00	2.429.981.520,00	(130.018.480,00)	94,92
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.560.000.000,00	2.429.981.520,00	(130.018.480,00)	94,92
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000,00	230.405.520,00	(29.594.480,00)	88,62
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	230.405.520,00	(29.594.480,00)	88,62
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	(100.424.000,00)	95,63
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	(100.424.000,00)	95,63
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	29.028.583.000,00	27.361.398.333,00	(1.667.184.667,00)	94,26
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	29.028.583.000,00	27.361.398.333,00	(1.667.184.667,00)	94,26
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	29.028.583.000,00	27.361.398.333,00	(1.667.184.667,00)	94,26
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	28.263.298.850,00	26.711.419.597,00	(1.551.879.253,00)	94,51
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.443.636.000,00	13.750.417.892,00	(693.218.108,00)	95,20
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.634.262.850,00	12.775.934.705,00	(858.328.145,00)	93,70
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	185.400.000,00	185.067.000,00	(333.000,00)	99,82
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	765.284.150,00	649.978.736,00	(115.305.414,00)	84,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	451.252.150,00	436.420.736,00	(14.831.414,00)	96,71
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	13.780.000,00	(220.000,00)	98,43
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.032.000,00	199.778.000,00	(100.254.000,00)	66,59
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.085.544.800,00	7.741.697.267,00	(1.343.847.533,00)	85,21
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.085.544.800,00	7.741.697.267,00	(1.343.847.533,00)	85,21
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.085.544.800,00	7.741.697.267,00	(1.343.847.533,00)	85,21
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.073.814.800,00	7.731.737.267,00	(1.342.077.533,00)	85,21
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.507.322.000,00	4.339.515.448,00	(1.167.806.552,00)	78,80
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.566.492.800,00	3.392.221.819,00	(174.270.981,00)	95,11
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.730.000,00	9.960.000,00	(1.770.000,00)	84,91
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.730.000,00	9.960.000,00	(1.770.000,00)	84,91
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.776.280.500,00	10.906.108.919,00	(870.171.581,00)	92,61
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11.776.280.500,00	10.906.108.919,00	(870.171.581,00)	92,61
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.776.280.500,00	10.906.108.919,00	(870.171.581,00)	92,61
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.747.255.500,00	10.877.308.919,00	(869.946.581,00)	92,59
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.665.291.000,00	3.935.797.166,00	(729.493.834,00)	84,36
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.081.964.500,00	6.941.511.753,00	(140.452.747,00)	98,02
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	29.025.000,00	28.800.000,00	(225.000,00)	99,22
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.025.000,00	28.800.000,00	(225.000,00)	99,22
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.403.648.418,00	14.371.448.240,00	(32.200.178,00)	99,78
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.403.648.418,00	14.371.448.240,00	(32.200.178,00)	99,78
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.403.648.418,00	14.371.448.240,00	(32.200.178,00)	99,78
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.206.119.098,00	14.184.514.780,00	(21.604.318,00)	99,85
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.206.119.098,00	14.184.514.780,00	(21.604.318,00)	99,85
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	197.529.320,00	186.933.460,00	(10.595.860,00)	94,64
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.529.320,00	186.933.460,00	(10.595.860,00)	94,64
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	14.280.623.600,00	13.864.930.272,00	(415.693.328,00)	97,09
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	14.280.623.600,00	13.864.930.272,00	(415.693.328,00)	97,09
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.280.623.600,00	13.864.930.272,00	(415.693.328,00)	97,09
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.713.472.380,00	13.303.564.294,00	(409.908.086,00)	97,01
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.575.684.500,00	8.266.752.686,00	(308.931.814,00)	96,40
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.957.787.880,00	4.870.611.608,00	(87.176.272,00)	98,24
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	180.000.000,00	166.200.000,00	(13.800.000,00)	92,33
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	567.151.220,00	561.365.978,00	(5.785.242,00)	98,98
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.551.220,00	277.338.337,00	(5.212.883,00)	98,16
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.600.000,00	96.402.996,00	(197.004,00)	99,80
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	188.000.000,00	187.624.645,00	(375.355,00)	99,80
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.978.489.000,00	13.606.617.913,00	(371.871.087,00)	97,34
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	13.978.489.000,00	13.606.617.913,00	(371.871.087,00)	97,34
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.978.489.000,00	13.606.617.913,00	(371.871.087,00)	97,34
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.699.896.396,00	13.331.439.163,00	(368.457.233,00)	97,31
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.456.233.000,00	5.211.818.523,00	(244.414.477,00)	95,52
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.118.663.396,00	7.994.620.640,00	(124.042.756,00)	98,47
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	278.592.604,00	275.178.750,00	(3.413.854,00)	98,77
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.592.604,00	275.178.750,00	(3.413.854,00)	98,77

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	26.242.441.000,00	24.625.654.199,00	(1.616.786.801,00)	93,84
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	26.242.441.000,00	24.625.654.199,00	(1.616.786.801,00)	93,84
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	26.242.441.000,00	24.625.654.199,00	(1.616.786.801,00)	93,84
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	26.074.249.600,00	24.458.312.799,00	(1.615.936.801,00)	93,80
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	19.585.621.000,00	18.061.556.805,00	(1.524.064.195,00)	92,22
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.191.128.600,00	5.153.255.994,00	(37.872.606,00)	99,27
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.147.500.000,00	1.093.500.000,00	(54.000.000,00)	95,29
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	168.191.400,00	167.341.400,00	(850.000,00)	99,49
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.191.400,00	167.341.400,00	(850.000,00)	99,49
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.406.130.400,00	6.046.373.747,00	(359.756.653,00)	94,38
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.406.130.400,00	6.046.373.747,00	(359.756.653,00)	94,38
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.406.130.400,00	6.046.373.747,00	(359.756.653,00)	94,38
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.019.130.400,00	5.660.000.183,00	(359.130.217,00)	94,03
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.441.608.000,00	3.106.042.110,00	(335.565.890,00)	90,25
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.577.522.400,00	2.553.958.073,00	(23.564.327,00)	99,09
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	387.000.000,00	386.373.564,00	(626.436,00)	99,84
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	385.000.000,00	384.473.564,00	(526.436,00)	99,86
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.399.000.000,00	9.168.319.923,00	(230.680.077,00)	97,55
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	9.399.000.000,00	9.168.319.923,00	(230.680.077,00)	97,55
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.399.000.000,00	9.168.319.923,00	(230.680.077,00)	97,55
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.944.660.000,00	8.714.615.879,00	(230.044.121,00)	97,43
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.604.660.000,00	4.424.615.879,00	(180.044.121,00)	96,09
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	4.340.000.000,00	4.290.000.000,00	(50.000.000,00)	98,85
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	454.340.000,00	453.704.044,00	(635.956,00)	99,86
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.280.000,00	58.279.950,00	(50,00)	100,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	396.060.000,00	395.424.094,00	(635.906,00)	99,84
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	128.373.000,00	127.221.469,00	(1.151.531,00)	99,10
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	128.373.000,00	127.221.469,00	(1.151.531,00)	99,10
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	128.373.000,00	127.221.469,00	(1.151.531,00)	99,10
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	128.373.000,00	127.221.469,00	(1.151.531,00)	99,10
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.373.000,00	127.221.469,00	(1.151.531,00)	99,10
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	277.137.600,00	275.083.965,00	(2.053.635,00)	99,26
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	277.137.600,00	275.083.965,00	(2.053.635,00)	99,26
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	277.137.600,00	275.083.965,00	(2.053.635,00)	99,26
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	276.637.600,00	274.592.676,00	(2.044.924,00)	99,26
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.637.600,00	274.592.676,00	(2.044.924,00)	99,26
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	500.000,00	491.289,00	(8.711,00)	98,26
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000,00	491.289,00	(8.711,00)	98,26
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.224.189.870,00	5.812.330.028,00	(411.859.842,00)	93,38
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.224.189.870,00	5.812.330.028,00	(411.859.842,00)	93,38
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.224.189.870,00	5.812.330.028,00	(411.859.842,00)	93,38
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.202.429.870,00	2.878.151.829,00	(324.278.041,00)	89,87
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.242.429.870,00	2.043.151.829,00	(199.278.041,00)	91,11
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	960.000.000,00	835.000.000,00	(125.000.000,00)	86,98
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.021.760.000,00	2.934.178.199,00	(87.581.801,00)	97,10
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.001.760.000,00	2.914.178.199,00	(87.581.801,00)	97,08
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	8.127.727.500,00	7.546.433.445,00	(581.294.055,00)	92,85
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.127.727.500,00	7.546.433.445,00	(581.294.055,00)	92,85
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.127.727.500,00	7.546.433.445,00	(581.294.055,00)	92,85
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.960.569.500,00	4.525.049.573,00	(435.519.927,00)	91,22
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.178.783.000,00	2.806.911.569,00	(371.871.431,00)	88,30
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.781.786.500,00	1.718.138.004,00	(63.648.496,00)	96,43
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.167.158.000,00	3.021.383.872,00	(145.774.128,00)	95,40
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	10.931.892,00	(1.068.108,00)	91,10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.010.158.000,00	2.866.034.320,00	(144.123.680,00)	95,21
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.000.000,00	144.417.660,00	(582.340,00)	99,60
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	374.929.500,00	354.232.562,00	(20.696.938,00)	94,48

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	374.929.500,00	354.232.562,00	(20.696.938,00)	94,48
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	374.929.500,00	354.232.562,00	(20.696.938,00)	94,48
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	374.929.500,00	354.232.562,00	(20.696.938,00)	94,48
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.929.500,00	354.232.562,00	(20.696.938,00)	94,48
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.878.086.350,00	61.237.858.078,83	(4.640.228.271,17)	92,96
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.239.045.750,00	14.650.438.898,00	(588.606.852,00)	96,14
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	15.239.045.750,00	14.650.438.898,00	(588.606.852,00)	96,14
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	15.239.045.750,00	14.650.438.898,00	(588.606.852,00)	96,14
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.805.815.875,00	13.355.203.393,00	(450.612.482,00)	96,74
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.059.969.000,00	4.819.112.278,00	(240.856.722,00)	95,24
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.085.562.014,00	4.070.623.029,00	(14.938.985,00)	99,63
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	4.660.284.861,00	4.465.468.086,00	(194.816.775,00)	95,82
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.433.229.875,00	1.295.235.505,00	(137.994.370,00)	90,37
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	390.453.875,00	390.278.875,00	(175.000,00)	99,96
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.042.776.000,00	904.956.630,00	(137.819.370,00)	86,78
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.698.183.550,00	12.370.321.061,00	(1.327.862.489,00)	90,31
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	13.698.183.550,00	12.370.321.061,00	(1.327.862.489,00)	90,31
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.698.183.550,00	12.370.321.061,00	(1.327.862.489,00)	90,31
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.631.780.870,00	12.304.171.061,00	(1.327.609.809,00)	90,26
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.089.342.000,00	6.129.661.984,00	(959.680.016,00)	86,46
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.442.438.870,00	6.074.509.077,00	(367.929.793,00)	94,29
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	66.402.680,00	66.150.000,00	(252.680,00)	99,62
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.402.680,00	66.150.000,00	(252.680,00)	99,62
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	33.058.978.050,00	30.475.709.491,83	(2.583.268.558,17)	92,19
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	33.058.978.050,00	30.475.709.491,83	(2.583.268.558,17)	92,19
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	33.058.978.050,00	30.475.709.491,83	(2.583.268.558,17)	92,19
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	32.569.849.934,00	29.992.548.491,83	(2.577.301.442,17)	92,09
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	15.714.850.000,00	13.303.303.878,00	(2.411.546.122,00)	84,65
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.283.889.119,00	9.224.415.765,00	(59.473.354,00)	99,36
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	7.571.110.815,00	7.464.828.848,83	(106.281.966,17)	98,60
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	489.128.116,00	483.161.000,00	(5.967.116,00)	98,78
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	489.128.116,00	483.161.000,00	(5.967.116,00)	98,78
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.210.000.000,00	2.199.042.128,00	(10.957.872,00)	99,50
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.210.000.000,00	2.199.042.128,00	(10.957.872,00)	99,50
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.210.000.000,00	2.199.042.128,00	(10.957.872,00)	99,50
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.205.000.000,00	2.194.042.128,00	(10.957.872,00)	99,50
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000.000,00	2.194.042.128,00	(10.957.872,00)	99,50
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.495.279.000,00	1.418.411.779,00	(76.867.221,00)	94,86
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.495.279.000,00	1.418.411.779,00	(76.867.221,00)	94,86
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.495.279.000,00	1.418.411.779,00	(76.867.221,00)	94,86
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.495.279.000,00	1.418.411.779,00	(76.867.221,00)	94,86
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.495.279.000,00	1.418.411.779,00	(76.867.221,00)	94,86
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	176.600.000,00	123.934.721,00	(52.665.279,00)	70,18
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Tenaga Kerja	176.600.000,00	123.934.721,00	(52.665.279,00)	70,18
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	176.600.000,00	123.934.721,00	(52.665.279,00)	70,18
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	176.600.000,00	123.934.721,00	(52.665.279,00)	70,18
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.600.000,00	113.934.721,00	(52.665.279,00)	68,39
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	113.902.295.671,00	104.803.798.734,00	(9.098.496.937,00)	92,01
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	51.884.523.271,00	47.326.180.911,00	(4.558.342.360,00)	91,21
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000		Sekretariat Daerah	-	3.597.686.923,00	3.597.686.923,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	5	BELANJA DAERAH	-	3.597.686.923,00	3.597.686.923,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	5.1	BELANJA OPERASI	-	3.597.686.923,00	3.597.686.923,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	-	3.541.406.401,00	3.541.406.401,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	56.280.522,00	56.280.522,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001		Bagian Umum	32.614.496.899,00	27.079.383.091,00	(5.535.113.808,00)	83,03
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	5	BELANJA DAERAH	32.614.496.899,00	27.079.383.091,00	(5.535.113.808,00)	83,03

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.763.044.149,00	26.232.037.351,00	(5.531.006.798,00)	82,59
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	21.093.857.000,00	15.995.378.835,00	(5.098.478.165,00)	75,83
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.669.187.149,00	10.236.658.516,00	(432.528.633,00)	95,95
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	5.2	BELANJA MODAL	851.452.750,00	847.345.740,00	(4.107.010,00)	99,52
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	803.807.750,00	799.700.740,00	(4.107.010,00)	99,49
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.645.000,00	47.645.000,00	-	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002		Bagian Organisasi	570.397.000,00	565.113.539,00	(5.283.461,00)	99,07
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	5	BELANJA DAERAH	570.397.000,00	565.113.539,00	(5.283.461,00)	99,07
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	5.1	BELANJA OPERASI	570.397.000,00	565.113.539,00	(5.283.461,00)	99,07
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.397.000,00	565.113.539,00	(5.283.461,00)	99,07
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003		Bagian Administrasi Pembangunan	657.523.045,00	646.085.900,00	(11.437.145,00)	98,26
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	5	BELANJA DAERAH	657.523.045,00	646.085.900,00	(11.437.145,00)	98,26
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	5.1	BELANJA OPERASI	657.523.045,00	646.085.900,00	(11.437.145,00)	98,26
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.523.045,00	646.085.900,00	(11.437.145,00)	98,26
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004		Bagian Tata Pemerintahan	981.055.556,00	942.836.173,00	(38.219.383,00)	96,10
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	5	BELANJA DAERAH	981.055.556,00	942.836.173,00	(38.219.383,00)	96,10
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	5.1	BELANJA OPERASI	980.805.556,00	942.586.173,00	(38.219.383,00)	96,10
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.805.556,00	942.586.173,00	(38.219.383,00)	96,10
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	5.2	BELANJA MODAL	250.000,00	250.000,00	-	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000,00	250.000,00	-	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005		Bagian Kesejahteraan Rakyat	14.207.412.000,00	11.741.286.444,00	(2.466.125.556,00)	82,64
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	5	BELANJA DAERAH	14.207.412.000,00	11.741.286.444,00	(2.466.125.556,00)	82,64
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.207.412.000,00	11.741.286.444,00	(2.466.125.556,00)	82,64
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.730.412.000,00	2.564.786.444,00	(165.625.556,00)	93,93
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	5.1.05	Belanja Hibah	11.477.000.000,00	9.176.500.000,00	(2.300.500.000,00)	79,96
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006		Bagian Hukum	755.908.450,00	706.497.038,00	(49.411.412,00)	93,46
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	5	BELANJA DAERAH	755.908.450,00	706.497.038,00	(49.411.412,00)	93,46
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	5.1	BELANJA OPERASI	750.658.450,00	701.248.038,00	(49.410.412,00)	93,42
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.658.450,00	701.248.038,00	(49.410.412,00)	93,42
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	5.2	BELANJA MODAL	5.250.000,00	5.249.000,00	(1.000,00)	99,98
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.250.000,00	5.249.000,00	(1.000,00)	99,98
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007		Bagian Perekonomian	904.490.321,00	870.611.357,00	(33.878.964,00)	96,25
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	5	BELANJA DAERAH	904.490.321,00	870.611.357,00	(33.878.964,00)	96,25
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	5.1	BELANJA OPERASI	904.490.321,00	870.611.357,00	(33.878.964,00)	96,25
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.490.321,00	870.611.357,00	(33.878.964,00)	96,25
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	480.000.000,00	477.326.705,00	(2.673.295,00)	99,44
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	5	BELANJA DAERAH	480.000.000,00	477.326.705,00	(2.673.295,00)	99,44
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	5.1	BELANJA OPERASI	457.300.000,00	454.726.705,00	(2.573.295,00)	99,44
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.300.000,00	454.726.705,00	(2.573.295,00)	99,44
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	5.2	BELANJA MODAL	22.700.000,00	22.600.000,00	(100.000,00)	99,56
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.700.000,00	22.600.000,00	(100.000,00)	99,56
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	713.240.000,00	699.353.741,00	(13.886.259,00)	98,05
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	5	BELANJA DAERAH	713.240.000,00	699.353.741,00	(13.886.259,00)	98,05
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	5.1	BELANJA OPERASI	665.858.750,00	652.353.741,00	(13.505.009,00)	97,97
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.858.750,00	652.353.741,00	(13.505.009,00)	97,97
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	5.2	BELANJA MODAL	47.381.250,00	47.000.000,00	(381.250,00)	99,20
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.381.250,00	47.000.000,00	(381.250,00)	99,20
4.02			SEKRETARIAT DPRD	62.017.772.400,00	57.477.617.823,00	(4.540.154.577,00)	92,68
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	62.017.772.400,00	57.477.617.823,00	(4.540.154.577,00)	92,68
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	62.017.772.400,00	57.477.617.823,00	(4.540.154.577,00)	92,68
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	61.765.974.400,00	57.253.706.323,00	(4.512.268.077,00)	92,69
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	33.251.526.000,00	32.507.539.419,00	(743.986.581,00)	97,76
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.514.448.400,00	24.746.166.904,00	(3.768.281.496,00)	86,78
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	251.798.000,00	223.911.500,00	(27.886.500,00)	88,93
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.648.000,00	217.778.000,00	(27.870.000,00)	88,65
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.150.000,00	6.133.500,00	(16.500,00)	99,73
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	496.431.286.087,00	490.969.914.534,00	(5.461.371.553,00)	98,90
5.01			PERENCANAAN	10.905.277.900,00	9.657.622.270,00	(1.247.655.630,00)	88,56
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.905.277.900,00	9.657.622.270,00	(1.247.655.630,00)	88,56
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.905.277.900,00	9.657.622.270,00	(1.247.655.630,00)	88,56

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.538.661.780,00	9.307.383.477,00	(1.231.278.303,00)	88,32
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.024.962.000,00	4.931.305.640,00	(1.093.656.360,00)	81,85
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.513.699.780,00	4.376.077.837,00	(137.621.943,00)	96,95
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	366.616.120,00	350.238.793,00	(16.377.327,00)	95,53
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	366.616.120,00	350.238.793,00	(16.377.327,00)	95,53
5.02			KEUANGAN	469.139.830.737,00	466.747.672.976,00	(2.392.157.761,00)	99,49
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	454.344.118.887,00	452.764.339.692,00	(1.579.779.195,00)	99,65
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	454.344.118.887,00	452.764.339.692,00	(1.579.779.195,00)	99,65
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.972.713.012,00	11.250.082.983,00	(722.630.029,00)	93,96
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.250.396.000,00	5.678.736.984,00	(571.659.016,00)	90,85
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.722.317.012,00	5.571.345.999,00	(150.971.013,00)	97,36
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	937.261.875,00	914.510.250,00	(22.751.625,00)	97,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	937.261.875,00	914.510.250,00	(22.751.625,00)	97,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	(705.997.541,00)	64,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	(705.997.541,00)	64,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	439.461.644.000,00	439.333.244.000,00	(128.400.000,00)	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.681.180.000,00	14.681.180.000,00	-	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	(128.400.000,00)	99,97
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.795.711.850,00	13.983.333.284,00	(812.378.566,00)	94,51
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	14.795.711.850,00	13.983.333.284,00	(812.378.566,00)	94,51
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.305.710.850,00	13.516.854.284,00	(788.856.566,00)	94,49
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.662.960.053,00	10.006.616.890,00	(656.343.163,00)	93,84
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.642.750.797,00	3.510.237.394,00	(132.513.403,00)	96,36
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	490.001.000,00	466.479.000,00	(23.522.000,00)	95,20
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.001.000,00	269.479.000,00	(20.522.000,00)	92,92
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	197.000.000,00	(3.000.000,00)	98,50
5.03			KEPEGAWAIAN	14.948.977.450,00	13.338.166.118,00	(1.610.811.332,00)	89,22
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian Daerah	14.948.977.450,00	13.338.166.118,00	(1.610.811.332,00)	89,22
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	14.948.977.450,00	13.338.166.118,00	(1.610.811.332,00)	89,22
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.814.443.386,00	13.203.636.158,00	(1.610.807.228,00)	89,13
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.106.075.000,00	6.228.907.144,00	(877.167.856,00)	87,66
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.708.368.386,00	6.974.729.014,00	(733.639.372,00)	90,48
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	134.534.064,00	134.529.960,00	(4.104,00)	100,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.534.064,00	134.529.960,00	(4.104,00)	100,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.437.200.000,00	1.226.453.170,00	(210.746.830,00)	85,34
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.437.200.000,00	1.226.453.170,00	(210.746.830,00)	85,34
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.437.200.000,00	1.226.453.170,00	(210.746.830,00)	85,34
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.427.200.000,00	1.226.453.170,00	(200.746.830,00)	85,93
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.427.200.000,00	1.226.453.170,00	(200.746.830,00)	85,93
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.167.463.000,00	14.041.665.870,00	(1.125.797.130,00)	92,58
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	15.167.463.000,00	14.041.665.870,00	(1.125.797.130,00)	92,58
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	15.167.463.000,00	14.041.665.870,00	(1.125.797.130,00)	92,58
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	15.167.463.000,00	14.041.665.870,00	(1.125.797.130,00)	92,58
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.807.998.775,00	12.778.433.220,00	(1.029.565.555,00)	92,54
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.517.463.000,00	7.305.389.380,00	(212.073.620,00)	97,18
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.290.535.775,00	5.473.043.840,00	(817.491.935,00)	87,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.359.464.225,00	1.263.232.650,00	(96.231.575,00)	92,92
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.329.035.225,00	1.233.142.650,00	(95.892.575,00)	92,78
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.429.000,00	30.090.000,00	(339.000,00)	98,89
7			UNSUR KEWILAYAHAN	65.113.504.146,00	60.897.779.858,00	(4.215.724.288,00)	93,53
7.01			KECAMATAN	65.113.504.146,00	60.897.779.858,00	(4.215.724.288,00)	93,53
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Moga	2.791.169.000,00	2.514.247.095,00	(276.921.905,00)	90,08
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.791.169.000,00	2.514.247.095,00	(276.921.905,00)	90,08
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.745.780.135,00	2.468.861.095,00	(276.919.040,00)	89,91
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.936.169.000,00	1.665.625.095,00	(270.543.905,00)	86,03
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.611.135,00	803.236.000,00	(6.375.135,00)	99,21
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	45.388.865,00	45.386.000,00	(2.865,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.388.865,00	45.386.000,00	(2.865,00)	99,99

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Pulosari	2.984.399.000,00	2.782.870.595,00	(201.528.405,00)	93,25
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.984.399.000,00	2.782.870.595,00	(201.528.405,00)	93,25
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.984.399.000,00	2.782.870.595,00	(201.528.405,00)	93,25
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.129.399.000,00	1.937.500.061,00	(191.898.939,00)	90,99
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	855.000.000,00	845.370.534,00	(9.629.466,00)	98,87
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Belik	2.894.548.000,00	2.723.345.888,00	(171.202.112,00)	94,09
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	2.894.548.000,00	2.723.345.888,00	(171.202.112,00)	94,09
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.882.548.000,00	2.711.870.888,00	(170.677.112,00)	94,08
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.039.548.000,00	1.875.455.498,00	(164.092.502,00)	91,95
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.000.000,00	836.415.390,00	(6.584.610,00)	99,22
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	11.475.000,00	(525.000,00)	95,63
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.475.000,00	(525.000,00)	95,63
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Watukumpul	2.942.496.000,00	2.581.231.934,00	(361.264.066,00)	87,72
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	2.942.496.000,00	2.581.231.934,00	(361.264.066,00)	87,72
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.942.496.000,00	2.581.231.934,00	(361.264.066,00)	87,72
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.037.496.000,00	1.734.062.318,00	(303.433.682,00)	85,11
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	905.000.000,00	847.169.616,00	(57.830.384,00)	93,61
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Bodeh	3.318.056.000,00	3.169.574.899,00	(148.481.101,00)	95,53
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	3.318.056.000,00	3.169.574.899,00	(148.481.101,00)	95,53
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.237.056.000,00	3.088.694.899,00	(148.361.101,00)	95,42
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.413.056.000,00	2.268.074.899,00	(144.981.101,00)	93,99
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	824.000.000,00	820.620.000,00	(3.380.000,00)	99,59
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	81.000.000,00	80.880.000,00	(120.000,00)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.000.000,00	80.880.000,00	(120.000,00)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Bantarbolang	3.054.221.000,00	2.934.512.742,00	(119.708.258,00)	96,08
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	3.054.221.000,00	2.934.512.742,00	(119.708.258,00)	96,08
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.983.578.592,00	2.863.938.942,00	(119.639.650,00)	95,99
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.149.221.000,00	2.036.383.192,00	(112.837.808,00)	94,75
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.357.592,00	827.555.750,00	(6.801.842,00)	99,18
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	70.642.408,00	70.573.800,00	(68.608,00)	99,90
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.642.408,00	70.573.800,00	(68.608,00)	99,90
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Randudongkal	3.194.083.000,00	3.051.063.156,00	(143.019.844,00)	95,52
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	3.194.083.000,00	3.051.063.156,00	(143.019.844,00)	95,52
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.161.733.000,00	3.018.740.156,00	(142.992.844,00)	95,48
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.289.083.000,00	2.146.557.923,00	(142.525.077,00)	93,77
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	872.650.000,00	872.182.233,00	(467.767,00)	99,95
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	32.350.000,00	32.323.000,00	(27.000,00)	99,92
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.350.000,00	32.323.000,00	(27.000,00)	99,92
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kecamatan Pemalang	12.925.733.550,00	12.187.225.642,00	(738.507.908,00)	94,29
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	12.925.733.550,00	12.187.225.642,00	(738.507.908,00)	94,29
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.840.811.010,00	12.104.725.642,00	(736.085.368,00)	94,27
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.626.864.000,00	10.908.101.394,00	(718.762.606,00)	93,82
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.947.010,00	1.196.624.248,00	(17.322.762,00)	98,57
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	84.922.540,00	82.500.000,00	(2.422.540,00)	97,15
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.922.540,00	82.500.000,00	(2.422.540,00)	97,15
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan Taman	5.819.080.000,00	5.361.068.536,00	(458.011.464,00)	92,13
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	5.819.080.000,00	5.361.068.536,00	(458.011.464,00)	92,13
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.790.780.000,00	5.332.768.536,00	(458.011.464,00)	92,09
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.934.080.000,00	4.476.916.048,00	(457.163.952,00)	90,73
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	856.700.000,00	855.852.488,00	(847.512,00)	99,90
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Petarukan	4.292.393.000,00	4.030.322.655,00	(262.070.345,00)	93,89
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	4.292.393.000,00	4.030.322.655,00	(262.070.345,00)	93,89
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.292.393.000,00	4.030.322.655,00	(262.070.345,00)	93,89
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.266.317.000,00	3.004.281.355,00	(262.035.645,00)	91,98
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.026.076.000,00	1.026.041.300,00	(34.700,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Ampelgading	3.053.632.000,00	2.864.053.147,00	(189.578.853,00)	93,79
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	3.053.632.000,00	2.864.053.147,00	(189.578.853,00)	93,79
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.034.132.000,00	2.844.553.147,00	(189.578.853,00)	93,75

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.198.632.000,00	2.013.213.147,00	(185.418.853,00)	91,57
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	835.500.000,00	831.340.000,00	(4.160.000,00)	99,50
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		Kecamatan Comal	4.622.502.970,00	4.179.699.722,00	(442.803.248,00)	90,42
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	4.622.502.970,00	4.179.699.722,00	(442.803.248,00)	90,42
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.520.420.480,00	4.082.552.722,00	(437.867.758,00)	90,31
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.672.853.000,00	3.240.227.522,00	(432.625.478,00)	88,22
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.567.480,00	842.325.200,00	(5.242.280,00)	99,38
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	102.082.490,00	97.147.000,00	(4.935.490,00)	95,17
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.082.490,00	97.147.000,00	(4.935.490,00)	95,17
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		Kecamatan Ulujami	3.335.266.000,00	2.830.277.720,00	(504.988.280,00)	84,86
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	3.335.266.000,00	2.830.277.720,00	(504.988.280,00)	84,86
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.301.451.000,00	2.798.023.120,00	(503.427.880,00)	84,75
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.430.266.000,00	1.931.993.271,00	(498.272.729,00)	79,50
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	871.185.000,00	866.029.849,00	(5.155.151,00)	99,41
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	33.815.000,00	32.254.600,00	(1.560.400,00)	95,39
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.815.000,00	32.254.600,00	(1.560.400,00)	95,39
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		Kecamatan Warungpring	2.965.665.000,00	2.886.958.957,00	(78.706.043,00)	97,35
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	2.965.665.000,00	2.886.958.957,00	(78.706.043,00)	97,35
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.909.277.000,00	2.831.137.357,00	(78.139.643,00)	97,31
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.210.665.000,00	2.137.945.657,00	(72.719.343,00)	96,71
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.612.000,00	693.191.700,00	(5.420.300,00)	99,22
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	56.388.000,00	55.821.600,00	(566.400,00)	99,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.388.000,00	55.821.600,00	(566.400,00)	99,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001		Kelurahan Kebondalem	610.084.771,00	604.681.835,00	(5.402.936,00)	99,11
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	5	BELANJA DAERAH	610.084.771,00	604.681.835,00	(5.402.936,00)	99,11
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	598.360.896,00	592.957.960,00	(5.402.936,00)	99,10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.360.896,00	592.957.960,00	(5.402.936,00)	99,10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	5.2	BELANJA MODAL	11.723.875,00	11.723.875,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.723.875,00	11.723.875,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002		Kelurahan Pelutan	654.529.250,00	637.774.400,00	(16.754.850,00)	97,44
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	5	BELANJA DAERAH	654.529.250,00	637.774.400,00	(16.754.850,00)	97,44
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	650.529.250,00	633.774.400,00	(16.754.850,00)	97,42
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.529.250,00	633.774.400,00	(16.754.850,00)	97,42
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004		Kelurahan Sugihwaras	594.173.175,00	547.537.010,00	(46.636.165,00)	92,15
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	5	BELANJA DAERAH	594.173.175,00	547.537.010,00	(46.636.165,00)	92,15
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	594.173.175,00	547.537.010,00	(46.636.165,00)	92,15
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.173.175,00	547.537.010,00	(46.636.165,00)	92,15
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005		Kelurahan Mulyoharjo	692.728.150,00	690.971.861,00	(1.756.289,00)	99,75
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	5	BELANJA DAERAH	692.728.150,00	690.971.861,00	(1.756.289,00)	99,75
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	5.1	BELANJA OPERASI	577.730.170,00	576.163.881,00	(1.566.289,00)	99,73
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.730.170,00	576.163.881,00	(1.566.289,00)	99,73
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	5.2	BELANJA MODAL	114.997.980,00	114.807.980,00	(190.000,00)	99,83
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.997.980,00	114.807.980,00	(190.000,00)	99,83
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006		Kelurahan Bojongbata	595.576.675,00	593.289.828,00	(2.286.847,00)	99,62
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	5	BELANJA DAERAH	595.576.675,00	593.289.828,00	(2.286.847,00)	99,62
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	5.1	BELANJA OPERASI	472.873.625,00	471.154.983,00	(1.718.642,00)	99,64
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.873.625,00	471.154.983,00	(1.718.642,00)	99,64
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	5.2	BELANJA MODAL	122.703.050,00	122.134.845,00	(568.205,00)	99,54
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.203.050,00	27.635.000,00	(568.050,00)	97,99
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.500.000,00	94.499.845,00	(155,00)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003		Kelurahan Paduraksa	551.885.375,00	550.360.044,00	(1.525.331,00)	99,72
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	5	BELANJA DAERAH	551.885.375,00	550.360.044,00	(1.525.331,00)	99,72
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	551.885.375,00	550.360.044,00	(1.525.331,00)	99,72
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.885.375,00	550.360.044,00	(1.525.331,00)	99,72
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007		Kelurahan Widuri	551.968.200,00	524.888.909,00	(27.079.291,00)	95,09
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	5	BELANJA DAERAH	551.968.200,00	524.888.909,00	(27.079.291,00)	95,09

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	5.1	BELANJA OPERASI	551.968.200,00	524.888.909,00	(27.079.291,00)	95,09
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.968.200,00	524.888.909,00	(27.079.291,00)	95,09
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001		Kelurahan Wanarejan Selatan	630.000.000,00	619.659.408,00	(10.340.592,00)	98,36
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	5	BELANJA DAERAH	630.000.000,00	619.659.408,00	(10.340.592,00)	98,36
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	630.000.000,00	619.659.408,00	(10.340.592,00)	98,36
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.000.000,00	619.659.408,00	(10.340.592,00)	98,36
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002		Kelurahan Beji	630.000.000,00	628.313.665,00	(1.686.335,00)	99,73
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	5	BELANJA DAERAH	630.000.000,00	628.313.665,00	(1.686.335,00)	99,73
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	613.917.521,00	612.293.665,00	(1.623.856,00)	99,74
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.917.521,00	612.293.665,00	(1.623.856,00)	99,74
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	5.2	BELANJA MODAL	16.082.479,00	16.020.000,00	(62.479,00)	99,61
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.082.479,00	16.020.000,00	(62.479,00)	99,61
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001		Kelurahan Petarukan	808.964.000,00	804.288.360,00	(4.675.640,00)	99,42
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	5	BELANJA DAERAH	808.964.000,00	804.288.360,00	(4.675.640,00)	99,42
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	808.964.000,00	804.288.360,00	(4.675.640,00)	99,42
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.964.000,00	804.288.360,00	(4.675.640,00)	99,42
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001		Kelurahan Purwoharjo	600.350.030,00	599.561.850,00	(788.180,00)	99,87
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	5	BELANJA DAERAH	600.350.030,00	599.561.850,00	(788.180,00)	99,87
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	600.350.030,00	599.561.850,00	(788.180,00)	99,87
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.350.030,00	599.561.850,00	(788.180,00)	99,87
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	75.070.585.200,00	74.607.330.047,00	(463.255.153,00)	99,38
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	75.070.585.200,00	74.607.330.047,00	(463.255.153,00)	99,38
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.070.585.200,00	74.607.330.047,00	(463.255.153,00)	99,38
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	75.070.585.200,00	74.607.330.047,00	(463.255.153,00)	99,38
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	75.030.085.200,00	74.566.830.047,00	(463.255.153,00)	99,38
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.898.004.000,00	2.643.848.389,00	(254.155.611,00)	91,23
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.961.232.200,00	3.952.132.658,00	(9.099.542,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	68.170.849.000,00	67.970.849.000,00	(200.000.000,00)	99,71
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.807.367.254.000,00**	**2.755.590.550.648,00**	**98,16**	**2.572.342.827.720,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**417.213.761.000,00**	**402.958.330.520,00**	**96,58**	**363.617.077.022,00**
4.1.01	Pajak Daerah	123.205.300.000,00	120.978.507.825,00	98,19	116.205.661.323,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	-	-	0,00	630.807.498,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	-	-	0,00	630.807.498,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	-	-	0,00	630.807.498,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	-	-	0,00	2.480.407.785,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	0,00	2.480.407.785,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	0,00	2.480.407.785,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	-	-	0,00	343.489.890,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	-	-	0,00	343.489.890,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	-	-	0,00	343.489.890,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.800.000.000,00	1.838.821.283,00	102,16	1.845.830.522,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00	1.838.821.283,00	102,16	1.845.830.522,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00	1.838.821.283,00	102,16	1.845.830.522,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	-	-	0,00	48.884.821.760,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-	-	0,00	48.884.821.760,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-	-	0,00	48.884.821.760,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	-	-	0,00	144.717.921,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	-	-	0,00	144.717.921,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	-	-	0,00	144.717.921,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	955.000.000,00	1.519.027.200,00	159,06	506.947.085,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	955.000.000,00	1.519.027.200,00	159,06	506.947.085,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	955.000.000,00	1.519.027.200,00	159,06	506.947.085,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.700.000,00	107,00	10.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.700.000,00	107,00	10.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.700.000,00	107,00	10.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	711.717.300,00	71,17	927.733.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	-	-	0,00	927.733.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	-	-	0,00	927.733.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00	711.717.300,00	71,17	-
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00	711.717.300,00	71,17	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.000.000.000,00	26.305.780.261,00	101,18	26.060.741.323,00
4.1.01.15.01	PBBP2	26.000.000.000,00	26.305.780.261,00	101,18	26.060.741.323,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	26.000.000.000,00	26.305.780.261,00	101,18	26.060.741.323,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	33.000.000.000,00	27.624.741.965,00	83,71	34.370.164.539,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	33.000.000.000,00	27.624.741.965,00	83,71	34.370.164.539,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	33.000.000.000,00	27.624.741.965,00	83,71	34.370.164.539,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	60.440.300.000,00	62.967.719.816,00	104,18	-
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.350.000.000,00	3.298.776.024,00	140,37	-
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2.350.000.000,00	3.298.776.024,00	140,37	-
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	57.000.000.000,00	58.573.203.303,00	102,76	-
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	57.000.000.000,00	58.573.203.303,00	102,76	-
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	600.000.000,00	600.008.196,00	100,00	-
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	600.000.000,00	600.008.196,00	100,00	-
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	160.300.000,00	86.896.040,00	54,21	-
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	160.300.000,00	86.896.040,00	54,21	-
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	330.000.000,00	408.836.253,00	123,89	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	330.000.000,00	408.836.253,00	123,89	-
4.1.02	Retribusi Daerah	252.906.500.000,00	239.370.082.261,00	94,65	36.963.121.727,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	241.626.500.000,00	228.881.177.818,00	94,73	26.984.196.061,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	229.500.000.000,00	218.384.657.616,00	95,16	16.201.303.131,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	84.500.000.000,00	88.999.363.581,00	105,32	16.201.303.131,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	145.000.000.000,00	129.385.294.035,00	89,23	-
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	476.500.000,00	529.063.000,00	111,03	418.654.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	476.500.000,00	529.063.000,00	111,03	418.654.000,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	-	0,00	7.100.000,00
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	-	-	0,00	7.100.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	650.000.000,00	626.755.000,00	96,42	552.888.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	650.000.000,00	626.755.000,00	96,42	552.888.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	11.000.000.000,00	9.340.702.202,00	84,92	9.176.760.430,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	-	-	0,00	9.176.760.430,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	11.000.000.000,00	9.340.702.202,00	84,92	-
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	0,00	515.505.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	0,00	515.505.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-	0,00	7.800.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-	0,00	7.800.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	0,00	104.185.500,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	-	-	0,00	104.185.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.680.000.000,00	4.560.446.943,00	59,38	5.561.246.556,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	555.000.000,00	369.870.117,00	66,64	573.461.228,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	-	17.969.593,00	0,00	212.178.500,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	50.000.000,00	40.980.000,00	81,96	50.153.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000,00	30.220.000,00	120,88	25.950.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	100.000.000,00	103.246.524,00	103,25	68.039.728,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	380.000.000,00	177.454.000,00	46,70	217.140.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	4.000.000.000,00	2.726.817.826,00	68,17	3.530.445.778,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4.000.000.000,00	2.726.817.826,00	68,17	3.530.445.778,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	-	-	0,00	311.216.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	-	-	0,00	311.216.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000,00	78.588.000,00	104,78	56.988.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	75.000.000,00	78.588.000,00	104,78	56.988.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.050.000.000,00	1.385.171.000,00	45,42	1.089.135.550,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.050.000.000,00	1.385.171.000,00	45,42	1.089.135.550,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.600.000.000,00	5.928.457.500,00	164,68	4.417.679.110,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	0,00	4.409.127.110,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	-	-	0,00	4.409.127.110,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	0,00	8.552.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	0,00	8.552.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.600.000.000,00	5.928.457.500,00	164,68	-
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.600.000.000,00	5.928.457.500,00	164,68	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.031.761.000,00	26.031.762.403,00	100,00	23.940.780.939,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	26.031.761.000,00	26.031.762.403,00	100,00	23.940.780.939,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	22.383.944.000,00	22.383.944.895,00	100,00	20.616.885.220,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	22.383.944.000,00	22.383.944.895,00	100,00	20.616.885.220,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	3.647.817.000,00	3.647.817.508,00	100,00	3.323.895.719,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	3.647.817.000,00	3.647.817.508,00	100,00	3.323.895.719,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.070.200.000,00	16.577.978.031,00	110,01	186.507.513.033,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	750.610.000,00	1.218.076.333,00	162,28	2.179.625.800,00
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	-	-	0,00	1.325.314.300,00
4.1.04.01.01.0024	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	-	-	0,00	1.325.314.300,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	635.670.000,00	317,84	789.296.500,00
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	-	-	0,00	789.296.500,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100.000.000,00	506.400.000,00	506,40	-
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100.000.000,00	129.270.000,00	129,27	-
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	550.610.000,00	582.406.333,00	105,77	55.716.000,00
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	-	-	0,00	55.716.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	550.610.000,00	582.406.333,00	105,77	-
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	9.299.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	-	-	0,00	9.299.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.670.200.000,00	4.346.621.414,00	93,07	6.264.423.965,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	4.670.200.000,00	4.346.621.414,00	93,07	6.264.423.965,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	4.670.200.000,00	4.346.621.414,00	93,07	6.264.423.965,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.400.000.000,00	1.530.473.812,00	109,32	963.801.179,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	900.000.000,00	978.069.745,00	108,67	772.109.340,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	900.000.000,00	978.069.745,00	108,67	772.109.340,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	552.404.067,00	110,48	191.691.839,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	552.404.067,00	110,48	191.691.839,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	6.305.624.046,00	126,11	7.199.857.759,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	6.305.624.046,00	126,11	7.199.857.759,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	6.305.624.046,00	126,11	7.199.857.759,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.410.000,00	90.824.372,00	180,17	68.544.121,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.410.000,00	90.824.372,00	180,17	68.544.121,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.410.000,00	90.824.372,00	180,17	68.544.121,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	0,00	146.747.389,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	0,00	146.747.389,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	0,00	146.747.389,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000.000,00	533.421.262,00	177,81	789.809.487,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	4.884.604,00	0,00	5.115.574,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	4.884.604,00	0,00	5.115.574,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	5.278.377,00	0,00	9.824.759,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	5.278.377,00	0,00	9.824.759,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	1.428.304,00	0,00	1.441.709,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	-	1.428.304,00	0,00	1.441.709,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	3.638.212,00	0,00	16.405.046,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	-	3.638.212,00	0,00	16.405.046,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	569.194,00	0,00	2.248.206,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	569.194,00	0,00	2.248.206,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	883.144,00	0,00	1.332.032,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	883.144,00	0,00	1.332.032,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	10.210.847,00	0,00	11.954.900,00
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	-	10.210.847,00	0,00	-
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	-	0,00	11.954.900,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	300.000.000,00	506.528.580,00	168,84	741.487.261,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	300.000.000,00	506.528.580,00	168,84	741.487.261,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	0,00	123.000.000,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	-	0,00	123.000.000,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	-	0,00	123.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.898.980.000,00	2.552.936.792,00	88,06	2.602.869.804,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-	0,00	123.013.450,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-	0,00	123.013.450,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	102.317.500,00	0,00	-
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	-	102.317.500,00	0,00	-
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	100.000.000,00	73.718.130,00	73,72	6.245.600,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	100.000.000,00	73.718.130,00	73,72	-
4.1.04.15.08.0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS	-	-	0,00	6.245.600,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.000.000,00	1.640.000,00	3,28	6.454.120,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	50.000.000,00	1.640.000,00	3,28	6.454.120,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.000.000,00	42.341.919,00	120,98	113.705.000,00
4.1.04.15.10.0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD	10.000.000,00	-	0,00	8.400.000,00
4.1.04.15.10.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD	-	-	0,00	105.305.000,00
4.1.04.15.10.0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK	-	8.736.919,00	0,00	-
4.1.04.15.10.0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK	25.000.000,00	33.605.000,00	134,42	-
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	5.000.000,00	89.887.326,00	1.797,75	-
4.1.04.15.16.0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	89.887.326,00	1.797,75	-
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	2.678.980.000,00	2.214.910.231,00	82,68	971.251.634,00
4.1.04.15.17.0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.678.980.000,00	2.214.910.231,00	82,68	971.251.634,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000,00	28.121.686,00	93,74	1.382.200.000,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00	1.382.200.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.04.15.34.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	30.000.000,00	28.121.686,00	93,74	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	-	-	0,00	115.351.533.501,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	-	-	0,00	115.351.533.501,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	-	-	0,00	115.351.533.501,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	0,00	50.817.300.028,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	0,00	50.817.300.028,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	0,00	50.817.300.028,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**417.213.761.000,00**	**402.958.330.520,00**	**96,58**	**363.617.077.022,00**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.390.153.493.000,00**	**2.352.632.220.128,00**	**98,43**	**2.208.725.750.698,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.153.066.903.000,00	2.141.851.769.410,00	99,48	2.014.258.742.643,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.881.195.824.000,00	1.869.980.690.410,00	99,40	1.746.347.989.883,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	33.146.109.000,00	33.425.428.000,00	100,84	34.400.884.813,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.890.520.000,00	4.577.592.000,00	66,43	3.554.060.471,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	-	12.823.135.000,00	0,00	12.560.575.971,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	11.232.977.000,00	685.051.000,00	6,10	865.656.394,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	12.735.648.000,00	13.014.967.000,00	102,19	13.932.025.998,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	100.799.000,00	50.999.000,00	50,59	16.756.146,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	83.687.000,00	0,00	112.612.195,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	31.392.000,00	34.797.000,00	110,85	12.628.071,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.182.000,00	3.609.000,00	113,42	1.075.293,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	-	0,00	136.568,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	874.492.000,00	874.492.000,00	100,00	1.574.809.845,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.277.099.000,00	1.277.099.000,00	100,00	1.770.547.861,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.265.304.393.000,00	1.265.304.393.000,00	100,00	1.178.380.360.243,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.046.268.439.000,00	1.046.268.439.000,00	100,00	1.120.907.802.243,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	100,00	2.200.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	36.658.872.000,00	36.658.872.000,00	100,00	55.272.558.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	139.846.075.000,00	139.846.075.000,00	100,00	-
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.634.226.000,00	26.634.226.000,00	100,00	-
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	13.696.781.000,00	13.696.781.000,00	100,00	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	110.173.816.000,00	102.178.208.438,00	92,74	91.392.948.645,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.800.412.000,00	187.400.000,00	10,41	728.074.935,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	16.649.247.000,00	996.950.000,00	5,99	1.359.695.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.415.288.000,00	237.500.000,00	5,38	4.793.249.955,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	261.855.000,00	-	0,00	-
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	7.101.224.000,00	6.493.695.600,00	91,44	-
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	415.460.000,00	-	0,00	1.455.800.000,00
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.345.717.000,00	-	0,00	-
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.045.623.000,00	-	0,00	9.699.783.985,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.407.770.000,00	1.373.649.557,00	25,40	5.690.426.725,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.416.168.000,00	-	0,00	24.217.911.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	12.918.734.000,00	-	0,00	7.145.450.500,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	3.557.482.500,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.327.343.000,00	-	0,00	5.936.575.000,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	-	1.831.835.750,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	11.463.068.000,00	-	0,00	660.070.000,00
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	-	6.978.064.359,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	-	-	0,00	8.910.510.000,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	-	-	0,00	2.103.000.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	21.605.907.000,00	-	0,00	18.692.401.545,00
4.2.01.01.03.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	-	1.305.720.672,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	-	12.756.061.442,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	-	3.480.440.800,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0069	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB	-	255.157.317,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	20.817.931.706,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	-	404.032.460,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	7.394.374.400,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	-	8.107.884.650,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0084	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	-	4.039.757.250,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	-	1.455.750.000,00	0,00	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.2.01.01.03.0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	10.786.976.007,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	6.016.510.754,00	0,00	-
4.2.01.01.03.0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	3.701.033.214,00	0,00	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	472.571.506.000,00	469.072.660.972,00	99,26	442.173.796.182,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	-	0,00	170.443.922.621,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	-	0,00	4.287.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	215.210.980.000,00	215.210.980.000,00	100,00	206.545.952.982,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	6.350.706.000,00	6.350.706.000,00	100,00	3.962.241.500,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	-	0,00	20.482.800.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.447.100.000,00	6.326.040.000,00	98,12	4.766.923.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	35.196.696.000,00	32.543.755.567,00	92,46	16.589.229.894,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	490.631.000,00	-	0,00	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	13.219.951.000,00	13.103.310.564,00	99,12	13.883.970.700,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-	0,00	445.151.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	580.092.000,00	580.092.000,00	100,00	330.305.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.041.150.000,00	1.041.099.800,00	100,00	435.799.485,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	170.276.700.000,00	170.208.929.041,00	99,96	-
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.837.500.000,00	3.837.500.000,00	100,00	-
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	19.920.000.000,00	19.870.248.000,00	99,75	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**1.881.195.824.000,00**	**1.869.980.690.410,00**	**99,40**	**1.746.347.989.883,00**
4.2.01.05	Dana Desa	266.151.514.000,00	266.151.514.000,00	100,00	261.275.195.760,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	266.151.514.000,00	266.151.514.000,00	100,00	261.275.195.760,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	266.151.514.000,00	266.151.514.000,00	100,00	261.275.195.760,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.719.565.000,00	5.719.565.000,00	100,00	6.635.557.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	5.719.565.000,00	5.719.565.000,00	100,00	6.635.557.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	5.719.565.000,00	5.719.565.000,00	100,00	6.635.557.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**271.871.079.000,00**	**271.871.079.000,00**	**100,00**	**267.910.752.760,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	237.086.590.000,00	210.780.450.718,00	88,90	194.467.008.055,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	217.827.830.000,00	191.738.404.378,00	88,02	185.308.688.272,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	217.827.830.000,00	191.738.404.378,00	88,02	185.308.688.272,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	59.080.546.000,00	41.138.706.115,00	69,63	44.647.048.421,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.349.608.000,00	25.310.027.122,00	86,24	26.179.119.798,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.065.739.000,00	48.718.257.994,00	99,29	43.266.505.801,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	140.261.000,00	152.105.550,00	108,44	128.164.823,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	80.191.676.000,00	76.419.307.597,00	95,30	71.087.849.429,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	19.258.760.000,00	19.042.046.340,00	98,87	9.158.319.783,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	19.258.760.000,00	19.042.046.340,00	98,87	9.158.319.783,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	19.258.760.000,00	19.042.046.340,00	98,87	9.158.319.783,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**237.086.590.000,00**	**210.780.450.718,00**	**88,90**	**194.467.008.055,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.390.153.493.000,00**	**2.352.632.220.128,00**	**98,43**	**2.208.725.750.698,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.807.367.254.000,00**	**2.755.590.550.648,00**	**98,16**	**2.572.342.827.720,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**3.001.406.468.000,00**	**2.797.563.975.971,83**	**93,21**	**2.539.300.079.432,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.367.480.276.291,00**	**2.175.975.811.563,83**	**91,91**	**1.890.948.953.345,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.452.801.288.790,00	1.302.143.148.625,00	89,63	1.113.196.374.159,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	858.200.453.721,00	742.658.256.753,00	86,54	673.918.703.800,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	649.135.645.721,00	567.248.702.633,00	87,39	513.484.360.997,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	480.795.505.521,00	444.056.908.779,00	92,36	439.124.758.297,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	168.340.140.200,00	123.191.793.854,00	73,18	74.359.602.700,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	60.938.847.000,00	52.256.006.084,00	85,75	47.043.699.659,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	44.284.529.000,00	40.674.005.566,00	91,85	40.055.598.411,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.654.318.000,00	11.582.000.518,00	69,54	6.988.101.248,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.310.235.000,00	4.753.744.950,00	89,52	4.234.455.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.310.235.000,00	4.753.744.950,00	89,52	4.234.455.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	51.624.401.000,00	37.977.330.162,00	73,56	32.134.253.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.570.622.000,00	34.059.662.162,00	88,30	32.134.253.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.053.779.000,00	3.917.668.000,00	30,01	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.035.815.000,00	4.484.835.000,00	89,06	6.503.955.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.035.815.000,00	4.484.835.000,00	89,06	6.503.955.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	34.701.890.000,00	30.032.954.970,00	86,55	28.920.637.320,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	23.416.290.000,00	22.141.347.570,00	94,56	23.737.103.400,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.285.600.000,00	7.891.607.400,00	69,93	5.183.533.920,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.910.502.000,00	4.514.855.517,00	91,94	2.516.086.227,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.910.502.000,00	4.514.855.517,00	91,94	2.516.086.227,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.443.000,00	7.557.997,00	52,33	7.467.452,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.533.000,00	5.751.960,00	60,34	6.133.126,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.910.000,00	1.806.037,00	36,78	1.334.326,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	40.327.856.000,00	36.716.552.380,00	91,05	34.861.349.010,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	33.298.656.000,00	30.541.194.868,00	91,72	31.868.204.992,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.029.200.000,00	6.175.357.512,00	87,85	2.993.144.018,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.471.195.000,00	1.166.433.685,00	79,28	1.053.113.866,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.008.795.000,00	908.694.112,00	90,08	900.370.246,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	462.400.000,00	257.739.573,00	55,74	152.743.620,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.729.624.000,00	3.499.283.375,00	73,99	3.159.326.269,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.950.208.000,00	2.726.094.711,00	92,40	2.697.438.624,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.779.416.000,00	773.188.664,00	43,45	461.887.645,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	138.057.693.000,00	124.668.447.396,00	90,30	132.199.270.278,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	138.057.693.000,00	124.668.447.396,00	90,30	132.199.270.278,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	138.057.693.000,00	124.668.447.396,00	90,30	132.199.270.278,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	287.583.278.611,00	283.338.798.656,00	98,52	210.084.545.339,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.119.704.053,00	2.929.676.387,00	93,91	3.189.266.274,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	13.297.812,00	5.220.000,00	39,25	20.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	53.315.383,00	53.315.383,00	100,00	49.999.999,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	11.313.796,00	11.313.796,00	100,00	10.547.750,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	156.947.335,00	78.300.000,00	49,89	61.245.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.548.030.435,00	1.514.773.686,00	97,85	1.354.172.250,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.552.732,00	-	0,00	2.003.300,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	16.243.748,00	16.243.748,00	100,00	15.991.750,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	221.630,00	221.250,00	99,83	306.225,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.163.020,00	4.350.000,00	19,63	25.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	647.238.512,00	622.238.512,00	96,14	800.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	647.379.650,00	623.700.012,00	96,34	850.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	755.996.250,00	665.948.250,00	88,09	604.534.773,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	-	-	0,00	3.600.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	397.485.000,00	397.369.500,00	99,97	328.216.175,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22.750.000,00	22.750.000,00	100,00	19.401.250,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	0,00	14.815.500,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2.528.750,00	2.528.750,00	100,00	-
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	22.675.000,00	-	0,00	-
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	103.070.000,00	99.800.000,00	96,83	89.318.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	-	-	0,00	10.935.250,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.750.000,00	-	0,00	2.100.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	90.737.500,00	30.500.000,00	33,61	-
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	-	-	0,00	135.960.810,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	0,00	187.788,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	113.000.000,00	113.000.000,00	100,00	-
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	277.258.578.308,00	274.165.735.269,00	98,88	202.846.284.292,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	277.258.578.308,00	274.165.735.269,00	98,88	202.846.284.292,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	6.449.000.000,00	5.577.438.750,00	86,49	3.432.250.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	6.449.000.000,00	5.577.438.750,00	86,49	3.432.250.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	-	-	0,00	6.360.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	0,00	6.360.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	0,00	5.850.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	-	0,00	5.850.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.737.858.000,00	27.278.480.541,00	98,34	27.480.182.850,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.132.261.200,00	1.096.515.000,00	96,84	1.111.110.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.132.261.200,00	1.096.515.000,00	96,84	1.111.110.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.853.360,00	124.404.000,00	94,35	126.684.600,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.853.360,00	124.404.000,00	94,35	126.684.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.168.800,00	133.470.060,00	95,91	134.121.840,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.168.800,00	133.470.060,00	95,91	134.121.840,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	97.419.800,00	94.153.500,00	96,65	95.193.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	97.419.800,00	94.153.500,00	96,65	95.193.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.609.587.000,00	1.589.946.750,00	98,78	1.611.109.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.609.587.000,00	1.589.946.750,00	98,78	1.611.109.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.500.000,00	107.579.850,00	80,58	132.457.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.500.000,00	107.579.850,00	80,58	132.457.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.350.000,00	12.849.900,00	63,14	14.798.700,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.350.000,00	12.849.900,00	63,14	14.798.700,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.357.500.000,00	6.226.500.000,00	97,94	6.279.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.357.500.000,00	6.226.500.000,00	97,94	6.279.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.081.500.000,00	1.039.500.000,00	96,12	1.575.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.081.500.000,00	1.039.500.000,00	96,12	1.575.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	25.150.000,00	11.630.291,00	46,24	5.320.248,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	25.150.000,00	11.630.291,00	46,24	5.320.248,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.474.167.840,00	9.413.391.190,00	99,36	9.459.087.462,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	115.589.250,00	110.462.454,00	95,56	112.692.934,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.877.512,00	2.259.684,00	58,28	2.284.632,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.633.078,00	6.779.052,00	58,27	6.853.896,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.343.068.000,00	9.293.890.000,00	99,47	9.337.256.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.980.400.000,00	6.967.800.000,00	99,82	6.930.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.980.400.000,00	6.967.800.000,00	99,82	6.930.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	555.000.000,00	460.740.000,00	83,02	6.300.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	555.000.000,00	460.740.000,00	83,02	6.300.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	699.939.250,00	516.235.056,00	73,75	1.124.594.110,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.060.000,00	29.400.000,00	48,95	40.081.200,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.060.000,00	29.400.000,00	48,95	40.081.200,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.409.000,00	4.116.000,00	48,95	4.536.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.409.000,00	4.116.000,00	48,95	4.536.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	52.920.000,00	53,85	54.000.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	52.920.000,00	53,85	54.000.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.270.000,00	4.055.520,00	49,04	5.938.440,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.270.000,00	4.055.520,00	49,04	5.938.440,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.000.000,00	757.546,00	37,88	415.626,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.000.000,00	757.546,00	37,88	415.626,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	13.000,00	1.000,00	7,69	220,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	13.000,00	1.000,00	7,69	220,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.500.000,00	2.963.520,00	45,59	3.699.360,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.500.000,00	2.963.520,00	45,59	3.699.360,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	446.500,00	60.480,00	13,55	98.640,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	446.500,00	60.480,00	13,55	98.640,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.339.500,00	181.440,00	13,55	295.920,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.339.500,00	181.440,00	13,55	295.920,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	446.400.000,00	421.779.550,00	94,48	970.727.217,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.900.000,00	780.000,00	20,00	8.100.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	14.170.000,00	14.170.000,00	100,00	21.791.734,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.145.000,00	2.145.000,00	100,00	4.185.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	11.700.000,00	5.850.000,00	50,00	24.300.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	205.421.340,00	205.421.340,00	100,00	321.084.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.041.950,00	-	0,00	863.033,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	13.004.300,00	4.245.800,00	32,65	6.345.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	65.000,00	65.000,00	100,00	121.500,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.500.000,00	650.000,00	10,00	10.458.450,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	98.452.410,00	98.452.410,00	100,00	223.450.500,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	350.028.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	68.221.250,00	-	0,00	44.801.487,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	-	-	0,00	900.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.082.500,00	-	0,00	556.325,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	0,00	3.973.750,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	0,00	3.034.500,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	446.250,00	-	0,00	-
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	36.680.000,00	-	0,00	18.105.000,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	-	-	0,00	2.239.750,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	-	-	0,00	525.000,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.012.500,00	-	0,00	-
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	-	-	0,00	15.428.700,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	0,00	38.462,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	13.000.000,00	-	0,00	-
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	621.600.000,00	72,96	672.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	201.600.000,00	80,00	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	201.600.000,00	80,00	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	420.000.000,00	70,00	420.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	420.000.000,00	70,00	420.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	139.670.066.208,00	123.061.330.223,00	88,11	67.717.077.782,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	139.670.066.208,00	123.061.330.223,00	88,11	67.717.077.782,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	139.670.066.208,00	123.061.330.223,00	88,11	67.717.077.782,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.061.378.291,00	714.049.430.646,00	95,07	667.795.423.023,00
5.1.02.01	Belanja Barang	109.655.628.425,03	101.980.355.512,00	93,00	93.739.020.194,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	108.974.448.425,03	101.300.281.637,00	92,96	93.655.602.954,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.099.729.291,00	1.900.795.373,00	90,53	984.533.142,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	138.217.496,00	122.740.767,00	88,80	181.584.290,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.317.091.220,00	9.207.532.374,00	89,25	10.401.981.961,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.544.705.200,00	1.541.724.162,00	99,81	766.641.000,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	7.000,00	-	0,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	224.266.000,00	216.289.500,00	96,44	33.515.600,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	65.736.000,00	58.003.000,00	88,24	96.214.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	73.105.000,00	71.278.600,00	97,50	195.884.049,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	225.763.700,00	225.698.800,00	99,97	71.050.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.224.149.210,00	3.112.750.630,00	96,54	4.785.458.911,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.290.000,00	13.133.000,00	98,82	-
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	210.000.000,00	209.699.500,00	99,86	687.689.172,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	36.795.000,00	36.787.500,00	99,98	4.440.428,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	0,00	14.219.900,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	16.103.300,00	10.031.300,00	62,29	417.215.762,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.336.038.302,03	2.236.911.518,00	41,92	3.735.066.653,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.380.288.640,00	2.282.346.107,00	95,89	2.181.974.811,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.134.728.337,00	8.812.417.604,00	96,47	10.692.903.441,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	295.939.000,00	279.540.600,00	94,46	428.496.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.425.481.488,00	2.225.954.353,00	91,77	2.763.517.080,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	147.691.000,00	132.874.408,00	89,97	201.836.808,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	636.896.000,00	632.980.890,00	99,39	687.371.619,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	422.785.000,00	421.721.290,00	99,75	329.626.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	283.450.000,00	283.245.000,00	99,93	218.047.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	467.169.000,00	450.465.200,00	96,42	540.195.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.643.210.550,00	1.577.243.800,00	95,99	1.972.956.021,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	11.500.534.370,00	11.237.336.226,00	97,71	6.777.399.056,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.079.968.251,00	4.905.057.266,00	96,56	5.969.899.147,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.113.775.700,00	6.028.813.090,00	98,61	3.239.223.357,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	0,00	113.320.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	48.000.000,00	45.600.000,00	95,00	-
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	880.654.500,00	868.276.905,00	98,59	2.377.973.823,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	304.469.200,00	304.274.750,00	99,94	109.222.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.074.651.670,00	20.773.348.700,00	94,10	20.806.787.539,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.802.915.000,00	2.741.310.343,00	97,80	3.025.103.962,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.051.998.500,00	2.040.030.881,00	99,42	1.773.863.627,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	12.491.306.500,00	12.239.161.500,00	97,98	4.109.593.100,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.373.625.000,00	1.348.567.813,00	98,18	1.317.058.060,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	255.500.000,00	179.600.000,00	70,29	41.960.600,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	110.902.000,00	90.450.000,00	81,56	40.609.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	372.395.000,00	370.281.000,00	99,43	153.028.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	42.000.000,00	28.000.000,00	66,67	90.076.600,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	40.500.000,00	40.476.500,00	99,94	40.377.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	-	-	0,00	4.895.100,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	162.700.000,00	162.625.000,00	99,95	79.200.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	55.037.000,00	41.040.000,00	74,57	1.533.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	11.000.000,00	10.900.000,00	99,09	10.866.900,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	158.900.000,00	128.540.000,00	80,89	156.534.800,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	304.100.000,00	303.046.000,00	99,65	272.179.835,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.191.887.500,00	1.166.887.400,00	97,90	556.279.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	169.992.500,00	169.492.987,00	99,71	194.199.700,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	0,00	83.417.240,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	-	-	0,00	21.191.240,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	-	-	0,00	60.726.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	0,00	1.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	681.180.000,00	680.073.875,00	99,84	-
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(),Home Use],	49.920.000,00	49.905.000,00	99,97	-
5.1.02.01.04.0138	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	25.300.000,00	24.272.875,00	95,94	-
5.1.02.01.04.0514	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00	-
5.1.02.01.04.0521	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	596.300.000,00	596.236.000,00	99,99	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	247.041.592.635,00	237.343.159.071,00	96,07	260.724.369.060,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	146.628.847.104,00	138.420.767.038,00	94,40	191.891.358.426,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.737.557.000,00	6.977.937.000,00	90,18	7.173.870.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	578.400.000,00	489.100.000,00	84,56	1.726.212.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	8.320.400.000,00	8.316.800.000,00	99,96	4.851.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	39.800.000,00	28.860.000,00	72,51	32.900.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	34.200.000,00	7.800.000,00	22,81	12.960.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	-	-	0,00	52.560.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	52.600.000,00	48.400.000,00	92,02	79.200.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	606.500.000,00	601.300.000,00	99,14	486.550.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	17.090.000.000,00	15.885.350.000,00	92,95	14.723.750.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.088.113.000,00	3.881.935.031,00	76,29	5.412.304.455,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	666.328.000,00	659.468.850,00	98,97	504.761.800,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	204.792.992,00	197.676.840,00	96,53	647.985.203,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.384.923.000,00	2.367.423.000,00	99,27	2.473.648.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	584.550.000,00	567.750.000,00	97,13	614.600.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	10.500.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	305.000.000,00	303.000.000,00	99,34	379.500.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.467.725.000,00	1.435.275.000,00	97,79	1.527.366.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.425.073.185,00	1.418.863.975,00	99,56	1.445.851.785,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	77.830.000,00	77.830.000,00	100,00	128.548.800,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	579.050.000,00	570.750.000,00	98,57	460.290.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.180.817.500,00	16.607.478.000,00	96,66	14.842.415.500,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.078.850.000,00	2.020.742.000,00	97,20	2.659.713.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.031.966.000,00	2.013.566.000,00	99,09	51.329.889.313,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	344.000.000,00	307.000.000,00	89,24	647.750.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.019.929.120,00	6.845.929.688,00	97,52	7.378.155.868,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.173.409.730,00	4.070.105.304,00	97,52	4.008.906.284,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	887.450.000,00	849.500.000,00	95,72	1.019.331.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	145.200.000,00	118.200.000,00	81,40	119.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	56.840.000,00	52.110.000,00	91,68	20.550.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	-	-	0,00	27.160.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	468.800.000,00	433.800.000,00	92,53	491.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	17.000.000,00	16.500.000,00	97,06	63.450.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.001.660.000,00	967.200.000,00	96,56	1.008.884.000,00
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	82.800.000,00	82.800.000,00	100,00	82.800.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	968.442.890,00	967.030.040,00	99,85	55.500.250,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	264.904.000,00	228.239.500,00	86,16	173.485.400,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	46.620.000,00	46.607.780,00	99,97	61.012.720,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	724.113.000,00	686.169.050,00	94,76	739.930.550,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	24.360.360.000,00	22.995.383.083,00	94,40	19.208.172.318,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	70.986.000,00	55.766.748,00	78,56	84.609.165,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	124.484.000,00	107.060.000,00	86,00	272.010.567,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	245.075.000,00	91.912.606,00	37,50	380.072.286,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	13.600.000,00	13.596.142,00	99,97	39.973.600,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	2.309.443.370,00	1.733.660.992,00	75,07	1.471.770.694,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.013.482.500,00	919.080.700,00	90,69	978.211.500,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	595.104.000,00	508.113.989,00	85,38	380.946.014,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	536.140.500,00	406.445.957,00	75,81	419.636.206,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	25.494.928.628,00	24.698.201.788,00	96,87	24.438.160.816,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	501.280.000,00	489.387.660,00	97,63	586.760.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.253.443.722,00	4.130.360.585,00	97,11	7.763.615.338,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	6.948.000,00	2.081.030,00	29,95	28.682.500,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	49.090.500,00	49.090.500,00	100,00	9.750.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	688.461.467,00	571.246.170,00	82,97	607.432.775,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	50.000.000,00	-	0,00	-
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.536.575.000,00	1.457.082.030,00	94,83	1.261.369.320,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	-	-	0,00	6.448.393.399,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	80.199.377.200,00	80.049.159.701,00	99,81	48.293.846.925,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.745.840.000,00	2.714.514.080,00	98,86	2.700.920.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	73.633.883.400,00	73.604.282.381,00	99,96	41.617.895.653,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.886.466.800,00	2.886.466.800,00	100,00	3.364.342.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	147.930.000,00	132.439.185,00	89,53	277.911.083,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	332.273.415,00	299.509.691,00	90,14	141.565.611,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	346.983.585,00	306.141.028,00	88,23	102.928.353,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	106.000.000,00	105.806.536,00	99,82	88.283.425,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	128.437.000,00	95.250.000,00	74,16	69.749.999,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	63.000.000,00	55.000.000,00	87,30	-
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	17.250.000,00	17.250.000,00	100,00	16.999.999,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	-	-	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.03.0010	Belanja Sewa Tanah Perkebunan	44.187.000,00	19.000.000,00	43,00	-
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.03.0024	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air	-	-	0,00	2.750.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.128.686.952,00	3.040.615.642,00	97,19	2.723.384.084,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	18.953.352,00	18.953.352,00	100,00	196.406.000,00
5.1.02.02.04.0019	Belanja Sewa Alat Penarik	-	-	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	975.768.000,00	906.188.000,00	92,87	709.185.973,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	67.352.000,00	60.122.000,00	89,27	68.551.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.02.04.0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	14.658.000,00	97,72	12.769.711,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	28.050.000,00	28.050.000,00	100,00	2.900.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	0,00	234.800.000,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	67.888.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.923.563.600,00	1.912.644.290,00	99,43	1.374.883.400,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	875.385.000,00	820.311.000,00	93,71	889.795.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	-	0,00	-
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	-	-	0,00	25.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	331.750.000,00	329.490.000,00	99,32	444.825.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	10.000.000,00	9.000.000,00	90,00	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	225.995.000,00	193.421.000,00	85,59	320.015.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	297.640.000,00	288.400.000,00	96,90	87.955.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.100.172.379,00	7.827.375.244,00	96,63	6.814.849.678,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	433.463.000,00	414.380.859,00	95,60	437.407.915,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	143.500.000,00	141.830.250,00	98,84	-
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	747.696.000,00	737.477.575,00	98,63	1.074.144.215,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	459.500.000,00	454.686.850,00	98,95	1.023.069.750,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	-	-	0,00	634.977.280,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.860.000.000,00	2.839.899.480,00	99,30	2.050.617.612,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	360.000.000,00	359.534.883,00	99,87	19.852.350,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	250.000.000,00	249.829.476,00	99,93	-
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	408.604.379,00	390.179.998,00	95,49	405.761.481,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	338.064.000,00	328.511.114,00	97,17	259.730.275,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	108.480.000,00	107.969.700,00	99,53	-
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	727.065.000,00	643.054.050,00	88,45	240.500.200,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	50.500.000,00	49.913.259,00	98,84	20.785.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	-	-	0,00	1.679.700,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.213.300.000,00	1.110.107.750,00	91,49	547.816.950,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	-	-	0,00	98.506.950,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.565.000.000,00	1.508.149.446,00	96,37	3.890.711.698,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	-	-	0,00	89.910.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	35.000.000,00	34.604.250,00	98,87	39.488.250,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	200.000.000,00	196.448.410,00	98,22	714.624.918,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	-	-	0,00	601.957.750,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00	49.611.450,00	99,22	134.886.400,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	250.000.000,00	247.986.900,00	99,19	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	60.000.000,00	54.000.000,00	90,00	275.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	970.000.000,00	925.498.436,00	95,41	1.769.853.880,00
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	-	-	0,00	64.990.500,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	50.000,00
5.1.02.02.10.0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	50.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	600.000.000,00	200.000.000,00	33,33	-
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	400.000.000,00	-	0,00	-
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.783.397.000,00	5.349.571.000,00	92,50	6.122.888.250,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.366.897.000,00	3.108.346.000,00	92,32	4.394.838.250,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.416.500.000,00	2.241.225.000,00	92,75	1.728.050.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	27.690.000,00	27.360.000,00	98,81	27.735.000,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	27.690.000,00	27.360.000,00	98,81	27.735.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	89.214.628.733,00	87.727.849.385,00	98,33	63.457.481.471,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	0,00	262.506.280,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	-	-	0,00	262.506.280,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.424.238.000,00	9.284.466.608,00	98,52	9.250.028.127,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	975.660.000,00	970.959.000,00	99,52	149.370.000,00
5.1.02.03.02.0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	-	-	0,00	14.997.500,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	59.450.500,00	59.340.000,00	99,81	159.941.014,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	142.920.000,00	142.501.760,00	99,71	150.419.758,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.278.105.900,00	4.226.403.226,00	98,79	3.104.792.603,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	538.682.000,00	515.435.230,00	95,68	1.283.501.349,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	210.700.000,00	196.636.938,00	93,33	341.724.850,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000,00	3.998.167,00	99,95	20.451.850,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	0,00	211.249.087,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	-	-	0,00	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	11.500.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	-	-	0,00	20.107.096,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	289.755.600,00	289.071.750,00	99,76	89.599.000,00
5.1.02.03.02.0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	13.160.000,00	13.160.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	-	0,00	1.100.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.680.000,00	7.642.900,00	99,52	17.208.125,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.111.644.000,00	1.090.473.490,00	98,10	1.263.034.054,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	296.000.000,00	295.657.000,00	99,88	181.316.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.550.000,00	2.497.088,00	97,93	151.237.222,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	399.057.000,00	392.466.694,00	98,35	510.895.439,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	-	-	0,00	18.472.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000,00	8.950.000,00	99,44	29.308.928,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	17.105.000,00	17.100.000,00	99,97	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	0,00	2.601.036,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	40.000.000,00	39.770.000,00	99,43	-
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	5.000.000,00	-	0,00	57.404.043,00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	-	-	0,00	36.398.600,00
5.1.02.03.02.0208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	-	0,00	35.936.250,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	-	-	0,00	17.828.000,00
5.1.02.03.02.0253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	-	-	0,00	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	176.528.000,00	172.961.759,00	97,98	346.488.652,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	0,00	16.634.600,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	231.000.000,00	228.544.580,00	98,94	252.909.021,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	0,00	7.609.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	225.000.000,00	224.998.776,00	100,00	61.775.250,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	264.990.000,00	259.666.000,00	97,99	493.805.300,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	111.250.000,00	111.232.250,00	99,98	155.412.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.241.495.714,00	11.026.391.859,00	98,09	18.924.229.871,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.179.609.042,00	7.971.258.702,00	97,45	8.500.068.597,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	-	-	0,00	19.670.247,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.820.886.672,00	2.814.729.696,00	99,78	2.650.213.613,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	190.000.000,00	189.537.450,00	99,76	4.482.897.200,00
5.1.02.03.03.0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	18.585.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	-	-	0,00	75.000.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-	0,00	478.563.938,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	0,00	2.654.412.796,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	50.000.000,00	49.866.011,00	99,73	-
5.1.02.03.03.0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	-	-	0,00	44.818.480,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.548.145.019,00	67.416.242.238,00	98,35	35.018.467.193,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	47.953.731.501,00	47.724.248.015,00	99,52	18.494.622.537,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	-	-	0,00	2.651.108.495,00
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	1.856.515.062,00	1.854.117.215,00	99,87	970.638.709,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	-	-	0,00	293.529.000,00
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	-	-	0,00	29.941.000,00
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	343.000.000,00	335.362.850,00	97,77	-
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	12.705.231.000,00	11.915.414.971,00	93,78	3.642.401.092,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.781.033.000,00	2.762.139.974,00	99,32	-
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.390.000.000,00	1.386.421.812,00	99,74	3.355.950.790,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	147.444.000,00	147.100.001,00	99,77	-
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	640.000.000,00	622.725.500,00	97,30	1.530.991.250,00
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	-	-	0,00	90.736.000,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-	0,00	27.633.500,00
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	557.190.456,00	524.763.650,00	94,18	1.248.153.000,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	-	-	0,00	98.786.255,00
5.1.02.03.04.0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	-	-	0,00	19.924.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	174.000.000,00	143.948.250,00	82,73	1.963.588.000,00
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	-	-	0,00	5.320.565,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	-	0,00	595.143.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	750.000,00	748.680,00	99,82	2.250.000,00
5.1.02.03.05.0016	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi	750.000,00	748.680,00	99,82	2.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.284.984.769,97	51.594.058.552,00	90,07	47.616.822.861,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.234.984.769,97	51.544.058.552,00	90,06	47.551.822.861,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.086.865.769,97	34.235.576.352,00	89,89	31.279.656.307,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.134.500.000,00	9.215.655.400,00	90,93	10.323.132.454,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.900.799.000,00	4.376.266.800,00	89,30	3.481.166.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.112.820.000,00	3.716.560.000,00	90,37	2.467.868.100,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	65.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	65.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.876.450.000,00	29.425.862.861,00	95,30	16.509.701.641,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.030.700.000,00	27.652.360.000,00	95,25	14.054.282.100,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	681.650.000,00	623.890.000,00	91,53	261.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	961.950.000,00	959.800.000,00	99,78	733.430.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	-	-	0,00	196.950.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.525.600.000,00	3.523.200.000,00	99,93	-
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	23.861.500.000,00	22.545.470.000,00	94,48	12.862.402.100,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.845.750.000,00	1.773.502.861,00	96,09	2.455.419.541,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.845.750.000,00	1.773.502.861,00	96,09	2.455.419.541,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	129.498.566.129,00	127.785.546.692,00	98,68	127.114.256.419,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	129.498.566.129,00	127.785.546.692,00	98,68	127.114.256.419,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	129.498.566.129,00	127.785.546.692,00	98,68	127.114.256.419,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.489.527.599,00	78.192.598.573,00	89,37	58.633.771.377,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.489.527.599,00	78.192.598.573,00	89,37	58.633.771.377,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.489.527.599,00	78.192.598.573,00	89,37	58.633.771.377,00
5.1.05	Belanja Hibah	153.666.629.210,00	150.235.584.292,83	97,77	101.019.252.163,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.432.500.000,00	5.381.195.600,00	99,06	2.868.409.750,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.432.500.000,00	2.381.195.600,00	97,89	2.868.409.750,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.432.500.000,00	2.381.195.600,00	97,89	2.868.409.750,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	130.462.842.526,00	127.150.650.801,83	97,46	80.127.521.905,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	109.883.372.526,00	109.146.127.084,83	99,33	44.332.832.998,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	99.882.700.000,00	99.490.342.000,00	99,61	31.750.929.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.672.526,00	9.655.785.084,83	96,55	12.581.903.998,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.058.500.000,00	1.942.764.869,00	94,38	8.454.426.347,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.435.000.000,00	1.320.000.000,00	91,99	7.205.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	623.500.000,00	622.764.869,00	99,88	1.249.426.347,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.420.970.000,00	15.961.758.848,00	86,65	27.340.262.560,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.661.000.000,00	15.230.500.000,00	86,24	25.161.464.686,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	759.970.000,00	731.258.848,00	96,22	2.178.797.874,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.820.437.684,00	15.752.888.891,00	99,57	16.155.490.508,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	52.637.684,00	-	0,00	-
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	52.637.684,00	-	0,00	-
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.767.800.000,00	15.752.888.891,00	99,91	16.155.490.508,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.767.800.000,00	15.752.888.891,00	99,91	16.155.490.508,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.849.000,00	1.950.849.000,00	100,00	1.867.830.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.849.000,00	1.950.849.000,00	100,00	1.867.830.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.849.000,00	1.950.849.000,00	100,00	1.867.830.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.950.980.000,00	9.547.648.000,00	95,95	8.937.904.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.650.980.000,00	9.247.648.000,00	95,82	8.577.932.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.762.720.000,00	5.399.920.000,00	93,70	8.249.300.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.762.720.000,00	5.399.920.000,00	93,70	8.249.300.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.888.260.000,00	3.847.728.000,00	98,96	328.632.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.888.260.000,00	3.847.728.000,00	98,96	328.632.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	359.972.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	0,00	359.972.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	0,00	359.972.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.367.480.276.291,00**	**2.175.975.811.563,83**	**91,91**	**1.890.948.953.345,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**192.492.047.709,00**	**180.988.417.949,00**	**94,02**	**217.207.125.026,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	95,63	2.046.604.500,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	95,63	2.046.604.500,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	95,63	-
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	95,63	-
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	-	-	0,00	2.046.604.500,00
5.2.01.01.03.0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	-	-	0,00	2.046.604.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.645.018.098,00	68.867.746.899,00	93,51	90.599.632.595,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	579.802.500,00	536.559.950,00	92,54	1.928.997.200,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	0,00	1.547.340.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	-	-	0,00	1.547.340.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	579.802.500,00	536.559.950,00	92,54	381.657.200,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	452.000.000,00	420.630.000,00	93,06	343.850.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	70.130.000,00	66.429.950,00	94,72	24.925.000,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	7.909.200,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	52.672.500,00	44.500.000,00	84,48	4.973.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	16.156.686.000,00	15.992.422.400,00	98,98	4.546.873.947,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	15.986.936.000,00	15.835.256.400,00	99,05	4.437.450.947,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	300.862.000,00	268.764.600,00	89,33	285.980.498,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.186.074.000,00	2.128.691.800,00	97,38	269.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	0,00	162.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	0,00	968.620.449,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	13.500.000.000,00	13.437.800.000,00	99,54	642.800.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	0,00	2.109.050.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	169.750.000,00	157.166.000,00	92,59	109.423.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00	25.464.000,00
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	-	-	0,00	45.200.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	156.000.000,00	143.416.000,00	91,93	38.759.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	105.215.400,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	105.215.400,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	-	-	0,00	61.000.000,00
5.2.02.03.03.0020	Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	-
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	-	-	0,00	44.215.400,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	291.100.000,00	290.225.000,00	99,70	44.800.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	291.100.000,00	290.225.000,00	99,70	44.800.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	26.000.000,00	25.800.000,00	99,23	-
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	-	-	0,00	44.800.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	200.000.000,00	199.825.000,00	99,91	-
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	65.100.000,00	64.600.000,00	99,23	-
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.330.758.540,00	9.010.548.471,00	87,22	5.956.544.138,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.596.585.068,00	699.275.515,00	43,80	1.247.738.250,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	138.686.250,00	126.042.250,00	90,88	112.810.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.457.898.818,00	573.233.265,00	39,32	1.134.928.250,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.576.217.472,00	8.157.233.956,00	95,11	4.552.569.888,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	6.336.203.351,00	6.010.569.060,00	94,86	3.517.221.495,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	0,00	7.150.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.433.449.405,00	1.378.330.856,00	96,15	771.794.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	12.050.000,00	12.050.000,00	100,00	23.982.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	769.610.216,00	731.504.540,00	95,05	199.022.393,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	24.904.500,00	24.779.500,00	99,50	33.400.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	157.956.000,00	154.039.000,00	97,52	156.236.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	0,00	21.000.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	143.000.000,00	139.489.000,00	97,54	-
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	10.656.000,00	10.250.000,00	96,19	52.286.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	0,00	60.250.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	22.700.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	337.966.006,00	320.375.314,00	94,80	2.289.334.620,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	238.766.006,00	228.375.314,00	95,65	2.267.836.620,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	218.766.006,00	211.384.025,00	96,63	1.900.499.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	17.000.000,00	16.991.289,00	99,95	209.026.620,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	-	-	0,00	62.218.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	-	-	0,00	7.260.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	-	0,00	3.500.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	-	0,00	85.333.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	900.000,00	-	0,00	21.498.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	900.000,00	-	0,00	21.498.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	98.300.000,00	92.000.000,00	93,59	-
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	98.300.000,00	92.000.000,00	93,59	-
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.383.547.424,00	19.846.214.588,00	88,66	35.232.967.961,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	641.413.152,00	318.922.034,00	49,72	425.738.882,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	536.639.452,00	271.103.084,00	50,52	252.501.263,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	104.773.700,00	47.818.950,00	45,64	172.874.619,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	-	-	0,00	363.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	21.742.134.272,00	19.527.292.554,00	89,81	34.807.229.079,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	21.742.134.272,00	19.527.292.554,00	89,81	34.807.229.079,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.853.412.530,00	1.681.971.390,00	90,75	2.776.158.590,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.047.941.090,00	1.025.168.140,00	97,83	2.049.638.600,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	3.422.950,00	3.175.000,00	92,76	15.638.600,00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	-	-	0,00	12.000.000,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	-	-	0,00	1.500.000.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.044.518.140,00	1.021.993.140,00	97,84	522.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	748.471.440,00	600.303.250,00	80,20	721.319.990,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	405.661.740,00	277.969.250,00	68,52	-
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	-	-	0,00	194.877.150,00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	-	-	0,00	6.630.000,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	243.081.700,00	227.764.000,00	93,70	239.620.140,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	99.728.000,00	94.570.000,00	94,83	280.192.700,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	57.000.000,00	56.500.000,00	99,12	-
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	57.000.000,00	56.500.000,00	99,12	-
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	-	-	0,00	5.200.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	-	-	0,00	5.200.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.105.151.972,00	7.528.652.310,00	92,89	37.412.921.239,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	7.178.347.114,00	6.715.062.350,00	93,55	31.039.293.327,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	661.100.000,00	544.328.000,00	82,34	3.020.584.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.897.905.864,00	4.613.943.250,00	94,20	3.383.059.913,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.619.341.250,00	1.556.791.100,00	96,14	24.635.649.414,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	926.804.858,00	813.589.960,00	87,78	6.373.627.912,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	0,00	23.310.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	530.297.938,00	435.270.000,00	82,08	592.171.092,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	322.400.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	364.506.920,00	346.319.960,00	95,01	5.435.746.820,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	69.985.000,00	47.150.000,00	67,37	70.907.000,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	-	-	0,00	55.643.000,00
5.2.02.11.01.0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	-	-	0,00	55.643.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	69.985.000,00	47.150.000,00	67,37	15.264.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	69.985.000,00	47.150.000,00	67,37	15.264.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	0,00	2.000.000,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	-	-	0,00	2.000.000,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	-	-	0,00	2.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	-
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	-
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	-
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	150.000.000,00	149.286.337,00	99,52	232.912.500,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	150.000.000,00	149.286.337,00	99,52	232.912.500,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	150.000.000,00	149.286.337,00	99,52	232.912.500,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	-
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	-
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00	-
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.261.560.126,00	13.398.761.139,00	101,03	-
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.261.560.126,00	13.398.761.139,00	101,03	-
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.261.560.126,00	13.398.761.139,00	101,03	-
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	69.148.000,00	9.980.000,00	14,43	-
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	69.148.000,00	9.980.000,00	14,43	-
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	69.148.000,00	9.980.000,00	14,43	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.414.402.986,00	47.292.557.157,00	86,91	47.732.039.343,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	54.284.349.211,00	47.186.265.807,00	86,92	47.532.580.343,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.284.349.211,00	47.186.265.807,00	86,92	47.532.580.343,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.267.189.000,00	4.158.019.709,00	97,44	6.799.455.363,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.818.407.000,00	1.470.131.706,00	80,85	-
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	96.768.730,00	73.590.613,00	76,05	605.000.035,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	41.761.390.481,00	35.780.440.394,00	85,68	39.678.483.945,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	716.060.000,00	713.453.094,00	99,64	-
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	96.600.000,00	96.402.996,00	99,80	-
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	2.810.158.000,00	2.666.666.665,00	94,89	70.628.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.042.776.000,00	904.956.630,00	86,78	-
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.675.000.000,00	1.322.604.000,00	78,96	379.013.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	30.000.000,00	29.990.000,00	99,97	199.459.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	30.000.000,00	29.990.000,00	99,97	199.459.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	30.000.000,00	29.990.000,00	99,97	199.459.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	100.053.775,00	76.301.350,00	76,26	-
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	100.053.775,00	76.301.350,00	76,26	-
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	100.053.775,00	76.301.350,00	76,26	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.886.187.880,00	41.979.833.338,00	97,89	54.538.776.430,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	35.796.219.080,00	35.304.221.338,00	98,63	52.382.454.200,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	35.596.219.080,00	35.104.838.692,00	98,62	51.830.956.200,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	32.380.801.100,00	32.256.885.035,00	99,62	51.709.236.200,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	3.005.920.000,00	2.638.645.832,00	87,78	-
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	209.497.980,00	209.307.825,00	99,91	121.720.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	200.000.000,00	199.382.646,00	99,69	551.498.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.000.000,00	199.382.646,00	99,69	551.498.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	802.000.000,00	765.612.000,00	95,46	18.495.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.000.000,00	-	0,00	-
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.000.000,00	-	0,00	-
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	800.000.000,00	765.612.000,00	95,70	-
5.2.04.02.03.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	800.000.000,00	765.612.000,00	95,70	-
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	0,00	295.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	-	-	0,00	295.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	-	-	0,00	18.200.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	-	-	0,00	18.200.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	6.287.968.800,00	5.910.000.000,00	93,99	1.973.000.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	6.287.500.000,00	5.910.000.000,00	94,00	-
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	6.287.500.000,00	5.910.000.000,00	94,00	-
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	468.800,00	-	0,00	1.973.000.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	468.800,00	-	0,00	1.973.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	-	-	0,00	164.827.230,00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	-	-	0,00	164.827.230,00
5.2.04.04.03.0004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara	-	-	0,00	164.827.230,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.332.688.745,00	17.866.133.555,00	109,39	22.290.072.158,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	246.180.000,00	239.800.160,00	97,41	21.719.526.158,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	234.180.000,00	227.800.160,00	97,28	21.456.903.033,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	234.180.000,00	227.800.160,00	97,28	21.300.483.033,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	-	-	0,00	7.350.000,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	-	-	0,00	22.050.000,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	-	-	0,00	106.350.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	-	-	0,00	14.700.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	-	-	0,00	1.470.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	-	-	0,00	4.500.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	0,00	228.083.125,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	-	-	0,00	228.083.125,00
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	34.540.000,00
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	34.540.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	372.300.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	-	-	0,00	372.300.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	-	-	0,00	6.000.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	-	-	0,00	366.300.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	35.645.000,00	35.645.000,00	100,00	-
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	35.645.000,00	35.645.000,00	100,00	-
5.2.05.06.01.0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi	35.645.000,00	35.645.000,00	100,00	-
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0,00	198.246.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	0,00	198.246.000,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	-	-	0,00	198.246.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.030.863.745,00	17.570.688.395,00	109,61	-
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.030.863.745,00	17.570.688.395,00	109,61	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.030.863.745,00	17.570.688.395,00	109,61	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.913.750.000,00	2.782.571.000,00	95,50	-
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.910.000.000,00	2.782.571.000,00	95,62	-
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.910.000.000,00	2.782.571.000,00	95,62	-
5.2.06.01.01.0003	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	10.000.000,00	-	0,00	-
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	2.900.000.000,00	2.782.571.000,00	95,95	-
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.750.000,00	-	0,00	-
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.750.000,00	-	0,00	-
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.750.000,00	-	0,00	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	**192.492.047.709,00**	**180.988.417.949,00**	**94,02**	**217.207.125.026,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.972.500.000,00**	**1.266.502.459,00**	**64,21**	**427.605.701,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	64,21	427.605.701,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	64,21	427.605.701,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	64,21	427.605.701,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	64,21	427.605.701,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.972.500.000,00**	**1.266.502.459,00**	**64,21**	**427.605.701,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**439.461.644.000,00**	**439.333.244.000,00**	**99,97**	**430.716.395.360,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.681.180.000,00	14.681.180.000,00	100,00	15.047.084.900,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.281.883.069,00	11.281.883.069,00	100,00	10.413.308.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.281.883.069,00	11.281.883.069,00	100,00	10.413.308.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	11.281.883.069,00	11.281.883.069,00	100,00	10.413.308.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.399.296.931,00	3.399.296.931,00	100,00	4.633.776.900,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.399.296.931,00	3.399.296.931,00	100,00	4.633.776.900,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.399.296.931,00	3.399.296.931,00	100,00	4.633.776.900,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	99,97	415.669.310.460,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	99,97	415.669.310.460,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	0,00	113.229.692.000,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	0,00	113.229.692.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	99,97	302.439.618.460,00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	0,00	8.845.000.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	99,97	293.594.618.460,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**439.461.644.000,00**	**439.333.244.000,00**	**99,97**	**430.716.395.360,00**
	JUMLAH BELANJA	**3.001.406.468.000,00**	**2.797.563.975.971,83**	**93,21**	**2.539.300.079.432,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(194.039.214.000,00)**	**(41.973.425.323,83)**	**21,63**	**33.042.748.288,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**194.039.214.000,00**	**186.444.214.155,00**	**96,09**	**127.901.465.867,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**208.539.214.000,00**	**200.944.214.155,00**	**96,36**	**155.751.465.867,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.944.214.000,00	159.517.643.992,00	99,11	155.751.465.867,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	0,00	1.999.614.036,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	-	-	0,00	6.462.075.485,00
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	-	-	0,00	(83.385.000,00)
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	-	-	0,00	194.058.586,00
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	-	-	0,00	(77.976.350,00)
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	-	-	0,00	(69.715.937,00)
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	-	-	0,00	407.667.464,00
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	-	-	0,00	22.354.915,00
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	-	-	0,00	10.253.405,00
6.1.01.01.01.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	-	-	0,00	(2.100.000,00)
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	0,00	349.134.950,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	-	0,00	2.319.625.004,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	0,00	3.392.158.448,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	-	-	0,00	(6.568.502.926,00)
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	-	-	0,00	(4.090.632.082,00)
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	-	-	0,00	(2.484.035.486,00)
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	0,00	6.164.642,00
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00	2.678,00
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-	0,00	2.678,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	-	-	0,00	2.106.038.799,00
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	-	-	0,00	(233.022.751,00)
6.1.01.01.04.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	0,00	497.359.766,00
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	-	-	0,00	(472.346.416,00)
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	-	-	0,00	2.306.849.270,00
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	0,00	(217.635.613,00)
6.1.01.01.04.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	0,00	104.999.999,00
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	-	-	0,00	(375.349.406,00)
6.1.01.01.04.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	0,00	495.183.950,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	-	0,00	(24.115.501.770,00)
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	-	-	0,00	(15.219.207.467,00)
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	0,00	1.348.065.292,00
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	-	0,00	(391.590.796,00)
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	0,00	659.600.420,00
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	-	-	0,00	(223.748.621,00)
6.1.01.02.01.0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	-	-	0,00	394.616.382,00
6.1.01.02.01.0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	-	-	0,00	13.816.609,00
6.1.01.02.01.0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	-	-	0,00	3.591.881,00
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	-	-	0,00	656.700,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	-	0,00	515,00
6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	-	-	0,00	173.473.000,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	0,00	(39.771.965,00)
6.1.01.02.01.0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	-	0,00	(2.438.569,00)
6.1.01.02.01.0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	-	0,00	(8.616.562,00)
6.1.01.02.01.0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	-	0,00	(409.748.994,00)
6.1.01.02.01.0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	0,00	(525.318.900,00)
6.1.01.02.01.0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	0,00	(81.871.201,00)
6.1.01.02.01.0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	0,00	(284.190.136,00)
6.1.01.02.01.0048	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	0,00	(178.124.700,00)
6.1.01.02.01.0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	0,00	(2.586.005.425,00)
6.1.01.02.01.0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	-	0,00	(332.716.445,00)
6.1.01.02.01.0054	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	0,00	(1.216.000,00)
6.1.01.02.01.0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-	-	0,00	(384.467.281,00)
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	0,00	(10.551.505.129,00)
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	0,00	(1.811.700.000,00)
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	-	-	0,00	333.036.955,00
6.1.01.02.01.0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	0,00	(406.876.000,00)
6.1.01.02.01.0080	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	-	0,00	580.830.000,00
6.1.01.02.01.0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	-	-	0,00	(506.990.000,00)
6.1.01.02.01.0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	0,00	203,00
6.1.01.02.01.0102	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKB-KB	-	-	0,00	400,00
6.1.01.02.01.0104	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-	-	0,00	900,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	-	-	0,00	(8.896.294.303,00)
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	-	-	0,00	(7.599.961.303,00)
6.1.01.02.02.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan	-	-	0,00	(1.296.333.000,00)
6.1.01.05	Penghematan Belanja	160.944.214.000,00	159.517.643.992,00	99,11	119.231.641.876,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	160.944.214.000,00	159.517.643.992,00	99,11	100.725.548.578,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	0,00	36.878.507.361,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	-	-	0,00	13.548.869.609,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	0,00	13.657.020.758,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	0,00	13.547.904,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	0,00	715.295.863,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	0,00	95.200.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	160.944.214.000,00	159.517.643.992,00	99,11	6.119.726.863,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	-	-	0,00	17.821.609.815,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	-	-	0,00	1.825.583.472,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	-	-	0,00	4.917.505.750,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00	852.496.212,00
6.1.01.05.01.0021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00	82.598.154,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	0,00	1.804.010.817,00
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	0,00	2.133.505.000,00
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	0,00	260.071.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	-	-	0,00	14.663.053.943,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	-	-	0,00	932.829.500,00
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	-	-	0,00	1.785.968,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	-	-	0,00	77.800.393,00
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	0,00	26.970.400,00
6.1.01.05.02.0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	-	-	0,00	320.549.000,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	0,00	270.810.328,00
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	0,00	22.268.255,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	0,00	606.123.090,00
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	-	-	0,00	22.603.150,00
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	-	-	0,00	188.658.827,00
6.1.01.05.02.0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	-	-	0,00	940.000,00
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	-	-	0,00	1.479.508,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	-	0,00	1.778.507.359,00
6.1.01.05.02.0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara	-	-	0,00	402.100,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	-	-	0,00	7.372.860.025,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	-	-	0,00	2.995.445.140,00
6.1.01.05.02.0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	-	-	0,00	32.895.900,00
6.1.01.05.02.0030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	0,00	5.000.000,00
6.1.01.05.02.0035	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	0,00	5.125.000,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	-	-	0,00	3.843.039.350,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	-	-	0,00	3.843.039.350,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	-	-	0,00	5,00
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	0,00	5,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	-	-	0,00	58.635.711.725,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	0,00	48.088.445.094,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	0,00	48.088.445.094,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	-	-	0,00	91.662.687,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	-	-	0,00	91.662.687,00
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	-	-	0,00	10.455.603.944,00
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	-	-	0,00	10.455.603.944,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	41.426.570.163,00	103,57	-
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	41.426.570.163,00	103,57	-
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	41.426.570.163,00	103,57	-
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	41.426.570.163,00	103,57	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.595.000.000,00	-	0,00	-
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	7.595.000.000,00	-	0,00	-
6.1.05.03.02	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	7.595.000.000,00	-	0,00	-
6.1.05.03.02.0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD	7.595.000.000,00	-	0,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**208.539.214.000,00**	**200.944.214.155,00**	**96,36**	**155.751.465.867,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**14.500.000.000,00**	**14.500.000.000,00**	**100,00**	**27.850.000.000,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00	20.000.000.000,00
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00	20.000.000.000,00
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00	20.000.000.000,00
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00	20.000.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00	7.850.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00	7.850.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00	7.850.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100,00	7.850.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**14.500.000.000,00**	**14.500.000.000,00**	**100,00**	**27.850.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**194.039.214.000,00**	**186.444.214.155,00**	**96,09**	**127.901.465.867,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**-**	**144.470.788.831,17**	**0,00**	**160.944.214.155,00**

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**
Organisasi : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.220.035.337.213,00	1.107.124.854.791,00	(112.910.482.422,00)	90,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	922.117.392.029,00	819.365.729.056,00	(102.751.662.973,00)	88,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	407.801.650,00	406.313.800,00	(1.487.850,00)	99,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	365.801.650,00	364.365.000,00	(1.436.650,00)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	365.801.650,00	364.365.000,00	(1.436.650,00)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.801.650,00	364.365.000,00	(1.436.650,00)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	16.000.000,00	15.949.400,00	(50.600,00)	99,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.949.400,00	(50.600,00)	99,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.949.400,00	(50.600,00)	99,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	16.000.000,00	15.999.400,00	(600,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.999.400,00	(600,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.999.400,00	(600,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	917.926.600.029,00	815.538.333.233,00	(102.388.266.796,00)	88,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	917.817.790.029,00	815.430.131.033,00	(102.387.658.996,00)	88,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	917.817.790.029,00	815.430.131.033,00	(102.387.658.996,00)	88,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	917.817.790.029,00	815.430.131.033,00	(102.387.658.996,00)	88,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	78.810.000,00	78.202.200,00	(607.800,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	78.810.000,00	78.202.200,00	(607.800,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.810.000,00	78.202.200,00	(607.800,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	206.886.000,00	201.327.000,00	(5.559.000,00)	97,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	206.886.000,00	201.327.000,00	(5.559.000,00)	97,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	206.886.000,00	201.327.000,00	(5.559.000,00)	97,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.886.000,00	201.327.000,00	(5.559.000,00)	97,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.466.128.010,00	1.294.573.749,00	(171.554.261,00)	88,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	34.210.000,00	34.210.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.210.000,00	34.210.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.210.000,00	34.210.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	70.786.656,00	69.800.000,00	(986.656,00)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	70.786.656,00	69.800.000,00	(986.656,00)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.786.656,00	69.800.000,00	(986.656,00)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	34.620.000,00	34.620.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.620.000,00	34.620.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.620.000,00	34.620.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	198.703.004,00	196.962.000,00	(1.741.004,00)	99,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	198.703.004,00	196.962.000,00	(1.741.004,00)	99,12	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.703.004,00	196.962.000,00	(1.741.004,00)	99,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	59.770.000,00	59.770.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	59.770.000,00	59.770.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.770.000,00	59.770.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39.650.000,00	36.050.000,00	(3.600.000,00)	90,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	39.650.000,00	36.050.000,00	(3.600.000,00)	90,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.650.000,00	36.050.000,00	(3.600.000,00)	90,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.028.388.350,00	863.161.749,00	(165.226.601,00)	83,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.028.388.350,00	863.161.749,00	(165.226.601,00)	83,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.028.388.350,00	863.161.749,00	(165.226.601,00)	83,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	787.366.000,00	782.489.300,00	(4.876.700,00)	99,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	468.830.000,00	466.789.300,00	(2.040.700,00)	99,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	468.830.000,00	466.789.300,00	(2.040.700,00)	99,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	468.830.000,00	466.789.300,00	(2.040.700,00)	99,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	318.536.000,00	315.700.000,00	(2.836.000,00)	99,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	874,00	-	(874,00)	-	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874,00	-	(874,00)	-	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	318.535.126,00	315.700.000,00	(2.835.126,00)	99,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	318.535.126,00	315.700.000,00	(2.835.126,00)	99,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	285.354.000,00	284.540.093,00	(813.907,00)	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	274.954.000,00	274.140.093,00	(813.907,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	274.954.000,00	274.140.093,00	(813.907,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.954.000,00	274.140.093,00	(813.907,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.037.256.340,00	858.151.881,00	(179.104.459,00)	82,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	155.360.000,00	154.622.218,00	(737.782,00)	99,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	155.360.000,00	154.622.218,00	(737.782,00)	99,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.360.000,00	154.622.218,00	(737.782,00)	99,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	86.646.340,00	86.562.000,00	(84.340,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	86.646.340,00	86.562.000,00	(84.340,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.646.340,00	86.562.000,00	(84.340,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	745.250.000,00	566.967.663,00	(178.282.337,00)	76,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	715.250.000,00	536.977.663,00	(178.272.337,00)	75,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.250.000,00	536.977.663,00	(178.272.337,00)	75,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	295.617.945.184,00	285.749.259.290,00	(9.868.685.894,00)	96,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	173.959.863.792,00	167.743.210.140,00	(6.216.653.652,00)	96,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	10.514.735.173,00	8.383.969.587,00	(2.130.765.586,00)	79,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.035.999,00	7.200.000,00	(2.835.999,00)	71,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.035.999,00	7.200.000,00	(2.835.999,00)	71,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.504.699.174,00	8.376.769.587,00	(2.127.929.587,00)	79,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.504.699.174,00	8.376.769.587,00	(2.127.929.587,00)	79,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.694.527.900,00	1.654.224.000,00	(40.303.900,00)	97,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.694.527.900,00	1.654.224.000,00	(40.303.900,00)	97,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.694.379.290,00	1.654.224.000,00	(40.155.290,00)	97,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.610,00	-	(148.610,00)	-	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	1.000.000.000,00	982.148.000,00	(17.852.000,00)	98,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	982.148.000,00	(17.852.000,00)	98,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	982.148.000,00	(17.852.000,00)	98,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	2.000.000.000,00	1.987.940.000,00	(12.060.000,00)	99,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	1.930.000.000,00	1.917.940.000,00	(12.060.000,00)	99,37	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.929.995.000,00	1.917.940.000,00	(12.055.000,00)	99,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.000,00	-	(5.000,00)	-	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	1.501.775.000,00	1.382.668.000,00	(119.107.000,00)	92,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.501.775.000,00	1.382.668.000,00	(119.107.000,00)	92,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.501.775.000,00	1.382.668.000,00	(119.107.000,00)	92,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	20.500.000.000,00	18.782.151.558,00	(1.717.848.442,00)	91,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	20.500.000.000,00	18.782.151.558,00	(1.717.848.442,00)	91,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000.000,00	18.782.151.558,00	(1.717.848.442,00)	91,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	117.304.202.292,00	117.230.574.062,00	(73.628.230,00)	99,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	95.554.968.461,00	94.783.709.028,00	(771.259.433,00)	99,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.704.066.169,00	88.979.870.828,00	(724.195.341,00)	99,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	5.850.902.292,00	5.803.838.200,00	(47.064.092,00)	99,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	21.749.233.831,00	22.446.865.034,00	697.631.203,00	103,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.979.984.906,00	10.671.588.509,00	(308.396.397,00)	97,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.769.248.925,00	11.775.276.525,00	1.006.027.600,00	109,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	900.000.000,00	817.070.500,00	(82.929.500,00)	90,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	900.000.000,00	817.070.500,00	(82.929.500,00)	90,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	817.070.500,00	(82.929.500,00)	90,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	200.000.000,00	199.441.980,00	(558.020,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.441.980,00	(558.020,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.441.980,00	(558.020,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	6.033.798.427,00	5.195.032.014,00	(838.766.413,00)	86,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1	BELANJA OPERASI	825.000.000,00	825.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1.05	Belanja Hibah	825.000.000,00	825.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2	BELANJA MODAL	5.208.798.427,00	4.370.032.014,00	(838.766.413,00)	83,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.208.798.427,00	4.370.032.014,00	(838.766.413,00)	83,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	350.825.000,00	318.950.000,00	(31.875.000,00)	90,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	350.825.000,00	318.950.000,00	(31.875.000,00)	90,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.825.000,00	318.950.000,00	(31.875.000,00)	90,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	11.960.000.000,00	10.809.040.439,00	(1.150.959.561,00)	90,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	31.780.000,00	18.298.000,00	(13.482.000,00)	57,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.780.000,00	18.298.000,00	(13.482.000,00)	57,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	11.928.220.000,00	10.790.742.439,00	(1.137.477.561,00)	90,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.928.220.000,00	10.790.742.439,00	(1.137.477.561,00)	90,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	76.750.323.392,00	74.616.404.626,00	(2.133.918.766,00)	97,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	4.613.500.000,00	3.938.983.113,00	(674.516.887,00)	85,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	4.613.500.000,00	3.938.983.113,00	(674.516.887,00)	85,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.613.500.000,00	3.938.983.113,00	(674.516.887,00)	85,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	7.614.656.730,00	6.790.412.355,00	(824.244.375,00)	89,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	625.000.000,00	625.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1.05	Belanja Hibah	625.000.000,00	625.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	6.989.656.730,00	6.165.412.355,00	(824.244.375,00)	88,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.989.656.730,00	6.165.412.355,00	(824.244.375,00)	88,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	2.761.469.530,00	2.669.177.750,00	(92.291.780,00)	96,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	2.761.469.530,00	2.669.177.750,00	(92.291.780,00)	96,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.761.469.530,00	2.669.177.750,00	(92.291.780,00)	96,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	2.000.000.000,00	1.943.067.516,00	(56.932.484,00)	97,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000,00	1.943.067.516,00	(56.932.484,00)	97,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	1.943.067.516,00	(56.932.484,00)	97,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	900.661.740,00	771.019.250,00	(129.642.490,00)	85,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.1.05	Belanja Hibah	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2	BELANJA MODAL	795.661.740,00	666.019.250,00	(129.642.490,00)	83,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	795.661.740,00	666.019.250,00	(129.642.490,00)	83,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	816.900.000,00	719.541.000,00	(97.359.000,00)	88,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	816.900.000,00	719.541.000,00	(97.359.000,00)	88,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.900.000,00	719.541.000,00	(97.359.000,00)	88,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	56.862.635.392,00	56.832.721.055,00	(29.914.337,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	49.319.445.352,00	48.310.136.555,00	(1.009.308.797,00)	97,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.349.909.960,00	38.361.085.864,00	(988.824.096,00)	97,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	9.969.535.392,00	9.949.050.691,00	(20.484.701,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	7.543.190.040,00	8.522.584.500,00	979.394.460,00	112,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.281.575.220,00	2.727.172.630,00	445.597.410,00	119,53	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.261.614.820,00	5.795.411.870,00	533.797.050,00	110,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	350.000.000,00	266.858.000,00	(83.142.000,00)	76,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	266.858.000,00	(83.142.000,00)	76,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	266.858.000,00	(83.142.000,00)	76,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	830.500.000,00	684.624.587,00	(145.875.413,00)	82,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	830.500.000,00	684.624.587,00	(145.875.413,00)	82,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.500.000,00	684.624.587,00	(145.875.413,00)	82,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	32.015.307.500,00	30.907.485.345,00	(1.107.822.155,00)	96,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	2.567.360.520,00	2.055.757.696,00	(511.602.824,00)	80,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	833.597.980,00	712.887.547,00	(120.710.433,00)	85,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.864.860,00	47.964.204,00	(58.900.656,00)	44,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	726.733.120,00	664.923.343,00	(61.809.777,00)	91,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.733.762.540,00	1.342.870.149,00	(390.892.391,00)	77,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.733.762.540,00	1.342.870.149,00	(390.892.391,00)	77,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004		REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	4.715.946.830,00	4.592.285.365,00	(123.661.465,00)	97,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.667.346.830,00	3.549.563.337,00	(117.783.493,00)	96,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.346.830,00	74.601.813,00	(62.745.017,00)	54,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.1.05	Belanja Hibah	3.530.000.000,00	3.474.961.524,00	(55.038.476,00)	98,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.048.600.000,00	1.042.722.028,00	(5.877.972,00)	99,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.048.600.000,00	1.042.722.028,00	(5.877.972,00)	99,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007		PENGADAAN MEBEL PAUD	622.000.150,00	588.604.000,00	(33.396.150,00)	94,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	487.496.370,00	455.214.000,00	(32.282.370,00)	93,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.250.640,00	29.714.000,00	(27.536.640,00)	51,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1.05	Belanja Hibah	430.245.730,00	425.500.000,00	(4.745.730,00)	98,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	134.503.780,00	133.390.000,00	(1.113.780,00)	99,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.503.780,00	133.390.000,00	(1.113.780,00)	99,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009		PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD	1.340.000.000,00	1.166.975.500,00	(173.024.500,00)	87,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	970.002.000,00	914.384.500,00	(55.617.500,00)	94,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.634.000,00	18.324.500,00	(35.309.500,00)	34,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.05	Belanja Hibah	916.368.000,00	896.060.000,00	(20.308.000,00)	97,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	369.998.000,00	252.591.000,00	(117.407.000,00)	68,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.518.000,00	180.891.000,00	(111.627.000,00)	61,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77.480.000,00	71.700.000,00	(5.780.000,00)	92,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	2.850.000.000,00	2.655.160.784,00	(194.839.216,00)	93,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000.000,00	2.655.160.784,00	(194.839.216,00)	93,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.707.000.000,00	2.513.160.784,00	(193.839.216,00)	92,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.05	Belanja Hibah	143.000.000,00	142.000.000,00	(1.000.000,00)	99,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	19.920.000.000,00	19.848.702.000,00	(71.298.000,00)	99,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	19.900.390.000,00	19.829.092.000,00	(71.298.000,00)	99,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.790.000,00	444.790.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	19.455.600.000,00	19.384.302.000,00	(71.298.000,00)	99,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	19.610.000,00	19.610.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.310.000,00	19.310.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	12.892.450.500,00	12.482.159.179,00	(410.291.321,00)	96,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.05	Belanja Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	6.647.100.000,00	6.526.040.000,00	(121.060.000,00)	98,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.647.100.000,00	6.526.040.000,00	(121.060.000,00)	98,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	6.647.100.000,00	6.526.040.000,00	(121.060.000,00)	98,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	3.245.350.500,00	2.956.119.179,00	(289.231.321,00)	91,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	3.245.350.500,00	2.956.119.179,00	(289.231.321,00)	91,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.645.350.500,00	2.356.119.179,00	(289.231.321,00)	89,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.500.000.000,00	1.219.426.000,00	(280.574.000,00)	81,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	1.500.000.000,00	1.219.426.000,00	(280.574.000,00)	81,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	1.500.000.000,00	1.219.426.000,00	(280.574.000,00)	81,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	1.219.426.000,00	(280.574.000,00)	81,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.219.426.000,00	(280.574.000,00)	81,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	800.000.000,00	790.440.445,00	(9.559.555,00)	98,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	800.000.000,00	790.440.445,00	(9.559.555,00)	98,80	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	400.000.000,00	394.130.400,00	(5.869.600,00)	98,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	394.130.400,00	(5.869.600,00)	98,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	394.130.400,00	(5.869.600,00)	98,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	400.000.000,00	396.310.045,00	(3.689.955,00)	99,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	396.310.045,00	(3.689.955,00)	99,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	396.310.045,00	(3.689.955,00)	99,07	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**
Organisasi : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.224.189.870,00	5.812.330.028,00	(411.859.842,00)	93,38	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.851.702.000,00	1.740.826.638,00	(110.875.362,00)	94,01	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	260.000.000,00	239.623.827,00	(20.376.173,00)	92,16	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	260.000.000,00	239.623.827,00	(20.376.173,00)	92,16	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000,00	239.623.827,00	(20.376.173,00)	92,16	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	239.623.827,00	(20.376.173,00)	92,16	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.591.702.000,00	1.501.202.811,00	(90.499.189,00)	94,31	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	1.143.442.000,00	1.070.787.634,00	(72.654.366,00)	93,64	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.123.442.000,00	1.050.787.634,00	(72.654.366,00)	93,53	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	853.442.000,00	845.787.634,00	(7.654.366,00)	99,10	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	270.000.000,00	205.000.000,00	(65.000.000,00)	75,92	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL	448.260.000,00	430.415.177,00	(17.844.823,00)	96,01	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	448.260.000,00	430.415.177,00	(17.844.823,00)	96,01	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.260.000,00	430.415.177,00	(17.844.823,00)	96,01	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	228.874.000,00	180.867.004,00	(48.006.996,00)	79,02	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01		PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	228.874.000,00	180.867.004,00	(48.006.996,00)	79,02	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0001		PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA SEJARAH LOKAL KABUPATEN/KOTA	228.874.000,00	180.867.004,00	(48.006.996,00)	79,02	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	228.874.000,00	180.867.004,00	(48.006.996,00)	79,02	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.874.000,00	180.867.004,00	(48.006.996,00)	79,02	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	4.143.613.870,00	3.890.636.386,00	(252.977.484,00)	93,89	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	171.650.000,00	148.186.000,00	(23.464.000,00)	86,33	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002		PENETAPAN CAGAR BUDAYA	171.650.000,00	148.186.000,00	(23.464.000,00)	86,33	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	171.650.000,00	148.186.000,00	(23.464.000,00)	86,33	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.650.000,00	148.186.000,00	(23.464.000,00)	86,33	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	3.971.963.870,00	3.742.450.386,00	(229.513.484,00)	94,22	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001		PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	3.971.963.870,00	3.742.450.386,00	(229.513.484,00)	94,22	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	970.203.870,00	828.272.187,00	(141.931.683,00)	85,37	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.203.870,00	198.272.187,00	(81.931.683,00)	70,75	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	690.000.000,00	630.000.000,00	(60.000.000,00)	91,30	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.001.760.000,00	2.914.178.199,00	(87.581.801,00)	97,08	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.001.760.000,00	2.914.178.199,00	(87.581.801,00)	97,08	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Dinas Kesehatan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	229.500.000.000,00	369.910.000,00	(229.130.090.000,00)	0,16	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	229.500.000.000,00	369.910.000,00	(229.130.090.000,00)	0,16	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	229.500.000.000,00	369.910.000,00	(229.130.090.000,00)	0,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	260.705.043.393,00	247.148.552.573,00	(13.556.490.820,00)	94,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.494.638.233,00	114.393.965.691,00	(11.100.672.542,00)	91,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.217.485.233,00	206.951.987,00	(3.010.533.246,00)	6,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.757.000,00	(243.000,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.757.000,00	(243.000,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.757.000,00	(243.000,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	108.772.000,00	93.260.000,00	(15.512.000,00)	85,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	108.772.000,00	93.260.000,00	(15.512.000,00)	85,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.772.000,00	93.260.000,00	(15.512.000,00)	85,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.038.713.233,00	53.194.987,00	(2.985.518.246,00)	1,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.038.713.233,00	53.194.987,00	(2.985.518.246,00)	1,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.038.713.233,00	53.194.987,00	(2.985.518.246,00)	1,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	65.000.000,00	55.740.000,00	(9.260.000,00)	85,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	55.740.000,00	(9.260.000,00)	85,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	55.740.000,00	(9.260.000,00)	85,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	118.923.085.000,00	111.152.125.332,00	(7.770.959.668,00)	93,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	118.785.585.000,00	111.015.628.332,00	(7.769.956.668,00)	93,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	118.785.585.000,00	111.015.628.332,00	(7.769.956.668,00)	93,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	118.785.585.000,00	111.015.628.332,00	(7.769.956.668,00)	93,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	50.000.000,00	49.660.000,00	(340.000,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.660.000,00	(340.000,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.660.000,00	(340.000,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	75.000.000,00	74.489.000,00	(511.000,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.489.000,00	(511.000,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.489.000,00	(511.000,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	7.500.000,00	7.360.000,00	(140.000,00)	98,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.360.000,00	(140.000,00)	98,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.360.000,00	(140.000,00)	98,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.000.000,00	4.988.000,00	(12.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.988.000,00	(12.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.988.000,00	(12.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.780.000,00	(220.000,00)	95,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	5.000.000,00	4.780.000,00	(220.000,00)	95,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.780.000,00	(220.000,00)	95,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.780.000,00	(220.000,00)	95,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.920.000,00	10.835.000,00	(85.000,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	10.920.000,00	10.835.000,00	(85.000,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.920.000,00	10.835.000,00	(85.000,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.835.000,00	(85.000,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	413.756.000,00	409.818.463,00	(3.937.537,00)	99,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	32.511.500,00	32.475.175,00	(36.325,00)	99,88	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.511.500,00	32.475.175,00	(36.325,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.511.500,00	32.475.175,00	(36.325,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.260.000,00	6.239.000,00	(21.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.260.000,00	6.239.000,00	(21.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	6.239.000,00	(21.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	134.000.000,00	133.380.000,00	(620.000,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	134.000.000,00	133.380.000,00	(620.000,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	133.380.000,00	(620.000,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	32.500.000,00	31.250.000,00	(1.250.000,00)	96,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000,00	31.250.000,00	(1.250.000,00)	96,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	31.250.000,00	(1.250.000,00)	96,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	11.484.500,00	11.415.640,00	(68.860,00)	99,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.484.500,00	11.415.640,00	(68.860,00)	99,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.484.500,00	11.415.640,00	(68.860,00)	99,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	10.000.000,00	8.904.500,00	(1.095.500,00)	89,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.904.500,00	(1.095.500,00)	89,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.904.500,00	(1.095.500,00)	89,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	187.000.000,00	186.154.148,00	(845.852,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	187.000.000,00	186.154.148,00	(845.852,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.000.000,00	186.154.148,00	(845.852,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.000.000,00	9.750.000,00	(250.000,00)	97,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.000.000,00	9.750.000,00	(250.000,00)	97,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.750.000,00	(250.000,00)	97,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.750.000,00	(250.000,00)	97,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.536.492.000,00	2.230.111.753,00	(306.380.247,00)	87,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.500.000,00	6.326.000,00	(1.174.000,00)	84,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	6.326.000,00	(1.174.000,00)	84,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.326.000,00	(1.174.000,00)	84,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.783.000.000,00	1.522.589.753,00	(260.410.247,00)	85,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.783.000.000,00	1.522.589.753,00	(260.410.247,00)	85,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.783.000.000,00	1.522.589.753,00	(260.410.247,00)	85,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	745.992.000,00	701.196.000,00	(44.796.000,00)	93,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	745.992.000,00	701.196.000,00	(44.796.000,00)	93,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	745.992.000,00	701.196.000,00	(44.796.000,00)	93,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	377.900.000,00	369.593.156,00	(8.306.844,00)	97,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	60.000.000,00	56.303.870,00	(3.696.130,00)	93,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	56.303.870,00	(3.696.130,00)	93,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	56.303.870,00	(3.696.130,00)	93,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	135.000.000,00	131.415.758,00	(3.584.242,00)	97,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	131.415.758,00	(3.584.242,00)	97,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	131.415.758,00	(3.584.242,00)	97,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.000.000,00	4.990.000,00	(10.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.990.000,00	(10.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.990.000,00	(10.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	174.500.000,00	173.523.528,00	(976.472,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	174.500.000,00	173.523.528,00	(976.472,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.500.000,00	173.523.528,00	(976.472,00)	99,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.400.000,00	3.360.000,00	(40.000,00)	98,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.360.000,00	(40.000,00)	98,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.360.000,00	(40.000,00)	98,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	132.297.243.660,00	130.066.802.128,00	(2.230.441.532,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.541.894.236,00	34.191.667.250,00	(1.350.226.986,00)	96,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001		PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	251.691.672,00	238.314.500,00	(13.377.172,00)	94,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	251.691.672,00	238.314.500,00	(13.377.172,00)	94,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.691.672,00	238.314.500,00	(13.377.172,00)	94,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007		PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.871.682.000,00	1.505.165.706,00	(366.516.294,00)	80,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	52.275.000,00	34.044.000,00	(18.231.000,00)	65,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.275.000,00	34.044.000,00	(18.231.000,00)	65,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.819.407.000,00	1.471.121.706,00	(348.285.294,00)	80,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.818.407.000,00	1.470.131.706,00	(348.275.294,00)	80,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	3.590.918.864,00	3.519.593.544,00	(71.325.320,00)	98,01	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.589.168.864,00	3.519.593.544,00	(69.575.320,00)	98,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.139.168.864,00	3.069.593.544,00	(69.575.320,00)	97,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	20.287.198.700,00	19.773.815.225,00	(513.383.475,00)	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	89.698.700,00	18.515.225,00	(71.183.475,00)	20,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.698.700,00	18.515.225,00	(71.183.475,00)	20,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	20.197.500.000,00	19.755.300.000,00	(442.200.000,00)	97,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.910.000.000,00	13.845.300.000,00	(64.700.000,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.287.500.000,00	5.910.000.000,00	(377.500.000,00)	93,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	9.324.344.000,00	8.956.992.475,00	(367.351.525,00)	96,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	9.324.344.000,00	8.956.992.475,00	(367.351.525,00)	96,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.324.344.000,00	8.956.992.475,00	(367.351.525,00)	96,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0024		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA	50.000.000,00	35.062.800,00	(14.937.200,00)	70,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	35.062.800,00	(14.937.200,00)	70,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	35.062.800,00	(14.937.200,00)	70,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	166.059.000,00	162.723.000,00	(3.336.000,00)	97,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	166.059.000,00	162.723.000,00	(3.336.000,00)	97,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.059.000,00	162.723.000,00	(3.336.000,00)	97,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.901.456.924,00	95.200.326.866,00	(701.130.058,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	180.621.000,00	136.915.000,00	(43.706.000,00)	75,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	180.621.000,00	136.915.000,00	(43.706.000,00)	75,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.621.000,00	136.915.000,00	(43.706.000,00)	75,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	60.000.000,00	59.402.000,00	(598.000,00)	99,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.402.000,00	(598.000,00)	99,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.402.000,00	(598.000,00)	99,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	333.240.000,00	331.100.410,00	(2.139.590,00)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	333.240.000,00	331.100.410,00	(2.139.590,00)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.240.000,00	331.100.410,00	(2.139.590,00)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	80.000.000,00	79.909.000,00	(91.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.909.000,00	(91.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.909.000,00	(91.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.900.000,00	(100.000,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	549.421.820,00	479.239.000,00	(70.182.820,00)	87,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	549.421.820,00	479.239.000,00	(70.182.820,00)	87,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.421.820,00	479.239.000,00	(70.182.820,00)	87,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	41.162.000,00	41.162.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	41.162.000,00	41.162.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.162.000,00	41.162.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	100.000.000,00	78.064.000,00	(21.936.000,00)	78,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	78.064.000,00	(21.936.000,00)	78,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	78.064.000,00	(21.936.000,00)	78,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	1.665.900.580,00	1.646.041.400,00	(19.859.180,00)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.665.900.580,00	1.646.041.400,00	(19.859.180,00)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.665.900.580,00	1.646.041.400,00	(19.859.180,00)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	150.000.000,00	145.133.500,00	(4.866.500,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	145.133.500,00	(4.866.500,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	145.133.500,00	(4.866.500,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.601.576.100,00	1.569.110.140,00	(32.465.960,00)	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	557.057.960,00	547.117.000,00	(9.940.960,00)	98,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.057.960,00	547.117.000,00	(9.940.960,00)	98,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.2	BELANJA MODAL	1.044.518.140,00	1.021.993.140,00	(22.525.000,00)	97,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.044.518.140,00	1.021.993.140,00	(22.525.000,00)	97,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	535.596.000,00	512.305.000,00	(23.291.000,00)	95,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	511.516.000,00	498.005.000,00	(13.511.000,00)	97,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.516.000,00	498.005.000,00	(13.511.000,00)	97,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	24.080.000,00	14.300.000,00	(9.780.000,00)	59,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.080.000,00	14.300.000,00	(9.780.000,00)	59,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	255.262.000,00	183.321.000,00	(71.941.000,00)	71,81	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	255.262.000,00	183.321.000,00	(71.941.000,00)	71,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.262.000,00	183.321.000,00	(71.941.000,00)	71,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	208.451.500,00	196.206.500,00	(12.245.000,00)	94,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	208.451.500,00	196.206.500,00	(12.245.000,00)	94,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.451.500,00	46.206.500,00	(12.245.000,00)	79,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	8.630.335.000,00	8.620.886.500,00	(9.448.500,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	8.530.335.000,00	8.522.886.500,00	(7.448.500,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.530.335.000,00	8.522.886.500,00	(7.448.500,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.000.000,00	(2.000.000,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	98.000.000,00	(2.000.000,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	55.000.000,00	53.351.500,00	(1.648.500,00)	97,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	53.351.500,00	(1.648.500,00)	97,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	53.351.500,00	(1.648.500,00)	97,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1.009.279.500,00	979.462.700,00	(29.816.800,00)	97,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.009.279.500,00	979.462.700,00	(29.816.800,00)	97,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.009.279.500,00	979.462.700,00	(29.816.800,00)	97,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	281.105.000,00	276.652.000,00	(4.453.000,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	281.105.000,00	276.652.000,00	(4.453.000,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.105.000,00	276.652.000,00	(4.453.000,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA	75.000.000,00	71.788.500,00	(3.211.500,00)	95,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	71.788.500,00	(3.211.500,00)	95,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	71.788.500,00	(3.211.500,00)	95,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	455.190.000,00	424.891.300,00	(30.298.700,00)	93,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	455.190.000,00	424.891.300,00	(30.298.700,00)	93,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.190.000,00	424.891.300,00	(30.298.700,00)	93,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	15.000.000,00	13.600.000,00	(1.400.000,00)	90,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.600.000,00	(1.400.000,00)	90,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.600.000,00	(1.400.000,00)	90,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	42.332.000,00	36.589.000,00	(5.743.000,00)	86,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	42.332.000,00	36.589.000,00	(5.743.000,00)	86,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.332.000,00	36.589.000,00	(5.743.000,00)	86,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024		PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN	79.058.000,00	74.642.000,00	(4.416.000,00)	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	79.058.000,00	74.642.000,00	(4.416.000,00)	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.058.000,00	74.642.000,00	(4.416.000,00)	94,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	1.991.897.224,00	1.866.245.238,00	(125.651.986,00)	93,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.991.897.224,00	1.866.245.238,00	(125.651.986,00)	93,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.897.224,00	1.866.245.238,00	(125.651.986,00)	93,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	76.577.348.000,00	76.541.559.967,00	(35.788.033,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	76.577.348.000,00	76.541.559.967,00	(35.788.033,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.577.348.000,00	76.541.559.967,00	(35.788.033,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027		DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI FASYANKES DAN SEKOLAH	15.000.000,00	13.550.000,00	(1.450.000,00)	90,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.550.000,00	(1.450.000,00)	90,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.550.000,00	(1.450.000,00)	90,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	115.088.500,00	31.030.000,00	(84.058.500,00)	26,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	115.088.500,00	31.030.000,00	(84.058.500,00)	26,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.088.500,00	31.030.000,00	(84.058.500,00)	26,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029		PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	237.000.000,00	226.700.111,00	(10.299.889,00)	95,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	237.000.000,00	226.700.111,00	(10.299.889,00)	95,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.000.000,00	226.700.111,00	(10.299.889,00)	95,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035		PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	107.045.000,00	88.680.500,00	(18.364.500,00)	82,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	107.045.000,00	88.680.500,00	(18.364.500,00)	82,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.045.000,00	88.680.500,00	(18.364.500,00)	82,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	12.540.000,00	10.539.000,00	(2.001.000,00)	84,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	12.540.000,00	10.539.000,00	(2.001.000,00)	84,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.540.000,00	10.539.000,00	(2.001.000,00)	84,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037		PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH	14.300.000,00	14.285.000,00	(15.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1	BELANJA OPERASI	14.300.000,00	14.285.000,00	(15.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.285.000,00	(15.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	50.046.800,00	46.834.600,00	(3.212.200,00)	93,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	50.046.800,00	46.834.600,00	(3.212.200,00)	93,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.046.800,00	46.834.600,00	(3.212.200,00)	93,58	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	127.210.900,00	110.812.500,00	(16.398.400,00)	87,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	127.210.900,00	110.812.500,00	(16.398.400,00)	87,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.210.900,00	110.812.500,00	(16.398.400,00)	87,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	149.490.000,00	145.992.000,00	(3.498.000,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	149.490.000,00	145.992.000,00	(3.498.000,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.490.000,00	145.992.000,00	(3.498.000,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	30.960.000,00	24.425.500,00	(6.534.500,00)	78,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	30.960.000,00	24.425.500,00	(6.534.500,00)	78,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.960.000,00	24.425.500,00	(6.534.500,00)	78,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	350.000.000,00	307.138.698,00	(42.861.302,00)	87,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	350.000.000,00	307.138.698,00	(42.861.302,00)	87,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	255.695.930,00	213.638.698,00	(42.057.232,00)	83,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.695.930,00	213.638.698,00	(42.057.232,00)	83,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	94.304.070,00	93.500.000,00	(804.070,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.304.070,00	93.500.000,00	(804.070,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	503.892.500,00	367.669.314,00	(136.223.186,00)	72,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	5.000.000,00	4.700.000,00	(300.000,00)	94,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.700.000,00	(300.000,00)	94,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.700.000,00	(300.000,00)	94,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002		PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.000.000,00	18.470.000,00	(1.530.000,00)	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.470.000,00	(1.530.000,00)	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.470.000,00	(1.530.000,00)	92,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	54.505.000,00	42.091.000,00	(12.414.000,00)	77,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.505.000,00	42.091.000,00	(12.414.000,00)	77,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.505.000,00	42.091.000,00	(12.414.000,00)	77,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004		PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	424.387.500,00	302.408.314,00	(121.979.186,00)	71,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	424.387.500,00	302.408.314,00	(121.979.186,00)	71,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.387.500,00	302.408.314,00	(121.979.186,00)	71,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.952.297.500,00	1.745.143.678,00	(207.153.822,00)	89,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	120.000.000,00	87.448.128,00	(32.551.872,00)	72,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001		PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	100.000.000,00	79.217.128,00	(20.782.872,00)	79,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	79.217.128,00	(20.782.872,00)	79,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	79.217.128,00	(20.782.872,00)	79,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	20.000.000,00	8.231.000,00	(11.769.000,00)	41,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	8.231.000,00	(11.769.000,00)	41,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	8.231.000,00	(11.769.000,00)	41,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	86.250.000,00	74.734.500,00	(11.515.500,00)	86,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001		PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	65.000.000,00	62.932.000,00	(2.068.000,00)	96,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	62.932.000,00	(2.068.000,00)	96,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	62.932.000,00	(2.068.000,00)	96,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	5.000.000,00	3.830.000,00	(1.170.000,00)	76,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	3.830.000,00	(1.170.000,00)	76,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.830.000,00	(1.170.000,00)	76,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16.250.000,00	7.972.500,00	(8.277.500,00)	49,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.250.000,00	7.972.500,00	(8.277.500,00)	49,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	7.972.500,00	(8.277.500,00)	49,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.746.047.500,00	1.582.961.050,00	(163.086.450,00)	90,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.746.047.500,00	1.582.961.050,00	(163.086.450,00)	90,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.746.047.500,00	1.582.961.050,00	(163.086.450,00)	90,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.746.047.500,00	1.582.961.050,00	(163.086.450,00)	90,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	515.631.000,00	501.246.320,00	(14.384.680,00)	97,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	63.730.000,00	63.730.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	63.730.000,00	63.730.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.730.000,00	63.730.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.730.000,00	63.730.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	271.387.000,00	257.087.000,00	(14.300.000,00)	94,73	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	271.387.000,00	257.087.000,00	(14.300.000,00)	94,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	271.387.000,00	257.087.000,00	(14.300.000,00)	94,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.387.000,00	257.087.000,00	(14.300.000,00)	94,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	180.514.000,00	180.429.320,00	(84.680,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	180.514.000,00	180.429.320,00	(84.680,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	180.514.000,00	180.429.320,00	(84.680,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.514.000,00	180.429.320,00	(84.680,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	445.233.000,00	441.394.756,00	(3.838.244,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.584.500,00	55.286.256,00	(1.298.244,00)	97,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.584.500,00	55.286.256,00	(1.298.244,00)	97,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.584.500,00	55.286.256,00	(1.298.244,00)	97,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.584.500,00	55.286.256,00	(1.298.244,00)	97,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.515.500,00	48.515.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	48.515.500,00	48.515.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.515.500,00	48.515.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.515.500,00	48.515.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	340.133.000,00	337.593.000,00	(2.540.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	340.133.000,00	337.593.000,00	(2.540.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	340.133.000,00	337.593.000,00	(2.540.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.133.000,00	337.593.000,00	(2.540.000,00)	99,25	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **RSUD Dr. M. Ashari**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4	PENDAPATAN DAERAH	-	129.385.294.035,00	129.385.294.035,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	129.385.294.035,00	129.385.294.035,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1.02	Retribusi Daerah	-	129.385.294.035,00	129.385.294.035,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	177.796.757.929,00	157.736.869.517,00	(20.059.888.412,00)	88,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	177.796.757.929,00	157.736.869.517,00	(20.059.888.412,00)	88,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.101.223.726,00	21.361.533.358,00	(739.690.368,00)	96,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	17.101.223.726,00	16.361.610.940,00	(739.612.786,00)	95,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	17.101.223.726,00	16.361.610.940,00	(739.612.786,00)	95,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.101.223.726,00	16.361.610.940,00	(739.612.786,00)	95,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	5.000.000.000,00	4.999.922.418,00	(77.582,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000.000,00	4.999.922.418,00	(77.582,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000,00	4.999.922.418,00	(77.582,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.695.534.203,00	136.375.336.159,00	(19.320.198.044,00)	87,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	155.695.534.203,00	136.375.336.159,00	(19.320.198.044,00)	87,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	146.508.849.265,00	129.579.373.343,00	(16.929.475.922,00)	88,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	87.000.000.000,00	73.766.079.206,00	(13.233.920.794,00)	84,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.508.849.265,00	55.813.294.137,00	(3.695.555.128,00)	93,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	9.186.684.938,00	6.795.962.816,00	(2.390.722.122,00)	73,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.390.084.938,00	4.136.801.203,00	(2.253.283.735,00)	64,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0032	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.600.000,00	73.590.613,00	(23.009.387,00)	76,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0032	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.700.000.000,00	2.585.571.000,00	(114.429.000,00)	95,76	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Banyumudal**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.195.842.035,00	4.195.842.035,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.195.842.035,00	4.195.842.035,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.195.842.035,00	4.195.842.035,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	4.890.089.000,00	4.074.542.848,00	(815.546.152,00)	83,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.809.614.000,00	4.031.457.848,00	(778.156.152,00)	83,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.809.614.000,00	4.031.457.848,00	(778.156.152,00)	83,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	15.912.000,00	15.912.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.912.000,00	15.912.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.912.000,00	15.912.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	6.777.000,00	6.770.000,00	(7.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.777.000,00	6.770.000,00	(7.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.777.000,00	6.770.000,00	(7.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	43.550.000,00	40.495.000,00	(3.055.000,00)	92,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.550.000,00	40.495.000,00	(3.055.000,00)	92,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.550.000,00	40.495.000,00	(3.055.000,00)	92,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.460.000,00	4.160.000,00	(1.300.000,00)	76,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.460.000,00	4.160.000,00	(1.300.000,00)	76,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	4.160.000,00	(1.300.000,00)	76,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	317.394.000,00	316.067.000,00	(1.327.000,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	317.394.000,00	316.067.000,00	(1.327.000,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.394.000,00	316.067.000,00	(1.327.000,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12.220.000,00	11.050.000,00	(1.170.000,00)	90,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	12.220.000,00	11.050.000,00	(1.170.000,00)	90,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.220.000,00	11.050.000,00	(1.170.000,00)	90,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	37.404.000,00	11.072.000,00	(26.332.000,00)	29,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	37.404.000,00	11.072.000,00	(26.332.000,00)	29,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.404.000,00	11.072.000,00	(26.332.000,00)	29,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	237.301.000,00	123.322.000,00	(113.979.000,00)	51,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	237.301.000,00	123.322.000,00	(113.979.000,00)	51,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.301.000,00	123.322.000,00	(113.979.000,00)	51,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	4.057.478.000,00	3.469.606.848,00	(587.871.152,00)	85,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.854.324.350,00	3.339.657.348,00	(514.667.002,00)	86,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.424.400.000,00	2.313.656.071,00	(110.743.929,00)	95,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.429.924.350,00	1.026.001.277,00	(403.923.073,00)	71,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	203.153.650,00	129.949.500,00	(73.204.150,00)	63,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.153.650,00	129.949.500,00	(73.204.150,00)	63,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	5.720.000,00	-	(5.720.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	5.720.000,00	-	(5.720.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	-	(5.720.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.460.000,00	4.225.000,00	(1.235.000,00)	77,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	5.460.000,00	4.225.000,00	(1.235.000,00)	77,38	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	4.225.000,00	(1.235.000,00)	77,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.300.000,00	650.000,00	(650.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	650.000,00	(650.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	650.000,00	(650.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	11.466.000,00	7.666.000,00	(3.800.000,00)	66,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	11.466.000,00	7.666.000,00	(3.800.000,00)	66,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.466.000,00	7.666.000,00	(3.800.000,00)	66,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	50.872.000,00	20.462.000,00	(30.410.000,00)	40,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	50.872.000,00	20.462.000,00	(30.410.000,00)	40,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.872.000,00	20.462.000,00	(30.410.000,00)	40,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	80.475.000,00	43.085.000,00	(37.390.000,00)	53,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.475.000,00	43.085.000,00	(37.390.000,00)	53,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	80.475.000,00	43.085.000,00	(37.390.000,00)	53,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.475.000,00	43.085.000,00	(37.390.000,00)	53,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.475.000,00	43.085.000,00	(37.390.000,00)	53,53	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Warungpring**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.143.495.935,00	2.143.495.935,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.143.495.935,00	2.143.495.935,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.143.495.935,00	2.143.495.935,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	2.941.986.360,00	2.557.220.428,00	(384.765.932,00)	86,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.917.398.360,00	2.532.632.428,00	(384.765.932,00)	86,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.917.398.360,00	2.532.632.428,00	(384.765.932,00)	86,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	32.196.000,00	32.196.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.196.000,00	32.196.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.196.000,00	32.196.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	2.640.000,00	1.990.000,00	(650.000,00)	75,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	1.990.000,00	(650.000,00)	75,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	1.990.000,00	(650.000,00)	75,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	56.550.000,00	44.265.000,00	(12.285.000,00)	78,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	56.550.000,00	44.265.000,00	(12.285.000,00)	78,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.550.000,00	44.265.000,00	(12.285.000,00)	78,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	97.529.000,00	97.269.000,00	(260.000,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	97.529.000,00	97.269.000,00	(260.000,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.529.000,00	97.269.000,00	(260.000,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	5.980.000,00	5.980.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	5.980.000,00	5.980.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	5.980.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	10.141.000,00	7.021.000,00	(3.120.000,00)	69,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	10.141.000,00	7.021.000,00	(3.120.000,00)	69,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.141.000,00	7.021.000,00	(3.120.000,00)	69,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	145.448.800,00	135.852.000,00	(9.596.800,00)	93,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	145.448.800,00	135.852.000,00	(9.596.800,00)	93,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.448.800,00	135.852.000,00	(9.596.800,00)	93,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	2.415.151.560,00	2.057.857.428,00	(357.294.132,00)	85,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.284.056.960,00	1.954.233.053,00	(329.823.907,00)	85,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.415.694.360,00	1.208.791.167,00	(206.903.193,00)	85,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.362.600,00	745.441.886,00	(122.920.714,00)	85,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	131.094.600,00	103.624.375,00	(27.470.225,00)	79,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.094.600,00	103.624.375,00	(27.470.225,00)	79,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	3.640.000,00	3.640.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	3.640.000,00	3.640.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	3.640.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	5.372.000,00	5.372.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	5.372.000,00	5.372.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.372.000,00	5.372.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	111.550.000,00	109.990.000,00	(1.560.000,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	111.550.000,00	109.990.000,00	(1.560.000,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.550.000,00	109.990.000,00	(1.560.000,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.588.000,00	24.588.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.588.000,00	24.588.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.588.000,00	24.588.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.588.000,00	24.588.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.588.000,00	24.588.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Pulosari**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.249.726.254,00	4.249.726.254,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.249.726.254,00	4.249.726.254,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.249.726.254,00	4.249.726.254,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	4.569.654.860,00	4.025.953.937,00	(543.700.923,00)	88,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.523.114.860,00	3.983.768.937,00	(539.345.923,00)	88,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.523.114.860,00	3.983.768.937,00	(539.345.923,00)	88,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	59.880.000,00	59.880.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.880.000,00	59.880.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.880.000,00	59.880.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	5.375.000,00	5.375.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.375.000,00	5.375.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	5.375.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	42.965.000,00	41.210.000,00	(1.755.000,00)	95,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.965.000,00	41.210.000,00	(1.755.000,00)	95,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.965.000,00	41.210.000,00	(1.755.000,00)	95,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	145.326.500,00	145.326.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	145.326.500,00	145.326.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.326.500,00	145.326.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	7.865.000,00	6.305.000,00	(1.560.000,00)	80,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	7.865.000,00	6.305.000,00	(1.560.000,00)	80,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.865.000,00	6.305.000,00	(1.560.000,00)	80,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	17.690.000,00	15.090.000,00	(2.600.000,00)	85,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	17.690.000,00	15.090.000,00	(2.600.000,00)	85,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.690.000,00	15.090.000,00	(2.600.000,00)	85,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	82.225.000,00	81.380.000,00	(845.000,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	82.225.000,00	81.380.000,00	(845.000,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.225.000,00	81.380.000,00	(845.000,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.998.258.360,00	3.465.672.437,00	(532.585.923,00)	86,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.834.351.524,00	3.325.189.429,00	(509.162.095,00)	86,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.435.455.350,00	2.162.091.145,00	(273.364.205,00)	88,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.398.896.174,00	1.163.098.284,00	(235.797.890,00)	83,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	163.906.836,00	140.483.008,00	(23.423.828,00)	85,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.906.836,00	140.483.008,00	(23.423.828,00)	85,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.120.000,00	3.120.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	3.120.000,00	3.120.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	3.120.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	156.510.000,00	156.510.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	156.510.000,00	156.510.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.510.000,00	156.510.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	46.540.000,00	42.185.000,00	(4.355.000,00)	90,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.540.000,00	42.185.000,00	(4.355.000,00)	90,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	46.540.000,00	42.185.000,00	(4.355.000,00)	90,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.540.000,00	42.185.000,00	(4.355.000,00)	90,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.540.000,00	42.185.000,00	(4.355.000,00)	90,64	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Belik**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4	PENDAPATAN DAERAH	-	6.966.149.043,00	6.966.149.043,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6.966.149.043,00	6.966.149.043,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1.02	Retribusi Daerah	-	6.966.149.043,00	6.966.149.043,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	7.244.025.000,00	5.720.316.222,00	(1.523.708.778,00)	78,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.227.775.000,00	5.704.066.222,00	(1.523.708.778,00)	78,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.227.775.000,00	5.704.066.222,00	(1.523.708.778,00)	78,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	11.505.000,00	8.996.000,00	(2.509.000,00)	78,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.505.000,00	8.996.000,00	(2.509.000,00)	78,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.505.000,00	8.996.000,00	(2.509.000,00)	78,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	2.845.000,00	1.442.000,00	(1.403.000,00)	50,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.845.000,00	1.442.000,00	(1.403.000,00)	50,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.845.000,00	1.442.000,00	(1.403.000,00)	50,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	40.573.000,00	37.180.000,00	(3.393.000,00)	91,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.573.000,00	37.180.000,00	(3.393.000,00)	91,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.573.000,00	37.180.000,00	(3.393.000,00)	91,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	92.190.000,00	82.174.000,00	(10.016.000,00)	89,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	92.190.000,00	82.174.000,00	(10.016.000,00)	89,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.190.000,00	82.174.000,00	(10.016.000,00)	89,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	13.650.000,00	13.260.000,00	(390.000,00)	97,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	13.650.000,00	13.260.000,00	(390.000,00)	97,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	13.260.000,00	(390.000,00)	97,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	31.288.000,00	20.878.000,00	(10.410.000,00)	66,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	31.288.000,00	20.878.000,00	(10.410.000,00)	66,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.288.000,00	20.878.000,00	(10.410.000,00)	66,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	101.335.000,00	90.740.000,00	(10.595.000,00)	89,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	101.335.000,00	90.740.000,00	(10.595.000,00)	89,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.335.000,00	90.740.000,00	(10.595.000,00)	89,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	6.815.744.000,00	5.339.721.222,00	(1.476.022.778,00)	78,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	6.462.607.575,00	5.117.651.222,00	(1.344.956.353,00)	79,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	4.170.800.000,00	3.869.323.761,00	(301.476.239,00)	92,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.291.807.575,00	1.248.327.461,00	(1.043.480.114,00)	54,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	353.136.425,00	222.070.000,00	(131.066.425,00)	62,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.136.425,00	222.070.000,00	(131.066.425,00)	62,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	7.800.000,00	5.200.000,00	(2.600.000,00)	66,66	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	5.200.000,00	(2.600.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	5.200.000,00	(2.600.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	12.900.000,00	8.270.000,00	(4.630.000,00)	64,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	12.900.000,00	8.270.000,00	(4.630.000,00)	64,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	8.270.000,00	(4.630.000,00)	64,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	89.365.000,00	87.625.000,00	(1.740.000,00)	98,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	89.365.000,00	87.625.000,00	(1.740.000,00)	98,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.365.000,00	87.625.000,00	(1.740.000,00)	98,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.250.000,00	16.250.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.250.000,00	16.250.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	16.250.000,00	16.250.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.250.000,00	16.250.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	16.250.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Watukumpul**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.255.496.668,00	3.255.496.668,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.255.496.668,00	3.255.496.668,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.255.496.668,00	3.255.496.668,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	3.416.101.000,00	3.032.254.064,00	(383.846.936,00)	88,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.368.601.000,00	2.999.834.064,00	(368.766.936,00)	89,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.368.601.000,00	2.999.834.064,00	(368.766.936,00)	89,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	61.952.000,00	56.320.000,00	(5.632.000,00)	90,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.952.000,00	56.320.000,00	(5.632.000,00)	90,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.952.000,00	56.320.000,00	(5.632.000,00)	90,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	16.740.000,00	15.050.000,00	(1.690.000,00)	89,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.740.000,00	15.050.000,00	(1.690.000,00)	89,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.740.000,00	15.050.000,00	(1.690.000,00)	89,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	26.520.000,00	15.795.000,00	(10.725.000,00)	59,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.520.000,00	15.795.000,00	(10.725.000,00)	59,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.520.000,00	15.795.000,00	(10.725.000,00)	59,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	237.237.000,00	235.796.000,00	(1.441.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	237.237.000,00	235.796.000,00	(1.441.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.237.000,00	235.796.000,00	(1.441.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	14.894.000,00	11.598.000,00	(3.296.000,00)	77,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	14.894.000,00	11.598.000,00	(3.296.000,00)	77,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.894.000,00	11.598.000,00	(3.296.000,00)	77,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	61.010.000,00	57.370.000,00	(3.640.000,00)	94,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	61.010.000,00	57.370.000,00	(3.640.000,00)	94,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.010.000,00	57.370.000,00	(3.640.000,00)	94,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	2.830.321.000,00	2.489.985.064,00	(340.335.936,00)	87,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.730.448.250,00	2.395.725.064,00	(334.723.186,00)	87,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.711.800.000,00	1.494.147.863,00	(217.652.137,00)	87,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.648.250,00	901.577.201,00	(117.071.049,00)	88,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	99.872.750,00	94.260.000,00	(5.612.750,00)	94,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.872.750,00	94.260.000,00	(5.612.750,00)	94,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.950.000,00	1.560.000,00	(390.000,00)	80,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.560.000,00	(390.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.560.000,00	(390.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.137.000,00	2.080.000,00	(57.000,00)	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	2.137.000,00	2.080.000,00	(57.000,00)	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.137.000,00	2.080.000,00	(57.000,00)	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	98.680.000,00	97.120.000,00	(1.560.000,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	98.680.000,00	97.120.000,00	(1.560.000,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.680.000,00	97.120.000,00	(1.560.000,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	47.500.000,00	32.420.000,00	(15.080.000,00)	68,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.500.000,00	32.420.000,00	(15.080.000,00)	68,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	47.500.000,00	32.420.000,00	(15.080.000,00)	68,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.500.000,00	32.420.000,00	(15.080.000,00)	68,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	32.420.000,00	(15.080.000,00)	68,25	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Kebandaran**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.252.029.456,00	3.252.029.456,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.252.029.456,00	3.252.029.456,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.252.029.456,00	3.252.029.456,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	3.719.004.000,00	3.461.394.602,00	(257.609.398,00)	93,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.631.744.000,00	3.374.134.602,00	(257.609.398,00)	92,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.631.744.000,00	3.374.134.602,00	(257.609.398,00)	92,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	74.500.000,00	74.500.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.500.000,00	74.500.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.500.000,00	74.500.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	6.360.000,00	6.360.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.360.000,00	6.360.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	6.360.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	40.625.000,00	40.625.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.625.000,00	40.625.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.625.000,00	40.625.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	267.064.000,00	184.584.000,00	(82.480.000,00)	69,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	267.064.000,00	184.584.000,00	(82.480.000,00)	69,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.064.000,00	184.584.000,00	(82.480.000,00)	69,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	36.005.000,00	34.640.000,00	(1.365.000,00)	96,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	36.005.000,00	34.640.000,00	(1.365.000,00)	96,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.005.000,00	34.640.000,00	(1.365.000,00)	96,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	84.760.000,00	72.670.000,00	(12.090.000,00)	85,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	84.760.000,00	72.670.000,00	(12.090.000,00)	85,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.760.000,00	72.670.000,00	(12.090.000,00)	85,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.026.450.000,00	2.867.245.602,00	(159.204.398,00)	94,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.988.307.460,00	2.867.245.602,00	(121.061.858,00)	95,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000.000,00	1.768.557.267,00	(31.442.733,00)	98,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.188.307.460,00	1.098.688.335,00	(89.619.125,00)	92,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	38.142.540,00	-	(38.142.540,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.142.540,00	-	(38.142.540,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.300.000,00	780.000,00	(520.000,00)	60,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	780.000,00	(520.000,00)	60,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	780.000,00	(520.000,00)	60,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	5.060.000,00	5.060.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	5.060.000,00	5.060.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	5.060.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	75.320.000,00	74.670.000,00	(650.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	75.320.000,00	74.670.000,00	(650.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.320.000,00	74.670.000,00	(650.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	87.260.000,00	87.260.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.260.000,00	87.260.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	87.260.000,00	87.260.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	87.260.000,00	87.260.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.260.000,00	87.260.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Bantarbolang**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4	PENDAPATAN DAERAH	-	5.343.881.758,00	5.343.881.758,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5.343.881.758,00	5.343.881.758,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1.02	Retribusi Daerah	-	5.343.881.758,00	5.343.881.758,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	5.835.690.525,00	5.431.392.995,00	(404.297.530,00)	93,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.811.887.525,00	5.407.622.995,00	(404.264.530,00)	93,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.811.887.525,00	5.407.622.995,00	(404.264.530,00)	93,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	41.052.000,00	41.052.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.052.000,00	41.052.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.052.000,00	41.052.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	5.978.000,00	5.978.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.978.000,00	5.978.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.978.000,00	5.978.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	16.120.000,00	16.120.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.120.000,00	16.120.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.120.000,00	16.120.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	6.630.000,00	6.630.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.630.000,00	6.630.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	6.630.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	4.420.000,00	4.420.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	4.420.000,00	4.420.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	4.420.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	438.096.000,00	438.069.500,00	(26.500,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	438.096.000,00	438.069.500,00	(26.500,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.096.000,00	438.069.500,00	(26.500,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.680.000,00	17.680.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	17.680.000,00	17.680.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	17.680.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	25.871.000,00	25.798.000,00	(73.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	25.871.000,00	25.798.000,00	(73.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.871.000,00	25.798.000,00	(73.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	87.621.000,00	69.291.000,00	(18.330.000,00)	79,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	87.621.000,00	69.291.000,00	(18.330.000,00)	79,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.621.000,00	69.291.000,00	(18.330.000,00)	79,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	5.107.477.525,00	4.721.642.495,00	(385.835.030,00)	92,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	4.782.537.518,00	4.453.806.095,00	(328.731.423,00)	93,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	3.133.407.525,00	2.917.288.829,00	(216.118.696,00)	93,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.649.129.993,00	1.536.517.266,00	(112.612.727,00)	93,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	324.940.007,00	267.836.400,00	(57.103.607,00)	82,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	324.940.007,00	267.836.400,00	(57.103.607,00)	82,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	2.210.000,00	2.210.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	2.210.000,00	2.210.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	2.210.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	4.420.000,00	4.420.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	4.420.000,00	4.420.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	4.420.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.210.000,00	2.210.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	2.210.000,00	2.210.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	2.210.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	4.420.000,00	4.420.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	4.420.000,00	4.420.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	4.420.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	47.682.000,00	47.682.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	47.682.000,00	47.682.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.682.000,00	47.682.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.803.000,00	23.770.000,00	(33.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.803.000,00	23.770.000,00	(33.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	23.803.000,00	23.770.000,00	(33.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.803.000,00	23.770.000,00	(33.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.803.000,00	23.770.000,00	(33.000,00)	99,86	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Randudongkal**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.837.708.486,00	3.837.708.486,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.837.708.486,00	3.837.708.486,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.837.708.486,00	3.837.708.486,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		5	BELANJA DAERAH	3.928.392.809,00	3.700.528.433,00	(227.864.376,00)	94,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.892.034.809,00	3.664.188.433,00	(227.846.376,00)	94,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.892.034.809,00	3.664.188.433,00	(227.846.376,00)	94,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	48.600.000,00	48.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.600.000,00	48.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	48.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	10.480.000,00	10.155.000,00	(325.000,00)	96,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.480.000,00	10.155.000,00	(325.000,00)	96,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000,00	10.155.000,00	(325.000,00)	96,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	75.010.000,00	73.775.000,00	(1.235.000,00)	98,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	75.010.000,00	73.775.000,00	(1.235.000,00)	98,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.010.000,00	73.775.000,00	(1.235.000,00)	98,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.600.000,00	2.015.000,00	(585.000,00)	77,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.015.000,00	(585.000,00)	77,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.015.000,00	(585.000,00)	77,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	102.205.000,00	101.921.000,00	(284.000,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	102.205.000,00	101.921.000,00	(284.000,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.205.000,00	101.921.000,00	(284.000,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	20.490.000,00	18.930.000,00	(1.560.000,00)	92,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	20.490.000,00	18.930.000,00	(1.560.000,00)	92,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.490.000,00	18.930.000,00	(1.560.000,00)	92,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	141.675.000,00	134.375.000,00	(7.300.000,00)	94,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	141.675.000,00	134.375.000,00	(7.300.000,00)	94,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.675.000,00	134.375.000,00	(7.300.000,00)	94,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.368.780.809,00	3.154.067.433,00	(214.713.376,00)	93,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.250.464.780,00	3.042.325.433,00	(208.139.347,00)	93,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.001.626.809,00	1.900.262.443,00	(101.364.366,00)	94,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.248.837.971,00	1.142.062.990,00	(106.774.981,00)	91,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	118.316.029,00	111.742.000,00	(6.574.029,00)	94,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.316.029,00	111.742.000,00	(6.574.029,00)	94,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	650.000,00	-	(650.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	650.000,00	-	(650.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	-	(650.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.600.000,00	1.495.000,00	(1.105.000,00)	57,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	1.495.000,00	(1.105.000,00)	57,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	1.495.000,00	(1.105.000,00)	57,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	19.904.000,00	19.880.000,00	(24.000,00)	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	19.904.000,00	19.880.000,00	(24.000,00)	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.904.000,00	19.880.000,00	(24.000,00)	99,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	87.600.000,00	87.535.000,00	(65.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	87.600.000,00	87.535.000,00	(65.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.600.000,00	87.535.000,00	(65.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.358.000,00	36.340.000,00	(18.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.358.000,00	36.340.000,00	(18.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	36.358.000,00	36.340.000,00	(18.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.358.000,00	36.340.000,00	(18.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.358.000,00	36.340.000,00	(18.000,00)	99,95	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Kalimas**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.278.800.964,00	2.278.800.964,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.278.800.964,00	2.278.800.964,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.278.800.964,00	2.278.800.964,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		5	BELANJA DAERAH	3.044.713.441,00	2.697.969.187,00	(346.744.254,00)	88,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.984.653.441,00	2.637.909.187,00	(346.744.254,00)	88,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.984.653.441,00	2.637.909.187,00	(346.744.254,00)	88,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	30.300.000,00	30.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.300.000,00	30.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	30.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.078.000,00	1.908.000,00	(1.170.000,00)	61,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.078.000,00	1.908.000,00	(1.170.000,00)	61,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.078.000,00	1.908.000,00	(1.170.000,00)	61,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	11.115.000,00	11.115.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.115.000,00	11.115.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.115.000,00	11.115.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	23.400.000,00	22.360.000,00	(1.040.000,00)	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	22.360.000,00	(1.040.000,00)	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	22.360.000,00	(1.040.000,00)	95,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	137.388.000,00	133.813.000,00	(3.575.000,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	137.388.000,00	133.813.000,00	(3.575.000,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.388.000,00	133.813.000,00	(3.575.000,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	20.280.000,00	20.280.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	20.280.000,00	20.280.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.280.000,00	20.280.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	21.018.000,00	7.758.000,00	(13.260.000,00)	36,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	21.018.000,00	7.758.000,00	(13.260.000,00)	36,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.018.000,00	7.758.000,00	(13.260.000,00)	36,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	93.405.000,00	90.610.000,00	(2.795.000,00)	97,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	93.405.000,00	90.610.000,00	(2.795.000,00)	97,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.405.000,00	90.610.000,00	(2.795.000,00)	97,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	2.580.954.441,00	2.260.280.187,00	(320.674.254,00)	87,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.537.859.281,00	2.221.960.027,00	(315.899.254,00)	87,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.529.610.441,00	1.304.015.242,00	(225.595.199,00)	85,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.248.840,00	917.944.785,00	(90.304.055,00)	91,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	43.095.160,00	38.320.160,00	(4.775.000,00)	88,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.095.160,00	38.320.160,00	(4.775.000,00)	88,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.755.000,00	1.755.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	1.755.000,00	1.755.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.755.000,00	1.755.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	15.600.000,00	11.570.000,00	(4.030.000,00)	74,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	11.570.000,00	(4.030.000,00)	74,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	11.570.000,00	(4.030.000,00)	74,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	44.800.000,00	44.600.000,00	(200.000,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	44.800.000,00	44.600.000,00	(200.000,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	44.600.000,00	(200.000,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60.060.000,00	60.060.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.060.000,00	60.060.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	60.060.000,00	60.060.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.060.000,00	60.060.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.060.000,00	60.060.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Paduraksa**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.348.445.322,00	3.348.445.322,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.348.445.322,00	3.348.445.322,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.348.445.322,00	3.348.445.322,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		5	BELANJA DAERAH	4.074.053.000,00	3.619.764.181,00	(454.288.819,00)	88,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.011.328.000,00	3.558.209.181,00	(453.118.819,00)	88,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.011.328.000,00	3.558.209.181,00	(453.118.819,00)	88,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	26.100.000,00	26.100.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.100.000,00	26.100.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	26.100.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	9.950.000,00	9.950.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.950.000,00	9.950.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	9.950.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	44.590.000,00	43.940.000,00	(650.000,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	44.590.000,00	43.940.000,00	(650.000,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.590.000,00	43.940.000,00	(650.000,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	84.627.000,00	83.954.000,00	(673.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	84.627.000,00	83.954.000,00	(673.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.627.000,00	83.954.000,00	(673.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	37.180.000,00	32.175.000,00	(5.005.000,00)	86,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	37.180.000,00	32.175.000,00	(5.005.000,00)	86,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.180.000,00	32.175.000,00	(5.005.000,00)	86,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	176.872.000,00	172.397.000,00	(4.475.000,00)	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	176.872.000,00	172.397.000,00	(4.475.000,00)	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.872.000,00	172.397.000,00	(4.475.000,00)	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.460.749.000,00	3.019.083.181,00	(441.665.819,00)	87,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.298.615.345,00	2.890.457.681,00	(408.157.664,00)	87,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.972.000.000,00	1.916.358.848,00	(55.641.152,00)	97,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.326.615.345,00	974.098.833,00	(352.516.512,00)	73,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	162.133.655,00	128.625.500,00	(33.508.155,00)	79,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.133.655,00	128.625.500,00	(33.508.155,00)	79,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	7.020.000,00	7.020.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	7.020.000,00	7.020.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	7.020.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	5.200.000,00	4.550.000,00	(650.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	4.550.000,00	(650.000,00)	87,50	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	4.550.000,00	(650.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	7.020.000,00	7.020.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	7.020.000,00	7.020.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	7.020.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	127.320.000,00	127.320.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	127.320.000,00	127.320.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.320.000,00	127.320.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	62.725.000,00	61.555.000,00	(1.170.000,00)	98,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.725.000,00	61.555.000,00	(1.170.000,00)	98,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	62.725.000,00	61.555.000,00	(1.170.000,00)	98,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.725.000,00	61.555.000,00	(1.170.000,00)	98,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.725.000,00	61.555.000,00	(1.170.000,00)	98,13	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Mulyoharjo**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0013		4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.573.818.324,00	3.573.818.324,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0013		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.573.818.324,00	3.573.818.324,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0013		4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.573.818.324,00	3.573.818.324,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		5	BELANJA DAERAH	4.268.035.000,00	3.745.634.029,00	(522.400.971,00)	87,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.227.421.000,00	3.705.034.029,00	(522.386.971,00)	87,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.227.421.000,00	3.705.034.029,00	(522.386.971,00)	87,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	39.606.000,00	39.606.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.606.000,00	39.606.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.606.000,00	39.606.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	7.861.000,00	7.861.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.861.000,00	7.861.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.861.000,00	7.861.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	38.220.000,00	35.945.000,00	(2.275.000,00)	94,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	38.220.000,00	35.945.000,00	(2.275.000,00)	94,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.220.000,00	35.945.000,00	(2.275.000,00)	94,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	11.700.000,00	10.660.000,00	(1.040.000,00)	91,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	10.660.000,00	(1.040.000,00)	91,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	10.660.000,00	(1.040.000,00)	91,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.600.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	119.773.500,00	119.773.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	119.773.500,00	119.773.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.773.500,00	119.773.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	85.762.000,00	82.642.000,00	(3.120.000,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	85.762.000,00	82.642.000,00	(3.120.000,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.762.000,00	82.642.000,00	(3.120.000,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	109.445.000,00	90.586.000,00	(18.859.000,00)	82,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	109.445.000,00	90.586.000,00	(18.859.000,00)	82,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.445.000,00	90.586.000,00	(18.859.000,00)	82,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.643.113.500,00	3.147.320.529,00	(495.792.971,00)	86,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.587.988.532,00	3.119.770.529,00	(468.218.003,00)	86,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.177.000.000,00	2.081.945.595,00	(95.054.405,00)	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.410.988.532,00	1.037.824.934,00	(373.163.598,00)	73,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	55.124.968,00	27.550.000,00	(27.574.968,00)	49,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.124.968,00	27.550.000,00	(27.574.968,00)	49,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	8.808.000,00	8.808.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	8.808.000,00	8.808.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.808.000,00	8.808.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	11.245.000,00	11.245.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	11.245.000,00	11.245.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.245.000,00	11.245.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	52.356.000,00	52.356.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	52.356.000,00	52.356.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.356.000,00	52.356.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	77.431.000,00	77.431.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	77.431.000,00	77.431.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.431.000,00	77.431.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	40.614.000,00	40.600.000,00	(14.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.614.000,00	40.600.000,00	(14.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	40.614.000,00	40.600.000,00	(14.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.614.000,00	40.600.000,00	(14.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.614.000,00	40.600.000,00	(14.000,00)	99,96	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Kebondalem**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0014		4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.615.691.631,00	3.615.691.631,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0014		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.615.691.631,00	3.615.691.631,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0014		4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.615.691.631,00	3.615.691.631,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		5	BELANJA DAERAH	4.325.894.000,00	3.613.813.084,00	(712.080.916,00)	83,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.302.865.000,00	3.590.784.084,00	(712.080.916,00)	83,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.302.865.000,00	3.590.784.084,00	(712.080.916,00)	83,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	41.220.000,00	38.100.000,00	(3.120.000,00)	92,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.220.000,00	38.100.000,00	(3.120.000,00)	92,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.220.000,00	38.100.000,00	(3.120.000,00)	92,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	4.155.000,00	2.855.000,00	(1.300.000,00)	68,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.155.000,00	2.855.000,00	(1.300.000,00)	68,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.155.000,00	2.855.000,00	(1.300.000,00)	68,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	25.350.000,00	21.515.000,00	(3.835.000,00)	84,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.350.000,00	21.515.000,00	(3.835.000,00)	84,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	21.515.000,00	(3.835.000,00)	84,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	133.403.000,00	130.135.000,00	(3.268.000,00)	97,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	133.403.000,00	130.135.000,00	(3.268.000,00)	97,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.403.000,00	130.135.000,00	(3.268.000,00)	97,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	19.110.000,00	18.590.000,00	(520.000,00)	97,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	19.110.000,00	18.590.000,00	(520.000,00)	97,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.110.000,00	18.590.000,00	(520.000,00)	97,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	27.250.000,00	22.275.000,00	(4.975.000,00)	81,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	27.250.000,00	22.275.000,00	(4.975.000,00)	81,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	22.275.000,00	(4.975.000,00)	81,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	85.686.000,00	68.725.000,00	(16.961.000,00)	80,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	85.686.000,00	68.725.000,00	(16.961.000,00)	80,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.686.000,00	68.725.000,00	(16.961.000,00)	80,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.819.821.000,00	3.142.694.084,00	(677.126.916,00)	82,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.615.625.814,00	2.991.724.084,00	(623.901.730,00)	82,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.229.500.000,00	2.076.147.409,00	(153.352.591,00)	93,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.125.814,00	915.576.675,00	(470.549.139,00)	66,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	204.195.186,00	150.970.000,00	(53.225.186,00)	73,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.195.186,00	150.970.000,00	(53.225.186,00)	73,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	6.240.000,00	5.850.000,00	(390.000,00)	93,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	6.240.000,00	5.850.000,00	(390.000,00)	93,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	5.850.000,00	(390.000,00)	93,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	120.680.000,00	120.095.000,00	(585.000,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	120.680.000,00	120.095.000,00	(585.000,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.680.000,00	120.095.000,00	(585.000,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.029.000,00	23.029.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.029.000,00	23.029.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	23.029.000,00	23.029.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.029.000,00	23.029.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.029.000,00	23.029.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Banjardawa**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0015		4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.458.796.259,00	3.458.796.259,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0015		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.458.796.259,00	3.458.796.259,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0015		4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.458.796.259,00	3.458.796.259,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		5	BELANJA DAERAH	3.799.794.950,00	3.432.149.518,00	(367.645.432,00)	90,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.723.484.950,00	3.356.814.518,00	(366.670.432,00)	90,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.723.484.950,00	3.356.814.518,00	(366.670.432,00)	90,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	20.725.000,00	20.725.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.725.000,00	20.725.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.725.000,00	20.725.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	41.015.000,00	38.025.000,00	(2.990.000,00)	92,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	41.015.000,00	38.025.000,00	(2.990.000,00)	92,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.015.000,00	38.025.000,00	(2.990.000,00)	92,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	6.825.000,00	6.825.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.825.000,00	6.825.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	6.825.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	4.225.000,00	1.625.000,00	(2.600.000,00)	38,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	4.225.000,00	1.625.000,00	(2.600.000,00)	38,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.225.000,00	1.625.000,00	(2.600.000,00)	38,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	110.914.000,00	110.914.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	110.914.000,00	110.914.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.914.000,00	110.914.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	10.205.000,00	10.140.000,00	(65.000,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	10.205.000,00	10.140.000,00	(65.000,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.205.000,00	10.140.000,00	(65.000,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	13.112.000,00	12.722.000,00	(390.000,00)	97,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	13.112.000,00	12.722.000,00	(390.000,00)	97,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.112.000,00	12.722.000,00	(390.000,00)	97,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	114.332.000,00	75.747.500,00	(38.584.500,00)	66,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	114.332.000,00	75.747.500,00	(38.584.500,00)	66,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.332.000,00	75.747.500,00	(38.584.500,00)	66,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.293.542.950,00	2.985.626.018,00	(307.916.932,00)	90,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.185.507.828,00	2.907.054.056,00	(278.453.772,00)	91,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.870.193.950,00	1.866.937.286,00	(3.256.664,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.315.313.878,00	1.040.116.770,00	(275.197.108,00)	79,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	108.035.122,00	78.571.962,00	(29.463.160,00)	72,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.035.122,00	78.571.962,00	(29.463.160,00)	72,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	9.054.000,00	-	(9.054.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	9.054.000,00	-	(9.054.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.054.000,00	-	(9.054.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	5.005.000,00	-	(5.005.000,00)	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	5.005.000,00	-	(5.005.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.005.000,00	-	(5.005.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.315.000,00	3.315.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	3.315.000,00	3.315.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.315.000,00	3.315.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	79.315.000,00	79.250.000,00	(65.000,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	79.315.000,00	79.250.000,00	(65.000,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.315.000,00	79.250.000,00	(65.000,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	76.310.000,00	75.335.000,00	(975.000,00)	98,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.310.000,00	75.335.000,00	(975.000,00)	98,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	76.310.000,00	75.335.000,00	(975.000,00)	98,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.310.000,00	75.335.000,00	(975.000,00)	98,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.310.000,00	75.335.000,00	(975.000,00)	98,72	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Kabunan**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0016		4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.845.612.787,00	2.845.612.787,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0016		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.845.612.787,00	2.845.612.787,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0016		4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.845.612.787,00	2.845.612.787,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		5	BELANJA DAERAH	3.373.001.000,00	2.844.624.683,00	(528.376.317,00)	84,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.316.776.000,00	2.808.874.683,00	(507.901.317,00)	84,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.316.776.000,00	2.808.874.683,00	(507.901.317,00)	84,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	37.250.000,00	37.250.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.250.000,00	37.250.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000,00	37.250.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	14.550.000,00	13.445.000,00	(1.105.000,00)	92,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.550.000,00	13.445.000,00	(1.105.000,00)	92,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	13.445.000,00	(1.105.000,00)	92,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	7.800.000,00	4.290.000,00	(3.510.000,00)	55,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	4.290.000,00	(3.510.000,00)	55,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	4.290.000,00	(3.510.000,00)	55,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	36.817.500,00	32.762.000,00	(4.055.500,00)	88,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	36.817.500,00	32.762.000,00	(4.055.500,00)	88,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.817.500,00	32.762.000,00	(4.055.500,00)	88,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	7.540.000,00	10.400.000,00	2.860.000,00	137,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	7.540.000,00	10.400.000,00	2.860.000,00	137,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.540.000,00	10.400.000,00	2.860.000,00	137,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	11.565.000,00	9.875.000,00	(1.690.000,00)	85,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	11.565.000,00	9.875.000,00	(1.690.000,00)	85,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.565.000,00	9.875.000,00	(1.690.000,00)	85,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	89.985.000,00	70.415.000,00	(19.570.000,00)	78,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	89.985.000,00	70.415.000,00	(19.570.000,00)	78,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.985.000,00	70.415.000,00	(19.570.000,00)	78,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.010.314.500,00	2.537.182.683,00	(473.131.817,00)	84,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.889.110.778,00	2.454.387.683,00	(434.723.095,00)	84,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.672.500.000,00	1.626.529.806,00	(45.970.194,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.216.610.778,00	827.857.877,00	(388.752.901,00)	68,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	121.203.722,00	82.795.000,00	(38.408.722,00)	68,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.203.722,00	82.795.000,00	(38.408.722,00)	68,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	7.734.000,00	3.155.000,00	(4.579.000,00)	40,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	7.734.000,00	3.155.000,00	(4.579.000,00)	40,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.734.000,00	3.155.000,00	(4.579.000,00)	40,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	1.300.000,00	1.040.000,00	(260.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.040.000,00	(260.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.040.000,00	(260.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	14.060.000,00	14.060.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	14.060.000,00	14.060.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.060.000,00	14.060.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	68.110.000,00	67.850.000,00	(260.000,00)	99,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	68.110.000,00	67.850.000,00	(260.000,00)	99,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.110.000,00	67.850.000,00	(260.000,00)	99,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	56.225.000,00	35.750.000,00	(20.475.000,00)	63,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.225.000,00	35.750.000,00	(20.475.000,00)	63,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	56.225.000,00	35.750.000,00	(20.475.000,00)	63,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.225.000,00	35.750.000,00	(20.475.000,00)	63,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.225.000,00	35.750.000,00	(20.475.000,00)	63,58	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Jebed**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0017		4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.284.695.314,00	3.284.695.314,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0017		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.284.695.314,00	3.284.695.314,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0017		4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.284.695.314,00	3.284.695.314,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		5	BELANJA DAERAH	4.194.283.500,00	3.554.866.016,00	(639.417.484,00)	84,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.177.238.500,00	3.537.821.016,00	(639.417.484,00)	84,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.177.238.500,00	3.537.821.016,00	(639.417.484,00)	84,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	66.660.000,00	66.660.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.660.000,00	66.660.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.660.000,00	66.660.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	49.920.000,00	47.320.000,00	(2.600.000,00)	94,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.920.000,00	47.320.000,00	(2.600.000,00)	94,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	47.320.000,00	(2.600.000,00)	94,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	6.630.000,00	4.160.000,00	(2.470.000,00)	62,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.630.000,00	4.160.000,00	(2.470.000,00)	62,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	4.160.000,00	(2.470.000,00)	62,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	111.632.500,00	109.408.000,00	(2.224.500,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	111.632.500,00	109.408.000,00	(2.224.500,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.632.500,00	109.408.000,00	(2.224.500,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12.610.000,00	8.580.000,00	(4.030.000,00)	68,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	12.610.000,00	8.580.000,00	(4.030.000,00)	68,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.610.000,00	8.580.000,00	(4.030.000,00)	68,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	13.516.000,00	8.836.000,00	(4.680.000,00)	65,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	13.516.000,00	8.836.000,00	(4.680.000,00)	65,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.516.000,00	8.836.000,00	(4.680.000,00)	65,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	244.400.000,00	225.614.000,00	(18.786.000,00)	92,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	244.400.000,00	225.614.000,00	(18.786.000,00)	92,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.400.000,00	225.614.000,00	(18.786.000,00)	92,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.419.465.000,00	2.811.328.016,00	(608.136.984,00)	82,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.231.432.160,00	2.644.718.016,00	(586.714.144,00)	81,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.140.000.000,00	1.774.104.628,00	(365.895.372,00)	82,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.091.432.160,00	870.613.388,00	(220.818.772,00)	79,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	188.032.840,00	166.610.000,00	(21.422.840,00)	88,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.032.840,00	166.610.000,00	(21.422.840,00)	88,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	2.860.000,00	2.860.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	2.860.000,00	2.860.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	2.860.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	2.145.000,00	5.655.000,00	3.510.000,00	263,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	2.145.000,00	5.655.000,00	3.510.000,00	263,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	5.655.000,00	3.510.000,00	263,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.430.000,00	1.430.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.430.000,00	1.430.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000,00	1.430.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	103.960.000,00	103.960.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	103.960.000,00	103.960.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.960.000,00	103.960.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	142.010.000,00	142.010.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	142.010.000,00	142.010.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.010.000,00	142.010.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.045.000,00	17.045.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.045.000,00	17.045.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	17.045.000,00	17.045.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.045.000,00	17.045.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.045.000,00	17.045.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Petarukan**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0018		4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.313.867.106,00	4.313.867.106,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0018		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.313.867.106,00	4.313.867.106,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0018		4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.313.867.106,00	4.313.867.106,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		5	BELANJA DAERAH	5.042.280.240,00	4.581.133.759,00	(461.146.481,00)	90,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.012.460.240,00	4.561.063.759,00	(451.396.481,00)	90,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.012.460.240,00	4.561.063.759,00	(451.396.481,00)	90,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	25.800.000,00	25.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.800.000,00	25.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	3.100.000,00	-	(3.100.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.100.000,00	-	(3.100.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	-	(3.100.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	37.295.000,00	34.310.000,00	(2.985.000,00)	91,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.295.000,00	34.310.000,00	(2.985.000,00)	91,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.295.000,00	34.310.000,00	(2.985.000,00)	91,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	7.500.000,00	7.350.000,00	(150.000,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.350.000,00	(150.000,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.350.000,00	(150.000,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	242.970.000,00	241.660.000,00	(1.310.000,00)	99,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	242.970.000,00	241.660.000,00	(1.310.000,00)	99,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.970.000,00	241.660.000,00	(1.310.000,00)	99,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	13.130.000,00	9.425.000,00	(3.705.000,00)	71,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	13.130.000,00	9.425.000,00	(3.705.000,00)	71,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.130.000,00	9.425.000,00	(3.705.000,00)	71,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	2.525.000,00	1.170.000,00	(1.355.000,00)	46,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	2.525.000,00	1.170.000,00	(1.355.000,00)	46,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	1.170.000,00	(1.355.000,00)	46,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	88.160.000,00	83.870.000,00	(4.290.000,00)	95,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	88.160.000,00	83.870.000,00	(4.290.000,00)	95,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.160.000,00	83.870.000,00	(4.290.000,00)	95,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	4.471.340.240,00	4.050.763.759,00	(420.576.481,00)	90,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	4.404.242.240,00	4.045.033.759,00	(359.208.481,00)	91,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.676.842.240,00	2.484.051.967,00	(192.790.273,00)	92,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.727.400.000,00	1.560.981.792,00	(166.418.208,00)	90,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	67.098.000,00	5.730.000,00	(61.368.000,00)	8,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.348.000,00	5.730.000,00	(57.618.000,00)	9,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.750.000,00	-	(3.750.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	18.880.000,00	9.830.000,00	(9.050.000,00)	52,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	18.880.000,00	9.830.000,00	(9.050.000,00)	52,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.880.000,00	9.830.000,00	(9.050.000,00)	52,06	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	16.900.000,00	13.260.000,00	(3.640.000,00)	78,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	16.900.000,00	13.260.000,00	(3.640.000,00)	78,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	13.260.000,00	(3.640.000,00)	78,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.950.000,00	1.105.000,00	(845.000,00)	56,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.105.000,00	(845.000,00)	56,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.105.000,00	(845.000,00)	56,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	77.450.000,00	77.060.000,00	(390.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	77.450.000,00	77.060.000,00	(390.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.450.000,00	77.060.000,00	(390.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	29.820.000,00	20.070.000,00	(9.750.000,00)	67,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.820.000,00	20.070.000,00	(9.750.000,00)	67,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	29.820.000,00	20.070.000,00	(9.750.000,00)	67,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.820.000,00	20.070.000,00	(9.750.000,00)	67,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.820.000,00	20.070.000,00	(9.750.000,00)	67,30	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Klareyan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0019		4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.049.434.020,00	4.049.434.020,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0019		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.049.434.020,00	4.049.434.020,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0019		4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.049.434.020,00	4.049.434.020,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		5	BELANJA DAERAH	5.004.626.000,00	3.822.146.805,00	(1.182.479.195,00)	76,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.955.629.000,00	3.822.146.805,00	(1.133.482.195,00)	77,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.955.629.000,00	3.822.146.805,00	(1.133.482.195,00)	77,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	18.700.000,00	12.220.000,00	(6.480.000,00)	65,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.700.000,00	12.220.000,00	(6.480.000,00)	65,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	12.220.000,00	(6.480.000,00)	65,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	7.545.000,00	-	(7.545.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.545.000,00	-	(7.545.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.545.000,00	-	(7.545.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	41.917.000,00	36.912.000,00	(5.005.000,00)	88,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	41.917.000,00	36.912.000,00	(5.005.000,00)	88,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.917.000,00	36.912.000,00	(5.005.000,00)	88,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	7.930.000,00	6.435.000,00	(1.495.000,00)	81,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.930.000,00	6.435.000,00	(1.495.000,00)	81,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.930.000,00	6.435.000,00	(1.495.000,00)	81,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	93.415.000,00	88.438.000,00	(4.977.000,00)	94,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	93.415.000,00	88.438.000,00	(4.977.000,00)	94,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.415.000,00	88.438.000,00	(4.977.000,00)	94,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	30.630.000,00	14.430.000,00	(16.200.000,00)	47,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	30.630.000,00	14.430.000,00	(16.200.000,00)	47,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.630.000,00	14.430.000,00	(16.200.000,00)	47,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	17.810.000,00	11.156.000,00	(6.654.000,00)	62,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	17.810.000,00	11.156.000,00	(6.654.000,00)	62,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.810.000,00	11.156.000,00	(6.654.000,00)	62,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	78.860.000,00	78.470.000,00	(390.000,00)	99,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	78.860.000,00	78.470.000,00	(390.000,00)	99,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.860.000,00	78.470.000,00	(390.000,00)	99,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	4.587.212.000,00	3.524.490.805,00	(1.062.721.195,00)	76,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	4.288.554.400,00	3.383.871.239,00	(904.683.161,00)	78,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.735.577.600,00	2.441.224.831,00	(294.352.769,00)	89,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.552.976.800,00	942.646.408,00	(610.330.392,00)	60,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	298.657.600,00	140.619.566,00	(158.038.034,00)	47,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.603.825,00	64.318.216,00	(134.285.609,00)	32,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.053.775,00	76.301.350,00	(23.752.425,00)	76,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	4.810.000,00	4.810.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	4.810.000,00	4.810.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.810.000,00	4.810.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	17.160.000,00	7.800.000,00	(9.360.000,00)	45,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	17.160.000,00	7.800.000,00	(9.360.000,00)	45,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.160.000,00	7.800.000,00	(9.360.000,00)	45,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.340.000,00	2.275.000,00	(65.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.275.000,00	(65.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.275.000,00	(65.000,00)	97,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	46.000.000,00	34.710.000,00	(11.290.000,00)	75,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	34.710.000,00	(11.290.000,00)	75,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	34.710.000,00	(11.290.000,00)	75,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	48.997.000,00	-	(48.997.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.997.000,00	-	(48.997.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	48.997.000,00	-	(48.997.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.997.000,00	-	(48.997.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.997.000,00	-	(48.997.000,00)	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Losari**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0020		4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.744.189.443,00	4.744.189.443,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.744.189.443,00	4.744.189.443,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.744.189.443,00	4.744.189.443,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		5	BELANJA DAERAH	6.058.475.000,00	5.362.543.730,00	(695.931.270,00)	88,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.000.235.000,00	5.309.503.730,00	(690.731.270,00)	88,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.000.235.000,00	5.309.503.730,00	(690.731.270,00)	88,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	75.680.000,00	75.550.000,00	(130.000,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.680.000,00	75.550.000,00	(130.000,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.680.000,00	75.550.000,00	(130.000,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	10.928.000,00	10.928.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.928.000,00	10.928.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.928.000,00	10.928.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	55.250.000,00	42.640.000,00	(12.610.000,00)	77,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.250.000,00	42.640.000,00	(12.610.000,00)	77,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.250.000,00	42.640.000,00	(12.610.000,00)	77,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	15.600.000,00	13.650.000,00	(1.950.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	13.650.000,00	(1.950.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	13.650.000,00	(1.950.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	15.600.000,00	2.145.000,00	(13.455.000,00)	13,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	2.145.000,00	(13.455.000,00)	13,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	2.145.000,00	(13.455.000,00)	13,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	254.073.500,00	252.843.500,00	(1.230.000,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	254.073.500,00	252.843.500,00	(1.230.000,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.073.500,00	252.843.500,00	(1.230.000,00)	99,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	43.680.000,00	30.680.000,00	(13.000.000,00)	70,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	43.680.000,00	30.680.000,00	(13.000.000,00)	70,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.680.000,00	30.680.000,00	(13.000.000,00)	70,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	41.244.000,00	36.101.000,00	(5.143.000,00)	87,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	41.244.000,00	36.101.000,00	(5.143.000,00)	87,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.244.000,00	36.101.000,00	(5.143.000,00)	87,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	146.802.000,00	126.084.000,00	(20.718.000,00)	85,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	146.802.000,00	126.084.000,00	(20.718.000,00)	85,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.802.000,00	126.084.000,00	(20.718.000,00)	85,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	5.141.727.500,00	4.578.992.230,00	(562.735.270,00)	89,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	4.892.136.502,00	4.515.537.230,00	(376.599.272,00)	92,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.685.120.000,00	2.669.706.451,00	(15.413.549,00)	99,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.207.016.502,00	1.845.830.779,00	(361.185.723,00)	83,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	249.590.998,00	63.455.000,00	(186.135.998,00)	25,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.590.998,00	63.455.000,00	(186.135.998,00)	25,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	12.480.000,00	11.895.000,00	(585.000,00)	95,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	12.480.000,00	11.895.000,00	(585.000,00)	95,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	11.895.000,00	(585.000,00)	95,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	12.480.000,00	11.115.000,00	(1.365.000,00)	89,06	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	12.480.000,00	11.115.000,00	(1.365.000,00)	89,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	11.115.000,00	(1.365.000,00)	89,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.170.000,00	585.000,00	(585.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	585.000,00	(585.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	585.000,00	(585.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	4.160.000,00	-	(4.160.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	4.160.000,00	-	(4.160.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	-	(4.160.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	169.360.000,00	116.295.000,00	(53.065.000,00)	68,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	169.360.000,00	116.295.000,00	(53.065.000,00)	68,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.360.000,00	116.295.000,00	(53.065.000,00)	68,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	58.240.000,00	53.040.000,00	(5.200.000,00)	91,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.240.000,00	53.040.000,00	(5.200.000,00)	91,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	58.240.000,00	53.040.000,00	(5.200.000,00)	91,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.240.000,00	53.040.000,00	(5.200.000,00)	91,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.240.000,00	53.040.000,00	(5.200.000,00)	91,07	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Purwoharjo**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0021		4	PENDAPATAN DAERAH	-	4.892.394.546,00	4.892.394.546,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0021		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.892.394.546,00	4.892.394.546,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0021		4.1.02	Retribusi Daerah	-	4.892.394.546,00	4.892.394.546,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		5	BELANJA DAERAH	5.498.804.000,00	4.813.402.866,00	(685.401.134,00)	87,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.447.194.000,00	4.766.442.866,00	(680.751.134,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.447.194.000,00	4.766.442.866,00	(680.751.134,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	108.612.000,00	108.612.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.612.000,00	108.612.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.612.000,00	108.612.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	975.000,00	390.000,00	(585.000,00)	40,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	975.000,00	390.000,00	(585.000,00)	40,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	390.000,00	(585.000,00)	40,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	263.850.000,00	263.850.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	263.850.000,00	263.850.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.850.000,00	263.850.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.290.000,00	17.290.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	17.290.000,00	17.290.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.290.000,00	17.290.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	13.756.000,00	13.115.000,00	(641.000,00)	95,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	13.756.000,00	13.115.000,00	(641.000,00)	95,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.756.000,00	13.115.000,00	(641.000,00)	95,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	118.190.000,00	97.322.000,00	(20.868.000,00)	82,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	118.190.000,00	97.322.000,00	(20.868.000,00)	82,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.190.000,00	97.322.000,00	(20.868.000,00)	82,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	4.721.423.000,00	4.097.335.866,00	(624.087.134,00)	86,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	4.467.040.600,00	3.878.765.526,00	(588.275.074,00)	86,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.626.000.000,00	2.594.391.274,00	(31.608.726,00)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.841.040.600,00	1.284.374.252,00	(556.666.348,00)	69,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	254.382.400,00	218.570.340,00	(35.812.060,00)	85,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.382.400,00	218.570.340,00	(33.812.060,00)	86,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	43.020.000,00	11.960.000,00	(31.060.000,00)	27,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	43.020.000,00	11.960.000,00	(31.060.000,00)	27,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.020.000,00	11.960.000,00	(31.060.000,00)	27,80	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	7.800.000,00	4.810.000,00	(2.990.000,00)	61,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	4.810.000,00	(2.990.000,00)	61,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	4.810.000,00	(2.990.000,00)	61,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	650.000,00	130.000,00	(520.000,00)	20,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	650.000,00	130.000,00	(520.000,00)	20,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	130.000,00	(520.000,00)	20,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	108.978.000,00	108.978.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	108.978.000,00	108.978.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.978.000,00	108.978.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	51.610.000,00	46.960.000,00	(4.650.000,00)	90,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.610.000,00	46.960.000,00	(4.650.000,00)	90,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	51.610.000,00	46.960.000,00	(4.650.000,00)	90,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.610.000,00	46.960.000,00	(4.650.000,00)	90,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.610.000,00	46.960.000,00	(4.650.000,00)	90,99	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Sarwodadi**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0022		4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.330.491.899,00	2.330.491.899,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0022		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.330.491.899,00	2.330.491.899,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0022		4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.330.491.899,00	2.330.491.899,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022		5	BELANJA DAERAH	2.833.009.000,00	2.692.173.727,00	(140.835.273,00)	95,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.802.329.000,00	2.661.493.727,00	(140.835.273,00)	94,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.802.329.000,00	2.661.493.727,00	(140.835.273,00)	94,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	45.712.000,00	45.712.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.712.000,00	45.712.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.712.000,00	45.712.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	11.660.000,00	10.600.000,00	(1.060.000,00)	90,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.660.000,00	10.600.000,00	(1.060.000,00)	90,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.660.000,00	10.600.000,00	(1.060.000,00)	90,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	43.485.000,00	38.155.000,00	(5.330.000,00)	87,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.485.000,00	38.155.000,00	(5.330.000,00)	87,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.485.000,00	38.155.000,00	(5.330.000,00)	87,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	520.000,00	520.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	520.000,00	520.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	520.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	137.425.000,00	137.035.000,00	(390.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	137.425.000,00	137.035.000,00	(390.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.425.000,00	137.035.000,00	(390.000,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	21.510.000,00	20.730.000,00	(780.000,00)	96,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	21.510.000,00	20.730.000,00	(780.000,00)	96,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.510.000,00	20.730.000,00	(780.000,00)	96,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	144.728.000,00	133.013.000,00	(11.715.000,00)	91,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	144.728.000,00	133.013.000,00	(11.715.000,00)	91,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.728.000,00	133.013.000,00	(11.715.000,00)	91,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	2.244.793.000,00	2.123.232.727,00	(121.560.273,00)	94,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.096.116.618,00	1.993.315.727,00	(102.800.891,00)	95,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.486.000.000,00	1.424.739.896,00	(61.260.104,00)	95,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.116.618,00	568.575.831,00	(41.540.787,00)	93,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	148.676.382,00	129.917.000,00	(18.759.382,00)	87,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.676.382,00	129.917.000,00	(18.759.382,00)	87,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	5.460.000,00	5.460.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	5.460.000,00	5.460.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.460.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	3.120.000,00	3.120.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	3.120.000,00	3.120.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	3.120.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	12.640.000,00	12.640.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	12.640.000,00	12.640.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.640.000,00	12.640.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	100.726.000,00	100.726.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	100.726.000,00	100.726.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.726.000,00	100.726.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	30.680.000,00	30.680.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.680.000,00	30.680.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	30.680.000,00	30.680.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.680.000,00	30.680.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.680.000,00	30.680.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Rowosari**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0023		4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.205.050.137,00	2.205.050.137,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0023		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.205.050.137,00	2.205.050.137,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0023		4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.205.050.137,00	2.205.050.137,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023		5	BELANJA DAERAH	2.855.940.000,00	2.566.498.300,00	(289.441.700,00)	89,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.828.622.000,00	2.539.198.300,00	(289.423.700,00)	89,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.828.622.000,00	2.539.198.300,00	(289.423.700,00)	89,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	27.846.000,00	27.846.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.846.000,00	27.846.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.846.000,00	27.846.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	20.860.000,00	20.210.000,00	(650.000,00)	96,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.860.000,00	20.210.000,00	(650.000,00)	96,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.860.000,00	20.210.000,00	(650.000,00)	96,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	25.285.000,00	24.895.000,00	(390.000,00)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.285.000,00	24.895.000,00	(390.000,00)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.285.000,00	24.895.000,00	(390.000,00)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	6.110.000,00	6.110.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.110.000,00	6.110.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.110.000,00	6.110.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	71.532.000,00	69.982.000,00	(1.550.000,00)	97,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	71.532.000,00	69.982.000,00	(1.550.000,00)	97,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.532.000,00	69.982.000,00	(1.550.000,00)	97,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	10.920.000,00	10.920.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	10.920.000,00	10.920.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.920.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	14.605.000,00	12.915.000,00	(1.690.000,00)	88,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	14.605.000,00	12.915.000,00	(1.690.000,00)	88,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.605.000,00	12.915.000,00	(1.690.000,00)	88,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	121.680.000,00	117.910.000,00	(3.770.000,00)	96,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	121.680.000,00	117.910.000,00	(3.770.000,00)	96,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.680.000,00	117.910.000,00	(3.770.000,00)	96,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	2.442.169.000,00	2.163.135.300,00	(279.033.700,00)	88,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.402.819.800,00	2.144.350.450,00	(258.469.350,00)	89,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.453.557.650,00	1.360.228.044,00	(93.329.606,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	949.262.150,00	784.122.406,00	(165.139.744,00)	82,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	39.349.200,00	18.784.850,00	(20.564.350,00)	47,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.349.200,00	18.784.850,00	(20.564.350,00)	47,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	650.000,00	-	(650.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	650.000,00	-	(650.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	-	(650.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	2.080.000,00	1.170.000,00	(910.000,00)	56,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	2.080.000,00	1.170.000,00	(910.000,00)	56,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	1.170.000,00	(910.000,00)	56,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	325.000,00	260.000,00	(65.000,00)	80,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	325.000,00	260.000,00	(65.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000,00	260.000,00	(65.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	31.165.000,00	30.450.000,00	(715.000,00)	97,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	31.165.000,00	30.450.000,00	(715.000,00)	97,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.165.000,00	30.450.000,00	(715.000,00)	97,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	53.395.000,00	53.395.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	53.395.000,00	53.395.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.395.000,00	53.395.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.318.000,00	27.300.000,00	(18.000,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.318.000,00	27.300.000,00	(18.000,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	27.318.000,00	27.300.000,00	(18.000,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.318.000,00	27.300.000,00	(18.000,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.318.000,00	27.300.000,00	(18.000,00)	99,93	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Mojo**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0024		4	PENDAPATAN DAERAH	-	3.474.583.317,00	3.474.583.317,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0024		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3.474.583.317,00	3.474.583.317,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0024		4.1.02	Retribusi Daerah	-	3.474.583.317,00	3.474.583.317,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024		5	BELANJA DAERAH	4.286.058.551,00	3.934.753.755,00	(351.304.796,00)	91,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.253.363.551,00	3.906.058.755,00	(347.304.796,00)	91,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.253.363.551,00	3.906.058.755,00	(347.304.796,00)	91,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	62.711.000,00	62.711.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.711.000,00	62.711.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.711.000,00	62.711.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	6.026.000,00	4.151.000,00	(1.875.000,00)	68,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.026.000,00	4.151.000,00	(1.875.000,00)	68,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.026.000,00	4.151.000,00	(1.875.000,00)	68,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	70.265.000,00	60.710.000,00	(9.555.000,00)	86,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.265.000,00	60.710.000,00	(9.555.000,00)	86,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.265.000,00	60.710.000,00	(9.555.000,00)	86,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	4.290.000,00	3.115.000,00	(1.175.000,00)	72,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	4.290.000,00	3.115.000,00	(1.175.000,00)	72,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	3.115.000,00	(1.175.000,00)	72,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	433.900.000,00	271.733.800,00	(162.166.200,00)	62,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	433.900.000,00	271.733.800,00	(162.166.200,00)	62,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.900.000,00	271.733.800,00	(162.166.200,00)	62,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12.090.000,00	12.090.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	12.090.000,00	12.090.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.090.000,00	12.090.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	18.390.000,00	17.870.000,00	(520.000,00)	97,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	18.390.000,00	17.870.000,00	(520.000,00)	97,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.390.000,00	17.870.000,00	(520.000,00)	97,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	270.910.000,00	255.630.000,00	(15.280.000,00)	94,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	270.910.000,00	255.630.000,00	(15.280.000,00)	94,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.910.000,00	255.630.000,00	(15.280.000,00)	94,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	3.187.996.551,00	3.043.937.955,00	(144.058.596,00)	95,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.071.066.529,00	2.931.904.115,00	(139.162.414,00)	95,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000.000,00	2.016.960.745,00	(3.039.255,00)	99,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.051.066.529,00	914.943.370,00	(136.123.159,00)	87,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	116.930.022,00	112.033.840,00	(4.896.182,00)	95,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.930.022,00	112.033.840,00	(4.896.182,00)	95,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	23.400.000,00	15.665.000,00	(7.735.000,00)	66,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	15.665.000,00	(7.735.000,00)	66,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	15.665.000,00	(7.735.000,00)	66,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	4.680.000,00	650.000,00	(4.030.000,00)	13,88	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	4.680.000,00	650.000,00	(4.030.000,00)	13,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	650.000,00	(4.030.000,00)	13,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	48.345.000,00	47.890.000,00	(455.000,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	48.345.000,00	47.890.000,00	(455.000,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.345.000,00	47.890.000,00	(455.000,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	107.760.000,00	107.305.000,00	(455.000,00)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	107.760.000,00	107.305.000,00	(455.000,00)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.760.000,00	107.305.000,00	(455.000,00)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32.695.000,00	28.695.000,00	(4.000.000,00)	87,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.695.000,00	28.695.000,00	(4.000.000,00)	87,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	32.695.000,00	28.695.000,00	(4.000.000,00)	87,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.695.000,00	28.695.000,00	(4.000.000,00)	87,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.695.000,00	28.695.000,00	(4.000.000,00)	87,76	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Cikadu**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0025		4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.333.800.321,00	2.333.800.321,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0025		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.333.800.321,00	2.333.800.321,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0025		4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.333.800.321,00	2.333.800.321,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025		5	BELANJA DAERAH	3.032.465.000,00	2.639.459.884,00	(393.005.116,00)	87,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.964.744.000,00	2.572.268.884,00	(392.475.116,00)	86,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.964.744.000,00	2.572.268.884,00	(392.475.116,00)	86,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	53.640.000,00	46.935.000,00	(6.705.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.640.000,00	46.935.000,00	(6.705.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.640.000,00	46.935.000,00	(6.705.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	9.995.000,00	9.540.000,00	(455.000,00)	95,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.995.000,00	9.540.000,00	(455.000,00)	95,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.995.000,00	9.540.000,00	(455.000,00)	95,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	21.840.000,00	15.860.000,00	(5.980.000,00)	72,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.840.000,00	15.860.000,00	(5.980.000,00)	72,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.840.000,00	15.860.000,00	(5.980.000,00)	72,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.460.000,00	2.730.000,00	(2.730.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.460.000,00	2.730.000,00	(2.730.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	2.730.000,00	(2.730.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.730.000,00	1.820.000,00	(910.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.730.000,00	1.820.000,00	(910.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	1.820.000,00	(910.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	259.532.000,00	258.622.000,00	(910.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	259.532.000,00	258.622.000,00	(910.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.532.000,00	258.622.000,00	(910.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	7.800.000,00	4.550.000,00	(3.250.000,00)	58,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	4.550.000,00	(3.250.000,00)	58,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	4.550.000,00	(3.250.000,00)	58,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	19.500.000,00	16.900.000,00	(2.600.000,00)	86,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	16.900.000,00	(2.600.000,00)	86,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	16.900.000,00	(2.600.000,00)	86,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	78.109.000,00	57.258.000,00	(20.851.000,00)	73,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	78.109.000,00	57.258.000,00	(20.851.000,00)	73,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.109.000,00	57.258.000,00	(20.851.000,00)	73,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	2.432.960.000,00	2.096.185.884,00	(336.774.116,00)	86,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.267.330.825,00	1.968.402.884,00	(298.927.941,00)	86,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.426.872.000,00	1.342.311.163,00	(84.560.837,00)	94,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.458.825,00	626.091.721,00	(214.367.104,00)	74,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	165.629.175,00	127.783.000,00	(37.846.175,00)	77,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.629.175,00	127.783.000,00	(37.846.175,00)	77,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	910.000,00	-	(910.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	910.000,00	-	(910.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.000,00	-	(910.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.460.000,00	3.640.000,00	(1.820.000,00)	66,66	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	5.460.000,00	3.640.000,00	(1.820.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	3.640.000,00	(1.820.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	2.730.000,00	-	(2.730.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	2.730.000,00	-	(2.730.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	-	(2.730.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	13.062.000,00	13.062.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	13.062.000,00	13.062.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.062.000,00	13.062.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	51.016.000,00	45.166.000,00	(5.850.000,00)	88,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	51.016.000,00	45.166.000,00	(5.850.000,00)	88,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.016.000,00	45.166.000,00	(5.850.000,00)	88,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	67.721.000,00	67.191.000,00	(530.000,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.721.000,00	67.191.000,00	(530.000,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	67.721.000,00	67.191.000,00	(530.000,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.721.000,00	67.191.000,00	(530.000,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.721.000,00	67.191.000,00	(530.000,00)	99,21	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Jatiroyom**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0026		4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.241.462.880,00	2.241.462.880,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0026		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.241.462.880,00	2.241.462.880,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0026		4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.241.462.880,00	2.241.462.880,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026		5	BELANJA DAERAH	2.795.079.655,00	2.575.742.032,00	(219.337.623,00)	92,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.733.124.655,00	2.513.787.032,00	(219.337.623,00)	91,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.124.655,00	2.513.787.032,00	(219.337.623,00)	91,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	52.248.000,00	52.248.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.248.000,00	52.248.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.248.000,00	52.248.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	4.165.000,00	3.385.000,00	(780.000,00)	81,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.165.000,00	3.385.000,00	(780.000,00)	81,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.165.000,00	3.385.000,00	(780.000,00)	81,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	22.880.000,00	22.880.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.880.000,00	22.880.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.880.000,00	22.880.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	6.825.000,00	5.850.000,00	(975.000,00)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.825.000,00	5.850.000,00	(975.000,00)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	5.850.000,00	(975.000,00)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	2.730.000,00	-	(2.730.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.730.000,00	-	(2.730.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	-	(2.730.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	227.537.000,00	226.735.000,00	(802.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	227.537.000,00	226.735.000,00	(802.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.537.000,00	226.735.000,00	(802.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	17.290.000,00	17.290.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	17.290.000,00	17.290.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.290.000,00	17.290.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	12.815.000,00	12.165.000,00	(650.000,00)	94,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	12.815.000,00	12.165.000,00	(650.000,00)	94,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.815.000,00	12.165.000,00	(650.000,00)	94,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	80.579.000,00	72.680.000,00	(7.899.000,00)	90,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	80.579.000,00	72.680.000,00	(7.899.000,00)	90,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.579.000,00	72.680.000,00	(7.899.000,00)	90,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	2.223.264.655,00	2.025.610.032,00	(197.654.623,00)	91,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.085.402.283,00	1.902.687.532,00	(182.714.751,00)	91,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.445.108.283,00	1.317.998.388,00	(127.109.895,00)	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.294.000,00	584.689.144,00	(55.604.856,00)	91,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	137.862.372,00	122.922.500,00	(14.939.872,00)	89,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.862.372,00	122.922.500,00	(14.939.872,00)	89,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	9.750.000,00	5.850.000,00	(3.900.000,00)	60,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	9.750.000,00	5.850.000,00	(3.900.000,00)	60,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	5.850.000,00	(3.900.000,00)	60,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.820.000,00	-	(1.820.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.820.000,00	-	(1.820.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	-	(1.820.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.260.000,00	3.260.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	3.260.000,00	3.260.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	3.260.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	66.661.000,00	64.534.000,00	(2.127.000,00)	96,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	66.661.000,00	64.534.000,00	(2.127.000,00)	96,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.661.000,00	64.534.000,00	(2.127.000,00)	96,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	61.955.000,00	61.955.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.955.000,00	61.955.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	61.955.000,00	61.955.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.955.000,00	61.955.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.955.000,00	61.955.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Puskesmas Karangasem**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.02.0.00.0.00.01.0027		4	PENDAPATAN DAERAH	-	2.393.989.676,00	2.393.989.676,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0027		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.393.989.676,00	2.393.989.676,00	-	
	1.02.0.00.0.00.01.0027		4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.393.989.676,00	2.393.989.676,00	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027		5	BELANJA DAERAH	3.391.506.000,00	3.095.856.658,00	(295.649.342,00)	91,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.271.808.000,00	2.990.718.658,00	(281.089.342,00)	91,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.271.808.000,00	2.990.718.658,00	(281.089.342,00)	91,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	46.464.000,00	46.464.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.464.000,00	46.464.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.464.000,00	46.464.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	18.694.000,00	18.164.000,00	(530.000,00)	97,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.694.000,00	18.164.000,00	(530.000,00)	97,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.694.000,00	18.164.000,00	(530.000,00)	97,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	28.860.000,00	28.860.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.860.000,00	28.860.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.860.000,00	28.860.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	4.810.000,00	4.680.000,00	(130.000,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.810.000,00	4.680.000,00	(130.000,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.810.000,00	4.680.000,00	(130.000,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	1.820.000,00	-	(1.820.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.820.000,00	-	(1.820.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	-	(1.820.000,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	253.999.500,00	253.999.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	253.999.500,00	253.999.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.999.500,00	253.999.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12.870.000,00	13.065.000,00	195.000,00	101,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	12.870.000,00	13.065.000,00	195.000,00	101,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	13.065.000,00	195.000,00	101,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	35.459.500,00	4.757.000,00	(30.702.500,00)	13,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	35.459.500,00	4.757.000,00	(30.702.500,00)	13,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.459.500,00	4.757.000,00	(30.702.500,00)	13,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	123.628.000,00	116.478.000,00	(7.150.000,00)	94,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	123.628.000,00	116.478.000,00	(7.150.000,00)	94,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.628.000,00	116.478.000,00	(7.150.000,00)	94,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	2.609.822.000,00	2.369.780.158,00	(240.041.842,00)	90,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.531.205.290,00	2.308.661.159,00	(222.544.131,00)	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	1.431.000.000,00	1.363.480.898,00	(67.519.102,00)	95,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.205.290,00	945.180.261,00	(155.025.029,00)	85,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	78.616.710,00	61.118.999,00	(17.497.711,00)	77,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.447.980,00	61.118.999,00	(17.328.981,00)	77,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0033	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.730,00	-	(168.730,00)	-	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	2.275.000,00	1.625.000,00	(650.000,00)	71,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	2.275.000,00	1.625.000,00	(650.000,00)	71,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.275.000,00	1.625.000,00	(650.000,00)	71,42	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	4.160.000,00	3.900.000,00	(260.000,00)	93,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	4.160.000,00	3.900.000,00	(260.000,00)	93,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	3.900.000,00	(260.000,00)	93,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	910.000,00	910.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	910.000,00	910.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.000,00	910.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	7.140.000,00	7.140.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	7.140.000,00	7.140.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	7.140.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	120.896.000,00	120.896.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	120.896.000,00	120.896.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.896.000,00	120.896.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	119.698.000,00	105.138.000,00	(14.560.000,00)	87,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.698.000,00	105.138.000,00	(14.560.000,00)	87,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	119.698.000,00	105.138.000,00	(14.560.000,00)	87,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	119.698.000,00	105.138.000,00	(14.560.000,00)	87,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.698.000,00	105.138.000,00	(14.560.000,00)	87,83	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
Organisasi : **Laboratorium Kesehatan Daerah**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028		5	BELANJA DAERAH	490.053.700,00	415.677.463,00	(74.376.237,00)	84,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	490.053.700,00	415.677.463,00	(74.376.237,00)	84,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	490.053.700,00	415.677.463,00	(74.376.237,00)	84,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	490.053.700,00	415.677.463,00	(74.376.237,00)	84,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	480.053.700,00	405.677.463,00	(74.376.237,00)	84,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.053.700,00	405.677.463,00	(74.376.237,00)	84,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0034	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0034	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Organisasi : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.880.000.000,00	6.025.411.093,00	2.145.411.093,00	155,29	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.880.000.000,00	6.025.411.093,00	2.145.411.093,00	155,29	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.880.000.000,00	6.025.411.093,00	2.145.411.093,00	155,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	149.124.092.264,00	142.876.680.023,00	(6.247.412.241,00)	95,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.233.158.000,00	19.796.667.741,00	(2.436.490.259,00)	89,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	129.765.000,00	128.950.645,00	(814.355,00)	99,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	129.765.000,00	128.950.645,00	(814.355,00)	99,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	129.765.000,00	128.950.645,00	(814.355,00)	99,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.765.000,00	128.950.645,00	(814.355,00)	99,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16.383.259.000,00	14.652.970.660,00	(1.730.288.340,00)	89,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	16.383.259.000,00	14.652.970.660,00	(1.730.288.340,00)	89,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.383.259.000,00	14.652.970.660,00	(1.730.288.340,00)	89,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	16.383.259.000,00	14.652.970.660,00	(1.730.288.340,00)	89,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	299.950.000,00	260.433.000,00	(39.517.000,00)	86,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	199.950.000,00	161.265.000,00	(38.685.000,00)	80,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	199.950.000,00	161.265.000,00	(38.685.000,00)	80,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.950.000,00	161.265.000,00	(38.685.000,00)	80,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100.000.000,00	99.168.000,00	(832.000,00)	99,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.168.000,00	(832.000,00)	99,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.168.000,00	(832.000,00)	99,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	623.699.000,00	612.500.456,00	(11.198.544,00)	98,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	180.469.000,00	178.553.000,00	(1.916.000,00)	98,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.070.000,00	43.628.000,00	(1.442.000,00)	96,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.070.000,00	43.628.000,00	(1.442.000,00)	96,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	135.399.000,00	134.925.000,00	(474.000,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.399.000,00	134.925.000,00	(474.000,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	85.630.000,00	85.375.440,00	(254.560,00)	99,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	85.630.000,00	85.375.440,00	(254.560,00)	99,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.630.000,00	85.375.440,00	(254.560,00)	99,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75.000.000,00	74.951.500,00	(48.500,00)	99,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.951.500,00	(48.500,00)	99,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.951.500,00	(48.500,00)	99,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.500.000,00	12.410.000,00	(90.000,00)	99,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.410.000,00	(90.000,00)	99,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.410.000,00	(90.000,00)	99,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	250.100.000,00	241.230.516,00	(8.869.484,00)	96,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	250.100.000,00	241.230.516,00	(8.869.484,00)	96,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.100.000,00	241.230.516,00	(8.869.484,00)	96,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	125.048.300,00	109.152.500,00	(15.895.800,00)	87,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	109.567.800,00	93.752.500,00	(15.815.300,00)	85,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	109.567.800,00	93.752.500,00	(15.815.300,00)	85,56	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.567.800,00	93.752.500,00	(15.815.300,00)	85,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.480.500,00	15.400.000,00	(80.500,00)	99,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	15.480.500,00	15.400.000,00	(80.500,00)	99,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.480.500,00	15.400.000,00	(80.500,00)	99,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.467.416.700,00	2.861.616.060,00	(605.800.640,00)	82,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	800.000.000,00	618.296.799,00	(181.703.201,00)	77,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	618.296.799,00	(181.703.201,00)	77,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	618.296.799,00	(181.703.201,00)	77,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	121.701.700,00	121.326.510,00	(375.190,00)	99,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	121.701.700,00	121.326.510,00	(375.190,00)	99,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.701.700,00	121.326.510,00	(375.190,00)	99,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.545.715.000,00	2.121.992.751,00	(423.722.249,00)	83,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.545.715.000,00	2.121.992.751,00	(423.722.249,00)	83,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.545.715.000,00	2.121.992.751,00	(423.722.249,00)	83,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.204.020.000,00	1.171.044.420,00	(32.975.580,00)	97,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	300.000.000,00	299.847.478,00	(152.522,00)	99,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	299.847.478,00	(152.522,00)	99,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	299.847.478,00	(152.522,00)	99,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	250.000.000,00	249.569.500,00	(430.500,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.569.500,00	(430.500,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.569.500,00	(430.500,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	200.000.000,00	199.966.600,00	(33.400,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.966.600,00	(33.400,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.966.600,00	(33.400,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	454.020.000,00	421.660.842,00	(32.359.158,00)	92,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	454.020.000,00	421.660.842,00	(32.359.158,00)	92,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.020.000,00	421.660.842,00	(32.359.158,00)	92,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.590.066.000,00	17.642.536.484,00	(947.529.516,00)	94,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.264.618.350,00	4.238.334.080,00	(26.284.270,00)	99,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0073		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI	393.775.000,00	389.929.500,00	(3.845.500,00)	99,02	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0073	5.1	BELANJA OPERASI	393.775.000,00	389.929.500,00	(3.845.500,00)	99,02	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0073	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.775.000,00	389.929.500,00	(3.845.500,00)	99,02	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093		NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	2.190.910.350,00	2.183.404.657,00	(7.505.693,00)	99,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1	BELANJA OPERASI	2.190.910.350,00	2.183.404.657,00	(7.505.693,00)	99,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.910.350,00	2.183.404.657,00	(7.505.693,00)	99,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0103		PENINGKATAN TANGGUL SUNGAI	400.000.000,00	398.561.455,00	(1.438.545,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0103	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	398.561.455,00	(1.438.545,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0103	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	398.561.455,00	(1.438.545,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109		PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	1.179.933.000,00	1.166.778.545,00	(13.154.455,00)	98,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.1	BELANJA OPERASI	1.179.933.000,00	1.166.778.545,00	(13.154.455,00)	98,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.179.933.000,00	1.166.778.545,00	(13.154.455,00)	98,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0114		REHABILITASI EMBUNG DAN PENAMPUNGAN AIR LAINNYA	100.000.000,00	99.659.923,00	(340.077,00)	99,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0114	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.659.923,00	(340.077,00)	99,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0114	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.659.923,00	(340.077,00)	99,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.325.447.650,00	13.404.202.404,00	(921.245.246,00)	93,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	13.156.255.800,00	12.339.052.800,00	(817.203.000,00)	93,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	13.156.255.800,00	12.339.052.800,00	(817.203.000,00)	93,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.156.255.800,00	12.339.052.800,00	(817.203.000,00)	93,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021		OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	460.000.000,00	408.242.181,00	(51.757.819,00)	88,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	460.000.000,00	408.242.181,00	(51.757.819,00)	88,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.000.000,00	408.242.181,00	(51.757.819,00)	88,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0035		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA	709.191.850,00	656.907.423,00	(52.284.427,00)	92,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	709.191.850,00	656.907.423,00	(52.284.427,00)	92,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.191.850,00	656.907.423,00	(52.284.427,00)	92,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.349.067.000,00	12.028.156.433,00	(1.320.910.567,00)	90,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.349.067.000,00	12.028.156.433,00	(1.320.910.567,00)	90,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026		PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	167.500.000,00	153.743.500,00	(13.756.500,00)	91,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	167.500.000,00	153.743.500,00	(13.756.500,00)	91,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.500.000,00	153.743.500,00	(13.756.500,00)	91,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	13.181.567.000,00	11.874.412.933,00	(1.307.154.067,00)	90,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	13.181.567.000,00	11.874.412.933,00	(1.307.154.067,00)	90,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.181.567.000,00	11.874.412.933,00	(1.307.154.067,00)	90,08	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.752.500.000,00	1.441.798.458,00	(310.701.542,00)	82,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01		PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.752.500.000,00	1.441.798.458,00	(310.701.542,00)	82,27	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010		PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.250.000.000,00	1.122.132.700,00	(127.867.300,00)	89,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000.000,00	1.122.132.700,00	(127.867.300,00)	89,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000,00	1.122.132.700,00	(127.867.300,00)	89,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	300.000.000,00	162.179.108,00	(137.820.892,00)	54,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	162.179.108,00	(137.820.892,00)	54,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	162.179.108,00	(137.820.892,00)	54,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0013		PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	202.500.000,00	157.486.650,00	(45.013.350,00)	77,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	202.500.000,00	157.486.650,00	(45.013.350,00)	77,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.500.000,00	157.486.650,00	(45.013.350,00)	77,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.082.959.264,00	6.852.436.382,00	(230.522.882,00)	96,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.082.959.264,00	6.852.436.382,00	(230.522.882,00)	96,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022		PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN	6.782.959.264,00	6.705.231.000,00	(77.728.264,00)	98,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	6.782.959.264,00	6.705.231.000,00	(77.728.264,00)	98,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.782.959.264,00	6.705.231.000,00	(77.728.264,00)	98,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	300.000.000,00	147.205.382,00	(152.794.618,00)	49,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	147.205.382,00	(152.794.618,00)	49,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	147.205.382,00	(152.794.618,00)	49,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	732.500.000,00	712.348.500,00	(20.151.500,00)	97,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	732.500.000,00	712.348.500,00	(20.151.500,00)	97,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	732.500.000,00	712.348.500,00	(20.151.500,00)	97,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	732.500.000,00	712.348.500,00	(20.151.500,00)	97,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	732.500.000,00	712.348.500,00	(20.151.500,00)	97,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.771.000.000,00	3.674.784.727,00	(96.215.273,00)	97,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	3.771.000.000,00	3.674.784.727,00	(96.215.273,00)	97,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018		PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.289.000.000,00	3.228.543.900,00	(60.456.100,00)	98,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.919.000.000,00	2.859.504.900,00	(59.495.100,00)	97,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.500.000,00	478.309.300,00	(8.190.700,00)	98,31	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.05	Belanja Hibah	2.432.500.000,00	2.381.195.600,00	(51.304.400,00)	97,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	370.000.000,00	369.039.000,00	(961.000,00)	99,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	370.000.000,00	369.039.000,00	(961.000,00)	99,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	482.000.000,00	446.240.827,00	(35.759.173,00)	92,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	482.000.000,00	446.240.827,00	(35.759.173,00)	92,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.01	Belanja Pegawai	126.000.000,00	113.000.000,00	(13.000.000,00)	89,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.000.000,00	333.240.827,00	(22.759.173,00)	93,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	353.000.000,00	350.028.850,00	(2.971.150,00)	99,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	353.000.000,00	350.028.850,00	(2.971.150,00)	99,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA	353.000.000,00	350.028.850,00	(2.971.150,00)	99,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	31.999.850,00	(1.000.150,00)	96,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	31.999.850,00	(1.000.150,00)	96,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	320.000.000,00	318.029.000,00	(1.971.000,00)	99,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.000.000,00	318.029.000,00	(1.971.000,00)	99,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	80.326.322.000,00	79.451.944.393,00	(874.377.607,00)	98,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	80.326.322.000,00	79.451.944.393,00	(874.377.607,00)	98,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	2.567.972.000,00	2.505.206.880,00	(62.765.120,00)	97,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	2.567.972.000,00	2.505.206.880,00	(62.765.120,00)	97,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.567.972.000,00	2.505.206.880,00	(62.765.120,00)	97,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	26.559.899.400,00	26.451.069.657,00	(108.829.743,00)	99,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	930.404.000,00	834.862.996,00	(95.541.004,00)	89,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	930.404.000,00	834.862.996,00	(95.541.004,00)	89,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	25.629.495.400,00	25.616.206.661,00	(13.288.739,00)	99,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.629.495.400,00	25.616.206.661,00	(13.288.739,00)	99,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034		PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	1.096.154.700,00	1.047.722.000,00	(48.432.700,00)	95,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1	BELANJA OPERASI	89.999.700,00	53.691.500,00	(36.308.200,00)	59,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.999.700,00	53.691.500,00	(36.308.200,00)	59,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2	BELANJA MODAL	1.006.155.000,00	994.030.500,00	(12.124.500,00)	98,79	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	5.287.500,00	(4.212.500,00)	55,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	996.655.000,00	988.743.000,00	(7.912.000,00)	99,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0037		PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR	5.427.087.500,00	5.367.425.729,00	(59.661.771,00)	98,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0037	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	102.893.000,00	(57.107.000,00)	64,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	102.893.000,00	(57.107.000,00)	64,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0037	5.2	BELANJA MODAL	5.267.087.500,00	5.264.532.729,00	(2.554.771,00)	99,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0037	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.267.087.500,00	5.264.532.729,00	(2.554.771,00)	99,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	2.202.789.510,00	2.083.786.857,00	(119.002.653,00)	94,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	2.202.789.510,00	2.083.786.857,00	(119.002.653,00)	94,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.202.789.510,00	2.083.786.857,00	(119.002.653,00)	94,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040		PEMBANGUNAN JEMBATAN	256.026.000,00	217.837.146,00	(38.188.854,00)	85,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	56.026.000,00	18.454.500,00	(37.571.500,00)	32,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.026.000,00	18.454.500,00	(37.571.500,00)	32,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.382.646,00	(617.354,00)	99,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.382.646,00	(617.354,00)	99,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	828.261.000,00	770.771.200,00	(57.489.800,00)	93,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	813.261.000,00	757.046.200,00	(56.214.800,00)	93,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	813.261.000,00	757.046.200,00	(56.214.800,00)	93,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	13.725.000,00	(1.275.000,00)	91,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	13.725.000,00	(1.275.000,00)	91,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	41.388.131.890,00	41.008.124.924,00	(380.006.966,00)	99,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	41.279.125.984,00	40.916.002.924,00	(363.123.060,00)	99,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.279.125.984,00	40.916.002.924,00	(363.123.060,00)	99,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	109.005.906,00	92.122.000,00	(16.883.906,00)	84,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.005.906,00	92.122.000,00	(16.883.906,00)	84,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000,00	97.670.450,00	(2.329.550,00)	97,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	20.000.000,00	18.200.000,00	(1.800.000,00)	91,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010		FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS	20.000.000,00	18.200.000,00	(1.800.000,00)	91,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.200.000,00	(1.800.000,00)	91,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.200.000,00	(1.800.000,00)	91,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.000.000,00	79.470.450,00	(529.550,00)	99,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA	80.000.000,00	79.470.450,00	(529.550,00)	99,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.470.450,00	(529.550,00)	99,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.470.450,00	(529.550,00)	99,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	833.520.000,00	828.307.605,00	(5.212.395,00)	99,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	28.625.000,00	(1.375.000,00)	95,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0003		PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	30.000.000,00	28.625.000,00	(1.375.000,00)	95,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.625.000,00	(1.375.000,00)	95,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.625.000,00	(1.375.000,00)	95,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	733.520.000,00	730.924.605,00	(2.595.395,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/KOTA	383.520.000,00	382.460.272,00	(1.059.728,00)	99,72	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	383.520.000,00	382.460.272,00	(1.059.728,00)	99,72	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	383.520.000,00	382.460.272,00	(1.059.728,00)	99,72	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA	350.000.000,00	348.464.333,00	(1.535.667,00)	99,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	348.464.333,00	(1.535.667,00)	99,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	348.464.333,00	(1.535.667,00)	99,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.000.000,00	68.758.000,00	(1.242.000,00)	98,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	70.000.000,00	68.758.000,00	(1.242.000,00)	98,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	68.758.000,00	(1.242.000,00)	98,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	68.758.000,00	(1.242.000,00)	98,22	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Organisasi : **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	45.276.303.000,00	43.654.393.286,00	(1.621.909.714,00)	96,41	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.767.903.000,00	24.580.035.294,00	(1.187.867.706,00)	95,39	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	136.787.000,00	134.825.983,00	(1.961.017,00)	98,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	23.787.000,00	22.847.500,00	(939.500,00)	96,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.787.000,00	22.847.500,00	(939.500,00)	96,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.787.000,00	22.847.500,00	(939.500,00)	96,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	6.000.000,00	5.960.000,00	(40.000,00)	99,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.960.000,00	(40.000,00)	99,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.960.000,00	(40.000,00)	99,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.000.000,00	4.956.033,00	(43.967,00)	99,12	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.956.033,00	(43.967,00)	99,12	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.956.033,00	(43.967,00)	99,12	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.000.000,00	5.913.000,00	(87.000,00)	98,55	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.913.000,00	(87.000,00)	98,55	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.913.000,00	(87.000,00)	98,55	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	31.000.000,00	30.808.000,00	(192.000,00)	99,38	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.808.000,00	(192.000,00)	99,38	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.808.000,00	(192.000,00)	99,38	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.000.000,00	59.391.450,00	(608.550,00)	98,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.391.450,00	(608.550,00)	98,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.391.450,00	(608.550,00)	98,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.695.586.000,00	4.615.722.946,00	(1.079.863.054,00)	81,04	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.681.786.000,00	4.602.138.446,00	(1.079.647.554,00)	80,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.681.786.000,00	4.602.138.446,00	(1.079.647.554,00)	80,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.681.786.000,00	4.602.138.446,00	(1.079.647.554,00)	80,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.000.000,00	5.985.000,00	(15.000,00)	99,75	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.985.000,00	(15.000,00)	99,75	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.985.000,00	(15.000,00)	99,75	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.000.000,00	4.799.500,00	(200.500,00)	95,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.799.500,00	(200.500,00)	95,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.799.500,00	(200.500,00)	95,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.04		ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	1.150.000,00	1.149.500,00	(500,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.04.0007		PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	1.150.000,00	1.149.500,00	(500,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.150.000,00	1.149.500,00	(500,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.149.500,00	(500,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	400.000.000,00	399.500.000,00	(500.000,00)	99,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	400.000.000,00	399.500.000,00	(500.000,00)	99,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.500.000,00	(500.000,00)	99,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	399.500.000,00	(500.000,00)	99,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	235.560.000,00	233.695.110,00	(1.864.890,00)	99,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	2.991.000,00	(9.000,00)	99,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.991.000,00	(9.000,00)	99,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.991.000,00	(9.000,00)	99,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.000.000,00	28.993.390,00	(6.610,00)	99,97	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	28.993.390,00	(6.610,00)	99,97	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	28.993.390,00	(6.610,00)	99,97	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.000.000,00	24.990.320,00	(9.680,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.990.320,00	(9.680,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.990.320,00	(9.680,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.500.000,00	18.488.000,00	(12.000,00)	99,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.500.000,00	18.488.000,00	(12.000,00)	99,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.488.000,00	(12.000,00)	99,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	30.000.000,00	29.973.900,00	(26.100,00)	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.973.900,00	(26.100,00)	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.973.900,00	(26.100,00)	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	130.060.000,00	128.258.500,00	(1.801.500,00)	98,61	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	130.060.000,00	128.258.500,00	(1.801.500,00)	98,61	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.060.000,00	128.258.500,00	(1.801.500,00)	98,61	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.320.000,00	13.320.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.320.000,00	13.320.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	13.320.000,00	13.320.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.320.000,00	13.320.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.081.000.000,00	18.977.966.606,00	(103.033.394,00)	99,46	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.851.000.000,00	17.811.024.885,00	(39.975.115,00)	99,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.851.000.000,00	17.811.024.885,00	(39.975.115,00)	99,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.851.000.000,00	17.811.024.885,00	(39.975.115,00)	99,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.230.000.000,00	1.166.941.721,00	(63.058.279,00)	94,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.230.000.000,00	1.166.941.721,00	(63.058.279,00)	94,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000.000,00	1.166.941.721,00	(63.058.279,00)	94,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	202.500.000,00	201.955.149,00	(544.851,00)	99,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	58.000.000,00	57.474.149,00	(525.851,00)	99,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.000.000,00	57.474.149,00	(525.851,00)	99,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	57.474.149,00	(525.851,00)	99,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	40.000.000,00	39.981.000,00	(19.000,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.981.000,00	(19.000,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.981.000,00	(19.000,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	54.500.000,00	54.500.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	54.500.000,00	54.500.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.500.000,00	54.500.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	315.000.000,00	308.242.456,00	(6.757.544,00)	97,85	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	7.679.000,00	(2.321.000,00)	76,79	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0008		PENDATAAN DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	7.679.000,00	(2.321.000,00)	76,79	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.679.000,00	(2.321.000,00)	76,79	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.679.000,00	(2.321.000,00)	76,79	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02		SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	73.957.356,00	(1.042.644,00)	98,60	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001		SOSIALISASI STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KEPADA MASYARAKAT/SUKARELAWAN TANGGAP BENCANA	35.000.000,00	34.664.495,00	(335.505,00)	99,04	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.664.495,00	(335.505,00)	99,04	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.664.495,00	(335.505,00)	99,04	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0009		SOSIALISASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN BARU DAN MEKANISME AKSES PEMBIAYAAN PERUMAHAN	40.000.000,00	39.292.861,00	(707.139,00)	98,23	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.292.861,00	(707.139,00)	98,23	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.292.861,00	(707.139,00)	98,23	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.503.900,00	(496.100,00)	99,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001		REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	100.000.000,00	99.503.900,00	(496.100,00)	99,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.503.900,00	(496.100,00)	99,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.503.900,00	(496.100,00)	98,01	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05		PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	80.000.000,00	77.685.000,00	(2.315.000,00)	97,10	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001		FASILITASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMILIK/PENGHUNI RUMAH SUSUN	45.000.000,00	43.717.500,00	(1.282.500,00)	97,15	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	43.717.500,00	(1.282.500,00)	97,15	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	43.717.500,00	(1.282.500,00)	97,15	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002		PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	35.000.000,00	33.967.500,00	(1.032.500,00)	97,04	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	33.967.500,00	(1.032.500,00)	97,04	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.967.500,00	(1.032.500,00)	97,04	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06		PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	50.000.000,00	49.417.200,00	(582.800,00)	98,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	50.000.000,00	49.417.200,00	(582.800,00)	98,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.417.200,00	(582.800,00)	98,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.417.200,00	(582.800,00)	98,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.618.400.000,00	9.211.818.603,00	(406.581.397,00)	95,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02		PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	25.000.000,00	24.920.900,00	(79.100,00)	99,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0004		PENYADARAN PUBLIK PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH	25.000.000,00	24.920.900,00	(79.100,00)	99,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.920.900,00	(79.100,00)	99,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.920.900,00	(79.100,00)	99,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	9.593.400.000,00	9.186.897.703,00	(406.502.297,00)	95,76	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012		PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	9.593.400.000,00	9.186.897.703,00	(406.502.297,00)	95,76	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	5.787.480.000,00	5.782.639.871,00	(4.840.129,00)	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.667.480.000,00	5.662.639.871,00	(4.840.129,00)	99,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	3.805.920.000,00	3.404.257.832,00	(401.662.168,00)	89,44	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.805.920.000,00	3.404.257.832,00	(401.662.168,00)	89,44	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.370.000.000,00	2.369.066.000,00	(934.000,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01		PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.370.000.000,00	2.369.066.000,00	(934.000,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	2.370.000.000,00	2.369.066.000,00	(934.000,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.370.000.000,00	2.369.066.000,00	(934.000,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	189.066.000,00	(934.000,00)	99,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.180.000.000,00	2.180.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.170.000.000,00	7.150.551.533,00	(19.448.467,00)	99,72	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	7.170.000.000,00	7.150.551.533,00	(19.448.467,00)	99,72	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	7.145.000.000,00	7.125.700.934,00	(19.299.066,00)	99,72	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.145.000.000,00	7.125.700.934,00	(19.299.066,00)	99,72	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.145.000.000,00	7.125.700.934,00	(19.299.066,00)	99,72	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	10.000.000,00	9.913.000,00	(87.000,00)	99,12	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.913.000,00	(87.000,00)	99,12	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.913.000,00	(87.000,00)	99,12	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0010		VERIFIKASI DAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DARI PENGEMBANG	15.000.000,00	14.937.599,00	(62.401,00)	99,58	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.937.599,00	(62.401,00)	99,58	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.937.599,00	(62.401,00)	99,58	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35.000.000,00	34.679.400,00	(320.600,00)	99,08	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.06.2.01		SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN KECIL	35.000.000,00	34.679.400,00	(320.600,00)	99,08	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.06.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN KUALIFIKASI KECIL	35.000.000,00	34.679.400,00	(320.600,00)	99,08	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.679.400,00	(320.600,00)	99,08	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.679.400,00	(320.600,00)	99,08	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**
Organisasi : **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	260.000.000,00	156.660.000,00	(103.340.000,00)	60,25	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.560.000.000,00	2.429.981.520,00	(130.018.480,00)	94,92	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	30.000.000,00	28.844.000,00	(1.156.000,00)	96,14	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01		PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	28.844.000,00	(1.156.000,00)	96,14	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002		MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	28.844.000,00	(1.156.000,00)	96,14	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.844.000,00	(1.156.000,00)	96,14	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.844.000,00	(1.156.000,00)	96,14	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.530.000.000,00	2.401.137.520,00	(128.862.480,00)	94,90	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01		PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.530.000.000,00	2.401.137.520,00	(128.862.480,00)	94,90	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	2.530.000.000,00	2.401.137.520,00	(128.862.480,00)	94,90	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	230.000.000,00	201.561.520,00	(28.438.480,00)	87,63	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	201.561.520,00	(28.438.480,00)	87,63	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	(100.424.000,00)	95,63	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	(100.424.000,00)	95,63	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Organisasi : **Satuan Polisi Pamong Praja**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	14.522.544.400,00	13.883.140.159,00	(639.404.241,00)	95,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.617.550.400,00	11.005.173.825,00	(612.376.575,00)	94,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.500.000,00	31.242.500,00	(4.257.500,00)	88,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	14.797.500,00	(202.500,00)	98,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.797.500,00	(202.500,00)	98,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.797.500,00	(202.500,00)	98,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.000.000,00	7.740.000,00	(1.260.000,00)	86,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	7.740.000,00	(1.260.000,00)	86,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	7.740.000,00	(1.260.000,00)	86,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.500.000,00	4.705.000,00	(2.795.000,00)	62,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	4.705.000,00	(2.795.000,00)	62,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	4.705.000,00	(2.795.000,00)	62,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.100.270.000,00	7.568.152.017,00	(532.117.983,00)	93,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.089.745.000,00	7.557.925.017,00	(531.819.983,00)	93,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.089.745.000,00	7.557.925.017,00	(531.819.983,00)	93,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.089.745.000,00	7.557.925.017,00	(531.819.983,00)	93,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.500.000,00	3.475.000,00	(25.000,00)	99,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.475.000,00	(25.000,00)	99,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.475.000,00	(25.000,00)	99,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	6.000.000,00	5.760.000,00	(240.000,00)	96,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.760.000,00	(240.000,00)	96,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.760.000,00	(240.000,00)	96,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.025.000,00	992.000,00	(33.000,00)	96,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.025.000,00	992.000,00	(33.000,00)	96,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	992.000,00	(33.000,00)	96,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	202.440.000,00	200.988.000,00	(1.452.000,00)	99,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	102.440.000,00	100.988.000,00	(1.452.000,00)	98,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.440.000,00	100.988.000,00	(1.452.000,00)	98,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.440.000,00	100.988.000,00	(1.452.000,00)	98,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	305.280.400,00	292.689.310,00	(12.591.090,00)	95,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	36.940.000,00	35.905.530,00	(1.034.470,00)	97,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.169.550,00	11.135.080,00	(1.034.470,00)	91,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.169.550,00	11.135.080,00	(1.034.470,00)	91,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	24.770.450,00	24.770.450,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.770.450,00	24.770.450,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	30.840.400,00	26.932.930,00	(3.907.470,00)	87,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.840.400,00	26.932.930,00	(3.907.470,00)	87,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.840.400,00	26.932.930,00	(3.907.470,00)	87,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.500.000,00	25.669.750,00	(5.830.250,00)	81,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.500.000,00	25.669.750,00	(5.830.250,00)	81,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	25.669.750,00	(5.830.250,00)	81,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.500.000,00	4.750.000,00	(1.750.000,00)	73,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	4.750.000,00	(1.750.000,00)	73,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	4.750.000,00	(1.750.000,00)	73,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	192.000.000,00	191.931.100,00	(68.900,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	192.000.000,00	191.931.100,00	(68.900,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	191.931.100,00	(68.900,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.700.060.000,00	2.647.202.698,00	(52.857.302,00)	98,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	151.060.000,00	138.079.330,00	(12.980.670,00)	91,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	151.060.000,00	138.079.330,00	(12.980.670,00)	91,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.060.000,00	138.079.330,00	(12.980.670,00)	91,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.000.000,00	1.958.500,00	(41.500,00)	97,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.958.500,00	(41.500,00)	97,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.958.500,00	(41.500,00)	97,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.545.500.000,00	2.505.664.868,00	(39.835.132,00)	98,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.545.500.000,00	2.505.664.868,00	(39.835.132,00)	98,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.545.500.000,00	2.505.664.868,00	(39.835.132,00)	98,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	274.000.000,00	264.899.300,00	(9.100.700,00)	96,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	153.500.000,00	144.399.800,00	(9.100.200,00)	94,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.500.000,00	144.399.800,00	(9.100.200,00)	94,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.500.000,00	144.399.800,00	(9.100.200,00)	94,07	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.000.000,00	2.999.500,00	(500,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.999.500,00	(500,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.999.500,00	(500,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.842.494.000,00	1.841.576.900,00	(917.100,00)	99,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.189.660.000,00	1.189.542.900,00	(117.100,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	588.160.000,00	588.109.500,00	(50.500,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	588.160.000,00	588.109.500,00	(50.500,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.160.000,00	588.109.500,00	(50.500,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004		PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0008		PENYUSUNAN SOP KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016		PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017		PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH	10.000.000,00	9.933.400,00	(66.600,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.933.400,00	(66.600,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.933.400,00	(66.600,00)	99,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	644.334.000,00	643.534.000,00	(800.000,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010		SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	444.334.000,00	443.579.500,00	(754.500,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	444.334.000,00	443.579.500,00	(754.500,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.334.000,00	443.579.500,00	(754.500,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012		PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	70.000.000,00	69.954.500,00	(45.500,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.954.500,00	(45.500,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.954.500,00	(45.500,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03		PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03.0006		PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.062.500.000,00	1.036.389.434,00	(26.110.566,00)	97,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.500.000,00	55.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001		PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003		PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007		PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018		PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI ANTAR DAERAH BERBATASAN, ANTAR LEMBAGA, DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	1.007.000.000,00	980.889.434,00	(26.110.566,00)	97,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT	1.000.000.000,00	973.894.434,00	(26.105.566,00)	97,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	988.515.500,00	962.409.934,00	(26.105.566,00)	97,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.515.500,00	962.409.934,00	(26.105.566,00)	97,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	11.484.500,00	11.484.500,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.484.500,00	11.484.500,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002		PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0003		DUKUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN MELALUI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Organisasi : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	8.417.528.600,00	7.678.245.146,00	(739.283.454,00)	91,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.916.228.600,00	5.213.214.157,00	(703.014.443,00)	88,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	111.957.600,00	111.423.165,00	(534.435,00)	99,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	108.127.600,00	107.779.165,00	(348.435,00)	99,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.127.600,00	107.779.165,00	(348.435,00)	99,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.127.600,00	107.779.165,00	(348.435,00)	99,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.830.000,00	3.644.000,00	(186.000,00)	95,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.830.000,00	3.644.000,00	(186.000,00)	95,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	3.644.000,00	(186.000,00)	95,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.189.051.000,00	3.514.325.211,00	(674.725.789,00)	83,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.184.001.000,00	3.509.425.211,00	(674.575.789,00)	83,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.184.001.000,00	3.509.425.211,00	(674.575.789,00)	83,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.184.001.000,00	3.509.425.211,00	(674.575.789,00)	83,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.615.000,00	3.465.000,00	(150.000,00)	95,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.615.000,00	3.465.000,00	(150.000,00)	95,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.615.000,00	3.465.000,00	(150.000,00)	95,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1.435.000,00	1.435.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.435.000,00	1.435.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.435.000,00	1.435.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	349.670.000,00	343.256.642,00	(6.413.358,00)	98,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	57.030.000,00	56.791.000,00	(239.000,00)	99,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.030.000,00	56.791.000,00	(239.000,00)	99,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.030.000,00	56.791.000,00	(239.000,00)	99,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.330.000,00	3.181.610,00	(148.390,00)	95,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.330.000,00	3.181.610,00	(148.390,00)	95,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	3.181.610,00	(148.390,00)	95,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	65.620.000,00	64.915.840,00	(704.160,00)	98,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.620.000,00	64.915.840,00	(704.160,00)	98,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.620.000,00	64.915.840,00	(704.160,00)	98,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.830.000,00	25.798.692,00	(31.308,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.830.000,00	25.798.692,00	(31.308,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.830.000,00	25.798.692,00	(31.308,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	197.860.000,00	192.569.500,00	(5.290.500,00)	97,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	197.860.000,00	192.569.500,00	(5.290.500,00)	97,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.860.000,00	192.569.500,00	(5.290.500,00)	97,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	65.000.000,00	64.812.900,00	(187.100,00)	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	65.000.000,00	64.812.900,00	(187.100,00)	99,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	172.000,00	-	(172.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.000,00	-	(172.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	64.828.000,00	64.812.900,00	(15.100,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.828.000,00	64.812.900,00	(15.100,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	536.660.000,00	523.620.052,00	(13.039.948,00)	97,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.660.000,00	1.000.000,00	(660.000,00)	60,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.660.000,00	1.000.000,00	(660.000,00)	60,24	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	1.000.000,00	(660.000,00)	60,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	135.000.000,00	125.201.103,00	(9.798.897,00)	92,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	125.201.103,00	(9.798.897,00)	92,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	125.201.103,00	(9.798.897,00)	92,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	9.738.000,00	(262.000,00)	97,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.738.000,00	(262.000,00)	97,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.738.000,00	(262.000,00)	97,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	390.000.000,00	387.680.949,00	(2.319.051,00)	99,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	390.000.000,00	387.680.949,00	(2.319.051,00)	99,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	387.680.949,00	(2.319.051,00)	99,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	663.890.000,00	655.776.187,00	(8.113.813,00)	98,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	157.160.000,00	151.087.506,00	(6.072.494,00)	96,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.160.000,00	151.087.506,00	(6.072.494,00)	96,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.160.000,00	151.087.506,00	(6.072.494,00)	96,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	278.230.000,00	277.195.551,00	(1.034.449,00)	99,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	278.230.000,00	277.195.551,00	(1.034.449,00)	99,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.230.000,00	277.195.551,00	(1.034.449,00)	99,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	228.500.000,00	227.493.130,00	(1.006.870,00)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	228.500.000,00	227.493.130,00	(1.006.870,00)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.500.000,00	227.493.130,00	(1.006.870,00)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.501.300.000,00	2.465.030.989,00	(36.269.011,00)	98,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	232.950.000,00	222.112.066,00	(10.837.934,00)	95,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003		PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA	162.900.000,00	157.437.656,00	(5.462.344,00)	96,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	162.900.000,00	157.437.656,00	(5.462.344,00)	96,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.900.000,00	157.437.656,00	(5.462.344,00)	96,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	70.050.000,00	64.674.410,00	(5.375.590,00)	92,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.050.000,00	64.674.410,00	(5.375.590,00)	92,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.050.000,00	64.674.410,00	(5.375.590,00)	92,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	590.000.000,00	587.512.092,00	(2.487.908,00)	99,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0010		GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	25.000.000,00	23.602.500,00	(1.397.500,00)	94,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.602.500,00	(1.397.500,00)	94,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.602.500,00	(1.397.500,00)	94,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	38.500.000,00	37.976.500,00	(523.500,00)	98,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	7.850.000,00	7.697.500,00	(152.500,00)	98,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	7.697.500,00	(152.500,00)	98,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	30.650.000,00	30.279.000,00	(371.000,00)	98,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.650.000,00	30.279.000,00	(371.000,00)	98,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	526.500.000,00	525.933.092,00	(566.908,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	523.642.500,00	523.075.592,00	(566.908,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.642.500,00	523.075.592,00	(566.908,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	2.857.500,00	2.857.500,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.857.500,00	2.857.500,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1.515.850.000,00	1.497.302.540,00	(18.547.460,00)	98,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002		RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	1.148.294.500,00	1.132.021.840,00	(16.272.660,00)	98,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.148.294.500,00	1.132.021.840,00	(16.272.660,00)	98,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.148.294.500,00	1.132.021.840,00	(16.272.660,00)	98,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	367.555.500,00	365.280.700,00	(2.274.800,00)	99,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	358.855.500,00	356.580.700,00	(2.274.800,00)	99,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.855.500,00	356.580.700,00	(2.274.800,00)	99,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	162.500.000,00	158.104.291,00	(4.395.709,00)	97,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0005		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	96.526.000,00	92.810.990,00	(3.715.010,00)	96,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	96.526.000,00	92.810.990,00	(3.715.010,00)	96,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.526.000,00	92.810.990,00	(3.715.010,00)	96,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010		KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	65.974.000,00	65.293.301,00	(680.699,00)	98,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	65.974.000,00	65.293.301,00	(680.699,00)	98,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.974.000,00	65.293.301,00	(680.699,00)	98,96	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**
Organisasi : **Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	22.548.552.618,00	21.445.261.078,00	(1.103.291.540,00)	95,10	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.166.604.018,00	7.491.484.164,00	(675.119.854,00)	91,73	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	201.000.000,00	200.980.000,00	(20.000,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	86.000.000,00	86.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	86.000.000,00	86.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	86.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.951.196.000,00	4.680.979.826,00	(270.216.174,00)	94,54	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.872.786.000,00	4.602.685.826,00	(270.100.174,00)	94,45	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.872.786.000,00	4.602.685.826,00	(270.100.174,00)	94,45	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.872.786.000,00	4.602.685.826,00	(270.100.174,00)	94,45	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	24.650.000,00	24.650.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.650.000,00	24.650.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.650.000,00	24.650.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	13.760.000,00	13.735.000,00	(25.000,00)	99,81	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.760.000,00	13.735.000,00	(25.000,00)	99,81	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	13.735.000,00	(25.000,00)	99,81	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	40.000.000,00	39.909.000,00	(91.000,00)	99,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.909.000,00	(91.000,00)	99,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.909.000,00	(91.000,00)	99,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	119.643.000,00	115.641.110,00	(4.001.890,00)	96,65	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.672.500,00	7.668.500,00	(4.000,00)	99,94	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.672.500,00	7.668.500,00	(4.000,00)	99,94	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.672.500,00	7.668.500,00	(4.000,00)	99,94	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.087.000,00	10.083.095,00	(3.905,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.087.000,00	10.083.095,00	(3.905,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.087.000,00	10.083.095,00	(3.905,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	16.900.000,00	16.875.600,00	(24.400,00)	99,85	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.900.000,00	16.875.600,00	(24.400,00)	99,85	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	16.875.600,00	(24.400,00)	99,85	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.158.500,00	11.119.000,00	(39.500,00)	99,64	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.158.500,00	11.119.000,00	(39.500,00)	99,64	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.158.500,00	11.119.000,00	(39.500,00)	99,64	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	70.825.000,00	66.994.915,00	(3.830.085,00)	94,59	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.825.000,00	66.994.915,00	(3.830.085,00)	94,59	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.825.000,00	66.994.915,00	(3.830.085,00)	94,59	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.325.000,00	6.325.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	6.325.000,00	6.325.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	6.325.000,00	6.325.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.325.000,00	6.325.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	724.624.018,00	710.253.576,00	(14.370.442,00)	98,01	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	26.022.018,00	25.963.850,00	(58.168,00)	99,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.022.018,00	25.963.850,00	(58.168,00)	99,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.022.018,00	25.963.850,00	(58.168,00)	99,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	105.100.000,00	100.809.897,00	(4.290.103,00)	95,91	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.100.000,00	100.809.897,00	(4.290.103,00)	95,91	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.100.000,00	100.809.897,00	(4.290.103,00)	95,91	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.308.000,00	10.253.000,00	(55.000,00)	99,46	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.308.000,00	10.253.000,00	(55.000,00)	99,46	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.308.000,00	10.253.000,00	(55.000,00)	99,46	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	583.194.000,00	573.226.829,00	(9.967.171,00)	98,29	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	583.194.000,00	573.226.829,00	(9.967.171,00)	98,29	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.194.000,00	573.226.829,00	(9.967.171,00)	98,29	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.073.816.000,00	1.687.304.652,00	(386.511.348,00)	81,36	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	75.095.000,00	74.996.838,00	(98.162,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.095.000,00	74.996.838,00	(98.162,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.095.000,00	74.996.838,00	(98.162,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.998.721.000,00	1.612.307.814,00	(386.413.186,00)	80,66	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	323.721.000,00	289.703.814,00	(34.017.186,00)	89,49	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.721.000,00	289.703.814,00	(34.017.186,00)	89,49	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	1.675.000.000,00	1.322.604.000,00	(352.396.000,00)	78,96	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.675.000.000,00	1.322.604.000,00	(352.396.000,00)	78,96	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	642.085.000,00	641.772.648,00	(312.352,00)	99,95	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	642.085.000,00	641.772.648,00	(312.352,00)	99,95	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0001		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	4.661.000,00	4.661.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.661.000,00	4.661.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.661.000,00	4.661.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	221.559.000,00	221.311.000,00	(248.000,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	221.559.000,00	221.311.000,00	(248.000,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.559.000,00	221.311.000,00	(248.000,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0003		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	405.880.000,00	405.825.648,00	(54.352,00)	99,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	405.880.000,00	405.825.648,00	(54.352,00)	99,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.880.000,00	405.825.648,00	(54.352,00)	99,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	7.569.000,00	7.559.000,00	(10.000,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.569.000,00	7.559.000,00	(10.000,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.569.000,00	7.559.000,00	(10.000,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0005		PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	2.416.000,00	2.416.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.416.000,00	2.416.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.416.000,00	2.416.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.633.270.000,00	9.208.878.766,00	(424.391.234,00)	95,59	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	5.684.382.000,00	5.293.513.000,00	(390.869.000,00)	93,12	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	54.270.000,00	54.270.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.270.000,00	54.270.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.770.000,00	4.770.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	6.040.000,00	6.040.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.040.000,00	6.040.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	6.040.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003		PENYEDIAAN ALAT BANTU	103.659.800,00	103.659.500,00	(300,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	103.659.800,00	103.659.500,00	(300,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.159.800,00	3.159.500,00	(300,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.500.000,00	100.500.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004		PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	9.221.200,00	8.724.500,00	(496.700,00)	94,61	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.221.200,00	8.724.500,00	(496.700,00)	94,61	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.221.200,00	8.724.500,00	(496.700,00)	94,61	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	615.550.000,00	566.227.000,00	(49.323.000,00)	91,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	615.550.000,00	566.227.000,00	(49.323.000,00)	91,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.550.000,00	566.227.000,00	(49.323.000,00)	91,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	3.978.700.000,00	3.938.136.500,00	(40.563.500,00)	98,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.978.700.000,00	3.938.136.500,00	(40.563.500,00)	98,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.940.000,00	91.908.500,00	(31.500,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.886.760.000,00	3.846.228.000,00	(40.532.000,00)	98,95	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007		FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	884.000.000,00	584.800.000,00	(299.200.000,00)	66,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	884.000.000,00	584.800.000,00	(299.200.000,00)	66,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	79.800.000,00	(4.200.000,00)	95,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	505.000.000,00	(295.000.000,00)	63,12	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	6.034.800,00	5.994.500,00	(40.300,00)	99,33	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.034.800,00	5.994.500,00	(40.300,00)	99,33	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.034.800,00	5.994.500,00	(40.300,00)	99,33	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012		PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	17.906.200,00	16.661.000,00	(1.245.200,00)	93,04	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	17.906.200,00	16.661.000,00	(1.245.200,00)	93,04	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.906.200,00	16.661.000,00	(1.245.200,00)	93,04	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	3.948.888.000,00	3.915.365.766,00	(33.522.234,00)	99,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0007		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	351.640.000,00	350.565.000,00	(1.075.000,00)	99,69	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	351.640.000,00	350.565.000,00	(1.075.000,00)	99,69	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.640.000,00	350.565.000,00	(1.075.000,00)	99,69	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA	2.219.020.000,00	2.217.611.000,00	(1.409.000,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.219.020.000,00	2.217.611.000,00	(1.409.000,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	917.300.000,00	915.891.000,00	(1.409.000,00)	99,84	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.301.720.000,00	1.301.720.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0010		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	1.292.590.000,00	1.261.802.808,00	(30.787.192,00)	97,61	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.292.590.000,00	1.261.802.808,00	(30.787.192,00)	97,61	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.192.590.000,00	1.161.802.808,00	(30.787.192,00)	97,41	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0010	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0014		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN/KOTA	85.638.000,00	85.386.958,00	(251.042,00)	99,70	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	85.638.000,00	85.386.958,00	(251.042,00)	99,70	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.638.000,00	85.386.958,00	(251.042,00)	99,70	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.033.771.600,00	4.030.315.500,00	(3.456.100,00)	99,91	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01		PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	8.398.900,00	8.213.500,00	(185.400,00)	97,79	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0001		PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0002		RUJUKAN ANAK-ANAK TERLANTAR	4.984.400,00	4.799.000,00	(185.400,00)	96,28	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.984.400,00	4.799.000,00	(185.400,00)	96,28	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.984.400,00	4.799.000,00	(185.400,00)	96,28	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0003		PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR	2.414.500,00	2.414.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.414.500,00	2.414.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.414.500,00	2.414.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.025.372.700,00	4.022.102.000,00	(3.270.700,00)	99,91	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0001		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.956.800,00	59.447.500,00	(509.300,00)	99,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.956.800,00	59.447.500,00	(509.300,00)	99,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.956.800,00	59.447.500,00	(509.300,00)	99,15	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.528.800,00	60.365.000,00	(163.800,00)	99,72	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.528.800,00	60.365.000,00	(163.800,00)	99,72	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.528.800,00	60.365.000,00	(163.800,00)	99,72	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	3.902.793.600,00	3.900.196.000,00	(2.597.600,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.902.793.600,00	3.900.196.000,00	(2.597.600,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.902.793.600,00	3.900.196.000,00	(2.597.600,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004		FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	2.093.500,00	2.093.500,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.093.500,00	2.093.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.093.500,00	2.093.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	38.907.000,00	38.895.000,00	(12.000,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	13.810.000,00	13.810.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001		PENYEDIAAN MAKANAN	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	7.260.000,00	7.260.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.260.000,00	7.260.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	7.260.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003		PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004		PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	25.097.000,00	25.085.000,00	(12.000,00)	99,95	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0001		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA	6.691.900,00	6.691.500,00	(400,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.691.900,00	6.691.500,00	(400,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.691.900,00	6.691.500,00	(400,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	18.405.100,00	18.393.500,00	(11.600,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.405.100,00	18.393.500,00	(11.600,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.405.100,00	18.393.500,00	(11.600,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	33.915.000,00	33.915.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	33.915.000,00	33.915.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0001		REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	6.668.000,00	6.668.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.668.000,00	6.668.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.668.000,00	6.668.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0002		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	7.327.000,00	7.327.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.327.000,00	7.327.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.327.000,00	7.327.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0003		PENGAMANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	19.920.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Organisasi : **Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.335.500.000,00	2.156.264.058,00	(179.235.942,00)	92,32	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	955.000.000,00	839.977.883,00	(115.022.117,00)	87,95	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	24.020.000,00	(25.980.000,00)	48,03	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	99,85	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	99,85	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	99,85	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0003		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0004		SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0005		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KAB/ KOTA	7.000.000,00	2.230.000,00	(4.770.000,00)	31,85	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	2.230.000,00	(4.770.000,00)	31,85	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	2.230.000,00	(4.770.000,00)	31,85	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0006		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KAB/KOTA	7.000.000,00	6.800.000,00	(200.000,00)	97,14	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.800.000,00	(200.000,00)	97,14	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.800.000,00	(200.000,00)	97,14	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0008		SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KAB/KOTA	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	255.000.000,00	244.024.883,00	(10.975.117,00)	95,69	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.02.0001		SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	5.000.000,00	4.490.000,00	(510.000,00)	89,79	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.490.000,00	(510.000,00)	89,79	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.490.000,00	(510.000,00)	89,79	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.02.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	250.000.000,00	239.534.883,00	(10.465.117,00)	95,81	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	239.534.883,00	(10.465.117,00)	95,81	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	239.534.883,00	(10.465.117,00)	95,81	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	650.000.000,00	571.933.000,00	(78.067.000,00)	87,98	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	163.824.000,00	(36.176.000,00)	81,91	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	163.824.000,00	(36.176.000,00)	81,91	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	163.824.000,00	(36.176.000,00)	81,91	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	177.024.000,00	(22.976.000,00)	88,51	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	177.024.000,00	(22.976.000,00)	88,51	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	177.024.000,00	(22.976.000,00)	88,51	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0003		PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	250.000.000,00	231.085.000,00	(18.915.000,00)	92,43	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	231.085.000,00	(18.915.000,00)	92,43	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	231.085.000,00	(18.915.000,00)	92,43	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	367.500.000,00	335.164.495,00	(32.335.505,00)	91,20	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.000.000,00	284.322.005,00	(20.677.995,00)	93,22	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	284.322.005,00	(15.677.995,00)	94,77	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	284.322.005,00	(15.677.995,00)	94,77	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	284.322.005,00	(15.677.995,00)	94,77	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	37.500.000,00	31.277.450,00	(6.222.550,00)	83,40	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	7.500.000,00	4.360.000,00	(3.140.000,00)	58,13	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	4.360.000,00	(3.140.000,00)	58,13	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	4.360.000,00	(3.140.000,00)	58,13	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	26.917.450,00	(3.082.550,00)	89,72	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	26.917.450,00	(3.082.550,00)	89,72	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.917.450,00	(3.082.550,00)	89,72	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00	19.565.040,00	(5.434.960,00)	78,26	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	7.500.000,00	7.450.000,00	(50.000,00)	99,33	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.450.000,00	(50.000,00)	99,33	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.450.000,00	(50.000,00)	99,33	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN SPESIFIK BAGI PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	7.500.000,00	7.115.040,00	(384.960,00)	94,86	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.115.040,00	(384.960,00)	94,86	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.115.040,00	(384.960,00)	94,86	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0004		PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	440.500.000,00	436.557.108,00	(3.942.892,00)	99,10	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	228.500.000,00	226.426.108,00	(2.073.892,00)	99,09	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.621.500,00	(378.500,00)	99,62	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.621.500,00	(378.500,00)	99,62	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.621.500,00	(378.500,00)	99,62	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0002		PELAKSANAAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KG DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGI KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0003		PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	125.000.000,00	123.304.608,00	(1.695.392,00)	98,64	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	123.304.608,00	(1.695.392,00)	98,64	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	123.304.608,00	(1.695.392,00)	98,64	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	205.000.000,00	203.131.000,00	(1.869.000,00)	99,08	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.000.000,00	124.611.000,00	(389.000,00)	99,68	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.611.000,00	(389.000,00)	99,68	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.611.000,00	(389.000,00)	99,68	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	73.520.000,00	(1.480.000,00)	98,02	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	73.520.000,00	(1.480.000,00)	98,02	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.520.000,00	(1.480.000,00)	98,02	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0003		PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.03		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.03.0001		PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN KOMPREHENSIF BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	14.500.000,00	14.450.000,00	(50.000,00)	99,65	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05.2.01		PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.500.000,00	14.450.000,00	(50.000,00)	99,65	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05.2.01.0002		PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	405.500.000,00	383.536.480,00	(21.963.520,00)	94,58	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	382.500.000,00	360.536.480,00	(21.963.520,00)	94,25	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	275.000.000,00	253.286.480,00	(21.713.520,00)	92,10	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	253.286.480,00	(21.713.520,00)	92,10	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	253.286.480,00	(21.713.520,00)	92,10	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	107.500.000,00	107.250.000,00	(250.000,00)	99,76	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.500.000,00	107.250.000,00	(250.000,00)	99,76	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.500.000,00	107.250.000,00	(250.000,00)	99,76	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0003		PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0004		PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	152.500.000,00	146.578.092,00	(5.921.908,00)	96,11	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.500.000,00	108.108.092,00	(4.391.908,00)	96,09	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0003		PENGUATAN KERJA SAMA LINTAS PERANGKAT DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK, DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, DAN DRPPA	7.500.000,00	7.420.000,00	(80.000,00)	98,93	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.420.000,00	(80.000,00)	98,93	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.420.000,00	(80.000,00)	98,93	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004		ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA	100.000.000,00	95.688.092,00	(4.311.908,00)	95,68	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	95.688.092,00	(4.311.908,00)	95,68	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	95.688.092,00	(4.311.908,00)	95,68	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0005		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KEWENANGAN KAB/ KOTA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.000.000,00	10.470.000,00	(1.530.000,00)	87,25	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0005		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	4.010.000,00	(990.000,00)	80,20	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.010.000,00	(990.000,00)	80,20	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.010.000,00	(990.000,00)	80,20	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK	7.000.000,00	6.460.000,00	(540.000,00)	92,28	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.460.000,00	(540.000,00)	92,28	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.460.000,00	(540.000,00)	92,28	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0004		PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN AMPK TINGKAT KABUPATEN/KOTA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0005		PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0007		PENGEMBANGAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI) PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0008		PENYEDIAAN BANTUAN KEBUTUHAN KHUSUS BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Organisasi : **Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	14.403.648.418,00	14.371.448.240,00	(32.200.178,00)	99,77	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	9.662.363.693,00	9.633.381.540,00	(28.982.153,00)	99,70	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.662.363.693,00	9.633.381.540,00	(28.982.153,00)	99,70	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0017		PERUMUSAN PARAMETER PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	9.662.363.693,00	9.633.381.540,00	(28.982.153,00)	99,70	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.464.834.373,00	9.446.448.080,00	(18.386.293,00)	99,80	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.464.834.373,00	9.446.448.080,00	(18.386.293,00)	99,80	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	197.529.320,00	186.933.460,00	(10.595.860,00)	94,63	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.529.320,00	186.933.460,00	(10.595.860,00)	94,63	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.163.733.000,00	3.163.632.000,00	(101.000,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	3.100.000,00	3.005.000,00	(95.000,00)	96,93	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0013		KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	3.100.000,00	3.005.000,00	(95.000,00)	96,93	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	3.100.000,00	3.005.000,00	(95.000,00)	96,93	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.005.000,00	(95.000,00)	96,93	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0006		FASILITASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB)	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.148.861.000,00	3.148.856.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	8.920.000,00	8.920.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.920.000,00	8.920.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00	8.920.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	6.385.000,00	6.385.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.385.000,00	6.385.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.385.000,00	6.385.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0004		PENYEDIAAN DUKUNGAN AYOMAN KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN PENGGUNAAN MKJP	3.935.000,00	3.935.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.935.000,00	3.935.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.935.000,00	3.935.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	12.230.000,00	12.230.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.230.000,00	12.230.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.230.000,00	12.230.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0011		DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK	3.073.861.000,00	3.073.856.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.073.861.000,00	3.073.856.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.073.861.000,00	3.073.856.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0013		PENINGKATAN KESERTAAN KB PRIA	43.530.000,00	43.530.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	43.530.000,00	43.530.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.530.000,00	43.530.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	6.772.000,00	6.772.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0001		PENGUATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	1.772.000,00	1.772.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.772.000,00	1.772.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.772.000,00	1.772.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.577.551.725,00	1.574.434.700,00	(3.117.025,00)	99,80	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1.567.411.725,00	1.564.294.700,00	(3.117.025,00)	99,80	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0008		PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	48.239.025,00	48.039.000,00	(200.025,00)	99,58	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	48.239.025,00	48.039.000,00	(200.025,00)	99,58	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.239.025,00	48.039.000,00	(200.025,00)	99,58	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	304.580.000,00	304.580.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	304.580.000,00	304.580.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.580.000,00	304.580.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0019		ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	503.910.000,00	501.921.000,00	(1.989.000,00)	99,60	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	503.910.000,00	501.921.000,00	(1.989.000,00)	99,60	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.910.000,00	501.921.000,00	(1.989.000,00)	99,60	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0021		ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS PENGELOLA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	632.080.000,00	631.152.000,00	(928.000,00)	99,85	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	632.080.000,00	631.152.000,00	(928.000,00)	99,85	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.080.000,00	631.152.000,00	(928.000,00)	99,85	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0024		PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	76.600.000,00	76.600.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	76.600.000,00	76.600.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.600.000,00	76.600.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0028		PEMBENTUKAN KELOMPOK KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BINA KELUARGA BALITA (BKB), BINA KELUARGA REMAJA (BKR), PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) BINA KELUARGA LANSIA (BKL), USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA)	2.002.700,00	2.002.700,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	2.002.700,00	2.002.700,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.002.700,00	2.002.700,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02		PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	10.140.000,00	10.140.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0004		PROMOSI DAN SOSIALISASI PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BAGI MITRA KERJA	10.140.000,00	10.140.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.140.000,00	10.140.000,00	-	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	10.140.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**
Organisasi : **Dinas Tenaga Kerja**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.308.474.350,00	10.492.630.011,00	(815.844.339,00)	92,78	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.809.836.350,00	5.092.401.452,00	(717.434.898,00)	87,65	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	129.356.000,00	128.879.887,00	(476.113,00)	99,63	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	114.786.000,00	114.343.887,00	(442.113,00)	99,61	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	114.786.000,00	114.343.887,00	(442.113,00)	99,61	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.786.000,00	114.343.887,00	(442.113,00)	99,61	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.510.000,00	1.500.000,00	(10.000,00)	99,33	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.510.000,00	1.500.000,00	(10.000,00)	99,33	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	1.500.000,00	(10.000,00)	99,33	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.020.000,00	3.020.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.020.000,00	3.020.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	3.020.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.040.000,00	3.016.000,00	(24.000,00)	99,21	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.040.000,00	3.016.000,00	(24.000,00)	99,21	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	3.016.000,00	(24.000,00)	99,21	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.360.360.000,00	3.678.878.076,00	(681.481.924,00)	84,37	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.333.039.000,00	3.651.557.076,00	(681.481.924,00)	84,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.333.039.000,00	3.651.557.076,00	(681.481.924,00)	84,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.333.039.000,00	3.651.557.076,00	(681.481.924,00)	84,27	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.106.000,00	2.106.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.106.000,00	2.106.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.106.000,00	2.106.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	25.215.000,00	25.215.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.215.000,00	25.215.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.215.000,00	25.215.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	34.994.000,00	34.993.900,00	(100,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34.994.000,00	34.993.900,00	(100,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	34.994.000,00	34.993.900,00	(100,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.994.000,00	34.993.900,00	(100,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	368.681.150,00	360.777.340,00	(7.903.810,00)	97,85	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.992.000,00	9.992.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.992.000,00	9.992.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.992.000,00	9.992.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.626.400,00	12.618.030,00	(8.370,00)	99,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.626.400,00	12.618.030,00	(8.370,00)	99,93	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.626.400,00	12.618.030,00	(8.370,00)	99,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	114.518.500,00	114.515.750,00	(2.750,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.518.500,00	114.515.750,00	(2.750,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.518.500,00	114.515.750,00	(2.750,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.400.000,00	22.960.000,00	(440.000,00)	98,11	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	22.960.000,00	(440.000,00)	98,11	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	22.960.000,00	(440.000,00)	98,11	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	200.644.250,00	193.191.560,00	(7.452.690,00)	96,28	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.644.250,00	193.191.560,00	(7.452.690,00)	96,28	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.644.250,00	193.191.560,00	(7.452.690,00)	96,28	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	106.755.200,00	101.330.000,00	(5.425.200,00)	94,91	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	101.755.200,00	96.330.000,00	(5.425.200,00)	94,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	101.755.200,00	96.330.000,00	(5.425.200,00)	94,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.755.200,00	96.330.000,00	(5.425.200,00)	94,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	561.736.000,00	541.101.936,00	(20.634.064,00)	96,32	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	196.110.000,00	176.293.363,00	(19.816.637,00)	89,89	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	196.110.000,00	176.293.363,00	(19.816.637,00)	89,89	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.110.000,00	176.293.363,00	(19.816.637,00)	89,89	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	365.626.000,00	364.808.573,00	(817.427,00)	99,77	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	365.626.000,00	364.808.573,00	(817.427,00)	99,77	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.626.000,00	364.808.573,00	(817.427,00)	99,77	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	247.954.000,00	246.440.313,00	(1.513.687,00)	99,38	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	113.005.000,00	111.520.615,00	(1.484.385,00)	98,68	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.005.000,00	111.520.615,00	(1.484.385,00)	98,68	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.005.000,00	111.520.615,00	(1.484.385,00)	98,68	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.274.000,00	35.244.848,00	(29.152,00)	99,91	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.274.000,00	35.244.848,00	(29.152,00)	99,91	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.274.000,00	35.244.848,00	(29.152,00)	99,91	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	99.675.000,00	99.674.850,00	(150,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	99.675.000,00	99.674.850,00	(150,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.675.000,00	99.674.850,00	(150,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.942.020.000,00	3.882.878.646,00	(59.141.354,00)	98,49	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	3.887.520.000,00	3.833.851.081,00	(53.668.919,00)	98,61	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	2.287.520.000,00	2.277.147.911,00	(10.372.089,00)	99,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.287.520.000,00	2.277.147.911,00	(10.372.089,00)	99,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.287.520.000,00	2.277.147.911,00	(10.372.089,00)	99,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0003		PENGADAAN SARANA PELATIHAN KERJA KABUPATEN/KOTA	1.600.000.000,00	1.556.703.170,00	(43.296.830,00)	97,29	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	105.110.080,00	103.771.950,00	(1.338.130,00)	98,72	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.110.080,00	103.771.950,00	(1.338.130,00)	98,72	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.494.889.920,00	1.452.931.220,00	(41.958.700,00)	97,19	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.494.889.920,00	1.452.931.220,00	(41.958.700,00)	97,19	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.02		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	50.000.000,00	45.127.565,00	(4.872.435,00)	90,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.02.0001		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	50.000.000,00	45.127.565,00	(4.872.435,00)	90,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	45.127.565,00	(4.872.435,00)	90,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.127.565,00	(4.872.435,00)	90,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.03		PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.03.0001		PENYEDIAAN SUMBER DAYA PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SECARA TERINTEGRASI	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.010.100.000,00	985.002.920,00	(25.097.080,00)	97,51	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01		PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	681.000.000,00	675.825.000,00	(5.175.000,00)	99,24	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002		PELAYANAN ANTAR KERJA	82.000.000,00	81.563.000,00	(437.000,00)	99,46	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.000.000,00	81.563.000,00	(437.000,00)	99,46	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	81.563.000,00	(437.000,00)	99,46	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005		PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	599.000.000,00	594.262.000,00	(4.738.000,00)	99,20	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	599.000.000,00	594.262.000,00	(4.738.000,00)	99,20	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.000.000,00	594.262.000,00	(4.738.000,00)	99,20	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	200.100.000,00	189.192.720,00	(10.907.280,00)	94,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003		JOB FAIR/BURSA KERJA	200.100.000,00	189.192.720,00	(10.907.280,00)	94,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.100.000,00	189.192.720,00	(10.907.280,00)	94,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.100.000,00	189.192.720,00	(10.907.280,00)	94,54	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.04		PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	129.000.000,00	119.985.200,00	(9.014.800,00)	93,01	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.04.0001		PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)	129.000.000,00	119.985.200,00	(9.014.800,00)	93,01	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	129.000.000,00	119.985.200,00	(9.014.800,00)	93,01	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	119.985.200,00	(9.014.800,00)	93,01	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	546.518.000,00	532.346.993,00	(14.171.007,00)	97,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.000.000,00	44.802.783,00	(1.197.217,00)	97,39	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0001		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN	46.000.000,00	44.802.783,00	(1.197.217,00)	97,39	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	44.802.783,00	(1.197.217,00)	97,39	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	44.802.783,00	(1.197.217,00)	97,39	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.518.000,00	487.544.210,00	(12.973.790,00)	97,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002		PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00	22.985.282,00	(2.014.718,00)	91,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.985.282,00	(2.014.718,00)	91,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.985.282,00	(2.014.718,00)	91,94	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0003		PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI	10.000.000,00	9.980.000,00	(20.000,00)	99,79	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.980.000,00	(20.000,00)	99,79	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.980.000,00	(20.000,00)	99,79	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004		PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.500.000,00	74.305.500,00	(3.194.500,00)	95,87	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	77.500.000,00	74.305.500,00	(3.194.500,00)	95,87	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	74.305.500,00	(3.194.500,00)	95,87	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005		PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	388.018.000,00	380.273.428,00	(7.744.572,00)	98,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	388.018.000,00	380.273.428,00	(7.744.572,00)	98,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.018.000,00	380.273.428,00	(7.744.572,00)	98,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**
Organisasi : **Dinas Tenaga Kerja**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	176.600.000,00	123.934.721,00	(52.665.279,00)	70,17	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	176.600.000,00	123.934.721,00	(52.665.279,00)	70,17	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01		PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	176.600.000,00	123.934.721,00	(52.665.279,00)	70,17	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.000.000,00	60.465.330,00	(14.534.670,00)	80,62	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	60.465.330,00	(14.534.670,00)	80,62	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	60.465.330,00	(14.534.670,00)	80,62	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0004		PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.600.000,00	63.469.391,00	(38.130.609,00)	62,46	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	101.600.000,00	63.469.391,00	(38.130.609,00)	62,46	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.600.000,00	53.469.391,00	(38.130.609,00)	58,37	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0004	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
Organisasi : **Dinas Lingkungan Hidup**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	425.000.000,00	473.475.000,00	48.475.000,00	111,40	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	425.000.000,00	473.475.000,00	48.475.000,00	111,40	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	425.000.000,00	473.475.000,00	48.475.000,00	111,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	29.028.583.000,00	27.361.398.333,00	(1.667.184.667,00)	94,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.367.756.100,00	18.504.527.457,00	(863.228.643,00)	95,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.000.000,00	17.683.640,00	(316.360,00)	98,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	12.000.000,00	11.741.640,00	(258.360,00)	97,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.741.640,00	(258.360,00)	97,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.741.640,00	(258.360,00)	97,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	5.942.000,00	(58.000,00)	99,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.942.000,00	(58.000,00)	99,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.942.000,00	(58.000,00)	99,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.459.636.000,00	13.765.849.212,00	(693.786.788,00)	95,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14.443.636.000,00	13.750.417.892,00	(693.218.108,00)	95,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.443.636.000,00	13.750.417.892,00	(693.218.108,00)	95,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	14.443.636.000,00	13.750.417.892,00	(693.218.108,00)	95,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.000.000,00	5.690.000,00	(310.000,00)	94,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.690.000,00	(310.000,00)	94,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.690.000,00	(310.000,00)	94,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.000.000,00	4.953.320,00	(46.680,00)	99,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.953.320,00	(46.680,00)	99,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.953.320,00	(46.680,00)	99,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.000.000,00	4.788.000,00	(212.000,00)	95,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.788.000,00	(212.000,00)	95,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.788.000,00	(212.000,00)	95,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	416.562.500,00	402.036.327,00	(14.526.173,00)	96,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	308.858.500,00	306.045.159,00	(2.813.341,00)	99,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	308.858.500,00	306.045.159,00	(2.813.341,00)	99,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.858.500,00	306.045.159,00	(2.813.341,00)	99,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	107.704.000,00	95.991.168,00	(11.712.832,00)	89,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	107.704.000,00	95.991.168,00	(11.712.832,00)	89,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.704.000,00	95.991.168,00	(11.712.832,00)	89,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	409.054.400,00	401.490.293,00	(7.564.107,00)	98,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.100.000,00	3.085.058,00	(14.942,00)	99,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.100.000,00	3.085.058,00	(14.942,00)	99,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.085.058,00	(14.942,00)	99,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	36.650.000,00	34.643.772,00	(2.006.228,00)	94,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.650.000,00	34.643.772,00	(2.006.228,00)	94,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.650.000,00	34.643.772,00	(2.006.228,00)	94,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.824.800,00	3.480.600,00	(344.200,00)	91,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.599.800,00	1.415.600,00	(184.200,00)	88,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.599.800,00	1.415.600,00	(184.200,00)	88,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.225.000,00	2.065.000,00	(160.000,00)	92,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.225.000,00	2.065.000,00	(160.000,00)	92,80	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	132.439.100,00	131.949.470,00	(489.630,00)	99,63	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.439.100,00	131.949.470,00	(489.630,00)	99,63	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.439.100,00	131.949.470,00	(489.630,00)	99,63	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.962.500,00	13.954.500,00	(8.000,00)	99,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.962.500,00	13.954.500,00	(8.000,00)	99,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.962.500,00	13.954.500,00	(8.000,00)	99,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.860.000,00	16.212.000,00	(648.000,00)	96,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.860.000,00	16.212.000,00	(648.000,00)	96,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.860.000,00	16.212.000,00	(648.000,00)	96,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	202.218.000,00	198.164.893,00	(4.053.107,00)	97,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	202.218.000,00	198.164.893,00	(4.053.107,00)	97,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.218.000,00	198.164.893,00	(4.053.107,00)	97,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	142.926.100,00	141.390.736,00	(1.535.364,00)	98,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	27.430.350,00	26.297.350,00	(1.133.000,00)	95,86	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.813.000,00	3.680.000,00	(1.133.000,00)	76,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.813.000,00	3.680.000,00	(1.133.000,00)	76,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	22.617.350,00	22.617.350,00	-	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.617.350,00	22.617.350,00	-	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	115.495.750,00	115.093.386,00	(402.364,00)	99,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	115.495.750,00	115.093.386,00	(402.364,00)	99,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.495.750,00	115.093.386,00	(402.364,00)	99,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.732.063.000,00	3.589.815.315,00	(142.247.685,00)	96,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.140.000,00	4.500.000,00	(640.000,00)	87,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.140.000,00	4.500.000,00	(640.000,00)	87,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	4.500.000,00	(640.000,00)	87,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	195.560.000,00	187.594.474,00	(7.965.526,00)	95,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	195.560.000,00	187.594.474,00	(7.965.526,00)	95,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.560.000,00	187.594.474,00	(7.965.526,00)	95,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.531.363.000,00	3.397.720.841,00	(133.642.159,00)	96,21	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.531.363.000,00	3.397.720.841,00	(133.642.159,00)	96,21	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.531.363.000,00	3.397.720.841,00	(133.642.159,00)	96,21	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	189.514.100,00	186.261.934,00	(3.252.166,00)	98,28	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	82.338.000,00	79.742.576,00	(2.595.424,00)	96,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.338.000,00	79.742.576,00	(2.595.424,00)	96,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.338.000,00	79.742.576,00	(2.595.424,00)	96,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.200.000,00	6.199.000,00	(1.000,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.199.000,00	(1.000,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.199.000,00	(1.000,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	89.378.100,00	89.006.006,00	(372.094,00)	99,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	89.378.100,00	89.006.006,00	(372.094,00)	99,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.378.100,00	89.006.006,00	(372.094,00)	99,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	11.598.000,00	11.314.352,00	(283.648,00)	97,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.598.000,00	11.314.352,00	(283.648,00)	97,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.598.000,00	11.314.352,00	(283.648,00)	97,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	310.000.000,00	160.115.035,00	(149.884.965,00)	51,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01		RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	144.261.727,00	(5.738.273,00)	96,17	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002		PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	144.261.727,00	(5.738.273,00)	96,17	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	144.261.727,00	(5.738.273,00)	96,17	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	144.261.727,00	(5.738.273,00)	96,17	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	160.000.000,00	15.853.308,00	(144.146.692,00)	9,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005		PENYELENGGARAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	160.000.000,00	15.853.308,00	(144.146.692,00)	9,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	15.853.308,00	(144.146.692,00)	9,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	15.853.308,00	(144.146.692,00)	9,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	690.000.000,00	672.329.695,00	(17.670.305,00)	97,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	690.000.000,00	672.329.695,00	(17.670.305,00)	97,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	256.000.000,00	252.491.260,00	(3.508.740,00)	98,62	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	256.000.000,00	252.491.260,00	(3.508.740,00)	98,62	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.000.000,00	252.491.260,00	(3.508.740,00)	98,62	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	100.000.000,00	98.166.050,00	(1.833.950,00)	98,16	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.166.050,00	(1.833.950,00)	98,16	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.166.050,00	(1.833.950,00)	98,16	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	334.000.000,00	321.672.385,00	(12.327.615,00)	96,30	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	262.185.950,00	251.043.385,00	(11.142.565,00)	95,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.185.950,00	251.043.385,00	(11.142.565,00)	95,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	71.814.050,00	70.629.000,00	(1.185.050,00)	98,34	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.814.050,00	70.629.000,00	(1.185.050,00)	98,34	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	30.000.000,00	26.897.900,00	(3.102.100,00)	89,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	30.000.000,00	26.897.900,00	(3.102.100,00)	89,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	30.000.000,00	26.897.900,00	(3.102.100,00)	89,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	26.897.900,00	(3.102.100,00)	89,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.897.900,00	(3.102.100,00)	89,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.000.000,00	9.171.920,00	(828.080,00)	91,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	10.000.000,00	9.171.920,00	(828.080,00)	91,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002		VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	10.000.000,00	9.171.920,00	(828.080,00)	91,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.171.920,00	(828.080,00)	91,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.171.920,00	(828.080,00)	91,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	150.000.000,00	136.727.725,00	(13.272.275,00)	91,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	136.727.725,00	(13.272.275,00)	91,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	136.727.725,00	(13.272.275,00)	91,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	136.727.725,00	(13.272.275,00)	91,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	136.727.725,00	(13.272.275,00)	91,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	700.000.000,00	647.978.082,00	(52.021.918,00)	92,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	700.000.000,00	647.978.082,00	(52.021.918,00)	92,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002		PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	147.796.437,00	(2.203.563,00)	98,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	147.796.437,00	(2.203.563,00)	98,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	147.796.437,00	(2.203.563,00)	98,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000,00	184.468.697,00	(15.531.303,00)	92,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	184.468.697,00	(15.531.303,00)	92,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	184.468.697,00	(15.531.303,00)	92,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT	350.000.000,00	315.712.948,00	(34.287.052,00)	90,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	315.712.948,00	(34.287.052,00)	90,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	315.712.948,00	(34.287.052,00)	90,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.000.000,00	22.469.772,00	(12.530.228,00)	64,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01		PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.000.000,00	22.469.772,00	(12.530.228,00)	64,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001		PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	35.000.000,00	22.469.772,00	(12.530.228,00)	64,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	22.469.772,00	(12.530.228,00)	64,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	22.469.772,00	(12.530.228,00)	64,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15.000.000,00	6.001.000,00	(8.999.000,00)	40,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	6.001.000,00	(8.999.000,00)	40,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	6.001.000,00	(8.999.000,00)	40,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	6.001.000,00	(8.999.000,00)	40,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	6.001.000,00	(8.999.000,00)	40,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.720.826.900,00	7.175.179.747,00	(545.647.153,00)	92,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	7.720.826.900,00	7.175.179.747,00	(545.647.153,00)	92,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004		PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	240.000.000,00	231.615.500,00	(8.384.500,00)	96,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	231.615.500,00	(8.384.500,00)	96,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	231.615.500,00	(8.384.500,00)	96,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	1.147.000.000,00	967.924.674,00	(179.075.326,00)	84,38	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	832.968.000,00	754.366.674,00	(78.601.326,00)	90,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.568.000,00	569.299.674,00	(78.268.326,00)	87,91	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.05	Belanja Hibah	185.400.000,00	185.067.000,00	(333.000,00)	99,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	314.032.000,00	213.558.000,00	(100.474.000,00)	68,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	13.780.000,00	(220.000,00)	98,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.032.000,00	199.778.000,00	(100.254.000,00)	66,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	49.158.922,00	(841.078,00)	98,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.158.922,00	(841.078,00)	98,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.158.922,00	(841.078,00)	98,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN	6.258.826.900,00	5.902.077.261,00	(356.749.639,00)	94,30	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	6.019.726.900,00	5.676.061.261,00	(343.665.639,00)	94,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.019.726.900,00	5.676.061.261,00	(343.665.639,00)	94,29	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	239.100.000,00	226.016.000,00	(13.084.000,00)	94,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.100.000,00	226.016.000,00	(13.084.000,00)	94,52	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019		PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENDAURAN ULANG SAMPAH	25.000.000,00	24.403.390,00	(596.610,00)	97,61	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.403.390,00	(596.610,00)	97,61	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.403.390,00	(596.610,00)	97,61	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Organisasi : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.085.544.800,00	7.741.697.267,00	(1.343.847.533,00)	85,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.559.857.800,00	6.357.064.044,00	(1.202.793.756,00)	84,08	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.998.000,00	9.980.000,00	(18.000,00)	99,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.748.000,00	2.730.000,00	(18.000,00)	99,34	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.748.000,00	2.730.000,00	(18.000,00)	99,34	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.748.000,00	2.730.000,00	(18.000,00)	99,34	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.508.974.000,00	4.341.167.448,00	(1.167.806.552,00)	78,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.507.322.000,00	4.339.515.448,00	(1.167.806.552,00)	78,79	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.507.322.000,00	4.339.515.448,00	(1.167.806.552,00)	78,79	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.507.322.000,00	4.339.515.448,00	(1.167.806.552,00)	78,79	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1.052.000,00	1.052.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.052.000,00	1.052.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.052.000,00	1.052.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	21.694.000,00	21.540.000,00	(154.000,00)	99,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.694.000,00	21.540.000,00	(154.000,00)	99,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	21.694.000,00	21.540.000,00	(154.000,00)	99,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.694.000,00	21.540.000,00	(154.000,00)	99,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	516.098.000,00	509.957.920,00	(6.140.080,00)	98,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.096.000,00	8.085.200,00	(10.800,00)	99,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.096.000,00	8.085.200,00	(10.800,00)	99,86	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.096.000,00	8.085.200,00	(10.800,00)	99,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.570.000,00	2.246.000,00	(324.000,00)	87,39	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.570.000,00	2.246.000,00	(324.000,00)	87,39	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.570.000,00	2.246.000,00	(324.000,00)	87,39	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	363.472.000,00	360.860.470,00	(2.611.530,00)	99,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	363.472.000,00	360.860.470,00	(2.611.530,00)	99,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.472.000,00	360.860.470,00	(2.611.530,00)	99,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.190.000,00	8.887.500,00	(302.500,00)	96,70	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.190.000,00	8.887.500,00	(302.500,00)	96,70	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.190.000,00	8.887.500,00	(302.500,00)	96,70	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.120.000,00	6.065.000,00	(55.000,00)	99,10	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.120.000,00	6.065.000,00	(55.000,00)	99,10	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	6.065.000,00	(55.000,00)	99,10	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	126.650.000,00	123.813.750,00	(2.836.250,00)	97,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	126.650.000,00	123.813.750,00	(2.836.250,00)	97,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.650.000,00	123.813.750,00	(2.836.250,00)	97,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.730.000,00	9.960.000,00	(1.770.000,00)	84,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	11.730.000,00	9.960.000,00	(1.770.000,00)	84,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	11.730.000,00	9.960.000,00	(1.770.000,00)	84,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.730.000,00	9.960.000,00	(1.770.000,00)	84,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.246.016.000,00	1.222.635.762,00	(23.380.238,00)	98,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	88,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	88,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	88,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	266.190.000,00	245.789.443,00	(20.400.557,00)	92,33	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	266.190.000,00	245.789.443,00	(20.400.557,00)	92,33	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.190.000,00	245.789.443,00	(20.400.557,00)	92,33	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	974.826.000,00	972.446.319,00	(2.379.681,00)	99,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	974.826.000,00	972.446.319,00	(2.379.681,00)	99,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.826.000,00	972.446.319,00	(2.379.681,00)	99,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	245.347.800,00	241.822.914,00	(3.524.886,00)	98,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	65.889.800,00	64.019.914,00	(1.869.886,00)	97,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.889.800,00	64.019.914,00	(1.869.886,00)	97,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.889.800,00	64.019.914,00	(1.869.886,00)	97,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	50.546.000,00	50.523.500,00	(22.500,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.546.000,00	50.523.500,00	(22.500,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.546.000,00	50.523.500,00	(22.500,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	121.660.000,00	120.059.500,00	(1.600.500,00)	98,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	121.660.000,00	120.059.500,00	(1.600.500,00)	98,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.660.000,00	120.059.500,00	(1.600.500,00)	98,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	4.752.000,00	4.720.000,00	(32.000,00)	99,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.752.000,00	4.720.000,00	(32.000,00)	99,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.752.000,00	4.720.000,00	(32.000,00)	99,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	862.978.000,00	753.697.600,00	(109.280.400,00)	87,33	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	689.878.000,00	597.549.600,00	(92.328.400,00)	86,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	10.375.000,00	10.084.000,00	(291.000,00)	97,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.375.000,00	10.084.000,00	(291.000,00)	97,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.375.000,00	10.084.000,00	(291.000,00)	97,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	644.129.000,00	552.972.500,00	(91.156.500,00)	85,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	644.129.000,00	552.972.500,00	(91.156.500,00)	85,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.129.000,00	552.972.500,00	(91.156.500,00)	85,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0005		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	35.374.000,00	34.493.100,00	(880.900,00)	97,50	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.374.000,00	34.493.100,00	(880.900,00)	97,50	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.374.000,00	34.493.100,00	(880.900,00)	97,50	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02		PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002		PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	163.100.000,00	146.148.000,00	(16.952.000,00)	89,60	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	163.100.000,00	146.148.000,00	(16.952.000,00)	89,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	163.100.000,00	146.148.000,00	(16.952.000,00)	89,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.100.000,00	146.148.000,00	(16.952.000,00)	89,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	142.658.000,00	138.800.000,00	(3.858.000,00)	97,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	142.658.000,00	138.800.000,00	(3.858.000,00)	97,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	30.709.000,00	29.628.000,00	(1.081.000,00)	96,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.709.000,00	29.628.000,00	(1.081.000,00)	96,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.709.000,00	29.628.000,00	(1.081.000,00)	96,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	111.949.000,00	109.172.000,00	(2.777.000,00)	97,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.949.000,00	109.172.000,00	(2.777.000,00)	97,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.949.000,00	109.172.000,00	(2.777.000,00)	97,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	471.801.000,00	445.828.623,00	(25.972.377,00)	94,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	43.448.000,00	33.677.250,00	(9.770.750,00)	77,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001		PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	27.520.000,00	23.635.500,00	(3.884.500,00)	85,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.520.000,00	23.635.500,00	(3.884.500,00)	85,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.520.000,00	23.635.500,00	(3.884.500,00)	85,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002		KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	15.928.000,00	10.041.750,00	(5.886.250,00)	63,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.928.000,00	10.041.750,00	(5.886.250,00)	63,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.928.000,00	10.041.750,00	(5.886.250,00)	63,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02		PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7.500.000,00	5.510.000,00	(1.990.000,00)	73,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02.0001		PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7.500.000,00	5.510.000,00	(1.990.000,00)	73,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	5.510.000,00	(1.990.000,00)	73,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	5.510.000,00	(1.990.000,00)	73,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	420.853.000,00	406.641.373,00	(14.211.627,00)	96,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001		KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	15.350.000,00	14.917.500,00	(432.500,00)	97,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.350.000,00	14.917.500,00	(432.500,00)	97,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	14.917.500,00	(432.500,00)	97,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	332.777.000,00	320.981.873,00	(11.795.127,00)	96,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	332.777.000,00	320.981.873,00	(11.795.127,00)	96,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.777.000,00	320.981.873,00	(11.795.127,00)	96,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005		SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	65.226.000,00	63.542.000,00	(1.684.000,00)	97,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	65.226.000,00	63.542.000,00	(1.684.000,00)	97,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.226.000,00	63.542.000,00	(1.684.000,00)	97,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007		KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	48.250.000,00	46.307.000,00	(1.943.000,00)	95,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	48.250.000,00	46.307.000,00	(1.943.000,00)	95,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA	42.500.000,00	40.807.000,00	(1.693.000,00)	96,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.500.000,00	40.807.000,00	(1.693.000,00)	96,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	40.807.000,00	(1.693.000,00)	96,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002		PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	5.750.000,00	5.500.000,00	(250.000,00)	95,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.750.000,00	5.500.000,00	(250.000,00)	95,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.500.000,00	(250.000,00)	95,65	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
Organisasi : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.776.280.500,00	10.906.108.919,00	(870.171.581,00)	92,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.555.533.200,00	4.806.815.211,00	(748.717.989,00)	86,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.575.000,00	18.326.408,00	(248.592,00)	98,66	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.336.000,00	2.334.000,00	(2.000,00)	99,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.336.000,00	2.334.000,00	(2.000,00)	99,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.336.000,00	2.334.000,00	(2.000,00)	99,91	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.754.500,00	1.746.000,00	(8.500,00)	99,51	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.754.500,00	1.746.000,00	(8.500,00)	99,51	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.754.500,00	1.746.000,00	(8.500,00)	99,51	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.623.000,00	1.623.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.623.000,00	1.623.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.623.000,00	1.623.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.605.000,00	1.566.000,00	(39.000,00)	97,57	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.605.000,00	1.566.000,00	(39.000,00)	97,57	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.605.000,00	1.566.000,00	(39.000,00)	97,57	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.628.500,00	3.628.000,00	(500,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.628.500,00	3.628.000,00	(500,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.628.500,00	3.628.000,00	(500,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.878.000,00	4.679.408,00	(198.592,00)	95,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.878.000,00	4.679.408,00	(198.592,00)	95,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.878.000,00	4.679.408,00	(198.592,00)	95,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.674.297.000,00	3.944.718.166,00	(729.578.834,00)	84,39	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.665.291.000,00	3.935.797.166,00	(729.493.834,00)	84,36	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.665.291.000,00	3.935.797.166,00	(729.493.834,00)	84,36	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.665.291.000,00	3.935.797.166,00	(729.493.834,00)	84,36	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	2.500.000,00	2.460.000,00	(40.000,00)	98,40	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.460.000,00	(40.000,00)	98,40	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.460.000,00	(40.000,00)	98,40	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.506.000,00	3.486.000,00	(20.000,00)	99,42	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.506.000,00	3.486.000,00	(20.000,00)	99,42	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.506.000,00	3.486.000,00	(20.000,00)	99,42	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	3.000.000,00	2.975.000,00	(25.000,00)	99,16	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.975.000,00	(25.000,00)	99,16	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.975.000,00	(25.000,00)	99,16	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.782.000,00	1.777.000,00	(5.000,00)	99,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.302.000,00	1.297.000,00	(5.000,00)	99,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.302.000,00	1.297.000,00	(5.000,00)	99,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.302.000,00	1.297.000,00	(5.000,00)	99,61	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	5.997.000,00	(3.000,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	5.997.000,00	(3.000,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.997.000,00	(3.000,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.997.000,00	(3.000,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	301.826.700,00	298.394.818,00	(3.431.882,00)	98,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.342.500,00	4.342.500,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.342.500,00	4.342.500,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.342.500,00	4.342.500,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.866.500,00	15.274.600,00	(591.900,00)	96,26	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.866.500,00	15.274.600,00	(591.900,00)	96,26	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.866.500,00	15.274.600,00	(591.900,00)	96,26	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	60.043.700,00	60.017.530,00	(26.170,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.043.700,00	60.017.530,00	(26.170,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.043.700,00	60.017.530,00	(26.170,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.268.000,00	10.268.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.268.000,00	10.268.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.268.000,00	10.268.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.500.000,00	6.550.000,00	(1.950.000,00)	77,05	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	6.550.000,00	(1.950.000,00)	77,05	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	6.550.000,00	(1.950.000,00)	77,05	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	151.306.000,00	151.107.188,00	(198.812,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	151.306.000,00	151.107.188,00	(198.812,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.306.000,00	151.107.188,00	(198.812,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	51.500.000,00	50.835.000,00	(665.000,00)	98,70	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	51.500.000,00	50.835.000,00	(665.000,00)	98,70	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	50.835.000,00	(665.000,00)	98,70	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	29.300.000,00	29.070.000,00	(230.000,00)	99,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.300.000,00	29.070.000,00	(230.000,00)	99,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	275.000,00	270.000,00	(5.000,00)	98,18	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	270.000,00	(5.000,00)	98,18	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	29.025.000,00	28.800.000,00	(225.000,00)	99,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.025.000,00	28.800.000,00	(225.000,00)	99,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	430.540.000,00	419.521.460,00	(11.018.540,00)	97,44	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	148.920.000,00	137.973.460,00	(10.946.540,00)	92,64	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.920.000,00	137.973.460,00	(10.946.540,00)	92,64	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.920.000,00	137.973.460,00	(10.946.540,00)	92,64	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.860.000,00	12.800.000,00	(60.000,00)	99,53	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.860.000,00	12.800.000,00	(60.000,00)	99,53	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.860.000,00	12.800.000,00	(60.000,00)	99,53	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	266.760.000,00	266.748.000,00	(12.000,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	266.760.000,00	266.748.000,00	(12.000,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.760.000,00	266.748.000,00	(12.000,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.212.500,00	89.010.359,00	(4.202.141,00)	95,49	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	81.152.000,00	77.060.859,00	(4.091.141,00)	94,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.152.000,00	77.060.859,00	(4.091.141,00)	94,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.152.000,00	77.060.859,00	(4.091.141,00)	94,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.060.500,00	1.950.000,00	(110.500,00)	94,63	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.060.500,00	1.950.000,00	(110.500,00)	94,63	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.060.500,00	1.950.000,00	(110.500,00)	94,63	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	9.999.500,00	(500,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.500,00	(500,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.500,00	(500,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	1.600.784.000,00	1.599.567.722,00	(1.216.278,00)	99,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	1.600.784.000,00	1.599.567.722,00	(1.216.278,00)	99,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0006		FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA	1.600.784.000,00	1.599.567.722,00	(1.216.278,00)	99,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.784.000,00	1.599.567.722,00	(1.216.278,00)	99,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.784.000,00	1.599.567.722,00	(1.216.278,00)	99,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	97.497.000,00	89.086.950,00	(8.410.050,00)	91,37	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA	97.497.000,00	89.086.950,00	(8.410.050,00)	91,37	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0001		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN/KOTA	51.692.000,00	51.611.950,00	(80.050,00)	99,84	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.692.000,00	51.611.950,00	(80.050,00)	99,84	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.692.000,00	51.611.950,00	(80.050,00)	99,84	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA	13.589.000,00	7.033.000,00	(6.556.000,00)	51,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.589.000,00	7.033.000,00	(6.556.000,00)	51,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.589.000,00	7.033.000,00	(6.556.000,00)	51,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003		FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	32.216.000,00	30.442.000,00	(1.774.000,00)	94,49	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.216.000,00	30.442.000,00	(1.774.000,00)	94,49	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.216.000,00	30.442.000,00	(1.774.000,00)	94,49	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.376.157.000,00	3.324.361.036,00	(51.795.964,00)	98,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.376.157.000,00	3.324.361.036,00	(51.795.964,00)	98,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001		FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.770.197.000,00	2.737.971.080,00	(32.225.920,00)	98,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.770.197.000,00	2.737.971.080,00	(32.225.920,00)	98,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.770.197.000,00	2.737.971.080,00	(32.225.920,00)	98,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA	22.259.000,00	21.713.000,00	(546.000,00)	97,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.259.000,00	21.713.000,00	(546.000,00)	97,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.259.000,00	21.713.000,00	(546.000,00)	97,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	11.190.000,00	10.990.000,00	(200.000,00)	98,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.190.000,00	10.990.000,00	(200.000,00)	98,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.190.000,00	10.990.000,00	(200.000,00)	98,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	155.594.000,00	154.968.500,00	(625.500,00)	99,59	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	155.594.000,00	154.968.500,00	(625.500,00)	99,59	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.594.000,00	154.968.500,00	(625.500,00)	99,59	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009		PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	54.811.000,00	52.496.600,00	(2.314.400,00)	95,77	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	54.811.000,00	52.496.600,00	(2.314.400,00)	95,77	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.811.000,00	52.496.600,00	(2.314.400,00)	95,77	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0010		FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	7.780.000,00	7.580.000,00	(200.000,00)	97,42	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	7.780.000,00	7.580.000,00	(200.000,00)	97,42	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.780.000,00	7.580.000,00	(200.000,00)	97,42	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011		FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA	9.722.000,00	9.722.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.722.000,00	9.722.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.722.000,00	9.722.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0012		FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	195.361.000,00	187.875.856,00	(7.485.144,00)	96,16	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	195.361.000,00	187.875.856,00	(7.485.144,00)	96,16	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.361.000,00	187.875.856,00	(7.485.144,00)	96,16	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013		FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	11.030.000,00	10.316.000,00	(714.000,00)	93,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	11.030.000,00	10.316.000,00	(714.000,00)	93,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.030.000,00	10.316.000,00	(714.000,00)	93,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014		PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD	112.880.000,00	106.310.000,00	(6.570.000,00)	94,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	112.880.000,00	106.310.000,00	(6.570.000,00)	94,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.880.000,00	106.310.000,00	(6.570.000,00)	94,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0015		FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	12.108.000,00	11.428.000,00	(680.000,00)	94,38	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	12.108.000,00	11.428.000,00	(680.000,00)	94,38	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.108.000,00	11.428.000,00	(680.000,00)	94,38	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016		FASILITASI PEMBINAAN LAPORAN KEPALA DESA	6.350.000,00	6.350.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	6.350.000,00	6.350.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	6.350.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018		FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	6.875.000,00	6.640.000,00	(235.000,00)	96,58	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	6.875.000,00	6.640.000,00	(235.000,00)	96,58	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	6.640.000,00	(235.000,00)	96,58	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.146.309.300,00	1.086.278.000,00	(60.031.300,00)	94,76	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.146.309.300,00	1.086.278.000,00	(60.031.300,00)	94,76	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002		FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	40.933.500,00	24.174.500,00	(16.759.000,00)	59,05	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.933.500,00	24.174.500,00	(16.759.000,00)	59,05	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.933.500,00	24.174.500,00	(16.759.000,00)	59,05	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	550.000.000,00	527.429.500,00	(22.570.500,00)	95,89	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	550.000.000,00	527.429.500,00	(22.570.500,00)	95,89	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	527.429.500,00	(22.570.500,00)	95,89	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	173.674.600,00	162.837.500,00	(10.837.100,00)	93,76	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	173.674.600,00	162.837.500,00	(10.837.100,00)	93,76	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.674.600,00	162.837.500,00	(10.837.100,00)	93,76	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006		FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	30.225.000,00	30.225.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.225.000,00	30.225.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.225.000,00	30.225.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007		FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	350.076.200,00	340.211.500,00	(9.864.700,00)	97,18	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	350.076.200,00	340.211.500,00	(9.864.700,00)	97,18	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.076.200,00	340.211.500,00	(9.864.700,00)	97,18	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**
Organisasi : **Dinas Perhubungan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	726.500.000,00	712.563.000,00	(13.937.000,00)	98,08	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	726.500.000,00	712.563.000,00	(13.937.000,00)	98,08	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	726.500.000,00	712.563.000,00	(13.937.000,00)	98,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	14.280.623.600,00	13.864.930.272,00	(415.693.328,00)	97,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.022.883.300,00	11.634.009.349,00	(388.873.951,00)	96,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	157.063.800,00	153.363.000,00	(3.700.800,00)	97,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	36.651.000,00	35.956.000,00	(695.000,00)	98,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.651.000,00	35.956.000,00	(695.000,00)	98,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.651.000,00	35.956.000,00	(695.000,00)	98,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.120.000,00	11.115.000,00	(5.000,00)	99,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.120.000,00	11.115.000,00	(5.000,00)	99,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.120.000,00	11.115.000,00	(5.000,00)	99,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	109.292.800,00	106.292.000,00	(3.000.800,00)	97,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	109.292.800,00	106.292.000,00	(3.000.800,00)	97,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.292.800,00	106.292.000,00	(3.000.800,00)	97,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.578.906.788,00	8.269.974.686,00	(308.932.102,00)	96,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.575.684.500,00	8.266.752.686,00	(308.931.814,00)	96,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.575.684.500,00	8.266.752.686,00	(308.931.814,00)	96,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.575.684.500,00	8.266.752.686,00	(308.931.814,00)	96,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.154.000,00	1.154.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.154.000,00	1.154.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.000,00	1.154.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.068.288,00	2.068.000,00	(288,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.068.288,00	2.068.000,00	(288,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.068.288,00	2.068.000,00	(288,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	103.812.000,00	103.802.000,00	(10.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	103.812.000,00	103.802.000,00	(10.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	103.812.000,00	103.802.000,00	(10.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.812.000,00	103.802.000,00	(10.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	334.844.000,00	331.886.920,00	(2.957.080,00)	99,11	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.373.000,00	14.373.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.373.000,00	14.373.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.373.000,00	14.373.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	89.747.000,00	89.577.000,00	(170.000,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.747.000,00	89.577.000,00	(170.000,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.747.000,00	89.577.000,00	(170.000,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60.134.000,00	57.687.590,00	(2.446.410,00)	95,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	60.134.000,00	57.687.590,00	(2.446.410,00)	95,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.134.000,00	57.687.590,00	(2.446.410,00)	95,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	163.440.000,00	163.099.330,00	(340.670,00)	99,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	163.440.000,00	163.099.330,00	(340.670,00)	99,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.440.000,00	163.099.330,00	(340.670,00)	99,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	127.266.220,00	122.767.000,00	(4.499.220,00)	96,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	46.879.000,00	45.320.000,00	(1.559.000,00)	96,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	46.879.000,00	45.320.000,00	(1.559.000,00)	96,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.879.000,00	45.320.000,00	(1.559.000,00)	96,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	41.731.760,00	41.577.000,00	(154.760,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	41.731.760,00	41.577.000,00	(154.760,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.731.760,00	41.577.000,00	(154.760,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0007		PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	38.655.460,00	35.870.000,00	(2.785.460,00)	92,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	38.655.460,00	35.870.000,00	(2.785.460,00)	92,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.655.460,00	35.870.000,00	(2.785.460,00)	92,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.554.980.000,00	2.491.743.423,00	(63.236.577,00)	97,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	242.402.000,00	237.138.923,00	(5.263.077,00)	97,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	242.402.000,00	237.138.923,00	(5.263.077,00)	97,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.402.000,00	237.138.923,00	(5.263.077,00)	97,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.310.078.000,00	2.252.104.500,00	(57.973.500,00)	97,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.310.078.000,00	2.252.104.500,00	(57.973.500,00)	97,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.310.078.000,00	2.252.104.500,00	(57.973.500,00)	97,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	166.010.492,00	160.472.320,00	(5.538.172,00)	96,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	114.460.000,00	109.021.300,00	(5.438.700,00)	95,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	114.460.000,00	109.021.300,00	(5.438.700,00)	95,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.460.000,00	109.021.300,00	(5.438.700,00)	95,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	9.475.000,00	9.475.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.475.000,00	9.475.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.475.000,00	9.475.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	16.355.492,00	16.321.020,00	(34.472,00)	99,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	16.355.492,00	16.321.020,00	(34.472,00)	99,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.355.492,00	16.321.020,00	(34.472,00)	99,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.720.000,00	15.655.000,00	(65.000,00)	99,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	15.720.000,00	15.655.000,00	(65.000,00)	99,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	15.655.000,00	(65.000,00)	99,58	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.257.740.300,00	2.230.920.923,00	(26.819.377,00)	98,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01		PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	63.341.000,00	62.946.757,00	(394.243,00)	99,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0001		PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	1.877.000,00	1.731.257,00	(145.743,00)	92,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.877.000,00	1.731.257,00	(145.743,00)	92,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.877.000,00	1.731.257,00	(145.743,00)	92,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0002		PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	61.464.000,00	61.215.500,00	(248.500,00)	99,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.464.000,00	61.215.500,00	(248.500,00)	99,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.464.000,00	61.215.500,00	(248.500,00)	99,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	499.056.000,00	496.959.094,00	(2.096.906,00)	99,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001		PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	273.125.000,00	271.606.833,00	(1.518.167,00)	99,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.525.000,00	25.917.500,00	(607.500,00)	97,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.525.000,00	25.917.500,00	(607.500,00)	97,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	246.600.000,00	245.689.333,00	(910.667,00)	99,63	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	149.286.337,00	(713.663,00)	99,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.600.000,00	96.402.996,00	(197.004,00)	99,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN	122.195.000,00	121.740.011,00	(454.989,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	122.195.000,00	121.740.011,00	(454.989,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.195.000,00	121.740.011,00	(454.989,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	102.116.000,00	101.992.250,00	(123.750,00)	99,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	102.116.000,00	101.992.250,00	(123.750,00)	99,87	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.116.000,00	101.992.250,00	(123.750,00)	99,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03		PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	234.311.000,00	232.776.025,00	(1.534.975,00)	99,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG)	234.311.000,00	232.776.025,00	(1.534.975,00)	99,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	41.026.000,00	39.866.380,00	(1.159.620,00)	97,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.026.000,00	39.866.380,00	(1.159.620,00)	97,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	5.2	BELANJA MODAL	193.285.000,00	192.909.645,00	(375.355,00)	99,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.285.000,00	5.285.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	188.000.000,00	187.624.645,00	(375.355,00)	99,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	171.599.000,00	170.122.140,00	(1.476.860,00)	99,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	171.599.000,00	170.122.140,00	(1.476.860,00)	99,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	171.599.000,00	170.122.140,00	(1.476.860,00)	99,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.599.000,00	170.122.140,00	(1.476.860,00)	99,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	397.028.500,00	394.522.750,00	(2.505.750,00)	99,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	9.528.500,00	8.502.000,00	(1.026.500,00)	89,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.528.500,00	8.502.000,00	(1.026.500,00)	89,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.528.500,00	8.502.000,00	(1.026.500,00)	89,22	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004		PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0005		SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	300.000.000,00	298.520.750,00	(1.479.250,00)	99,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	298.520.750,00	(1.479.250,00)	99,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	298.520.750,00	(1.479.250,00)	99,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	251.690.000,00	251.680.907,00	(9.093,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	1.510.000,00	1.510.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.510.000,00	1.510.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	1.510.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015		FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	7.015.000,00	7.015.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1	BELANJA OPERASI	7.015.000,00	7.015.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.015.000,00	7.015.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017		PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	243.165.000,00	243.155.907,00	(9.093,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1	BELANJA OPERASI	243.165.000,00	243.155.907,00	(9.093,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.165.000,00	243.155.907,00	(9.093,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07		PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	8.785.000,00	8.607.150,00	(177.850,00)	97,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006		PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS ANDALALIN	8.785.000,00	8.607.150,00	(177.850,00)	97,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.785.000,00	8.607.150,00	(177.850,00)	97,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.785.000,00	8.607.150,00	(177.850,00)	97,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08		AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	48.758.000,00	48.758.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004		PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA	23.248.500,00	23.248.500,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.248.500,00	23.248.500,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.248.500,00	23.248.500,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0006		PELAKSANAAN INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN PADA TERMINAL TIPE C	25.509.500,00	25.509.500,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.509.500,00	25.509.500,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.509.500,00	25.509.500,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	187.642.000,00	187.642.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	187.642.000,00	187.642.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	187.642.000,00	187.642.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.642.000,00	187.642.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	390.013.800,00	371.907.100,00	(18.106.700,00)	95,35	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	305.367.800,00	289.624.500,00	(15.743.300,00)	94,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	305.367.800,00	289.624.500,00	(15.743.300,00)	94,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.367.800,00	123.424.500,00	(1.943.300,00)	98,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	180.000.000,00	166.200.000,00	(13.800.000,00)	92,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0003		FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	84.646.000,00	82.282.600,00	(2.363.400,00)	97,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.646.000,00	82.282.600,00	(2.363.400,00)	97,20	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.646.000,00	82.282.600,00	(2.363.400,00)	97,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16		PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.516.000,00	4.999.000,00	(517.000,00)	90,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16.0002		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI TARIF KELAS EKONOMI ANGKUTAN ORANG DAN ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.516.000,00	4.999.000,00	(517.000,00)	90,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.516.000,00	4.999.000,00	(517.000,00)	90,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.516.000,00	4.999.000,00	(517.000,00)	90,62	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
Organisasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,24	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,24	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,24	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.978.489.000,00	13.606.617.913,00	(371.871.087,00)	97,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.836.509.400,00	8.521.273.074,00	(315.236.326,00)	96,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	144.340.000,00	144.106.000,00	(234.000,00)	99,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14.410.000,00	14.292.000,00	(118.000,00)	99,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.410.000,00	14.292.000,00	(118.000,00)	99,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.410.000,00	14.292.000,00	(118.000,00)	99,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	8.715.000,00	8.705.000,00	(10.000,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.715.000,00	8.705.000,00	(10.000,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.715.000,00	8.705.000,00	(10.000,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.355.000,00	4.355.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.355.000,00	4.355.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.355.000,00	4.355.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	116.860.000,00	116.754.000,00	(106.000,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	116.860.000,00	116.754.000,00	(106.000,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.860.000,00	116.754.000,00	(106.000,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.466.285.000,00	5.221.870.523,00	(244.414.477,00)	95,52	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.456.233.000,00	5.211.818.523,00	(244.414.477,00)	95,52	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.456.233.000,00	5.211.818.523,00	(244.414.477,00)	95,52	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.456.233.000,00	5.211.818.523,00	(244.414.477,00)	95,52	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	26.000,00	26.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.000,00	26.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000,00	26.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	26.000,00	26.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	26.000,00	26.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000,00	26.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.041.448.334,00	1.033.509.594,00	(7.938.740,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	744.040.334,00	736.299.901,00	(7.740.433,00)	98,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	744.040.334,00	736.299.901,00	(7.740.433,00)	98,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	744.040.334,00	736.299.901,00	(7.740.433,00)	98,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	297.408.000,00	297.209.693,00	(198.307,00)	99,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	297.408.000,00	297.209.693,00	(198.307,00)	99,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.408.000,00	297.209.693,00	(198.307,00)	99,93	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	260.530.900,00	259.261.339,00	(1.269.561,00)	99,51	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.720.000,00	5.200.000,00	(520.000,00)	90,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.720.000,00	5.200.000,00	(520.000,00)	90,90	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	5.200.000,00	(520.000,00)	90,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	31.175.000,00	31.112.344,00	(62.656,00)	99,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.175.000,00	31.112.344,00	(62.656,00)	99,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.175.000,00	31.112.344,00	(62.656,00)	99,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.522.000,00	18.425.900,00	(96.100,00)	99,48	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.522.000,00	18.425.900,00	(96.100,00)	99,48	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.522.000,00	18.425.900,00	(96.100,00)	99,48	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.960.000,00	12.960.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.960.000,00	12.960.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	12.960.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	33.017.000,00	33.009.500,00	(7.500,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	33.017.000,00	33.009.500,00	(7.500,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.017.000,00	33.009.500,00	(7.500,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	155.186.900,00	154.603.595,00	(583.305,00)	99,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	155.186.900,00	154.603.595,00	(583.305,00)	99,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.186.900,00	154.603.595,00	(583.305,00)	99,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	32.478.829,00	32.428.750,00	(50.079,00)	99,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	28.900.000,00	28.878.750,00	(21.250,00)	99,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	28.900.000,00	28.878.750,00	(21.250,00)	99,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.900.000,00	28.878.750,00	(21.250,00)	99,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.578.829,00	3.550.000,00	(28.829,00)	99,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.578.829,00	3.550.000,00	(28.829,00)	99,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.578.829,00	3.550.000,00	(28.829,00)	99,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.503.553.000,00	1.442.957.583,00	(60.595.417,00)	95,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	23.040.000,00	23.033.000,00	(7.000,00)	99,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.040.000,00	23.033.000,00	(7.000,00)	99,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.040.000,00	23.033.000,00	(7.000,00)	99,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	338.640.000,00	318.935.551,00	(19.704.449,00)	94,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	338.640.000,00	318.935.551,00	(19.704.449,00)	94,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.640.000,00	318.935.551,00	(19.704.449,00)	94,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	53.168.000,00	52.186.000,00	(982.000,00)	98,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.168.000,00	52.186.000,00	(982.000,00)	98,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.168.000,00	52.186.000,00	(982.000,00)	98,15	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.088.705.000,00	1.048.803.032,00	(39.901.968,00)	96,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.088.705.000,00	1.048.803.032,00	(39.901.968,00)	96,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.088.705.000,00	1.048.803.032,00	(39.901.968,00)	96,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	387.873.337,00	387.139.285,00	(734.052,00)	99,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	135.282.337,00	134.775.135,00	(507.202,00)	99,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.282.337,00	134.775.135,00	(507.202,00)	99,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.282.337,00	134.775.135,00	(507.202,00)	99,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	66.591.000,00	66.571.150,00	(19.850,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	66.591.000,00	66.571.150,00	(19.850,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.591.000,00	66.571.150,00	(19.850,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	186.000.000,00	185.793.000,00	(207.000,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	186.000.000,00	185.793.000,00	(207.000,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	185.793.000,00	(207.000,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.425.000.000,00	2.380.824.289,00	(44.175.711,00)	98,17	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.425.000.000,00	2.380.824.289,00	(44.175.711,00)	98,17	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0002		MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	160.000.000,00	159.426.200,00	(573.800,00)	99,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	159.426.200,00	(573.800,00)	99,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	159.426.200,00	(573.800,00)	99,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0003		MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRIORITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	26.000.000,00	25.754.300,00	(245.700,00)	99,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	25.754.300,00	(245.700,00)	99,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	25.754.300,00	(245.700,00)	99,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0004		PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	300.500.000,00	297.116.000,00	(3.384.000,00)	98,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	300.500.000,00	297.116.000,00	(3.384.000,00)	98,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.500.000,00	297.116.000,00	(3.384.000,00)	98,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	480.576.800,00	473.760.493,00	(6.816.307,00)	98,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	480.576.800,00	473.760.493,00	(6.816.307,00)	98,58	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.576.800,00	473.760.493,00	(6.816.307,00)	98,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	85.000.000,00	83.284.500,00	(1.715.500,00)	97,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	83.284.500,00	(1.715.500,00)	97,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	83.284.500,00	(1.715.500,00)	97,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007		LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	881.559.425,00	860.800.949,00	(20.758.476,00)	97,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	881.559.425,00	860.800.949,00	(20.758.476,00)	97,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	856.559.425,00	835.800.949,00	(20.758.476,00)	97,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0008		KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	55.000.000,00	52.977.618,00	(2.022.382,00)	96,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	52.977.618,00	(2.022.382,00)	96,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	52.977.618,00	(2.022.382,00)	96,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0010		PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK	55.500.000,00	52.365.579,00	(3.134.421,00)	94,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	55.500.000,00	52.365.579,00	(3.134.421,00)	94,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	52.365.579,00	(3.134.421,00)	94,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012		PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	93.000.000,00	91.068.650,00	(1.931.350,00)	97,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	93.000.000,00	91.068.650,00	(1.931.350,00)	97,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	91.068.650,00	(1.931.350,00)	97,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013		PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	287.863.775,00	284.270.000,00	(3.593.775,00)	98,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	41.750.000,00	41.520.000,00	(230.000,00)	99,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.750.000,00	41.520.000,00	(230.000,00)	99,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	246.113.775,00	242.750.000,00	(3.363.775,00)	98,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.113.775,00	242.750.000,00	(3.363.775,00)	98,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.716.979.600,00	2.704.520.550,00	(12.459.050,00)	99,54	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.130.491.200,00	2.121.879.176,00	(8.612.024,00)	99,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003		PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	2.130.491.200,00	2.121.879.176,00	(8.612.024,00)	99,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.130.491.200,00	2.121.879.176,00	(8.612.024,00)	99,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.130.491.200,00	2.121.879.176,00	(8.612.024,00)	99,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	586.488.400,00	582.641.374,00	(3.847.026,00)	99,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0001		PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.000,00	108.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.000,00	108.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000,00	108.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007		PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	422.095.000,00	418.867.566,00	(3.227.434,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	422.095.000,00	418.867.566,00	(3.227.434,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.095.000,00	418.867.566,00	(3.227.434,00)	99,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008		PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	100.000,00	99.300,00	(700,00)	99,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	99.300,00	(700,00)	99,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	99.300,00	(700,00)	99,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0009		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	163.985.400,00	163.370.008,00	(615.392,00)	99,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	163.985.400,00	163.370.008,00	(615.392,00)	99,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.985.400,00	63.370.008,00	(615.392,00)	99,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0009	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	100.000,00	97.500,00	(2.500,00)	97,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	97.500,00	(2.500,00)	97,50	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	97.500,00	(2.500,00)	97,50	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**
Organisasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,24	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,24	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,24	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	128.373.000,00	127.221.469,00	(1.151.531,00)	99,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	128.373.000,00	127.221.469,00	(1.151.531,00)	99,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.373.000,00	127.221.469,00	(1.151.531,00)	99,10	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	30.000.000,00	29.314.573,00	(685.427,00)	97,71	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.314.573,00	(685.427,00)	97,71	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.314.573,00	(685.427,00)	97,71	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI	68.373.000,00	68.119.586,00	(253.414,00)	99,62	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.373.000,00	68.119.586,00	(253.414,00)	99,62	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.373.000,00	68.119.586,00	(253.414,00)	99,62	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003		MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	30.000.000,00	29.787.310,00	(212.690,00)	99,29	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.787.310,00	(212.690,00)	99,29	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.787.310,00	(212.690,00)	99,29	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**
Organisasi : **Dinas Komunikasi dan Informatika**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,24	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,24	
	2.16.2.20.2.21.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	103.246.524,00	3.246.524,00	103,24	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	277.137.600,00	275.083.965,00	(2.053.635,00)	99,25	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	277.137.600,00	275.083.965,00	(2.053.635,00)	99,25	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	277.137.600,00	275.083.965,00	(2.053.635,00)	99,25	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	248.983.000,00	248.219.676,00	(763.324,00)	99,69	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	248.983.000,00	248.219.676,00	(763.324,00)	99,69	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.983.000,00	248.219.676,00	(763.324,00)	99,69	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.154.600,00	26.864.289,00	(1.290.311,00)	95,41	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.654.600,00	26.373.000,00	(1.281.600,00)	95,36	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.654.600,00	26.373.000,00	(1.281.600,00)	95,36	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	500.000,00	491.289,00	(8.711,00)	98,25	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000,00	491.289,00	(8.711,00)	98,25	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**
Organisasi : **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	11.060.000.000,00	9.497.812.202,00	(1.562.187.798,00)	85,87	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.060.000.000,00	9.497.812.202,00	(1.562.187.798,00)	85,87	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	11.000.000.000,00	9.340.702.202,00	(1.659.297.798,00)	84,91	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.000.000,00	157.110.000,00	97.110.000,00	261,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	26.242.441.000,00	24.625.654.199,00	(1.616.786.801,00)	93,83	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.899.621.000,00	22.343.097.729,00	(1.556.523.271,00)	93,48	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.661.250,00	20.531.100,00	(1.130.150,00)	94,78	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.556.000,00	4.553.000,00	(3.000,00)	99,93	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.556.000,00	4.553.000,00	(3.000,00)	99,93	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.556.000,00	4.553.000,00	(3.000,00)	99,93	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.588.500,00	2.576.500,00	(12.000,00)	99,53	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.588.500,00	2.576.500,00	(12.000,00)	99,53	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.588.500,00	2.576.500,00	(12.000,00)	99,53	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.620.500,00	2.477.500,00	(143.000,00)	94,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.620.500,00	2.477.500,00	(143.000,00)	94,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.620.500,00	2.477.500,00	(143.000,00)	94,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.379.000,00	2.154.500,00	(224.500,00)	90,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.379.000,00	2.154.500,00	(224.500,00)	90,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.379.000,00	2.154.500,00	(224.500,00)	90,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.664.000,00	2.034.500,00	(629.500,00)	76,37	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.664.000,00	2.034.500,00	(629.500,00)	76,37	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.664.000,00	2.034.500,00	(629.500,00)	76,37	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.202.500,00	4.112.350,00	(90.150,00)	97,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.202.500,00	4.112.350,00	(90.150,00)	97,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.202.500,00	4.112.350,00	(90.150,00)	97,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.650.750,00	2.622.750,00	(28.000,00)	98,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.650.750,00	2.622.750,00	(28.000,00)	98,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.750,00	2.622.750,00	(28.000,00)	98,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	19.591.849.250,00	18.067.708.055,00	(1.524.141.195,00)	92,22	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	19.585.621.000,00	18.061.556.805,00	(1.524.064.195,00)	92,21	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.585.621.000,00	18.061.556.805,00	(1.524.064.195,00)	92,21	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	19.585.621.000,00	18.061.556.805,00	(1.524.064.195,00)	92,21	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.059.250,00	2.059.250,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.059.250,00	2.059.250,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.059.250,00	2.059.250,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.812.500,00	2.774.500,00	(38.000,00)	98,64	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.812.500,00	2.774.500,00	(38.000,00)	98,64	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.812.500,00	2.774.500,00	(38.000,00)	98,64	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.356.500,00	1.317.500,00	(39.000,00)	97,12	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.356.500,00	1.317.500,00	(39.000,00)	97,12	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.356.500,00	1.317.500,00	(39.000,00)	97,12	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.067.500,00	1.950.250,00	(117.250,00)	94,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.067.500,00	1.950.250,00	(117.250,00)	94,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.067.500,00	1.950.250,00	(117.250,00)	94,32	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.067.500,00	1.950.250,00	(117.250,00)	94,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	230.754.000,00	226.280.000,00	(4.474.000,00)	98,06	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	230.754.000,00	226.280.000,00	(4.474.000,00)	98,06	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	230.754.000,00	226.280.000,00	(4.474.000,00)	98,06	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.754.000,00	226.280.000,00	(4.474.000,00)	98,06	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	654.593.400,00	650.784.850,00	(3.808.550,00)	99,41	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.475.000,00	6.412.500,00	(62.500,00)	99,03	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.475.000,00	6.412.500,00	(62.500,00)	99,03	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.475.000,00	6.412.500,00	(62.500,00)	99,03	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	112.900.000,00	111.437.700,00	(1.462.300,00)	98,70	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	112.900.000,00	111.437.700,00	(1.462.300,00)	98,70	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.900.000,00	111.437.700,00	(1.462.300,00)	98,70	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	81.899.000,00	81.840.000,00	(59.000,00)	99,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	81.899.000,00	81.840.000,00	(59.000,00)	99,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.899.000,00	81.840.000,00	(59.000,00)	99,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	453.319.400,00	451.094.650,00	(2.224.750,00)	99,50	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	453.319.400,00	451.094.650,00	(2.224.750,00)	99,50	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.319.400,00	451.094.650,00	(2.224.750,00)	99,50	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	170.691.400,00	169.841.400,00	(850.000,00)	99,50	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	23.176.800,00	23.176.800,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	23.176.800,00	23.176.800,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.176.800,00	23.176.800,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	147.514.600,00	146.664.600,00	(850.000,00)	99,42	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	145.014.600,00	144.164.600,00	(850.000,00)	99,41	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.014.600,00	144.164.600,00	(850.000,00)	99,41	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.865.638.200,00	2.852.733.575,00	(12.904.625,00)	99,54	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	443.070.000,00	437.428.575,00	(5.641.425,00)	98,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	443.070.000,00	437.428.575,00	(5.641.425,00)	98,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.070.000,00	437.428.575,00	(5.641.425,00)	98,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	145.193.200,00	145.130.000,00	(63.200,00)	99,95	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	145.193.200,00	145.130.000,00	(63.200,00)	99,95	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.193.200,00	145.130.000,00	(63.200,00)	99,95	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.277.375.000,00	2.270.175.000,00	(7.200.000,00)	99,68	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.277.375.000,00	2.270.175.000,00	(7.200.000,00)	99,68	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.277.375.000,00	2.270.175.000,00	(7.200.000,00)	99,68	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	362.366.000,00	353.268.499,00	(9.097.501,00)	97,48	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	151.846.000,00	143.749.554,00	(8.096.446,00)	94,66	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	151.846.000,00	143.749.554,00	(8.096.446,00)	94,66	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.846.000,00	143.749.554,00	(8.096.446,00)	94,66	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	210.520.000,00	209.518.945,00	(1.001.055,00)	99,52	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	210.520.000,00	209.518.945,00	(1.001.055,00)	99,52	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.520.000,00	209.518.945,00	(1.001.055,00)	99,52	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	231.000.000,00	229.086.000,00	(1.914.000,00)	99,17	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	231.000.000,00	229.086.000,00	(1.914.000,00)	99,17	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0003		PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.000.000,00	79.086.000,00	(1.914.000,00)	97,63	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	79.086.000,00	(1.914.000,00)	97,63	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	79.086.000,00	(1.914.000,00)	97,63	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20.320.000,00	20.310.500,00	(9.500,00)	99,95	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.320.000,00	20.310.500,00	(9.500,00)	99,95	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0003		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI MELIPUTI TATA KELOLA, PROFIL RISIKO, KINERJA KEUANGAN, DAN PERMODALAN	20.320.000,00	20.310.500,00	(9.500,00)	99,95	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.320.000,00	20.310.500,00	(9.500,00)	99,95	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.320.000,00	20.310.500,00	(9.500,00)	99,95	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	287.649.000,00	287.649.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	287.649.000,00	287.649.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	287.649.000,00	287.649.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	287.649.000,00	287.649.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.649.000,00	287.649.000,00	-	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	76.000.000,00	73.967.970,00	(2.032.030,00)	97,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	76.000.000,00	73.967.970,00	(2.032.030,00)	97,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	76.000.000,00	73.967.970,00	(2.032.030,00)	97,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	76.000.000,00	73.967.970,00	(2.032.030,00)	97,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	73.967.970,00	(2.032.030,00)	97,32	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.727.851.000,00	1.671.543.000,00	(56.308.000,00)	96,74	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	1.727.851.000,00	1.671.543.000,00	(56.308.000,00)	96,74	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0002		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	1.727.851.000,00	1.671.543.000,00	(56.308.000,00)	96,74	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.727.851.000,00	1.671.543.000,00	(56.308.000,00)	96,74	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.351.000,00	578.043.000,00	(2.308.000,00)	99,60	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.147.500.000,00	1.093.500.000,00	(54.000.000,00)	95,29	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**
Organisasi : **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	11.060.000.000,00	9.497.812.202,00	(1.562.187.798,00)	85,87	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.060.000.000,00	9.497.812.202,00	(1.562.187.798,00)	85,87	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	11.000.000.000,00	9.340.702.202,00	(1.659.297.798,00)	84,91	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.000.000,00	157.110.000,00	97.110.000,00	261,85	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.210.000.000,00	2.199.042.128,00	(10.957.872,00)	99,50	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06		PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0003		PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA TERHADAP PENGGUNA AKHIR BAHAN BERBAHAYA (PA-B2) MAUPUN PRODUSEN B2 (P-B2)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.430.000.000,00	1.421.653.806,00	(8.346.194,00)	99,41	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	950.000.000,00	944.334.086,00	(5.665.914,00)	99,40	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	950.000.000,00	944.334.086,00	(5.665.914,00)	99,40	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	950.000.000,00	944.334.086,00	(5.665.914,00)	99,40	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000,00	944.334.086,00	(5.665.914,00)	99,40	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02		PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	480.000.000,00	477.319.720,00	(2.680.280,00)	99,44	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001		PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	480.000.000,00	477.319.720,00	(2.680.280,00)	99,44	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	480.000.000,00	477.319.720,00	(2.680.280,00)	99,44	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	477.319.720,00	(2.680.280,00)	99,44	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	321.000.000,00	319.980.500,00	(1.019.500,00)	99,68	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01		MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	75.000.000,00	73.980.500,00	(1.019.500,00)	98,64	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	75.000.000,00	73.980.500,00	(1.019.500,00)	98,64	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	73.980.500,00	(1.019.500,00)	98,64	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.980.500,00	(1.019.500,00)	98,64	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	242.000.000,00	242.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0003		PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03		PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0002		PENGAWASAN PENGADAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	250.000.000,00	248.893.071,00	(1.106.929,00)	99,55	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	250.000.000,00	248.893.071,00	(1.106.929,00)	99,55	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0002		PAMERAN DAGANG NASIONAL	120.000.000,00	119.668.825,00	(331.175,00)	99,72	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.668.825,00	(331.175,00)	99,72	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.668.825,00	(331.175,00)	99,72	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0003		PAMERAN DAGANG LOKAL	95.000.000,00	94.610.000,00	(390.000,00)	99,58	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	94.610.000,00	(390.000,00)	99,58	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	94.610.000,00	(390.000,00)	99,58	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0005		PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR	35.000.000,00	34.614.246,00	(385.754,00)	98,89	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.614.246,00	(385.754,00)	98,89	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.614.246,00	(385.754,00)	98,89	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	69.000.000,00	68.559.751,00	(440.249,00)	99,36	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	69.000.000,00	68.559.751,00	(440.249,00)	99,36	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	65.000.000,00	64.559.751,00	(440.249,00)	99,32	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	64.559.751,00	(440.249,00)	99,32	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.559.751,00	(440.249,00)	99,32	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	130.000.000,00	129.955.000,00	(45.000,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01		PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	130.000.000,00	129.955.000,00	(45.000,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006		PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	130.000.000,00	129.955.000,00	(45.000,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.955.000,00	(45.000,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.955.000,00	(45.000,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**
Organisasi : **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	11.060.000.000,00	9.497.812.202,00	(1.562.187.798,00)	85,87	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.060.000.000,00	9.497.812.202,00	(1.562.187.798,00)	85,87	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	11.000.000.000,00	9.340.702.202,00	(1.659.297.798,00)	84,91	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.000.000,00	157.110.000,00	97.110.000,00	261,85	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.495.279.000,00	1.418.411.779,00	(76.867.221,00)	94,85	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.240.279.000,00	1.194.905.603,00	(45.373.397,00)	96,34	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1.240.279.000,00	1.194.905.603,00	(45.373.397,00)	96,34	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	390.279.000,00	357.684.000,00	(32.595.000,00)	91,64	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	390.279.000,00	357.684.000,00	(32.595.000,00)	91,64	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.279.000,00	357.684.000,00	(32.595.000,00)	91,64	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	816.225.000,00	806.542.103,00	(9.682.897,00)	98,81	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	816.225.000,00	806.542.103,00	(9.682.897,00)	98,81	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.225.000,00	806.542.103,00	(9.682.897,00)	98,81	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0006		EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	33.775.000,00	30.679.500,00	(3.095.500,00)	90,83	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.775.000,00	30.679.500,00	(3.095.500,00)	90,83	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.775.000,00	30.679.500,00	(3.095.500,00)	90,83	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	130.000.000,00	112.008.691,00	(17.991.309,00)	86,16	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01		PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	130.000.000,00	112.008.691,00	(17.991.309,00)	86,16	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	43.300.000,00	31.827.071,00	(11.472.929,00)	73,50	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.300.000,00	31.827.071,00	(11.472.929,00)	73,50	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	31.827.071,00	(11.472.929,00)	73,50	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0004		FASILITASI VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN/STANDAR KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN DALAM RANGKA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE APPROACH (OSS RBA)	86.700.000,00	80.181.620,00	(6.518.380,00)	92,48	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	86.700.000,00	80.181.620,00	(6.518.380,00)	92,48	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.700.000,00	80.181.620,00	(6.518.380,00)	92,48	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	125.000.000,00	111.497.485,00	(13.502.515,00)	89,19	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	125.000.000,00	111.497.485,00	(13.502.515,00)	89,19	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	25.000.000,00	21.660.000,00	(3.340.000,00)	86,64	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	21.660.000,00	(3.340.000,00)	86,64	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.660.000,00	(3.340.000,00)	86,64	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003		PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI LINGKUP KABUPATEN/KOTA DALAM PENYAMPAIAN DATA KE SIINAS	100.000.000,00	89.837.485,00	(10.162.515,00)	89,83	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	89.837.485,00	(10.162.515,00)	89,83	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	89.837.485,00	(10.162.515,00)	89,83	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
Organisasi : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.406.130.400,00	6.046.373.747,00	(359.756.653,00)	94,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.185.966.400,00	4.831.187.147,00	(354.779.253,00)	93,15	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	86.288.900,00	85.992.285,00	(296.615,00)	99,65	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.307.000,00	3.302.000,00	(5.000,00)	99,84	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.307.000,00	3.302.000,00	(5.000,00)	99,84	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.307.000,00	3.302.000,00	(5.000,00)	99,84	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.023.250,00	5.023.250,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.023.250,00	5.023.250,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.023.250,00	5.023.250,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.974.000,00	5.974.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.974.000,00	5.974.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.974.000,00	5.974.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.190.000,00	3.190.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.190.000,00	3.190.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.190.000,00	3.190.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.491.250,00	5.491.250,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.491.250,00	5.491.250,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.491.250,00	5.491.250,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.638.000,00	4.637.500,00	(500,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.638.000,00	4.637.500,00	(500,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.638.000,00	4.637.500,00	(500,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	58.665.400,00	58.374.285,00	(291.115,00)	99,50	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	58.665.400,00	58.374.285,00	(291.115,00)	99,50	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.665.400,00	58.374.285,00	(291.115,00)	99,50	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.449.260.500,00	3.113.694.610,00	(335.565.890,00)	90,27	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.441.608.000,00	3.106.042.110,00	(335.565.890,00)	90,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.441.608.000,00	3.106.042.110,00	(335.565.890,00)	90,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.441.608.000,00	3.106.042.110,00	(335.565.890,00)	90,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.663.000,00	3.663.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.663.000,00	3.663.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.663.000,00	3.663.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.989.500,00	3.989.500,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.989.500,00	3.989.500,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.989.500,00	3.989.500,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	399.071.000,00	398.863.064,00	(207.936,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.010.000,00	3.005.000,00	(5.000,00)	99,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.010.000,00	3.005.000,00	(5.000,00)	99,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	3.005.000,00	(5.000,00)	99,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	130.607.500,00	130.533.200,00	(74.300,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	130.607.500,00	130.533.200,00	(74.300,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.607.500,00	130.533.200,00	(74.300,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.000.500,00	30.000.000,00	(500,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.500,00	30.000.000,00	(500,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.500,00	30.000.000,00	(500,00)	99,99	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	229.653.000,00	229.524.864,00	(128.136,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	229.653.000,00	229.524.864,00	(128.136,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.653.000,00	229.524.864,00	(128.136,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	657.522.000,00	640.854.615,00	(16.667.385,00)	97,46	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	152.714.000,00	138.390.272,00	(14.323.728,00)	90,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	152.714.000,00	138.390.272,00	(14.323.728,00)	90,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.714.000,00	138.390.272,00	(14.323.728,00)	90,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	502.808.000,00	500.564.343,00	(2.243.657,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	502.808.000,00	500.564.343,00	(2.243.657,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.808.000,00	500.564.343,00	(2.243.657,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	591.824.000,00	589.882.573,00	(1.941.427,00)	99,67	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	99.940.000,00	99.567.800,00	(372.200,00)	99,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.940.000,00	99.567.800,00	(372.200,00)	99,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.940.000,00	99.567.800,00	(372.200,00)	99,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	71.850.000,00	71.357.884,00	(492.116,00)	99,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	71.850.000,00	71.357.884,00	(492.116,00)	99,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.850.000,00	71.357.884,00	(492.116,00)	99,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	420.034.000,00	418.956.889,00	(1.077.111,00)	99,74	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.034.000,00	34.483.325,00	(550.675,00)	98,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.034.000,00	34.483.325,00	(550.675,00)	98,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	385.000.000,00	384.473.564,00	(526.436,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	385.000.000,00	384.473.564,00	(526.436,00)	99,86	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	9.970.000,00	9.306.000,00	(664.000,00)	93,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01		PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.995.000,00	4.523.000,00	(472.000,00)	90,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	4.995.000,00	4.523.000,00	(472.000,00)	90,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.995.000,00	4.523.000,00	(472.000,00)	90,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	4.523.000,00	(472.000,00)	90,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	4.975.000,00	4.783.000,00	(192.000,00)	96,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001		PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.975.000,00	4.783.000,00	(192.000,00)	96,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.975.000,00	4.783.000,00	(192.000,00)	96,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	4.783.000,00	(192.000,00)	96,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	280.030.000,00	279.408.200,00	(621.800,00)	99,77	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	280.030.000,00	279.408.200,00	(621.800,00)	99,77	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.000.000,00	159.800.000,00	(200.000,00)	99,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	159.800.000,00	(200.000,00)	99,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	159.800.000,00	(200.000,00)	99,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003		PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	120.030.000,00	119.608.200,00	(421.800,00)	99,64	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	120.030.000,00	119.608.200,00	(421.800,00)	99,64	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.030.000,00	119.608.200,00	(421.800,00)	99,64	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	109.072.000,00	106.588.200,00	(2.483.800,00)	97,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	109.072.000,00	106.588.200,00	(2.483.800,00)	97,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	71.000.000,00	70.409.700,00	(590.300,00)	99,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	71.000.000,00	70.409.700,00	(590.300,00)	99,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	70.409.700,00	(590.300,00)	99,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008		PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	33.072.000,00	31.378.500,00	(1.693.500,00)	94,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	33.072.000,00	31.378.500,00	(1.693.500,00)	94,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.072.000,00	31.378.500,00	(1.693.500,00)	94,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	790.092.000,00	788.960.200,00	(1.131.800,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	790.092.000,00	788.960.200,00	(1.131.800,00)	99,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	87.013.000,00	86.751.000,00	(262.000,00)	99,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.013.000,00	86.751.000,00	(262.000,00)	99,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.013.000,00	86.751.000,00	(262.000,00)	99,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	524.052.000,00	523.679.100,00	(372.900,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	524.052.000,00	523.679.100,00	(372.900,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.052.000,00	523.679.100,00	(372.900,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	179.027.000,00	178.530.100,00	(496.900,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	179.027.000,00	178.530.100,00	(496.900,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.027.000,00	178.530.100,00	(496.900,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	31.000.000,00	30.924.000,00	(76.000,00)	99,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.000.000,00	30.924.000,00	(76.000,00)	99,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002		PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	31.000.000,00	30.924.000,00	(76.000,00)	99,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.924.000,00	(76.000,00)	99,75	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.924.000,00	(76.000,00)	99,75	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**
Organisasi : **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.127.727.500,00	7.546.433.445,00	(581.294.055,00)	92,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.960.110.500,00	3.563.870.469,00	(396.240.031,00)	89,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.387.410,00	28.068.360,00	(319.050,00)	98,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.406.400,00	4.364.770,00	(41.630,00)	99,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.406.400,00	4.364.770,00	(41.630,00)	99,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.406.400,00	4.364.770,00	(41.630,00)	99,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.905.000,00	3.892.200,00	(12.800,00)	99,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.905.000,00	3.892.200,00	(12.800,00)	99,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.905.000,00	3.892.200,00	(12.800,00)	99,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.705.000,00	3.701.120,00	(3.880,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.705.000,00	3.701.120,00	(3.880,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.705.000,00	3.701.120,00	(3.880,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.264.600,00	4.184.335,00	(80.265,00)	98,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.264.600,00	4.184.335,00	(80.265,00)	98,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.264.600,00	4.184.335,00	(80.265,00)	98,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.734.910,00	2.662.840,00	(72.070,00)	97,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.734.910,00	2.662.840,00	(72.070,00)	97,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.734.910,00	2.662.840,00	(72.070,00)	97,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.846.500,00	3.812.235,00	(34.265,00)	99,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.846.500,00	3.812.235,00	(34.265,00)	99,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.846.500,00	3.812.235,00	(34.265,00)	99,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.525.000,00	5.450.860,00	(74.140,00)	98,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.525.000,00	5.450.860,00	(74.140,00)	98,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	5.450.860,00	(74.140,00)	98,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.182.985.300,00	2.811.042.774,00	(371.942.526,00)	88,31	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.178.783.000,00	2.806.911.569,00	(371.871.431,00)	88,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.178.783.000,00	2.806.911.569,00	(371.871.431,00)	88,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.178.783.000,00	2.806.911.569,00	(371.871.431,00)	88,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.842.000,00	2.791.560,00	(50.440,00)	98,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.842.000,00	2.791.560,00	(50.440,00)	98,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.842.000,00	2.791.560,00	(50.440,00)	98,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.360.300,00	1.339.645,00	(20.655,00)	98,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.360.300,00	1.339.645,00	(20.655,00)	98,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.300,00	1.339.645,00	(20.655,00)	98,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	76.226.962,00	71.081.244,00	(5.145.718,00)	93,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	76.226.962,00	71.081.244,00	(5.145.718,00)	93,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	76.226.962,00	71.081.244,00	(5.145.718,00)	93,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.226.962,00	71.081.244,00	(5.145.718,00)	93,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	184.349.700,00	177.669.768,00	(6.679.932,00)	96,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	33.000.000,00	32.418.105,00	(581.895,00)	98,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	32.418.105,00	(581.895,00)	98,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	32.418.105,00	(581.895,00)	98,23	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	16.715.900,00	15.779.628,00	(936.272,00)	94,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.715.900,00	15.779.628,00	(936.272,00)	94,39	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.715.900,00	15.779.628,00	(936.272,00)	94,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	41.956.500,00	37.821.421,00	(4.135.079,00)	90,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.956.500,00	37.821.421,00	(4.135.079,00)	90,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.956.500,00	37.821.421,00	(4.135.079,00)	90,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.878.500,00	6.871.960,00	(6.540,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.878.500,00	6.871.960,00	(6.540,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.878.500,00	6.871.960,00	(6.540,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.080.000,00	2.422.000,00	(658.000,00)	78,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.080.000,00	2.422.000,00	(658.000,00)	78,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	2.422.000,00	(658.000,00)	78,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	82.718.800,00	82.356.654,00	(362.146,00)	99,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	82.718.800,00	82.356.654,00	(362.146,00)	99,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.718.800,00	82.356.654,00	(362.146,00)	99,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12.000.000,00	10.931.892,00	(1.068.108,00)	91,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.000.000,00	10.931.892,00	(1.068.108,00)	91,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	10.931.892,00	(1.068.108,00)	91,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	10.931.892,00	(1.068.108,00)	91,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	469.726.128,00	460.047.731,00	(9.678.397,00)	97,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.492.400,00	(7.600,00)	99,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.492.400,00	(7.600,00)	99,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.492.400,00	(7.600,00)	99,49	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	124.162.128,00	115.308.333,00	(8.853.795,00)	92,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	124.162.128,00	115.308.333,00	(8.853.795,00)	92,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.162.128,00	115.308.333,00	(8.853.795,00)	92,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	344.064.000,00	343.246.998,00	(817.002,00)	99,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	344.064.000,00	343.246.998,00	(817.002,00)	99,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.064.000,00	343.246.998,00	(817.002,00)	99,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.435.000,00	5.028.700,00	(1.406.300,00)	78,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	6.165.000,00	4.766.500,00	(1.398.500,00)	77,31	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.165.000,00	4.766.500,00	(1.398.500,00)	77,31	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.165.000,00	4.766.500,00	(1.398.500,00)	77,31	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	120.000,00	112.200,00	(7.800,00)	93,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	120.000,00	112.200,00	(7.800,00)	93,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	112.200,00	(7.800,00)	93,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	4.161.937.000,00	3.977.329.896,00	(184.607.104,00)	95,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	786.303.200,00	754.486.682,00	(31.816.518,00)	95,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	1.500.000,00	1.452.480,00	(47.520,00)	96,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.452.480,00	(47.520,00)	96,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.452.480,00	(47.520,00)	96,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.510.000,00	26.486.114,00	(2.023.886,00)	92,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.510.000,00	26.486.114,00	(2.023.886,00)	92,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.510.000,00	26.486.114,00	(2.023.886,00)	92,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	15.000.000,00	14.600.378,00	(399.622,00)	97,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.600.378,00	(399.622,00)	97,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.600.378,00	(399.622,00)	97,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS TINGKAT KABUPATEN/KOTA	9.516.000,00	9.398.838,00	(117.162,00)	98,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.516.000,00	9.398.838,00	(117.162,00)	98,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.516.000,00	9.398.838,00	(117.162,00)	98,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006		PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.475.000,00	143.152.435,00	(9.322.565,00)	93,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	152.475.000,00	143.152.435,00	(9.322.565,00)	93,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.475.000,00	143.152.435,00	(9.322.565,00)	93,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007		PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	348.195.000,00	332.941.822,00	(15.253.178,00)	95,61	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	348.195.000,00	332.941.822,00	(15.253.178,00)	95,61	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.195.000,00	332.941.822,00	(15.253.178,00)	95,61	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0008		PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	223.282.700,00	219.089.065,00	(4.193.635,00)	98,12	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	78.282.700,00	74.671.405,00	(3.611.295,00)	95,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.282.700,00	74.671.405,00	(3.611.295,00)	95,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	145.000.000,00	144.417.660,00	(582.340,00)	99,59	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0008	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.000.000,00	144.417.660,00	(582.340,00)	99,59	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010		PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.824.500,00	7.365.550,00	(458.950,00)	94,13	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	7.824.500,00	7.365.550,00	(458.950,00)	94,13	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.824.500,00	7.365.550,00	(458.950,00)	94,13	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.375.633.800,00	3.222.843.214,00	(152.790.586,00)	95,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001		SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	95.500.000,00	92.503.580,00	(2.996.420,00)	96,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.500.000,00	92.503.580,00	(2.996.420,00)	96,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.500.000,00	92.503.580,00	(2.996.420,00)	96,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.168.039.500,00	3.021.460.399,00	(146.579.101,00)	95,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	157.881.500,00	155.426.079,00	(2.455.421,00)	98,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.881.500,00	155.426.079,00	(2.455.421,00)	98,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.010.158.000,00	2.866.034.320,00	(144.123.680,00)	95,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.010.158.000,00	2.866.034.320,00	(144.123.680,00)	95,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	74.729.300,00	72.589.763,00	(2.139.537,00)	97,13	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	74.729.300,00	72.589.763,00	(2.139.537,00)	97,13	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.729.300,00	72.589.763,00	(2.139.537,00)	97,13	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	37.365.000,00	36.289.472,00	(1.075.528,00)	97,12	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.365.000,00	36.289.472,00	(1.075.528,00)	97,12	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.365.000,00	36.289.472,00	(1.075.528,00)	97,12	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5.680.000,00	5.233.080,00	(446.920,00)	92,13	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01		PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.680.000,00	5.233.080,00	(446.920,00)	92,13	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0002		PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PENGALIHMEDIAAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI OLEH MASYARAKAT UNTUK DILESTARIKAN DAN DIDAYAGUNAKAN	5.680.000,00	5.233.080,00	(446.920,00)	92,13	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.680.000,00	5.233.080,00	(446.920,00)	92,13	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	5.233.080,00	(446.920,00)	92,13	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**
Organisasi : **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	374.929.500,00	354.232.562,00	(20.696.938,00)	94,47	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	349.721.000,00	332.599.417,00	(17.121.583,00)	95,10	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.510.000,00	167.632.070,00	(3.877.930,00)	97,73	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001		PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	26.510.000,00	25.511.640,00	(998.360,00)	96,23	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.510.000,00	25.511.640,00	(998.360,00)	96,23	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.510.000,00	25.511.640,00	(998.360,00)	96,23	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002		PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS	109.600.000,00	108.375.130,00	(1.224.870,00)	98,88	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.600.000,00	108.375.130,00	(1.224.870,00)	98,88	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.600.000,00	108.375.130,00	(1.224.870,00)	98,88	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	35.400.000,00	33.745.300,00	(1.654.700,00)	95,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.400.000,00	33.745.300,00	(1.654.700,00)	95,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	33.745.300,00	(1.654.700,00)	95,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02		PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.000.000,00	33.797.627,00	(6.202.373,00)	84,49	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002		AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	40.000.000,00	33.797.627,00	(6.202.373,00)	84,49	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	33.797.627,00	(6.202.373,00)	84,49	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	33.797.627,00	(6.202.373,00)	84,49	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	138.211.000,00	131.169.720,00	(7.041.280,00)	94,90	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001		PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	118.151.000,00	112.450.520,00	(5.700.480,00)	95,17	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	118.151.000,00	112.450.520,00	(5.700.480,00)	95,17	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.151.000,00	112.450.520,00	(5.700.480,00)	95,17	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002		PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.060.000,00	18.719.200,00	(1.340.800,00)	93,31	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.060.000,00	18.719.200,00	(1.340.800,00)	93,31	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.060.000,00	18.719.200,00	(1.340.800,00)	93,31	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	17.000.000,00	15.152.945,00	(1.847.055,00)	89,13	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.01		PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	10.000.000,00	8.232.915,00	(1.767.085,00)	82,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.01.0001		PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	10.000.000,00	8.232.915,00	(1.767.085,00)	82,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.232.915,00	(1.767.085,00)	82,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.232.915,00	(1.767.085,00)	82,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03		PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	7.000.000,00	6.920.030,00	(79.970,00)	98,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004		PENDAMPINGAN PENYELAMATAN ARSIP BAGI PEMEKARAN DESA/KELURAHAN	7.000.000,00	6.920.030,00	(79.970,00)	98,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.920.030,00	(79.970,00)	98,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.920.030,00	(79.970,00)	98,85	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.04		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	8.208.500,00	6.480.200,00	(1.728.300,00)	78,94	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.04.2.01		PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA	8.208.500,00	6.480.200,00	(1.728.300,00)	78,94	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.04.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SOP PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP	8.208.500,00	6.480.200,00	(1.728.300,00)	78,94	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.208.500,00	6.480.200,00	(1.728.300,00)	78,94	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.208.500,00	6.480.200,00	(1.728.300,00)	78,94	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Organisasi : **Dinas Perikanan**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	4.050.000.000,00	2.767.797.826,00	(1.282.202.174,00)	68,34	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.050.000.000,00	2.767.797.826,00	(1.282.202.174,00)	68,34	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	4.050.000.000,00	2.767.797.826,00	(1.282.202.174,00)	68,34	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	15.239.045.750,00	14.650.438.898,00	(588.606.852,00)	96,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.936.107.150,00	6.683.783.634,00	(252.323.516,00)	96,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.165.000,00	13.091.000,00	(74.000,00)	99,43	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.400.000,00	2.385.000,00	(15.000,00)	99,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.385.000,00	(15.000,00)	99,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.385.000,00	(15.000,00)	99,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.280.000,00	2.270.000,00	(10.000,00)	99,56	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.280.000,00	2.270.000,00	(10.000,00)	99,56	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.270.000,00	(10.000,00)	99,56	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.272.000,00	2.272.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.272.000,00	2.272.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.272.000,00	2.272.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.890.000,00	1.875.000,00	(15.000,00)	99,20	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.890.000,00	1.875.000,00	(15.000,00)	99,20	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	1.875.000,00	(15.000,00)	99,20	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.245.000,00	2.225.000,00	(20.000,00)	99,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.245.000,00	2.225.000,00	(20.000,00)	99,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.245.000,00	2.225.000,00	(20.000,00)	99,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.078.000,00	2.064.000,00	(14.000,00)	99,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.078.000,00	2.064.000,00	(14.000,00)	99,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.078.000,00	2.064.000,00	(14.000,00)	99,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.063.097.500,00	4.822.240.778,00	(240.856.722,00)	95,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.059.969.000,00	4.819.112.278,00	(240.856.722,00)	95,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.059.969.000,00	4.819.112.278,00	(240.856.722,00)	95,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.059.969.000,00	4.819.112.278,00	(240.856.722,00)	95,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.622.500,00	1.622.500,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.622.500,00	1.622.500,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.622.500,00	1.622.500,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1.506.000,00	1.506.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.506.000,00	1.506.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.506.000,00	1.506.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.120.000,00	4.115.000,00	(5.000,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.120.000,00	4.115.000,00	(5.000,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.120.000,00	4.115.000,00	(5.000,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	4.115.000,00	(5.000,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	679.402.027,00	678.803.700,00	(598.327,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.135.000,00	6.135.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.135.000,00	6.135.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.135.000,00	6.135.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.156.000,00	2.149.500,00	(6.500,00)	99,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.156.000,00	2.149.500,00	(6.500,00)	99,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.156.000,00	2.149.500,00	(6.500,00)	99,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	89.086.487,00	89.080.750,00	(5.737,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.086.487,00	89.080.750,00	(5.737,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.086.487,00	89.080.750,00	(5.737,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	287.048.500,00	287.018.786,00	(29.714,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	287.048.500,00	287.018.786,00	(29.714,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.048.500,00	287.018.786,00	(29.714,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.995.000,00	12.439.000,00	(556.000,00)	95,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.995.000,00	12.439.000,00	(556.000,00)	95,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.995.000,00	12.439.000,00	(556.000,00)	95,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	281.981.040,00	281.980.664,00	(376,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	281.981.040,00	281.980.664,00	(376,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.981.040,00	281.980.664,00	(376,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	190.453.875,00	190.453.875,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	190.453.875,00	190.453.875,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	190.453.875,00	190.453.875,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.453.875,00	190.453.875,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	798.403.000,00	791.865.233,00	(6.537.767,00)	99,18	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.050.000,00	18.043.500,00	(6.500,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.050.000,00	18.043.500,00	(6.500,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	18.043.500,00	(6.500,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	134.429.000,00	134.172.635,00	(256.365,00)	99,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	134.429.000,00	134.172.635,00	(256.365,00)	99,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.429.000,00	134.172.635,00	(256.365,00)	99,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	645.924.000,00	639.649.098,00	(6.274.902,00)	99,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	645.924.000,00	639.649.098,00	(6.274.902,00)	99,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.924.000,00	639.649.098,00	(6.274.902,00)	99,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	122.465.748,00	118.214.048,00	(4.251.700,00)	96,52	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	41.028.700,00	36.777.000,00	(4.251.700,00)	89,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.028.700,00	36.777.000,00	(4.251.700,00)	89,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.028.700,00	36.777.000,00	(4.251.700,00)	89,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.674.000,00	25.674.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.674.000,00	25.674.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.674.000,00	25.674.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	55.763.048,00	55.763.048,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.763.048,00	55.763.048,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.763.048,00	55.763.048,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.426.541.000,00	2.359.438.143,00	(67.102.857,00)	97,23	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.733.541.556,00	1.667.961.699,00	(65.579.857,00)	96,21	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	1.716.541.556,00	1.650.961.699,00	(65.579.857,00)	96,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.716.541.556,00	1.650.961.699,00	(65.579.857,00)	96,17	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.050.686,00	68.042.304,00	(8.382,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.648.490.870,00	1.582.919.395,00	(65.571.475,00)	96,02	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	599.999.444,00	598.476.444,00	(1.523.000,00)	99,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	599.999.444,00	598.476.444,00	(1.523.000,00)	99,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	599.999.444,00	598.476.444,00	(1.523.000,00)	99,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.999.444,00	598.476.444,00	(1.523.000,00)	99,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03		PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0001		PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	64.232.000,00	64.232.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.232.000,00	64.232.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.232.000,00	52.232.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0001	5.1.05	Belanja Hibah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0002		PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	15.768.000,00	15.768.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.768.000,00	15.768.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.768.000,00	15.768.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04		PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002		PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.781.445.600,00	4.513.070.752,00	(268.374.848,00)	94,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02		PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	1.128.519.600,00	1.127.298.057,00	(1.221.543,00)	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	647.169.600,00	646.988.500,00	(181.100,00)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	647.169.600,00	646.988.500,00	(181.100,00)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.169.600,00	646.988.500,00	(181.100,00)	99,97	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002		PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0003		PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA	35.000.000,00	34.994.000,00	(6.000,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.994.000,00	(6.000,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.994.000,00	(6.000,00)	99,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004		PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	440.350.000,00	439.315.557,00	(1.034.443,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	440.350.000,00	439.315.557,00	(1.034.443,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.630.000,00	76.630.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	363.720.000,00	362.685.557,00	(1.034.443,00)	99,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	3.652.926.000,00	3.385.772.695,00	(267.153.305,00)	92,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.223.276.000,00	2.956.362.145,00	(266.913.855,00)	91,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.180.500.000,00	2.051.405.515,00	(129.094.485,00)	94,07	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.926.009,00	179.307.250,00	(1.618.759,00)	99,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.999.573.991,00	1.872.098.265,00	(127.475.726,00)	93,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.042.776.000,00	904.956.630,00	(137.819.370,00)	86,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.042.776.000,00	904.956.630,00	(137.819.370,00)	86,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	413.050.000,00	412.810.550,00	(239.450,00)	99,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	213.050.000,00	212.985.550,00	(64.450,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.050.000,00	212.985.550,00	(64.450,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.825.000,00	(175.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.825.000,00	(175.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0004		PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0006		PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	134.952.000,00	134.952.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01		PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	134.952.000,00	134.952.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001		PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	134.952.000,00	134.952.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	134.952.000,00	134.952.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.952.000,00	134.952.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	960.000.000,00	959.194.369,00	(805.631,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01		PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02		PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	625.000.000,00	624.194.369,00	(805.631,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001		PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	625.000.000,00	624.194.369,00	(805.631,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	625.000.000,00	624.194.369,00	(805.631,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.929.500,00	(70.500,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	570.000.000,00	569.264.869,00	(735.131,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	315.000.000,00	315.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.000.000,00	155.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	155.000.000,00	155.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	155.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002		PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.500.000,00	118.500.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	41.500.000,00	41.500.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.300.000.000,00	1.545.671.000,00	(1.754.329.000,00)	46,83	
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.300.000.000,00	1.545.671.000,00	(1.754.329.000,00)	46,83	
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.050.000.000,00	1.385.171.000,00	(1.664.829.000,00)	45,41	
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	250.000.000,00	160.500.000,00	(89.500.000,00)	64,20	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.698.183.550,00	12.370.321.061,00	(1.327.862.489,00)	90,30	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.975.933.550,00	8.927.071.166,00	(1.048.862.384,00)	89,48	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	220.556.000,00	209.406.950,00	(11.149.050,00)	94,94	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	61.292.000,00	60.526.950,00	(765.050,00)	98,75	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.292.000,00	60.526.950,00	(765.050,00)	98,75	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.292.000,00	60.526.950,00	(765.050,00)	98,75	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	9.892.000,00	9.530.000,00	(362.000,00)	96,34	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.892.000,00	9.530.000,00	(362.000,00)	96,34	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.892.000,00	9.530.000,00	(362.000,00)	96,34	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	8.748.000,00	8.301.000,00	(447.000,00)	94,89	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.748.000,00	8.301.000,00	(447.000,00)	94,89	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.748.000,00	8.301.000,00	(447.000,00)	94,89	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.454.000,00	3.410.000,00	(44.000,00)	98,72	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.454.000,00	3.410.000,00	(44.000,00)	98,72	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.454.000,00	3.410.000,00	(44.000,00)	98,72	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.454.000,00	3.386.000,00	(68.000,00)	98,03	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.454.000,00	3.386.000,00	(68.000,00)	98,03	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.454.000,00	3.386.000,00	(68.000,00)	98,03	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.032.000,00	7.978.000,00	(54.000,00)	99,32	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.032.000,00	7.978.000,00	(54.000,00)	99,32	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.032.000,00	7.978.000,00	(54.000,00)	99,32	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	125.684.000,00	116.275.000,00	(9.409.000,00)	92,51	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	125.684.000,00	116.275.000,00	(9.409.000,00)	92,51	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.684.000,00	116.275.000,00	(9.409.000,00)	92,51	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.097.248.000,00	6.137.548.484,00	(959.699.516,00)	86,47	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.089.342.000,00	6.129.661.984,00	(959.680.016,00)	86,46	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.089.342.000,00	6.129.661.984,00	(959.680.016,00)	86,46	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.089.342.000,00	6.129.661.984,00	(959.680.016,00)	86,46	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.906.000,00	7.886.500,00	(19.500,00)	99,75	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.906.000,00	7.886.500,00	(19.500,00)	99,75	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.906.000,00	7.886.500,00	(19.500,00)	99,75	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	436.311.370,00	429.529.538,00	(6.781.832,00)	98,44	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.832.500,00	4.817.000,00	(15.500,00)	99,67	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.832.500,00	4.817.000,00	(15.500,00)	99,67	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.832.500,00	4.817.000,00	(15.500,00)	99,67	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	139.129.300,00	137.931.459,00	(1.197.841,00)	99,13	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	139.129.300,00	137.931.459,00	(1.197.841,00)	99,13	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.129.300,00	137.931.459,00	(1.197.841,00)	99,13	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.240.000,00	24.013.500,00	(226.500,00)	99,06	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.240.000,00	24.013.500,00	(226.500,00)	99,06	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000,00	24.013.500,00	(226.500,00)	99,06	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	268.109.570,00	262.767.579,00	(5.341.991,00)	98,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	268.109.570,00	262.767.579,00	(5.341.991,00)	98,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.109.570,00	262.767.579,00	(5.341.991,00)	98,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.902.680,00	41.650.000,00	(252.680,00)	99,39	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	41.902.680,00	41.650.000,00	(252.680,00)	99,39	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	40.152.680,00	39.900.000,00	(252.680,00)	99,37	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.152.680,00	39.900.000,00	(252.680,00)	99,37	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.884.335.500,00	1.822.544.604,00	(61.790.896,00)	96,72	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	402.753.500,00	373.529.628,00	(29.223.872,00)	92,74	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	402.753.500,00	373.529.628,00	(29.223.872,00)	92,74	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.753.500,00	373.529.628,00	(29.223.872,00)	92,74	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.286.000,00	28.195.000,00	(91.000,00)	99,67	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.286.000,00	28.195.000,00	(91.000,00)	99,67	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.286.000,00	28.195.000,00	(91.000,00)	99,67	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.453.296.000,00	1.420.819.976,00	(32.476.024,00)	97,76	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.453.296.000,00	1.420.819.976,00	(32.476.024,00)	97,76	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.453.296.000,00	1.420.819.976,00	(32.476.024,00)	97,76	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	295.580.000,00	286.391.590,00	(9.188.410,00)	96,89	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	146.200.000,00	137.332.040,00	(8.867.960,00)	93,93	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.200.000,00	137.332.040,00	(8.867.960,00)	93,93	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.200.000,00	137.332.040,00	(8.867.960,00)	93,93	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	149.380.000,00	149.059.550,00	(320.450,00)	99,78	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	149.380.000,00	149.059.550,00	(320.450,00)	99,78	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.380.000,00	149.059.550,00	(320.450,00)	99,78	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.757.720.000,00	1.578.575.847,00	(179.144.153,00)	89,80	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	1.757.720.000,00	1.578.575.847,00	(179.144.153,00)	89,80	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	76.250.000,00	76.118.000,00	(132.000,00)	99,82	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.868.000,00	(132.000,00)	99,73	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.868.000,00	(132.000,00)	99,73	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	26.250.000,00	26.250.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.250.000,00	26.250.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	1.681.470.000,00	1.502.457.847,00	(179.012.153,00)	89,35	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.681.470.000,00	1.502.457.847,00	(179.012.153,00)	89,35	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.681.470.000,00	1.502.457.847,00	(179.012.153,00)	89,35	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.964.530.000,00	1.864.674.048,00	(99.855.952,00)	94,91	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	1.529.250.000,00	1.465.605.518,00	(63.644.482,00)	95,83	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006		FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	1.366.450.000,00	1.325.705.018,00	(40.744.982,00)	97,01	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.366.450.000,00	1.325.705.018,00	(40.744.982,00)	97,01	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.266.450.000,00	1.225.705.018,00	(40.744.982,00)	96,78	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011		MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	162.800.000,00	139.900.500,00	(22.899.500,00)	85,93	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	162.800.000,00	139.900.500,00	(22.899.500,00)	85,93	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.800.000,00	139.900.500,00	(22.899.500,00)	85,93	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.02		PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	435.280.000,00	399.068.530,00	(36.211.470,00)	91,68	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001		PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	435.280.000,00	399.068.530,00	(36.211.470,00)	91,68	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	435.280.000,00	399.068.530,00	(36.211.470,00)	91,68	
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.280.000,00	399.068.530,00	(36.211.470,00)	91,68	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.300.000.000,00	1.545.671.000,00	(1.754.329.000,00)	46,83	
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.300.000.000,00	1.545.671.000,00	(1.754.329.000,00)	46,83	
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.050.000.000,00	1.385.171.000,00	(1.664.829.000,00)	45,41	
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	250.000.000,00	160.500.000,00	(89.500.000,00)	64,20	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.399.000.000,00	9.168.319.923,00	(230.680.077,00)	97,54	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	758.753.000,00	646.312.348,00	(112.440.652,00)	85,18	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	85.000.000,00	84.755.348,00	(244.652,00)	99,71	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA	85.000.000,00	84.755.348,00	(244.652,00)	99,71	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	84.755.348,00	(244.652,00)	99,71	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	84.755.348,00	(244.652,00)	99,71	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	673.753.000,00	561.557.000,00	(112.196.000,00)	83,34	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002		PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	673.753.000,00	561.557.000,00	(112.196.000,00)	83,34	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	673.753.000,00	561.557.000,00	(112.196.000,00)	83,34	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.753.000,00	211.557.000,00	(112.196.000,00)	65,34	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8.267.747.000,00	8.157.157.575,00	(110.589.425,00)	98,66	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	452.747.000,00	399.782.940,00	(52.964.060,00)	88,30	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	452.747.000,00	399.782.940,00	(52.964.060,00)	88,30	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	254.717.000,00	202.058.846,00	(52.658.154,00)	79,32	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.717.000,00	202.058.846,00	(52.658.154,00)	79,32	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	198.030.000,00	197.724.094,00	(305.906,00)	99,84	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.030.000,00	197.724.094,00	(305.906,00)	99,84	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.440.179.000,00	1.438.177.500,00	(2.001.500,00)	99,86	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	350.000.000,00	349.991.000,00	(9.000,00)	99,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	349.991.000,00	(9.000,00)	99,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	349.991.000,00	(9.000,00)	99,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	375.000.000,00	374.900.000,00	(100.000,00)	99,97	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	375.000.000,00	374.900.000,00	(100.000,00)	99,97	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	374.900.000,00	(100.000,00)	99,97	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003		PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	715.179.000,00	713.286.500,00	(1.892.500,00)	99,73	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	715.179.000,00	713.286.500,00	(1.892.500,00)	99,73	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.179.000,00	713.286.500,00	(1.892.500,00)	99,73	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	1.700.000.000,00	1.697.943.000,00	(2.057.000,00)	99,87	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002		PEMUSATAN LATIHAN DAERAH, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT SCIENCE)	750.000.000,00	749.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	749.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	749.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	750.000.000,00	749.645.000,00	(355.000,00)	99,95	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	749.645.000,00	(355.000,00)	99,95	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	749.645.000,00	(355.000,00)	99,95	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0004		PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	198.300.000,00	(1.700.000,00)	99,15	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.300.000,00	(1.700.000,00)	99,15	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.300.000,00	(1.700.000,00)	99,15	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	3.700.000.000,00	3.650.000.000,00	(50.000.000,00)	98,64	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002		PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN	3.700.000.000,00	3.650.000.000,00	(50.000.000,00)	98,64	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000.000,00	3.650.000.000,00	(50.000.000,00)	98,64	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	3.650.000.000,00	3.600.000.000,00	(50.000.000,00)	98,63	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	974.821.000,00	971.254.135,00	(3.566.865,00)	99,63	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001		PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI	400.000.000,00	399.960.000,00	(40.000,00)	99,98	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.960.000,00	(40.000,00)	99,98	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	399.960.000,00	(40.000,00)	99,98	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003		PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI	574.821.000,00	571.294.135,00	(3.526.865,00)	99,38	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	318.511.000,00	315.314.185,00	(3.196.815,00)	98,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.511.000,00	315.314.185,00	(3.196.815,00)	98,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.2	BELANJA MODAL	256.310.000,00	255.979.950,00	(330.050,00)	99,87	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.280.000,00	58.279.950,00	(50,00)	99,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.030.000,00	197.700.000,00	(330.000,00)	99,83	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	372.500.000,00	364.850.000,00	(7.650.000,00)	97,94	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	372.500.000,00	364.850.000,00	(7.650.000,00)	97,94	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	372.500.000,00	364.850.000,00	(7.650.000,00)	97,94	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	372.500.000,00	364.850.000,00	(7.650.000,00)	97,94	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	24.850.000,00	(7.650.000,00)	76,46	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	340.000.000,00	340.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	379.604.500,00	4.604.500,00	101,22	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	379.604.500,00	4.604.500,00	101,22	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	175.000.000,00	177.058.000,00	2.058.000,00	101,17	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.000.000,00	202.546.500,00	2.546.500,00	101,27	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	33.058.978.050,00	30.475.709.491,83	(2.583.268.558,17)	92,18	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.056.492.850,00	15.630.031.499,00	(2.426.461.351,00)	86,56	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	79.500.000,00	79.273.000,00	(227.000,00)	99,71	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	24.412.500,00	24.231.500,00	(181.000,00)	99,25	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.412.500,00	24.231.500,00	(181.000,00)	99,25	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.412.500,00	24.231.500,00	(181.000,00)	99,25	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	8.066.500,00	8.050.500,00	(16.000,00)	99,80	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.066.500,00	8.050.500,00	(16.000,00)	99,80	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.066.500,00	8.050.500,00	(16.000,00)	99,80	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	10.576.000,00	10.576.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.576.000,00	10.576.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.576.000,00	10.576.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.320.000,00	5.320.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.320.000,00	5.320.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00	5.320.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	8.028.000,00	8.028.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.028.000,00	8.028.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.028.000,00	8.028.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.742.000,00	11.712.000,00	(30.000,00)	99,74	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.742.000,00	11.712.000,00	(30.000,00)	99,74	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.742.000,00	11.712.000,00	(30.000,00)	99,74	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.355.000,00	11.355.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.355.000,00	11.355.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.355.000,00	11.355.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.788.350.000,00	13.376.798.628,00	(2.411.551.372,00)	84,72	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.714.850.000,00	13.303.303.878,00	(2.411.546.122,00)	84,65	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.714.850.000,00	13.303.303.878,00	(2.411.546.122,00)	84,65	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.714.850.000,00	13.303.303.878,00	(2.411.546.122,00)	84,65	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	47.637.000,00	47.631.750,00	(5.250,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.637.000,00	47.631.750,00	(5.250,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.637.000,00	47.631.750,00	(5.250,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.058.000,00	6.058.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.058.000,00	6.058.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.058.000,00	6.058.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	9.909.500,00	9.909.500,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.909.500,00	9.909.500,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.909.500,00	9.909.500,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	9.895.500,00	9.895.500,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.895.500,00	9.895.500,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.895.500,00	9.895.500,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	568.947.000,00	564.426.354,00	(4.520.646,00)	99,20	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	91.800.000,00	87.500.000,00	(4.300.000,00)	95,31	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.384,00	-	(67.384,00)	-	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.384,00	-	(67.384,00)	-	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	91.732.616,00	87.500.000,00	(4.232.616,00)	95,38	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.732.616,00	87.500.000,00	(4.232.616,00)	95,38	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	134.307.000,00	134.301.500,00	(5.500,00)	99,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	134.307.000,00	134.301.500,00	(5.500,00)	99,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.307.000,00	134.301.500,00	(5.500,00)	99,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.000.000,00	21.911.000,00	(89.000,00)	99,59	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.911.000,00	(89.000,00)	99,59	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.911.000,00	(89.000,00)	99,59	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.840.000,00	5.835.000,00	(5.000,00)	99,91	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.840.000,00	5.835.000,00	(5.000,00)	99,91	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.835.000,00	(5.000,00)	99,91	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	285.000.000,00	284.878.854,00	(121.146,00)	99,95	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	285.000.000,00	284.878.854,00	(121.146,00)	99,95	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	284.878.854,00	(121.146,00)	99,95	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	18.895.500,00	18.600.000,00	(295.500,00)	98,43	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	18.895.500,00	18.600.000,00	(295.500,00)	98,43	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	18.895.500,00	18.600.000,00	(295.500,00)	98,43	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.895.500,00	18.600.000,00	(295.500,00)	98,43	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.268.705.350,00	1.259.197.747,00	(9.507.603,00)	99,25	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.242.850,00	8.242.500,00	(350,00)	99,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.242.850,00	8.242.500,00	(350,00)	99,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.242.850,00	8.242.500,00	(350,00)	99,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	193.081.000,00	192.408.731,00	(672.269,00)	99,65	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	193.081.000,00	192.408.731,00	(672.269,00)	99,65	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.081.000,00	192.408.731,00	(672.269,00)	99,65	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.500.000,00	21.500.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	21.500.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.500.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.045.881.500,00	1.037.046.516,00	(8.834.984,00)	99,15	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.045.881.500,00	1.037.046.516,00	(8.834.984,00)	99,15	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.045.881.500,00	1.037.046.516,00	(8.834.984,00)	99,15	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	321.435.000,00	321.075.770,00	(359.230,00)	99,88	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	109.000.000,00	108.985.000,00	(15.000,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.000.000,00	108.985.000,00	(15.000,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	108.985.000,00	(15.000,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	197.435.000,00	197.143.770,00	(291.230,00)	99,85	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	197.435.000,00	197.143.770,00	(291.230,00)	99,85	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.435.000,00	197.143.770,00	(291.230,00)	99,85	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.000.000,00	14.947.000,00	(53.000,00)	99,64	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.947.000,00	(53.000,00)	99,64	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.947.000,00	(53.000,00)	99,64	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.437.272.200,00	2.361.345.154,00	(75.927.046,00)	96,88	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	1.350.972.200,00	1.330.105.000,00	(20.867.200,00)	98,45	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	1.291.672.200,00	1.271.065.000,00	(20.607.200,00)	98,40	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.291.672.200,00	1.271.065.000,00	(20.607.200,00)	98,40	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.282.200,00	681.175.000,00	(1.107.200,00)	99,83	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	609.390.000,00	589.890.000,00	(19.500.000,00)	96,80	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	59.300.000,00	59.040.000,00	(260.000,00)	99,56	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.300.000,00	33.240.000,00	(60.000,00)	99,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	4.500.000,00	4.440.000,00	(60.000,00)	98,66	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	26.000.000,00	25.800.000,00	(200.000,00)	99,23	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	25.800.000,00	(200.000,00)	99,23	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	570.000.000,00	539.334.654,00	(30.665.346,00)	94,62	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	150.000.000,00	147.212.900,00	(2.787.100,00)	98,14	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	147.212.900,00	(2.787.100,00)	98,14	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	147.212.900,00	(2.787.100,00)	98,14	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003		PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN	420.000.000,00	392.121.754,00	(27.878.246,00)	93,36	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	420.000.000,00	392.121.754,00	(27.878.246,00)	93,36	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.030.000,00	23.945.705,00	(84.295,00)	99,64	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	395.970.000,00	368.176.049,00	(27.793.951,00)	92,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.500.000,00	8.490.000,00	(10.000,00)	99,88	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0002		PENGUJIAN MUTU BENIH DAN BIBIT TERNAK	8.500.000,00	8.490.000,00	(10.000,00)	99,88	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.490.000,00	(10.000,00)	99,88	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.490.000,00	(10.000,00)	99,88	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	507.800.000,00	483.415.500,00	(24.384.500,00)	95,19	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	507.800.000,00	483.415.500,00	(24.384.500,00)	95,19	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	507.800.000,00	483.415.500,00	(24.384.500,00)	95,19	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.300.000,00	75.115.500,00	(184.500,00)	99,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.05	Belanja Hibah	432.500.000,00	408.300.000,00	(24.200.000,00)	94,40	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.148.934.000,00	8.101.051.774,83	(47.882.225,17)	99,41	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.603.311.000,00	1.557.861.000,00	(45.450.000,00)	97,16	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	1.603.311.000,00	1.557.861.000,00	(45.450.000,00)	97,16	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.603.311.000,00	1.557.861.000,00	(45.450.000,00)	97,16	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.419.711.000,00	1.407.921.000,00	(11.790.000,00)	99,16	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	183.600.000,00	149.940.000,00	(33.660.000,00)	81,66	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	6.545.623.000,00	6.543.190.774,83	(2.432.225,17)	99,96	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	3.315.400.000,00	3.314.401.584,00	(998.416,00)	99,96	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.315.400.000,00	3.314.401.584,00	(998.416,00)	99,96	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.400.000,00	123.318.785,00	(81.215,00)	99,93	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	3.192.000.000,00	3.191.082.799,00	(917.201,00)	99,97	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0004		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN DAM PARIT	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BALAI PENYULUH DI KECAMATAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA	350.000.000,00	348.761.000,00	(1.239.000,00)	99,64	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	348.761.000,00	(1.239.000,00)	99,64	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	348.761.000,00	(1.239.000,00)	99,64	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.05	Belanja Hibah	143.000.000,00	143.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI	2.478.223.000,00	2.478.028.190,83	(194.809,17)	99,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.478.223.000,00	2.478.028.190,83	(194.809,17)	99,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.072.185,00	108.028.190,00	(43.995,00)	99,95	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.05	Belanja Hibah	2.370.150.815,00	2.370.000.000,83	(150.814,17)	99,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	610.650.000,00	609.084.292,00	(1.565.708,00)	99,74	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.263.000,00	86.240.520,00	(1.022.480,00)	98,82	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.263.000,00	86.240.520,00	(1.022.480,00)	98,82	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	87.263.000,00	86.240.520,00	(1.022.480,00)	98,82	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.263.000,00	86.240.520,00	(1.022.480,00)	98,82	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.02		PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.02.0004		PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM)	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03		PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	408.150.000,00	407.740.772,00	(409.228,00)	99,89	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002		PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	408.150.000,00	407.740.772,00	(409.228,00)	99,89	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	408.150.000,00	407.740.772,00	(409.228,00)	99,89	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.150.000,00	407.740.772,00	(409.228,00)	99,89	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	25.000.000,00	24.866.000,00	(134.000,00)	99,46	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0010		PENGAWASAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN	25.000.000,00	24.866.000,00	(134.000,00)	99,46	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.866.000,00	(134.000,00)	99,46	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.866.000,00	(134.000,00)	99,46	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.05		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN	37.737.000,00	37.737.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.05.0003		PEMBINAAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA UNIT USAHA	37.737.000,00	37.737.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.737.000,00	37.737.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.737.000,00	37.737.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	311.896.000,00	309.416.000,00	(2.480.000,00)	99,20	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	311.896.000,00	309.416.000,00	(2.480.000,00)	99,20	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	311.896.000,00	309.416.000,00	(2.480.000,00)	99,20	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	311.896.000,00	309.416.000,00	(2.480.000,00)	99,20	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.896.000,00	309.416.000,00	(2.480.000,00)	99,20	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.493.733.000,00	3.464.780.772,00	(28.952.228,00)	99,17	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	3.493.733.000,00	3.464.780.772,00	(28.952.228,00)	99,17	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	723.500.000,00	723.138.650,00	(361.350,00)	99,95	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	723.500.000,00	723.138.650,00	(361.350,00)	99,95	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	723.500.000,00	723.138.650,00	(361.350,00)	99,95	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	770.233.000,00	752.696.000,00	(17.537.000,00)	97,72	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	770.233.000,00	752.696.000,00	(17.537.000,00)	97,72	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.233.000,00	752.696.000,00	(17.537.000,00)	97,72	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005		PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	2.000.000.000,00	1.988.946.122,00	(11.053.878,00)	99,44	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000,00	1.988.946.122,00	(11.053.878,00)	99,44	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	1.988.946.122,00	(11.053.878,00)	99,44	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**
Organisasi : **Dinas Pertanian**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	379.604.500,00	4.604.500,00	101,22	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	379.604.500,00	4.604.500,00	101,22	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	175.000.000,00	177.058.000,00	2.058.000,00	101,17	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.000.000,00	202.546.500,00	2.546.500,00	101,27	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	567.000.000,00	559.093.200,00	(7.906.800,00)	98,60	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.02.2.01		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0006		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	459.050.000,00	451.143.200,00	(7.906.800,00)	98,27	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	102.500.000,00	102.500.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA	85.000.000,00	85.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	85.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010		PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0012		PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015		PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	272.000.000,00	264.093.200,00	(7.906.800,00)	97,09	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003		PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	272.000.000,00	264.093.200,00	(7.906.800,00)	97,09	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	272.000.000,00	264.093.200,00	(7.906.800,00)	97,09	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.000.000,00	264.093.200,00	(7.906.800,00)	97,09	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	84.550.000,00	84.550.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	84.550.000,00	84.550.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.550.000,00	84.550.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.550.000,00	84.550.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	72.500.000,00	72.500.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.02		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002		PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	30.450.000,00	30.450.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.450.000,00	30.450.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0006		REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	2.639.000,00	2.639.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.639.000,00	2.639.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.639.000,00	2.639.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0009		PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	27.811.000,00	27.811.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.811.000,00	27.811.000,00	-	100,00	
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.811.000,00	27.811.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Bagian Umum**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001		5	BELANJA DAERAH	32.614.496.899,00	27.079.383.091,00	(5.535.113.808,00)	83,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.614.496.899,00	27.079.383.091,00	(5.535.113.808,00)	83,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.000.000,00	19.618.750,00	(381.250,00)	98,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.000.000,00	19.618.750,00	(381.250,00)	98,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.618.750,00	(381.250,00)	98,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.618.750,00	(381.250,00)	98,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	20.399.891.381,00	15.576.329.604,00	(4.823.561.777,00)	76,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	20.308.539.000,00	15.494.451.518,00	(4.814.087.482,00)	76,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.308.539.000,00	15.494.451.518,00	(4.814.087.482,00)	76,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	20.308.539.000,00	15.494.451.518,00	(4.814.087.482,00)	76,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	80.152.381,00	73.315.086,00	(6.837.295,00)	91,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.152.381,00	73.315.086,00	(6.837.295,00)	91,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.152.381,00	73.315.086,00	(6.837.295,00)	91,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.600.000,00	5.053.000,00	(1.547.000,00)	76,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	5.053.000,00	(1.547.000,00)	76,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	5.053.000,00	(1.547.000,00)	76,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.600.000,00	3.510.000,00	(1.090.000,00)	76,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.600.000,00	3.510.000,00	(1.090.000,00)	76,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	3.510.000,00	(1.090.000,00)	76,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	5.500.000,00	5.149.000,00	(351.000,00)	93,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	5.500.000,00	5.149.000,00	(351.000,00)	93,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.149.000,00	(351.000,00)	93,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.149.000,00	(351.000,00)	93,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	236.960.000,00	230.169.032,00	(6.790.968,00)	97,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	33.300.000,00	33.300.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.300.000,00	33.300.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	33.300.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	4.625.000,00	4.520.000,00	(105.000,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.625.000,00	4.520.000,00	(105.000,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	4.520.000,00	(105.000,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	178.500.000,00	172.772.282,00	(5.727.718,00)	96,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	178.500.000,00	172.772.282,00	(5.727.718,00)	96,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.500.000,00	172.772.282,00	(5.727.718,00)	96,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.535.000,00	19.576.750,00	(958.250,00)	95,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	20.535.000,00	19.576.750,00	(958.250,00)	95,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.535.000,00	19.576.750,00	(958.250,00)	95,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.523.356.200,00	1.496.535.259,00	(26.820.941,00)	98,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	95.082.000,00	95.071.400,00	(10.600,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.082.000,00	95.071.400,00	(10.600,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.082.000,00	95.071.400,00	(10.600,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.724.300,00	39.823.950,00	(900.350,00)	97,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.724.300,00	39.823.950,00	(900.350,00)	97,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.724.300,00	39.823.950,00	(900.350,00)	97,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	132.617.890,00	132.055.540,00	(562.350,00)	99,57	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.558.890,00	8.000.000,00	(558.890,00)	93,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.558.890,00	8.000.000,00	(558.890,00)	93,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	124.059.000,00	124.055.540,00	(3.460,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.414.000,00	76.410.540,00	(3.460,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0003	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.645.000,00	47.645.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	24.702.000,00	23.124.000,00	(1.578.000,00)	93,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.702.000,00	23.124.000,00	(1.578.000,00)	93,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.702.000,00	23.124.000,00	(1.578.000,00)	93,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	82.983.500,00	82.983.500,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	82.983.500,00	82.983.500,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.983.500,00	82.983.500,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	88.900.000,00	85.640.000,00	(3.260.000,00)	96,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	88.900.000,00	85.640.000,00	(3.260.000,00)	96,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.900.000,00	85.640.000,00	(3.260.000,00)	96,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	199.150.000,00	189.270.000,00	(9.880.000,00)	95,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	199.150.000,00	189.270.000,00	(9.880.000,00)	95,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.150.000,00	189.270.000,00	(9.880.000,00)	95,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	859.196.510,00	848.566.869,00	(10.629.641,00)	98,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	859.196.510,00	848.566.869,00	(10.629.641,00)	98,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	859.196.510,00	848.566.869,00	(10.629.641,00)	98,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	666.411.100,00	662.040.200,00	(4.370.900,00)	99,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.106.000,00	37.830.000,00	(276.000,00)	99,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	38.106.000,00	37.830.000,00	(276.000,00)	99,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.106.000,00	37.830.000,00	(276.000,00)	99,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	136.411.100,00	136.407.900,00	(3.200,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.350,00	-	(2.350,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350,00	-	(2.350,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	136.408.750,00	136.407.900,00	(850,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.408.750,00	136.407.900,00	(850,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	491.894.000,00	487.802.300,00	(4.091.700,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.965.000,00	1.700.000,00	(265.000,00)	86,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.965.000,00	1.700.000,00	(265.000,00)	86,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	489.929.000,00	486.102.300,00	(3.826.700,00)	99,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	489.929.000,00	486.102.300,00	(3.826.700,00)	99,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.675.877.188,00	3.425.214.614,00	(250.662.574,00)	93,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	30.840.000,00	28.657.000,00	(2.183.000,00)	92,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.840.000,00	28.657.000,00	(2.183.000,00)	92,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.840.000,00	28.657.000,00	(2.183.000,00)	92,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.100.000.000,00	883.031.700,00	(216.968.300,00)	80,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000,00	883.031.700,00	(216.968.300,00)	80,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	883.031.700,00	(216.968.300,00)	80,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	261.091.600,00	260.645.040,00	(446.560,00)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	261.091.600,00	260.645.040,00	(446.560,00)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.091.600,00	260.645.040,00	(446.560,00)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.283.945.588,00	2.252.880.874,00	(31.064.714,00)	98,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.283.945.588,00	2.252.880.874,00	(31.064.714,00)	98,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.283.945.588,00	2.252.880.874,00	(31.064.714,00)	98,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.204.622.663,00	2.196.843.696,00	(7.778.967,00)	99,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	174.415.000,00	170.220.372,00	(4.194.628,00)	97,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	174.415.000,00	170.220.372,00	(4.194.628,00)	97,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.415.000,00	170.220.372,00	(4.194.628,00)	97,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	844.841.000,00	841.963.454,00	(2.877.546,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	844.841.000,00	841.963.454,00	(2.877.546,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.841.000,00	841.963.454,00	(2.877.546,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	114.430.000,00	114.275.000,00	(155.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	114.430.000,00	114.275.000,00	(155.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.430.000,00	114.275.000,00	(155.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	922.720.663,00	922.337.870,00	(382.793,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	882.220.663,00	881.837.870,00	(382.793,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.220.663,00	881.837.870,00	(382.793,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	148.216.000,00	148.047.000,00	(169.000,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	148.216.000,00	148.047.000,00	(169.000,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.216.000,00	148.047.000,00	(169.000,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.008.001.580,00	710.158.317,00	(297.843.263,00)	70,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	785.318.000,00	500.927.317,00	(284.390.683,00)	63,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	785.318.000,00	500.927.317,00	(284.390.683,00)	63,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	785.318.000,00	500.927.317,00	(284.390.683,00)	63,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	187.500.000,00	186.472.500,00	(1.027.500,00)	99,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	187.500.000,00	186.472.500,00	(1.027.500,00)	99,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.500.000,00	186.472.500,00	(1.027.500,00)	99,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	35.183.580,00	22.758.500,00	(12.425.080,00)	64,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.183.580,00	22.758.500,00	(12.425.080,00)	64,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.183.580,00	22.758.500,00	(12.425.080,00)	64,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	2.873.876.787,00	2.757.324.619,00	(116.552.168,00)	95,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	2.029.361.787,00	1.913.454.619,00	(115.907.168,00)	94,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.006.911.787,00	1.891.004.619,00	(115.907.168,00)	94,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.006.911.787,00	1.891.004.619,00	(115.907.168,00)	94,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	22.450.000,00	22.450.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.450.000,00	22.450.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	175.000,00	-	(175.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	175.000,00	-	(175.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	-	(175.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	844.340.000,00	843.870.000,00	(470.000,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	844.340.000,00	843.870.000,00	(470.000,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.340.000,00	843.870.000,00	(470.000,00)	99,94	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Bagian Organisasi**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002		5	BELANJA DAERAH	570.397.000,00	565.113.539,00	(5.283.461,00)	99,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	570.397.000,00	565.113.539,00	(5.283.461,00)	99,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	570.397.000,00	565.113.539,00	(5.283.461,00)	99,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	225.659.000,00	224.391.125,00	(1.267.875,00)	99,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	225.659.000,00	224.391.125,00	(1.267.875,00)	99,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.659.000,00	224.391.125,00	(1.267.875,00)	99,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	115.619.000,00	114.184.213,00	(1.434.787,00)	98,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	115.619.000,00	114.184.213,00	(1.434.787,00)	98,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.619.000,00	114.184.213,00	(1.434.787,00)	98,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	65.678.500,00	65.551.925,00	(126.575,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	65.678.500,00	65.551.925,00	(126.575,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.678.500,00	65.551.925,00	(126.575,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	53.421.000,00	52.590.179,00	(830.821,00)	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	53.421.000,00	52.590.179,00	(830.821,00)	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.421.000,00	52.590.179,00	(830.821,00)	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	110.019.500,00	108.396.097,00	(1.623.403,00)	98,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	110.019.500,00	108.396.097,00	(1.623.403,00)	98,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.019.500,00	108.396.097,00	(1.623.403,00)	98,52	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Bagian Administrasi Pembangunan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003		5	BELANJA DAERAH	657.523.045,00	646.085.900,00	(11.437.145,00)	98,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	657.523.045,00	646.085.900,00	(11.437.145,00)	98,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	657.523.045,00	646.085.900,00	(11.437.145,00)	98,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	71.026.000,00	65.359.316,00	(5.666.684,00)	92,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.026.000,00	65.359.316,00	(5.666.684,00)	92,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.026.000,00	65.359.316,00	(5.666.684,00)	92,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	485.457.045,00	482.442.112,00	(3.014.933,00)	99,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	485.457.045,00	482.442.112,00	(3.014.933,00)	99,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.457.045,00	482.442.112,00	(3.014.933,00)	99,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	101.040.000,00	98.284.472,00	(2.755.528,00)	97,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	101.040.000,00	98.284.472,00	(2.755.528,00)	97,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.040.000,00	98.284.472,00	(2.755.528,00)	97,27	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Bagian Tata Pemerintahan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004		5	BELANJA DAERAH	981.055.556,00	942.836.173,00	(38.219.383,00)	96,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	981.055.556,00	942.836.173,00	(38.219.383,00)	96,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	756.055.556,00	725.236.232,00	(30.819.324,00)	95,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	155.055.556,00	146.066.428,00	(8.989.128,00)	94,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	154.805.556,00	145.816.428,00	(8.989.128,00)	94,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.805.556,00	145.816.428,00	(8.989.128,00)	94,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	95.000.000,00	90.665.643,00	(4.334.357,00)	95,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	90.665.643,00	(4.334.357,00)	95,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	90.665.643,00	(4.334.357,00)	95,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	506.000.000,00	488.504.161,00	(17.495.839,00)	96,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	506.000.000,00	488.504.161,00	(17.495.839,00)	96,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.000.000,00	488.504.161,00	(17.495.839,00)	96,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	225.000.000,00	217.599.941,00	(7.400.059,00)	96,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	206.000.000,00	199.123.981,00	(6.876.019,00)	96,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	206.000.000,00	199.123.981,00	(6.876.019,00)	96,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.000.000,00	199.123.981,00	(6.876.019,00)	96,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0002		FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI	9.000.000,00	8.821.618,00	(178.382,00)	98,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.821.618,00	(178.382,00)	98,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.821.618,00	(178.382,00)	98,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0003		EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	10.000.000,00	9.654.342,00	(345.658,00)	96,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.654.342,00	(345.658,00)	96,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.654.342,00	(345.658,00)	96,54	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Bagian Kesejahteraan Rakyat**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005		5	BELANJA DAERAH	14.207.412.000,00	11.741.286.444,00	(2.466.125.556,00)	82,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.207.412.000,00	11.741.286.444,00	(2.466.125.556,00)	82,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.207.412.000,00	11.741.286.444,00	(2.466.125.556,00)	82,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	14.049.412.000,00	11.670.825.104,00	(2.378.586.896,00)	83,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.049.412.000,00	11.670.825.104,00	(2.378.586.896,00)	83,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.572.412.000,00	2.494.325.104,00	(78.086.896,00)	96,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	11.477.000.000,00	9.176.500.000,00	(2.300.500.000,00)	79,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	133.000.000,00	54.720.770,00	(78.279.230,00)	41,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	133.000.000,00	54.720.770,00	(78.279.230,00)	41,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	54.720.770,00	(78.279.230,00)	41,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	25.000.000,00	15.740.570,00	(9.259.430,00)	62,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	15.740.570,00	(9.259.430,00)	62,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	15.740.570,00	(9.259.430,00)	62,96	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Bagian Hukum**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006		5	BELANJA DAERAH	755.908.450,00	706.497.038,00	(49.411.412,00)	93,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	755.908.450,00	706.497.038,00	(49.411.412,00)	93,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	755.908.450,00	706.497.038,00	(49.411.412,00)	93,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	184.648.600,00	175.325.581,00	(9.323.019,00)	94,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	184.648.600,00	175.325.581,00	(9.323.019,00)	94,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.648.600,00	175.325.581,00	(9.323.019,00)	94,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	273.004.400,00	252.116.089,00	(20.888.311,00)	92,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	273.004.400,00	252.116.089,00	(20.888.311,00)	92,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.004.400,00	252.116.089,00	(20.888.311,00)	92,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	298.255.450,00	279.055.368,00	(19.200.082,00)	93,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	293.005.450,00	273.806.368,00	(19.199.082,00)	93,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.005.450,00	273.806.368,00	(19.199.082,00)	93,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	5.250.000,00	5.249.000,00	(1.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0003	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.250.000,00	5.249.000,00	(1.000,00)	99,98	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Bagian Perekonomian**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007		5	BELANJA DAERAH	904.490.321,00	870.611.357,00	(33.878.964,00)	96,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	904.490.321,00	870.611.357,00	(33.878.964,00)	96,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	306.610.500,00	287.730.655,00	(18.879.845,00)	93,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	193.750.000,00	186.265.077,00	(7.484.923,00)	96,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	193.750.000,00	186.265.077,00	(7.484.923,00)	96,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.750.000,00	186.265.077,00	(7.484.923,00)	96,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	68.468.000,00	61.626.298,00	(6.841.702,00)	90,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.468.000,00	61.626.298,00	(6.841.702,00)	90,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.468.000,00	61.626.298,00	(6.841.702,00)	90,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	44.392.500,00	39.839.280,00	(4.553.220,00)	89,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.392.500,00	39.839.280,00	(4.553.220,00)	89,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.392.500,00	39.839.280,00	(4.553.220,00)	89,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	597.879.821,00	582.880.702,00	(14.999.119,00)	97,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	556.718.321,00	544.995.190,00	(11.723.131,00)	97,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	556.718.321,00	544.995.190,00	(11.723.131,00)	97,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.718.321,00	544.995.190,00	(11.723.131,00)	97,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	16.429.000,00	14.969.720,00	(1.459.280,00)	91,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.429.000,00	14.969.720,00	(1.459.280,00)	91,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.429.000,00	14.969.720,00	(1.459.280,00)	91,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	24.732.500,00	22.915.792,00	(1.816.708,00)	92,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.732.500,00	22.915.792,00	(1.816.708,00)	92,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.732.500,00	22.915.792,00	(1.816.708,00)	92,65	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008		5	BELANJA DAERAH	480.000.000,00	477.326.705,00	(2.673.295,00)	99,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	480.000.000,00	477.326.705,00	(2.673.295,00)	99,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	480.000.000,00	477.326.705,00	(2.673.295,00)	99,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	138.807.000,00	137.826.214,00	(980.786,00)	99,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	138.807.000,00	137.826.214,00	(980.786,00)	99,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.807.000,00	137.826.214,00	(980.786,00)	99,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	57.037.400,00	56.685.000,00	(352.400,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.037.400,00	56.685.000,00	(352.400,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.037.400,00	56.685.000,00	(352.400,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	284.155.600,00	282.815.491,00	(1.340.109,00)	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	261.455.600,00	260.215.491,00	(1.240.109,00)	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.455.600,00	260.215.491,00	(1.240.109,00)	99,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0003	5.2	BELANJA MODAL	22.700.000,00	22.600.000,00	(100.000,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.700.000,00	22.600.000,00	(100.000,00)	99,55	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DAERAH**
Organisasi : **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009		5	BELANJA DAERAH	713.240.000,00	699.353.741,00	(13.886.259,00)	98,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	713.240.000,00	699.353.741,00	(13.886.259,00)	98,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	713.240.000,00	699.353.741,00	(13.886.259,00)	98,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	234.115.000,00	229.533.317,00	(4.581.683,00)	98,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	234.115.000,00	229.533.317,00	(4.581.683,00)	98,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.115.000,00	229.533.317,00	(4.581.683,00)	98,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	320.084.000,00	318.477.124,00	(1.606.876,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	275.084.000,00	273.727.124,00	(1.356.876,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.084.000,00	273.727.124,00	(1.356.876,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.750.000,00	(250.000,00)	99,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	44.750.000,00	(250.000,00)	99,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	159.041.000,00	151.343.300,00	(7.697.700,00)	95,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	156.659.750,00	149.093.300,00	(7.566.450,00)	95,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.659.750,00	149.093.300,00	(7.566.450,00)	95,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.381.250,00	2.250.000,00	(131.250,00)	94,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.381.250,00	2.250.000,00	(131.250,00)	94,48	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **SEKRETARIAT DPRD**
Organisasi : **Sekretariat DPRD**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	62.017.772.400,00	57.477.617.823,00	(4.540.154.577,00)	92,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.013.481.050,00	39.576.309.283,00	(1.437.171.767,00)	96,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	37.725.000,00	33.779.000,00	(3.946.000,00)	89,54	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.344.000,00	3.870.500,00	(473.500,00)	89,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.344.000,00	3.870.500,00	(473.500,00)	89,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.344.000,00	3.870.500,00	(473.500,00)	89,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.624.000,00	4.830.000,00	(794.000,00)	85,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.624.000,00	4.830.000,00	(794.000,00)	85,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.624.000,00	4.830.000,00	(794.000,00)	85,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.808.000,00	3.572.000,00	(236.000,00)	93,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.808.000,00	3.572.000,00	(236.000,00)	93,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.808.000,00	3.572.000,00	(236.000,00)	93,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.173.000,00	6.148.000,00	(25.000,00)	99,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.173.000,00	6.148.000,00	(25.000,00)	99,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.173.000,00	6.148.000,00	(25.000,00)	99,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.134.000,00	2.781.000,00	(353.000,00)	88,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.134.000,00	2.781.000,00	(353.000,00)	88,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.134.000,00	2.781.000,00	(353.000,00)	88,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.858.000,00	4.145.500,00	(712.500,00)	85,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.858.000,00	4.145.500,00	(712.500,00)	85,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.858.000,00	4.145.500,00	(712.500,00)	85,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.784.000,00	8.432.000,00	(1.352.000,00)	86,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.784.000,00	8.432.000,00	(1.352.000,00)	86,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.784.000,00	8.432.000,00	(1.352.000,00)	86,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.776.557.500,00	5.478.461.908,00	(298.095.592,00)	94,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.513.668.000,00	5.229.058.878,00	(284.609.122,00)	94,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.513.668.000,00	5.229.058.878,00	(284.609.122,00)	94,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.513.668.000,00	5.229.058.878,00	(284.609.122,00)	94,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	24.818.000,00	20.783.000,00	(4.035.000,00)	83,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.818.000,00	20.783.000,00	(4.035.000,00)	83,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.818.000,00	20.783.000,00	(4.035.000,00)	83,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.708.000,00	4.852.000,00	(856.000,00)	85,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.708.000,00	4.852.000,00	(856.000,00)	85,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.708.000,00	4.852.000,00	(856.000,00)	85,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	232.363.500,00	223.768.030,00	(8.595.470,00)	96,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	232.363.500,00	223.768.030,00	(8.595.470,00)	96,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.363.500,00	223.768.030,00	(8.595.470,00)	96,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	76.446.400,00	60.215.000,00	(16.231.400,00)	78,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	26.446.400,00	12.433.000,00	(14.013.400,00)	47,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.446.400,00	12.433.000,00	(14.013.400,00)	47,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.446.400,00	12.433.000,00	(14.013.400,00)	47,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50.000.000,00	47.782.000,00	(2.218.000,00)	95,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.782.000,00	(2.218.000,00)	95,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.782.000,00	(2.218.000,00)	95,56	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.860.000.500,00	2.692.738.523,00	(167.261.977,00)	94,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	58.647.500,00	55.705.000,00	(2.942.500,00)	94,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.647.500,00	55.705.000,00	(2.942.500,00)	94,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.647.500,00	55.705.000,00	(2.942.500,00)	94,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	50.000.000,00	37.478.400,00	(12.521.600,00)	74,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	37.478.400,00	(12.521.600,00)	74,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	37.478.400,00	(12.521.600,00)	74,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.628.033.000,00	1.583.312.978,00	(44.720.022,00)	97,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.628.033.000,00	1.583.312.978,00	(44.720.022,00)	97,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.628.033.000,00	1.583.312.978,00	(44.720.022,00)	97,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	359.072.500,00	357.823.050,00	(1.249.450,00)	99,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	359.072.500,00	357.823.050,00	(1.249.450,00)	99,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.072.500,00	357.823.050,00	(1.249.450,00)	99,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	210.250.000,00	208.787.100,00	(1.462.900,00)	99,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	204.100.000,00	202.653.600,00	(1.446.400,00)	99,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.100.000,00	202.653.600,00	(1.446.400,00)	99,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.2	BELANJA MODAL	6.150.000,00	6.133.500,00	(16.500,00)	99,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.150.000,00	6.133.500,00	(16.500,00)	99,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.000.000,00	24.002.500,00	(997.500,00)	96,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.002.500,00	(997.500,00)	96,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.002.500,00	(997.500,00)	96,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	519.713.500,00	416.392.495,00	(103.321.005,00)	80,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	519.713.500,00	416.392.495,00	(103.321.005,00)	80,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.713.500,00	416.392.495,00	(103.321.005,00)	80,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	9.284.000,00	9.237.000,00	(47.000,00)	99,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	9.284.000,00	9.237.000,00	(47.000,00)	99,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.284.000,00	9.237.000,00	(47.000,00)	99,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	295.815.250,00	262.461.300,00	(33.353.950,00)	88,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	240.818.250,00	217.778.000,00	(23.040.250,00)	90,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.393.250,00	-	(3.393.250,00)	-	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.393.250,00	-	(3.393.250,00)	-	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	237.425.000,00	217.778.000,00	(19.647.000,00)	91,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.425.000,00	217.778.000,00	(19.647.000,00)	91,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	54.997.000,00	44.683.300,00	(10.313.700,00)	81,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	46.774.000,00	44.683.300,00	(2.090.700,00)	95,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.774.000,00	44.683.300,00	(2.090.700,00)	95,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	8.223.000,00	-	(8.223.000,00)	-	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.223.000,00	-	(8.223.000,00)	-	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.449.831.400,00	1.357.530.578,00	(92.300.822,00)	93,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	41.855.000,00	39.475.000,00	(2.380.000,00)	94,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.855.000,00	39.475.000,00	(2.380.000,00)	94,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.855.000,00	39.475.000,00	(2.380.000,00)	94,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	796.500.000,00	728.547.078,00	(67.952.922,00)	91,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	796.500.000,00	728.547.078,00	(67.952.922,00)	91,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	796.500.000,00	728.547.078,00	(67.952.922,00)	91,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	611.476.400,00	589.508.500,00	(21.967.900,00)	96,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	611.476.400,00	589.508.500,00	(21.967.900,00)	96,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.476.400,00	589.508.500,00	(21.967.900,00)	96,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.548.918.000,00	1.404.036.266,00	(144.881.734,00)	90,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	330.000.000,00	290.272.995,00	(39.727.005,00)	87,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000,00	290.272.995,00	(39.727.005,00)	87,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	290.272.995,00	(39.727.005,00)	87,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	300.000.000,00	280.445.936,00	(19.554.064,00)	93,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	280.445.936,00	(19.554.064,00)	93,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	280.445.936,00	(19.554.064,00)	93,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	19.460.000,00	10.011.000,00	(9.449.000,00)	51,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.460.000,00	10.011.000,00	(9.449.000,00)	51,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.460.000,00	10.011.000,00	(9.449.000,00)	51,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	255.070.000,00	197.363.840,00	(57.706.160,00)	77,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	255.070.000,00	197.363.840,00	(57.706.160,00)	77,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.070.000,00	197.363.840,00	(57.706.160,00)	77,37	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	644.388.000,00	625.942.495,00	(18.445.505,00)	97,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	644.388.000,00	625.942.495,00	(18.445.505,00)	97,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.388.000,00	625.942.495,00	(18.445.505,00)	97,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	28.149.961.000,00	27.531.975.041,00	(617.985.959,00)	97,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	27.737.858.000,00	27.278.480.541,00	(459.377.459,00)	98,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.737.858.000,00	27.278.480.541,00	(459.377.459,00)	98,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	27.737.858.000,00	27.278.480.541,00	(459.377.459,00)	98,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	337.038.000,00	213.244.500,00	(123.793.500,00)	63,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	337.038.000,00	213.244.500,00	(123.793.500,00)	63,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.038.000,00	213.244.500,00	(123.793.500,00)	63,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	75.065.000,00	40.250.000,00	(34.815.000,00)	53,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	75.065.000,00	40.250.000,00	(34.815.000,00)	53,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.065.000,00	40.250.000,00	(34.815.000,00)	53,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	818.226.000,00	755.111.667,00	(63.114.333,00)	92,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	20.000.000,00	18.095.265,00	(1.904.735,00)	90,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.095.265,00	(1.904.735,00)	90,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.095.265,00	(1.904.735,00)	90,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002		FASILITASI FRAKSI DPRD	15.000.000,00	8.250.000,00	(6.750.000,00)	55,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	8.250.000,00	(6.750.000,00)	55,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	8.250.000,00	(6.750.000,00)	55,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	601.226.000,00	577.561.748,00	(23.664.252,00)	96,06	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	601.226.000,00	577.561.748,00	(23.664.252,00)	96,06	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.226.000,00	577.561.748,00	(23.664.252,00)	96,06	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	182.000.000,00	151.204.654,00	(30.795.346,00)	83,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	182.000.000,00	151.204.654,00	(30.795.346,00)	83,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.000.000,00	151.204.654,00	(30.795.346,00)	83,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.004.291.350,00	17.901.308.540,00	(3.102.982.810,00)	85,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	1.853.098.200,00	1.568.928.191,00	(284.170.009,00)	84,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	445.947.000,00	379.682.168,00	(66.264.832,00)	85,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	445.947.000,00	379.682.168,00	(66.264.832,00)	85,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.947.000,00	379.682.168,00	(66.264.832,00)	85,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	930.934.800,00	886.037.395,00	(44.897.405,00)	95,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	930.934.800,00	886.037.395,00	(44.897.405,00)	95,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	930.934.800,00	886.037.395,00	(44.897.405,00)	95,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	174.177.000,00	124.463.878,00	(49.713.122,00)	71,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	174.177.000,00	124.463.878,00	(49.713.122,00)	71,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.177.000,00	124.463.878,00	(49.713.122,00)	71,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	236.018.400,00	168.994.750,00	(67.023.650,00)	71,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	236.018.400,00	168.994.750,00	(67.023.650,00)	71,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.018.400,00	168.994.750,00	(67.023.650,00)	71,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005		PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD	66.021.000,00	9.750.000,00	(56.271.000,00)	14,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	66.021.000,00	9.750.000,00	(56.271.000,00)	14,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.021.000,00	9.750.000,00	(56.271.000,00)	14,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	157.785.000,00	143.967.050,00	(13.817.950,00)	91,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	8.805.000,00	8.029.800,00	(775.200,00)	91,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.805.000,00	8.029.800,00	(775.200,00)	91,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.805.000,00	8.029.800,00	(775.200,00)	91,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	11.700.000,00	9.079.750,00	(2.620.250,00)	77,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	9.079.750,00	(2.620.250,00)	77,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	9.079.750,00	(2.620.250,00)	77,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	48.420.000,00	44.355.000,00	(4.065.000,00)	91,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.420.000,00	44.355.000,00	(4.065.000,00)	91,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.420.000,00	44.355.000,00	(4.065.000,00)	91,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004		PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	48.420.000,00	43.177.000,00	(5.243.000,00)	89,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.420.000,00	43.177.000,00	(5.243.000,00)	89,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.420.000,00	43.177.000,00	(5.243.000,00)	89,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	40.440.000,00	39.325.500,00	(1.114.500,00)	97,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	40.440.000,00	39.325.500,00	(1.114.500,00)	97,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.440.000,00	39.325.500,00	(1.114.500,00)	97,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	1.300.456.300,00	1.248.878.401,00	(51.577.899,00)	96,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	27.874.000,00	18.280.050,00	(9.593.950,00)	65,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.874.000,00	18.280.050,00	(9.593.950,00)	65,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.874.000,00	18.280.050,00	(9.593.950,00)	65,58	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	17.654.000,00	7.202.700,00	(10.451.300,00)	40,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.654.000,00	7.202.700,00	(10.451.300,00)	40,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.654.000,00	7.202.700,00	(10.451.300,00)	40,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	27.874.000,00	11.402.750,00	(16.471.250,00)	40,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.874.000,00	11.402.750,00	(16.471.250,00)	40,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.874.000,00	11.402.750,00	(16.471.250,00)	40,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	27.874.000,00	17.663.200,00	(10.210.800,00)	63,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.874.000,00	17.663.200,00	(10.210.800,00)	63,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.874.000,00	17.663.200,00	(10.210.800,00)	63,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007		PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	640.170.800,00	636.287.121,00	(3.883.679,00)	99,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	640.170.800,00	636.287.121,00	(3.883.679,00)	99,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.170.800,00	636.287.121,00	(3.883.679,00)	99,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008		PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	559.009.500,00	558.042.580,00	(966.920,00)	99,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	559.009.500,00	558.042.580,00	(966.920,00)	99,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.009.500,00	558.042.580,00	(966.920,00)	99,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	3.414.656.000,00	2.975.311.419,00	(439.344.581,00)	87,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001		ORIENTASI DPRD	441.162.000,00	410.112.598,00	(31.049.402,00)	92,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	441.162.000,00	410.112.598,00	(31.049.402,00)	92,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.162.000,00	410.112.598,00	(31.049.402,00)	92,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	2.348.403.800,00	2.022.832.921,00	(325.570.879,00)	86,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.348.403.800,00	2.022.832.921,00	(325.570.879,00)	86,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.348.403.800,00	2.022.832.921,00	(325.570.879,00)	86,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004		PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	40.000.000,00	24.600.000,00	(15.400.000,00)	61,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	24.600.000,00	(15.400.000,00)	61,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.600.000,00	(15.400.000,00)	61,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	220.722.000,00	200.150.000,00	(20.572.000,00)	90,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	220.722.000,00	200.150.000,00	(20.572.000,00)	90,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.722.000,00	200.150.000,00	(20.572.000,00)	90,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006		PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	15.000.000,00	14.401.000,00	(599.000,00)	96,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.401.000,00	(599.000,00)	96,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.401.000,00	(599.000,00)	96,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	3.910.000,00	2.590.000,00	(1.320.000,00)	66,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.910.000,00	2.590.000,00	(1.320.000,00)	66,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	2.590.000,00	(1.320.000,00)	66,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	345.458.200,00	300.624.900,00	(44.833.300,00)	87,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	345.458.200,00	300.624.900,00	(44.833.300,00)	87,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.458.200,00	300.624.900,00	(44.833.300,00)	87,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	2.206.316.000,00	2.160.745.250,00	(45.570.750,00)	97,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	25.000.000,00	14.250.000,00	(10.750.000,00)	56,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	14.250.000,00	(10.750.000,00)	56,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	14.250.000,00	(10.750.000,00)	56,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002		PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	5.152.000,00	5.138.000,00	(14.000,00)	99,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.152.000,00	5.138.000,00	(14.000,00)	99,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.152.000,00	5.138.000,00	(14.000,00)	99,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	2.176.164.000,00	2.141.357.250,00	(34.806.750,00)	98,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.176.164.000,00	2.141.357.250,00	(34.806.750,00)	98,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.176.164.000,00	2.141.357.250,00	(34.806.750,00)	98,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	397.919.250,00	201.969.771,00	(195.949.479,00)	50,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001		PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD	188.219.600,00	1.000.000,00	(187.219.600,00)	0,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	188.219.600,00	1.000.000,00	(187.219.600,00)	0,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.219.600,00	1.000.000,00	(187.219.600,00)	0,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002		PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	209.699.650,00	200.969.771,00	(8.729.879,00)	95,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	209.699.650,00	200.969.771,00	(8.729.879,00)	95,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.699.650,00	200.969.771,00	(8.729.879,00)	95,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	11.674.060.600,00	9.601.508.458,00	(2.072.552.142,00)	82,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	9.449.207.500,00	7.923.893.292,00	(1.525.314.208,00)	83,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.449.207.500,00	7.923.893.292,00	(1.525.314.208,00)	83,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.449.207.500,00	7.923.893.292,00	(1.525.314.208,00)	83,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002		PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	718.024.500,00	713.539.950,00	(4.484.550,00)	99,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	718.024.500,00	713.539.950,00	(4.484.550,00)	99,37	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	718.024.500,00	713.539.950,00	(4.484.550,00)	99,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004		FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	1.503.828.600,00	961.075.216,00	(542.753.384,00)	63,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.503.828.600,00	961.075.216,00	(542.753.384,00)	63,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.503.828.600,00	961.075.216,00	(542.753.384,00)	63,90	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PERENCANAAN**
Organisasi : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.905.277.900,00	9.657.622.270,00	(1.247.655.630,00)	88,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.513.977.900,00	7.297.328.922,00	(1.216.648.978,00)	85,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.841.000,00	5.511.950,00	(329.050,00)	94,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.102.500,00	2.953.200,00	(149.300,00)	95,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.102.500,00	2.953.200,00	(149.300,00)	95,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.102.500,00	2.953.200,00	(149.300,00)	95,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.738.500,00	2.558.750,00	(179.750,00)	93,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.738.500,00	2.558.750,00	(179.750,00)	93,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.738.500,00	2.558.750,00	(179.750,00)	93,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.035.165.000,00	4.940.698.640,00	(1.094.466.360,00)	81,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.024.962.000,00	4.931.305.640,00	(1.093.656.360,00)	81,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.024.962.000,00	4.931.305.640,00	(1.093.656.360,00)	81,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.024.962.000,00	4.931.305.640,00	(1.093.656.360,00)	81,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	3.433.000,00	3.098.000,00	(335.000,00)	90,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.433.000,00	3.098.000,00	(335.000,00)	90,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.433.000,00	3.098.000,00	(335.000,00)	90,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.220.000,00	3.097.000,00	(123.000,00)	96,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.220.000,00	3.097.000,00	(123.000,00)	96,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	3.097.000,00	(123.000,00)	96,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.134.000,00	1.850.000,00	(284.000,00)	86,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.134.000,00	1.850.000,00	(284.000,00)	86,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.134.000,00	1.850.000,00	(284.000,00)	86,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.416.000,00	1.348.000,00	(68.000,00)	95,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.416.000,00	1.348.000,00	(68.000,00)	95,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.416.000,00	1.348.000,00	(68.000,00)	95,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	490.000,00	490.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	280.000,00	280.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	280.000,00	280.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000,00	280.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	210.000,00	210.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	210.000,00	210.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	145.251.800,00	134.515.612,00	(10.736.188,00)	92,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	145.251.800,00	134.515.612,00	(10.736.188,00)	92,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	145.251.800,00	134.515.612,00	(10.736.188,00)	92,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.251.800,00	134.515.612,00	(10.736.188,00)	92,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	772.040.980,00	732.113.109,00	(39.927.871,00)	94,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.022.500,00	16.029.800,00	(992.700,00)	94,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.022.500,00	16.029.800,00	(992.700,00)	94,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.022.500,00	16.029.800,00	(992.700,00)	94,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	42.028.200,00	41.805.000,00	(223.200,00)	99,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.028.200,00	41.805.000,00	(223.200,00)	99,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.028.200,00	41.805.000,00	(223.200,00)	99,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	20.370.000,00	17.901.518,00	(2.468.482,00)	87,88	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.370.000,00	17.901.518,00	(2.468.482,00)	87,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.370.000,00	17.901.518,00	(2.468.482,00)	87,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	213.324.000,00	209.937.400,00	(3.386.600,00)	98,41	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	213.324.000,00	209.937.400,00	(3.386.600,00)	98,41	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.324.000,00	209.937.400,00	(3.386.600,00)	98,41	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.910.080,00	15.837.000,00	(73.080,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.910.080,00	15.837.000,00	(73.080,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.910.080,00	15.837.000,00	(73.080,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	90,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	90,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	90,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	47.250.000,00	44.392.505,00	(2.857.495,00)	93,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	47.250.000,00	44.392.505,00	(2.857.495,00)	93,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.250.000,00	44.392.505,00	(2.857.495,00)	93,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	404.136.200,00	375.409.886,00	(28.726.314,00)	92,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	404.136.200,00	375.409.886,00	(28.726.314,00)	92,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.136.200,00	375.409.886,00	(28.726.314,00)	92,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	366.616.120,00	350.238.793,00	(16.377.327,00)	95,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	40.232.100,00	35.100.000,00	(5.132.100,00)	87,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	40.232.100,00	35.100.000,00	(5.132.100,00)	87,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.232.100,00	35.100.000,00	(5.132.100,00)	87,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	326.384.020,00	315.138.793,00	(11.245.227,00)	96,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	326.384.020,00	315.138.793,00	(11.245.227,00)	96,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.384.020,00	315.138.793,00	(11.245.227,00)	96,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	798.755.000,00	747.434.890,00	(51.320.110,00)	93,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.800.000,00	2.799.000,00	(1.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.799.000,00	(1.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.799.000,00	(1.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	215.880.000,00	191.867.890,00	(24.012.110,00)	88,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	215.880.000,00	191.867.890,00	(24.012.110,00)	88,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.880.000,00	191.867.890,00	(24.012.110,00)	88,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	580.075.000,00	552.768.000,00	(27.307.000,00)	95,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	580.075.000,00	552.768.000,00	(27.307.000,00)	95,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.075.000,00	552.768.000,00	(27.307.000,00)	95,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	389.818.000,00	386.325.928,00	(3.492.072,00)	99,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	200.450.000,00	200.414.428,00	(35.572,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.450.000,00	200.414.428,00	(35.572,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.450.000,00	200.414.428,00	(35.572,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	74.496.000,00	71.160.000,00	(3.336.000,00)	95,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	74.496.000,00	71.160.000,00	(3.336.000,00)	95,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.496.000,00	71.160.000,00	(3.336.000,00)	95,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	114.872.000,00	114.751.500,00	(120.500,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	114.872.000,00	114.751.500,00	(120.500,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.872.000,00	114.751.500,00	(120.500,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.156.045.500,00	1.153.355.977,00	(2.689.523,00)	99,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1.013.033.900,00	1.010.613.727,00	(2.420.173,00)	99,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	13.910.000,00	13.910.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.910.000,00	13.910.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.910.000,00	13.910.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	86.813.500,00	86.755.500,00	(58.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	86.813.500,00	86.755.500,00	(58.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.813.500,00	86.755.500,00	(58.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	912.310.400,00	909.948.227,00	(2.362.173,00)	99,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	912.310.400,00	909.948.227,00	(2.362.173,00)	99,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912.310.400,00	909.948.227,00	(2.362.173,00)	99,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	114.995.500,00	114.810.500,00	(185.000,00)	99,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	75.550.500,00	75.411.500,00	(139.000,00)	99,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.550.500,00	75.411.500,00	(139.000,00)	99,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.550.500,00	75.411.500,00	(139.000,00)	99,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003		PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.445.000,00	39.399.000,00	(46.000,00)	99,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.445.000,00	39.399.000,00	(46.000,00)	99,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.445.000,00	39.399.000,00	(46.000,00)	99,88	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.016.100,00	27.931.750,00	(84.350,00)	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.016.100,00	27.931.750,00	(84.350,00)	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.016.100,00	27.931.750,00	(84.350,00)	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.016.100,00	27.931.750,00	(84.350,00)	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.235.254.500,00	1.206.937.371,00	(28.317.129,00)	97,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	536.454.500,00	514.310.095,00	(22.144.405,00)	95,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	23.223.500,00	22.240.500,00	(983.000,00)	95,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.223.500,00	22.240.500,00	(983.000,00)	95,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.223.500,00	22.240.500,00	(983.000,00)	95,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	122.648.000,00	116.842.602,00	(5.805.398,00)	95,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	122.648.000,00	116.842.602,00	(5.805.398,00)	95,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.648.000,00	116.842.602,00	(5.805.398,00)	95,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	246.285.000,00	239.681.860,00	(6.603.140,00)	97,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	246.285.000,00	239.681.860,00	(6.603.140,00)	97,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.285.000,00	239.681.860,00	(6.603.140,00)	97,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	98.908.000,00	96.171.935,00	(2.736.065,00)	97,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	98.908.000,00	96.171.935,00	(2.736.065,00)	97,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.908.000,00	96.171.935,00	(2.736.065,00)	97,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	17.405.000,00	14.481.250,00	(2.923.750,00)	83,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.405.000,00	14.481.250,00	(2.923.750,00)	83,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.405.000,00	14.481.250,00	(2.923.750,00)	83,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	10.125.000,00	8.950.000,00	(1.175.000,00)	88,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.125.000,00	8.950.000,00	(1.175.000,00)	88,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.125.000,00	8.950.000,00	(1.175.000,00)	88,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	17.860.000,00	15.941.948,00	(1.918.052,00)	89,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.860.000,00	15.941.948,00	(1.918.052,00)	89,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.860.000,00	15.941.948,00	(1.918.052,00)	89,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	328.300.000,00	325.241.480,00	(3.058.520,00)	99,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	102.500.000,00	101.397.480,00	(1.102.520,00)	98,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.500.000,00	101.397.480,00	(1.102.520,00)	98,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.500.000,00	101.397.480,00	(1.102.520,00)	98,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	225.800.000,00	223.844.000,00	(1.956.000,00)	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	225.800.000,00	223.844.000,00	(1.956.000,00)	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.800.000,00	223.844.000,00	(1.956.000,00)	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	370.500.000,00	367.385.796,00	(3.114.204,00)	99,15	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	88.240.000,00	88.057.013,00	(182.987,00)	99,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.240.000,00	88.057.013,00	(182.987,00)	99,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.240.000,00	88.057.013,00	(182.987,00)	99,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	41.820.000,00	41.752.866,00	(67.134,00)	99,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.820.000,00	41.752.866,00	(67.134,00)	99,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.820.000,00	41.752.866,00	(67.134,00)	99,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	153.440.000,00	150.765.164,00	(2.674.836,00)	98,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	153.440.000,00	150.765.164,00	(2.674.836,00)	98,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.440.000,00	150.765.164,00	(2.674.836,00)	98,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	87.000.000,00	86.810.753,00	(189.247,00)	99,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	87.000.000,00	86.810.753,00	(189.247,00)	99,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	86.810.753,00	(189.247,00)	99,78	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Organisasi : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.437.200.000,00	1.226.453.170,00	(210.746.830,00)	85,33	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.437.200.000,00	1.226.453.170,00	(210.746.830,00)	85,33	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	670.000.000,00	624.409.800,00	(45.590.200,00)	93,19	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0007		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	670.000.000,00	624.409.800,00	(45.590.200,00)	93,19	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	670.000.000,00	624.409.800,00	(45.590.200,00)	93,19	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	670.000.000,00	624.409.800,00	(45.590.200,00)	93,19	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	767.200.000,00	602.043.370,00	(165.156.630,00)	78,47	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	144.000.000,00	124.225.500,00	(19.774.500,00)	86,26	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	124.225.500,00	(19.774.500,00)	86,26	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	124.225.500,00	(19.774.500,00)	86,26	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0002		UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	250.000.000,00	198.937.900,00	(51.062.100,00)	79,57	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	198.937.900,00	(51.062.100,00)	79,57	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	198.937.900,00	(51.062.100,00)	79,57	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003		DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	48.200.000,00	19.436.500,00	(28.763.500,00)	40,32	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.200.000,00	19.436.500,00	(28.763.500,00)	40,32	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.200.000,00	19.436.500,00	(28.763.500,00)	40,32	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0005		FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	325.000.000,00	259.443.470,00	(65.556.530,00)	79,82	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	315.000.000,00	259.443.470,00	(55.556.530,00)	82,36	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	259.443.470,00	(55.556.530,00)	82,36	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0005	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0005	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEUANGAN**
Organisasi : **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.426.635.254.000,00	2.391.021.523.800,00	(35.613.730.200,00)	98,53	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.481.761.000,00	38.389.303.672,00	1.907.542.672,00	105,22	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.031.761.000,00	26.031.762.403,00	1.403,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.450.000.000,00	12.357.541.269,00	1.907.541.269,00	118,25	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.390.153.493.000,00	2.352.632.220.128,00	(37.521.272.872,00)	98,43	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.153.066.903.000,00	2.141.851.769.410,00	(11.215.133.590,00)	99,47	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	237.086.590.000,00	210.780.450.718,00	(26.306.139.282,00)	88,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	454.344.118.887,00	452.764.339.692,00	(1.579.779.195,00)	99,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.167.974.887,00	8.527.311.567,00	(640.663.320,00)	93,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.250.000,00	17.139.000,00	(111.000,00)	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	90,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	90,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	90,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.250.000,00	2.200.000,00	(50.000,00)	97,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.200.000,00	(50.000,00)	97,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.200.000,00	(50.000,00)	97,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.750.000,00	7.739.000,00	(11.000,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.750.000,00	7.739.000,00	(11.000,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	7.739.000,00	(11.000,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.292.646.000,00	5.719.779.984,00	(572.866.016,00)	90,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.250.396.000,00	5.678.736.984,00	(571.659.016,00)	90,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.250.396.000,00	5.678.736.984,00	(571.659.016,00)	90,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.250.396.000,00	5.678.736.984,00	(571.659.016,00)	90,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	41.500.000,00	40.293.000,00	(1.207.000,00)	97,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.500.000,00	40.293.000,00	(1.207.000,00)	97,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	40.293.000,00	(1.207.000,00)	97,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	110.000.000,00	107.405.000,00	(2.595.000,00)	97,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	110.000.000,00	107.405.000,00	(2.595.000,00)	97,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	107.405.000,00	(2.595.000,00)	97,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	107.405.000,00	(2.595.000,00)	97,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	688.698.462,00	677.151.456,00	(11.547.006,00)	98,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	50.002.000,00	49.996.300,00	(5.700,00)	99,98	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.002.000,00	49.996.300,00	(5.700,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.002.000,00	49.996.300,00	(5.700,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	50.022.958,00	48.434.950,00	(1.588.008,00)	96,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.022.958,00	48.434.950,00	(1.588.008,00)	96,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.022.958,00	48.434.950,00	(1.588.008,00)	96,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.615.954,00	31.970.000,00	(3.645.954,00)	89,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.615.954,00	31.970.000,00	(3.645.954,00)	89,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.615.954,00	31.970.000,00	(3.645.954,00)	89,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	125.628.750,00	121.687.369,00	(3.941.381,00)	96,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	125.628.750,00	121.687.369,00	(3.941.381,00)	96,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.628.750,00	121.687.369,00	(3.941.381,00)	96,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	412.428.800,00	410.214.837,00	(2.213.963,00)	99,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	412.428.800,00	410.214.837,00	(2.213.963,00)	99,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.428.800,00	410.214.837,00	(2.213.963,00)	99,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	12.000.000,00	11.848.000,00	(152.000,00)	98,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.848.000,00	(152.000,00)	98,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.848.000,00	(152.000,00)	98,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	946.916.625,00	921.460.250,00	(25.456.375,00)	97,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	577.204.000,00	566.970.500,00	(10.233.500,00)	98,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.572.000,00	6.870.000,00	(2.702.000,00)	71,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.572.000,00	6.870.000,00	(2.702.000,00)	71,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	567.632.000,00	560.100.500,00	(7.531.500,00)	98,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	567.632.000,00	560.100.500,00	(7.531.500,00)	98,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	22.000.000,00	21.992.750,00	(7.250,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	82.750,00	80.000,00	(2.750,00)	96,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.750,00	80.000,00	(2.750,00)	96,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	21.917.250,00	21.912.750,00	(4.500,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.917.250,00	21.912.750,00	(4.500,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	347.712.625,00	332.497.000,00	(15.215.625,00)	95,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	347.712.625,00	332.497.000,00	(15.215.625,00)	95,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	347.712.625,00	332.497.000,00	(15.215.625,00)	95,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	778.544.800,00	752.094.581,00	(26.450.219,00)	96,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	22.500.000,00	21.300.000,00	(1.200.000,00)	94,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	21.300.000,00	(1.200.000,00)	94,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	21.300.000,00	(1.200.000,00)	94,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	450.750.000,00	444.981.423,00	(5.768.577,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	450.750.000,00	444.981.423,00	(5.768.577,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.750.000,00	444.981.423,00	(5.768.577,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.360.000,00	3.962.000,00	(398.000,00)	90,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.360.000,00	3.962.000,00	(398.000,00)	90,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	3.962.000,00	(398.000,00)	90,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	300.934.800,00	281.851.158,00	(19.083.642,00)	93,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	300.934.800,00	281.851.158,00	(19.083.642,00)	93,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.934.800,00	281.851.158,00	(19.083.642,00)	93,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	333.919.000,00	332.281.296,00	(1.637.704,00)	99,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	186.850.000,00	185.705.573,00	(1.144.427,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	186.850.000,00	185.705.573,00	(1.144.427,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.850.000,00	185.705.573,00	(1.144.427,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.000.000,00	44.910.548,00	(89.452,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.910.548,00	(89.452,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.910.548,00	(89.452,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	85.069.000,00	84.862.175,00	(206.825,00)	99,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	85.069.000,00	84.862.175,00	(206.825,00)	99,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.069.000,00	84.862.175,00	(206.825,00)	99,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	17.000.000,00	16.803.000,00	(197.000,00)	98,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.803.000,00	(197.000,00)	98,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.803.000,00	(197.000,00)	98,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	444.289.144.000,00	443.398.744.778,00	(890.399.222,00)	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.310.000.000,00	1.275.363.619,00	(34.636.381,00)	97,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	310.000.000,00	294.585.425,00	(15.414.575,00)	95,02	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	310.000.000,00	294.585.425,00	(15.414.575,00)	95,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	294.585.425,00	(15.414.575,00)	95,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	173.000.000,00	164.632.500,00	(8.367.500,00)	95,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	173.000.000,00	164.632.500,00	(8.367.500,00)	95,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.000.000,00	164.632.500,00	(8.367.500,00)	95,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	389.970.000,00	386.400.596,00	(3.569.404,00)	99,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	389.970.000,00	386.400.596,00	(3.569.404,00)	99,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.970.000,00	386.400.596,00	(3.569.404,00)	99,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	437.030.000,00	429.745.098,00	(7.284.902,00)	98,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	437.030.000,00	429.745.098,00	(7.284.902,00)	98,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.030.000,00	429.745.098,00	(7.284.902,00)	98,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	750.000.000,00	732.287.950,00	(17.712.050,00)	97,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	330.000.000,00	327.737.500,00	(2.262.500,00)	99,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000,00	327.737.500,00	(2.262.500,00)	99,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	327.737.500,00	(2.262.500,00)	99,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	165.000.000,00	158.622.900,00	(6.377.100,00)	96,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000,00	158.622.900,00	(6.377.100,00)	96,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	158.622.900,00	(6.377.100,00)	96,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010		PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN	92.000.000,00	87.068.350,00	(4.931.650,00)	94,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	92.000.000,00	87.068.350,00	(4.931.650,00)	94,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	87.068.350,00	(4.931.650,00)	94,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011		PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	163.000.000,00	158.859.200,00	(4.140.800,00)	97,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	163.000.000,00	158.859.200,00	(4.140.800,00)	97,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.000.000,00	158.859.200,00	(4.140.800,00)	97,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	595.000.000,00	592.597.673,00	(2.402.327,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	15.000.000,00	14.883.500,00	(116.500,00)	99,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.883.500,00	(116.500,00)	99,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.883.500,00	(116.500,00)	99,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	215.000.000,00	213.554.744,00	(1.445.256,00)	99,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	215.000.000,00	213.554.744,00	(1.445.256,00)	99,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	213.554.744,00	(1.445.256,00)	99,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	303.531.000,00	303.199.679,00	(331.321,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	303.531.000,00	303.199.679,00	(331.321,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.531.000,00	303.199.679,00	(331.321,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	31.469.000,00	30.992.750,00	(476.250,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	31.469.000,00	30.992.750,00	(476.250,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.469.000,00	30.992.750,00	(476.250,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010		PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	30.000.000,00	29.967.000,00	(33.000,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.967.000,00	(33.000,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.967.000,00	(33.000,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	441.434.144.000,00	440.599.746.459,00	(834.397.541,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	(128.400.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	(128.400.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00	(128.400.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	(705.997.541,00)	64,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	(705.997.541,00)	64,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	(705.997.541,00)	64,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010		PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	14.681.180.000,00	14.681.180.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	14.681.180.000,00	14.681.180.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.681.180.000,00	14.681.180.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05		PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	200.000.000,00	198.749.077,00	(1.250.923,00)	99,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002		IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	100.000.000,00	99.200.077,00	(799.923,00)	99,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.200.077,00	(799.923,00)	99,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.200.077,00	(799.923,00)	99,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0003		PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.549.000,00	(451.000,00)	99,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.549.000,00	(451.000,00)	99,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.549.000,00	(451.000,00)	99,54	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	887.000.000,00	838.283.347,00	(48.716.653,00)	94,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	887.000.000,00	838.283.347,00	(48.716.653,00)	94,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	500.000.000,00	454.399.916,00	(45.600.084,00)	90,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	454.399.916,00	(45.600.084,00)	90,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	454.399.916,00	(45.600.084,00)	90,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	340.000.000,00	337.780.231,00	(2.219.769,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	340.000.000,00	337.780.231,00	(2.219.769,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	337.780.231,00	(2.219.769,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012		PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	47.000.000,00	46.103.200,00	(896.800,00)	98,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	46.103.200,00	(896.800,00)	98,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	46.103.200,00	(896.800,00)	98,09	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	194.039.214.000,00	186.444.214.155,00	(7.594.999.845,00)	96,08	
	5.02.0.00.0.00.01.0000				-	-	-	-	
	5.02.0.00.0.00.01.0000				-	-	-	-	
	5.02.0.00.0.00.01.0000				-	-	-	-	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	208.539.214.000,00	200.944.214.155,00	(7.594.999.845,00)	96,35	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.944.214.000,00	159.517.643.992,00	(1.426.570.008,00)	99,11	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	41.426.570.163,00	1.426.570.163,00	103,56	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.595.000.000,00	-	(7.595.000.000,00)	-	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	-	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	127.055.500.000,00	124.522.128.087,00	(2.533.371.913,00)	98,00	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	127.055.500.000,00	124.522.128.087,00	(2.533.371.913,00)	98,00	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.01	Pajak Daerah	123.205.300.000,00	120.978.507.825,00	(2.226.792.175,00)	98,19	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.850.200.000,00	3.543.620.262,00	(306.579.738,00)	92,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	14.795.711.850,00	13.983.333.284,00	(812.378.566,00)	94,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.475.880.850,00	11.767.190.352,00	(708.690.498,00)	94,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	86.398.500,00	86.046.109,00	(352.391,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.826.000,00	11.825.000,00	(1.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.826.000,00	11.825.000,00	(1.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.826.000,00	11.825.000,00	(1.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.182.500,00	4.182.500,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.182.500,00	4.182.500,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.182.500,00	4.182.500,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.840.000,00	4.840.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.840.000,00	4.840.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	4.840.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	57.550.000,00	57.198.609,00	(351.391,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	57.550.000,00	57.198.609,00	(351.391,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.550.000,00	57.198.609,00	(351.391,00)	99,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.729.124.900,00	10.071.735.958,00	(657.388.942,00)	93,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.662.960.053,00	10.006.616.890,00	(656.343.163,00)	93,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.662.960.053,00	10.006.616.890,00	(656.343.163,00)	93,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.662.960.053,00	10.006.616.890,00	(656.343.163,00)	93,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.964.000,00	2.952.000,00	(12.000,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.964.000,00	2.952.000,00	(12.000,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.964.000,00	2.952.000,00	(12.000,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	63.200.847,00	62.167.068,00	(1.033.779,00)	98,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	63.200.847,00	62.167.068,00	(1.033.779,00)	98,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.200.847,00	62.167.068,00	(1.033.779,00)	98,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	212.775.000,00	210.632.388,00	(2.142.612,00)	98,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	212.775.000,00	210.632.388,00	(2.142.612,00)	98,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	212.775.000,00	210.632.388,00	(2.142.612,00)	98,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.775.000,00	210.632.388,00	(2.142.612,00)	98,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	286.734.000,00	286.712.474,00	(21.526,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.198.000,00	7.198.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.198.000,00	7.198.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.198.000,00	7.198.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.643.000,00	2.643.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.643.000,00	2.643.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.643.000,00	2.643.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	85.529.300,00	85.519.300,00	(10.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	85.529.300,00	85.519.300,00	(10.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.529.300,00	85.519.300,00	(10.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.468.000,00	18.468.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.468.000,00	18.468.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.468.000,00	18.468.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.060.000,00	3.060.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.060.000,00	3.060.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	3.060.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	166.835.700,00	166.824.174,00	(11.526,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	166.835.700,00	166.824.174,00	(11.526,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.835.700,00	166.824.174,00	(11.526,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	290.001.000,00	269.479.000,00	(20.522.000,00)	92,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	290.001.000,00	269.479.000,00	(20.522.000,00)	92,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	290.001.000,00	269.479.000,00	(20.522.000,00)	92,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.001.000,00	269.479.000,00	(20.522.000,00)	92,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	520.988.000,00	502.136.473,00	(18.851.527,00)	96,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	156.388.000,00	150.197.043,00	(6.190.957,00)	96,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	156.388.000,00	150.197.043,00	(6.190.957,00)	96,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.388.000,00	150.197.043,00	(6.190.957,00)	96,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	362.600.000,00	349.939.430,00	(12.660.570,00)	96,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	362.600.000,00	349.939.430,00	(12.660.570,00)	96,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.600.000,00	349.939.430,00	(12.660.570,00)	96,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	349.859.450,00	340.447.950,00	(9.411.500,00)	97,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	88.480.000,00	82.806.500,00	(5.673.500,00)	93,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.480.000,00	82.806.500,00	(5.673.500,00)	93,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.480.000,00	82.806.500,00	(5.673.500,00)	93,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.420.000,00	30.420.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.420.000,00	30.420.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.420.000,00	30.420.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	220.966.000,00	217.228.000,00	(3.738.000,00)	98,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	220.966.000,00	217.228.000,00	(3.738.000,00)	98,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.966.000,00	217.228.000,00	(3.738.000,00)	98,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	9.993.450,00	9.993.450,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.993.450,00	9.993.450,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.993.450,00	9.993.450,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.319.831.000,00	2.216.142.932,00	(103.688.068,00)	95,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.319.831.000,00	2.216.142.932,00	(103.688.068,00)	95,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	11.280.000,00	11.162.000,00	(118.000,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.280.000,00	11.162.000,00	(118.000,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	11.162.000,00	(118.000,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	86.000.000,00	83.279.367,00	(2.720.633,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.000.000,00	83.279.367,00	(2.720.633,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	83.279.367,00	(2.720.633,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	314.600.000,00	308.361.280,00	(6.238.720,00)	98,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	314.600.000,00	308.361.280,00	(6.238.720,00)	98,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.600.000,00	308.361.280,00	(6.238.720,00)	98,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	205.700.000,00	202.672.259,00	(3.027.741,00)	98,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	205.700.000,00	202.672.259,00	(3.027.741,00)	98,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.700.000,00	202.672.259,00	(3.027.741,00)	98,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	108.505.000,00	105.465.012,00	(3.039.988,00)	97,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	108.505.000,00	105.465.012,00	(3.039.988,00)	97,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.505.000,00	105.465.012,00	(3.039.988,00)	97,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	57.248.000,00	56.426.910,00	(821.090,00)	98,56	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	57.248.000,00	56.426.910,00	(821.090,00)	98,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.248.000,00	56.426.910,00	(821.090,00)	98,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	28.030.000,00	28.030.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.030.000,00	28.030.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.030.000,00	28.030.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008		PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	646.799.000,00	619.675.334,00	(27.123.666,00)	95,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	446.799.000,00	422.675.334,00	(24.123.666,00)	94,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.799.000,00	422.675.334,00	(24.123.666,00)	94,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	197.000.000,00	(3.000.000,00)	98,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	197.000.000,00	(3.000.000,00)	98,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	109.818.000,00	104.196.856,00	(5.621.144,00)	94,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	109.818.000,00	104.196.856,00	(5.621.144,00)	94,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.818.000,00	104.196.856,00	(5.621.144,00)	94,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010		PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	19.250.000,00	18.850.000,00	(400.000,00)	97,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	19.250.000,00	18.850.000,00	(400.000,00)	97,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	18.850.000,00	(400.000,00)	97,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	444.771.000,00	398.103.807,00	(46.667.193,00)	89,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	444.771.000,00	398.103.807,00	(46.667.193,00)	89,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.771.000,00	398.103.807,00	(46.667.193,00)	89,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012		PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	162.130.000,00	158.335.212,00	(3.794.788,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	162.130.000,00	158.335.212,00	(3.794.788,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.130.000,00	158.335.212,00	(3.794.788,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	110.700.000,00	106.592.895,00	(4.107.105,00)	96,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	110.700.000,00	106.592.895,00	(4.107.105,00)	96,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.700.000,00	106.592.895,00	(4.107.105,00)	96,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	15.000.000,00	14.992.000,00	(8.000,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.992.000,00	(8.000,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.992.000,00	(8.000,00)	99,94	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **KEPEGAWAIAN**
Organisasi : **Badan Kepegawaian Daerah**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	14.948.977.450,00	13.338.166.118,00	(1.610.811.332,00)	89,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.772.608.500,00	7.763.224.955,00	(1.009.383.545,00)	88,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.465.000,00	32.381.900,00	(83.100,00)	99,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	32.465.000,00	32.381.900,00	(83.100,00)	99,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.465.000,00	32.381.900,00	(83.100,00)	99,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.465.000,00	32.381.900,00	(83.100,00)	99,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.106.075.000,00	6.228.907.144,00	(877.167.856,00)	87,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.106.075.000,00	6.228.907.144,00	(877.167.856,00)	87,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.106.075.000,00	6.228.907.144,00	(877.167.856,00)	87,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.106.075.000,00	6.228.907.144,00	(877.167.856,00)	87,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	93.602.000,00	91.252.500,00	(2.349.500,00)	97,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	93.602.000,00	91.252.500,00	(2.349.500,00)	97,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	93.602.000,00	91.252.500,00	(2.349.500,00)	97,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.602.000,00	91.252.500,00	(2.349.500,00)	97,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	606.835.190,00	575.714.785,00	(31.120.405,00)	94,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	14.994.000,00	(6.000,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.994.000,00	(6.000,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.994.000,00	(6.000,00)	99,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	172.843.150,00	160.099.544,00	(12.743.606,00)	92,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	172.843.150,00	160.099.544,00	(12.743.606,00)	92,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.843.150,00	160.099.544,00	(12.743.606,00)	92,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.751.540,00	25.749.000,00	(2.540,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.751.540,00	25.749.000,00	(2.540,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.751.540,00	25.749.000,00	(2.540,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.060.000,00	13.550.000,00	(4.510.000,00)	75,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.060.000,00	13.550.000,00	(4.510.000,00)	75,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	13.550.000,00	(4.510.000,00)	75,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.767.500,00	2.519.500,00	(248.000,00)	91,03	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.767.500,00	2.519.500,00	(248.000,00)	91,03	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.767.500,00	2.519.500,00	(248.000,00)	91,03	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	372.413.000,00	358.802.741,00	(13.610.259,00)	96,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	372.413.000,00	358.802.741,00	(13.610.259,00)	96,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.413.000,00	358.802.741,00	(13.610.259,00)	96,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	134.534.064,00	134.529.960,00	(4.104,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	134.534.064,00	134.529.960,00	(4.104,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	134.534.064,00	134.529.960,00	(4.104,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.534.064,00	134.529.960,00	(4.104,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	335.772.000,00	299.536.716,00	(36.235.284,00)	89,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	2.178.500,00	(321.500,00)	87,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.178.500,00	(321.500,00)	87,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.178.500,00	(321.500,00)	87,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	200.060.000,00	165.446.216,00	(34.613.784,00)	82,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	200.060.000,00	165.446.216,00	(34.613.784,00)	82,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.060.000,00	165.446.216,00	(34.613.784,00)	82,69	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	133.212.000,00	131.912.000,00	(1.300.000,00)	99,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	133.212.000,00	131.912.000,00	(1.300.000,00)	99,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.212.000,00	131.912.000,00	(1.300.000,00)	99,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	463.325.246,00	400.901.950,00	(62.423.296,00)	86,52	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	181.706.246,00	132.812.950,00	(48.893.296,00)	73,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	181.706.246,00	132.812.950,00	(48.893.296,00)	73,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.706.246,00	132.812.950,00	(48.893.296,00)	73,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	32.070.000,00	32.070.000,00	-	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.070.000,00	32.070.000,00	-	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.070.000,00	32.070.000,00	-	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	146.440.000,00	133.255.000,00	(13.185.000,00)	90,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	146.440.000,00	133.255.000,00	(13.185.000,00)	90,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.440.000,00	133.255.000,00	(13.185.000,00)	90,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	103.109.000,00	102.764.000,00	(345.000,00)	99,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	103.109.000,00	102.764.000,00	(345.000,00)	99,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.109.000,00	102.764.000,00	(345.000,00)	99,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.176.368.950,00	5.574.941.163,00	(601.427.787,00)	90,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	1.873.879.300,00	1.735.291.065,00	(138.588.235,00)	92,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	263.365.000,00	239.319.629,00	(24.045.371,00)	90,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	263.365.000,00	239.319.629,00	(24.045.371,00)	90,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.365.000,00	239.319.629,00	(24.045.371,00)	90,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	1.075.872.000,00	1.005.646.418,00	(70.225.582,00)	93,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.075.872.000,00	1.005.646.418,00	(70.225.582,00)	93,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.872.000,00	1.005.646.418,00	(70.225.582,00)	93,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	185.408.500,00	158.350.416,00	(27.058.084,00)	85,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	185.408.500,00	158.350.416,00	(27.058.084,00)	85,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.408.500,00	158.350.416,00	(27.058.084,00)	85,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008		FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	131.600.000,00	127.814.500,00	(3.785.500,00)	97,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	131.600.000,00	127.814.500,00	(3.785.500,00)	97,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.600.000,00	127.814.500,00	(3.785.500,00)	97,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011		PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	101.467.800,00	90.870.500,00	(10.597.300,00)	89,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	101.467.800,00	90.870.500,00	(10.597.300,00)	89,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.467.800,00	90.870.500,00	(10.597.300,00)	89,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0012		EVALUASI DATA, INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	116.066.000,00	113.289.602,00	(2.776.398,00)	97,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	116.066.000,00	113.289.602,00	(2.776.398,00)	97,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.066.000,00	113.289.602,00	(2.776.398,00)	97,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	974.157.000,00	923.297.702,00	(50.859.298,00)	94,77	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	88.779.600,00	88.135.668,00	(643.932,00)	99,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	88.779.600,00	88.135.668,00	(643.932,00)	99,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.779.600,00	88.135.668,00	(643.932,00)	99,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	200.157.000,00	184.190.109,00	(15.966.891,00)	92,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	200.157.000,00	184.190.109,00	(15.966.891,00)	92,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.157.000,00	184.190.109,00	(15.966.891,00)	92,02	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	685.220.400,00	650.971.925,00	(34.248.475,00)	95,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	685.220.400,00	650.971.925,00	(34.248.475,00)	95,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.220.400,00	650.971.925,00	(34.248.475,00)	95,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	2.403.837.700,00	2.196.997.519,00	(206.840.181,00)	91,39	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	325.678.400,00	283.882.840,00	(41.795.560,00)	87,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	325.678.400,00	283.882.840,00	(41.795.560,00)	87,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.678.400,00	283.882.840,00	(41.795.560,00)	87,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002		PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER	295.000.000,00	286.682.044,00	(8.317.956,00)	97,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	295.000.000,00	286.682.044,00	(8.317.956,00)	97,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	286.682.044,00	(8.317.956,00)	97,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	354.309.500,00	306.413.665,00	(47.895.835,00)	86,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	354.309.500,00	306.413.665,00	(47.895.835,00)	86,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.309.500,00	306.413.665,00	(47.895.835,00)	86,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT	1.325.755.200,00	1.243.815.910,00	(81.939.290,00)	93,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.325.755.200,00	1.243.815.910,00	(81.939.290,00)	93,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.325.755.200,00	1.243.815.910,00	(81.939.290,00)	93,81	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0013		PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASN	61.041.900,00	47.619.460,00	(13.422.440,00)	78,01	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	61.041.900,00	47.619.460,00	(13.422.440,00)	78,01	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.041.900,00	47.619.460,00	(13.422.440,00)	78,01	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0014		FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL	42.052.700,00	28.583.600,00	(13.469.100,00)	67,97	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0014	5.1	BELANJA OPERASI	42.052.700,00	28.583.600,00	(13.469.100,00)	67,97	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.052.700,00	28.583.600,00	(13.469.100,00)	67,97	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	924.494.950,00	719.354.877,00	(205.140.073,00)	77,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	259.851.600,00	226.969.687,00	(32.881.913,00)	87,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	259.851.600,00	226.969.687,00	(32.881.913,00)	87,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.851.600,00	226.969.687,00	(32.881.913,00)	87,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003		EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004		PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	244.349.150,00	189.448.986,00	(54.900.164,00)	77,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	244.349.150,00	189.448.986,00	(54.900.164,00)	77,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.349.150,00	189.448.986,00	(54.900.164,00)	77,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005		PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI	26.075.000,00	6.840.500,00	(19.234.500,00)	26,23	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.075.000,00	6.840.500,00	(19.234.500,00)	26,23	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.075.000,00	6.840.500,00	(19.234.500,00)	26,23	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0006		EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN TANDA JASA APARATUR	336.000,00	-	(336.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	336.000,00	-	(336.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.000,00	-	(336.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	333.990.000,00	259.686.704,00	(74.303.296,00)	77,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	333.990.000,00	259.686.704,00	(74.303.296,00)	77,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.990.000,00	259.686.704,00	(74.303.296,00)	77,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008		PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	51.735.200,00	33.806.500,00	(17.928.700,00)	65,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	51.735.200,00	33.806.500,00	(17.928.700,00)	65,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.735.200,00	33.806.500,00	(17.928.700,00)	65,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009		PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI	6.958.000,00	2.602.500,00	(4.355.500,00)	37,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.958.000,00	2.602.500,00	(4.355.500,00)	37,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.958.000,00	2.602.500,00	(4.355.500,00)	37,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0010		EVALUASI DISIPLIN ASN	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **INSPEKTORAT DAERAH**
Organisasi : **Inspektorat**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	15.167.463.000,00	14.041.665.870,00	(1.125.797.130,00)	92,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.515.834.765,00	11.807.769.547,00	(708.065.218,00)	94,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	42.000.000,00	26.311.000,00	(15.689.000,00)	62,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	8.488.000,00	(1.512.000,00)	84,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.488.000,00	(1.512.000,00)	84,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.488.000,00	(1.512.000,00)	84,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.000.000,00	1.385.000,00	(3.615.000,00)	27,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	1.385.000,00	(3.615.000,00)	27,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.385.000,00	(3.615.000,00)	27,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.000.000,00	4.328.000,00	(672.000,00)	86,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.328.000,00	(672.000,00)	86,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.328.000,00	(672.000,00)	86,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.000.000,00	3.182.000,00	(2.818.000,00)	53,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	3.182.000,00	(2.818.000,00)	53,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.182.000,00	(2.818.000,00)	53,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.000.000,00	1.541.000,00	(4.459.000,00)	25,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	1.541.000,00	(4.459.000,00)	25,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	1.541.000,00	(4.459.000,00)	25,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	5.766.000,00	(234.000,00)	96,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.766.000,00	(234.000,00)	96,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.766.000,00	(234.000,00)	96,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.000.000,00	1.621.000,00	(2.379.000,00)	40,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	1.621.000,00	(2.379.000,00)	40,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.621.000,00	(2.379.000,00)	40,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.524.211.250,00	7.309.269.912,00	(214.941.338,00)	97,14	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.517.463.000,00	7.305.389.380,00	(212.073.620,00)	97,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.517.463.000,00	7.305.389.380,00	(212.073.620,00)	97,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.517.463.000,00	7.305.389.380,00	(212.073.620,00)	97,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.831.250,00	1.089.000,00	(742.250,00)	59,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.831.250,00	1.089.000,00	(742.250,00)	59,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.831.250,00	1.089.000,00	(742.250,00)	59,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.917.000,00	2.791.532,00	(2.125.468,00)	56,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.917.000,00	2.791.532,00	(2.125.468,00)	56,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.917.000,00	2.791.532,00	(2.125.468,00)	56,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	636.583.340,00	429.746.476,00	(206.836.864,00)	67,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	280.333.500,00	115.830.448,00	(164.503.052,00)	41,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	280.333.500,00	115.830.448,00	(164.503.052,00)	41,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.333.500,00	115.830.448,00	(164.503.052,00)	41,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	356.249.840,00	313.916.028,00	(42.333.812,00)	88,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	356.249.840,00	313.916.028,00	(42.333.812,00)	88,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.249.840,00	313.916.028,00	(42.333.812,00)	88,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	971.000.000,00	922.905.876,00	(48.094.124,00)	95,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35.000.000,00	34.862.590,00	(137.410,00)	99,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.862.590,00	(137.410,00)	99,60	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.862.590,00	(137.410,00)	99,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	356.000.000,00	353.104.866,00	(2.895.134,00)	99,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	351.250.000,00	348.604.866,00	(2.645.134,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.250.000,00	348.604.866,00	(2.645.134,00)	99,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	4.750.000,00	4.500.000,00	(250.000,00)	94,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.750.000,00	4.500.000,00	(250.000,00)	94,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100.000.000,00	79.665.600,00	(20.334.400,00)	79,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	94.125.000,00	73.865.600,00	(20.259.400,00)	78,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.125.000,00	73.865.600,00	(20.259.400,00)	78,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.2	BELANJA MODAL	5.875.000,00	5.800.000,00	(75.000,00)	98,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.875.000,00	5.800.000,00	(75.000,00)	98,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.500.000,00	10.890.000,00	(6.610.000,00)	62,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	10.890.000,00	(6.610.000,00)	62,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	10.890.000,00	(6.610.000,00)	62,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	450.000.000,00	432.382.820,00	(17.617.180,00)	96,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	432.382.820,00	(17.617.180,00)	96,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	432.382.820,00	(17.617.180,00)	96,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	12.500.000,00	12.000.000,00	(500.000,00)	96,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.000.000,00	(500.000,00)	96,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.000.000,00	(500.000,00)	96,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.523.710.225,00	1.427.115.525,00	(96.594.700,00)	93,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	592.807.000,00	531.030.000,00	(61.777.000,00)	89,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	592.807.000,00	531.030.000,00	(61.777.000,00)	89,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	592.807.000,00	531.030.000,00	(61.777.000,00)	89,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	161.253.225,00	159.125.000,00	(2.128.225,00)	98,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	161.253.225,00	159.125.000,00	(2.128.225,00)	98,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.253.225,00	159.125.000,00	(2.128.225,00)	98,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	769.650.000,00	736.960.525,00	(32.689.475,00)	95,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	205.300.000,00	204.272.875,00	(1.027.125,00)	99,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.300.000,00	204.272.875,00	(1.027.125,00)	99,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	564.350.000,00	532.687.650,00	(31.662.350,00)	94,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564.350.000,00	532.687.650,00	(31.662.350,00)	94,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	424.091.000,00	307.804.945,00	(116.286.055,00)	72,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.000.000,00	12.124.266,00	(2.875.734,00)	80,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	12.124.266,00	(2.875.734,00)	80,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.124.266,00	(2.875.734,00)	80,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	172.000.000,00	128.621.094,00	(43.378.906,00)	74,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	172.000.000,00	128.621.094,00	(43.378.906,00)	74,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.000.000,00	128.621.094,00	(43.378.906,00)	74,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	106.780.000,00	72.926.100,00	(33.853.900,00)	68,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	106.780.000,00	72.926.100,00	(33.853.900,00)	68,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.780.000,00	72.926.100,00	(33.853.900,00)	68,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	130.311.000,00	94.133.485,00	(36.177.515,00)	72,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	130.311.000,00	94.133.485,00	(36.177.515,00)	72,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.311.000,00	94.133.485,00	(36.177.515,00)	72,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.394.238.950,00	1.384.615.813,00	(9.623.137,00)	99,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	310.000.000,00	303.494.183,00	(6.505.817,00)	97,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	310.000.000,00	303.494.183,00	(6.505.817,00)	97,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	303.494.183,00	(6.505.817,00)	97,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	12.840.000,00	11.368.000,00	(1.472.000,00)	88,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.840.000,00	11.368.000,00	(1.472.000,00)	88,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.840.000,00	11.368.000,00	(1.472.000,00)	88,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	174.970.000,00	174.165.100,00	(804.900,00)	99,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	174.970.000,00	174.165.100,00	(804.900,00)	99,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.970.000,00	174.165.100,00	(804.900,00)	99,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	896.428.950,00	895.588.530,00	(840.420,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	865.999.950,00	865.498.530,00	(501.420,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.999.950,00	865.498.530,00	(501.420,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011	5.2	BELANJA MODAL	30.429.000,00	30.090.000,00	(339.000,00)	98,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.429.000,00	30.090.000,00	(339.000,00)	98,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.599.156.235,00	1.327.609.824,00	(271.546.411,00)	83,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.380.976.235,00	1.129.538.405,00	(251.437.830,00)	81,79	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	157.238.585,00	151.214.930,00	(6.023.655,00)	96,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.238.585,00	151.214.930,00	(6.023.655,00)	96,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.238.585,00	151.214.930,00	(6.023.655,00)	96,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	120.000.000,00	102.712.500,00	(17.287.500,00)	85,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	102.712.500,00	(17.287.500,00)	85,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	102.712.500,00	(17.287.500,00)	85,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	35.000.000,00	31.971.000,00	(3.029.000,00)	91,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	31.971.000,00	(3.029.000,00)	91,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	31.971.000,00	(3.029.000,00)	91,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	171.250.000,00	146.334.472,00	(24.915.528,00)	85,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	171.250.000,00	146.334.472,00	(24.915.528,00)	85,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.250.000,00	146.334.472,00	(24.915.528,00)	85,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	348.477.600,00	176.525.388,00	(171.952.212,00)	50,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	348.477.600,00	176.525.388,00	(171.952.212,00)	50,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.477.600,00	176.525.388,00	(171.952.212,00)	50,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006		KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL	420.000.000,00	399.849.329,00	(20.150.671,00)	95,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	420.000.000,00	399.849.329,00	(20.150.671,00)	95,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	399.849.329,00	(20.150.671,00)	95,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	129.010.050,00	120.930.786,00	(8.079.264,00)	93,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	129.010.050,00	120.930.786,00	(8.079.264,00)	93,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.010.050,00	120.930.786,00	(8.079.264,00)	93,73	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	218.180.000,00	198.071.419,00	(20.108.581,00)	90,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	49.992.000,00	39.819.426,00	(10.172.574,00)	79,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.992.000,00	39.819.426,00	(10.172.574,00)	79,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.992.000,00	39.819.426,00	(10.172.574,00)	79,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	168.188.000,00	158.251.993,00	(9.936.007,00)	94,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	168.188.000,00	158.251.993,00	(9.936.007,00)	94,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.188.000,00	158.251.993,00	(9.936.007,00)	94,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.052.472.000,00	906.286.499,00	(146.185.501,00)	86,11	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	161.952.000,00	131.730.000,00	(30.222.000,00)	81,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	161.952.000,00	131.730.000,00	(30.222.000,00)	81,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.952.000,00	131.730.000,00	(30.222.000,00)	81,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.952.000,00	131.730.000,00	(30.222.000,00)	81,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	890.520.000,00	774.556.499,00	(115.963.501,00)	86,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	250.000.000,00	187.961.904,00	(62.038.096,00)	75,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	187.961.904,00	(62.038.096,00)	75,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	187.961.904,00	(62.038.096,00)	75,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	289.370.000,00	261.107.395,00	(28.262.605,00)	90,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	289.370.000,00	261.107.395,00	(28.262.605,00)	90,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.370.000,00	261.107.395,00	(28.262.605,00)	90,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	150.150.000,00	127.786.000,00	(22.364.000,00)	85,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	150.150.000,00	127.786.000,00	(22.364.000,00)	85,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.150.000,00	127.786.000,00	(22.364.000,00)	85,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	201.000.000,00	197.701.200,00	(3.298.800,00)	98,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	201.000.000,00	197.701.200,00	(3.298.800,00)	98,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.000.000,00	197.701.200,00	(3.298.800,00)	98,35	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Moga

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.791.169.000,00	2.514.247.095,00	(276.921.905,00)	90,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.469.093.750,00	2.193.172.095,00	(275.921.655,00)	88,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.174.000,00	14.174.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.524.500,00	5.524.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.524.500,00	5.524.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.524.500,00	5.524.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	554.500,00	554.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	554.500,00	554.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.500,00	554.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.054.000,00	1.054.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.054.000,00	1.054.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.000,00	1.054.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.337.500,00	1.337.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.337.500,00	1.337.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.337.500,00	1.337.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	837.500,00	837.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	837.500,00	837.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.500,00	837.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	619.000,00	619.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	619.000,00	619.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	619.000,00	619.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.247.000,00	4.247.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.247.000,00	4.247.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.247.000,00	4.247.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.939.056.000,00	1.668.512.095,00	(270.543.905,00)	86,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.936.169.000,00	1.665.625.095,00	(270.543.905,00)	86,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.936.169.000,00	1.665.625.095,00	(270.543.905,00)	86,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.936.169.000,00	1.665.625.095,00	(270.543.905,00)	86,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	360.750,00	360.750,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	360.750,00	360.750,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.750,00	360.750,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.526.250,00	2.526.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.526.250,00	2.526.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.526.250,00	2.526.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	133.048.500,00	133.008.500,00	(40.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.007.000,00	10.007.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.007.000,00	10.007.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.007.000,00	10.007.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.006.500,00	3.006.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.006.500,00	3.006.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.006.500,00	3.006.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	75.671.000,00	75.671.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.671.000,00	75.671.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.671.000,00	75.671.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.984.000,00	6.984.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.984.000,00	6.984.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.984.000,00	6.984.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	33.780.000,00	33.740.000,00	(40.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.780.000,00	33.740.000,00	(40.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.780.000,00	33.740.000,00	(40.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	45.389.150,00	45.386.000,00	(3.150,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.389.150,00	45.386.000,00	(3.150,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	285,00	-	(285,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285,00	-	(285,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	45.388.865,00	45.386.000,00	(2.865,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.388.865,00	45.386.000,00	(2.865,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	209.314.000,00	203.979.828,00	(5.334.172,00)	97,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.870.000,00	7.870.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.870.000,00	7.870.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	7.870.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.500.000,00	20.165.828,00	(5.334.172,00)	79,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	20.165.828,00	(5.334.172,00)	79,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	20.165.828,00	(5.334.172,00)	79,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	175.944.000,00	175.944.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	175.944.000,00	175.944.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.944.000,00	175.944.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	128.112.100,00	128.111.672,00	(428,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	72.870.000,00	72.869.572,00	(428,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.870.000,00	72.869.572,00	(428,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.870.000,00	72.869.572,00	(428,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.641.000,00	10.641.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.641.000,00	10.641.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.641.000,00	10.641.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	29.663.100,00	29.663.100,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.663.100,00	29.663.100,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.663.100,00	29.663.100,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	14.938.000,00	14.938.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.938.000,00	14.938.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.938.000,00	14.938.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.957.500,00	19.957.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	8.037.000,00	8.037.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	8.037.000,00	8.037.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.037.000,00	8.037.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.037.000,00	8.037.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	6.995.500,00	6.995.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	3.638.500,00	3.638.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.638.500,00	3.638.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.638.500,00	3.638.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	3.357.000,00	3.357.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.357.000,00	3.357.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.357.000,00	3.357.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4.925.000,00	4.925.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	2.902.500,00	2.902.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.902.500,00	2.902.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.902.500,00	2.902.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	2.022.500,00	2.022.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.022.500,00	2.022.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.022.500,00	2.022.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.550.750,00	72.550.750,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	72.550.750,00	72.550.750,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	35.524.500,00	35.524.500,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.524.500,00	35.524.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.524.500,00	35.524.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	37.026.250,00	37.026.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.026.250,00	37.026.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.026.250,00	37.026.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	163.016.000,00	163.015.750,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	163.016.000,00	163.015.750,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	85.518.500,00	85.518.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.518.500,00	85.518.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.518.500,00	85.518.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0002		FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	63.448.500,00	63.448.250,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.448.500,00	63.448.250,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.448.500,00	63.448.250,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.482.500,00	1.482.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.482.500,00	1.482.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.482.500,00	1.482.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	12.566.500,00	12.566.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.566.500,00	12.566.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.566.500,00	12.566.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.551.000,00	65.551.000,00	(1.000.000,00)	98,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.551.000,00	65.551.000,00	(1.000.000,00)	98,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	3.754.500,00	3.754.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.754.500,00	3.754.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.754.500,00	3.754.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	10.871.250,00	10.871.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.871.250,00	10.871.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.871.250,00	10.871.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	4.808.000,00	4.808.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.808.000,00	4.808.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.808.000,00	4.808.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	6.069.000,00	6.069.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.069.000,00	6.069.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.069.000,00	6.069.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0006		FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	20.397.000,00	20.397.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.397.000,00	20.397.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.397.000,00	20.397.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	6.431.500,00	6.431.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.431.500,00	6.431.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.431.500,00	6.431.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	2.790.500,00	2.790.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.790.500,00	2.790.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.790.500,00	2.790.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	5.223.250,00	5.223.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	5.223.250,00	5.223.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.223.250,00	5.223.250,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.206.000,00	1.206.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	1.206.000,00	1.206.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.206.000,00	1.206.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Pulosari

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.984.399.000,00	2.782.870.595,00	(201.528.405,00)	93,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.634.273.500,00	2.438.524.095,00	(195.749.405,00)	92,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	46.810.500,00	44.778.500,00	(2.032.000,00)	95,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	23.561.500,00	21.529.500,00	(2.032.000,00)	91,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.561.500,00	21.529.500,00	(2.032.000,00)	91,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.561.500,00	21.529.500,00	(2.032.000,00)	91,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.504.000,00	3.504.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.504.000,00	3.504.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.504.000,00	3.504.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.914.000,00	2.914.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.914.000,00	2.914.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.914.000,00	2.914.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.021.500,00	2.021.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.021.500,00	2.021.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.021.500,00	2.021.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.974.500,00	1.974.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.974.500,00	1.974.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.974.500,00	1.974.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.710.500,00	5.710.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.710.500,00	5.710.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.710.500,00	5.710.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.124.500,00	7.124.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.124.500,00	7.124.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.124.500,00	7.124.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.139.522.000,00	1.947.623.061,00	(191.898.939,00)	91,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.129.399.000,00	1.937.500.061,00	(191.898.939,00)	90,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.129.399.000,00	1.937.500.061,00	(191.898.939,00)	90,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.129.399.000,00	1.937.500.061,00	(191.898.939,00)	90,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.248.000,00	2.248.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.248.000,00	2.248.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.248.000,00	2.248.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	7.194.500,00	7.194.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.194.500,00	7.194.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.194.500,00	7.194.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	680.500,00	680.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	680.500,00	680.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.500,00	680.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	149.671.600,00	149.305.200,00	(366.400,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.315.000,00	9.315.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.315.000,00	9.315.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.315.000,00	9.315.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	88.989.600,00	88.933.700,00	(55.900,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.989.600,00	88.933.700,00	(55.900,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.989.600,00	88.933.700,00	(55.900,00)	99,93	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.337.000,00	16.216.500,00	(120.500,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.337.000,00	16.216.500,00	(120.500,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.337.000,00	16.216.500,00	(120.500,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	33.410.000,00	33.220.000,00	(190.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.410.000,00	33.220.000,00	(190.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.410.000,00	33.220.000,00	(190.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	157.636.000,00	156.860.334,00	(775.666,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.940.000,00	26.382.337,00	(557.663,00)	97,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.940.000,00	26.382.337,00	(557.663,00)	97,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.940.000,00	26.382.337,00	(557.663,00)	97,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	117.696.000,00	117.477.997,00	(218.003,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	117.696.000,00	117.477.997,00	(218.003,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.696.000,00	117.477.997,00	(218.003,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	140.633.400,00	139.957.000,00	(676.400,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	93.800.400,00	93.124.000,00	(676.400,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.800.400,00	93.124.000,00	(676.400,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.800.400,00	93.124.000,00	(676.400,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	13.580.000,00	13.580.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	13.580.000,00	13.580.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.580.000,00	13.580.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	8.253.000,00	8.253.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.253.000,00	8.253.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.253.000,00	8.253.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.652.000,00	9.652.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	4.016.000,00	4.016.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	4.016.000,00	4.016.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.016.000,00	4.016.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.016.000,00	4.016.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	5.636.000,00	5.636.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	2.716.000,00	2.716.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.716.000,00	2.716.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.716.000,00	2.716.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	2.920.000,00	2.920.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000,00	2.920.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.920.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.137.000,00	67.137.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	43.037.000,00	43.037.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	32.910.000,00	32.910.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.910.000,00	32.910.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.910.000,00	32.910.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	10.127.000,00	10.127.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.127.000,00	10.127.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.127.000,00	10.127.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	24.100.000,00	24.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001		PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	10.115.000,00	10.115.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.115.000,00	10.115.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.115.000,00	10.115.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	13.985.000,00	13.985.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.985.000,00	13.985.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.985.000,00	13.985.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.678.000,00	32.278.000,00	(2.400.000,00)	93,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.678.000,00	32.278.000,00	(2.400.000,00)	93,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	25.678.000,00	23.278.000,00	(2.400.000,00)	90,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.678.000,00	23.278.000,00	(2.400.000,00)	90,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.678.000,00	23.278.000,00	(2.400.000,00)	90,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	145.265.000,00	145.230.000,00	(35.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	145.265.000,00	145.230.000,00	(35.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	136.115.000,00	136.080.000,00	(35.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	136.115.000,00	136.080.000,00	(35.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.115.000,00	136.080.000,00	(35.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	93.393.500,00	90.049.500,00	(3.344.000,00)	96,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	93.393.500,00	90.049.500,00	(3.344.000,00)	96,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	6.648.000,00	6.648.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.648.000,00	6.648.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.648.000,00	6.648.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	4.558.000,00	4.558.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.558.000,00	4.558.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.558.000,00	4.558.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	2.551.000,00	2.551.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.551.000,00	2.551.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.551.000,00	2.551.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	48.951.000,00	45.607.000,00	(3.344.000,00)	93,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	48.951.000,00	45.607.000,00	(3.344.000,00)	93,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.951.000,00	45.607.000,00	(3.344.000,00)	93,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	2.157.000,00	2.157.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.157.000,00	2.157.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.157.000,00	2.157.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	5.595.000,00	5.595.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.595.000,00	5.595.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.595.000,00	5.595.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0014		FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA	7.019.500,00	7.019.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	7.019.500,00	7.019.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.019.500,00	7.019.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.769.000,00	4.769.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	4.769.000,00	4.769.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.769.000,00	4.769.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0017		KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	8.145.000,00	8.145.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.145.000,00	8.145.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.145.000,00	8.145.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Belik**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	2.894.548.000,00	2.723.345.888,00	(171.202.112,00)	94,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.632.576.850,00	2.461.516.888,00	(171.059.962,00)	93,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.291.000,00	13.149.000,00	(142.000,00)	98,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.271.000,00	3.271.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.271.000,00	3.271.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.271.000,00	3.271.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.751.000,00	1.721.000,00	(30.000,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.751.000,00	1.721.000,00	(30.000,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.751.000,00	1.721.000,00	(30.000,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.751.000,00	1.695.000,00	(56.000,00)	96,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.751.000,00	1.695.000,00	(56.000,00)	96,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.751.000,00	1.695.000,00	(56.000,00)	96,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.852.000,00	1.796.000,00	(56.000,00)	96,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.852.000,00	1.796.000,00	(56.000,00)	96,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.852.000,00	1.796.000,00	(56.000,00)	96,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.773.000,00	1.773.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.773.000,00	1.773.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.773.000,00	1.773.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.607.000,00	1.607.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.607.000,00	1.607.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.607.000,00	1.607.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.286.000,00	1.286.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.286.000,00	1.286.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.286.000,00	1.286.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.050.084.000,00	1.885.991.498,00	(164.092.502,00)	91,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.039.548.000,00	1.875.455.498,00	(164.092.502,00)	91,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.039.548.000,00	1.875.455.498,00	(164.092.502,00)	91,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.039.548.000,00	1.875.455.498,00	(164.092.502,00)	91,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.241.000,00	1.241.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.241.000,00	1.241.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.241.000,00	1.241.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.372.000,00	2.372.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.372.000,00	2.372.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.372.000,00	2.372.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.023.000,00	1.023.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.023.000,00	1.023.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.023.000,00	1.023.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.782.000,00	4.782.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.442.000,00	1.442.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.442.000,00	1.442.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.442.000,00	1.442.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	248.146.850,00	246.436.850,00	(1.710.000,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.600.000,00	12.075.000,00	(525.000,00)	95,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	11.475.000,00	(525.000,00)	95,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.475.000,00	(525.000,00)	95,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.233.200,00	2.233.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.233.200,00	2.233.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.233.200,00	2.233.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	149.248.650,00	149.208.650,00	(40.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	149.248.650,00	149.208.650,00	(40.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.248.650,00	149.208.650,00	(40.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.825.000,00	1.440.000,00	(385.000,00)	78,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.825.000,00	1.440.000,00	(385.000,00)	78,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	1.440.000,00	(385.000,00)	78,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	78.590.000,00	77.830.000,00	(760.000,00)	99,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	78.590.000,00	77.830.000,00	(760.000,00)	99,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.590.000,00	77.830.000,00	(760.000,00)	99,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	202.617.000,00	199.148.840,00	(3.468.160,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	39.999.000,00	39.971.000,00	(28.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.999.000,00	39.971.000,00	(28.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.000,00	39.971.000,00	(28.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.760.000,00	17.643.840,00	(3.116.160,00)	84,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.760.000,00	17.643.840,00	(3.116.160,00)	84,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.760.000,00	17.643.840,00	(3.116.160,00)	84,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	141.858.000,00	141.534.000,00	(324.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	141.858.000,00	141.534.000,00	(324.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.858.000,00	141.534.000,00	(324.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	110.256.000,00	108.608.700,00	(1.647.300,00)	98,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	20.566.000,00	19.333.700,00	(1.232.300,00)	94,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.566.000,00	19.333.700,00	(1.232.300,00)	94,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.566.000,00	19.333.700,00	(1.232.300,00)	94,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.000.000,00	14.920.000,00	(80.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.920.000,00	(80.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.920.000,00	(80.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	74.690.000,00	74.355.000,00	(335.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.690.000,00	74.355.000,00	(335.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.690.000,00	74.355.000,00	(335.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.022.000,00	21.938.000,00	(84.000,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	11.680.000,00	11.644.000,00	(36.000,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	11.680.000,00	11.644.000,00	(36.000,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.680.000,00	11.644.000,00	(36.000,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	11.644.000,00	(36.000,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	5.408.000,00	5.408.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	1.512.000,00	1.512.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.512.000,00	1.512.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.512.000,00	1.512.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	2.096.000,00	2.096.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.096.000,00	2.096.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.096.000,00	2.096.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4.934.000,00	4.886.000,00	(48.000,00)	99,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	3.780.000,00	3.732.000,00	(48.000,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.780.000,00	3.732.000,00	(48.000,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.732.000,00	(48.000,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	1.154.000,00	1.154.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.154.000,00	1.154.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.000,00	1.154.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	76.106.650,00	76.092.000,00	(14.650,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	42.606.000,00	42.601.000,00	(5.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	14.022.000,00	14.017.000,00	(5.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.022.000,00	14.017.000,00	(5.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.022.000,00	14.017.000,00	(5.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	20.802.000,00	20.802.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.802.000,00	20.802.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.802.000,00	20.802.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	7.782.000,00	7.782.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.782.000,00	7.782.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.782.000,00	7.782.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	33.500.650,00	33.491.000,00	(9.650,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001		PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	33.500.650,00	33.491.000,00	(9.650,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.500.650,00	33.491.000,00	(9.650,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.500.650,00	33.491.000,00	(9.650,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.818.000,00	12.818.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.712.000,00	6.712.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	6.712.000,00	6.712.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.712.000,00	6.712.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.712.000,00	6.712.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	6.106.000,00	6.106.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.106.000,00	6.106.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.106.000,00	6.106.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.106.000,00	6.106.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.625.000,00	40.625.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	40.625.000,00	40.625.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	35.125.000,00	35.125.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.125.000,00	35.125.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.125.000,00	35.125.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	110.399.500,00	110.356.000,00	(43.500,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	110.399.500,00	110.356.000,00	(43.500,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	14.666.000,00	14.636.000,00	(30.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.666.000,00	14.636.000,00	(30.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.666.000,00	14.636.000,00	(30.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	17.496.000,00	17.482.500,00	(13.500,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.496.000,00	17.482.500,00	(13.500,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.496.000,00	17.482.500,00	(13.500,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	17.468.000,00	17.468.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.468.000,00	17.468.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.468.000,00	17.468.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0004		FASILITASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.740.000,00	12.740.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.740.000,00	12.740.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.740.000,00	12.740.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	4.659.500,00	4.659.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.659.500,00	4.659.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.659.500,00	4.659.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	14.170.000,00	14.170.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.170.000,00	14.170.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.170.000,00	14.170.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0011		FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.256.000,00	9.256.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.256.000,00	9.256.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.256.000,00	9.256.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	13.732.000,00	13.732.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	13.732.000,00	13.732.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.732.000,00	13.732.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6.212.000,00	6.212.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	6.212.000,00	6.212.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.212.000,00	6.212.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Watukumpul

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	2.942.496.000,00	2.581.231.934,00	(361.264.066,00)	87,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.481.357.500,00	2.154.913.415,00	(326.444.085,00)	86,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.200.000,00	23.156.000,00	(44.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.500.000,00	6.488.000,00	(12.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.488.000,00	(12.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.488.000,00	(12.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.500.000,00	2.468.000,00	(32.000,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.468.000,00	(32.000,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.468.000,00	(32.000,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.040.496.000,00	1.737.062.318,00	(303.433.682,00)	85,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.037.496.000,00	1.734.062.318,00	(303.433.682,00)	85,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.037.496.000,00	1.734.062.318,00	(303.433.682,00)	85,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.037.496.000,00	1.734.062.318,00	(303.433.682,00)	85,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	92.282.000,00	90.056.000,00	(2.226.000,00)	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.149.000,00	8.076.500,00	(72.500,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.149.000,00	8.076.500,00	(72.500,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.149.000,00	8.076.500,00	(72.500,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	21.489.000,00	21.401.500,00	(87.500,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.489.000,00	21.401.500,00	(87.500,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.489.000,00	21.401.500,00	(87.500,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.306.000,00	6.306.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.306.000,00	6.306.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.306.000,00	6.306.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	56.338.000,00	54.272.000,00	(2.066.000,00)	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	56.338.000,00	54.272.000,00	(2.066.000,00)	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.338.000,00	54.272.000,00	(2.066.000,00)	96,33	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	201.997.500,00	197.995.097,00	(4.002.403,00)	98,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.500.000,00	19.836.521,00	(2.663.479,00)	88,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	19.836.521,00	(2.663.479,00)	88,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	19.836.521,00	(2.663.479,00)	88,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.315.500,00	6.515.000,00	(800.500,00)	89,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.315.500,00	6.515.000,00	(800.500,00)	89,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.315.500,00	6.515.000,00	(800.500,00)	89,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	166.182.000,00	165.643.576,00	(538.424,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	166.182.000,00	165.643.576,00	(538.424,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.182.000,00	165.643.576,00	(538.424,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	123.382.000,00	106.644.000,00	(16.738.000,00)	86,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	47.480.000,00	30.743.000,00	(16.737.000,00)	64,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.480.000,00	30.743.000,00	(16.737.000,00)	64,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.480.000,00	30.743.000,00	(16.737.000,00)	64,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.830.000,00	15.829.000,00	(1.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.830.000,00	15.829.000,00	(1.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.830.000,00	15.829.000,00	(1.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	52.572.000,00	52.572.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	52.572.000,00	52.572.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.572.000,00	52.572.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.000.000,00	46.264.019,00	(14.735.981,00)	75,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	10.000.000,00	9.943.000,00	(57.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	10.000.000,00	9.943.000,00	(57.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.943.000,00	(57.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.943.000,00	(57.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	31.000.000,00	23.157.469,00	(7.842.531,00)	74,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	11.000.000,00	4.009.900,00	(6.990.100,00)	36,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	4.009.900,00	(6.990.100,00)	36,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	4.009.900,00	(6.990.100,00)	36,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	10.000.000,00	9.735.999,00	(264.001,00)	97,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.735.999,00	(264.001,00)	97,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.735.999,00	(264.001,00)	97,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	10.000.000,00	9.411.570,00	(588.430,00)	94,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.411.570,00	(588.430,00)	94,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.411.570,00	(588.430,00)	94,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	20.000.000,00	13.163.550,00	(6.836.450,00)	65,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	10.000.000,00	6.913.550,00	(3.086.450,00)	69,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	6.913.550,00	(3.086.450,00)	69,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.913.550,00	(3.086.450,00)	69,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	10.000.000,00	6.250.000,00	(3.750.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	6.250.000,00	(3.750.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.250.000,00	(3.750.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.500.000,00	77.557.600,00	(942.400,00)	98,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	78.500.000,00	77.557.600,00	(942.400,00)	98,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	38.500.000,00	38.405.000,00	(95.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.500.000,00	38.405.000,00	(95.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.405.000,00	(95.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	40.000.000,00	39.152.600,00	(847.400,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.152.600,00	(847.400,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.152.600,00	(847.400,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000,00	39.177.400,00	(822.600,00)	97,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	20.000.000,00	19.227.400,00	(772.600,00)	96,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	20.000.000,00	19.227.400,00	(772.600,00)	96,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.227.400,00	(772.600,00)	96,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.227.400,00	(772.600,00)	96,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.832.000,00	80.731.500,00	(100.500,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	80.832.000,00	80.731.500,00	(100.500,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	60.832.000,00	60.731.500,00	(100.500,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.832.000,00	60.731.500,00	(100.500,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.832.000,00	60.731.500,00	(100.500,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0002		FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	200.806.500,00	182.588.000,00	(18.218.500,00)	90,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	200.806.500,00	182.588.000,00	(18.218.500,00)	90,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	23.514.500,00	23.314.500,00	(200.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.514.500,00	23.314.500,00	(200.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.514.500,00	23.314.500,00	(200.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	20.482.000,00	20.482.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.482.000,00	20.482.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.482.000,00	20.482.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	45.800.000,00	33.985.000,00	(11.815.000,00)	74,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.800.000,00	33.985.000,00	(11.815.000,00)	74,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	33.985.000,00	(11.815.000,00)	74,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0006		FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	25.310.000,00	19.242.000,00	(6.068.000,00)	76,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.310.000,00	19.242.000,00	(6.068.000,00)	76,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.310.000,00	19.242.000,00	(6.068.000,00)	76,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	14.000.000,00	13.939.500,00	(60.500,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.939.500,00	(60.500,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.939.500,00	(60.500,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	20.000.000,00	19.925.000,00	(75.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.925.000,00	(75.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.925.000,00	(75.000,00)	99,62	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Bodeh

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	3.318.056.000,00	3.169.574.899,00	(148.481.101,00)	95,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.212.282.000,00	3.063.800.899,00	(148.481.101,00)	95,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.413.056.000,00	2.268.074.899,00	(144.981.101,00)	93,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.413.056.000,00	2.268.074.899,00	(144.981.101,00)	93,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.413.056.000,00	2.268.074.899,00	(144.981.101,00)	93,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.413.056.000,00	2.268.074.899,00	(144.981.101,00)	93,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	365.556.000,00	364.167.500,00	(1.388.500,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.761.000,00	10.761.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.761.000,00	10.761.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.761.000,00	10.761.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	219.500.000,00	218.149.500,00	(1.350.500,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	138.500.000,00	137.269.500,00	(1.230.500,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.500.000,00	137.269.500,00	(1.230.500,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	81.000.000,00	80.880.000,00	(120.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.000.000,00	80.880.000,00	(120.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.295.000,00	27.287.000,00	(8.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.295.000,00	27.287.000,00	(8.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.295.000,00	27.287.000,00	(8.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	101.300.000,00	101.270.000,00	(30.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	101.300.000,00	101.270.000,00	(30.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.300.000,00	101.270.000,00	(30.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	23.238.000,00	23.238.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	23.238.000,00	23.238.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.238.000,00	23.238.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.238.000,00	23.238.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	247.832.000,00	246.911.000,00	(921.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	77.550.000,00	76.985.500,00	(564.500,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	77.550.000,00	76.985.500,00	(564.500,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.550.000,00	76.985.500,00	(564.500,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	167.282.000,00	166.925.500,00	(356.500,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	167.282.000,00	166.925.500,00	(356.500,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.282.000,00	166.925.500,00	(356.500,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	154.600.000,00	153.409.500,00	(1.190.500,00)	99,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	44.880.000,00	43.689.500,00	(1.190.500,00)	97,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.880.000,00	43.689.500,00	(1.190.500,00)	97,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.880.000,00	43.689.500,00	(1.190.500,00)	97,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	49.720.000,00	49.720.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	49.720.000,00	49.720.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.720.000,00	49.720.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.800.000,00	45.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	45.800.000,00	45.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.074.000,00	41.074.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	41.074.000,00	41.074.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	38.074.000,00	38.074.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.074.000,00	38.074.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.074.000,00	38.074.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.900.000,00	14.900.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.900.000,00	14.900.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Bantarbolang**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	3.054.221.000,00	2.934.512.742,00	(119.708.258,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.935.760.668,00	2.816.503.742,00	(119.256.926,00)	95,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.722.000,00	3.122.000,00	(600.000,00)	83,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	541.000,00	441.000,00	(100.000,00)	81,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	541.000,00	441.000,00	(100.000,00)	81,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.000,00	441.000,00	(100.000,00)	81,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	538.000,00	438.000,00	(100.000,00)	81,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	538.000,00	438.000,00	(100.000,00)	81,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.000,00	438.000,00	(100.000,00)	81,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	532.000,00	432.000,00	(100.000,00)	81,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	532.000,00	432.000,00	(100.000,00)	81,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.000,00	432.000,00	(100.000,00)	81,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	532.000,00	532.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	532.000,00	532.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.000,00	532.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	532.000,00	432.000,00	(100.000,00)	81,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	532.000,00	432.000,00	(100.000,00)	81,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.000,00	432.000,00	(100.000,00)	81,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	532.000,00	432.000,00	(100.000,00)	81,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	532.000,00	432.000,00	(100.000,00)	81,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.000,00	432.000,00	(100.000,00)	81,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	515.000,00	415.000,00	(100.000,00)	80,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	515.000,00	415.000,00	(100.000,00)	80,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.000,00	415.000,00	(100.000,00)	80,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.150.680.500,00	2.037.542.692,00	(113.137.808,00)	94,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.149.221.000,00	2.036.383.192,00	(112.837.808,00)	94,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.149.221.000,00	2.036.383.192,00	(112.837.808,00)	94,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.149.221.000,00	2.036.383.192,00	(112.837.808,00)	94,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	483.000,00	383.000,00	(100.000,00)	79,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	483.000,00	383.000,00	(100.000,00)	79,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.000,00	383.000,00	(100.000,00)	79,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	528.500,00	428.500,00	(100.000,00)	81,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	528.500,00	428.500,00	(100.000,00)	81,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.500,00	428.500,00	(100.000,00)	81,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	448.000,00	348.000,00	(100.000,00)	77,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	448.000,00	348.000,00	(100.000,00)	77,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.000,00	348.000,00	(100.000,00)	77,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.000.500,00	1.000.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	483.500,00	483.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	483.500,00	483.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.500,00	483.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	517.000,00	517.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	517.000,00	517.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.000,00	517.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.180.000,00	1.180.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	590.000,00	590.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	590.000,00	590.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.000,00	590.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	590.000,00	590.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	590.000,00	590.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.000,00	590.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	287.601.200,00	283.801.200,00	(3.800.000,00)	98,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	41.550.000,00	41.550.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.550.000,00	41.550.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.550.000,00	41.550.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39.410.000,00	39.310.000,00	(100.000,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.410.000,00	39.310.000,00	(100.000,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.410.000,00	39.310.000,00	(100.000,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.878.700,00	10.778.700,00	(100.000,00)	99,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.878.700,00	10.778.700,00	(100.000,00)	99,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.878.700,00	10.778.700,00	(100.000,00)	99,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	106.762.500,00	106.762.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	106.762.500,00	106.762.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.762.500,00	106.762.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	82.300.000,00	78.700.000,00	(3.600.000,00)	95,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	82.300.000,00	78.700.000,00	(3.600.000,00)	95,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.300.000,00	78.700.000,00	(3.600.000,00)	95,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	70.642.408,00	70.573.800,00	(68.608,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	49.988.500,00	49.938.900,00	(49.600,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	49.988.500,00	49.938.900,00	(49.600,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.988.500,00	49.938.900,00	(49.600,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.653.908,00	20.634.900,00	(19.008,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.653.908,00	20.634.900,00	(19.008,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.653.908,00	20.634.900,00	(19.008,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	268.168.000,00	266.949.000,00	(1.219.000,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.500.000,00	27.281.000,00	(1.219.000,00)	95,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.500.000,00	27.281.000,00	(1.219.000,00)	95,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	27.281.000,00	(1.219.000,00)	95,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	220.668.000,00	220.668.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	220.668.000,00	220.668.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.668.000,00	220.668.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	152.766.060,00	152.334.550,00	(431.510,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	35.600.000,00	35.306.750,00	(293.250,00)	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.600.000,00	35.306.750,00	(293.250,00)	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	35.306.750,00	(293.250,00)	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	31.080.000,00	31.080.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.080.000,00	31.080.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.080.000,00	31.080.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.726.000,00	28.726.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.726.000,00	28.726.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.726.000,00	28.726.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	35.760.060,00	35.621.800,00	(138.260,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.760.060,00	35.621.800,00	(138.260,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.760.060,00	35.621.800,00	(138.260,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.207.332,00	2.206.000,00	(1.332,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	433.000,00	433.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	433.000,00	433.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	433.000,00	433.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.000,00	433.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	1.236.000,00	1.236.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	412.000,00	412.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	412.000,00	412.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.000,00	412.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	412.000,00	412.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	412.000,00	412.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.000,00	412.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	412.000,00	412.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	412.000,00	412.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.000,00	412.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	538.332,00	537.000,00	(1.332,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	538.332,00	537.000,00	(1.332,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	538.332,00	537.000,00	(1.332,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.332,00	537.000,00	(1.332,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.103.000,00	29.103.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	25.003.000,00	25.003.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	21.803.000,00	21.803.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.803.000,00	21.803.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.803.000,00	21.803.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.150.000,00	66.150.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	66.150.000,00	66.150.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	60.300.000,00	60.300.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.300.000,00	60.300.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.300.000,00	60.300.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0002		FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	4.550.000,00	(450.000,00)	91,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	4.550.000,00	(450.000,00)	91,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	400.000,00	250.000,00	(150.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	250.000,00	(150.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	250.000,00	(150.000,00)	62,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	85,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	85,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	85,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Randudongkal

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	3.194.083.000,00	3.051.063.156,00	(143.019.844,00)	95,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.921.850.500,00	2.778.832.606,00	(143.017.894,00)	95,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	32.262.000,00	32.262.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.157.000,00	5.157.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.157.000,00	5.157.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.157.000,00	5.157.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6.010.000,00	6.010.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.010.000,00	6.010.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.010.000,00	6.010.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.095.000,00	6.095.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.095.000,00	6.095.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.095.000,00	6.095.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.307.389.000,00	2.164.863.923,00	(142.525.077,00)	93,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.289.083.000,00	2.146.557.923,00	(142.525.077,00)	93,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.289.083.000,00	2.146.557.923,00	(142.525.077,00)	93,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.289.083.000,00	2.146.557.923,00	(142.525.077,00)	93,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.206.000,00	7.206.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.206.000,00	7.206.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.206.000,00	7.206.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	6.136.000,00	6.136.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.136.000,00	3.136.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.136.000,00	3.136.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.136.000,00	3.136.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	171.394.000,00	171.379.934,00	(14.066,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.350.000,00	19.336.000,00	(14.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	19.350.000,00	19.336.000,00	(14.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.350.000,00	19.336.000,00	(14.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	76.605.000,00	76.604.934,00	(66,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.605.000,00	76.604.934,00	(66,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.605.000,00	76.604.934,00	(66,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.041.000,00	10.041.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.041.000,00	10.041.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.041.000,00	10.041.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	46.122.000,00	46.122.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.122.000,00	46.122.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.122.000,00	46.122.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	4.476.000,00	4.476.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.476.000,00	4.476.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.476.000,00	4.476.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.000.000,00	12.987.000,00	(13.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.000.000,00	12.987.000,00	(13.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	12.987.000,00	(13.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	12.987.000,00	(13.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	217.069.500,00	216.639.299,00	(430.201,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	23.150.000,00	23.149.600,00	(400,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.150.000,00	23.149.600,00	(400,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.150.000,00	23.149.600,00	(400,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	39.899.500,00	39.708.199,00	(191.301,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.899.500,00	39.708.199,00	(191.301,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.899.500,00	39.708.199,00	(191.301,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	154.020.000,00	153.781.500,00	(238.500,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	154.020.000,00	153.781.500,00	(238.500,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.020.000,00	153.781.500,00	(238.500,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	168.600.000,00	168.564.450,00	(35.550,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	26.050.000,00	26.050.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.050.000,00	26.050.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	26.050.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.150.000,00	11.150.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.150.000,00	11.150.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	11.150.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	116.400.000,00	116.364.450,00	(35.550,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	116.400.000,00	116.364.450,00	(35.550,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.400.000,00	116.364.450,00	(35.550,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.844.000,00	48.842.050,00	(1.950,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	11.942.000,00	11.942.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	11.942.000,00	11.942.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.942.000,00	11.942.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.942.000,00	11.942.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	18.650.500,00	18.649.200,00	(1.300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	3.000.000,00	2.998.700,00	(1.300,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.998.700,00	(1.300,00)	99,95	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.998.700,00	(1.300,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	12.650.500,00	12.650.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.650.500,00	12.650.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.650.500,00	12.650.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	18.251.500,00	18.250.850,00	(650,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	8.010.000,00	8.009.350,00	(650,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.010.000,00	8.009.350,00	(650,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	8.009.350,00	(650,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	4.241.500,00	4.241.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.241.500,00	4.241.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.241.500,00	4.241.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74.752.500,00	74.752.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	74.752.500,00	74.752.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	34.652.500,00	34.652.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.652.500,00	34.652.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.652.500,00	34.652.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	40.100.000,00	40.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.100.000,00	40.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	40.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.510.000,00	23.510.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	10.510.000,00	10.510.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	10.510.000,00	10.510.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.510.000,00	10.510.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.510.000,00	10.510.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.335.000,00	47.335.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	47.335.000,00	47.335.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	21.635.000,00	21.635.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.635.000,00	21.635.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.635.000,00	21.635.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0002		FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	77.791.000,00	77.791.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	77.791.000,00	77.791.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	8.560.000,00	8.560.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.560.000,00	8.560.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	8.560.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	9.252.000,00	9.252.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.252.000,00	9.252.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.252.000,00	9.252.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0006		FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	6.780.000,00	6.780.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.780.000,00	6.780.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	6.780.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	8.139.000,00	8.139.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	8.139.000,00	8.139.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.139.000,00	8.139.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8.060.000,00	8.060.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	8.060.000,00	8.060.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.060.000,00	8.060.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Pemalang

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	12.925.733.550,00	12.187.225.642,00	(738.507.908,00)	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.359.907.050,00	11.624.960.142,00	(734.946.908,00)	94,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.022.500,00	22.972.000,00	(50.500,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.070.000,00	4.070.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.070.000,00	4.070.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	4.070.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.977.000,00	1.952.000,00	(25.000,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.977.000,00	1.952.000,00	(25.000,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.977.000,00	1.952.000,00	(25.000,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.264.000,00	2.239.000,00	(25.000,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.264.000,00	2.239.000,00	(25.000,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.264.000,00	2.239.000,00	(25.000,00)	98,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.127.000,00	2.127.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.127.000,00	2.127.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.127.000,00	2.127.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.155.500,00	4.155.000,00	(500,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.155.500,00	4.155.000,00	(500,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.155.500,00	4.155.000,00	(500,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.009.000,00	6.009.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.009.000,00	6.009.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.009.000,00	6.009.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.628.474.000,00	10.909.711.394,00	(718.762.606,00)	93,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.626.864.000,00	10.908.101.394,00	(718.762.606,00)	93,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.626.864.000,00	10.908.101.394,00	(718.762.606,00)	93,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.626.864.000,00	10.908.101.394,00	(718.762.606,00)	93,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	27.024.000,00	27.024.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.024.000,00	27.024.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	27.024.000,00	27.024.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.024.000,00	27.024.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	200.098.010,00	199.984.092,00	(113.918,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.750.000,00	4.749.000,00	(1.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.750.000,00	4.749.000,00	(1.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.749.000,00	(1.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.950.000,00	9.860.000,00	(90.000,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	9.950.000,00	9.860.000,00	(90.000,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.950.000,00	9.860.000,00	(90.000,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	142.879.010,00	142.856.092,00	(22.918,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	142.879.010,00	142.856.092,00	(22.918,00)	99,98	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.879.010,00	142.856.092,00	(22.918,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.399.000,00	12.399.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.399.000,00	12.399.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.399.000,00	12.399.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.020.000,00	4.020.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.020.000,00	4.020.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	4.020.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	26.100.000,00	26.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.100.000,00	26.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	26.100.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	74.972.540,00	72.640.000,00	(2.332.540,00)	96,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.815.000,00	31.800.000,00	(2.015.000,00)	94,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	33.815.000,00	31.800.000,00	(2.015.000,00)	94,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.815.000,00	31.800.000,00	(2.015.000,00)	94,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	33.657.540,00	33.340.000,00	(317.540,00)	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	33.657.540,00	33.340.000,00	(317.540,00)	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.657.540,00	33.340.000,00	(317.540,00)	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	281.954.000,00	271.719.316,00	(10.234.684,00)	96,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	37.680.000,00	28.077.644,00	(9.602.356,00)	74,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.680.000,00	28.077.644,00	(9.602.356,00)	74,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.680.000,00	28.077.644,00	(9.602.356,00)	74,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	241.074.000,00	240.441.672,00	(632.328,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	241.074.000,00	240.441.672,00	(632.328,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.074.000,00	240.441.672,00	(632.328,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	124.362.000,00	120.909.340,00	(3.452.660,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	31.050.000,00	27.937.000,00	(3.113.000,00)	89,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.050.000,00	27.937.000,00	(3.113.000,00)	89,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.050.000,00	27.937.000,00	(3.113.000,00)	89,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	5.000.000,00	4.742.000,00	(258.000,00)	94,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.742.000,00	(258.000,00)	94,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.742.000,00	(258.000,00)	94,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.190.000,00	13.114.000,00	(76.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.190.000,00	13.114.000,00	(76.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.190.000,00	13.114.000,00	(76.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	75.122.000,00	75.116.340,00	(5.660,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.122.000,00	75.116.340,00	(5.660,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.122.000,00	75.116.340,00	(5.660,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.875.000,00	24.804.000,00	(71.000,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.990.000,00	(10.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	4.275.000,00	4.275.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	4.275.000,00	4.275.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.275.000,00	4.275.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	4.275.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	13.600.000,00	13.539.000,00	(61.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	13.600.000,00	13.539.000,00	(61.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.539.000,00	(61.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.539.000,00	(61.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	368.014.500,00	366.984.500,00	(1.030.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	368.014.500,00	366.984.500,00	(1.030.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	32.880.000,00	31.880.000,00	(1.000.000,00)	96,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.880.000,00	31.880.000,00	(1.000.000,00)	96,95	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.880.000,00	31.880.000,00	(1.000.000,00)	96,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	335.134.500,00	335.104.500,00	(30.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	335.134.500,00	335.104.500,00	(30.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.134.500,00	335.104.500,00	(30.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.075.000,00	22.065.000,00	(10.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.075.000,00	22.065.000,00	(10.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	22.075.000,00	22.065.000,00	(10.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.075.000,00	22.065.000,00	(10.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.075.000,00	22.065.000,00	(10.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.572.000,00	88.467.000,00	(105.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	88.572.000,00	88.467.000,00	(105.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	77.732.000,00	77.707.000,00	(25.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.732.000,00	77.707.000,00	(25.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.732.000,00	77.707.000,00	(25.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	10.840.000,00	10.760.000,00	(80.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.840.000,00	10.760.000,00	(80.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	10.760.000,00	(80.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.290.000,00	59.945.000,00	(2.345.000,00)	96,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.290.000,00	59.945.000,00	(2.345.000,00)	96,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	6.175.000,00	6.160.000,00	(15.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.175.000,00	6.160.000,00	(15.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	6.160.000,00	(15.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	2.500.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	36.475.000,00	36.465.000,00	(10.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.475.000,00	36.465.000,00	(10.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.475.000,00	36.465.000,00	(10.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	3.460.000,00	1.200.000,00	(2.260.000,00)	34,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.460.000,00	1.200.000,00	(2.260.000,00)	34,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	1.200.000,00	(2.260.000,00)	34,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	6.680.000,00	6.680.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.680.000,00	6.680.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.680.000,00	6.680.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.000.000,00	4.990.000,00	(10.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.990.000,00	(10.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.990.000,00	(10.000,00)	99,79	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Kebondalem**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001		5	BELANJA DAERAH	610.084.771,00	604.681.835,00	(5.402.936,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	272.842.500,00	271.728.545,00	(1.113.955,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	73.973.606,00	73.782.875,00	(190.731,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.238.500,00	5.202.500,00	(36.000,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.238.500,00	5.202.500,00	(36.000,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.238.500,00	5.202.500,00	(36.000,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.723.875,00	4.723.875,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	4.723.875,00	4.723.875,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.723.875,00	4.723.875,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	51.805.731,00	51.690.500,00	(115.231,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.805.731,00	51.690.500,00	(115.231,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.805.731,00	51.690.500,00	(115.231,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.705.500,00	9.666.000,00	(39.500,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.705.500,00	9.666.000,00	(39.500,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.705.500,00	9.666.000,00	(39.500,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	129.432.000,00	128.809.225,00	(622.775,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.460.000,00	23.284.225,00	(175.775,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.460.000,00	23.284.225,00	(175.775,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.460.000,00	23.284.225,00	(175.775,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	105.972.000,00	105.525.000,00	(447.000,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	105.972.000,00	105.525.000,00	(447.000,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.972.000,00	105.525.000,00	(447.000,00)	99,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.436.894,00	62.136.445,00	(300.449,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	17.361.750,00	17.061.750,00	(300.000,00)	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.361.750,00	17.061.750,00	(300.000,00)	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.361.750,00	17.061.750,00	(300.000,00)	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	14.640.000,00	14.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.640.000,00	14.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	14.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	30.435.144,00	30.434.695,00	(449,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.435.144,00	30.434.695,00	(449,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.435.144,00	30.434.695,00	(449,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.546.000,00	12.473.500,00	(72.500,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	12.546.000,00	12.473.500,00	(72.500,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	12.546.000,00	12.473.500,00	(72.500,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.546.000,00	12.473.500,00	(72.500,00)	99,42	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.546.000,00	12.473.500,00	(72.500,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	218.116.271,00	216.699.790,00	(1.416.481,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	218.116.271,00	216.699.790,00	(1.416.481,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	12.013.125,00	11.510.000,00	(503.125,00)	95,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.013.125,00	11.510.000,00	(503.125,00)	95,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.013.125,00	11.510.000,00	(503.125,00)	95,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	80.062.140,00	80.062.140,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.062.140,00	80.062.140,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.062.140,00	80.062.140,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	126.041.006,00	125.127.650,00	(913.356,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	126.041.006,00	125.127.650,00	(913.356,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.041.006,00	125.127.650,00	(913.356,00)	99,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.580.000,00	103.780.000,00	(2.800.000,00)	97,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	106.580.000,00	103.780.000,00	(2.800.000,00)	97,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	106.580.000,00	103.780.000,00	(2.800.000,00)	97,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	106.580.000,00	103.780.000,00	(2.800.000,00)	97,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.580.000,00	103.780.000,00	(2.800.000,00)	97,37	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Pelutan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002		5	BELANJA DAERAH	654.529.250,00	637.774.400,00	(16.754.850,00)	97,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.409.250,00	290.774.400,00	(14.634.850,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	159.100.250,00	152.156.750,00	(6.943.500,00)	95,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.665.500,00	2.665.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.665.500,00	2.665.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.665.500,00	2.665.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	61.973.750,00	55.825.750,00	(6.148.000,00)	90,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.973.750,00	55.825.750,00	(6.148.000,00)	90,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.973.750,00	55.825.750,00	(6.148.000,00)	90,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.121.000,00	6.115.500,00	(5.500,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.121.000,00	6.115.500,00	(5.500,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.121.000,00	6.115.500,00	(5.500,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	84.290.000,00	83.500.000,00	(790.000,00)	99,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.290.000,00	83.500.000,00	(790.000,00)	99,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.290.000,00	83.500.000,00	(790.000,00)	99,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100.064.000,00	97.776.650,00	(2.287.350,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.840.000,00	3.140.000,00	(1.700.000,00)	64,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.840.000,00	3.140.000,00	(1.700.000,00)	64,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	3.140.000,00	(1.700.000,00)	64,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.880.000,00	12.314.650,00	(565.350,00)	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.880.000,00	12.314.650,00	(565.350,00)	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.880.000,00	12.314.650,00	(565.350,00)	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	82.344.000,00	82.322.000,00	(22.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	82.344.000,00	82.322.000,00	(22.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.344.000,00	82.322.000,00	(22.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.245.000,00	36.841.000,00	(5.404.000,00)	87,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.870.000,00	4.100.000,00	(1.770.000,00)	69,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.870.000,00	4.100.000,00	(1.770.000,00)	69,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.870.000,00	4.100.000,00	(1.770.000,00)	69,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.110.000,00	7.297.000,00	(2.813.000,00)	72,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.110.000,00	7.297.000,00	(2.813.000,00)	72,17	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	7.297.000,00	(2.813.000,00)	72,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	23.765.000,00	22.944.000,00	(821.000,00)	96,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.765.000,00	22.944.000,00	(821.000,00)	96,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.765.000,00	22.944.000,00	(821.000,00)	96,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000,00	11.750.000,00	(250.000,00)	97,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	12.000.000,00	11.750.000,00	(250.000,00)	97,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	12.000.000,00	11.750.000,00	(250.000,00)	97,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.750.000,00	(250.000,00)	97,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.750.000,00	(250.000,00)	97,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	209.500.000,00	208.690.000,00	(810.000,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	209.500.000,00	208.690.000,00	(810.000,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	9.500.000,00	9.370.000,00	(130.000,00)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.370.000,00	(130.000,00)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.370.000,00	(130.000,00)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	78.251.000,00	78.251.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.251.000,00	78.251.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.251.000,00	78.251.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	121.749.000,00	121.069.000,00	(680.000,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	121.749.000,00	121.069.000,00	(680.000,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.749.000,00	121.069.000,00	(680.000,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.520.000,00	14.410.000,00	(110.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.520.000,00	14.410.000,00	(110.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	14.520.000,00	14.410.000,00	(110.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.520.000,00	14.410.000,00	(110.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.520.000,00	14.410.000,00	(110.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	113.100.000,00	112.150.000,00	(950.000,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	113.100.000,00	112.150.000,00	(950.000,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	113.100.000,00	112.150.000,00	(950.000,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	113.100.000,00	112.150.000,00	(950.000,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.100.000,00	112.150.000,00	(950.000,00)	99,16	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Paduraksa**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003		5	BELANJA DAERAH	551.885.375,00	550.360.044,00	(1.525.331,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.875.375,00	170.553.060,00	(1.322.315,00)	99,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	60.984.375,00	60.963.900,00	(20.475,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.307.000,00	4.307.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.307.000,00	4.307.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.307.000,00	4.307.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	49.112.875,00	49.092.400,00	(20.475,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.112.875,00	49.092.400,00	(20.475,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.112.875,00	49.092.400,00	(20.475,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.564.500,00	7.564.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.564.500,00	7.564.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.564.500,00	7.564.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.996.000,00	90.009.160,00	(986.840,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.180.000,00	14.481.202,00	(698.798,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.180.000,00	14.481.202,00	(698.798,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000,00	14.481.202,00	(698.798,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	75.816.000,00	75.527.958,00	(288.042,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.816.000,00	75.527.958,00	(288.042,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.816.000,00	75.527.958,00	(288.042,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.895.000,00	19.580.000,00	(315.000,00)	98,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.850.000,00	1.582.000,00	(268.000,00)	85,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000,00	1.582.000,00	(268.000,00)	85,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.582.000,00	(268.000,00)	85,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	18.045.000,00	17.998.000,00	(47.000,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.045.000,00	17.998.000,00	(47.000,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.045.000,00	17.998.000,00	(47.000,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.184.000,00	41.181.000,00	(3.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	41.184.000,00	41.181.000,00	(3.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	41.184.000,00	41.181.000,00	(3.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.184.000,00	41.181.000,00	(3.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.184.000,00	41.181.000,00	(3.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	206.870.000,00	206.669.984,00	(200.016,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	206.870.000,00	206.669.984,00	(200.016,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	6.870.000,00	6.800.000,00	(70.000,00)	98,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.870.000,00	6.800.000,00	(70.000,00)	98,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	6.800.000,00	(70.000,00)	98,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	67.000.000,00	67.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.000.000,00	67.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	67.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	133.000.000,00	132.869.984,00	(130.016,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	133.000.000,00	132.869.984,00	(130.016,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	132.869.984,00	(130.016,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.956.000,00	7.956.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.956.000,00	7.956.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	7.956.000,00	7.956.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.956.000,00	7.956.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.956.000,00	7.956.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124.000.000,00	124.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	124.000.000,00	124.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	124.000.000,00	124.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	124.000.000,00	124.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000,00	124.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Sugihwaras**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004		5	BELANJA DAERAH	594.173.175,00	547.537.010,00	(46.636.165,00)	92,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	233.801.175,00	213.069.262,00	(20.731.913,00)	91,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	60.181.175,00	57.728.700,00	(2.452.475,00)	95,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.500.000,00	6.498.000,00	(2.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.498.000,00	(2.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.498.000,00	(2.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	46.378.175,00	44.003.500,00	(2.374.675,00)	94,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	46.378.175,00	44.003.500,00	(2.374.675,00)	94,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.378.175,00	44.003.500,00	(2.374.675,00)	94,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.193.000,00	3.177.200,00	(15.800,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.193.000,00	3.177.200,00	(15.800,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.193.000,00	3.177.200,00	(15.800,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.110.000,00	4.050.000,00	(60.000,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.110.000,00	4.050.000,00	(60.000,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.110.000,00	4.050.000,00	(60.000,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	140.920.000,00	125.689.862,00	(15.230.138,00)	89,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.612.000,00	17.730.506,00	(3.881.494,00)	82,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.612.000,00	17.730.506,00	(3.881.494,00)	82,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.612.000,00	17.730.506,00	(3.881.494,00)	82,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	118.308.000,00	106.959.356,00	(11.348.644,00)	90,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	118.308.000,00	106.959.356,00	(11.348.644,00)	90,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.308.000,00	106.959.356,00	(11.348.644,00)	90,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	32.700.000,00	29.650.700,00	(3.049.300,00)	90,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.050.000,00	4.721.800,00	(328.200,00)	93,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.050.000,00	4.721.800,00	(328.200,00)	93,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	4.721.800,00	(328.200,00)	93,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.250.000,00	5.529.000,00	(2.721.000,00)	67,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.250.000,00	5.529.000,00	(2.721.000,00)	67,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	5.529.000,00	(2.721.000,00)	67,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	19.400.000,00	19.399.900,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	19.400.000,00	19.399.900,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	19.399.900,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.600.000,00	19.552.000,00	(48.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	19.600.000,00	19.552.000,00	(48.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	19.600.000,00	19.552.000,00	(48.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.600.000,00	19.552.000,00	(48.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	19.552.000,00	(48.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	218.697.000,00	211.015.748,00	(7.681.252,00)	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	218.697.000,00	211.015.748,00	(7.681.252,00)	96,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	11.529.000,00	11.529.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.529.000,00	11.529.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.529.000,00	11.529.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	82.380.000,00	82.036.748,00	(343.252,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.380.000,00	82.036.748,00	(343.252,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.380.000,00	82.036.748,00	(343.252,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	124.788.000,00	117.450.000,00	(7.338.000,00)	94,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	124.788.000,00	117.450.000,00	(7.338.000,00)	94,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.788.000,00	117.450.000,00	(7.338.000,00)	94,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	122.075.000,00	103.900.000,00	(18.175.000,00)	85,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	122.075.000,00	103.900.000,00	(18.175.000,00)	85,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	122.075.000,00	103.900.000,00	(18.175.000,00)	85,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	122.075.000,00	103.900.000,00	(18.175.000,00)	85,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.075.000,00	103.900.000,00	(18.175.000,00)	85,11	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Mulyoharjo**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005		5	BELANJA DAERAH	692.728.150,00	690.971.861,00	(1.756.289,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.978.150,00	304.723.888,00	(1.254.262,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	108.486.000,00	108.161.000,00	(325.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.285.000,00	1.960.000,00	(325.000,00)	85,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.285.000,00	1.960.000,00	(325.000,00)	85,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.285.000,00	1.960.000,00	(325.000,00)	85,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	78.001.000,00	78.001.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	78.001.000,00	78.001.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.001.000,00	78.001.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	179.676.000,00	178.815.388,00	(860.612,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.554.000,00	30.047.409,00	(506.591,00)	98,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.554.000,00	30.047.409,00	(506.591,00)	98,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.554.000,00	30.047.409,00	(506.591,00)	98,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.420.000,00	1.420.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.420.000,00	1.420.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	1.420.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	147.702.000,00	147.347.979,00	(354.021,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	147.702.000,00	147.347.979,00	(354.021,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.702.000,00	147.347.979,00	(354.021,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.816.150,00	17.747.500,00	(68.650,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	750.458,00	682.500,00	(67.958,00)	90,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	750.458,00	682.500,00	(67.958,00)	90,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.458,00	682.500,00	(67.958,00)	90,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	17.065.692,00	17.065.000,00	(692,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.065.692,00	17.065.000,00	(692,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.065.692,00	17.065.000,00	(692,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	284.350.000,00	283.847.973,00	(502.027,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	284.350.000,00	283.847.973,00	(502.027,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	9.350.000,00	9.350.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.350.000,00	9.350.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	9.350.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	114.997.980,00	114.807.980,00	(190.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	114.997.980,00	114.807.980,00	(190.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.997.980,00	114.807.980,00	(190.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	160.002.020,00	159.689.993,00	(312.027,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	160.002.020,00	159.689.993,00	(312.027,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.002.020,00	159.689.993,00	(312.027,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.400.000,00	102.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	102.400.000,00	102.400.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	102.400.000,00	102.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.400.000,00	102.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.400.000,00	102.400.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Bojongbata**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006		5	BELANJA DAERAH	595.576.675,00	593.289.828,00	(2.286.847,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	253.840.050,00	251.590.231,00	(2.249.819,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	82.051.000,00	81.672.000,00	(379.000,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.254.000,00	6.254.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.254.000,00	6.254.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.254.000,00	6.254.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.895.000,00	8.895.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.895.000,00	8.895.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.895.000,00	8.895.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	43.182.500,00	42.807.500,00	(375.000,00)	99,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	43.182.500,00	42.807.500,00	(375.000,00)	99,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.182.500,00	42.807.500,00	(375.000,00)	99,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.239.500,00	7.235.500,00	(4.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.239.500,00	7.235.500,00	(4.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.239.500,00	7.235.500,00	(4.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	16.480.000,00	16.480.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.480.000,00	16.480.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.480.000,00	16.480.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	28.203.050,00	27.635.000,00	(568.050,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.203.050,00	27.635.000,00	(568.050,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	28.203.050,00	27.635.000,00	(568.050,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.203.050,00	27.635.000,00	(568.050,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	143.586.000,00	142.283.231,00	(1.302.769,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.226.000,00	15.923.231,00	(1.302.769,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.226.000,00	15.923.231,00	(1.302.769,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.226.000,00	15.923.231,00	(1.302.769,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	126.360.000,00	126.360.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	126.360.000,00	126.360.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.360.000,00	126.360.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	216.736.625,00	216.699.597,00	(37.028,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	216.736.625,00	216.699.597,00	(37.028,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	119.070.000,00	119.069.098,00	(902,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.570.000,00	24.569.253,00	(747,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.570.000,00	24.569.253,00	(747,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	94.500.000,00	94.499.845,00	(155,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.500.000,00	94.499.845,00	(155,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	87.916.625,00	87.880.499,00	(36.126,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	87.916.625,00	87.880.499,00	(36.126,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.916.625,00	87.880.499,00	(36.126,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Widuri**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007		5	BELANJA DAERAH	551.968.200,00	524.888.909,00	(27.079.291,00)	95,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	219.768.200,00	207.359.616,00	(12.408.584,00)	94,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	85.352.200,00	80.585.500,00	(4.766.700,00)	94,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	54.234.200,00	53.422.500,00	(811.700,00)	98,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	54.234.200,00	53.422.500,00	(811.700,00)	98,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.234.200,00	53.422.500,00	(811.700,00)	98,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.878.000,00	2.528.000,00	(1.350.000,00)	65,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.878.000,00	2.528.000,00	(1.350.000,00)	65,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.878.000,00	2.528.000,00	(1.350.000,00)	65,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	23.300.000,00	20.695.000,00	(2.605.000,00)	88,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.300.000,00	20.695.000,00	(2.605.000,00)	88,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	20.695.000,00	(2.605.000,00)	88,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	121.766.000,00	120.234.116,00	(1.531.884,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.000.000,00	13.982.764,00	(1.017.236,00)	93,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.982.764,00	(1.017.236,00)	93,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.982.764,00	(1.017.236,00)	93,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	106.266.000,00	105.751.352,00	(514.648,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	106.266.000,00	105.751.352,00	(514.648,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.266.000,00	105.751.352,00	(514.648,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.650.000,00	6.540.000,00	(6.110.000,00)	51,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.600.000,00	1.290.000,00	(4.310.000,00)	23,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	1.290.000,00	(4.310.000,00)	23,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	1.290.000,00	(4.310.000,00)	23,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.050.000,00	5.250.000,00	(1.800.000,00)	74,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.050.000,00	5.250.000,00	(1.800.000,00)	74,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	5.250.000,00	(1.800.000,00)	74,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	207.625.000,00	193.704.293,00	(13.920.707,00)	93,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	207.625.000,00	193.704.293,00	(13.920.707,00)	93,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	7.625.000,00	7.550.000,00	(75.000,00)	99,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.625.000,00	7.550.000,00	(75.000,00)	99,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.625.000,00	7.550.000,00	(75.000,00)	99,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	81.000.000,00	80.613.293,00	(386.707,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	80.613.293,00	(386.707,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	80.613.293,00	(386.707,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	119.000.000,00	105.541.000,00	(13.459.000,00)	88,68	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	119.000.000,00	105.541.000,00	(13.459.000,00)	88,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.000.000,00	105.541.000,00	(13.459.000,00)	88,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124.575.000,00	123.825.000,00	(750.000,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	124.575.000,00	123.825.000,00	(750.000,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	124.575.000,00	123.825.000,00	(750.000,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	124.575.000,00	123.825.000,00	(750.000,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.575.000,00	123.825.000,00	(750.000,00)	99,39	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Taman**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	5.819.080.000,00	5.361.068.536,00	(458.011.464,00)	92,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.705.580.000,00	5.247.568.536,00	(458.011.464,00)	91,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.944.080.000,00	4.486.916.048,00	(457.163.952,00)	90,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.934.080.000,00	4.476.916.048,00	(457.163.952,00)	90,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.934.080.000,00	4.476.916.048,00	(457.163.952,00)	90,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.934.080.000,00	4.476.916.048,00	(457.163.952,00)	90,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	262.506.800,00	262.506.750,00	(50,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.075.500,00	14.075.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.075.500,00	14.075.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.075.500,00	14.075.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	165.000.000,00	165.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000,00	165.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	165.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	72.795.000,00	72.794.950,00	(50,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	72.795.000,00	72.794.950,00	(50,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.795.000,00	72.794.950,00	(50,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.636.300,00	5.636.300,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.636.300,00	5.636.300,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.636.300,00	5.636.300,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	300.548.000,00	299.819.238,00	(728.762,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.560.000,00	15.560.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.560.000,00	15.560.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.560.000,00	15.560.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	50.520.000,00	49.791.373,00	(728.627,00)	98,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.520.000,00	49.791.373,00	(728.627,00)	98,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.520.000,00	49.791.373,00	(728.627,00)	98,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	234.468.000,00	234.467.865,00	(135,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	234.468.000,00	234.467.865,00	(135,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.468.000,00	234.467.865,00	(135,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	121.145.200,00	121.026.500,00	(118.700,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	21.208.000,00	21.090.500,00	(117.500,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.208.000,00	21.090.500,00	(117.500,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.208.000,00	21.090.500,00	(117.500,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	66.437.200,00	66.436.000,00	(1.200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	66.437.200,00	66.436.000,00	(1.200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.437.200,00	66.436.000,00	(1.200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.000.000,00	39.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Wanarejan Selatan**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001		5	BELANJA DAERAH	630.000.000,00	619.659.408,00	(10.340.592,00)	98,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	270.069.500,00	264.589.277,00	(5.480.223,00)	97,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.000.000,00	2.999.814,00	(186,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.000.000,00	2.999.814,00	(186,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.999.814,00	(186,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.999.814,00	(186,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	57.641.500,00	56.366.840,00	(1.274.660,00)	97,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.955.000,00	1.804.500,00	(1.150.500,00)	61,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.955.000,00	1.804.500,00	(1.150.500,00)	61,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.955.000,00	1.804.500,00	(1.150.500,00)	61,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.000.000,00	7.999.577,00	(423,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.999.577,00	(423,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.999.577,00	(423,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	31.320.000,00	31.311.798,00	(8.202,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.320.000,00	31.311.798,00	(8.202,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.320.000,00	31.311.798,00	(8.202,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.886.500,00	3.877.465,00	(9.035,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.886.500,00	3.877.465,00	(9.035,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.886.500,00	3.877.465,00	(9.035,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)	91,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)	91,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)	91,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	10.280.000,00	10.273.500,00	(6.500,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.280.000,00	10.273.500,00	(6.500,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.280.000,00	10.273.500,00	(6.500,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	194.073.000,00	190.090.623,00	(3.982.377,00)	97,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.599.000,00	13.225.125,00	(3.373.875,00)	79,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.599.000,00	13.225.125,00	(3.373.875,00)	79,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.599.000,00	13.225.125,00	(3.373.875,00)	79,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	177.474.000,00	176.865.498,00	(608.502,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	177.474.000,00	176.865.498,00	(608.502,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.474.000,00	176.865.498,00	(608.502,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.355.000,00	15.132.000,00	(223.000,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.900.000,00	1.677.500,00	(222.500,00)	88,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.677.500,00	(222.500,00)	88,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.677.500,00	(222.500,00)	88,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.455.000,00	13.454.500,00	(500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.455.000,00	13.454.500,00	(500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.455.000,00	13.454.500,00	(500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	231.760.000,00	226.986.062,00	(4.773.938,00)	97,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	1.600.000,00	1.565.000,00	(35.000,00)	97,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	1.600.000,00	1.565.000,00	(35.000,00)	97,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.565.000,00	(35.000,00)	97,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.565.000,00	(35.000,00)	97,81	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	230.160.000,00	225.421.062,00	(4.738.938,00)	97,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	6.660.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	116.000.000,00	115.971.962,00	(28.038,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.000.000,00	115.971.962,00	(28.038,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000,00	115.971.962,00	(28.038,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	107.500.000,00	102.789.100,00	(4.710.900,00)	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	107.500.000,00	102.789.100,00	(4.710.900,00)	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.500.000,00	102.789.100,00	(4.710.900,00)	95,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.800.000,00	22.799.069,00	(931,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.800.000,00	22.799.069,00	(931,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	22.800.000,00	22.799.069,00	(931,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.800.000,00	22.799.069,00	(931,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.799.069,00	(931,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.370.500,00	105.285.000,00	(85.500,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	105.370.500,00	105.285.000,00	(85.500,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	105.370.500,00	105.285.000,00	(85.500,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.370.500,00	105.285.000,00	(85.500,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.370.500,00	105.285.000,00	(85.500,00)	99,91	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Beji**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002		5	BELANJA DAERAH	630.000.000,00	628.313.665,00	(1.686.335,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	324.600.000,00	322.913.665,00	(1.686.335,00)	99,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	77.937.210,00	77.937.200,00	(10,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.402.500,00	2.402.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.402.500,00	2.402.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.402.500,00	2.402.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	60.062.710,00	60.062.700,00	(10,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.062.710,00	60.062.700,00	(10,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.062.710,00	60.062.700,00	(10,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.082.000,00	5.082.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.082.000,00	5.082.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.082.000,00	5.082.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	7.750.000,00	7.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.750.000,00	7.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	7.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.082.479,00	16.020.000,00	(62.479,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.582.479,00	7.520.000,00	(62.479,00)	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	7.582.479,00	7.520.000,00	(62.479,00)	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.582.479,00	7.520.000,00	(62.479,00)	99,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	200.466.000,00	198.960.465,00	(1.505.535,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.280.000,00	15.794.476,00	(1.485.524,00)	91,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.280.000,00	15.794.476,00	(1.485.524,00)	91,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	15.794.476,00	(1.485.524,00)	91,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	174.186.000,00	174.165.989,00	(20.011,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	174.186.000,00	174.165.989,00	(20.011,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.186.000,00	174.165.989,00	(20.011,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.114.311,00	29.996.000,00	(118.311,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	700.000,00	583.500,00	(116.500,00)	83,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	583.500,00	(116.500,00)	83,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	583.500,00	(116.500,00)	83,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.240.000,00	5.240.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.240.000,00	5.240.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	5.240.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	19.174.311,00	19.172.500,00	(1.811,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.174.311,00	19.172.500,00	(1.811,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.174.311,00	19.172.500,00	(1.811,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	5.130.000,00	5.130.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.130.000,00	5.130.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	5.130.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	102.200.000,00	102.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.200.000,00	102.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.200.000,00	102.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	92.670.000,00	92.670.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	92.670.000,00	92.670.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.670.000,00	92.670.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.400.000,00	105.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	105.400.000,00	105.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	105.400.000,00	105.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.400.000,00	105.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.400.000,00	105.400.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Petarukan**

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	4.292.393.000,00	4.030.322.655,00	(262.070.345,00)	93,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.076.995.500,00	3.814.935.855,00	(262.059.645,00)	93,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.000.000,00	27.976.000,00	(24.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.000.000,00	3.976.000,00	(24.000,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.976.000,00	(24.000,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.976.000,00	(24.000,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.266.317.000,00	3.004.281.355,00	(262.035.645,00)	91,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.266.317.000,00	3.004.281.355,00	(262.035.645,00)	91,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.266.317.000,00	3.004.281.355,00	(262.035.645,00)	91,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.266.317.000,00	3.004.281.355,00	(262.035.645,00)	91,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	301.287.500,00	301.287.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.250.000,00	10.250.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.250.000,00	10.250.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	10.250.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	248.154.500,00	248.154.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	248.154.500,00	248.154.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.154.500,00	248.154.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.722.500,00	27.722.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.722.500,00	27.722.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.722.500,00	27.722.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	12.400.500,00	12.400.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.400.500,00	12.400.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.500,00	12.400.500,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	283.465.000,00	283.465.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.355.000,00	18.355.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.355.000,00	18.355.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.355.000,00	18.355.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	205.110.000,00	205.110.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	205.110.000,00	205.110.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.110.000,00	205.110.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	197.926.000,00	197.926.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	172.926.000,00	172.926.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	172.926.000,00	172.926.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.926.000,00	172.926.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.152.000,00	33.151.500,00	(500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	14.338.000,00	14.338.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	7.338.000,00	7.338.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.338.000,00	7.338.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.338.000,00	7.338.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	9.370.000,00	9.369.500,00	(500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	5.370.000,00	5.370.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.370.000,00	5.370.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.370.000,00	5.370.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	4.000.000,00	3.999.500,00	(500,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.999.500,00	(500,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.500,00	(500,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	9.444.000,00	9.444.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	4.384.000,00	4.384.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.384.000,00	4.384.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.384.000,00	4.384.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	5.060.000,00	5.060.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.060.000,00	5.060.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	5.060.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.408.000,00	50.408.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	50.408.000,00	50.408.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	45.908.000,00	45.908.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.908.000,00	45.908.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.908.000,00	45.908.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.123.000,00	40.123.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.123.000,00	40.123.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	40.123.000,00	40.123.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.123.000,00	40.123.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.123.000,00	40.123.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.048.000,00	63.038.000,00	(10.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	63.048.000,00	63.038.000,00	(10.000,00)	99,98	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	48.048.000,00	48.048.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.048.000,00	48.048.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.048.000,00	48.048.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	15.000.000,00	14.990.000,00	(10.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.990.000,00	(10.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.990.000,00	(10.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.666.500,00	28.666.300,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.666.500,00	28.666.300,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	7.500.000,00	7.499.800,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.499.800,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.499.800,00	(200,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	4.545.000,00	4.545.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.545.000,00	4.545.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	4.545.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0012		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	4.015.000,00	4.015.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	4.015.000,00	4.015.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	4.015.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6.526.500,00	6.526.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	6.526.500,00	6.526.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.526.500,00	6.526.500,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kelurahan Petarukan

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001		5	BELANJA DAERAH	808.964.000,00	804.288.360,00	(4.675.640,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	223.324.000,00	220.665.500,00	(2.658.500,00)	98,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	41.587.000,00	41.587.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.785.000,00	1.785.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.785.000,00	1.785.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.785.000,00	1.785.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.619.500,00	2.619.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.619.500,00	2.619.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.619.500,00	2.619.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	29.580.000,00	29.580.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.580.000,00	29.580.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.580.000,00	29.580.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.452.500,00	3.452.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.452.500,00	3.452.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.452.500,00	3.452.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	179.007.000,00	176.887.000,00	(2.120.000,00)	98,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.819.500,00	3.819.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.819.500,00	3.819.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.819.500,00	3.819.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.250.000,00	8.230.000,00	(20.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.250.000,00	8.230.000,00	(20.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.230.000,00	(20.000,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	166.937.500,00	164.837.500,00	(2.100.000,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	166.937.500,00	164.837.500,00	(2.100.000,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.937.500,00	164.837.500,00	(2.100.000,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.730.000,00	2.191.500,00	(538.500,00)	80,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	700.000,00	161.500,00	(538.500,00)	23,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	161.500,00	(538.500,00)	23,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	161.500,00	(538.500,00)	23,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	485.040.000,00	483.022.860,00	(2.017.140,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	485.040.000,00	483.022.860,00	(2.017.140,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	338.215.000,00	336.203.860,00	(2.011.140,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	338.215.000,00	336.203.860,00	(2.011.140,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.215.000,00	336.203.860,00	(2.011.140,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	146.825.000,00	146.819.000,00	(6.000,00)	99,99	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	146.825.000,00	146.819.000,00	(6.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.825.000,00	146.819.000,00	(6.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.600.000,00	100.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	100.600.000,00	100.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	100.600.000,00	100.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.600.000,00	100.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.600.000,00	100.600.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Ampelgading**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	3.053.632.000,00	2.864.053.147,00	(189.578.853,00)	93,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.887.632.000,00	2.698.053.147,00	(189.578.853,00)	93,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.201.132.000,00	2.015.713.147,00	(185.418.853,00)	91,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.198.632.000,00	2.013.213.147,00	(185.418.853,00)	91,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.198.632.000,00	2.013.213.147,00	(185.418.853,00)	91,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.198.632.000,00	2.013.213.147,00	(185.418.853,00)	91,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	240.225.000,00	238.725.000,00	(1.500.000,00)	99,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.555.000,00	2.555.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.555.000,00	2.555.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.555.000,00	2.555.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	133.640.000,00	133.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	133.640.000,00	133.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.640.000,00	133.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	42.055.000,00	42.055.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.055.000,00	42.055.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.055.000,00	42.055.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	41.960.000,00	40.460.000,00	(1.500.000,00)	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	41.960.000,00	40.460.000,00	(1.500.000,00)	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.960.000,00	40.460.000,00	(1.500.000,00)	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	199.850.000,00	198.840.800,00	(1.009.200,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.168.000,00	22.457.600,00	(710.400,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.168.000,00	22.457.600,00	(710.400,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.168.000,00	22.457.600,00	(710.400,00)	96,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	160.182.000,00	159.883.200,00	(298.800,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	160.182.000,00	159.883.200,00	(298.800,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.182.000,00	159.883.200,00	(298.800,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	214.975.000,00	213.324.200,00	(1.650.800,00)	99,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	101.150.000,00	99.499.200,00	(1.650.800,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.150.000,00	99.499.200,00	(1.650.800,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.150.000,00	99.499.200,00	(1.650.800,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	36.670.000,00	36.670.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	36.670.000,00	36.670.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.670.000,00	36.670.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	59.655.000,00	59.655.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	59.655.000,00	59.655.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.655.000,00	59.655.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.500.000,00	47.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	47.500.000,00	47.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0002		FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Comal

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		5	BELANJA DAERAH	4.622.502.970,00	4.179.699.722,00	(442.803.248,00)	90,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.319.912.970,00	3.877.109.722,00	(442.803.248,00)	89,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.222.100,00	30.221.000,00	(1.100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.221.000,00	5.221.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.221.000,00	5.221.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.221.000,00	5.221.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.754.800,00	3.754.500,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.754.800,00	3.754.500,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.754.800,00	3.754.500,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.719.600,00	3.719.500,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.719.600,00	3.719.500,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.719.600,00	3.719.500,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.262.000,00	3.262.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.262.000,00	3.262.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.262.000,00	3.262.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.287.300,00	4.287.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.287.300,00	4.287.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.287.300,00	4.287.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.089.300,00	6.089.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.089.300,00	6.089.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.089.300,00	6.089.000,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.888.100,00	3.888.000,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.888.100,00	3.888.000,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.888.100,00	3.888.000,00	(100,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.683.026.150,00	3.250.400.272,00	(432.625.878,00)	88,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.672.853.000,00	3.240.227.522,00	(432.625.478,00)	88,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.672.853.000,00	3.240.227.522,00	(432.625.478,00)	88,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.672.853.000,00	3.240.227.522,00	(432.625.478,00)	88,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.180.750,00	4.180.750,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.180.750,00	4.180.750,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.180.750,00	4.180.750,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.992.400,00	5.992.000,00	(400,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.992.400,00	5.992.000,00	(400,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.992.400,00	5.992.000,00	(400,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	189.511.230,00	189.507.900,00	(3.330,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.399.000,00	4.399.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.399.000,00	4.399.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.399.000,00	4.399.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	141.800.730,00	141.800.400,00	(330,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	141.800.730,00	141.800.400,00	(330,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.800.730,00	141.800.400,00	(330,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.503.500,00	5.503.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.503.500,00	5.503.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.503.500,00	5.503.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	31.308.000,00	31.305.000,00	(3.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	31.308.000,00	31.305.000,00	(3.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.308.000,00	31.305.000,00	(3.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	102.082.490,00	97.147.000,00	(4.935.490,00)	95,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.106.000,00	36.380.000,00	(1.726.000,00)	95,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	38.106.000,00	36.380.000,00	(1.726.000,00)	95,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.106.000,00	36.380.000,00	(1.726.000,00)	95,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	28.231.740,00	25.040.000,00	(3.191.740,00)	88,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	28.231.740,00	25.040.000,00	(3.191.740,00)	88,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.231.740,00	25.040.000,00	(3.191.740,00)	88,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.744.750,00	35.727.000,00	(17.750,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	35.744.750,00	35.727.000,00	(17.750,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.744.750,00	35.727.000,00	(17.750,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	181.263.000,00	178.050.050,00	(3.212.950,00)	98,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33.144.000,00	30.432.450,00	(2.711.550,00)	91,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.144.000,00	30.432.450,00	(2.711.550,00)	91,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.144.000,00	30.432.450,00	(2.711.550,00)	91,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	143.319.000,00	142.817.600,00	(501.400,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	143.319.000,00	142.817.600,00	(501.400,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.319.000,00	142.817.600,00	(501.400,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	129.808.000,00	127.783.500,00	(2.024.500,00)	98,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	42.774.000,00	40.786.500,00	(1.987.500,00)	95,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.774.000,00	40.786.500,00	(1.987.500,00)	95,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.774.000,00	40.786.500,00	(1.987.500,00)	95,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	48.694.000,00	48.659.000,00	(35.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.694.000,00	48.659.000,00	(35.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.694.000,00	48.659.000,00	(35.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.890.000,00	17.890.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.390.000,00	5.390.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.390.000,00	5.390.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.390.000,00	5.390.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	5.390.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.235.000,00	73.235.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	73.235.000,00	73.235.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	8.735.000,00	8.735.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.735.000,00	8.735.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.735.000,00	8.735.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	103.600.000,00	103.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	98.600.000,00	98.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	98.600.000,00	98.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.600.000,00	98.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.600.000,00	98.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.865.000,00	79.865.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	79.865.000,00	79.865.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	53.865.000,00	53.865.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.865.000,00	53.865.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.865.000,00	53.865.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kelurahan Purwoharjo**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001		5	BELANJA DAERAH	600.350.030,00	599.561.850,00	(788.180,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	257.217.830,00	256.429.650,00	(788.180,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	148.722.200,00	148.722.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	120.832.200,00	120.832.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	120.832.200,00	120.832.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.832.200,00	120.832.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.540.000,00	4.540.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.540.000,00	4.540.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	4.540.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	97.107.630,00	96.770.950,00	(336.680,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.500.000,00	16.349.750,00	(150.250,00)	99,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.349.750,00	(150.250,00)	99,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.349.750,00	(150.250,00)	99,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	74.157.630,00	73.971.200,00	(186.430,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	74.157.630,00	73.971.200,00	(186.430,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.157.630,00	73.971.200,00	(186.430,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.388.000,00	10.936.500,00	(451.500,00)	96,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	8.468.000,00	8.016.500,00	(451.500,00)	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.468.000,00	8.016.500,00	(451.500,00)	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.468.000,00	8.016.500,00	(451.500,00)	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.920.000,00	2.920.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000,00	2.920.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.920.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	343.132.200,00	343.132.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	343.132.200,00	343.132.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	12.948.200,00	12.948.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.948.200,00	12.948.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.948.200,00	12.948.200,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	230.184.000,00	230.184.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	230.184.000,00	230.184.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.184.000,00	230.184.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : **UNSUR KEWILAYAHAN**
Bidang Urusan : **KECAMATAN**
Organisasi : **Kecamatan Ulujami**

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	3.335.266.000,00	2.830.277.720,00	(504.988.280,00)	84,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.069.517.000,00	2.564.543.720,00	(504.973.280,00)	83,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.364.000,00	17.362.750,00	(1.250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.343.000,00	4.341.750,00	(1.250,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.343.000,00	4.341.750,00	(1.250,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.343.000,00	4.341.750,00	(1.250,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.021.000,00	3.021.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.021.000,00	3.021.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.021.000,00	3.021.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.437.266.000,00	1.938.993.271,00	(498.272.729,00)	79,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.430.266.000,00	1.931.993.271,00	(498.272.729,00)	79,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.430.266.000,00	1.931.993.271,00	(498.272.729,00)	79,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.430.266.000,00	1.931.993.271,00	(498.272.729,00)	79,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	126.406.098,00	126.403.006,00	(3.092,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	98.011.098,00	98.010.006,00	(1.092,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	98.011.098,00	98.010.006,00	(1.092,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.011.098,00	98.010.006,00	(1.092,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.895.000,00	4.893.000,00	(2.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.895.000,00	4.893.000,00	(2.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.895.000,00	4.893.000,00	(2.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	34.280.000,00	32.719.600,00	(1.560.400,00)	95,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	34.280.000,00	32.719.600,00	(1.560.400,00)	95,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	465.000,00	465.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.000,00	465.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	33.815.000,00	32.254.600,00	(1.560.400,00)	95,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.815.000,00	32.254.600,00	(1.560.400,00)	95,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	147.338.322,00	146.224.548,00	(1.113.774,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.010.000,00	15.010.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.010.000,00	15.010.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.010.000,00	15.010.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	49.756.322,00	48.805.160,00	(951.162,00)	98,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.756.322,00	48.805.160,00	(951.162,00)	98,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.756.322,00	48.805.160,00	(951.162,00)	98,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	82.572.000,00	82.409.388,00	(162.612,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	82.572.000,00	82.409.388,00	(162.612,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.572.000,00	82.409.388,00	(162.612,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	298.862.580,00	294.840.545,00	(4.022.035,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	108.963.080,00	105.085.045,00	(3.878.035,00)	96,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	108.963.080,00	105.085.045,00	(3.878.035,00)	96,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.963.080,00	105.085.045,00	(3.878.035,00)	96,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	177.899.500,00	177.755.500,00	(144.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	177.899.500,00	177.755.500,00	(144.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.899.500,00	177.755.500,00	(144.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.993.000,00	24.993.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	11.993.000,00	11.993.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	5.993.000,00	5.993.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.993.000,00	5.993.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.993.000,00	5.993.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.998.000,00	35.998.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	30.998.000,00	30.998.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	28.998.000,00	28.998.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.998.000,00	28.998.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.998.000,00	28.998.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	165.258.000,00	165.243.000,00	(15.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	165.258.000,00	165.243.000,00	(15.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	47.158.000,00	47.158.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.158.000,00	47.158.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.158.000,00	47.158.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0002		FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	63.580.000,00	63.565.000,00	(15.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.580.000,00	63.565.000,00	(15.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.580.000,00	63.565.000,00	(15.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28.920.000,00	28.920.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.920.000,00	28.920.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.920.000,00	28.920.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	25.600.000,00	25.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.600.000,00	25.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	25.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0013		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Warungpring

KODE				URAIAN	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	2.965.665.000,00	2.886.958.957,00	(78.706.043,00)	97,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.745.379.000,00	2.666.673.957,00	(78.705.043,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.795.000,00	5.795.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.795.000,00	5.795.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	5.795.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.355.000,00	5.355.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.355.000,00	5.355.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.355.000,00	5.355.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.410.000,00	5.410.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.410.000,00	5.410.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.410.000,00	5.410.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.213.165.000,00	2.140.445.657,00	(72.719.343,00)	96,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.210.665.000,00	2.137.945.657,00	(72.719.343,00)	96,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.210.665.000,00	2.137.945.657,00	(72.719.343,00)	96,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.210.665.000,00	2.137.945.657,00	(72.719.343,00)	96,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	159.395.800,00	157.997.050,00	(1.398.750,00)	99,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.365.000,00	9.365.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.365.000,00	9.365.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.365.000,00	9.365.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	71.255.800,00	71.255.800,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.255.800,00	71.255.800,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.255.800,00	71.255.800,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	37.275.000,00	35.876.250,00	(1.398.750,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	37.275.000,00	35.876.250,00	(1.398.750,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.275.000,00	35.876.250,00	(1.398.750,00)	96,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	56.388.000,00	55.821.600,00	(566.400,00)	98,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	30.213.000,00	29.670.000,00	(543.000,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	30.213.000,00	29.670.000,00	(543.000,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.213.000,00	29.670.000,00	(543.000,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.675.000,00	13.664.100,00	(10.900,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	13.675.000,00	13.664.100,00	(10.900,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.675.000,00	13.664.100,00	(10.900,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	12.500.000,00	12.487.500,00	(12.500,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	12.500.000,00	12.487.500,00	(12.500,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.487.500,00	(12.500,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	168.731.500,00	166.482.950,00	(2.248.550,00)	98,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	42.680.500,00	42.680.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.680.500,00	42.680.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.680.500,00	42.680.500,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.980.000,00	21.989.150,00	(1.990.850,00)	91,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.980.000,00	21.989.150,00	(1.990.850,00)	91,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.980.000,00	21.989.150,00	(1.990.850,00)	91,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.499.000,00	7.499.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.499.000,00	7.499.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.499.000,00	7.499.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	94.572.000,00	94.314.300,00	(257.700,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	94.572.000,00	94.314.300,00	(257.700,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.572.000,00	94.314.300,00	(257.700,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	113.598.700,00	111.826.700,00	(1.772.000,00)	98,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	51.650.000,00	49.878.000,00	(1.772.000,00)	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.650.000,00	49.878.000,00	(1.772.000,00)	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.650.000,00	49.878.000,00	(1.772.000,00)	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	11.680.000,00	11.680.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.680.000,00	11.680.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	11.680.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	45.268.700,00	45.268.700,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	45.268.700,00	45.268.700,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.268.700,00	45.268.700,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.000.000,00	44.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0001		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0002		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.161.000,00	84.161.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	81.161.000,00	81.161.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	46.161.000,00	46.161.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.161.000,00	46.161.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.161.000,00	46.161.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.02		KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.02.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.125.000,00	34.125.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.125.000,00	34.125.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0007		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	6.550.000,00	6.550.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.550.000,00	6.550.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	6.550.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0008		REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	5.045.000,00	5.045.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.045.000,00	5.045.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.045.000,00	5.045.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.530.000,00	5.530.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	5.530.000,00	5.530.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.530.000,00	5.530.000,00	-	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	75.070.585.200,00	74.607.330.047,00	(463.255.153,00)	99,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.608.550.200,00	4.301.147.186,00	(307.403.014,00)	93,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	218.396.000,00	167.438.600,00	(50.957.400,00)	76,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	73.000.000,00	22.946.000,00	(50.054.000,00)	31,43	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.000.000,00	22.946.000,00	(50.054.000,00)	31,43	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	22.946.000,00	(54.000,00)	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6.000.000,00	5.991.000,00	(9.000,00)	99,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.991.000,00	(9.000,00)	99,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.991.000,00	(9.000,00)	99,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	6.000.000,00	5.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.000.000,00	5.935.000,00	(65.000,00)	98,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.935.000,00	(65.000,00)	98,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.935.000,00	(65.000,00)	98,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.000.000,00	3.993.000,00	(7.000,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.993.000,00	(7.000,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.993.000,00	(7.000,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	33.396.000,00	33.334.600,00	(61.400,00)	99,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.396.000,00	33.334.600,00	(61.400,00)	99,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.396.000,00	33.334.600,00	(61.400,00)	99,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90.000.000,00	89.240.000,00	(760.000,00)	99,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	89.240.000,00	(760.000,00)	99,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.240.000,00	(760.000,00)	99,15	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.910.004.000,00	2.655.848.389,00	(254.155.611,00)	91,26	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.898.004.000,00	2.643.848.389,00	(254.155.611,00)	91,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.898.004.000,00	2.643.848.389,00	(254.155.611,00)	91,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.898.004.000,00	2.643.848.389,00	(254.155.611,00)	91,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	429.750.000,00	429.750.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	419.750.000,00	419.750.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	419.750.000,00	419.750.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.750.000,00	419.750.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	228.821.200,00	228.818.246,00	(2.954,00)	99,99	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.600.000,00	7.599.616,00	(384,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	7.599.616,00	(384,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.599.616,00	(384,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	32.000.000,00	31.997.630,00	(2.370,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	31.997.630,00	(2.370,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	31.997.630,00	(2.370,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.000.000,00	49.999.800,00	(200,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.999.800,00	(200,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.999.800,00	(200,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	116.221.200,00	116.221.200,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	116.221.200,00	116.221.200,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.221.200,00	116.221.200,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	587.349.000,00	585.086.570,00	(2.262.430,00)	99,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	65.199.000,00	64.936.570,00	(262.430,00)	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.199.000,00	64.936.570,00	(262.430,00)	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.199.000,00	64.936.570,00	(262.430,00)	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	522.150.000,00	520.150.000,00	(2.000.000,00)	99,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	522.150.000,00	520.150.000,00	(2.000.000,00)	99,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.150.000,00	520.150.000,00	(2.000.000,00)	99,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	182.230.000,00	182.205.381,00	(24.619,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	141.230.000,00	141.205.381,00	(24.619,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	141.230.000,00	141.205.381,00	(24.619,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.230.000,00	141.205.381,00	(24.619,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.176.200.000,00	1.174.784.887,00	(1.415.113,00)	99,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.176.200.000,00	1.174.784.887,00	(1.415.113,00)	99,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	437.695.000,00	437.586.850,00	(108.150,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	437.695.000,00	437.586.850,00	(108.150,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.695.000,00	437.586.850,00	(108.150,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	333.505.000,00	332.699.650,00	(805.350,00)	99,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	333.505.000,00	332.699.650,00	(805.350,00)	99,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.505.000,00	332.699.650,00	(805.350,00)	99,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	405.000.000,00	404.498.387,00	(501.613,00)	99,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	405.000.000,00	404.498.387,00	(501.613,00)	99,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000,00	404.498.387,00	(501.613,00)	99,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	68.175.035.000,00	68.073.884.674,00	(101.150.326,00)	99,85	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	68.175.035.000,00	68.073.884.674,00	(101.150.326,00)	99,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	67.915.035.000,00	67.814.216.374,00	(100.818.626,00)	99,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	67.915.035.000,00	67.814.216.374,00	(100.818.626,00)	99,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.186.000,00	163.367.374,00	(818.626,00)	99,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	67.750.849.000,00	67.650.849.000,00	(100.000.000,00)	99,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	260.000.000,00	259.668.300,00	(331.700,00)	99,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000,00	259.668.300,00	(331.700,00)	99,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	259.668.300,00	(331.700,00)	99,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	560.000.000,00	509.274.000,00	(50.726.000,00)	90,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	560.000.000,00	509.274.000,00	(50.726.000,00)	90,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	10.000.000,00	9.930.500,00	(69.500,00)	99,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.930.500,00	(69.500,00)	99,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.930.500,00	(69.500,00)	99,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0002		PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	19.000.000,00	18.713.000,00	(287.000,00)	98,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	18.713.000,00	(287.000,00)	98,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	18.713.000,00	(287.000,00)	98,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	390.000.000,00	339.960.500,00	(50.039.500,00)	87,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	390.000.000,00	339.960.500,00	(50.039.500,00)	87,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.960.500,00	(39.500,00)	99,80	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	370.000.000,00	320.000.000,00	(50.000.000,00)	86,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	95.000.000,00	94.690.000,00	(310.000,00)	99,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	94.690.000,00	(310.000,00)	99,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	94.690.000,00	(310.000,00)	99,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	46.000.000,00	45.980.000,00	(20.000,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	45.980.000,00	(20.000,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	45.980.000,00	(20.000,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	290.000.000,00	287.833.300,00	(2.166.700,00)	99,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	290.000.000,00	287.833.300,00	(2.166.700,00)	99,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	80.000.000,00	78.455.000,00	(1.545.000,00)	98,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	78.455.000,00	(1.545.000,00)	98,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	78.455.000,00	(1.545.000,00)	98,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	180.000.000,00	179.378.300,00	(621.700,00)	99,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	179.378.300,00	(621.700,00)	99,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	179.378.300,00	(621.700,00)	99,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	260.800.000,00	260.406.000,00	(394.000,00)	99,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	260.800.000,00	260.406.000,00	(394.000,00)	99,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	187.000.000,00	186.715.000,00	(285.000,00)	99,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	187.000.000,00	186.715.000,00	(285.000,00)	99,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.000.000,00	186.715.000,00	(285.000,00)	99,84	

https://jdih.pemalangkab.go.id

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (Berkurang)			DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1				2	3	4	5	6	7
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.800.000,00	63.691.000,00	(109.000,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	63.800.000,00	63.691.000,00	(109.000,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.800.000,00	63.691.000,00	(109.000,00)	99,82	

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.831.143.900.755,00	1.671.991.159.440,00	172.195.274.253,00	161.568.650.339,00	-	-	-	-
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.140.121.753.739,00	1.031.932.642.272,00	79.913.583.474,00	75.192.212.519,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.140.121.753.739,00	1.031.932.642.272,00	79.913.583.474,00	75.192.212.519,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	921.229.240.247,00	818.483.449.756,00	888.151.782,00	882.279.300,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	407.801.650,00	406.313.800,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	365.801.650,00	364.365.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.000.000,00	15.949.400,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	16.000.000,00	15.999.400,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	917.926.600.029,00	815.538.333.233,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	917.817.790.029,00	815.430.131.033,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.810.000,00	78.202.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	206.886.000,00	201.327.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	206.886.000,00	201.327.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.395.341.354,00	1.224.773.749,00	70.786.656,00	69.800.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.210.000,00	34.210.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	70.786.656,00	69.800.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.620.000,00	34.620.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.703.004,00	196.962.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.770.000,00	59.770.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.650.000,00	36.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.028.388.350,00	863.161.749,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	874,00	-	787.365.126,00	782.489.300,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	468.830.000,00	466.789.300,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	874,00	-	318.535.126,00	315.700.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.354.000,00	284.540.093,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.954.000,00	274.140.093,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.256.340,00	828.161.881,00	30.000.000,00	29.990.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.360.000,00	154.622.218,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.646.340,00	86.562.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	715.250.000,00	536.977.663,00	30.000.000,00	29.990.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	216.592.513.492,00	211.439.326.071,00	79.025.431.692,00	74.309.933.219,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	120.944.384.460,00	118.186.637.066,00	53.015.479.332,00	49.556.573.074,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.035.999,00	7.200.000,00	10.504.699.174,00	8.376.769.587,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	1.694.527.900,00	1.654.224.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.000.000.000,00	982.148.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	70.000.000,00	70.000.000,00	1.930.000.000,00	1.917.940.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.501.775.000,00	1.382.668.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.500.000.000,00	18.782.151.558,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	95.554.968.461,00	94.783.709.028,00	21.749.233.831,00	22.446.865.034,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	900.000.000,00	817.070.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	199.441.980,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	825.000.000,00	825.000.000,00	5.208.798.427,00	4.370.032.014,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	350.825.000,00	318.950.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	31.780.000,00	18.298.000,00	11.928.220.000,00	10.790.742.439,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.046.845.352,00	52.654.227.658,00	22.703.478.040,00	21.962.176.968,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	4.613.500.000,00	3.938.983.113,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	625.000.000,00	625.000.000,00	6.989.656.730,00	6.165.412.355,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	2.761.469.530,00	2.669.177.750,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.000.000.000,00	1.943.067.516,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	105.000.000,00	105.000.000,00	795.661.740,00	666.019.250,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	816.900.000,00	719.541.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.319.445.352,00	48.310.136.555,00	7.543.190.040,00	8.522.584.500,00	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	350.000.000,00	266.858.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	830.500.000,00	684.624.587,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.708.833.180,00	28.116.302.168,00	3.306.474.320,00	2.791.183.177,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	833.597.980,00	712.887.547,00	1.733.762.540,00	1.342.870.149,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.667.346.830,00	3.549.563.337,00	1.048.600.000,00	1.042.722.028,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	487.496.370,00	455.214.000,00	134.503.780,00	133.390.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	970.002.000,00	914.384.500,00	369.998.000,00	252.591.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2.850.000.000,00	2.655.160.784,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	19.900.390.000,00	19.829.092.000,00	19.610.000,00	19.610.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.892.450.500,00	12.482.159.179,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.647.100.000,00	6.526.040.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3.245.350.500,00	2.956.119.179,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.500.000.000,00	1.219.426.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.500.000.000,00	1.219.426.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.500.000.000,00	1.219.426.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	800.000.000,00	790.440.445,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	800.000.000,00	790.440.445,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	400.000.000,00	394.130.400,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	400.000.000,00	396.310.045,00	-	-	-	-	-	-
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	489.954.172.690,00	448.521.353.694,00	53.460.644.223,00	48.375.881.602,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	237.413.484.183,00	224.684.587.727,00	23.291.559.210,00	22.463.964.846,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.484.638.233,00	114.384.215.691,00	10.000.000,00	9.750.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.217.485.233,00	206.951.987,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.757.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	108.772.000,00	93.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.038.713.233,00	53.194.987,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.000.000,00	55.740.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	118.923.085.000,00	111.152.125.332,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	118.785.585.000,00	111.015.628.332,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000,00	49.660.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000,00	74.489.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.500.000,00	7.360.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	4.988.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.780.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	4.780.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.920.000,00	10.835.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.920.000,00	10.835.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.756.000,00	409.818.463,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.511.500,00	32.475.175,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.260.000,00	6.239.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.000.000,00	133.380.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.500.000,00	31.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.484.500,00	11.415.640,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	8.904.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.000.000,00	186.154.148,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00	9.750.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	10.000.000,00	9.750.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.536.492.000,00	2.230.111.753,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	6.326.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.783.000.000,00	1.522.589.753,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	745.992.000,00	701.196.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.900.000,00	369.593.156,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	56.303.870,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.000.000,00	131.415.758,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.990.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.500.000,00	173.523.528,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.400.000,00	3.360.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	109.015.684.450,00	107.612.587.282,00	23.281.559.210,00	22.454.214.846,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.523.237.236,00	12.965.245.544,00	22.018.657.000,00	21.226.421.706,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	251.691.672,00	238.314.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	52.275.000,00	34.044.000,00	1.819.407.000,00	1.471.121.706,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.589.168.864,00	3.519.593.544,00	1.750.000,00	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	89.698.700,00	18.515.225,00	20.197.500.000,00	19.755.300.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9.324.344.000,00	8.956.992.475,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	50.000.000,00	35.062.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	166.059.000,00	162.723.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.732.858.784,00	94.066.033.726,00	1.168.598.140,00	1.134.293.140,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	180.621.000,00	136.915.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	60.000.000,00	59.402.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	333.240.000,00	331.100.410,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	80.000.000,00	79.909.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	70.000.000,00	69.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	549.421.820,00	479.239.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	41.162.000,00	41.162.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100.000.000,00	78.064.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.665.900.580,00	1.646.041.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	150.000.000,00	145.133.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	557.057.960,00	547.117.000,00	1.044.518.140,00	1.021.993.140,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	511.516.000,00	498.005.000,00	24.080.000,00	14.300.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	255.262.000,00	183.321.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	208.451.500,00	196.206.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.530.335.000,00	8.522.886.500,00	100.000.000,00	98.000.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	55.000.000,00	53.351.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.009.279.500,00	979.462.700,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	281.105.000,00	276.652.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	75.000.000,00	71.788.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	455.190.000,00	424.891.300,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15.000.000,00	13.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	42.332.000,00	36.589.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	79.058.000,00	74.642.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.991.897.224,00	1.866.245.238,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	76.577.348.000,00	76.541.559.967,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	15.000.000,00	13.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	115.088.500,00	31.030.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	237.000.000,00	226.700.111,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	107.045.000,00	88.680.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12.540.000,00	10.539.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	14.300.000,00	14.285.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	50.046.800,00	46.834.600,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	127.210.900,00	110.812.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	149.490.000,00	145.992.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	30.960.000,00	24.425.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	255.695.930,00	213.638.698,00	94.304.070,00	93.500.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	255.695.930,00	213.638.698,00	94.304.070,00	93.500.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	503.892.500,00	367.669.314,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	5.000.000,00	4.700.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	18.470.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	54.505.000,00	42.091.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	424.387.500,00	302.408.314,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.952.297.500,00	1.745.143.678,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	87.448.128,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100.000.000,00	79.217.128,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	20.000.000,00	8.231.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	86.250.000,00	74.734.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	65.000.000,00	62.932.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.000.000,00	3.830.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16.250.000,00	7.972.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.746.047.500,00	1.582.961.050,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.746.047.500,00	1.582.961.050,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	515.631.000,00	501.246.320,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	63.730.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	63.730.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	271.387.000,00	257.087.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	271.387.000,00	257.087.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	180.514.000,00	180.429.320,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	180.514.000,00	180.429.320,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	445.233.000,00	441.394.756,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.584.500,00	55.286.256,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56.584.500,00	55.286.256,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.515.500,00	48.515.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	48.515.500,00	48.515.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	340.133.000,00	337.593.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	340.133.000,00	337.593.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		RSUD Dr. M. Ashari	151.508.849.265,00	134.579.295.761,00	26.287.908.664,00	23.157.573.756,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	151.508.849.265,00	134.579.295.761,00	26.287.908.664,00	23.157.573.756,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	4.999.922.418,00	17.101.223.726,00	16.361.610.940,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	17.101.223.726,00	16.361.610.940,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.000.000.000,00	4.999.922.418,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.508.849.265,00	129.579.373.343,00	9.186.684.938,00	6.795.962.816,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	146.508.849.265,00	129.579.373.343,00	9.186.684.938,00	6.795.962.816,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Banyumudal	4.686.935.350,00	3.944.593.348,00	203.153.650,00	129.949.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.606.460.350,00	3.901.508.348,00	203.153.650,00	129.949.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.606.460.350,00	3.901.508.348,00	203.153.650,00	129.949.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.912.000,00	15.912.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.777.000,00	6.770.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.550.000,00	40.495.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.460.000,00	4.160.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	317.394.000,00	316.067.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.220.000,00	11.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.404.000,00	11.072.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	237.301.000,00	123.322.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.854.324.350,00	3.339.657.348,00	203.153.650,00	129.949.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.720.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.460.000,00	4.225.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.300.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.466.000,00	7.666.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	50.872.000,00	20.462.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	80.475.000,00	43.085.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.475.000,00	43.085.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	80.475.000,00	43.085.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Warungpring	2.810.891.760,00	2.453.596.053,00	131.094.600,00	103.624.375,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.786.303.760,00	2.429.008.053,00	131.094.600,00	103.624.375,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.786.303.760,00	2.429.008.053,00	131.094.600,00	103.624.375,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.196.000,00	32.196.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.640.000,00	1.990.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	56.550.000,00	44.265.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	97.529.000,00	97.269.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.980.000,00	5.980.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.141.000,00	7.021.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	145.448.800,00	135.852.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.284.056.960,00	1.954.233.053,00	131.094.600,00	103.624.375,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.640.000,00	3.640.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.372.000,00	5.372.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	111.550.000,00	109.990.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.588.000,00	24.588.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.588.000,00	24.588.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.588.000,00	24.588.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Pulosari	4.405.748.024,00	3.885.470.929,00	163.906.836,00	140.483.008,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.359.208.024,00	3.843.285.929,00	163.906.836,00	140.483.008,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.359.208.024,00	3.843.285.929,00	163.906.836,00	140.483.008,00	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.880.000,00	59.880.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.375.000,00	5.375.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.965.000,00	41.210.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	145.326.500,00	145.326.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.865.000,00	6.305.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.690.000,00	15.090.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	82.225.000,00	81.380.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.834.351.524,00	3.325.189.429,00	163.906.836,00	140.483.008,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	156.510.000,00	156.510.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	46.540.000,00	42.185.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.540.000,00	42.185.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	46.540.000,00	42.185.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Belik	6.890.888.575,00	5.498.246.222,00	353.136.425,00	222.070.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.874.638.575,00	5.481.996.222,00	353.136.425,00	222.070.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.874.638.575,00	5.481.996.222,00	353.136.425,00	222.070.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.505.000,00	8.996.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.845.000,00	1.442.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.573.000,00	37.180.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	92.190.000,00	82.174.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.650.000,00	13.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31.288.000,00	20.878.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.335.000,00	90.740.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	6.462.607.575,00	5.117.651.222,00	353.136.425,00	222.070.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.800.000,00	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.900.000,00	8.270.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	89.365.000,00	87.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.250.000,00	16.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.250.000,00	16.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.250.000,00	16.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Watukumpul	3.316.228.250,00	2.937.994.064,00	99.872.750,00	94.260.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.268.728.250,00	2.905.574.064,00	99.872.750,00	94.260.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.268.728.250,00	2.905.574.064,00	99.872.750,00	94.260.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.952.000,00	56.320.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.740.000,00	15.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.520.000,00	15.795.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.160.000,00	4.160.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	237.237.000,00	235.796.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.894.000,00	11.598.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	61.010.000,00	57.370.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.730.448.250,00	2.395.725.064,00	99.872.750,00	94.260.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.160.000,00	4.160.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.950.000,00	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.137.000,00	2.080.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	98.680.000,00	97.120.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	47.500.000,00	32.420.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.500.000,00	32.420.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	47.500.000,00	32.420.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Kebandaran	3.680.861.460,00	3.461.394.602,00	38.142.540,00	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.593.601.460,00	3.374.134.602,00	38.142.540,00	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.593.601.460,00	3.374.134.602,00	38.142.540,00	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	74.500.000,00	74.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.360.000,00	6.360.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.625.000,00	40.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	267.064.000,00	184.584.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.005.000,00	34.640.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84.760.000,00	72.670.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.988.307.460,00	2.867.245.602,00	38.142.540,00	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.300.000,00	780.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.060.000,00	5.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	75.320.000,00	74.670.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	87.260.000,00	87.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.260.000,00	87.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	87.260.000,00	87.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Bantarbolang	5.510.750.518,00	5.163.556.595,00	324.940.007,00	267.836.400,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.486.947.518,00	5.139.786.595,00	324.940.007,00	267.836.400,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.486.947.518,00	5.139.786.595,00	324.940.007,00	267.836.400,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.052.000,00	41.052.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.978.000,00	5.978.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.120.000,00	16.120.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.630.000,00	6.630.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.420.000,00	4.420.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	438.096.000,00	438.069.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.680.000,00	17.680.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.871.000,00	25.798.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.621.000,00	69.291.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.782.537.518,00	4.453.806.095,00	324.940.007,00	267.836.400,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.210.000,00	2.210.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.420.000,00	4.420.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.210.000,00	2.210.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.420.000,00	4.420.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	47.682.000,00	47.682.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.803.000,00	23.770.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.803.000,00	23.770.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.803.000,00	23.770.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Randudongkal	3.810.076.780,00	3.588.786.433,00	118.316.029,00	111.742.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.773.718.780,00	3.552.446.433,00	118.316.029,00	111.742.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.773.718.780,00	3.552.446.433,00	118.316.029,00	111.742.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.600.000,00	48.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.480.000,00	10.155.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75.010.000,00	73.775.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.600.000,00	2.015.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	102.205.000,00	101.921.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.490.000,00	18.930.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	141.675.000,00	134.375.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.250.464.780,00	3.042.325.433,00	118.316.029,00	111.742.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.600.000,00	1.495.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.904.000,00	19.880.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	87.600.000,00	87.535.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.358.000,00	36.340.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.358.000,00	36.340.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36.358.000,00	36.340.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Kalimas	3.001.618.281,00	2.659.649.027,00	43.095.160,00	38.320.160,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.941.558.281,00	2.599.589.027,00	43.095.160,00	38.320.160,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.941.558.281,00	2.599.589.027,00	43.095.160,00	38.320.160,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.300.000,00	30.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.078.000,00	1.908.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.115.000,00	11.115.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.400.000,00	22.360.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	137.388.000,00	133.813.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.280.000,00	20.280.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.018.000,00	7.758.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.405.000,00	90.610.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.537.859.281,00	2.221.960.027,00	43.095.160,00	38.320.160,00	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.755.000,00	1.755.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15.600.000,00	11.570.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	44.800.000,00	44.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60.060.000,00	60.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.060.000,00	60.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	60.060.000,00	60.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Paduraksa	3.911.919.345,00	3.491.138.681,00	162.133.655,00	128.625.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.849.194.345,00	3.429.583.681,00	162.133.655,00	128.625.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.849.194.345,00	3.429.583.681,00	162.133.655,00	128.625.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.100.000,00	26.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.950.000,00	9.950.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.590.000,00	43.940.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	84.627.000,00	83.954.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.300.000,00	14.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.180.000,00	32.175.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	176.872.000,00	172.397.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.298.615.345,00	2.890.457.681,00	162.133.655,00	128.625.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.200.000,00	4.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	127.320.000,00	127.320.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	62.725.000,00	61.555.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.725.000,00	61.555.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	62.725.000,00	61.555.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Mulyoharjo	4.212.910.032,00	3.718.084.029,00	55.124.968,00	27.550.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.172.296.032,00	3.677.484.029,00	55.124.968,00	27.550.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.172.296.032,00	3.677.484.029,00	55.124.968,00	27.550.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.606.000,00	39.606.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.861.000,00	7.861.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.220.000,00	35.945.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.700.000,00	10.660.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.600.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.773.500,00	119.773.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.300.000,00	14.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	85.762.000,00	82.642.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	109.445.000,00	90.586.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.587.988.532,00	3.119.770.529,00	55.124.968,00	27.550.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.808.000,00	8.808.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11.245.000,00	11.245.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	52.356.000,00	52.356.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	77.431.000,00	77.431.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	40.614.000,00	40.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.614.000,00	40.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.614.000,00	40.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Kebondalem	4.121.698.814,00	3.462.843.084,00	204.195.186,00	150.970.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.098.669.814,00	3.439.814.084,00	204.195.186,00	150.970.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.098.669.814,00	3.439.814.084,00	204.195.186,00	150.970.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.220.000,00	38.100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.155.000,00	2.855.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.350.000,00	21.515.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	133.403.000,00	130.135.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.110.000,00	18.590.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.250.000,00	22.275.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	85.686.000,00	68.725.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.615.625.814,00	2.991.724.084,00	204.195.186,00	150.970.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.680.000,00	4.680.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.240.000,00	5.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	120.680.000,00	120.095.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.029.000,00	23.029.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.029.000,00	23.029.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.029.000,00	23.029.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Banjardawa	3.691.759.828,00	3.353.577.556,00	108.035.122,00	78.571.962,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.615.449.828,00	3.278.242.556,00	108.035.122,00	78.571.962,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.615.449.828,00	3.278.242.556,00	108.035.122,00	78.571.962,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.725.000,00	20.725.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.015.000,00	38.025.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.825.000,00	6.825.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.225.000,00	1.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	110.914.000,00	110.914.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.205.000,00	10.140.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.112.000,00	12.722.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	114.332.000,00	75.747.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.185.507.828,00	2.907.054.056,00	108.035.122,00	78.571.962,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.054.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.005.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.315.000,00	3.315.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	79.315.000,00	79.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	76.310.000,00	75.335.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.310.000,00	75.335.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	76.310.000,00	75.335.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Kabunan	3.251.797.278,00	2.761.829.683,00	121.203.722,00	82.795.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.195.572.278,00	2.726.079.683,00	121.203.722,00	82.795.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.195.572.278,00	2.726.079.683,00	121.203.722,00	82.795.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.250.000,00	37.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.550.000,00	13.445.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.800.000,00	4.290.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36.817.500,00	32.762.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.540.000,00	10.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.565.000,00	9.875.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.985.000,00	70.415.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.889.110.778,00	2.454.387.683,00	121.203.722,00	82.795.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.734.000,00	3.155.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.300.000,00	1.040.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.060.000,00	14.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	68.110.000,00	67.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	56.225.000,00	35.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.225.000,00	35.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	56.225.000,00	35.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Puskesmas Jebed	4.006.250.660,00	3.388.256.016,00	188.032.840,00	166.610.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.989.205.660,00	3.371.211.016,00	188.032.840,00	166.610.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.989.205.660,00	3.371.211.016,00	188.032.840,00	166.610.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.660.000,00	66.660.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.920.000,00	47.320.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.630.000,00	4.160.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111.632.500,00	109.408.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.610.000,00	8.580.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.516.000,00	8.836.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	244.400.000,00	225.614.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.231.432.160,00	2.644.718.016,00	188.032.840,00	166.610.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.860.000,00	2.860.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.145.000,00	5.655.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.430.000,00	1.430.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	103.960.000,00	103.960.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	142.010.000,00	142.010.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.045.000,00	17.045.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.045.000,00	17.045.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.045.000,00	17.045.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas Petarukan	4.975.182.240,00	4.575.403.759,00	67.098.000,00	5.730.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.945.362.240,00	4.555.333.759,00	67.098.000,00	5.730.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.945.362.240,00	4.555.333.759,00	67.098.000,00	5.730.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.800.000,00	25.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.295.000,00	34.310.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00	7.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	242.970.000,00	241.660.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.130.000,00	9.425.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.525.000,00	1.170.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.160.000,00	83.870.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.404.242.240,00	4.045.033.759,00	67.098.000,00	5.730.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18.880.000,00	9.830.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	16.900.000,00	13.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.950.000,00	1.105.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	77.450.000,00	77.060.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	29.820.000,00	20.070.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.820.000,00	20.070.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	29.820.000,00	20.070.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Klareyan	4.705.968.400,00	3.681.527.239,00	298.657.600,00	140.619.566,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.656.971.400,00	3.681.527.239,00	298.657.600,00	140.619.566,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.656.971.400,00	3.681.527.239,00	298.657.600,00	140.619.566,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.700.000,00	12.220.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.545.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.917.000,00	36.912.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.930.000,00	6.435.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	93.415.000,00	88.438.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.630.000,00	14.430.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.810.000,00	11.156.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78.860.000,00	78.470.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.288.554.400,00	3.383.871.239,00	298.657.600,00	140.619.566,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.810.000,00	4.810.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	17.160.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.340.000,00	2.275.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	46.000.000,00	34.710.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	48.997.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.997.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48.997.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		Puskesmas Losari	5.808.884.002,00	5.299.088.730,00	249.590.998,00	63.455.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.750.644.002,00	5.246.048.730,00	249.590.998,00	63.455.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.750.644.002,00	5.246.048.730,00	249.590.998,00	63.455.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.680.000,00	75.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.928.000,00	10.928.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	55.250.000,00	42.640.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.600.000,00	13.650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	15.600.000,00	2.145.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	254.073.500,00	252.843.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	43.680.000,00	30.680.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	41.244.000,00	36.101.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	146.802.000,00	126.084.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.892.136.502,00	4.515.537.230,00	249.590.998,00	63.455.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12.480.000,00	11.895.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	12.480.000,00	11.115.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.170.000,00	585.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	169.360.000,00	116.295.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	58.240.000,00	53.040.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.240.000,00	53.040.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	58.240.000,00	53.040.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		Puskesmas Purwoharjo	5.244.421.600,00	4.594.832.526,00	254.382.400,00	218.570.340,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.192.811.600,00	4.547.872.526,00	254.382.400,00	218.570.340,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.192.811.600,00	4.547.872.526,00	254.382.400,00	218.570.340,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	108.612.000,00	108.612.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	975.000,00	390.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	263.850.000,00	263.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.290.000,00	17.290.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.756.000,00	13.115.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	118.190.000,00	97.322.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.467.040.600,00	3.878.765.526,00	254.382.400,00	218.570.340,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	43.020.000,00	11.960.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.800.000,00	4.810.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	650.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	108.978.000,00	108.978.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	51.610.000,00	46.960.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.610.000,00	46.960.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	51.610.000,00	46.960.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022		Puskesmas Sarwodadi	2.684.332.618,00	2.562.256.727,00	148.676.382,00	129.917.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.653.652.618,00	2.531.576.727,00	148.676.382,00	129.917.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.653.652.618,00	2.531.576.727,00	148.676.382,00	129.917.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.712.000,00	45.712.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.660.000,00	10.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.485.000,00	38.155.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.300.000,00	14.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	520.000,00	520.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	137.425.000,00	137.035.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.510.000,00	20.730.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	144.728.000,00	133.013.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.096.116.618,00	1.993.315.727,00	148.676.382,00	129.917.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.460.000,00	5.460.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.640.000,00	12.640.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	100.726.000,00	100.726.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	30.680.000,00	30.680.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.680.000,00	30.680.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30.680.000,00	30.680.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023		Puskesmas Rowosari	2.816.590.800,00	2.547.713.450,00	39.349.200,00	18.784.850,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.789.272.800,00	2.520.413.450,00	39.349.200,00	18.784.850,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.789.272.800,00	2.520.413.450,00	39.349.200,00	18.784.850,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.846.000,00	27.846.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.860.000,00	20.210.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.285.000,00	24.895.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.110.000,00	6.110.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	71.532.000,00	69.982.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.920.000,00	10.920.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.605.000,00	12.915.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.680.000,00	117.910.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.402.819.800,00	2.144.350.450,00	39.349.200,00	18.784.850,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.080.000,00	1.170.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	325.000,00	260.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	31.165.000,00	30.450.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	53.395.000,00	53.395.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.318.000,00	27.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.318.000,00	27.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27.318.000,00	27.300.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024		Puskesmas Mojo	4.169.128.529,00	3.822.719.915,00	116.930.022,00	112.033.840,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.136.433.529,00	3.794.024.915,00	116.930.022,00	112.033.840,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.136.433.529,00	3.794.024.915,00	116.930.022,00	112.033.840,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.711.000,00	62.711.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.026.000,00	4.151.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	70.265.000,00	60.710.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.290.000,00	3.115.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	433.900.000,00	271.733.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.090.000,00	12.090.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.390.000,00	17.870.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	270.910.000,00	255.630.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.071.066.529,00	2.931.904.115,00	116.930.022,00	112.033.840,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	23.400.000,00	15.665.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.680.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	48.345.000,00	47.890.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	107.760.000,00	107.305.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32.695.000,00	28.695.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.695.000,00	28.695.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32.695.000,00	28.695.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025		Puskesmas Cikadu	2.866.835.825,00	2.511.676.884,00	165.629.175,00	127.783.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.799.114.825,00	2.444.485.884,00	165.629.175,00	127.783.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.799.114.825,00	2.444.485.884,00	165.629.175,00	127.783.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.640.000,00	46.935.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.995.000,00	9.540.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.840.000,00	15.860.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.460.000,00	2.730.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.730.000,00	1.820.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	259.532.000,00	258.622.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.800.000,00	4.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.500.000,00	16.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78.109.000,00	57.258.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.267.330.825,00	1.968.402.884,00	165.629.175,00	127.783.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	910.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.460.000,00	3.640.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.730.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.062.000,00	13.062.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	51.016.000,00	45.166.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	67.721.000,00	67.191.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.721.000,00	67.191.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0025	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	67.721.000,00	67.191.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026		Puskesmas Jatiroyom	2.657.217.283,00	2.452.819.532,00	137.862.372,00	122.922.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.595.262.283,00	2.390.864.532,00	137.862.372,00	122.922.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.595.262.283,00	2.390.864.532,00	137.862.372,00	122.922.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.248.000,00	52.248.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.165.000,00	3.385.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.880.000,00	22.880.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.825.000,00	5.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.730.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	227.537.000,00	226.735.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.290.000,00	17.290.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.815.000,00	12.165.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80.579.000,00	72.680.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.085.402.283,00	1.902.687.532,00	137.862.372,00	122.922.500,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.750.000,00	5.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.820.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.260.000,00	3.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	66.661.000,00	64.534.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	61.955.000,00	61.955.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.955.000,00	61.955.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0026	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	61.955.000,00	61.955.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027		Puskesmas Karangasem	3.312.889.290,00	3.034.737.659,00	78.616.710,00	61.118.999,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.193.191.290,00	2.929.599.659,00	78.616.710,00	61.118.999,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.193.191.290,00	2.929.599.659,00	78.616.710,00	61.118.999,00	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.464.000,00	46.464.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.694.000,00	18.164.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.860.000,00	28.860.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.810.000,00	4.680.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.820.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	253.999.500,00	253.999.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.870.000,00	13.065.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.459.500,00	4.757.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.628.000,00	116.478.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.531.205.290,00	2.308.661.159,00	78.616.710,00	61.118.999,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.275.000,00	1.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.160.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	910.000,00	910.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.140.000,00	7.140.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	120.896.000,00	120.896.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	119.698.000,00	105.138.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.698.000,00	105.138.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0027	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	119.698.000,00	105.138.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028		Laboratorium Kesehatan Daerah	480.053.700,00	405.677.463,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	480.053.700,00	405.677.463,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	480.053.700,00	405.677.463,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0028	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	480.053.700,00	405.677.463,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.946.901.158,00	109.765.534.987,00	33.177.191.106,00	33.111.145.036,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.946.901.158,00	109.765.534.987,00	33.177.191.106,00	33.111.145.036,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.972.710.700,00	19.552.590.241,00	260.447.300,00	244.077.500,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.765.000,00	128.950.645,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.765.000,00	128.950.645,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.383.259.000,00	14.652.970.660,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.383.259.000,00	14.652.970.660,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.950.000,00	260.433.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	199.950.000,00	161.265.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	99.168.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.300.000,00	477.575.456,00	135.399.000,00	134.925.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.980.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.070.000,00	43.628.000,00	135.399.000,00	134.925.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.630.000,00	85.375.440,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000,00	74.951.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000,00	12.410.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.100.000,00	241.230.516,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	125.048.300,00	109.152.500,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	109.567.800,00	93.752.500,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	15.480.500,00	15.400.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.467.416.700,00	2.861.616.060,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.000.000,00	618.296.799,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.701.700,00	121.326.510,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.545.715.000,00	2.121.992.751,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.204.020.000,00	1.171.044.420,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	299.847.478,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	250.000.000,00	249.569.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	199.966.600,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	454.020.000,00	421.660.842,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.590.066.000,00	17.642.536.484,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.264.618.350,00	4.238.334.080,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	393.775.000,00	389.929.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.190.910.350,00	2.183.404.657,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai	400.000.000,00	398.561.455,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.179.933.000,00	1.166.778.545,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	100.000.000,00	99.659.923,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.325.447.650,00	13.404.202.404,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	13.156.255.800,00	12.339.052.800,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	460.000.000,00	408.242.181,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	709.191.850,00	656.907.423,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.349.067.000,00	12.028.156.433,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	13.349.067.000,00	12.028.156.433,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	167.500.000,00	153.743.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	13.181.567.000,00	11.874.412.933,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.752.500.000,00	1.441.798.458,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.752.500.000,00	1.441.798.458,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.250.000.000,00	1.122.132.700,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	300.000.000,00	162.179.108,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	202.500.000,00	157.486.650,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.082.959.264,00	6.852.436.382,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.082.959.264,00	6.852.436.382,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	6.782.959.264,00	6.705.231.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	300.000.000,00	147.205.382,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	732.500.000,00	712.348.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	732.500.000,00	712.348.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	732.500.000,00	712.348.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.401.000.000,00	3.305.745.727,00	370.000.000,00	369.039.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.401.000.000,00	3.305.745.727,00	370.000.000,00	369.039.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.919.000.000,00	2.859.504.900,00	370.000.000,00	369.039.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	482.000.000,00	446.240.827,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	33.000.000,00	31.999.850,00	320.000.000,00	318.029.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000,00	31.999.850,00	320.000.000,00	318.029.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	33.000.000,00	31.999.850,00	320.000.000,00	318.029.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	48.099.578.194,00	47.271.944.857,00	32.226.743.806,00	32.179.999.536,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	48.099.578.194,00	47.271.944.857,00	32.226.743.806,00	32.179.999.536,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.567.972.000,00	2.505.206.880,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	930.404.000,00	834.862.996,00	25.629.495.400,00	25.616.206.661,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	89.999.700,00	53.691.500,00	1.006.155.000,00	994.030.500,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	160.000.000,00	102.893.000,00	5.267.087.500,00	5.264.532.729,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.202.789.510,00	2.083.786.857,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	56.026.000,00	18.454.500,00	200.000.000,00	199.382.646,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	813.261.000,00	757.046.200,00	15.000.000,00	13.725.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	41.279.125.984,00	40.916.002.924,00	109.005.906,00	92.122.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000,00	97.670.450,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	20.000.000,00	18.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	20.000.000,00	18.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.470.450,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.470.450,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	833.520.000,00	828.307.605,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	30.000.000,00	28.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	733.520.000,00	730.924.605,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	383.520.000,00	382.460.272,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	350.000.000,00	348.464.333,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	68.758.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	70.000.000,00	68.758.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	41.457.063.000,00	40.236.815.454,00	3.819.240.000,00	3.417.577.832,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.457.063.000,00	40.236.815.454,00	3.819.240.000,00	3.417.577.832,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.754.583.000,00	24.566.715.294,00	13.320.000,00	13.320.000,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.787.000,00	134.825.983,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.787.000,00	22.847.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000,00	5.960.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	4.956.033,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.000.000,00	5.913.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.000.000,00	30.808.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	59.391.450,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.695.586.000,00	4.615.722.946,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.681.786.000,00	4.602.138.446,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	5.985.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.799.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.150.000,00	1.149.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.150.000,00	1.149.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000,00	399.500.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	399.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.560.000,00	233.695.110,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.991.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	28.993.390,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	24.990.320,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.500.000,00	18.488.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	29.973.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.060.000,00	128.258.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	13.320.000,00	13.320.000,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	13.320.000,00	13.320.000,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.081.000.000,00	18.977.966.606,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.851.000.000,00	17.811.024.885,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.230.000.000,00	1.166.941.721,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.500.000,00	201.955.149,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000,00	57.474.149,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	39.981.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.500.000,00	54.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	315.000.000,00	308.242.456,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000,00	7.679.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000,00	7.679.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	75.000.000,00	73.957.356,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	35.000.000,00	34.664.495,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	40.000.000,00	39.292.861,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.503.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000,00	99.503.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	80.000.000,00	77.685.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	45.000.000,00	43.717.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	35.000.000,00	33.967.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50.000.000,00	49.417.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000,00	49.417.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.812.480.000,00	5.807.560.771,00	3.805.920.000,00	3.404.257.832,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	25.000.000,00	24.920.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	25.000.000,00	24.920.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.787.480.000,00	5.782.639.871,00	3.805.920.000,00	3.404.257.832,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.787.480.000,00	5.782.639.871,00	3.805.920.000,00	3.404.257.832,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.370.000.000,00	2.369.066.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.370.000.000,00	2.369.066.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.370.000.000,00	2.369.066.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.170.000.000,00	7.150.551.533,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.170.000.000,00	7.150.551.533,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7.145.000.000,00	7.125.700.934,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10.000.000,00	9.913.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	15.000.000,00	14.937.599,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35.000.000,00	34.679.400,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	35.000.000,00	34.679.400,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	35.000.000,00	34.679.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.796.782.550,00	21.418.480.955,00	143.290.450,00	142.904.350,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	14.486.289.450,00	13.846.885.209,00	36.254.950,00	36.254.950,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.592.779.950,00	10.980.403.375,00	24.770.450,00	24.770.450,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.500.000,00	31.242.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.797.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000,00	7.740.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	4.705.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.100.270.000,00	7.568.152.017,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.089.745.000,00	7.557.925.017,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000,00	3.475.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000,00	5.760.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.025.000,00	992.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.440.000,00	200.988.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	102.440.000,00	100.988.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.509.950,00	267.918.860,00	24.770.450,00	24.770.450,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.169.550,00	11.135.080,00	24.770.450,00	24.770.450,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.840.400,00	26.932.930,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.500.000,00	25.669.750,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000,00	4.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.000.000,00	191.931.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.700.060.000,00	2.647.202.698,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.060.000,00	138.079.330,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	1.958.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.545.500.000,00	2.505.664.868,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.000.000,00	264.899.300,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.500.000,00	144.399.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	2.999.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.842.494.000,00	1.841.576.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.189.660.000,00	1.189.542.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	588.160.000,00	588.109.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	10.000.000,00	9.933.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	644.334.000,00	643.534.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	444.334.000,00	443.579.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	70.000.000,00	69.954.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.051.015.500,00	1.024.904.934,00	11.484.500,00	11.484.500,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.500.000,00	55.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	995.515.500,00	969.404.934,00	11.484.500,00	11.484.500,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	988.515.500,00	962.409.934,00	11.484.500,00	11.484.500,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	5.000.000,00	4.995.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.310.493.100,00	7.571.595.746,00	107.035.500,00	106.649.400,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.851.400.600,00	5.148.401.257,00	64.828.000,00	64.812.900,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.957.600,00	111.423.165,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.127.600,00	107.779.165,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.830.000,00	3.644.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.189.051.000,00	3.514.325.211,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.184.001.000,00	3.509.425.211,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.615.000,00	3.465.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.435.000,00	1.435.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.670.000,00	343.256.642,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.030.000,00	56.791.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.330.000,00	3.181.610,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.620.000,00	64.915.840,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.830.000,00	25.798.692,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.860.000,00	192.569.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.000,00	-	64.828.000,00	64.812.900,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	172.000,00	-	64.828.000,00	64.812.900,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.660.000,00	523.620.052,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.660.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	125.201.103,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.738.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000,00	387.680.949,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.890.000,00	655.776.187,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.160.000,00	151.087.506,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.230.000,00	277.195.551,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	228.500.000,00	227.493.130,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.459.092.500,00	2.423.194.489,00	42.207.500,00	41.836.500,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	232.950.000,00	222.112.066,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	162.900.000,00	157.437.656,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	70.050.000,00	64.674.410,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	556.492.500,00	554.375.592,00	33.507.500,00	33.136.500,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.000.000,00	23.602.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	7.850.000,00	7.697.500,00	30.650.000,00	30.279.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	523.642.500,00	523.075.592,00	2.857.500,00	2.857.500,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.507.150.000,00	1.488.602.540,00	8.700.000,00	8.700.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.148.294.500,00	1.132.021.840,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	358.855.500,00	356.580.700,00	8.700.000,00	8.700.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	162.500.000,00	158.104.291,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	96.526.000,00	92.810.990,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	65.974.000,00	65.293.301,00	-	-	-	-	-	-
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.867.227.618,00	20.116.332.078,00	1.681.325.000,00	1.328.929.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.867.227.618,00	20.116.332.078,00	1.681.325.000,00	1.328.929.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.485.279.018,00	6.162.555.164,00	1.681.325.000,00	1.328.929.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.000.000,00	200.980.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.000.000,00	86.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.980.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.951.196.000,00	4.680.979.826,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.872.786.000,00	4.602.685.826,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.650.000,00	24.650.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.760.000,00	13.735.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.000.000,00	39.909.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.643.000,00	115.641.110,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.672.500,00	7.668.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.087.000,00	10.083.095,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.900.000,00	16.875.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.158.500,00	11.119.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	2.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.825.000,00	66.994.915,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.325.000,00	6.325.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	6.325.000,00	6.325.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.624.018,00	710.253.576,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.022.018,00	25.963.850,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.100.000,00	100.809.897,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.308.000,00	10.253.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.194.000,00	573.226.829,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.816.000,00	364.700.652,00	1.675.000.000,00	1.322.604.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.095.000,00	74.996.838,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	323.721.000,00	289.703.814,00	1.675.000.000,00	1.322.604.000,00	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	642.085.000,00	641.772.648,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	642.085.000,00	641.772.648,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.661.000,00	4.661.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	221.559.000,00	221.311.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	405.880.000,00	405.825.648,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7.569.000,00	7.559.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2.416.000,00	2.416.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.633.270.000,00	9.208.878.766,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.684.382.000,00	5.293.513.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	54.270.000,00	54.270.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	6.040.000,00	6.040.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	103.659.800,00	103.659.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.221.200,00	8.724.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	615.550.000,00	566.227.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.978.700.000,00	3.938.136.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	884.000.000,00	584.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	6.034.800,00	5.994.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	17.906.200,00	16.661.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	3.948.888.000,00	3.915.365.766,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	351.640.000,00	350.565.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	2.219.020.000,00	2.217.611.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.292.590.000,00	1.261.802.808,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	85.638.000,00	85.386.958,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.033.771.600,00	4.030.315.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	8.398.900,00	8.213.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	4.984.400,00	4.799.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	2.414.500,00	2.414.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.025.372.700,00	4.022.102.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	59.956.800,00	59.447.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60.528.800,00	60.365.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.902.793.600,00	3.900.196.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.093.500,00	2.093.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	38.907.000,00	38.895.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	13.810.000,00	13.810.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	2.950.000,00	2.950.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	7.260.000,00	7.260.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	25.097.000,00	25.085.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	6.691.900,00	6.691.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	18.405.100,00	18.393.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	33.915.000,00	33.915.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	33.915.000,00	33.915.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.668.000,00	6.668.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7.327.000,00	7.327.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	19.920.000,00	19.920.000,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	153.554.165.724,00	145.016.292.559,00	12.949.906.814,00	12.429.526.512,00	-	-	-	-
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.706.829.230,00	8.938.368.791,00	1.601.645.120,00	1.554.261.220,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Tenaga Kerja	9.706.829.230,00	8.938.368.791,00	1.601.645.120,00	1.554.261.220,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.703.081.150,00	4.991.071.452,00	106.755.200,00	101.330.000,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.356.000,00	128.879.887,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.786.000,00	114.343.887,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.510.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.020.000,00	3.020.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.040.000,00	3.016.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.360.360.000,00	3.678.878.076,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.333.039.000,00	3.651.557.076,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.106.000,00	2.106.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.215.000,00	25.215.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.994.000,00	34.993.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34.994.000,00	34.993.900,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.681.150,00	360.777.340,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.000,00	9.992.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.626.400,00	12.618.030,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.518.500,00	114.515.750,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.400.000,00	22.960.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.644.250,00	193.191.560,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	106.755.200,00	101.330.000,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	101.755.200,00	96.330.000,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.736.000,00	541.101.936,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.110.000,00	176.293.363,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.626.000,00	364.808.573,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.954.000,00	246.440.313,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.005.000,00	111.520.615,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.274.000,00	35.244.848,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.675.000,00	99.674.850,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.447.130.080,00	2.429.947.426,00	1.494.889.920,00	1.452.931.220,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.392.630.080,00	2.380.919.861,00	1.494.889.920,00	1.452.931.220,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.287.520.000,00	2.277.147.911,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	105.110.080,00	103.771.950,00	1.494.889.920,00	1.452.931.220,00	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000,00	45.127.565,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000,00	45.127.565,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	4.500.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	4.500.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.010.100.000,00	985.002.920,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	681.000.000,00	675.825.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	82.000.000,00	81.563.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	599.000.000,00	594.262.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	200.100.000,00	189.192.720,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	200.100.000,00	189.192.720,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	129.000.000,00	119.985.200,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	129.000.000,00	119.985.200,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	546.518.000,00	532.346.993,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.000.000,00	44.802.783,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	46.000.000,00	44.802.783,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	500.518.000,00	487.544.210,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	22.985.282,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	10.000.000,00	9.980.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	77.500.000,00	74.305.500,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	388.018.000,00	380.273.428,00	-	-	-	-	-	-
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.335.500.000,00	2.156.264.058,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.335.500.000,00	2.156.264.058,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	955.000.000,00	839.977.883,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	24.020.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	7.000.000,00	6.990.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	7.000.000,00	2.230.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	7.000.000,00	6.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	7.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	5.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	255.000.000,00	244.024.883,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5.000.000,00	4.490.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	250.000.000,00	239.534.883,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	650.000.000,00	571.933.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	163.824.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	177.024.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	231.085.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	367.500.000,00	335.164.495,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	305.000.000,00	284.322.005,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	284.322.005,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	37.500.000,00	31.277.450,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	4.360.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	26.917.450,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	19.565.040,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.115.040,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	440.500.000,00	436.557.108,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.500.000,00	226.426.108,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.621.500,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	123.304.608,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	205.000.000,00	203.131.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	124.611.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	73.520.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	14.500.000,00	14.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.500.000,00	14.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	7.000.000,00	6.950.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	405.500.000,00	383.536.480,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	382.500.000,00	360.536.480,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	275.000.000,00	253.286.480,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	107.500.000,00	107.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	152.500.000,00	146.578.092,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.500.000,00	108.108.092,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	7.500.000,00	7.420.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	100.000.000,00	95.688.092,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	10.470.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.010.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	7.000.000,00	6.460.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	567.000.000,00	559.093.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	567.000.000,00	559.093.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	459.050.000,00	451.143.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	102.500.000,00	102.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	272.000.000,00	264.093.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	272.000.000,00	264.093.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	84.550.000,00	84.550.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	84.550.000,00	84.550.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	72.500.000,00	72.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	30.450.000,00	30.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	30.450.000,00	30.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.639.000,00	2.639.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	3.27.2.09.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	27.811.000,00	27.811.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	260.000.000,00	230.405.520,00	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	260.000.000,00	230.405.520,00	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	30.000.000,00	28.844.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.844.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.844.000,00	-	-	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	230.000.000,00	201.561.520,00	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	230.000.000,00	201.561.520,00	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	230.000.000,00	201.561.520,00	2.300.000.000,00	2.199.576.000,00	-	-	-	-
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.263.298.850,00	26.711.419.597,00	765.284.150,00	649.978.736,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	28.263.298.850,00	26.711.419.597,00	765.284.150,00	649.978.736,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.227.418.000,00	18.364.751.721,00	140.338.100,00	139.775.736,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000,00	17.683.640,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.741.640,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	5.942.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.459.636.000,00	13.765.849.212,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.443.636.000,00	13.750.417.892,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	5.690.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.953.320,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	4.788.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	416.562.500,00	402.036.327,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	308.858.500,00	306.045.159,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	107.704.000,00	95.991.168,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.829.400,00	399.425.293,00	2.225.000,00	2.065.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.100.000,00	3.085.058,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.650.000,00	34.643.772,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.599.800,00	1.415.600,00	2.225.000,00	2.065.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.439.100,00	131.949.470,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.962.500,00	13.954.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.860.000,00	16.212.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.218.000,00	198.164.893,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.813.000,00	3.680.000,00	138.113.100,00	137.710.736,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.813.000,00	3.680.000,00	22.617.350,00	22.617.350,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	115.495.750,00	115.093.386,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.732.063.000,00	3.589.815.315,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.140.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.560.000,00	187.594.474,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.531.363.000,00	3.397.720.841,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.514.100,00	186.261.934,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.338.000,00	79.742.576,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.200.000,00	6.199.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.378.100,00	89.006.006,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.598.000,00	11.314.352,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	310.000.000,00	160.115.035,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	150.000.000,00	144.261.727,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	150.000.000,00	144.261.727,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	160.000.000,00	15.853.308,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	160.000.000,00	15.853.308,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	618.185.950,00	601.700.695,00	71.814.050,00	70.629.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	618.185.950,00	601.700.695,00	71.814.050,00	70.629.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	256.000.000,00	252.491.260,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100.000.000,00	98.166.050,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	262.185.950,00	251.043.385,00	71.814.050,00	70.629.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	30.000.000,00	26.897.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	30.000.000,00	26.897.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000,00	26.897.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.000.000,00	9.171.920,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	10.000.000,00	9.171.920,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	10.000.000,00	9.171.920,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	150.000.000,00	136.727.725,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	136.727.725,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000,00	136.727.725,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	700.000.000,00	647.978.082,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	647.978.082,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	150.000.000,00	147.796.437,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	200.000.000,00	184.468.697,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	350.000.000,00	315.712.948,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.000.000,00	22.469.772,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	22.469.772,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.000.000,00	22.469.772,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15.000.000,00	6.001.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	15.000.000,00	6.001.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000,00	6.001.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.167.694.900,00	6.735.605.747,00	553.132.000,00	439.574.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	7.167.694.900,00	6.735.605.747,00	553.132.000,00	439.574.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	240.000.000,00	231.615.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	832.968.000,00	754.366.674,00	314.032.000,00	213.558.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	50.000.000,00	49.158.922,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	6.019.726.900,00	5.676.061.261,00	239.100.000,00	226.016.000,00	-	-	-	-
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	25.000.000,00	24.403.390,00	-	-	-	-	-	-
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.073.814.800,00	7.731.737.267,00	11.730.000,00	9.960.000,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.073.814.800,00	7.731.737.267,00	11.730.000,00	9.960.000,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.548.127.800,00	6.347.104.044,00	11.730.000,00	9.960.000,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.998.000,00	9.980.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.748.000,00	2.730.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.508.974.000,00	4.341.167.448,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.507.322.000,00	4.339.515.448,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.052.000,00	1.052.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.694.000,00	21.540.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.694.000,00	21.540.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.098.000,00	509.957.920,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.096.000,00	8.085.200,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.570.000,00	2.246.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	363.472.000,00	360.860.470,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.190.000,00	8.887.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.120.000,00	6.065.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.650.000,00	123.813.750,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	11.730.000,00	9.960.000,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	11.730.000,00	9.960.000,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.246.016.000,00	1.222.635.762,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.190.000,00	245.789.443,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	974.826.000,00	972.446.319,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.347.800,00	241.822.914,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.889.800,00	64.019.914,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.546.000,00	50.523.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.660.000,00	120.059.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.752.000,00	4.720.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	862.978.000,00	753.697.600,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	689.878.000,00	597.549.600,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	10.375.000,00	10.084.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	644.129.000,00	552.972.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	35.374.000,00	34.493.100,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	163.100.000,00	146.148.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	163.100.000,00	146.148.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	142.658.000,00	138.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	142.658.000,00	138.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	30.709.000,00	29.628.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	111.949.000,00	109.172.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	471.801.000,00	445.828.623,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	43.448.000,00	33.677.250,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	27.520.000,00	23.635.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15.928.000,00	10.041.750,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.500.000,00	5.510.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.500.000,00	5.510.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	420.853.000,00	406.641.373,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.350.000,00	14.917.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	332.777.000,00	320.981.873,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65.226.000,00	63.542.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	7.500.000,00	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	48.250.000,00	46.307.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	48.250.000,00	46.307.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	42.500.000,00	40.807.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	5.750.000,00	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.747.255.500,00	10.877.308.919,00	29.025.000,00	28.800.000,00	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11.747.255.500,00	10.877.308.919,00	29.025.000,00	28.800.000,00	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.526.508.200,00	4.778.015.211,00	29.025.000,00	28.800.000,00	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.575.000,00	18.326.408,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.336.000,00	2.334.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.754.500,00	1.746.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.623.000,00	1.623.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.605.000,00	1.566.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.628.500,00	3.628.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.878.000,00	4.679.408,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.674.297.000,00	3.944.718.166,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.665.291.000,00	3.935.797.166,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.500.000,00	2.460.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.506.000,00	3.486.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	2.975.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.782.000,00	1.777.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.302.000,00	1.297.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.997.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	5.997.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.826.700,00	298.394.818,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.342.500,00	4.342.500,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.866.500,00	15.274.600,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.043.700,00	60.017.530,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.268.000,00	10.268.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.500.000,00	6.550.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.306.000,00	151.107.188,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	51.500.000,00	50.835.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.000,00	270.000,00	29.025.000,00	28.800.000,00	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	275.000,00	270.000,00	29.025.000,00	28.800.000,00	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.540.000,00	419.521.460,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.920.000,00	137.973.460,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.860.000,00	12.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.760.000,00	266.748.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.212.500,00	89.010.359,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.152.000,00	77.060.859,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.060.500,00	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.999.500,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	1.600.784.000,00	1.599.567.722,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	1.600.784.000,00	1.599.567.722,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1.600.784.000,00	1.599.567.722,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	97.497.000,00	89.086.950,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	97.497.000,00	89.086.950,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	51.692.000,00	51.611.950,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	13.589.000,00	7.033.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	32.216.000,00	30.442.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.376.157.000,00	3.324.361.036,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.376.157.000,00	3.324.361.036,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.770.197.000,00	2.737.971.080,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	22.259.000,00	21.713.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	11.190.000,00	10.990.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	155.594.000,00	154.968.500,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	54.811.000,00	52.496.600,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.780.000,00	7.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	9.722.000,00	9.722.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	195.361.000,00	187.875.856,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	11.030.000,00	10.316.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	112.880.000,00	106.310.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12.108.000,00	11.428.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	6.350.000,00	6.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6.875.000,00	6.640.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.146.309.300,00	1.086.278.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.146.309.300,00	1.086.278.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.933.500,00	24.174.500,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	550.000.000,00	527.429.500,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	173.674.600,00	162.837.500,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.225.000,00	30.225.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	350.076.200,00	340.211.500,00	-	-	-	-	-	-
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.206.119.098,00	14.184.514.780,00	197.529.320,00	186.933.460,00	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.206.119.098,00	14.184.514.780,00	197.529.320,00	186.933.460,00	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	9.464.834.373,00	9.446.448.080,00	197.529.320,00	186.933.460,00	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.464.834.373,00	9.446.448.080,00	197.529.320,00	186.933.460,00	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	9.464.834.373,00	9.446.448.080,00	197.529.320,00	186.933.460,00	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.163.733.000,00	3.163.632.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.100.000,00	3.005.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.100.000,00	3.005.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	5.000.000,00	4.999.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5.000.000,00	4.999.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.148.861.000,00	3.148.856.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.920.000,00	8.920.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6.385.000,00	6.385.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	3.935.000,00	3.935.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.230.000,00	12.230.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	3.073.861.000,00	3.073.856.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	43.530.000,00	43.530.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6.772.000,00	6.772.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.772.000,00	1.772.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.577.551.725,00	1.574.434.700,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.567.411.725,00	1.564.294.700,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	48.239.025,00	48.039.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	304.580.000,00	304.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	503.910.000,00	501.921.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	632.080.000,00	631.152.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	76.600.000,00	76.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	2.002.700,00	2.002.700,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	10.140.000,00	10.140.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	10.140.000,00	10.140.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.713.472.380,00	13.303.564.294,00	567.151.220,00	561.365.978,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	13.713.472.380,00	13.303.564.294,00	567.151.220,00	561.365.978,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.895.617.080,00	11.511.242.349,00	127.266.220,00	122.767.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.063.800,00	153.363.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.651.000,00	35.956.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.120.000,00	11.115.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.292.800,00	106.292.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.578.906.788,00	8.269.974.686,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.575.684.500,00	8.266.752.686,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.154.000,00	1.154.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.068.288,00	2.068.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.812.000,00	103.802.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	103.812.000,00	103.802.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.844.000,00	331.886.920,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.373.000,00	14.373.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.747.000,00	89.577.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.134.000,00	57.687.590,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.440.000,00	163.099.330,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	127.266.220,00	122.767.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	46.879.000,00	45.320.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	41.731.760,00	41.577.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	38.655.460,00	35.870.000,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.554.980.000,00	2.491.743.423,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.402.000,00	237.138.923,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.310.078.000,00	2.252.104.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.010.492,00	160.472.320,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.460.000,00	109.021.300,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.475.000,00	9.475.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.355.492,00	16.321.020,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.720.000,00	15.655.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.817.855.300,00	1.792.321.945,00	439.885.000,00	438.598.978,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	63.341.000,00	62.946.757,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.877.000,00	1.731.257,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	61.464.000,00	61.215.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	252.456.000,00	251.269.761,00	246.600.000,00	245.689.333,00	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	26.525.000,00	25.917.500,00	246.600.000,00	245.689.333,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	122.195.000,00	121.740.011,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	102.116.000,00	101.992.250,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	41.026.000,00	39.866.380,00	193.285.000,00	192.909.645,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	41.026.000,00	39.866.380,00	193.285.000,00	192.909.645,00	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	171.599.000,00	170.122.140,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	171.599.000,00	170.122.140,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	397.028.500,00	394.522.750,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.528.500,00	8.502.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	298.520.750,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	251.690.000,00	251.680.907,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.510.000,00	1.510.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7.015.000,00	7.015.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	243.165.000,00	243.155.907,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	8.785.000,00	8.607.150,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	8.785.000,00	8.607.150,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	48.758.000,00	48.758.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	23.248.500,00	23.248.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	25.509.500,00	25.509.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	187.642.000,00	187.642.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	187.642.000,00	187.642.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	390.013.800,00	371.907.100,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	305.367.800,00	289.624.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	84.646.000,00	82.282.600,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.516.000,00	4.999.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.516.000,00	4.999.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.699.896.396,00	13.331.439.163,00	278.592.604,00	275.178.750,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	13.699.896.396,00	13.331.439.163,00	278.592.604,00	275.178.750,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.804.030.571,00	8.488.844.324,00	32.478.829,00	32.428.750,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.340.000,00	144.106.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.410.000,00	14.292.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.715.000,00	8.705.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.355.000,00	4.355.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.860.000,00	116.754.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.466.285.000,00	5.221.870.523,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.456.233.000,00	5.211.818.523,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.041.448.334,00	1.033.509.594,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	744.040.334,00	736.299.901,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	297.408.000,00	297.209.693,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.530.900,00	259.261.339,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.720.000,00	5.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.175.000,00	31.112.344,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.522.000,00	18.425.900,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.960.000,00	12.960.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.017.000,00	33.009.500,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.186.900,00	154.603.595,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	32.478.829,00	32.428.750,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	28.900.000,00	28.878.750,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	3.578.829,00	3.550.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.503.553.000,00	1.442.957.583,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.040.000,00	23.033.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	338.640.000,00	318.935.551,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.168.000,00	52.186.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.088.705.000,00	1.048.803.032,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.873.337,00	387.139.285,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.282.337,00	134.775.135,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.591.000,00	66.571.150,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.000.000,00	185.793.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.178.886.225,00	2.138.074.289,00	246.113.775,00	242.750.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.178.886.225,00	2.138.074.289,00	246.113.775,00	242.750.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	160.000.000,00	159.426.200,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	26.000.000,00	25.754.300,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	300.500.000,00	297.116.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	480.576.800,00	473.760.493,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	85.000.000,00	83.284.500,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	881.559.425,00	860.800.949,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	55.000.000,00	52.977.618,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	55.500.000,00	52.365.579,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	93.000.000,00	91.068.650,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.750.000,00	41.520.000,00	246.113.775,00	242.750.000,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.716.979.600,00	2.704.520.550,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.130.491.200,00	2.121.879.176,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.130.491.200,00	2.121.879.176,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	586.488.400,00	582.641.374,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	108.000,00	108.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	100.000,00	99.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	422.095.000,00	418.867.566,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	100.000,00	99.300,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	163.985.400,00	163.370.008,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100.000,00	97.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	26.074.249.600,00	24.458.312.799,00	168.191.400,00	167.341.400,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	26.074.249.600,00	24.458.312.799,00	168.191.400,00	167.341.400,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.731.429.600,00	22.175.756.329,00	168.191.400,00	167.341.400,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.661.250,00	20.531.100,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.556.000,00	4.553.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.588.500,00	2.576.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.620.500,00	2.477.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.379.000,00	2.154.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.664.000,00	2.034.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.202.500,00	4.112.350,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.650.750,00	2.622.750,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.591.849.250,00	18.067.708.055,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.585.621.000,00	18.061.556.805,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.059.250,00	2.059.250,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.812.500,00	2.774.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.356.500,00	1.317.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.067.500,00	1.950.250,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.067.500,00	1.950.250,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.754.000,00	226.280.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	230.754.000,00	226.280.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	654.593.400,00	650.784.850,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.475.000,00	6.412.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.900.000,00	111.437.700,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.899.000,00	81.840.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.319.400,00	451.094.650,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	168.191.400,00	167.341.400,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	23.176.800,00	23.176.800,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	145.014.600,00	144.164.600,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.865.638.200,00	2.852.733.575,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	443.070.000,00	437.428.575,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.193.200,00	145.130.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.277.375.000,00	2.270.175.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.366.000,00	353.268.499,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.846.000,00	143.749.554,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.520.000,00	209.518.945,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	231.000.000,00	229.086.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	231.000.000,00	229.086.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	81.000.000,00	79.086.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20.320.000,00	20.310.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.320.000,00	20.310.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	20.320.000,00	20.310.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	287.649.000,00	287.649.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	287.649.000,00	287.649.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	287.649.000,00	287.649.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	76.000.000,00	73.967.970,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	76.000.000,00	73.967.970,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	76.000.000,00	73.967.970,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.727.851.000,00	1.671.543.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.727.851.000,00	1.671.543.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	1.727.851.000,00	1.671.543.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.019.130.400,00	5.660.000.183,00	387.000.000,00	386.373.564,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.019.130.400,00	5.660.000.183,00	387.000.000,00	386.373.564,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.798.966.400,00	4.444.813.583,00	387.000.000,00	386.373.564,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.288.900,00	85.992.285,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.307.000,00	3.302.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.023.250,00	5.023.250,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.974.000,00	5.974.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.190.000,00	3.190.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.491.250,00	5.491.250,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.638.000,00	4.637.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.665.400,00	58.374.285,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.449.260.500,00	3.113.694.610,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.441.608.000,00	3.106.042.110,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.663.000,00	3.663.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.989.500,00	3.989.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.071.000,00	398.863.064,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.010.000,00	3.005.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.607.500,00	130.533.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.500,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.653.000,00	229.524.864,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.000.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	2.000.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.522.000,00	640.854.615,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.714.000,00	138.390.272,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502.808.000,00	500.564.343,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.824.000,00	205.409.009,00	385.000.000,00	384.473.564,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.940.000,00	99.567.800,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.850.000,00	71.357.884,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.034.000,00	34.483.325,00	385.000.000,00	384.473.564,00	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	9.970.000,00	9.306.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.995.000,00	4.523.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.995.000,00	4.523.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4.975.000,00	4.783.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4.975.000,00	4.783.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	280.030.000,00	279.408.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	280.030.000,00	279.408.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	159.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	120.030.000,00	119.608.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	109.072.000,00	106.588.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	109.072.000,00	106.588.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	71.000.000,00	70.409.700,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	5.000.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	33.072.000,00	31.378.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	790.092.000,00	788.960.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	790.092.000,00	788.960.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	87.013.000,00	86.751.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	524.052.000,00	523.679.100,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	179.027.000,00	178.530.100,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	31.000.000,00	30.924.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000,00	30.924.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	31.000.000,00	30.924.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.944.660.000,00	8.714.615.879,00	454.340.000,00	453.704.044,00	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8.944.660.000,00	8.714.615.879,00	454.340.000,00	453.704.044,00	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	758.753.000,00	646.312.348,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	85.000.000,00	84.755.348,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	85.000.000,00	84.755.348,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	673.753.000,00	561.557.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	673.753.000,00	561.557.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.813.407.000,00	7.703.453.531,00	454.340.000,00	453.704.044,00	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	254.717.000,00	202.058.846,00	198.030.000,00	197.724.094,00	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	254.717.000,00	202.058.846,00	198.030.000,00	197.724.094,00	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.440.179.000,00	1.438.177.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	350.000.000,00	349.991.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	375.000.000,00	374.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	715.179.000,00	713.286.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.700.000.000,00	1.697.943.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	750.000.000,00	749.998.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	750.000.000,00	749.645.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	200.000.000,00	198.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.700.000.000,00	3.650.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.700.000.000,00	3.650.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	718.511.000,00	715.274.185,00	256.310.000,00	255.979.950,00	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	400.000.000,00	399.960.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	318.511.000,00	315.314.185,00	256.310.000,00	255.979.950,00	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	372.500.000,00	364.850.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	372.500.000,00	364.850.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	372.500.000,00	364.850.000,00	-	-	-	-	-	-
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	128.373.000,00	127.221.469,00	-	-	-	-	-	-
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	128.373.000,00	127.221.469,00	-	-	-	-	-	-
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	128.373.000,00	127.221.469,00	-	-	-	-	-	-
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	128.373.000,00	127.221.469,00	-	-	-	-	-	-
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	30.000.000,00	29.314.573,00	-	-	-	-	-	-
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68.373.000,00	68.119.586,00	-	-	-	-	-	-
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	30.000.000,00	29.787.310,00	-	-	-	-	-	-
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	276.637.600,00	274.592.676,00	500.000,00	491.289,00	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	276.637.600,00	274.592.676,00	500.000,00	491.289,00	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	276.637.600,00	274.592.676,00	500.000,00	491.289,00	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	276.637.600,00	274.592.676,00	500.000,00	491.289,00	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	248.983.000,00	248.219.676,00	-	-	-	-	-	-
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.654.600,00	26.373.000,00	500.000,00	491.289,00	-	-	-	-
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.202.429.870,00	2.878.151.829,00	3.021.760.000,00	2.934.178.199,00	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.202.429.870,00	2.878.151.829,00	3.021.760.000,00	2.934.178.199,00	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.831.702.000,00	1.720.826.638,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	260.000.000,00	239.623.827,00	-	-	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	260.000.000,00	239.623.827,00	-	-	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.571.702.000,00	1.481.202.811,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.123.442.000,00	1.050.787.634,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	448.260.000,00	430.415.177,00	-	-	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	228.874.000,00	180.867.004,00	-	-	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	228.874.000,00	180.867.004,00	-	-	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	228.874.000,00	180.867.004,00	-	-	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.141.853.870,00	976.458.187,00	3.001.760.000,00	2.914.178.199,00	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	171.650.000,00	148.186.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	171.650.000,00	148.186.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	970.203.870,00	828.272.187,00	3.001.760.000,00	2.914.178.199,00	-	-	-	-
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	970.203.870,00	828.272.187,00	3.001.760.000,00	2.914.178.199,00	-	-	-	-
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.960.569.500,00	4.525.049.573,00	3.167.158.000,00	3.021.383.872,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.960.569.500,00	4.525.049.573,00	3.167.158.000,00	3.021.383.872,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.948.110.500,00	3.552.938.577,00	12.000.000,00	10.931.892,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.387.410,00	28.068.360,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.406.400,00	4.364.770,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.905.000,00	3.892.200,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.705.000,00	3.701.120,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.264.600,00	4.184.335,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.734.910,00	2.662.840,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.846.500,00	3.812.235,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.525.000,00	5.450.860,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.182.985.300,00	2.811.042.774,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.178.783.000,00	2.806.911.569,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.842.000,00	2.791.560,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.360.300,00	1.339.645,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.226.962,00	71.081.244,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76.226.962,00	71.081.244,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.349.700,00	177.669.768,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000,00	32.418.105,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.715.900,00	15.779.628,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.956.500,00	37.821.421,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.878.500,00	6.871.960,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.080.000,00	2.422.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.718.800,00	82.356.654,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	12.000.000,00	10.931.892,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	12.000.000,00	10.931.892,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.726.128,00	460.047.731,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.492.400,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.162.128,00	115.308.333,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.064.000,00	343.246.998,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.435.000,00	5.028.700,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.165.000,00	4.766.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000,00	112.200,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.006.779.000,00	966.877.916,00	3.155.158.000,00	3.010.451.980,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	641.303.200,00	610.069.022,00	145.000.000,00	144.417.660,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.500.000,00	1.452.480,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.510.000,00	26.486.114,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	15.000.000,00	14.600.378,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	9.516.000,00	9.398.838,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	152.475.000,00	143.152.435,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	348.195.000,00	332.941.822,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	78.282.700,00	74.671.405,00	145.000.000,00	144.417.660,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.824.500,00	7.365.550,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	365.475.800,00	356.808.894,00	3.010.158.000,00	2.866.034.320,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	95.500.000,00	92.503.580,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	157.881.500,00	155.426.079,00	3.010.158.000,00	2.866.034.320,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	74.729.300,00	72.589.763,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	37.365.000,00	36.289.472,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5.680.000,00	5.233.080,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	5.680.000,00	5.233.080,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5.680.000,00	5.233.080,00	-	-	-	-	-	-
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	374.929.500,00	354.232.562,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	374.929.500,00	354.232.562,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	349.721.000,00	332.599.417,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	171.510.000,00	167.632.070,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	26.510.000,00	25.511.640,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	109.600.000,00	108.375.130,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	35.400.000,00	33.745.300,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	33.797.627,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	40.000.000,00	33.797.627,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	138.211.000,00	131.169.720,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	118.151.000,00	112.450.520,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	20.060.000,00	18.719.200,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	17.000.000,00	15.152.945,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10.000.000,00	8.232.915,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10.000.000,00	8.232.915,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	7.000.000,00	6.920.030,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	7.000.000,00	6.920.030,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	8.208.500,00	6.480.200,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	8.208.500,00	6.480.200,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	8.208.500,00	6.480.200,00	-	-	-	-	-	-
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	63.884.325.679,00	59.388.311.573,83	1.993.760.671,00	1.849.546.505,00	-	-	-	-
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.805.815.875,00	13.355.203.393,00	1.433.229.875,00	1.295.235.505,00	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	13.805.815.875,00	13.355.203.393,00	1.433.229.875,00	1.295.235.505,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.745.653.275,00	6.493.329.759,00	190.453.875,00	190.453.875,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.165.000,00	13.091.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.385.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.280.000,00	2.270.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.272.000,00	2.272.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.890.000,00	1.875.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.245.000,00	2.225.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.078.000,00	2.064.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.063.097.500,00	4.822.240.778,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.059.969.000,00	4.819.112.278,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.622.500,00	1.622.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.506.000,00	1.506.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.120.000,00	4.115.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.120.000,00	4.115.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	679.402.027,00	678.803.700,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.135.000,00	6.135.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.156.000,00	2.149.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.086.487,00	89.080.750,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	287.048.500,00	287.018.786,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.995.000,00	12.439.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.981.040,00	281.980.664,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	190.453.875,00	190.453.875,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	190.453.875,00	190.453.875,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.403.000,00	791.865.233,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.050.000,00	18.043.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.429.000,00	134.172.635,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	645.924.000,00	639.649.098,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.465.748,00	118.214.048,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.028.700,00	36.777.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.674.000,00	25.674.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.763.048,00	55.763.048,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.426.541.000,00	2.359.438.143,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.733.541.556,00	1.667.961.699,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.716.541.556,00	1.650.961.699,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	599.999.444,00	598.476.444,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	599.999.444,00	598.476.444,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	64.232.000,00	64.232.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	15.768.000,00	15.768.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.538.669.600,00	3.408.289.122,00	1.242.776.000,00	1.104.781.630,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1.128.519.600,00	1.127.298.057,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	647.169.600,00	646.988.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	35.000.000,00	34.994.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	440.350.000,00	439.315.557,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.410.150.000,00	2.280.991.065,00	1.242.776.000,00	1.104.781.630,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.180.500.000,00	2.051.405.515,00	1.042.776.000,00	904.956.630,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	213.050.000,00	212.985.550,00	200.000.000,00	199.825.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	134.952.000,00	134.952.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	134.952.000,00	134.952.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	134.952.000,00	134.952.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	960.000.000,00	959.194.369,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	625.000.000,00	624.194.369,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	625.000.000,00	624.194.369,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	315.000.000,00	315.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000,00	155.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.631.780.870,00	12.304.171.061,00	66.402.680,00	66.150.000,00	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	13.631.780.870,00	12.304.171.061,00	66.402.680,00	66.150.000,00	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.935.780.870,00	8.887.171.166,00	40.152.680,00	39.900.000,00	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.556.000,00	209.406.950,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.292.000,00	60.526.950,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.892.000,00	9.530.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.748.000,00	8.301.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.454.000,00	3.410.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.454.000,00	3.386.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.032.000,00	7.978.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.684.000,00	116.275.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.097.248.000,00	6.137.548.484,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.089.342.000,00	6.129.661.984,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.906.000,00	7.886.500,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.311.370,00	429.529.538,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.832.500,00	4.817.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.129.300,00	137.931.459,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.240.000,00	24.013.500,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.109.570,00	262.767.579,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	40.152.680,00	39.900.000,00	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	40.152.680,00	39.900.000,00	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.884.335.500,00	1.822.544.604,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402.753.500,00	373.529.628,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.286.000,00	28.195.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.453.296.000,00	1.420.819.976,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.580.000,00	286.391.590,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.200.000,00	137.332.040,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.380.000,00	149.059.550,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.731.470.000,00	1.552.325.847,00	26.250.000,00	26.250.000,00	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.731.470.000,00	1.552.325.847,00	26.250.000,00	26.250.000,00	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.868.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.681.470.000,00	1.502.457.847,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.964.530.000,00	1.864.674.048,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.529.250.000,00	1.465.605.518,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.366.450.000,00	1.325.705.018,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	162.800.000,00	139.900.500,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	435.280.000,00	399.068.530,00	-	-	-	-	-	-
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	435.280.000,00	399.068.530,00	-	-	-	-	-	-
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.569.849.934,00	29.992.548.491,83	489.128.116,00	483.161.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	32.569.849.934,00	29.992.548.491,83	489.128.116,00	483.161.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.945.864.734,00	15.523.931.499,00	110.628.116,00	106.100.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.500.000,00	79.273.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.412.500,00	24.231.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.066.500,00	8.050.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.576.000,00	10.576.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.320.000,00	5.320.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.028.000,00	8.028.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.742.000,00	11.712.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.355.000,00	11.355.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.788.350.000,00	13.376.798.628,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.714.850.000,00	13.303.303.878,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.637.000,00	47.631.750,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.058.000,00	6.058.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.909.500,00	9.909.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.895.500,00	9.895.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.160.000,00	4.160.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.160.000,00	4.160.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	477.214.384,00	476.926.354,00	91.732.616,00	87.500.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.384,00	-	91.732.616,00	87.500.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.307.000,00	134.301.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.000.000,00	21.911.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.840.000,00	5.835.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.000.000,00	284.878.854,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	18.895.500,00	18.600.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	18.895.500,00	18.600.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.268.705.350,00	1.259.197.747,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.242.850,00	8.242.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193.081.000,00	192.408.731,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.000,00	21.500.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.045.881.500,00	1.037.046.516,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.435.000,00	321.075.770,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.000.000,00	108.985.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.435.000,00	197.143.770,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.947.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.411.272.200,00	2.335.545.154,00	26.000.000,00	25.800.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.324.972.200,00	1.304.305.000,00	26.000.000,00	25.800.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.291.672.200,00	1.271.065.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	33.300.000,00	33.240.000,00	26.000.000,00	25.800.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	570.000.000,00	539.334.654,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	150.000.000,00	147.212.900,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	420.000.000,00	392.121.754,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.500.000,00	8.490.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	8.500.000,00	8.490.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	507.800.000,00	483.415.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	507.800.000,00	483.415.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.798.934.000,00	7.752.290.774,83	350.000.000,00	348.761.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.603.311.000,00	1.557.861.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.603.311.000,00	1.557.861.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	6.195.623.000,00	6.194.429.774,83	350.000.000,00	348.761.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.315.400.000,00	3.314.401.584,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	252.000.000,00	252.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	-	-	350.000.000,00	348.761.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.478.223.000,00	2.478.028.190,83	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	608.150.000,00	606.584.292,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	87.263.000,00	86.240.520,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.263.000,00	86.240.520,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	50.000.000,00	50.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	408.150.000,00	407.740.772,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	408.150.000,00	407.740.772,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	25.000.000,00	24.866.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	25.000.000,00	24.866.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	37.737.000,00	37.737.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	37.737.000,00	37.737.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	311.896.000,00	309.416.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	311.896.000,00	309.416.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	311.896.000,00	309.416.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.493.733.000,00	3.464.780.772,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.493.733.000,00	3.464.780.772,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	723.500.000,00	723.138.650,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	770.233.000,00	752.696.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	1.988.946.122,00	-	-	-	-	-	-
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.205.000.000,00	2.194.042.128,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.205.000.000,00	2.194.042.128,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.430.000.000,00	1.421.653.806,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	950.000.000,00	944.334.086,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	950.000.000,00	944.334.086,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	480.000.000,00	477.319.720,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	480.000.000,00	477.319.720,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	321.000.000,00	319.980.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000,00	73.980.500,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	75.000.000,00	73.980.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	242.000.000,00	242.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	250.000.000,00	248.893.071,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	248.893.071,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	120.000.000,00	119.668.825,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	95.000.000,00	94.610.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	35.000.000,00	34.614.246,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	69.000.000,00	68.559.751,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	69.000.000,00	68.559.751,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	65.000.000,00	64.559.751,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	125.000.000,00	124.955.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	125.000.000,00	124.955.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	125.000.000,00	124.955.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.495.279.000,00	1.418.411.779,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.495.279.000,00	1.418.411.779,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.240.279.000,00	1.194.905.603,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.240.279.000,00	1.194.905.603,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	390.279.000,00	357.684.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	816.225.000,00	806.542.103,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	33.775.000,00	30.679.500,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	130.000.000,00	112.008.691,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	130.000.000,00	112.008.691,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	43.300.000,00	31.827.071,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	86.700.000,00	80.181.620,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	125.000.000,00	111.497.485,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	111.497.485,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.000.000,00	21.660.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	100.000.000,00	89.837.485,00	-	-	-	-	-	-
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	176.600.000,00	123.934.721,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Tenaga Kerja	176.600.000,00	123.934.721,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	176.600.000,00	123.934.721,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.600.000,00	123.934.721,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	60.465.330,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.600.000,00	63.469.391,00	-	-	-	-	-	-
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	112.723.463.671,00	103.657.442.494,00	1.178.832.000,00	1.146.356.240,00	-	-	-	-
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	50.957.489.271,00	46.403.736.171,00	927.034.000,00	922.444.740,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000		Sekretariat Daerah	-	3.597.686.923,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	3.597.686.923,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3.527.878.212,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.527.878.212,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	56.280.522,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	56.280.522,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	13.528.189,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	13.528.189,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001		Bagian Umum	31.763.044.149,00	26.232.037.351,00	851.452.750,00	847.345.740,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.763.044.149,00	26.232.037.351,00	851.452.750,00	847.345.740,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.618.750,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.618.750,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.399.891.381,00	15.576.329.604,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.308.539.000,00	15.494.451.518,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.152.381,00	73.315.086,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.600.000,00	5.053.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.600.000,00	3.510.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.500.000,00	5.149.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.500.000,00	5.149.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	236.960.000,00	230.169.032,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.300.000,00	33.300.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.625.000,00	4.520.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	178.500.000,00	172.772.282,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.535.000,00	19.576.750,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.399.297.200,00	1.372.479.719,00	124.059.000,00	124.055.540,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.082.000,00	95.071.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.724.300,00	39.823.950,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.558.890,00	8.000.000,00	124.059.000,00	124.055.540,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.702.000,00	23.124.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	82.983.500,00	82.983.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	88.900.000,00	85.640.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	199.150.000,00	189.270.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	859.196.510,00	848.566.869,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.967.350,00	1.700.000,00	664.443.750,00	660.340.200,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	38.106.000,00	37.830.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.350,00	-	136.408.750,00	136.407.900,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.965.000,00	1.700.000,00	489.929.000,00	486.102.300,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.675.877.188,00	3.425.214.614,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.840.000,00	28.657.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000,00	883.031.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.091.600,00	260.645.040,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.283.945.588,00	2.252.880.874,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.164.122.663,00	2.156.343.696,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174.415.000,00	170.220.372,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	844.841.000,00	841.963.454,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	114.430.000,00	114.275.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	882.220.663,00	881.837.870,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.216.000,00	148.047.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.008.001.580,00	710.158.317,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	785.318.000,00	500.927.317,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	187.500.000,00	186.472.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35.183.580,00	22.758.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.851.426.787,00	2.734.874.619,00	22.450.000,00	22.450.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.006.911.787,00	1.891.004.619,00	22.450.000,00	22.450.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0001	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	844.340.000,00	843.870.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002		Bagian Organisasi	570.397.000,00	565.113.539,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	570.397.000,00	565.113.539,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	570.397.000,00	565.113.539,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	225.659.000,00	224.391.125,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	115.619.000,00	114.184.213,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	65.678.500,00	65.551.925,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	53.421.000,00	52.590.179,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0002	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	110.019.500,00	108.396.097,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003		Bagian Administrasi Pembangunan	657.523.045,00	646.085.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	657.523.045,00	646.085.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	657.523.045,00	646.085.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	71.026.000,00	65.359.316,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	485.457.045,00	482.442.112,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0003	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	101.040.000,00	98.284.472,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004		Bagian Tata Pemerintahan	980.805.556,00	942.586.173,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	980.805.556,00	942.586.173,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	755.805.556,00	724.986.232,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	154.805.556,00	145.816.428,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	95.000.000,00	90.665.643,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	506.000.000,00	488.504.161,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	225.000.000,00	217.599.941,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	206.000.000,00	199.123.981,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	9.000.000,00	8.821.618,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0004	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10.000.000,00	9.654.342,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005		Bagian Kesejahteraan Rakyat	14.207.412.000,00	11.741.286.444,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.207.412.000,00	11.741.286.444,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.207.412.000,00	11.741.286.444,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14.049.412.000,00	11.670.825.104,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	133.000.000,00	54.720.770,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0005	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	25.000.000,00	15.740.570,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006		Bagian Hukum	750.658.450,00	701.248.038,00	5.250.000,00	5.249.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	750.658.450,00	701.248.038,00	5.250.000,00	5.249.000,00	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	750.658.450,00	701.248.038,00	5.250.000,00	5.249.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	184.648.600,00	175.325.581,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	273.004.400,00	252.116.089,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0006	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	293.005.450,00	273.806.368,00	5.250.000,00	5.249.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007		Bagian Perekonomian	904.490.321,00	870.611.357,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	904.490.321,00	870.611.357,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	306.610.500,00	287.730.655,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	193.750.000,00	186.265.077,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	68.468.000,00	61.626.298,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	44.392.500,00	39.839.280,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	597.879.821,00	582.880.702,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	556.718.321,00	544.995.190,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	16.429.000,00	14.969.720,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0007	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	24.732.500,00	22.915.792,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	457.300.000,00	454.726.705,00	22.700.000,00	22.600.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	457.300.000,00	454.726.705,00	22.700.000,00	22.600.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	457.300.000,00	454.726.705,00	22.700.000,00	22.600.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	138.807.000,00	137.826.214,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	57.037.400,00	56.685.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0008	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	261.455.600,00	260.215.491,00	22.700.000,00	22.600.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	665.858.750,00	652.353.741,00	47.381.250,00	47.000.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	665.858.750,00	652.353.741,00	47.381.250,00	47.000.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	665.858.750,00	652.353.741,00	47.381.250,00	47.000.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	234.115.000,00	229.533.317,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	275.084.000,00	273.727.124,00	45.000.000,00	44.750.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.00.0009	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	156.659.750,00	149.093.300,00	2.381.250,00	2.250.000,00	-	-	-	-
4.02			SEKRETARIAT DPRD	61.765.974.400,00	57.253.706.323,00	251.798.000,00	223.911.500,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	61.765.974.400,00	57.253.706.323,00	251.798.000,00	223.911.500,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.761.683.050,00	39.352.397.783,00	251.798.000,00	223.911.500,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.725.000,00	33.779.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.344.000,00	3.870.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.624.000,00	4.830.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.808.000,00	3.572.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.173.000,00	6.148.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.134.000,00	2.781.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.858.000,00	4.145.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.784.000,00	8.432.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.776.557.500,00	5.478.461.908,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.513.668.000,00	5.229.058.878,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.818.000,00	20.783.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.708.000,00	4.852.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	232.363.500,00	223.768.030,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.446.400,00	60.215.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.446.400,00	12.433.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	47.782.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.853.850.500,00	2.686.605.023,00	6.150.000,00	6.133.500,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.647.500,00	55.705.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	37.478.400,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.628.033.000,00	1.583.312.978,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	359.072.500,00	357.823.050,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	204.100.000,00	202.653.600,00	6.150.000,00	6.133.500,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	24.002.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	519.713.500,00	416.392.495,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.284.000,00	9.237.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.167.250,00	44.683.300,00	245.648.000,00	217.778.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	3.393.250,00	-	237.425.000,00	217.778.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.774.000,00	44.683.300,00	8.223.000,00	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.449.831.400,00	1.357.530.578,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.855.000,00	39.475.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	796.500.000,00	728.547.078,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	611.476.400,00	589.508.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.548.918.000,00	1.404.036.266,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.000.000,00	290.272.995,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	280.445.936,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	19.460.000,00	10.011.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.070.000,00	197.363.840,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	644.388.000,00	625.942.495,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.149.961.000,00	27.531.975.041,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	27.737.858.000,00	27.278.480.541,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	337.038.000,00	213.244.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.065.000,00	40.250.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	818.226.000,00	755.111.667,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	20.000.000,00	18.095.265,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	15.000.000,00	8.250.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	601.226.000,00	577.561.748,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	182.000.000,00	151.204.654,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.004.291.350,00	17.901.308.540,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.853.098.200,00	1.568.928.191,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	445.947.000,00	379.682.168,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	930.934.800,00	886.037.395,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	174.177.000,00	124.463.878,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	236.018.400,00	168.994.750,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	66.021.000,00	9.750.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	157.785.000,00	143.967.050,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	8.805.000,00	8.029.800,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	11.700.000,00	9.079.750,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	48.420.000,00	44.355.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	48.420.000,00	43.177.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	40.440.000,00	39.325.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.300.456.300,00	1.248.878.401,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	27.874.000,00	18.280.050,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	17.654.000,00	7.202.700,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	27.874.000,00	11.402.750,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	27.874.000,00	17.663.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	640.170.800,00	636.287.121,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	559.009.500,00	558.042.580,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.414.656.000,00	2.975.311.419,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	441.162.000,00	410.112.598,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.348.403.800,00	2.022.832.921,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	40.000.000,00	24.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	220.722.000,00	200.150.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	15.000.000,00	14.401.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.910.000,00	2.590.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	345.458.200,00	300.624.900,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.206.316.000,00	2.160.745.250,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	25.000.000,00	14.250.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5.152.000,00	5.138.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	2.176.164.000,00	2.141.357.250,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	397.919.250,00	201.969.771,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	188.219.600,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	209.699.650,00	200.969.771,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	11.674.060.600,00	9.601.508.458,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.449.207.500,00	7.923.893.292,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	718.024.500,00	713.539.950,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.503.828.600,00	961.075.216,00	-	-	-	-	-	-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	53.058.729.028,00	48.504.410.072,00	1.938.413.059,00	1.865.758.003,00	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	439.461.644.000,00	439.333.244.000,00
5.01			PERENCANAAN	10.538.661.780,00	9.307.383.477,00	366.616.120,00	350.238.793,00	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.538.661.780,00	9.307.383.477,00	366.616.120,00	350.238.793,00	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.147.361.780,00	6.947.090.129,00	366.616.120,00	350.238.793,00	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.841.000,00	5.511.950,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.102.500,00	2.953.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.738.500,00	2.558.750,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.035.165.000,00	4.940.698.640,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.024.962.000,00	4.931.305.640,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.433.000,00	3.098.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.220.000,00	3.097.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.134.000,00	1.850.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.416.000,00	1.348.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	490.000,00	490.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	280.000,00	280.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145.251.800,00	134.515.612,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145.251.800,00	134.515.612,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	772.040.980,00	732.113.109,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.022.500,00	16.029.800,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.028.200,00	41.805.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.370.000,00	17.901.518,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.324.000,00	209.937.400,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.910.080,00	15.837.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.250.000,00	44.392.505,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.136.200,00	375.409.886,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	366.616.120,00	350.238.793,00	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	40.232.100,00	35.100.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	326.384.020,00	315.138.793,00	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.755.000,00	747.434.890,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000,00	2.799.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.880.000,00	191.867.890,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.075.000,00	552.768.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.818.000,00	386.325.928,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.450.000,00	200.414.428,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.496.000,00	71.160.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.872.000,00	114.751.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.156.045.500,00	1.153.355.977,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.013.033.900,00	1.010.613.727,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	13.910.000,00	13.910.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	86.813.500,00	86.755.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	912.310.400,00	909.948.227,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	114.995.500,00	114.810.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75.550.500,00	75.411.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	39.445.000,00	39.399.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	28.016.100,00	27.931.750,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	28.016.100,00	27.931.750,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.235.254.500,00	1.206.937.371,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	536.454.500,00	514.310.095,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.223.500,00	22.240.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	122.648.000,00	116.842.602,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	246.285.000,00	239.681.860,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.908.000,00	96.171.935,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.405.000,00	14.481.250,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.125.000,00	8.950.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.860.000,00	15.941.948,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	328.300.000,00	325.241.480,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	102.500.000,00	101.397.480,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	225.800.000,00	223.844.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	370.500.000,00	367.385.796,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	88.240.000,00	88.057.013,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	41.820.000,00	41.752.866,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	153.440.000,00	150.765.164,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	87.000.000,00	86.810.753,00	-	-	-	-	-	-
5.02			KEUANGAN	26.278.423.862,00	24.766.937.267,00	1.427.262.875,00	1.380.989.250,00	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	439.461.644.000,00	439.333.244.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.972.713.012,00	11.250.082.983,00	937.261.875,00	914.510.250,00	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	439.461.644.000,00	439.333.244.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.230.713.012,00	7.612.801.317,00	937.261.875,00	914.510.250,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.250.000,00	17.139.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000,00	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.750.000,00	7.739.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.292.646.000,00	5.719.779.984,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.250.396.000,00	5.678.736.984,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.500.000,00	40.293.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000,00	107.405.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110.000.000,00	107.405.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	688.698.462,00	677.151.456,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.002.000,00	49.996.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.022.958,00	48.434.950,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.615.954,00	31.970.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.628.750,00	121.687.369,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.428.800,00	410.214.837,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000,00	11.848.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.654.750,00	6.950.000,00	937.261.875,00	914.510.250,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.572.000,00	6.870.000,00	567.632.000,00	560.100.500,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	82.750,00	80.000,00	21.917.250,00	21.912.750,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	347.712.625,00	332.497.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.544.800,00	752.094.581,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.500.000,00	21.300.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.750.000,00	444.981.423,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.360.000,00	3.962.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.934.800,00	281.851.158,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.919.000,00	332.281.296,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.850.000,00	185.705.573,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	44.910.548,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.069.000,00	84.862.175,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000,00	16.803.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.855.000.000,00	2.798.998.319,00	-	-	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	439.461.644.000,00	439.333.244.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.310.000.000,00	1.275.363.619,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	310.000.000,00	294.585.425,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	173.000.000,00	164.632.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	389.970.000,00	386.400.596,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	437.030.000,00	429.745.098,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	750.000.000,00	732.287.950,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	330.000.000,00	327.737.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	165.000.000,00	158.622.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	92.000.000,00	87.068.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	163.000.000,00	158.859.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	595.000.000,00	592.597.673,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15.000.000,00	14.883.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	215.000.000,00	213.554.744,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	303.531.000,00	303.199.679,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	31.469.000,00	30.992.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	29.967.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	439.461.644.000,00	439.333.244.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	424.780.464.000,00	424.652.064.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	-	1.972.500.000,00	1.266.502.459,00	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	14.681.180.000,00	14.681.180.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	200.000.000,00	198.749.077,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100.000.000,00	99.200.077,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.549.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	887.000.000,00	838.283.347,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	887.000.000,00	838.283.347,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	500.000.000,00	454.399.916,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	340.000.000,00	337.780.231,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47.000.000,00	46.103.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.305.710.850,00	13.516.854.284,00	490.001.000,00	466.479.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.185.879.850,00	11.497.711.352,00	290.001.000,00	269.479.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.398.500,00	86.046.109,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.826.000,00	11.825.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.182.500,00	4.182.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.840.000,00	4.840.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.550.000,00	57.198.609,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.729.124.900,00	10.071.735.958,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.662.960.053,00	10.006.616.890,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.964.000,00	2.952.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.200.847,00	62.167.068,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.775.000,00	210.632.388,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	212.775.000,00	210.632.388,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.734.000,00	286.712.474,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.198.000,00	7.198.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.643.000,00	2.643.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.529.300,00	85.519.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.468.000,00	18.468.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.835.700,00	166.824.174,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	290.001.000,00	269.479.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	290.001.000,00	269.479.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.988.000,00	502.136.473,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.388.000,00	150.197.043,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.600.000,00	349.939.430,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.859.450,00	340.447.950,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.480.000,00	82.806.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.420.000,00	30.420.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.966.000,00	217.228.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.993.450,00	9.993.450,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.119.831.000,00	2.019.142.932,00	200.000.000,00	197.000.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.119.831.000,00	2.019.142.932,00	200.000.000,00	197.000.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	11.280.000,00	11.162.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	86.000.000,00	83.279.367,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	314.600.000,00	308.361.280,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	205.700.000,00	202.672.259,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	108.505.000,00	105.465.012,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	57.248.000,00	56.426.910,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.030.000,00	28.030.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	446.799.000,00	422.675.334,00	200.000.000,00	197.000.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	109.818.000,00	104.196.856,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	19.250.000,00	18.850.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	444.771.000,00	398.103.807,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	162.130.000,00	158.335.212,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	110.700.000,00	106.592.895,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15.000.000,00	14.992.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03			KEPEGAWAIAN	14.814.443.386,00	13.203.636.158,00	134.534.064,00	134.529.960,00	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian Daerah	14.814.443.386,00	13.203.636.158,00	134.534.064,00	134.529.960,00	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.638.074.436,00	7.628.694.995,00	134.534.064,00	134.529.960,00	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.465.000,00	32.381.900,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.465.000,00	32.381.900,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.106.075.000,00	6.228.907.144,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.106.075.000,00	6.228.907.144,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.602.000,00	91.252.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	93.602.000,00	91.252.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.835.190,00	575.714.785,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.994.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.843.150,00	160.099.544,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.751.540,00	25.749.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.060.000,00	13.550.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.767.500,00	2.519.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.413.000,00	358.802.741,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	134.534.064,00	134.529.960,00	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	134.534.064,00	134.529.960,00	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.772.000,00	299.536.716,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.178.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.060.000,00	165.446.216,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.212.000,00	131.912.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.325.246,00	400.901.950,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.706.246,00	132.812.950,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	32.070.000,00	32.070.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.440.000,00	133.255.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.109.000,00	102.764.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.176.368.950,00	5.574.941.163,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.873.879.300,00	1.735.291.065,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	263.365.000,00	239.319.629,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.075.872.000,00	1.005.646.418,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	185.408.500,00	158.350.416,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	131.600.000,00	127.814.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	101.467.800,00	90.870.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	116.066.000,00	113.289.602,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	974.157.000,00	923.297.702,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	88.779.600,00	88.135.668,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200.157.000,00	184.190.109,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	685.220.400,00	650.971.925,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	2.403.837.700,00	2.196.997.519,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	325.678.400,00	283.882.840,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	295.000.000,00	286.682.044,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	354.309.500,00	306.413.665,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.325.755.200,00	1.243.815.910,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	61.041.900,00	47.619.460,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	42.052.700,00	28.583.600,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	924.494.950,00	719.354.877,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	259.851.600,00	226.969.687,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	244.349.150,00	189.448.986,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	26.075.000,00	6.840.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	336.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	333.990.000,00	259.686.704,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	51.735.200,00	33.806.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	6.958.000,00	2.602.500,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.427.200.000,00	1.226.453.170,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.427.200.000,00	1.226.453.170,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.427.200.000,00	1.226.453.170,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	670.000.000,00	624.409.800,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	670.000.000,00	624.409.800,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	757.200.000,00	602.043.370,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	144.000.000,00	124.225.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	250.000.000,00	198.937.900,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	48.200.000,00	19.436.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	315.000.000,00	259.443.470,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.807.998.775,00	12.778.433.220,00	1.359.464.225,00	1.263.232.650,00	-	-	-	-
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	13.807.998.775,00	12.778.433.220,00	1.359.464.225,00	1.263.232.650,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	13.807.998.775,00	12.778.433.220,00	1.359.464.225,00	1.263.232.650,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.156.370.540,00	10.544.536.897,00	1.359.464.225,00	1.263.232.650,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.000.000,00	26.311.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	8.488.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	1.385.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	4.328.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000,00	3.182.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.000.000,00	1.541.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	5.766.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	1.621.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.524.211.250,00	7.309.269.912,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.517.463.000,00	7.305.389.380,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.831.250,00	1.089.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.917.000,00	2.791.532,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	636.583.340,00	429.746.476,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	280.333.500,00	115.830.448,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	356.249.840,00	313.916.028,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	960.375.000,00	912.605.876,00	10.625.000,00	10.300.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	34.862.590,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	351.250.000,00	348.604.866,00	4.750.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94.125.000,00	73.865.600,00	5.875.000,00	5.800.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.500.000,00	10.890.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	432.382.820,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.500.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.300.000,00	204.272.875,00	1.318.410.225,00	1.222.842.650,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	592.807.000,00	531.030.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	161.253.225,00	159.125.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.300.000,00	204.272.875,00	564.350.000,00	532.687.650,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.091.000,00	307.804.945,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	12.124.266,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.000.000,00	128.621.094,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.780.000,00	72.926.100,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.311.000,00	94.133.485,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.363.809.950,00	1.354.525.813,00	30.429.000,00	30.090.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.000.000,00	303.494.183,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.840.000,00	11.368.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.970.000,00	174.165.100,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	865.999.950,00	865.498.530,00	30.429.000,00	30.090.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.599.156.235,00	1.327.609.824,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.380.976.235,00	1.129.538.405,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	157.238.585,00	151.214.930,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	102.712.500,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	35.000.000,00	31.971.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	171.250.000,00	146.334.472,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	348.477.600,00	176.525.388,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	420.000.000,00	399.849.329,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	129.010.050,00	120.930.786,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	218.180.000,00	198.071.419,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	49.992.000,00	39.819.426,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	168.188.000,00	158.251.993,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.052.472.000,00	906.286.499,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	161.952.000,00	131.730.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	161.952.000,00	131.730.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	890.520.000,00	774.556.499,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	250.000.000,00	187.961.904,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	289.370.000,00	261.107.395,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	150.150.000,00	127.786.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	201.000.000,00	197.701.200,00	-	-	-	-	-	-
7			UNSUR KEWILAYAHAN	64.277.607.459,00	60.072.932.158,00	835.896.687,00	824.847.700,00	-	-	-	-
7.01			KECAMATAN	64.277.607.459,00	60.072.932.158,00	835.896.687,00	824.847.700,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Moga	2.745.780.135,00	2.468.861.095,00	45.388.865,00	45.386.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.423.704.885,00	2.147.786.095,00	45.388.865,00	45.386.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.174.000,00	14.174.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.524.500,00	5.524.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	554.500,00	554.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.054.000,00	1.054.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.337.500,00	1.337.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	837.500,00	837.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	619.000,00	619.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.247.000,00	4.247.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.939.056.000,00	1.668.512.095,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.936.169.000,00	1.665.625.095,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	360.750,00	360.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.526.250,00	2.526.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.048.500,00	133.008.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.007.000,00	10.007.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.006.500,00	3.006.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.671.000,00	75.671.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.984.000,00	6.984.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.780.000,00	33.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	285,00	-	45.388.865,00	45.386.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	285,00	-	45.388.865,00	45.386.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.314.000,00	203.979.828,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.870.000,00	7.870.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.500.000,00	20.165.828,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.944.000,00	175.944.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.112.100,00	128.111.672,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.870.000,00	72.869.572,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.641.000,00	10.641.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.663.100,00	29.663.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.938.000,00	14.938.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.957.500,00	19.957.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.037.000,00	8.037.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.037.000,00	8.037.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.995.500,00	6.995.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.638.500,00	3.638.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.357.000,00	3.357.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.925.000,00	4.925.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.902.500,00	2.902.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.022.500,00	2.022.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.550.750,00	72.550.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.550.750,00	72.550.750,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	35.524.500,00	35.524.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.026.250,00	37.026.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	163.016.000,00	163.015.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	163.016.000,00	163.015.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85.518.500,00	85.518.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	63.448.500,00	63.448.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.482.500,00	1.482.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.566.500,00	12.566.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.551.000,00	65.551.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.551.000,00	65.551.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.754.500,00	3.754.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.871.250,00	10.871.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.808.000,00	4.808.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.069.000,00	6.069.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20.397.000,00	20.397.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6.431.500,00	6.431.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.790.500,00	2.790.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.223.250,00	5.223.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.206.000,00	1.206.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Pulosari	2.984.399.000,00	2.782.870.595,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.634.273.500,00	2.438.524.095,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.810.500,00	44.778.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.561.500,00	21.529.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.504.000,00	3.504.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.914.000,00	2.914.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.021.500,00	2.021.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.974.500,00	1.974.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.710.500,00	5.710.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.124.500,00	7.124.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.139.522.000,00	1.947.623.061,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.399.000,00	1.937.500.061,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.248.000,00	2.248.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.194.500,00	7.194.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	680.500,00	680.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.671.600,00	149.305.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.315.000,00	9.315.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.989.600,00	88.933.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.337.000,00	16.216.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.410.000,00	33.220.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.636.000,00	156.860.334,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.940.000,00	26.382.337,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.696.000,00	117.477.997,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.633.400,00	139.957.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.800.400,00	93.124.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.580.000,00	13.580.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.253.000,00	8.253.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.652.000,00	9.652.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.016.000,00	4.016.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.016.000,00	4.016.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.636.000,00	5.636.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.716.000,00	2.716.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.137.000,00	67.137.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.037.000,00	43.037.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	32.910.000,00	32.910.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.127.000,00	10.127.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24.100.000,00	24.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	10.115.000,00	10.115.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	13.985.000,00	13.985.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.678.000,00	32.278.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.678.000,00	32.278.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.678.000,00	23.278.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	145.265.000,00	145.230.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	145.265.000,00	145.230.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	136.115.000,00	136.080.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	93.393.500,00	90.049.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	93.393.500,00	90.049.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.648.000,00	6.648.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.551.000,00	2.551.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.951.000,00	45.607.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.157.000,00	2.157.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.595.000,00	5.595.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7.019.500,00	7.019.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.769.000,00	4.769.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.145.000,00	8.145.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Belik	2.882.548.000,00	2.711.870.888,00	12.000.000,00	11.475.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.620.576.850,00	2.450.041.888,00	12.000.000,00	11.475.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.291.000,00	13.149.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.271.000,00	3.271.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.751.000,00	1.721.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.751.000,00	1.695.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.852.000,00	1.796.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.773.000,00	1.773.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.607.000,00	1.607.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.286.000,00	1.286.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.050.084.000,00	1.885.991.498,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.039.548.000,00	1.875.455.498,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.241.000,00	1.241.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.372.000,00	2.372.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.023.000,00	1.023.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.782.000,00	4.782.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.480.000,00	1.480.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.442.000,00	1.442.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.146.850,00	234.961.850,00	12.000.000,00	11.475.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600.000,00	600.000,00	12.000.000,00	11.475.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.233.200,00	2.233.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.248.650,00	149.208.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.825.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.590.000,00	77.830.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.617.000,00	199.148.840,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.999.000,00	39.971.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.760.000,00	17.643.840,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.858.000,00	141.534.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.256.000,00	108.608.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.566.000,00	19.333.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	14.920.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.690.000,00	74.355.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.022.000,00	21.938.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.680.000,00	11.644.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.680.000,00	11.644.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.408.000,00	5.408.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.512.000,00	1.512.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.096.000,00	2.096.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.934.000,00	4.886.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.780.000,00	3.732.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.154.000,00	1.154.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	76.106.650,00	76.092.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.606.000,00	42.601.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.022.000,00	14.017.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20.802.000,00	20.802.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.782.000,00	7.782.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	33.500.650,00	33.491.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	33.500.650,00	33.491.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.818.000,00	12.818.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.712.000,00	6.712.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.712.000,00	6.712.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.106.000,00	6.106.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.106.000,00	6.106.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.625.000,00	40.625.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.625.000,00	40.625.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.125.000,00	35.125.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	110.399.500,00	110.356.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	110.399.500,00	110.356.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14.666.000,00	14.636.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.496.000,00	17.482.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.468.000,00	17.468.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12.740.000,00	12.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.659.500,00	4.659.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14.170.000,00	14.170.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.256.000,00	9.256.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.732.000,00	13.732.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.212.000,00	6.212.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Watukumpul	2.942.496.000,00	2.581.231.934,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.481.357.500,00	2.154.913.415,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.200.000,00	23.156.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.488.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.468.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.040.496.000,00	1.737.062.318,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.037.496.000,00	1.734.062.318,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.282.000,00	90.056.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.149.000,00	8.076.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.489.000,00	21.401.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.306.000,00	6.306.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.338.000,00	54.272.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.997.500,00	197.995.097,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.500.000,00	19.836.521,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.315.500,00	6.515.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.182.000,00	165.643.576,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.382.000,00	106.644.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.480.000,00	30.743.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.830.000,00	15.829.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.572.000,00	52.572.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.000.000,00	46.264.019,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	9.943.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	9.943.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	31.000.000,00	23.157.469,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	11.000.000,00	4.009.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	9.735.999,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	9.411.570,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.000.000,00	13.163.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.000.000,00	6.913.550,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.000.000,00	6.250.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.500.000,00	77.557.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.500.000,00	77.557.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	38.500.000,00	38.405.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	39.152.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000,00	39.177.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	19.950.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	19.950.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00	19.227.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.000.000,00	19.227.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.832.000,00	80.731.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.832.000,00	80.731.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60.832.000,00	60.731.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	200.806.500,00	182.588.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	200.806.500,00	182.588.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	23.514.500,00	23.314.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.482.000,00	20.482.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45.800.000,00	33.985.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25.310.000,00	19.242.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.000.000,00	13.939.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.000.000,00	19.925.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Bodeh	3.237.056.000,00	3.088.694.899,00	81.000.000,00	80.880.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.131.282.000,00	2.982.920.899,00	81.000.000,00	80.880.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.413.056.000,00	2.268.074.899,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.413.056.000,00	2.268.074.899,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.556.000,00	283.287.500,00	81.000.000,00	80.880.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.761.000,00	10.761.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.500.000,00	137.269.500,00	81.000.000,00	80.880.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.295.000,00	27.287.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.300.000,00	101.270.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.238.000,00	23.238.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.238.000,00	23.238.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.832.000,00	246.911.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.550.000,00	76.985.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.282.000,00	166.925.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.600.000,00	153.409.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.880.000,00	43.689.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.720.000,00	49.720.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.800.000,00	45.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.800.000,00	45.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.074.000,00	41.074.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.074.000,00	41.074.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	38.074.000,00	38.074.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Bantarbolang	2.983.578.592,00	2.863.938.942,00	70.642.408,00	70.573.800,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.865.118.260,00	2.745.929.942,00	70.642.408,00	70.573.800,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.722.000,00	3.122.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	541.000,00	441.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	538.000,00	438.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	532.000,00	432.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	532.000,00	532.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	532.000,00	432.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	532.000,00	432.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	515.000,00	415.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.150.680.500,00	2.037.542.692,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.149.221.000,00	2.036.383.192,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	483.000,00	383.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	528.500,00	428.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	448.000,00	348.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.500,00	1.000.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	483.500,00	483.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	517.000,00	517.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	590.000,00	590.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	590.000,00	590.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.601.200,00	283.801.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.550.000,00	41.550.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.410.000,00	39.310.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.878.700,00	10.778.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.762.500,00	106.762.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.300.000,00	78.700.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	70.642.408,00	70.573.800,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	49.988.500,00	49.938.900,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	20.653.908,00	20.634.900,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.168.000,00	266.949.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.500.000,00	27.281.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.668.000,00	220.668.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.766.060,00	152.334.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.600.000,00	35.306.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	31.080.000,00	31.080.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.726.000,00	28.726.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.760.060,00	35.621.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.207.332,00	2.206.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	433.000,00	433.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	433.000,00	433.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.236.000,00	1.236.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	412.000,00	412.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	412.000,00	412.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	412.000,00	412.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	538.332,00	537.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	538.332,00	537.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.103.000,00	29.103.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.003.000,00	25.003.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21.803.000,00	21.803.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.150.000,00	66.150.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	66.150.000,00	66.150.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60.300.000,00	60.300.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	4.550.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	4.550.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	400.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.000.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Randudongkal	3.161.733.000,00	3.018.740.156,00	32.350.000,00	32.323.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.889.500.500,00	2.746.509.606,00	32.350.000,00	32.323.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.262.000,00	32.262.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.157.000,00	5.157.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.010.000,00	6.010.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.095.000,00	6.095.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.307.389.000,00	2.164.863.923,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.289.083.000,00	2.146.557.923,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.206.000,00	7.206.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.136.000,00	6.136.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.136.000,00	3.136.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.044.000,00	152.043.934,00	19.350.000,00	19.336.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	19.350.000,00	19.336.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.605.000,00	76.604.934,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.041.000,00	10.041.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.122.000,00	46.122.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.476.000,00	4.476.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	13.000.000,00	12.987.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	13.000.000,00	12.987.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.069.500,00	216.639.299,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.150.000,00	23.149.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.899.500,00	39.708.199,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.020.000,00	153.781.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.600.000,00	168.564.450,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.050.000,00	26.050.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.150.000,00	11.150.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.400.000,00	116.364.450,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.844.000,00	48.842.050,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.942.000,00	11.942.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.942.000,00	11.942.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.650.500,00	18.649.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.000.000,00	2.998.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.650.500,00	12.650.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.251.500,00	18.250.850,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.010.000,00	8.009.350,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.241.500,00	4.241.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74.752.500,00	74.752.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74.752.500,00	74.752.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	34.652.500,00	34.652.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.100.000,00	40.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.510.000,00	23.510.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.510.000,00	10.510.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.510.000,00	10.510.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.335.000,00	47.335.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	47.335.000,00	47.335.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.635.000,00	21.635.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.200.000,00	15.200.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	77.791.000,00	77.791.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.791.000,00	77.791.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.560.000,00	8.560.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.252.000,00	9.252.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.780.000,00	6.780.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.139.000,00	8.139.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.060.000,00	8.060.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kecamatan Pemalang	12.840.811.010,00	12.104.725.642,00	84.922.540,00	82.500.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.274.984.510,00	11.542.460.142,00	84.922.540,00	82.500.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.022.500,00	22.972.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.070.000,00	4.070.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.977.000,00	1.952.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.420.000,00	2.420.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.264.000,00	2.239.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.127.000,00	2.127.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.155.500,00	4.155.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.009.000,00	6.009.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.628.474.000,00	10.909.711.394,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.626.864.000,00	10.908.101.394,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.024.000,00	27.024.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.024.000,00	27.024.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.148.010,00	190.124.092,00	9.950.000,00	9.860.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.750.000,00	4.749.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	9.950.000,00	9.860.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.879.010,00	142.856.092,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.399.000,00	12.399.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.020.000,00	4.020.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.100.000,00	26.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	74.972.540,00	72.640.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	33.815.000,00	31.800.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	33.657.540,00	33.340.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.954.000,00	271.719.316,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.680.000,00	28.077.644,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.074.000,00	240.441.672,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.362.000,00	120.909.340,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.050.000,00	27.937.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	4.742.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.190.000,00	13.114.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.122.000,00	75.116.340,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.875.000,00	24.804.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.000.000,00	6.990.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.000.000,00	6.990.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.275.000,00	4.275.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.275.000,00	4.275.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.600.000,00	13.539.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	13.600.000,00	13.539.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	368.014.500,00	366.984.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	368.014.500,00	366.984.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	32.880.000,00	31.880.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	335.134.500,00	335.104.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.075.000,00	22.065.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.075.000,00	22.065.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.075.000,00	22.065.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.572.000,00	88.467.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	88.572.000,00	88.467.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	77.732.000,00	77.707.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.840.000,00	10.760.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.290.000,00	59.945.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.290.000,00	59.945.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.175.000,00	6.160.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.450.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36.475.000,00	36.465.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.460.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.680.000,00	6.680.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	4.990.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001		Kelurahan Kebondalem	598.360.896,00	592.957.960,00	11.723.875,00	11.723.875,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	261.118.625,00	260.004.670,00	11.723.875,00	11.723.875,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.249.731,00	69.059.000,00	4.723.875,00	4.723.875,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.238.500,00	5.202.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	4.723.875,00	4.723.875,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.805.731,00	51.690.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.705.500,00	9.666.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.432.000,00	128.809.225,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.460.000,00	23.284.225,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.972.000,00	105.525.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.436.894,00	62.136.445,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.361.750,00	17.061.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.640.000,00	14.640.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.435.144,00	30.434.695,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.546.000,00	12.473.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.546.000,00	12.473.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.546.000,00	12.473.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	218.116.271,00	216.699.790,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	218.116.271,00	216.699.790,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.013.125,00	11.510.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	80.062.140,00	80.062.140,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126.041.006,00	125.127.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.580.000,00	103.780.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.580.000,00	103.780.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0001	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	106.580.000,00	103.780.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002		Kelurahan Pelutan	650.529.250,00	633.774.400,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	301.409.250,00	286.774.400,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.100.250,00	152.156.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.665.500,00	2.665.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.973.750,00	55.825.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.121.000,00	6.115.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.290.000,00	83.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.064.000,00	97.776.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.840.000,00	3.140.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.880.000,00	12.314.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.344.000,00	82.322.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.245.000,00	36.841.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.870.000,00	4.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000,00	7.297.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.765.000,00	22.944.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000,00	11.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.000.000,00	11.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.000.000,00	11.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	209.500.000,00	208.690.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	209.500.000,00	208.690.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.500.000,00	9.370.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	78.251.000,00	78.251.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	121.749.000,00	121.069.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.520.000,00	14.410.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.520.000,00	14.410.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.520.000,00	14.410.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	113.100.000,00	112.150.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	113.100.000,00	112.150.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0002	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	113.100.000,00	112.150.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003		Kelurahan Paduraksa	551.885.375,00	550.360.044,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.875.375,00	170.553.060,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.984.375,00	60.963.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.307.000,00	4.307.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.112.875,00	49.092.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.564.500,00	7.564.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.996.000,00	90.009.160,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.180.000,00	14.481.202,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.816.000,00	75.527.958,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.895.000,00	19.580.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.850.000,00	1.582.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.045.000,00	17.998.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.184.000,00	41.181.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	41.184.000,00	41.181.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.184.000,00	41.181.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	206.870.000,00	206.669.984,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	206.870.000,00	206.669.984,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.870.000,00	6.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	133.000.000,00	132.869.984,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.956.000,00	7.956.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.956.000,00	7.956.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.956.000,00	7.956.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124.000.000,00	124.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	124.000.000,00	124.000.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0003	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	124.000.000,00	124.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004		Kelurahan Sugihwaras	594.173.175,00	547.537.010,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	233.801.175,00	213.069.262,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.181.175,00	57.728.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	6.498.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.378.175,00	44.003.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.193.000,00	3.177.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.110.000,00	4.050.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.920.000,00	125.689.862,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.612.000,00	17.730.506,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.308.000,00	106.959.356,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.700.000,00	29.650.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.050.000,00	4.721.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.250.000,00	5.529.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.400.000,00	19.399.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.600.000,00	19.552.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.600.000,00	19.552.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.600.000,00	19.552.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	218.697.000,00	211.015.748,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	218.697.000,00	211.015.748,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.529.000,00	11.529.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	82.380.000,00	82.036.748,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124.788.000,00	117.450.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	122.075.000,00	103.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	122.075.000,00	103.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0004	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	122.075.000,00	103.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005		Kelurahan Mulyoharjo	577.730.170,00	576.163.881,00	114.997.980,00	114.807.980,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.978.150,00	304.723.888,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.486.000,00	108.161.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.285.000,00	1.960.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.001.000,00	78.001.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.676.000,00	178.815.388,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.554.000,00	30.047.409,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.702.000,00	147.347.979,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.816.150,00	17.747.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.458,00	682.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.065.692,00	17.065.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	169.352.020,00	169.039.993,00	114.997.980,00	114.807.980,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	169.352.020,00	169.039.993,00	114.997.980,00	114.807.980,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.350.000,00	9.350.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	114.997.980,00	114.807.980,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.002.020,00	159.689.993,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.400.000,00	102.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.400.000,00	102.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0005	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	102.400.000,00	102.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006		Kelurahan Bojongbata	472.873.625,00	471.154.983,00	122.703.050,00	122.134.845,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	225.637.000,00	223.955.231,00	28.203.050,00	27.635.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.051.000,00	81.672.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.254.000,00	6.254.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.895.000,00	8.895.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.182.500,00	42.807.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.239.500,00	7.235.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.480.000,00	16.480.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	28.203.050,00	27.635.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	28.203.050,00	27.635.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.586.000,00	142.283.231,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.226.000,00	15.923.231,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.360.000,00	126.360.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.236.625,00	122.199.752,00	94.500.000,00	94.499.845,00	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	122.236.625,00	122.199.752,00	94.500.000,00	94.499.845,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.750.000,00	9.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	24.570.000,00	24.569.253,00	94.500.000,00	94.499.845,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.916.625,00	87.880.499,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0006	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007		Kelurahan Widuri	551.968.200,00	524.888.909,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	219.768.200,00	207.359.616,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.352.200,00	80.585.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.234.200,00	53.422.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.878.000,00	2.528.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.300.000,00	20.695.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.766.000,00	120.234.116,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	13.982.764,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.266.000,00	105.751.352,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.650.000,00	6.540.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.600.000,00	1.290.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.050.000,00	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	207.625.000,00	193.704.293,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	207.625.000,00	193.704.293,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.625.000,00	7.550.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	81.000.000,00	80.613.293,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119.000.000,00	105.541.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124.575.000,00	123.825.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	124.575.000,00	123.825.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0007	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	124.575.000,00	123.825.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan Taman	5.790.780.000,00	5.332.768.536,00	28.300.000,00	28.300.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.677.280.000,00	5.219.268.536,00	28.300.000,00	28.300.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.944.080.000,00	4.486.916.048,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.934.080.000,00	4.476.916.048,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.506.800,00	262.506.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.075.500,00	14.075.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.795.000,00	72.794.950,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.636.300,00	5.636.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	28.300.000,00	28.300.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	28.300.000,00	28.300.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.548.000,00	299.819.238,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.560.000,00	15.560.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.520.000,00	49.791.373,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.468.000,00	234.467.865,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.145.200,00	121.026.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.208.000,00	21.090.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.000,00	33.500.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.437.200,00	66.436.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001		Kelurahan Wanarejan Selatan	630.000.000,00	619.659.408,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	270.069.500,00	264.589.277,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.999.814,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.999.814,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.641.500,00	56.366.840,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.955.000,00	1.804.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.999.577,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.320.000,00	31.311.798,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.886.500,00	3.877.465,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.280.000,00	10.273.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.073.000,00	190.090.623,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.599.000,00	13.225.125,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.474.000,00	176.865.498,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.355.000,00	15.132.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.900.000,00	1.677.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.455.000,00	13.454.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	231.760.000,00	226.986.062,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.600.000,00	1.565.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.600.000,00	1.565.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	230.160.000,00	225.421.062,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.660.000,00	6.660.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	116.000.000,00	115.971.962,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107.500.000,00	102.789.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.800.000,00	22.799.069,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.800.000,00	22.799.069,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.800.000,00	22.799.069,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.370.500,00	105.285.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.370.500,00	105.285.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0001	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	105.370.500,00	105.285.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002		Kelurahan Beji	613.917.521,00	612.293.665,00	16.082.479,00	16.020.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	308.517.521,00	306.893.665,00	16.082.479,00	16.020.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.937.210,00	77.937.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.402.500,00	2.402.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.062.710,00	60.062.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.082.000,00	5.082.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	16.082.479,00	16.020.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	7.582.479,00	7.520.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.466.000,00	198.960.465,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.280.000,00	15.794.476,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.186.000,00	174.165.989,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.114.311,00	29.996.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000,00	583.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.240.000,00	5.240.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.174.311,00	19.172.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.130.000,00	5.130.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.200.000,00	102.200.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	92.670.000,00	92.670.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	105.400.000,00	105.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.400.000,00	105.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0002	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	105.400.000,00	105.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Petarukan	4.292.393.000,00	4.030.322.655,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.076.995.500,00	3.814.935.855,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000,00	27.976.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000,00	3.976.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.266.317.000,00	3.004.281.355,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.266.317.000,00	3.004.281.355,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.287.500,00	301.287.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.250.000,00	10.250.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	248.154.500,00	248.154.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.722.500,00	27.722.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.400.500,00	12.400.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.465.000,00	283.465.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.355.000,00	18.355.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.110.000,00	205.110.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.926.000,00	197.926.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.926.000,00	172.926.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.152.000,00	33.151.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.338.000,00	14.338.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.338.000,00	7.338.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.370.000,00	9.369.500,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.370.000,00	5.370.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000,00	3.999.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.444.000,00	9.444.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.384.000,00	4.384.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.060.000,00	5.060.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.408.000,00	50.408.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.408.000,00	50.408.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	45.908.000,00	45.908.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.123.000,00	40.123.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.123.000,00	40.123.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.123.000,00	40.123.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.048.000,00	63.038.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	63.048.000,00	63.038.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48.048.000,00	48.048.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	14.990.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.666.500,00	28.666.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.666.500,00	28.666.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.500.000,00	7.499.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.545.000,00	4.545.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.080.000,00	6.080.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.015.000,00	4.015.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.526.500,00	6.526.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001		Kelurahan Petarukan	808.964.000,00	804.288.360,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	223.324.000,00	220.665.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.587.000,00	41.587.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.785.000,00	1.785.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.619.500,00	2.619.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.580.000,00	29.580.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.452.500,00	3.452.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.007.000,00	176.887.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.819.500,00	3.819.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.250.000,00	8.230.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.937.500,00	164.837.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.730.000,00	2.191.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000,00	161.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000,00	2.030.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	485.040.000,00	483.022.860,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	485.040.000,00	483.022.860,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	338.215.000,00	336.203.860,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	146.825.000,00	146.819.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.600.000,00	100.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.600.000,00	100.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0001	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.600.000,00	100.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Ampelgading	3.034.132.000,00	2.844.553.147,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.868.132.000,00	2.678.553.147,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.201.132.000,00	2.015.713.147,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.198.632.000,00	2.013.213.147,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	950.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	950.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.225.000,00	238.725.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.375.000,00	2.375.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.555.000,00	2.555.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.640.000,00	133.640.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.055.000,00	42.055.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.960.000,00	40.460.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.850.000,00	198.840.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.168.000,00	22.457.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.182.000,00	159.883.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.975.000,00	213.324.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.150.000,00	99.499.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.670.000,00	36.670.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.655.000,00	59.655.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.500.000,00	47.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.500.000,00	47.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		Kecamatan Comal	4.520.420.480,00	4.082.552.722,00	102.082.490,00	97.147.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.217.830.480,00	3.779.962.722,00	102.082.490,00	97.147.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.222.100,00	30.221.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.221.000,00	5.221.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.754.800,00	3.754.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.719.600,00	3.719.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.262.000,00	3.262.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.287.300,00	4.287.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.089.300,00	6.089.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.888.100,00	3.888.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.683.026.150,00	3.250.400.272,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.672.853.000,00	3.240.227.522,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.180.750,00	4.180.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.992.400,00	5.992.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.511.230,00	189.507.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.399.000,00	4.399.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.800.730,00	141.800.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.503.500,00	5.503.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.308.000,00	31.305.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	102.082.490,00	97.147.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	38.106.000,00	36.380.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	28.231.740,00	25.040.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	35.744.750,00	35.727.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.263.000,00	178.050.050,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.144.000,00	30.432.450,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.319.000,00	142.817.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.808.000,00	127.783.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.774.000,00	40.786.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.840.000,00	15.840.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.694.000,00	48.659.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.998.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.890.000,00	17.890.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.390.000,00	5.390.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.390.000,00	5.390.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.235.000,00	73.235.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.235.000,00	73.235.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.735.000,00	8.735.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.500.000,00	30.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	103.600.000,00	103.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	98.600.000,00	98.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	98.600.000,00	98.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.865.000,00	79.865.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	79.865.000,00	79.865.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	53.865.000,00	53.865.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001		Kelurahan Purwoharjo	600.350.030,00	599.561.850,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	257.217.830,00	256.429.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.722.200,00	148.722.200,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.832.200,00	120.832.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.540.000,00	4.540.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.107.630,00	96.770.950,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000,00	16.349.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.157.630,00	73.971.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.388.000,00	10.936.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.468.000,00	8.016.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	343.132.200,00	343.132.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	343.132.200,00	343.132.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.948.200,00	12.948.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	230.184.000,00	230.184.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		Kecamatan Ulujami	3.301.451.000,00	2.798.023.120,00	33.815.000,00	32.254.600,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.035.702.000,00	2.532.289.120,00	33.815.000,00	32.254.600,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.364.000,00	17.362.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.343.000,00	4.341.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.021.000,00	3.021.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.437.266.000,00	1.938.993.271,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.430.266.000,00	1.931.993.271,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.406.098,00	126.403.006,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.011.098,00	98.010.006,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.895.000,00	4.893.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.000,00	465.000,00	33.815.000,00	32.254.600,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	465.000,00	465.000,00	33.815.000,00	32.254.600,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.338.322,00	146.224.548,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.010.000,00	15.010.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.756.322,00	48.805.160,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.572.000,00	82.409.388,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.862.580,00	294.840.545,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.963.080,00	105.085.045,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177.899.500,00	177.755.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.993.000,00	24.993.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.993.000,00	11.993.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.993.000,00	5.993.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.998.000,00	35.998.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.998.000,00	30.998.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	28.998.000,00	28.998.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	165.258.000,00	165.243.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	165.258.000,00	165.243.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	47.158.000,00	47.158.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	63.580.000,00	63.565.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.920.000,00	28.920.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		Kecamatan Warungpring	2.909.277.000,00	2.831.137.357,00	56.388.000,00	55.821.600,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.688.991.000,00	2.610.852.357,00	56.388.000,00	55.821.600,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.795.000,00	5.795.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.355.000,00	5.355.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.040.000,00	5.040.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.410.000,00	5.410.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.213.165.000,00	2.140.445.657,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.210.665.000,00	2.137.945.657,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.395.800,00	157.997.050,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.500.000,00	20.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.365.000,00	9.365.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.255.800,00	71.255.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.275.000,00	35.876.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	56.388.000,00	55.821.600,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	30.213.000,00	29.670.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	13.675.000,00	13.664.100,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	12.500.000,00	12.487.500,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.731.500,00	166.482.950,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.680.500,00	42.680.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.980.000,00	21.989.150,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.499.000,00	7.499.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.572.000,00	94.314.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.598.700,00	111.826.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.650.000,00	49.878.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.680.000,00	11.680.000,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.268.700,00	45.268.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.000.000,00	44.999.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	4.999.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	4.999.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.161.000,00	84.161.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	81.161.000,00	81.161.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.161.000,00	46.161.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.125.000,00	34.125.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.125.000,00	34.125.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.550.000,00	6.550.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.045.000,00	5.045.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.530.000,00	5.530.000,00	-	-	-	-	-	-
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	75.030.085.200,00	74.566.830.047,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	-	-
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	75.030.085.200,00	74.566.830.047,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.030.085.200,00	74.566.830.047,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.568.050.200,00	4.260.647.186,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.396.000,00	167.438.600,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000,00	22.946.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000,00	5.991.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000,00	5.999.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000,00	5.935.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000,00	3.993.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.396.000,00	33.334.600,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	89.240.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.910.004.000,00	2.655.848.389,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.898.004.000,00	2.643.848.389,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	429.750.000,00	429.750.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	419.750.000,00	419.750.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.821.200,00	228.818.246,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.600.000,00	7.599.616,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.000.000,00	31.997.630,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	49.999.800,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.221.200,00	116.221.200,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.349.000,00	585.086.570,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.199.000,00	64.936.570,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	522.150.000,00	520.150.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.230.000,00	182.205.381,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.230.000,00	141.205.381,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.176.200.000,00	1.174.784.887,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.176.200.000,00	1.174.784.887,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	437.695.000,00	437.586.850,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	333.505.000,00	332.699.650,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	405.000.000,00	404.498.387,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	68.175.035.000,00	68.073.884.674,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	68.175.035.000,00	68.073.884.674,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	67.915.035.000,00	67.814.216.374,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	260.000.000,00	259.668.300,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	560.000.000,00	509.274.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	560.000.000,00	509.274.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10.000.000,00	9.930.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	19.000.000,00	18.713.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	390.000.000,00	339.960.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	95.000.000,00	94.690.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	46.000.000,00	45.980.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	290.000.000,00	287.833.300,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	290.000.000,00	287.833.300,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80.000.000,00	78.455.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	180.000.000,00	179.378.300,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	260.800.000,00	260.406.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	260.800.000,00	260.406.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	187.000.000,00	186.715.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	63.800.000,00	63.691.000,00	-	-	-	-	-	-
			Jumlah	**2.367.480.276.291,00**	**2.175.975.811.563,83**	**192.492.047.709,00**	**180.988.417.949,00**	**1.972.500.000,00**	**1.266.502.459,00**	**439.461.644.000,00**	**439.333.244.000,00**

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO